



PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



RKPD

2025

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025**

bappeda.cilapkab.go.id

Jl. Kauman No. 28B

bappeda_clp

BAPPEDA 2024



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **18** TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Cilacap untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN;
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
BAB VII	PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

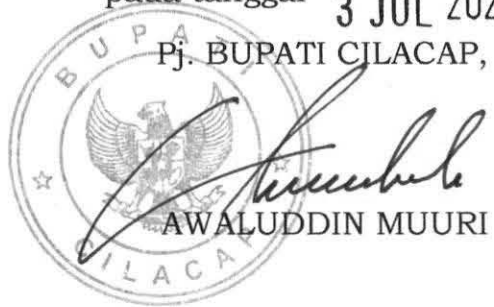
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 3 JUL 2024

Pj. BUPATI CILACAP,



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 03 JUL 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 18

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-24
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-51
2.1.4 Aspek Daya Saing	II-147
2.1.5 Riset dan Inovasi Daerah	II-156
2.2.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2023 dan Realisasi RPD.....	II-173
2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023	II-175
2.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-176
2.2.3. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-187
2.2.4. Urusan Pemerintahan Pilihan	II-204
2.2.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-211
2.2.6. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-213
2.2.7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-217
2.2.8. Unsur Kewilayahan.....	II-218
2.2.9. Unsur Pemerintahan Umum	II-219
2.3 Permasalahan Pembangunan	II-222
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-222
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-222

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-232
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-8
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-14
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-20
3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya.....	III-23
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-5
4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.....	IV-6
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025	IV-7
4.2.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cilacap.....	IV-8
4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-16
4.3 Pembangunan Kewilayahan	IV-32
4.4 Keselarasan dengan Kebijakan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045	IV-37
4.5 Inovasi Daerah	IV-39
4.5.1 Penelitian dan Pengkajian	IV-40
4.5.2 Pengembangan dan Penerapan.....	IV-42
4.5.3 Inovasi dan Inovasi.....	IV-44
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1 Pendanaan Daerah.....	V-1
5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	V-4
A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	V-5
B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	V-17
C. Urusan Pilihan.....	V-39
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	V-46
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V-47
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	V-53
G. Unsur Kewilayahan	V-53
H. Unsur Pemerintahan Umum.....	V-55

I. Non Urusan.....V-56

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1.Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025..... VI-1

6.2.Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 VI-2

6.3.Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 VI-8

6.4.Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 VI-14

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2022 II-3

Tabel 2. 2 Ketinggian Rata-Rata Kecamatan Kabupaten Cilacap II-4

Tabel 2. 3 Banyaknya Curah Hujan Terbesar dan Jumlah Hari Hujan Yang Tercatat Di Stasiun Meterologi Cilacap Tahun 2023 II-9

Tabel 2. 4 Luas Penggunaan Tanah/Lahan Tahun 2023..... II-10

Tabel 2. 5 Penetapan Kawasan Andalan II-12

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2019-2023 II-19

Tabel 2. 7 Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2019-2023 (jiwa) II-20

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019-2023 II-20

Tabel 2. 9 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2023..... II-22

Tabel 2. 10 Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019-2023..... II-22

Tabel 2. 11 Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023..... II-24

Tabel 2. 12 PDRB Kabupaten Cilacap Dengan Migas Tahun 2019-2023 . II-25

Tabel 2. 13 PDRB Kabupaten Cilacap Tanpa Migas Tahun 2019-2023 ... II-26

Tabel 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-26

Tabel 2. 15 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 Dengan Migas II-28

Tabel 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 Tanpa Migas (persen) II-29

Tabel 2. 17 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)..... II-30

Tabel 2. 18 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)..... II-30

Tabel 2. 19 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 (persen) II-31

Tabel 2. 20 PDRB Per kapita di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 ... II-31

Tabel 2. 21 Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Dirinci Per Bulan Tahun 2019-2023.....	II-32
Tabel 2. 22 Laju Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dirinci Menurut Bulan Tahun 2023 (persen)	II-33
Tabel 2. 23 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-36
Tabel 2. 24 Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penduduk Miskin Ekstrem di Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023	II-38
Tabel 2. 25 Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-47
Tabel 2. 26 Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-48
Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023	II-52
Tabel 2. 28 Perkembangan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-53
Tabel 2. 29 Perkembangan Pantauan Kejadian Penyakit di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-55
Tabel 2. 30 Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-57
Tabel 2. 31 Rasio Dokter di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2. 32 Rasio Tenaga Paramedis Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2. 33 Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2. 34 Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat JKN dan Jamkesda Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2. 35 Panjang Jalan di Kab. Cilacap Berdasarkan Kewenangan Tahun 2023.....	II-60
Tabel 2. 36 Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2019-2023 ...	II-61
Tabel 2. 37 Tipe Konstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2019-2023	II-61
Tabel 2. 38 Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten per Kecamatan Tahun 2023.....	II-62
Tabel 2. 39 Kondisi Jembatan Kewenangan Kabupaten Tahun 2019-2023	63
Tabel 2. 40 Kondisi Sarana Prasarana Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-64

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Indikator Sumber Daya Air Tahun 2019-202365

Tabel 2. 42 Kondisi Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-65

Tabel 2. 43 Kondisi Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-66

Tabel 2. 44 Jumlah Rumah di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-66

Tabel 2. 45 Perkembangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-67

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023 II-68

Tabel 2. 47 Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-68

Tabel 2. 48 Kawasan Kumuh di Kabupaten Cilacap Mendasarkan Kewenangannya..... II-69

Tabel 2. 49 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-69

Tabel 2. 50 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2019-2023 II-70

Tabel 2. 51 Kondisi Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-71

Tabel 2. 52 Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Tahun 2019-2023 II-71

Tabel 2. 53 Penyelesaian Pelanggaran Perda Kab. Cilacap Tahun 2019-2023 II-72

Tabel 2. 54 Penyelesaian Pelanggar Perda Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-72

Tabel 2. 55 Kondisi Konduktivitas Wilayah Tahun di Kabupaten Cilacap 2019-2023 II-74

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 II-75

Tabel 2. 57 Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-75

Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019-2023 II-76

Tabel 2. 59 Populasi dan Penanganan PMKS di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-76

Tabel 2. 60 Penguatan Kapasitas PMKS di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-77

Tabel 2. 61 Rasio Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2019-2023.....	II-77
Tabel 2. 62 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-79
Tabel 2. 63 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2. 64 Upah Minimum Kabupaten Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.....	II-80
Tabel 2. 65 Perkembangan Jumlah Pekerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2. 66 Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2. 67 Keterwakilan Perempuan yang menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2. 68 Persentase Perempuan Yang Bekerja atau Mempunyai Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2. 69 Rasio Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-83
Tabel 2. 70 Capaian Perlindungan Anak di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.....	II-83
Tabel 2. 71 Regulasi Pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 ...	II-84
Tabel 2. 72 Ketersediaan Pangan Utama, Energi dan Protein Tahun 2019-2023.....	II-84
Tabel 2. 73 Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2. 74 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-87
Tabel 2. 75 Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-87
Tabel 2. 76 Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Teregistrasi Tahun 2019-2022	II-87
Tabel 2. 77 Peredaran Jenis Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2. 78 Jumlah kecamatan rawan pangan transien (bencana) dan kronis (kemiskinan) di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019-2023.....	II-88
Tabel 2. 80 Capaian Program Reforma Agraria Tahun 2023	II-89

Tabel 2. 81 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-89

Tabel 2. 82 IKU, IKA dan IKTL Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023..... II-90

Tabel 2. 83 Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-91

Tabel 2. 84 Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-92

Tabel 2. 85 Tindak Lanjut Kasus Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023..... II-93

Tabel 2. 86 Ijin Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-94

Tabel 2. 87 Pendidikan Lingkungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-94

Tabel 2. 88 Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-95

Tabel 2. 89 Perkembangan Kepemilikan Akte Kelahiran Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023..... II-97

Tabel 2. 90 Perkawinan yang Dicatatkan di Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-97

Tabel 2. 91 Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Keluarga di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-98

Tabel 2. 92 Kinerja Penataan Desa di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-99

Tabel 2. 93 Kondisi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-101

Tabel 2. 94 Kondisi Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023..... II-102

Tabel 2. 95 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-103

Tabel 2. 96 Peserta KB Aktif di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.. II-103

Tabel 2. 97 TFR di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-103

Tabel 2. 98 Unmet Need KB Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023..... II-104

Tabel 2. 99 Persentase Tri Bina Aktif di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-104

Tabel 2. 100 Peran Masyarakat Program KB di Kab. Cilacap Tahun 2019-2023 II-105

Tabel 2. 101 Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-106
Tabel 2. 102 Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.....	II-107
Tabel 2. 103 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-107
Tabel 2. 104 Pelayanan Angkutan Darat di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.....	II-108
Tabel 2. 105 Kelayakan Kendaraan Umum di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.....	II-108
Tabel 2. 106 Panjang Lintasan Stasiun di Kabupaten Cilacap di Wilayah DAOP 5 Purwokerto berdasarkan bentang arah Timur ke Barat hingga ke Selatan	II-110
Tabel 2. 107 Stasiun di Kabupaten Cilacap di Wilayah DAOP 5 Purwokerto berdasarkan Kelas, Layanan dan Status	II-110
Tabel 2. 108 Fasilitas Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Kereta Api.....	II-111
Tabel 2. 109 Perlintasan Tidak Sebidang Kereta Api.....	II-112
Tabel 2. 110 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-112
Tabel 2. 111 Jumlah OPD Kabupaten Cilacap Memiliki Website dan yang Melakukan Update Data Pada Website Tahun 2019-2023	II-115
Tabel 2. 112 Kinerja Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-116
Tabel 2. 113 Capaian Kinerja Urusan Koperasi Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2. 114 Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2. 115 Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2019-2023	II-120
Tabel 2. 116 Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-121
Tabel 2. 117 Persentase Pemanfaatan Dokumen Statistik di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-122
Tabel 2. 118 Persentase Surat Yang Menggunakan Persandian Tahun 2019-2023.....	II-122
Tabel 2. 119 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-123
Tabel 2. 120 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2023	II-124

Tabel 2. 121 Kondisi Kearsipan Tahun 2019-2023 II-125

Tabel 2. 122 Kondisi Produksi Perikanan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-126

Tabel 2. 123 Kondisi Kelompok Nelayan dan Pembudidaya di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-126

Tabel 2. 124 Angka Konsumsi Ikan dan Produksi Garam Tahun 2019-2023 II-127

Tabel 2. 125 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2023 II-128

Tabel 2. 126 Produksi Tanaman Pangan Utama Tahun 2019-2023 II-131

Tabel 2. 127 Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-132

Tabel 2. 128 Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kab. Cilacap Tahun 2019-2023 II-133

Tabel 2. 129 Jumlah Populasi Ternak di Kab. Cilacap Tahun 2019-2023 II-134

Tabel 2. 130 Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-134

Tabel 2. 131 Angka Kesakitan Ternak di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-135

Tabel 2. 132 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019-2023 II-137

Tabel 2. 133 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019-2023 II-138

Tabel 2. 134 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 II-139

Tabel 2. 135 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 II-139

Tabel 2. 136 Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023 II-140

Tabel 2. 137 Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Tahun 2019-2023 II-142

Tabel 2. 138 Pengadaan CPNS di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-142

Tabel 2. 139 Tes Kompetensi Pejabat Struktural di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-143

Tabel 2. 140 Kenaikan Pangkat di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-143

Tabel 2. 141 Diklat Aparatur di Kab Cilacap Tahun 2019-2023 II-143

Tabel 2. 142 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2023 II-144

Tabel 2. 143 Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2019-2023 II-146

Tabel 2. 144 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Cilacap 2019-2023	II-147
Tabel 2. 145 Fasilitas Pelabuhan Udara Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2. 146 Banyaknya Penumpang Kereta Melalui PT KAI Cilacap Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2. 147 Jumlah Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-149
Tabel 2. 148 Rasio Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023.....	II-150
Tabel 2. 149 Banyaknya Kejadian Kriminalitas Menurut Jenis Kriminalitas Tahun 2019-2023	II-150
Tabel 2. 150 Lamanya Proses Perijinan di Kabupaten Cilacap.....	II-150
Tabel 2. 151 Jumlah Penerbitan Perijinan Tahun 2019-2023.....	II-154
Tabel 2. 152 Jumlah dan Macam Pajak Daerah Tahun 2019-2023	II-154
Tabel 2. 153 Jumlah Macam Retribusi Daerah Tahun 2019-2023.....	II-155
Tabel 2. 154 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2019-2023.....	II-155
Tabel 2. 155 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2. 156 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Cilacap.....	II-158
Tabel 2. 157 Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap	II-159
Tabel 2. 158 Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten Cilacap	II-166
Tabel 2. 159 Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap Tahun 2023	II-171
Tabel 2. 160 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023	II-174
Tabel 2. 161 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	II-175
Tabel 2. 162 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-176
Tabel 2. 163 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-178
Tabel 2. 164 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-181
Tabel 2. 165 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-183
Tabel 2. 166 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-184

Tabel 2. 167 Capaian Kinerja Urusan Sosial.....	II-186
Tabel 2. 168 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	II-187
Tabel 2. 169 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-188
Tabel 2. 170 Capaian Kinerja Urusan Pangan.....	II-189
Tabel 2. 171 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-190
Tabel 2. 172 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-191
Tabel 2. 173 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-192
Tabel 2. 174 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-194
Tabel 2. 175 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-195
Tabel 2. 176 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-196
Tabel 2. 177 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-197
Tabel 2. 178 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM	II-198
Tabel 2. 179 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	II-199
Tabel 2. 180 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-200
Tabel 2. 181 Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-201
Tabel 2. 182 Capaian Kinerja Urusan Persandian.....	II-201
Tabel 2. 183 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-202
Tabel 2. 184 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	II-203
Tabel 2. 185 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	II-203
Tabel 2. 186 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-204
Tabel 2. 187 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-205
Tabel 2. 188 Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-206
Tabel 2. 189 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	II-208
Tabel 2. 190 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-210
Tabel 2. 191 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	II-211
Tabel 2. 192 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	II-212
Tabel 2. 193 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan	II-213
Tabel 2. 194 Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	II-215
Tabel 2. 195 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian	II-216
Tabel 2. 196 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan	II-217
Tabel 2. 197 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan ...	II-217
Tabel 2. 198 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	II-218
Tabel 2. 199 Capaian Kinerja Kecamatan	II-219

Tabel 2. 200 Capaian Kinerja Urusan Kesbangpol.....	II-220
Tabel 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2024.....	III-6
Tabel 3. 2 Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	III-8
Tabel 3. 3 Realisasi/Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026	III-13
Tabel 3. 4 Pertumbuhan Belanja Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023	III-18
Tabel 3. 5 Realisasi/Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026	III-19
Tabel 3. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 – 2026.....	III-22
Tabel 3. 7 Realisasi Dana APBN di Kabupaten Cilacap Tahun 2023	III-23
Tabel 3. 8 Realisasi Pelaksanaan TJSPL/CSR Di Kabupaten Cilacap Tahun 2021 – 2023	III-26
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-3
Tabel 4. 2 Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025.....	IV-24
Tabel 4. 3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis (RPD) dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025.....	IV-29
Tabel 4. 4 Keselarasan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dengan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045	IV-37
Tabel 4. 5 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-38
Tabel 4. 6 Rencana Riset oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-40
Tabel 4. 7 Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-42
Tabel 4. 8 Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.....	IV-46
Tabel 5. 1 Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025	V-2
Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Belanja OPD Tahun 2025.....	V-3
Tabel 5. 3 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Cilacap	V-59
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap Tahun 2025	VI-1

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
..... VI-2

Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 VI-8

Tabel 6. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap Tahun 2025
..... VI-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 . I-4

Gambar 1. 2 Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya I-9

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap II-2

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Cilacap..... II-4

Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Cilacap II-8

Gambar 2. 4 Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Cilacap II-9

Gambar 2. 5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cilacap II-13

Gambar 2. 6 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cilacap II-17

Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana Tsunami dan Banjir Kabupaten Cilacap...
..... II-18

Gambar 2. 8 Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2023 II-21

Gambar 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023
..... II-27

Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%) II-27

Gambar 2. 11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten
Tetangga Tahun 2019-2023 II-28

Gambar 2. 12 Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2019-2023 (%)..... II-33

Gambar 2. 13 Indeks Gini Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2019-2023 II-34

Gambar 2. 14 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023..... II-35

Gambar 2. 15 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap dan
Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023 II-35

Gambar 2. 16 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Jawa
Tengah Tahun 2023 II-36

Gambar 2. 17 Garis Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.....
..... II-37

Gambar 2. 18 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023..... II-37

Gambar 2. 19 Persebaran Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten
Cilacap Tahun 2023 II-40

Gambar 2. 20 Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 II-41

Gambar 2. 21 Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten
Tetangga Tahun 2019-2023 II-41

Gambar 2. 22 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)..... II-42

Gambar 2. 23 Umur Harapan Hidup Kab. Cilacap dengan Kabupaten
Tetangga Tahun 2019-2023 (Tahun)..... II-42

Gambar 2. 24 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provisi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun) II-43

Gambar 2. 25 Harapan Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten
Tetangga Tahun 2019-2023 (Tahun)..... II-44

Gambar 2. 26 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun) II-44

Gambar 2. 27 Rata-rata Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten
Tetangga Tahun 2019-2023 (Tahun)..... II-45

Gambar 2. 28 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa
Tengah Serta Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah) II-45

Gambar 2. 29 Pengeluaran per Kapita Kab. Cilacap dengan Kabupaten
Tetangga Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah) II-46

Gambar 2. 30 Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2019-2023 II-47

Gambar 2. 31 Perkembangan IDG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2019-2023 II-48

Gambar 2. 32 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 II-49

Gambar 2. 33 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Cilacap dengan
Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023 II-49

Gambar 2. 34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 II-50

Gambar 2. 35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Cilacap dengan
Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023 II-50

Gambar 2. 36 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Cilacap II-62

Gambar 2. 37 Peta Daerah Rawan Pangan Kabupaten Cilacap II-85

Gambar 2. 38 Peta Jaringan Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Cilacap
..... II-106

Gambar 2. 39 Proposal Lomba Krenova Tahun 2012-2023 II-167

Gambar 2. 40 Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten
Tetangga Tahun 2023 II-169

Gambar 2. 41 Progres PDSD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 - 2023 II-170

Gambar 2. 42 Skor PDSD Barlingmascakeb tahun 2023 II-171

Gambar 4. 1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025 IV-31

Gambar 4. 2 Peta Pengembangan Kawasan dan Pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten Cilacap..... IV-35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
2. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
4. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resource availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan pada orientasi proses dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *top-down*, *bottom-up*, serta berdasarkan pada orientasi substansi dengan pendekatan secara holistik, integratif, tematik dan spasial.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sedangkan pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Selanjutnya pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

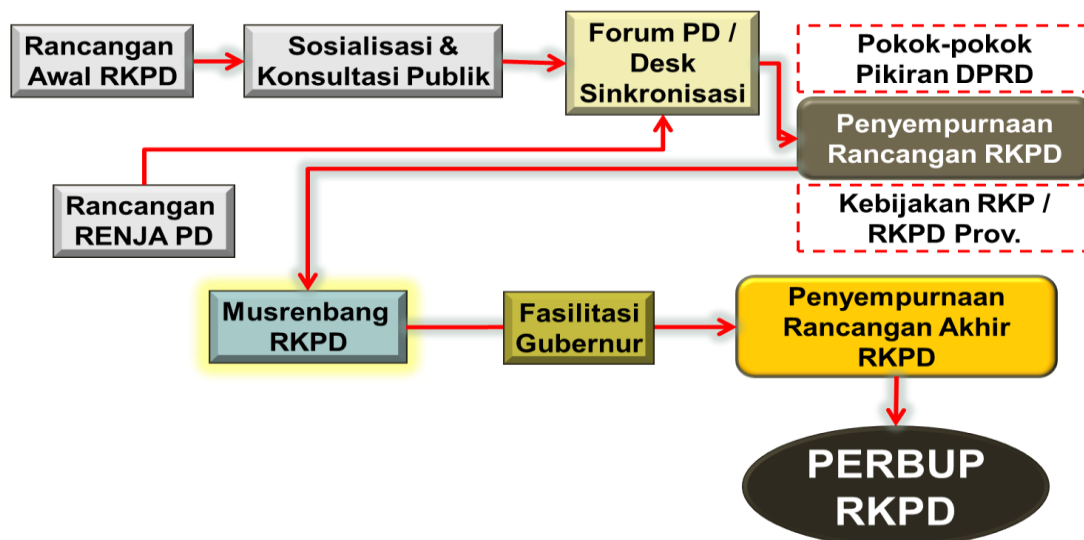
Proses penyusunan RKPD dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi mulai dari tahapan

persiapan, rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, Musrenbang, rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Selanjutnya dalam rangka menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan RKPD, maka dilakukan langkah-langkah penjaringan saran dan masukan dari stakeholder melalui Forum Konsultasi Publik. Di samping itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang berupa saran dan pendapat maupun hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat juga menjadi masukan dalam penyusunan RKPD yang diharmonisasi dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan, RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022. RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2017-2022 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap pada tahun 2022 mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Penyusunan RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176 SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 juga diselaraskan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama dari aspek keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

Dokumen RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, permasalahan pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan tata cara penyusunan RKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi : 1). penyusunan rancangan awal RKPD 2). sosialisasi dan konsultasi publik 3). forum PD untuk penyempurnaan penyusunan rancangan RKPD; 4). pelaksanaan Musrenbang RKPD; 5). fasilitasi oleh Gubernur yang akan digunakan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD dan; 6). penetapan RKPD. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1
Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan arah kebijakan Pembangunan Nasional serta mendasari dokumen perencanaan lainnya, yaitu evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
22. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 27).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di daerah. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan RPJPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, penyusunan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain : 1) *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Percepatan Penanganan Stunting; 4) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan; 5) Rencana Aksi

Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (RAD-TPB/SDG's); 6) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG); 7) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG); dan Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-ATS).

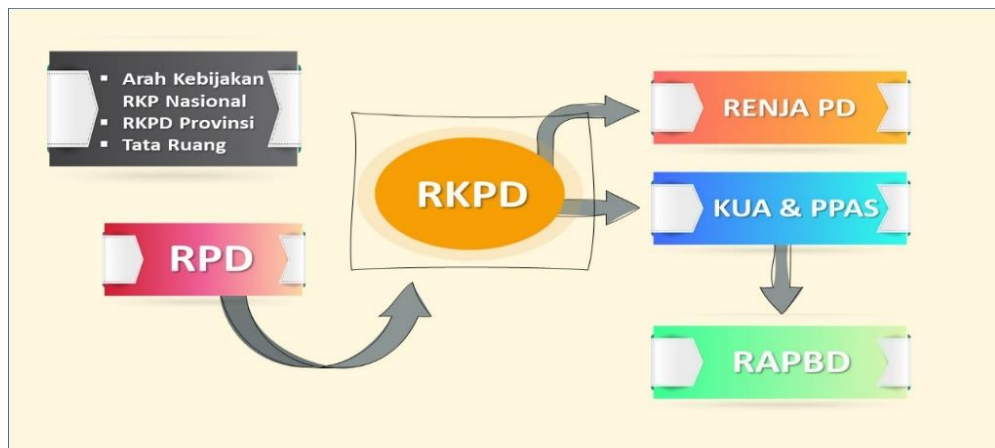
RKPD sebagai suatu produk perencanaan, tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dokumen perencanaan harus terintegrasi dengan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Beberapa dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain : RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan ke dalam arah pembangunan lima tahunan dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke dalam tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahunan dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan secara sinergis, berkesinambungan dalam satu kerangka perencanaan yang saling terkait dan terintegrasi.

Secara substansial, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang didasarkan pada evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dan hasil pengendalian tahun 2024. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka pencapaian tema pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2025. Adapun keterkaitan/hubungan RKPD Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi serta dokumen perencanaan Tata Ruang.
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPD yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Secara lengkap keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya disajikan dalam Gambar berikut :



Gambar 1.2
Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud disusunnya RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Sedangkan secara khusus penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025.
2. Mewujudkan harmonisasi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025.
3. Menjabarkan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran pembangunan dalam rangka mencapai target capaian kinerja tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2025.
2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2025.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
4. Menjamin konsistensi dan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jangka pendek dengan rencana pembangunan daerah.
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun lalu dan realisasi pelaksanaan RPD; permasalahan pembangunan daerah.
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan.
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

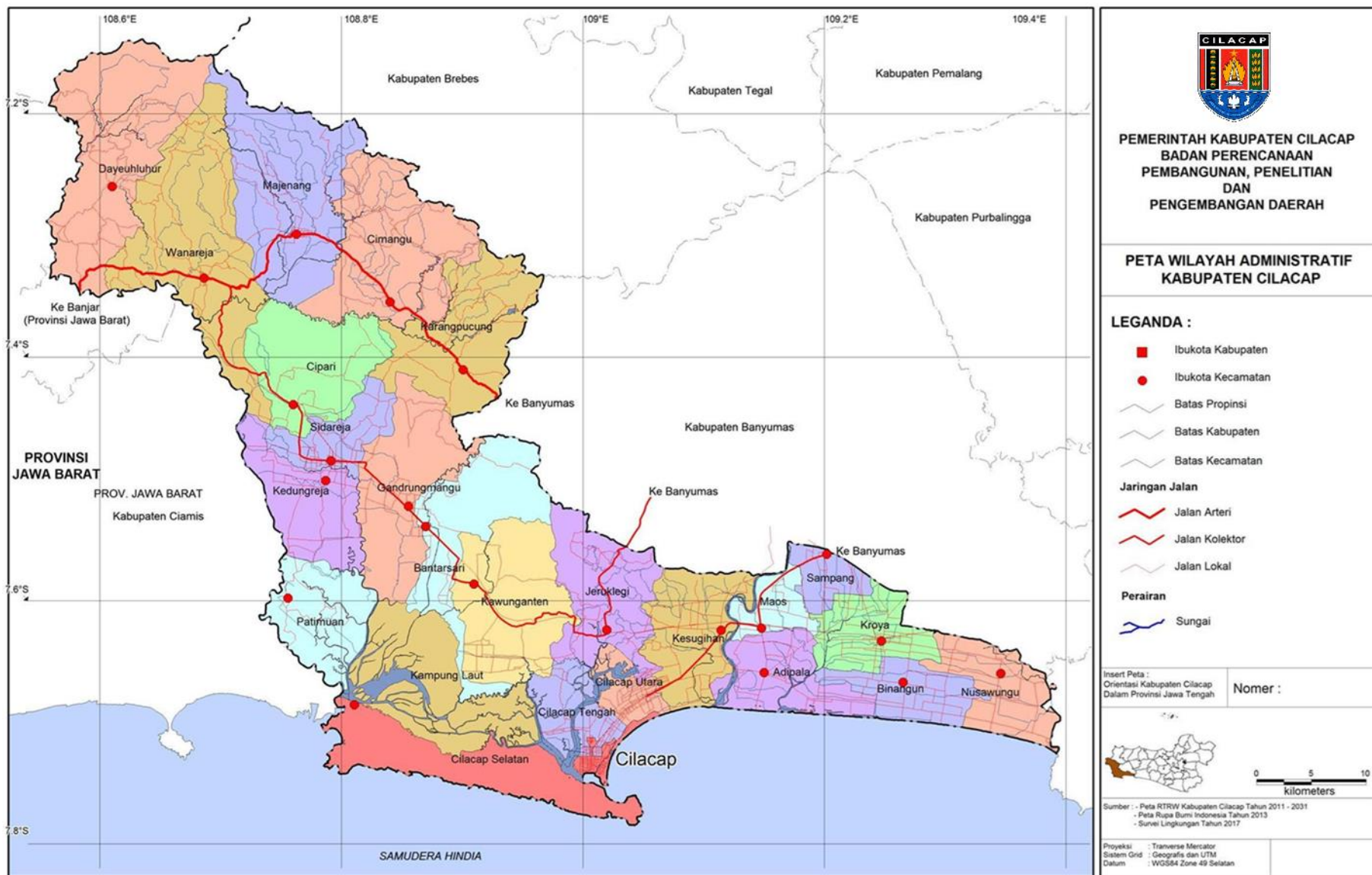
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.364,28 km² (termasuk Pulau Nusakambangan seluas 115,00 km²) atau sekitar 6,5 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administrasi Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat)
- Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen



Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap

Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Cilacap adalah Kecamatan Wanareja dengan luas mencapai 195,92 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sampang dengan luas 28,89 km². Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan, 269 Desa, 15 Kelurahan, 2.341 rukun warga (RW) dan 10.476 rukun tetangga (RT). Secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW
dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2022

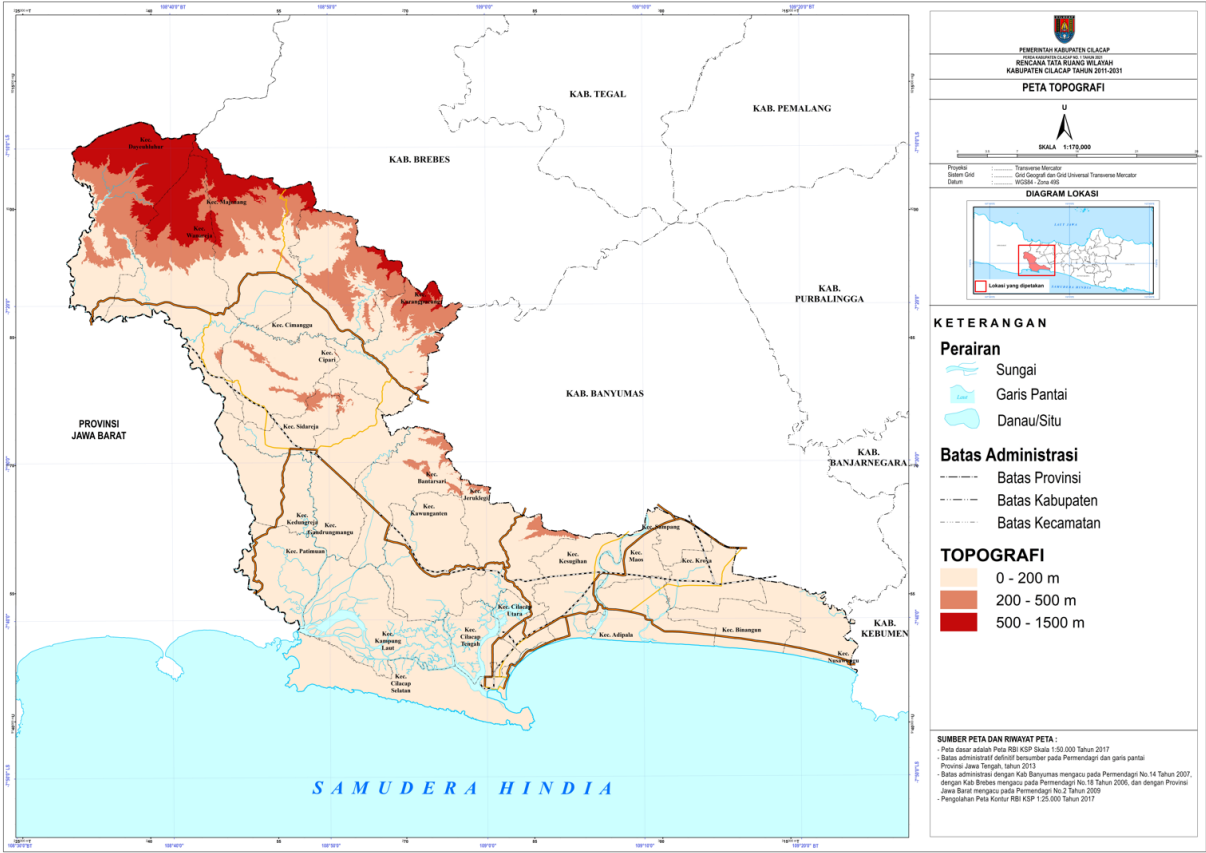
No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Dayeuhluhur	14	-	118	388	191,73
2.	Wanareja	16	-	182	669	195,92
3.	Majenang	17	-	172	786	167,60
4.	Cimanggu	15	-	107	446	163,35
5.	Karangpucung	14	-	111	414	124,74
6.	Cipari	11	-	78	357	107,53
7.	Sidareja	10	-	54	299	49,31
8.	Kedungreja	11	-	94	485	82,01
9.	Patimuan	7	-	80	322	78,68
10.	Gandrungmangu	14	-	89	585	119,26
11.	Bantarsari	8	-	67	411	99,49
12.	Kawunganten	12	-	80	469	138,09
13.	Kampung Laut	4	-	39	129	134,07
14.	Jeruklegi	13	-	86	459	99,41
15.	Kesugihan	16	-	156	689	89,10
16.	Adipala	16	-	112	495	74,65
17.	Maos	10	-	66	264	34,30
18.	Sampang	10	-	90	212	28,89
19.	Kroya	17	-	112	562	61,68
20.	Binangun	17	-	110	363	53,73
21.	Nusawungu	17	-	113	438	66,98
22.	Cilacap Selatan - Pulau Nusakambangan	-	5	73	451	8,04 115,00
23.	Cilacap Tengah	-	5	80	425	51,00
24.	Cilacap Utara	-	5	72	360	29,72
Jumlah		269	15	2.341	10.478	2.364,28

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2023

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Cilacap terletak diantara 108⁰4’30” – 109⁰30’30” (Garis Bujur Timur) serta 7⁰30’ - 7⁰45’20” (Garis Lintang Selatan). Kabupaten Cilacap secara geografis terdiri dari wilayah perbukitan, dataran rendah dan pesisir.

3) Topografi



Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap

Gambar 2. 2

Peta Topografi Kabupaten Cilacap

Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung laut dengan ketinggian rata-rata 1 meter dari permukaan laut.

Tabel 2. 2

Ketinggian Rata-Rata Kecamatan Kabupaten Cilacap

No	Kecamatan	Ketinggian Dari Permukaan Laut (m)	Di tempat tertentu
1	Dayeuhluhur	198	Dayeuhluhur
2	Wanareja	25	Wanareja
3	Majenang	23	Majenang
4	Cimanggu	40	Cimanggu
5	Karangpucung	50	Karangpucung
6	Cipari	50	Cipari
7	Sidareja	26	Sidareja
8	Kedungreja	45	Kedungreja
9	Patimuan	5	Patimuan
10	Gandrungmangu	15	Gandrungmangu
11	Bantarsari	8	Bantarsari
12	Kawunganten	56	Kawunganten
13	Kampung Laut	1	Kampung Laut
14	Jeruklegi	9	Jeruklegi
15	Kesugihan	8	Kesugihan
16	Adipala	8	Adipala
17	Maos	8	Maos

No	Kecamatan	Ketinggian Dari Permukaan Laut (m)	Di tempat tertentu
18	Sampang	8	Sampang
19	Kroya	10	Kroya
20	Binangun	8	Binangun
21	Nusawungu	10	Nusawungu
22	Cilacap Selatan	6	Cilacap Selatan
23	Cilacap Tengah	5	Cilacap Tengah
24	Cilacap Utara	6	Cilacap Utara

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2023

4) Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Cilacap dapat dirinci menjadi bahasan mengenai litologi/batuan, stratigrafi, dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir, maupun kekeringan.

Kabupaten Cilacap memiliki bentang alam yang beragam, secara topografi daerah barat dan utara berupa perbukitan dan pegunungan, serta daerah selatan berupa lahan pesisir dan laut. Wilayah ini memiliki keragaman ekosistem yang tersimpan di dalam wilayah administrasi Kabupaten Cilacap dari timur hingga barat. Kondisi pantai Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya keseragaman dalam unsur geologi dan relief. Geologi atau endapan sepanjang pantai umumnya berupa daratan rendah pantai yang terdiri dari sedimen kuarter. Sedimen tersebut merupakan kombinasi antara endapan-endapan sungai delta, pantai, dan alluvial.

Wilayah Kabupaten Cilacap secara geologi dibentuk oleh formasi-formasi batuan gunung api dan sedimen endapan alluvium menutupi sebagian besar wilayah barat hingga ke bagian selatan (Djuri, 1975; Asikin dkk., 1992, dan Simanjutak dkk., 1992). Formasi-formasi batuan berumur Miosen Tengah yang tersingkap terutama di Pulau Nusakambangan terdiri dari Formasi Nusakambangan dan Pamutuan, dimana formasi yang kedua menindih secara selaras formasi pertama. Kedua formasi tersebut diatas ditutupi oleh Formasi Kalipucang yang berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal, diendapkan secara tidak selaras di atas formasi Nusakambangan; sementara bagian bawahnya menjemari dengan anggota kalkarenit dari Formasi Pamutuan.

Formasi Nusakambangan disusun oleh tuf, tuf lapilli, tuf pasir/ kerikilan dengan sisipan batu pasir sela di bagian bawah; dimana batu pasir sela semakin bertambah ke bagian atas, berselingan dengan batu lempung, bersisipan breksi. Formasi Pamutuan terdiri dari batu pasir, kalkarenit, napal, tuf, batu lempung, dan batu gamping; sedangkan Formasi Kalipucung

merupakan endapan laut dangkal yang didominasi oleh batu gamping terumbu.

Bagian daratan Kabupaten Cilacap dibentuk oleh formasi-formasi Rambatan Halang; Kumbang dan Tapak; yang sebagian besar ditutupi oleh alluvium dengan endapan pantai menutupi terutama bagian pantai selatan dari Kota Cilacap hingga muara Sungai Bengawan di bagian timur kota. Formasi Rambatan berumur Miosen tengah disusun oleh endapan turbidit yang terdiri dari batu pasir gampingan bersisipan napal, batu lempung dan breksi. Formasi Halang terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung, napal, dan tuf bersisipan breksi yang ditutupi secara tidak selaras oleh Formasi Kumbang berumur Pliosen Awal berupa endapan breksi gunung api bersisipan lava, batu pasir dan konglomerat bersisipan napal. Sementara Formasi Tapak merupakan satuan batuan sedimen hasil pengendapan laut dangkal, yang terdiri dari batu pasir mengandung cangkang moluska bersisipan napal dan breksi; berumur Pliosen dan diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Halang.

Formasi Halang diterobos oleh retas-retas bersusunan basalt sebagai pengisian bukaan-bukaan batuan berarah hampir sejajar dengan struktur antiklin, yang kemudian dipotong oleh sesar-sesar berarah timur laut-barat daya atau hampir utara-selatan. Luasnya sebaran alluvium berarah barat laut-tenggara diduga sebagai pengisian blok yang mengalami penurunan/terban (graben) akibat bentukan struktur sesar normal di wilayah pemantauan.

5) Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Cilacap dominan alluvial terutama alluvial kelabu dan kecoklatan. Lahan di wilayah dataran dengan tanah aluvial ini penggunaannya didominasi persawahan dengan irigasi teknis, semi teknis maupun sederhana, kawasan ini terutama di wilayah Kecamatan Karangpucung, Adimulya, Sidareja, Patimuan Kroya, Nusawungu, Sampang, Kesugihan dan Cilacap. Curah hujan di wilayah Kabupaten Cilacap secara umum tinggi dan material alluvial mendominasi kawasan dataran ini.

Tanah jenis latosol terdapat di Kabupaten Cilacap terutama di daerah Pegunungan antara lain di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja dan sebagian Kecamatan Majenang dan Kecamatan Cimanggu (bagian utara). Kondisi

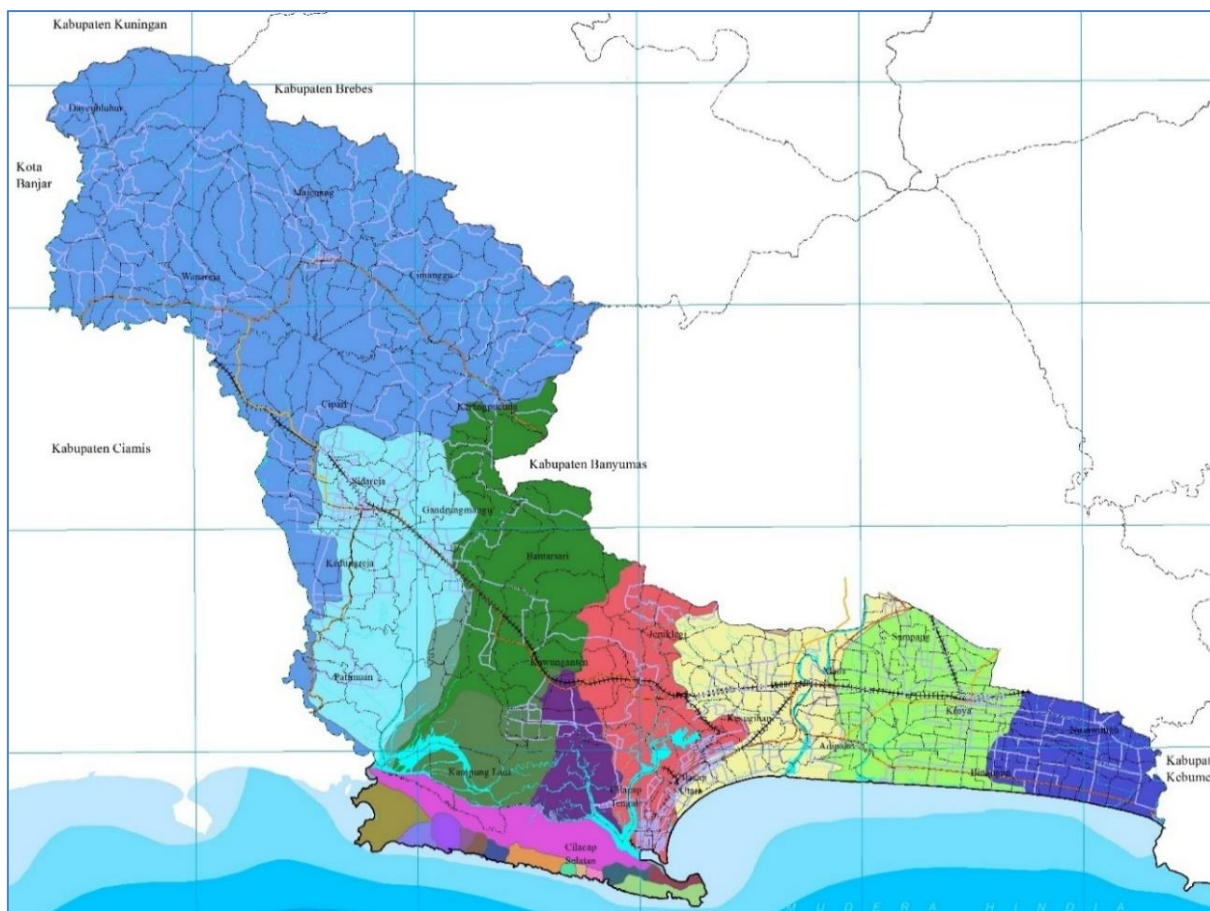
tanah pada kawasan ini secara umum sangat tebal dan subur sehingga sangat rentan terhadap bahaya gerakan tanah.

6) Hidrologi

Air Permukaan

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam yang bersangkutan, juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Cilacap memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan. Di Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy dari arah barat, Serayu dari arah Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur laut, serta Tipar dan Ijo di selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, disebutkan bahwa di Kabupaten Cilacap terdapat 24 (dua puluh empat) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di bawah pengelolaan dan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada peta wilayah sungai dalam gambar berikut :



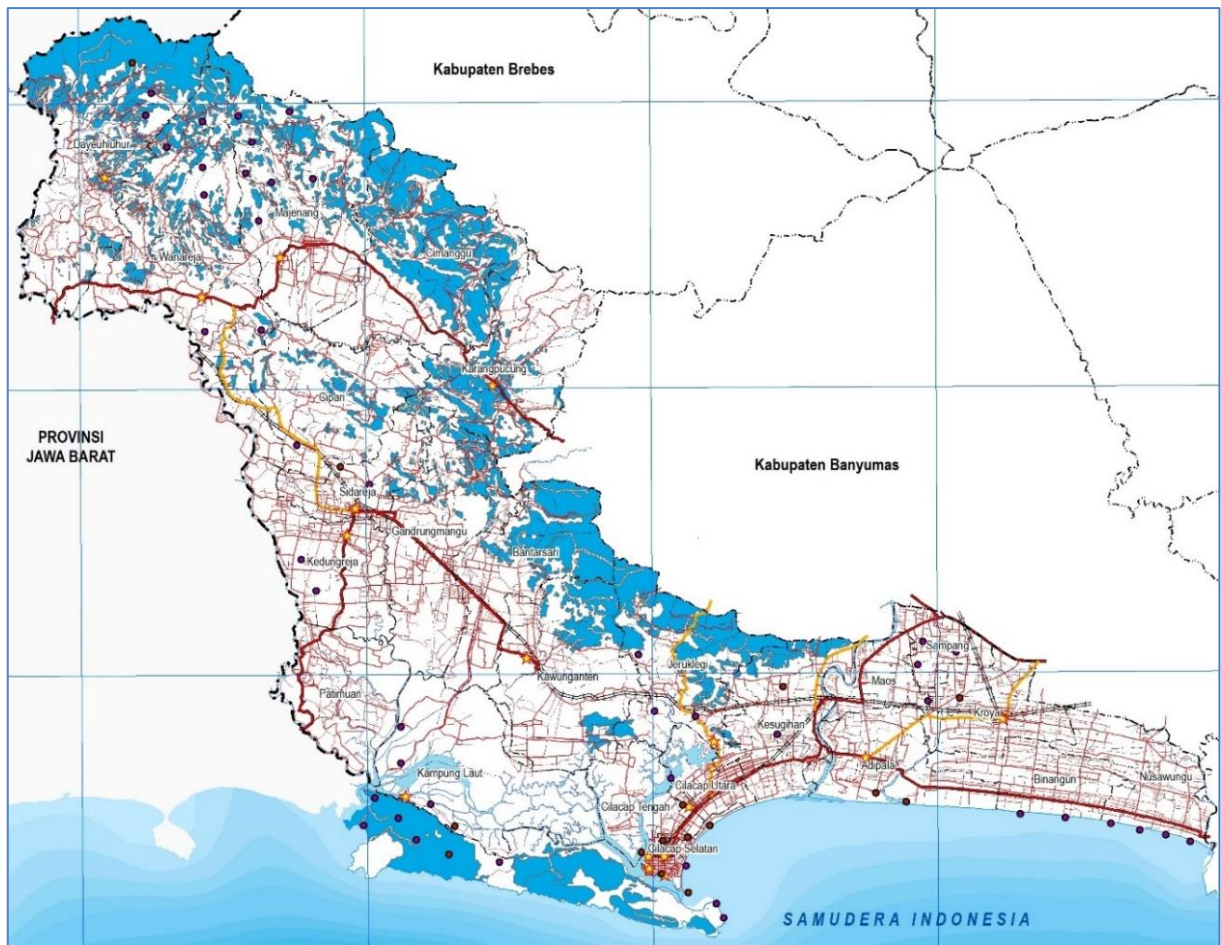
Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap

Gambar 2. 3
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Cilacap

Air Tanah

Hidrogeologi Cilacap secara regional dapat dibedakan atas dasar morfologi, geologi, lingkungan pengendapan batuan, dan keterdapatan air tanahnya. Kawasan perlindungan cekungan air tanah di wilayah Kabupaten Cilacap berupa kawasan imbuhan dan lepasan air tanah dengan luasan kurang lebih 1.274 km² ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap, dengan rincian luasan dan lokasinya sebagai berikut :

1. Cekungan Air Tanah (CAT) Majenang seluas ± 108 km²;
2. Cekungan Air Tanah (CAT) Sidareja seluas ± 480 km²;
3. Cekungan Air Tanah (CAT) Nusakambangan seluas ± 45 km²;
4. Cekungan Air Tanah (CAT) Cilacap seluas ± 218 km²;
5. Cekungan Air Tanah (CAT) Kroya seluas ± 423 km².



Sumber : RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap

Gambar 2. 4
Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Cilacap

7) Klimatologi

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Cilacap, pada tahun 2023 curah hujan tertinggi pada terjadi pada bulan April (356 mm) dan terendah terjadi pada bulan September (0,2 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 21 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus dan September sebanyak 1 hari hujan. Suhu maksimum tercatat 33,5°C terjadi pada bulan Desember, sedangkan suhu minimum 21,1°C terjadi pada bulan Agustus.

Tabel 2. 3
Banyaknya Curah Hujan Terbesar dan Jumlah Hari Hujan Yang Tercatat
Di Stasiun Meterologi Cilacap Tahun 2023

No	Bulan	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Curah Hujan Terbesar (mm)	Jumlah Hari Hujan
1	Januari	139,2	26,4	21
2	Februari	119,8	26,7	17
3	Maret	183	84	16
4	April	496	356	20
5	Mei	209	90,9	11
6	Juni	154,4	65,3	10
7	Juli	156,2	123,8	11
8	Agustus	1	1	1
9	September	0,2	0,2	1

No	Bulan	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Curah Hujan Terbesar (mm)	Jumlah Hari Hujan
10	Oktober	7,1	4	4
11	November	316,8	130,6	15
12	Desember	90,4	53,6	7
Tahun 2023		1.873,1	130,6	134
Tahun 2022		4.593,3	206,8	291
Tahun 2021		3.033,0	132,5	260
Tahun 2020		4.495,7	133,2	253
Tahun 2019		1.968,9	135	141

Sumber : BMKG Kabupaten Cilacap, 2023

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori kering. Curah hujan berubah secara drastis secara langsung dapat mengakibatkan penjemuran pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Tanah yang lama kering, kemudian diguyur hujan menerus, sehingga rentan mengalami pergerakan tanah atau longsor.

8) Penggunaan Lahan

Total lahan di Kabupaten Cilacap seluas 213.849 Ha, sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian seluas 170.663 Ha dan sisanya seluas 43.186 Ha yang penggunaannya di luar pertanian seperti untuk jalan, perumahan, dan lain-lain.

Dari lahan yang digunakan untuk pertanian seluas 170.663 Ha, sebagian besar digunakan untuk kepentingan lahan bukan sawah yaitu seluas 104.136 Ha yang digunakan antara lain untuk kebun/perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, padang rumput dan empang. Sedangkan lahan seluas 66.527 ha digunakan untuk sawah, baik sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut maupun untuk rawa lebak. Secara detail data penggunaan tanah / lahan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4
Luas Penggunaan Tanah/Lahan Tahun 2023

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Lahan Sawah		
1	Irigasi	45.267
2	Tadah Hujan	20.358
3	Rawa Pasang Surut	618
4	Rawa Lebak	284
Jumlah Lahan Sawah		66.527
Lahan Bukan Sawah		
1	Tegal / Kebun	40.335
2	Ladang / Huma	962
3	Perkebunan	12.667
4	Ditanami Pohon / Hutan Rakyat	7.623
5	Padang Penggembalaan/ Padang Rumput	0
6	Hutan Negara	30.208

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
7	Sementara Tidak Diusahakan	136
8	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara Dll)	12.205
	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah	104.136
	Lahan Bukan Pertanian (jalan, Permukiman dll)	43.186
	Total Luas Lahan	213.849

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Nasional; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Nasional. Kabupaten Cilacap dalam RTRWN masuk pada tahapan pengembangan fungsi Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional dan merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan dari tiga kawasan lain di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Dengan ditetapkannya Cilacap sebagai PKN, maka diperlukan peningkatan infrastruktur jalan yang mendukung kelancaran kegiatan nasional. Hal ini sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, yang menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai kawasan *hinterland* (penyangga) untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Brebes.

Terkait dengan pengembangan infrastruktur strategis yang termuat dalam RTRWN maupun Perpres tentang Proyek Strategis Nasional, di Kabupaten Cilacap terdapat beberapa proyek strategis nasional yang perlu mendapat perhatian baik yang memiliki pengaruh dalam skala lokal maupun regional. Pembangunan kawasan industri pengolah minyak (RDMP Project), pembangkit listrik/PLTU, Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan adalah beberapa proyek strategis nasional yang diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pengembangan kawasan lokal di sekitar kabupaten Cilacap. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Gedebage – Cilacap, Cilacap - Pejagan dan Cilacap – Yogyakarta, pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), diharapkan dapat mendorong peran Kabupaten

Cilacap dalam pengembangan kawasan regional yang terkoneksi dengan kawasan lain termasuk akses ke Bandara Jenderal Sudirman di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu, pada RTRWN juga menyebutkan bahwa Kabupaten Cilacap termasuk dalam 2 (dua) kawasan andalan, yaitu kawasan andalan Jawa Tengah Selatan dan kawasan andalan laut Cilacap dan sekitarnya.

Tabel 2. 5
Penetapan Kawasan Andalan

Kawasan Andalan	Sektor unggulan	Keterangan
Kawasan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya)	- pertanian - pariwisata - pertambangan - industri - perikanan	1. Tahap pengembangan kawasan andalan untuk pertanian 2. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata 3. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan 4. Tahapan rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan 5. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk perikanan
Kawasan Andalan Laut Cilacap dan sekitarnya	- perikanan laut - pertambangan - pariwisata	1. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk kelautan 2. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan 3. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN

Penetapan Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam kawasan andalan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Cilacap, yaitu “Mewujudkan Ruang Kabupaten Sebagai Pusat Ekonomi Skala Nasional Berbasis Pertanian, Industri, Kelautan, Secara Terpadu dan Berkelanjutan Guna Pemerataan Pembangunan Wilayah”. Selain itu, penetapan sebagai kawasan andalan laut Cilacap dan sekitarnya juga sesuai dengan rencana pemantapan pelabuhan utama di Kabupaten Cilacap yang diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan andalan kelautan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, pola ruang wilayah Kabupaten Cilacap dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan Budidaya.



Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap

Gambar 2. 5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cilacap

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.

Kawasan lindung Kabupaten Cilacap adalah mencakup kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya, Kawasan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan Lindung Lainnya. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukkan hutan produksi, kawasan peruntukkan hutan rakyat, kawasan peruntukkan pertanian, kawasan peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan peruntukkan permukiman, dan kawasan peruntukkan lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari :

2. Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cipari, Cimanggu, Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi dan Kesugihan.
3. Kawasan resapan air berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan dan Pulau Nusakambangan.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai yang berada pada seluruh sungai yang ada di Kabupaten Cilacap. Kawasan sempadan pantai sejauh 100 meter dari garis pantai yang ada di Kecamatan Patimuan, Kampunglaut, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, Adipala, Binangun dan Nusawungu. Kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air, ruang terbuka hijau publik dan privat dan jaringan irigasi juga masuk dalam kawasan perlindungan setempat.

Kawasan lindung di Kabupaten Cilacap juga meliputi Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang terdiri dari kawasan cagar alam yang berupa Cagar Alam Nusakambangan Barat, Nusakambangan Timur, Wijaya Kusuma dan Cagar Alam Karang Bolong. Kawasan taman wisata alam berupa Kawasan Gunung Selok di Kecamatan Adipala, sedangkan kawasan suaka alam laut berupa Kawasan Segara Anakan di Kecamatan Kampunglaut. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan tersebar di wilayah kabupaten Cilacap yang terdiri dari lingkungan bangunan gedung dan halaman serta lingkungan non bangunan.

Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan Cekungan Air Tanah yang terdiri dari cekungan air tanah Majenang, Sidareja, Nusakambangan, Cilacap dan cekungan air tanah Kroya. Kawasan lindung lainnya yang ada di Kabupaten Cilacap berupa kawasan lindung plasma nutfah yang ada di kawasan segara anakan.

Kawasan budidaya untuk peruntukan hutan produksi berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten dan Jeruklegi. Sedangkan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Cipari,

Gandrungmangu, Bantarsari dan Kawunganten. Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Kawasan tanaman pangan yang terdiri dari kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, peternakan, perkebunan rakyat tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, sedangkan untuk perkebunan besar berada di Kecamatan Kawunganten, Dayeuhluhur, Cimanggu, Wanareja, Cipari dan Jeruklegi. Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan Bupati Cilacap Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Cilacap, menjadi salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mempertahankan kondisi cadangan pangan daerah.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan terbagi menjadi sentra perikanan tangkap, sentra perikanan budidaya dan kawasan pengolah ikan. Sentra perikanan tangkap meliputi kawasan minapolitan perikanan tangkap yang terdiri dari zona inti Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), Kelurahan Cilacap, Kelurahan Tegalkamulyan dan Kelurahan Sidakaya. Sentra perikanan tangkap juga meliputi tempat Pelelangan ikan yang ada di TPI Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Nusawungu, Kesugihan dan Kampunglaut. Sentra perikanan budidaya tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan berupa kawasan minapolitan budidaya, sedangkan kawasan pengolahan ikan meliputi kecamatan Cilacap selatan, Cilacap Tengah dan Kampunglaut.

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi dan gas. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari pasir besi, emas, batu gamping, tanah liat, tras, andesit, pasir pasang dan pasir urug. Kawasan peruntukan pertambangan menjadi satu kesatuan wilayah peruntukan yang hampir meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.

Kawasan peruntukan industri terdiri dari kawasan industri yang ada yaitu Kawasan Industri Cilacap (KIC) dan kawasan peruntukan industri yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Industri Bunton, Karangandri, Warung Batok dan Sidareja. Kawasan peruntukan industri juga mencakup kawasan industri menengah, kecil dan mikro yang tersebar di seluruh kecamatan.

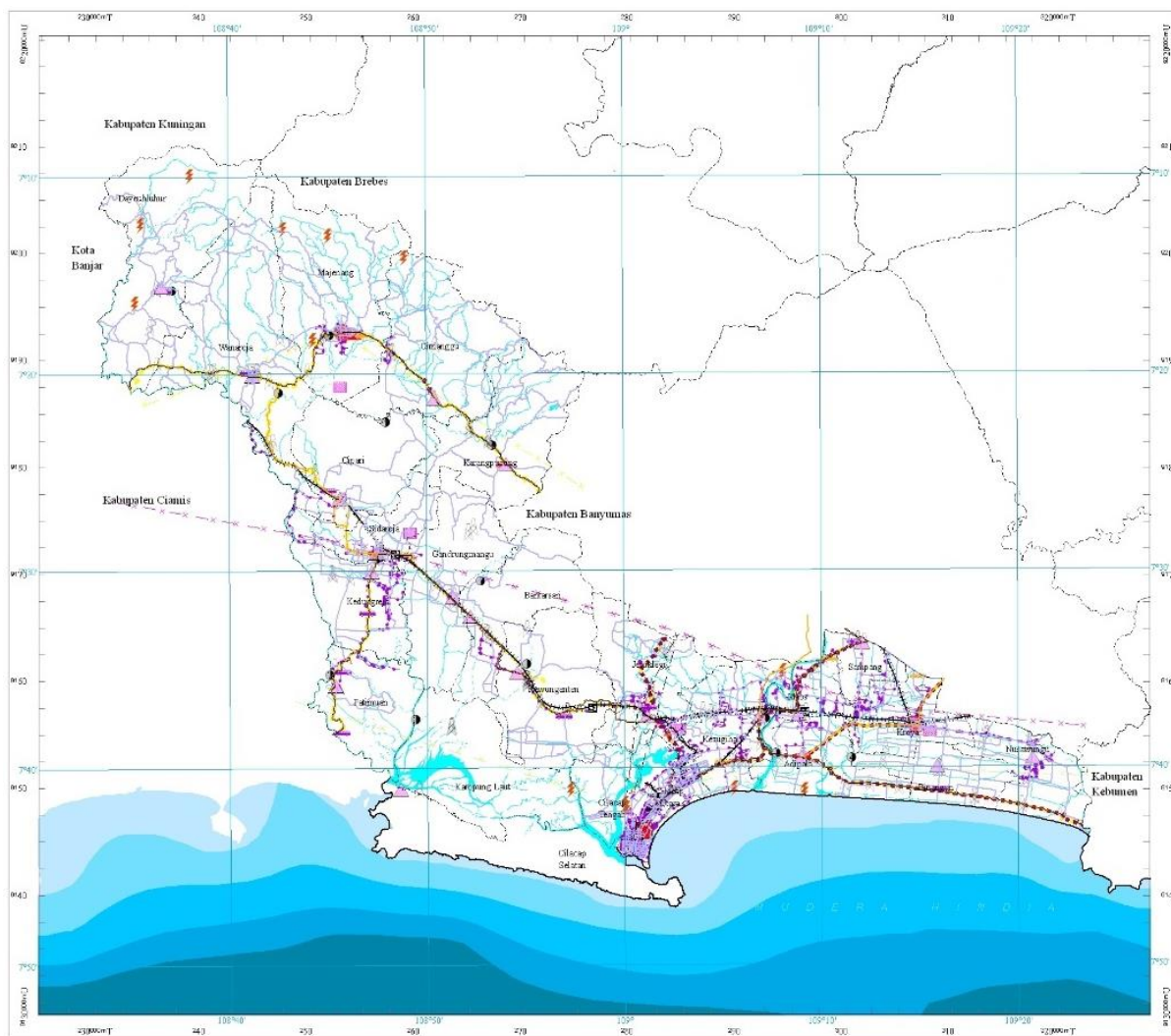
Kawasan Peruntukan Pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan

pariwisata ini tersebar di hampir seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari kawasan permukiman perkotaan yang meliputi seluruh kawasan perkotaan Cilacap dan beberapa wilayah di setiap kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman yang dekat dengan pusat pertumbuhan dan pemerintahan. Kawasan peruntukan permukiman juga mencakup kawasan perdesaan yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah yang tidak menghilangkan karakteristik wilayahnya.

Kawasan peruntukan budidaya lainnya mencakup peruntukan pertahanan dan keamanan yang secara wilayah berada di sepanjang pesisir pantai Cilacap dan kawasan pesisir serta pulau pulau kecil yang berada di sepanjang garis pantai dan pulau Nusakambangan.

Rencana struktur ruang Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW menyebutkan bahwa rencana struktur ruang terdiri dari rencana system pusat kegiatan dan rencana system jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan menggambarkan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dan penetapan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan (pusat kegiatan local atau pusat pelayanan kawasan) serta penetapan kawasan perdesaan sebagai pusat pelayanan lingkungan.

Rencana struktur ruang juga mendiskripsikan rencana pembangunan di Kabupaten Cilacap yang mencakup pembangunan sistem jaringan prasarana utama seperti rencana sistem jaringan transportasi darat, jaringan perkeretaapian, jaringan transportasi laut, jaringan transportasi udara serta pembangunan rencana sistem jaringan prasarana lain seperti rencana sistem jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana pengelolaan lingkungan dan jalur serta ruang evakuasi.



Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap

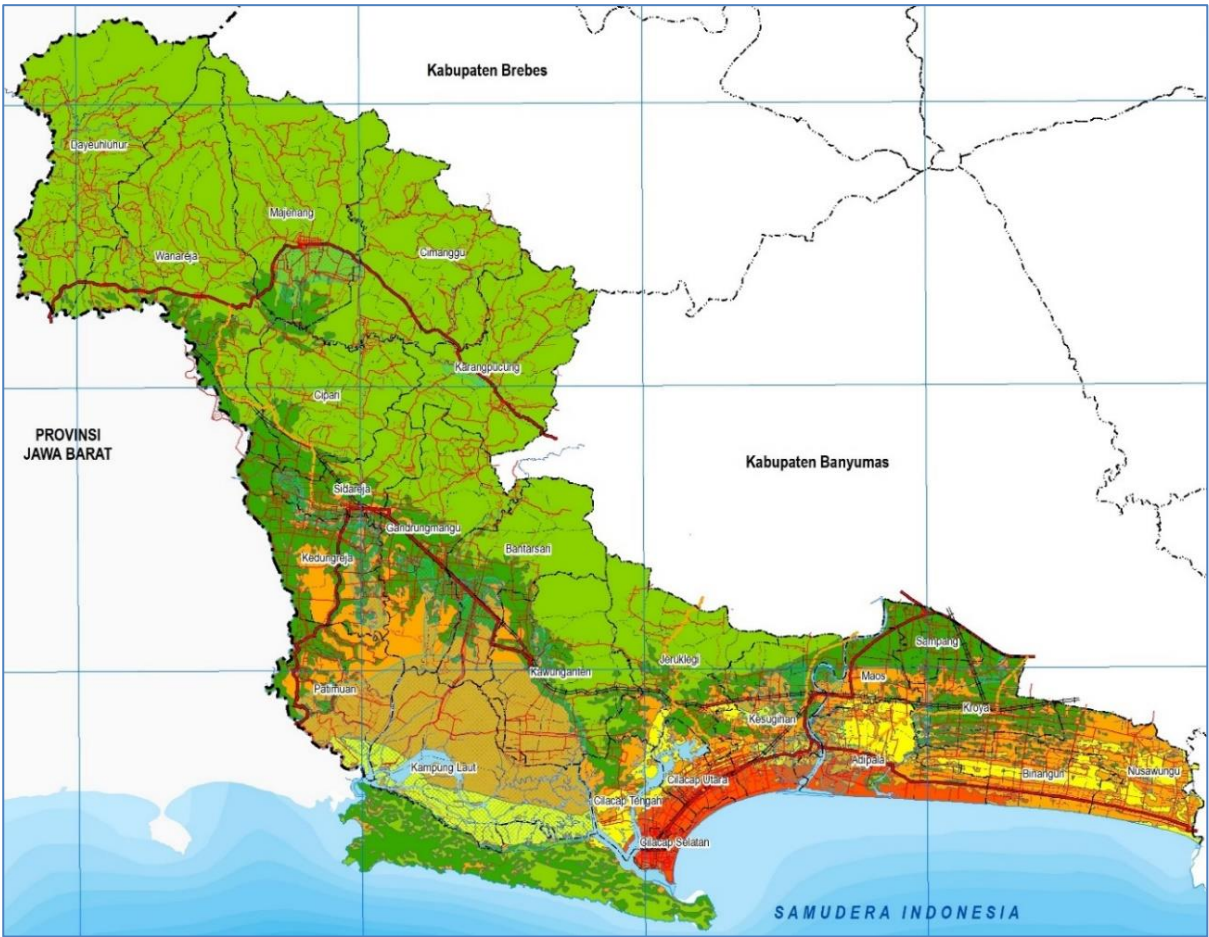
Gambar 2. 6
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cilacap

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam yang ada di Kabupaten Cilacap meliputi kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri dari rawan gempa bumi dan rawan tsunami. Kawasan rawan bencana gempa bumi mencakup wilayah Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cipari, Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten dan Nusawungu. Kawasan rawan bencana tsunami tersebar di kecamatan Nusawungu, Binangun, Adipala, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Kawunganten dan Kampung Laut.

Kawasan rawan bencana juga meliputi wilayah yang rawan bencana banjir, kekeringan dan bencana longsor. Wilayah rawan bencana banjir tersebar di Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya dan Nusawungu. Kawasan rawan bencana kekeringan tersebar di Kecamatan Jeruklegi, Cipari, Gandrungmangu, Kawunganten, Karangpucung, Bantarsari, Kampunglaut,

Sidareja, Nusawungu, Binangun, Patimuan dan Cilacap Utara. Sedangkan kawasan yang memiliki potensi bencana longsor meliputi kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu dan Karangpucung.



Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap

Gambar 2. 7
Peta Rawan Bencana Tsunami dan Banjir Kabupaten Cilacap

Dari 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap, terdapat 4 pos sektor pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Cilacap diantaranya Pos Damkar Cilacap Kota yang mencakup 7 kecamatan, Pos Damkar Kroya yang mencakup 6 kecamatan, Pos Damkar Sidareja yang mencakup 6 kecamatan, dan Pos Damkar Majenang yang mencakup 5 kecamatan. Di tahun 2017 jumlah kebakaran di Kabupaten Cilacap sebanyak 47 jumlah kebakaran, di tahun 2018 jumlah kebakaran sebanyak 110 kejadian kebakaran, pada tahun 2019 jumlah kebakaran sebanyak 123 kejadian kebakaran, di tahun 2020 jumlah kebakaran sebanyak 64 kejadian, di tahun 2021 jumlah kebakaran sebanyak 77 kejadian, di tahun 2022 jumlah kebakaran sebanyak 69 kejadian, dan di tahun 2023 jumlah kebakaran sebanyak 152 kejadian. Diantara jumlah kebakaran pada tahun 2017-2023 tersebut, telah dipetakan wilayah-wilayah dengan tingkat resiko kebakaran yang terbagi menjadi 5 klasifikasi resiko (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi). Kecamatan Kampung Laut menjadi satu-satunya kecamatan yang memiliki

tingkat resiko sangat rendah dengan jumlah kebakaran 1 kejadian, sedangkan dengan tingkat resiko rendah pada 14 kecamatan (Dayeuhluhur, Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, Jeruklegi, Kawunganten, Nusawungu, Binangun, Adipala, Maos, Sampang), lalu dengan tingkat resiko sedang terdapat pada 6 kecamatan (Wanareja, Sidareja, Bantarsari, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Kesugihan), pada tingkat resiko tinggi terdapat 2 kecamatan (Kroya, Cilacap Selatan), dan pada tingkat resiko sangat tinggi, hanya pada Kecamatan Majenang.

2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebanyak 2.032.570 jiwa, terdiri dari 1.028.879 jiwa penduduk laki-laki dan 1.003.691 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin mencapai 102,51. Pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 0,88 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2022 yang tercatat 1,28 persen.

Tabel 2. 6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Tahun 2019-2023

No	Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki-Laki	979.745	990.338	1.002.019	1.020.128	1.028.879
2	Perempuan	957.682	967.534	978.893	994.618	1.003.691
3	Laki-laki + Perempuan	1.937.427	1.957.872	1.980.912	2.014.746	2.032.570
4	Sex Ratio	102,30	102,35	102,36	102,57	102,51

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2024

Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2019-2023 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.937.427 jiwa meningkat menjadi sebanyak 2.032.570 jiwa pada tahun 2023. Sedangkan persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap juga tidak merata, Distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan Majenang adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 146.630 jiwa (7,21 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar 140.640 jiwa (6,92 per). Sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Kecamatan Kampung Laut, yaitu sejumlah 16.255 jiwa (0,80 persen). Perincian penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan kecamatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7
Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan
Wilayah Kecamatan Tahun 2019-2023 (jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Dayeuhluhur	49.188	49.096	49.438	50.254	50.486
2	Wanareja	104.771	105.761	106.683	108.941	110.063
3	Majenang	138.476	140.961	142.273	144.858	146.630
4	Cimanggu	104.212	105.761	106.491	107.665	108.418
5	Karangpucung	80.071	81.037	81.867	82.871	83.432
6	Cipari	65.608	65.999	67.107	68.261	68.932
7	Sidareja	62.305	62.712	63.406	64.433	64.823
8	Kedungreja	86.929	88.334	89.734	91.786	92.606
9	Patimuan	49.288	49.646	50.401	51.298	51.770
10	Gandrungmangu	109.331	110.498	112.234	114.295	115.308
11	Bantarsari	73.431	74.618	75.784	77.080	77.896
12	Kawunganten	84.705	85.775	86.866	88.397	89.242
13	Kampung Laut	15.566	15.609	15.839	16.176	16.255
14	Jeruklegi	75.156	76.457	77.795	79.597	80.713
15	Kesugihan	131.283	133.248	135.368	138.880	140.640
16	Adipala	93.309	94.745	96.211	98.008	99.324
17	Maos	46.672	46.893	47.407	48.088	48.192
18	Sampang	43.018	43.592	44.164	44.699	44.894
19	Kroya	114.119	115.503	117.055	118.850	119.953
20	Binangun	67.926	68.764	69.718	71.093	71.863
21	Nusawungu	84.729	85.854	87.613	89.579	90.754
22	Cilacap Selatan	84.549	84.349	84.151	84.767	84.882
23	Cilacap Tengah	90.490	90.183	90.010	90.250	90.203
24	Cilacap Utara	82.295	82.934	83.295	84.620	85.291
Jumlah		1.937.427	1.957.872	1.980.912	2.014.746	2.032.570

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2024

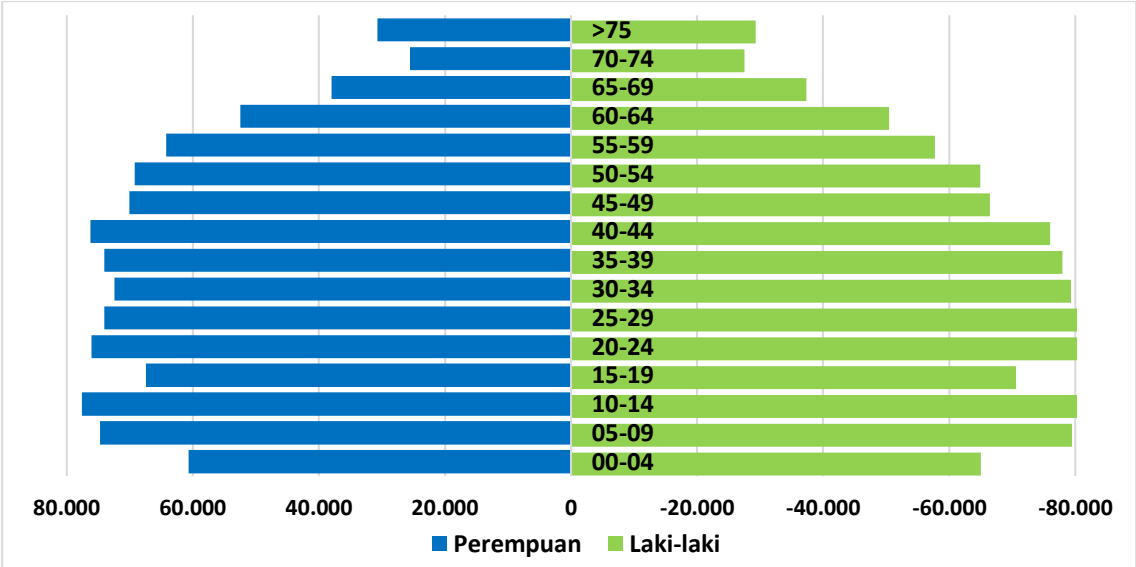
Untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap maka penduduk ditinjau dari kelompok umur. Berdasarkan kelompok umur kategori penduduk produktif tahun 2023 (15–64 tahun) sebesar 1.403.374 jiwa atau 69,04 persen, jumlah penduduk tidak produktif (>65 tahun) sebanyak 188.343 jiwa atau 9,27 persen dan jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 440.853 jiwa atau 21,69 persen. Potensi tenaga kerja di Kabupaten Cilacap cukup besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 69,04 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
0-14	439.096	448.425	443.167	416.064	440.853
15-64	1.348.357	1.364.725	1.377.834	1.407.752	1.403.374
65+	149.974	144.722	159.911	190.930	188.343
Rasio Ketergantungan	43,69	43,46	43,77	43,19	44,83

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Cilacap dapat dilihat bahwa struktur kependudukan mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar yaitu 69,04 persen. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), dan kualitas Sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Cilacap, namun apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat Cilacap dan peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif, maka yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran.



Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2024 (diolah)

Gambar 2. 8
Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka dikenal suatu ukuran yaitu kepadatan penduduk. Ukuran ini dapat digunakan sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat, yaitu dari 888 jiwa/km² pada tahun 2022 menjadi 904 jiwa/km² pada tahun 2023. Seperti tahun sebelumnya, penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Cilacap Selatan sebanyak 10.557 jiwa/km². Sementara itu Kecamatan Kampunglaut yang luasnya 5,96 persen dari total luas Kabupaten Cilacap hanya dihuni 121 jiwa/km².

Tabel 2. 9
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Cilacap Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk*	Kepadatan	Penyebaran
				(Jiwa)	(%)
1	Dayeuhluhur	191,73	50.486	263	2,48
2	Wanareja	195,92	110.063	562	5,41
3	Majenang	167,60	146.630	875	7,21
4	Cimanggu	163,35	108.418	664	5,33
5	Karangpucung	124,74	83.432	669	4,10
6	Cipari	107,53	68.932	641	3,39
7	Sidareja	49,31	64.823	1.315	3,19
8	Kedungreja	82,01	92.606	1.129	4,56
9	Patimuan	78,68	51.770	658	2,55
10	Gandrungmangu	119,26	115.308	967	5,67
11	Bantarsari	99,49	77.896	783	3,83
12	Kawunganten	138,09	89.242	646	4,39
13	Kampunglaut	134,07	16.255	121	0,80
14	Jeruklegi	99,41	80.713	812	3,97
15	Kesugihan	89,10	140.640	1.578	6,92
16	Adipala	74,65	99.324	1.331	4,89
17	Maos	34,30	48.192	1.405	2,37
18	Sampang	28,89	44.894	1.554	2,21
19	Kroya	61,68	119.953	1.945	5,90
20	Binangun	53,73	71.863	1.337	3,54
21	Nusawungu	66,98	90.754	1.355	4,46
22	Cilacap Selatan	8,04	84.882	10.557	4,18
23	Cilacap Tengah	51,00	90.203	1.769	4,44
24	Cilacap Utara	29,72	85.291	2.870	4,20
Kabupaten Cilacap		2.249,28*	2.032.570	904	100

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2024 (diolah)
* Luas wilayah belum termasuk Pulau Nusakambangan, luas Pulau Nusakambangan 115,00 km². Apabila Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah Kabupaten Cilacap dengan Pulau Nusakambangan adalah sebesar : 860 jiwa/ km².

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap yang sudah bekerja merupakan petani/pekebun, buruh harian lepas, wiraswasta, karyawan swasta dan pedagang.

Tabel 2. 10
Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pekerjaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belum/Tidak Bekerja	500.837	525.237	533.428	546.399	551.701
2	Mengurus Rumah Tangga	278.337	283.739	292.110	302.991	311.204
3	Pelajar/Mahasiswa	248.254	255.271	250.107	249.286	244.994
4	Pensiunan	8.154	7.538	7.489	7.849	7.978
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12.936	12.503	12.247	12.003	11.754
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.002	1.040	1.026	1.037	1.065
7	Kepolisian RI (Polri)	1.029	1.036	1.007	1.000	992
8	Perdagangan	4.654	4.498	4.540	4.593	4.589
9	Petani/Pekebun	326.055	309.826	309.795	310.934	309.858
10	Peternak	418	388	381	380	377
11	Nelayan/Perikanan	8.971	8.788	8.823	8.915	8.933
12	Industri	80	79	80	80	82
13	Konstruksi	74	75	75	73	73
14	Transportasi	134	130	132	132	133
15	Karyawan Swasta	110.994	114.062	117.254	120.646	123.276
16	Karyawan BUMN	2.982	2.997	3.003	2.970	2.952

No	Jenis Pekerjaan	2019	2020	2021	2022	2023
17	Karyawan BUMD	300	302	300	306	310
18	Karyawan Honorer	1.404	1.410	1.461	1.487	1.493
19	Buruh Harian Lepas	191.303	190.629	193.282	197.242	201.286
20	Buruh Tani/Perkebunan	52.652	50.427	50.262	50.352	50.126
21	Buruh Nelayan/Perikanan	521	519	528	534	536
22	Buruh Peternakan	168	168	168	164	164
23	Pembantu Rumah Tangga	489	466	461	450	445
24	Tukang Cukur	23	24	25	27	25
25	Tukang Listrik	16	13	13	15	15
26	Tukang Batu	301	299	298	295	293
27	Tukang Kayu	413	398	397	394	389
28	Tukang Sol Sepatu	8	8	7	7	7
29	Tukang Las/Pandai Besi	44	44	45	46	47
30	Tukang Jahit	1.999	2.016	2.026	1.996	1.989
31	Tukang Gigi	5	5	5	5	5
32	Penata Rias	24	23	24	24	24
33	Penata Busana	3	3	2	2	2
34	Penata Rambut	15	14	16	16	14
35	Mekanik	218	223	231	231	232
36	Seniman	60	63	68	74	78
37	Tabib	4	4	4	4	4
38	Paraji	11	8	8	8	8
39	Perancang Busana	6	6	6	6	6
40	Penterjemah	6	6	4	4	5
41	Imam Masjid	15	14	14	14	14
42	Pendeta	81	84	83	83	83
43	Pastor	5	5	5	5	5
44	Wartawan	43	39	43	45	45
45	Ustadz/Mubaligh	72	76	78	84	83
46	Juru Masak	7	6	6	5	5
47	Promotor Acara	-	1	1	1	1
48	Anggota DPR RI	2	3	3	3	2
58	Bupati	1	1	1	1	1
59	Wakil Bupati	1	1	1	0	0
62	Anggota DPRD Prop.	1	1	1	1	1
63	Anggota DPRD Kab./Kota	20	20	21	20	21
64	Dosen	252	257	285	287	302
65	Guru	13.232	13.348	13.646	14.229	14.514
67	Pengacara	24	23	25	25	26
68	Notaris	25	26	25	27	29
69	Arsitek	7	7	8	9	10
70	Akuntan	3	2	3	3	3
71	Konsultan	10	12	9	10	9
72	Dokter	320	335	352	381	400
73	Bidan	1.052	1.101	1.121	1.147	1.167
74	Perawat	1.285	1.364	1.449	1.586	1.659
75	Apoteker	116	123	139	157	167
76	Psikiater/Psikolog	3	2	3	2	2
78	Penyiar Radio	4	4	4	3	3
79	Pelaut	170	166	182	199	213
80	Peneliti	14	13	11	11	12
81	Sopir	1.971	1.986	2.004	2.039	2.061
82	Pialang	1	1	1	3	2
83	Paranormal	10	10	11	11	12
84	Pedagang	34.516	33.253	33.174	33.107	33.038
85	Perangkat Desa	3.074	3.043	3.032	3.050	3.004
86	Kepala Desa	185	181	179	178	169
87	Biarawan/Biarawati	18	18	18	16	16
88	Wiraswasta	125.845	127.925	131.048	134.919	137.919
89	Pekerjaan Lainnya	138	136	2.788	108	108
	Jumlah	1.937.427	1.957.872	1.980.912	2.014.746	2.032.570

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cilacap, Tahun 2024

Penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan jenjang pendidikannya pada tahun 2023 sebanyak 665.621 orang memiliki jenjang pendidikan SD/ sederajat, 338.947 orang memiliki jenjang pendidikan SLTP/ sederajat, 319.718 orang memiliki jenjang pendidikan SLTA/ sederajat. Secara lengkap terkait dengan jenjang pendidikan penduduk Kabupaten Cilacap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 11
Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tidak/Blm Sekolah	404.614	433.184	446.138	465.221	473.319
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	168.815	171.880	169.435	165.689	161.694
3	Tamat SD/ Sederajat	686.611	665.456	666.114	667.392	665.621
4	SLTP/ Sederajat	325.383	328.495	331.904	336.214	338.947
5	SLTA/ Sederajat	287.508	292.761	299.323	309.427	319.718
6	Diploma I/II	4.525	4.430	4.363	4.254	4.156
7	Akademi/ Diploma III	16.725	17.035	17.292	17.756	18.165
8	Diploma IV/ Strata I	41.557	42.901	44.579	46.930	48.989
9	Strata-II	1.619	1.665	1.703	1.802	1.897
10	Strata-III	70	65	61	61	64
	Jumlah	1.937.427	1.957.872	1.980.912	2.014.746	2.032.570

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cilacap, Tahun 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan. Keberadaan kilang minyak sangat berpengaruh terhadap PDRB Cilacap, maka dalam penghitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Melihat pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Cilacap dengan Migas tahun 2019-2023, laju pertumbuhan yang cenderung positif, pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Cilacap sebesar Rp 114.117.080 juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 4,03 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 104.542.660 juta dengan indeks perkembangan -8,39 persen. Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp 109.653.598 juta dengan indeks perkembangan 4,89 persen dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 121.021.798 juta dengan indeks perkembangan 10,37 persen, adapun tahun 2023 meningkat kembali menjadi Rp 132.425.324 juta dengan indeks perkembangan 9,42 persen. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2019

sebesar Rp 100.327.299 juta dengan indeks perkembangan 2,99 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 90.011.584 juta dengan indeks perkembangan -10,28 persen. Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp 91.944.588 juta dengan indeks perkembangan 2,15 persen dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 96.677.843 juta dengan indeks perkembangan 5,15 persen dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi Rp 101.839.741 juta dengan indeks perkembangan 5,34 persen.

Tabel 2. 12
PDRB Kabupaten Cilacap Dengan Migas Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (juta rupiah)	Indeks Perkembangan (%)	Jumlah (juta rupiah)	Indeks Perkembangan (%)
2019	114.117.080	4,03	100.327.299	2,27
2020	104.542.660	-8,39	90.011.584	-10,28
2021	109.653.598	4,89	91.944.588	2,15
2022	121.021.798	10,37	96.677.843	5,15
2023	132.425.324	9,42	101.839.741	5,34

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Sama seperti PDRB dengan Migas, PDRB Kabupaten Cilacap ADHB dan ADHK tanpa migas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, sedangkan pada tahun 2020 ada sedikit kenaikan untuk PDRB ADHB dan sedikit penurunan untuk PDRB ADHK. Pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Cilacap sebesar Rp 65.800.554 juta meningkat menjadi Rp 65.991.354 juta pada tahun 2020 dengan indeks perkembangan 0,29 persen dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi Rp 69.826.769 juta dengan indeks perkembangan 5,81 persen. Adapun tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 77.065.000 juta dengan indeks perkembangan 10,37 persen kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 menjadi Rp85.078.735 juta dengan indeks perkembangan 10,40 persen. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2019 sebesar Rp 47.492.685 juta dengan indeks 5,37 persen, mengalami penurunan menjadi Rp 46.849.019 juta pada tahun 2020 dengan indeks perkembangan -1,36 persen dan meningkat kembali pada tahun 2021 mencapai Rp 48.435.235 juta dengan indeks 3,39 persen. Adapun tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 51.211.600 juta dengan indeks perkembangan 5,73 persen untuk tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp 54.182.310 dengan indeks perkembangan 5,80 persen.

Tabel 2. 13
PDRB Kabupaten Cilacap Tanpa Migas Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah	Indeks Perkembangan (%)	Jumlah	Indeks Perkembangan (%)
	(juta rupiah)		(juta rupiah)	
2019	65.800.554	6,81	47.492.685	5,37
2020	65.991.354	0,29	46.849.019	-1,36
2021	69.826.769	5,81	48.435.235	3,39
2022	77.065.000	10,37	51.211.600	5,73
2023	85.078.735	10,40	54.182.307	5,80

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

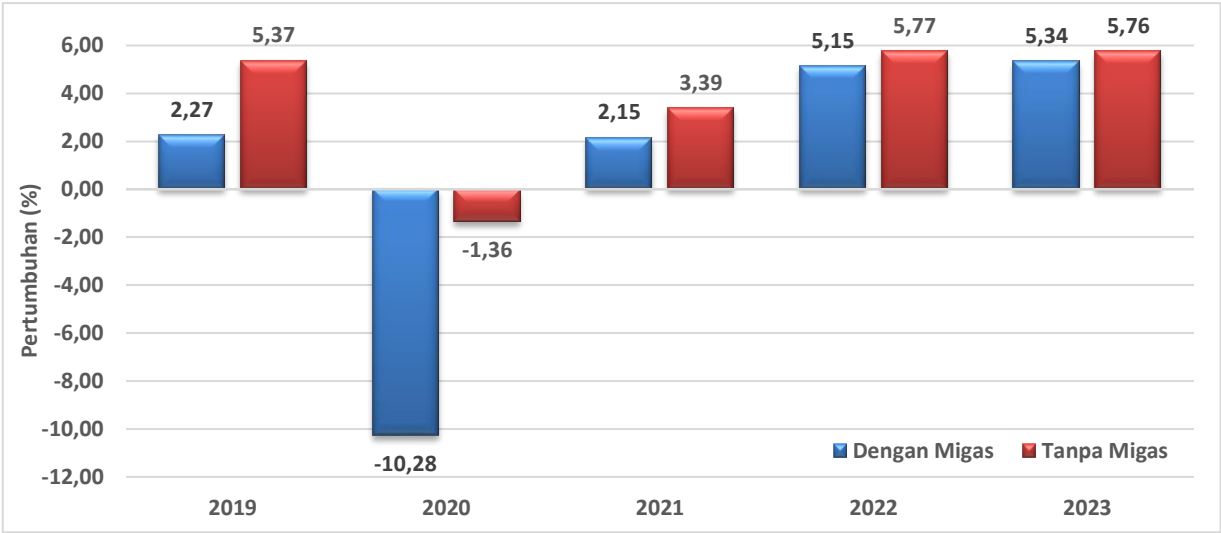
Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan dengan migas di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas sebesar 5,37 persen, sementara tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -1,36 persen. Adapun tahun 2021 dan 2022 meningkat kembali menjadi 3,39 persen dan 5,77 persen, tahun 2023 turun menjadi 5,76 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak, dimana kontribusi industri minyak terhadap PDRB secara total mempunyai andil yang cukup besar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -10,28 persen. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami peningkatan menjadi 2,15 persen dan 5,15 persen, di tahun 2023 menjadi 5,34 persen.

Tabel 2. 14
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

T a h u n	Dengan Migas (%)	Tanpa Migas (%)
2019	2,27	5,37
2020	-10,28	-1,36
2021	2,15	3,39
2022	5,15	5,77
2023	5,34	5,76

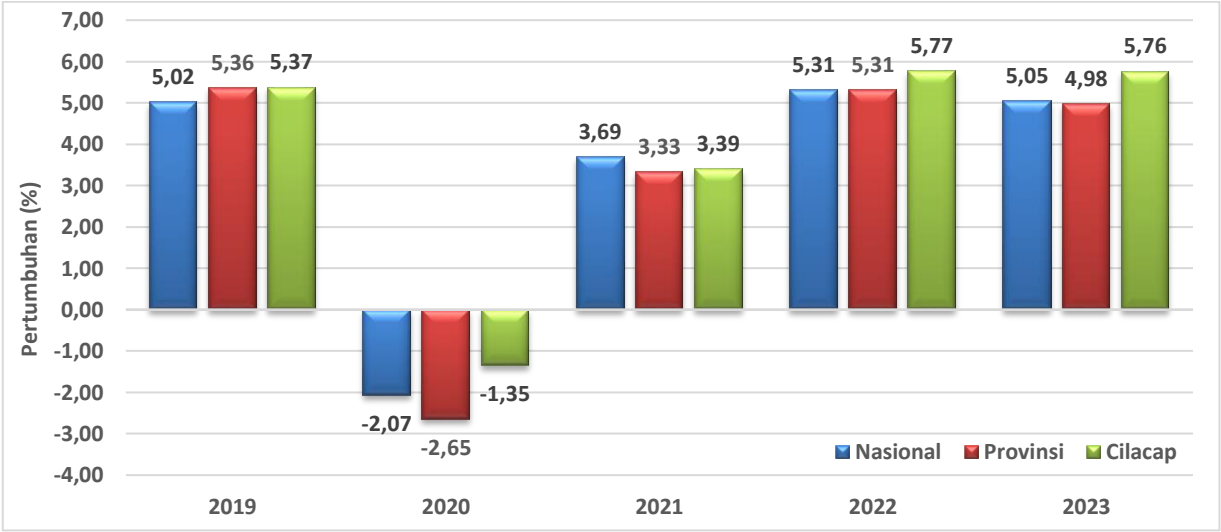
Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2. 9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

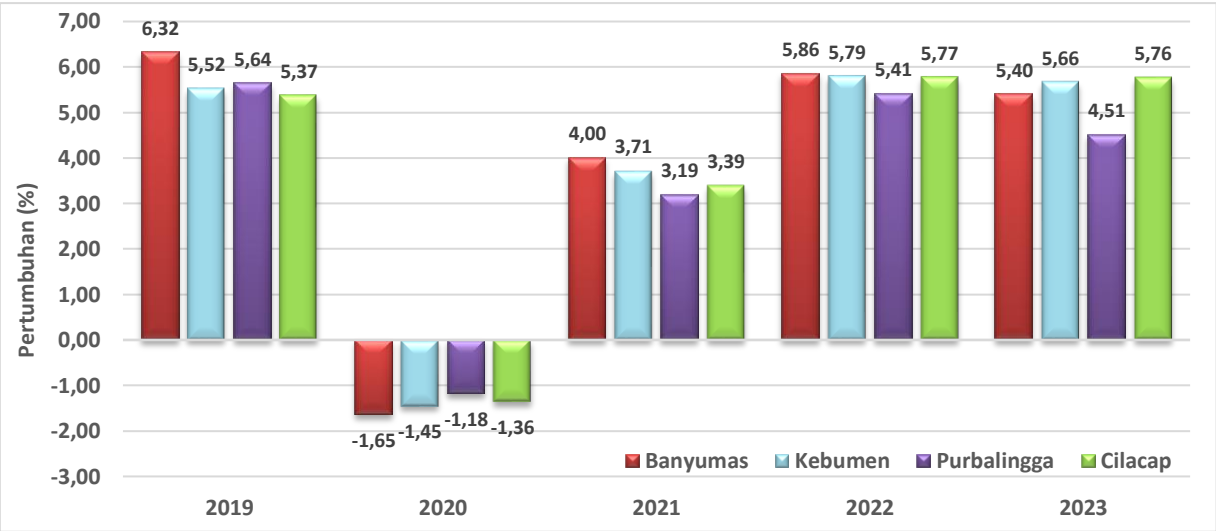
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap (tanpa migas) dari tahun 2019-2023 menunjukkan capaian yang fluktuatif seperti halnya nasional dan provinsi. Lebih rinci dapat kita lihat pada gambar berikut :



Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2. 10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun Kabupaten Cilacap (tanpa migas) dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2. 11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap
dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi dengan migas telah mengalami pemulihan dari -10,28 persen pada tahun 2020 menjadi 2,15 persen pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan menjadi 5,15 persen pada tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 5,34 persen. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi dengan migas tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,41 persen, dan terendah terjadi pada Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,56 persen. Kontribusi terbesar PDRB berasal dari sektor Industri Pengolahan yang mengalami peningkatan mencapai 57,58 persen. Peningkatan ini diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,22 persen dan Konstruksi sebesar 7,12 persen.

Tabel 2. 15
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023 Dengan Migas

Kategori/Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,17	1,08	-1,49	1,74	2,55
B	Pertambangan dan Penggalian	4,07	1,63	5,13	-2,74	2,03
C	Industri Pengolahan	0,96	-13,85	1,99	3,57	5,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	2,91	4,11	3,12	7,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,91	5,83	4,99	6,17	6,17
F	Konstruksi	5,89	-4,2	5,53	3,09	6,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	-1,74	4,59	3,89	5,45
H	Transportasi dan Pergudangan	7,31	-29,89	2,4	89,11	6,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,67	-3,45	6,1	11,28	11,41
J	Informasi dan Komunikasi	18,38	9,1	2,74	1,02	9,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	2,1	0,53	0,55	1,96
L	Real Estate	6,72	-0,07	0,71	5,17	6,89
M,N	Jasa Perusahaan	10,19	-6,65	1,78	6,32	5,05

Kategori/Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,45	-1,02	-0,44	1,16	2,35
P	Jasa Pendidikan	8,14	-0,31	0,16	1,99	3,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,59	5,1	0,44	2,81	1,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,63	-7,64	0,51	10,87	3,9
Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap		2,27	-10,28	2,15	5,15	5,34

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas menurun dari 5,77 persen pada tahun 2022 menjadi 5,76 persen pada tahun 2023. Tidak ada perbedaan pada lapangan usaha jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas, hanya perbedaan pada sektor Industri Pengolahan.

Tabel 2. 16
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 Tanpa Migas (persen)

Kategori/Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,17	1,08	-1,49	1,74	2,55
B	Pertambangan dan Penggalian	4,07	1,63	5,13	-2,74	2,03
C	Industri Pengolahan	-77,65	1,83	5,33	1,19	7,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	2,91	4,11	3,12	7,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,91	5,83	4,99	6,17	6,17
F	Konstruksi	5,89	-4,2	5,53	3,09	6,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	-1,74	4,59	3,89	5,45
H	Transportasi dan Pergudangan	7,31	-29,89	2,4	89,11	6,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,67	-3,45	6,1	11,28	11,41
J	Informasi dan Komunikasi	18,38	9,1	2,74	1,02	9,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	2,1	0,53	0,55	1,96
L	Real Estate	6,72	-0,07	0,71	5,17	6,89
M,N	Jasa Perusahaan	10,19	-6,65	1,78	6,32	5,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,45	-1,02	-0,44	1,16	2,35
P	Jasa Pendidikan	8,14	-0,31	0,16	1,99	3,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,59	5,1	0,44	2,81	1,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,63	-7,64	0,51	10,87	3,9
Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap		5,37	-1,36	3,39	5,77	5,76

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024

PDRB Menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Cilacap berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, penyajiannya berbeda dengan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB Lapangan Usaha yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Untuk PDRB Kabupaten Cilacap menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah pertumbuhan PDRB secara keseluruhan yaitu yang di dalamnya termasuk komponen minyak.

Bila dilihat dari nilai total PDRB, nilai PDRB menurut Lapangan Usaha maupun PDRB menurut Pengeluaran memiliki besar yang sama seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 17
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	32.596.066	32.360.061	32.898.312	34.262.929	36.257.528
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	387.976	378.526	383.166	392.045	428.212
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.050.326	1.986.806	2.003.210	2.024.835	2.068.270
Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.151.201	14.804.528	15.625.774	16.035.753	16.714.619
Perubahan Inventori	353.583	478.064	328.612	375.836	391.515
Net Ekspor	49.788.147	40.003.599	40.705.514	43.586.445	45.979.597
PDRB	100.327.299	90.011.584	91.944.588	96.667.843	101.839.741

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2. 18
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	44.837.413	45.025.977	46.399.767	50.313.052	55.223.806
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	588.510	582.627	607.726	658.789	749.582
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.282.347	3.121.203	3.218.790	3.293.316	3.485.410
Pembentukan Modal Tetap Bruto	22.625.435	22.137.166	23.773.698	25.459.984	27.136.592
Perubahan Inventori	431.576	486.089	424.346	511.036	557.667
Net Ekspor	42.351.799	33.189.598	35.229.271	40.785.621	45.272.267
PDRB	114.117.080	104.542.660	109.653.598	121.021.798	132.425.324

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024

Guna melihat seberapa jauh peranan masing-masing komponen pengeluaran dalam pembentukan PDRB menurut Pengeluaran di suatu wilayah dari tahun ke tahun, dapat dilihat melalui struktur komponen PDRB pengeluaran. PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2023 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 41,70 persen, dan Net Ekspor sebesar 34,19 persen. Secara rinci data distribusi PDRB Kabupaten Cilacap pada tabel berikut :

Tabel 2. 19
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023 (persen)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	39,29	43,07	42,31	41,57	41,70
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,52	0,56	0,55	0,54	0,57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,88	2,99	2,94	2,72	2,63
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,83	21,18	21,68	21,04	20,49
Perubahan Inventori	0,38	0,46	0,39	0,42	0,42
Net Ekspor	37,11	31,75	32,13	33,70	34,19
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024

PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan tujuan ke-8 SDG’s yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

PDRB Per kapita, dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan kenaikan dari tahun ke tahun walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 mencapai 55.836,26 ribu rupiah untuk PDRB per kapita ADHB dan 46.818,73 ribu rupiah untuk PDRB per kapita ADHK. Adapun tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai 65.954,48 ribu rupiah untuk PDRB per kapita ADHB dan 50.721,32 ribu rupiah untuk PDRB per kapita ADHK.

Tabel 2. 20
PDRB Per kapita di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB per Kapita (Ribu Rp)		Pertumbuhan (persen)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2019	66.392,53	58.369,73	4,07	2,32
2020	53.753,39	46.281,85	-19,04	-20,71
2021	55.836,26	46.818,73	3,87	1,16
2022	60.857,12	48.615,50	8,99	3,84
2023	65.954,48	50.721,32	8,38	4,33

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

2) Inflasi

Perkembangan Laju Inflasi bulanan di tahun 2023, menunjukkan bahwa selama kurun waktu dua belas bulan laju inflasi di Kabupaten Cilacap cenderung mengalami fluktuasi. Di Kabupaten Cilacap terjadi beberapa kali inflasi yang cukup tinggi dari bulan-bulan lain pada tahun 2023, di bulan

Januari sebesar 0,45 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok kelompok makanan, minuman dan tembakau serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Penyebab utama terjadinya inflasi di Kota Cilacap adalah naiknya harga beras, rokok kretek, cabai rawit, cabai merah dan gula pasir. Sedangkan komoditas utama yang menahan laju inflasi di Kota Cilacap antara lain turunnya harga daging ayam ras, telur ayam ras, BBM, minyak goreng dan kangkung.

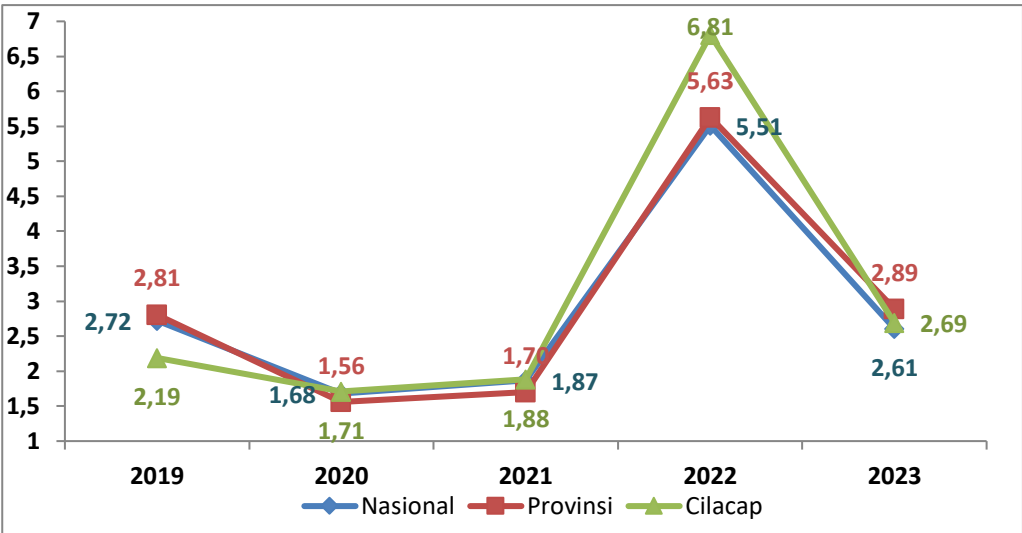
Tabel 2. 21
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Dirinci Per Bulan Tahun 2019-2023

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0,33	-0,03	0,27	0,66	0,45
Februari	-0,25	0,49	0,12	0,07	0,27
Maret	0,32	0,06	0,03	1,19	0,19
April	0,26	0,05	0,05	1,68	0,28
Mei	0,19	0,29	0,25	0,59	0,22
Juni	0,75	0,28	-0,25	0,71	0,05
Juli	0,14	-0,17	0,06	0,35	0,02
Agustus	0,33	-0,09	0,06	-0,55	0,04
September	-0,46	-0,03	-0,12	1,11	0,41
Oktober	-0,07	0,12	0,23	0,01	0,12
November	0,16	0,39	0,36	0,2	0,42
Desember	0,50	0,35	0,82	0,59	0,18
Inflasi Tahun Kalender	2,19	1,71	1,88	6,81	2,69

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2024

Inflasi di tahun 2023 tercatat 2,69 persen, lebih rendah dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 6,81 persen. Inflasi tahun kalender 2021 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender 2020, jika diasumsikan tidak ada kondisi ekonomi yang berubah secara ekstrim.

Inflasi Kabupaten Cilacap dari tahun 2019-2023 menunjukkan capaian yang fluktuatif seperti halnya nasional dan provinsi. Lebih rinci dapat kita lihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2024

Gambar 2. 12
Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

Apabila dibandingkan perkembangan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan laju inflasi Kabupaten Cilacap tahun 2023, laju Inflasi Kabupaten Cilacap berada diantara laju inflasi Nasional dan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar 2,61 persen dan 2,89 persen.

Tabel 2. 22
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dirinci Menurut Bulan Tahun 2023 (persen)

Bulan	Cilacap	Jawa Tengah	Nasional
Januari	0,45	0,32	0,34
Februari	0,27	0,29	0,16
Maret	0,19	0,19	0,18
April	0,28	0,28	0,33
Mei	0,22	0,22	0,09
Juni	0,05	0,03	0,14
Juli	0,02	0,2	0,21
Agustus	0,04	0,03	-0,02
September	0,41	0,41	0,19
Oktober	0,12	0,18	0,17
November	0,42	0,49	0,38
Desember	0,18	0,21	0,41
Inflasi Tahun Kalender	2,69	2,89	2,61

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

3) Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini dapat menunjukkan distribusi atau pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi. Koefisiennya berkisar antara angka 0 (pemerataan sempurna) dan angka 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata pembagian pendapatan dalam populasi tersebut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

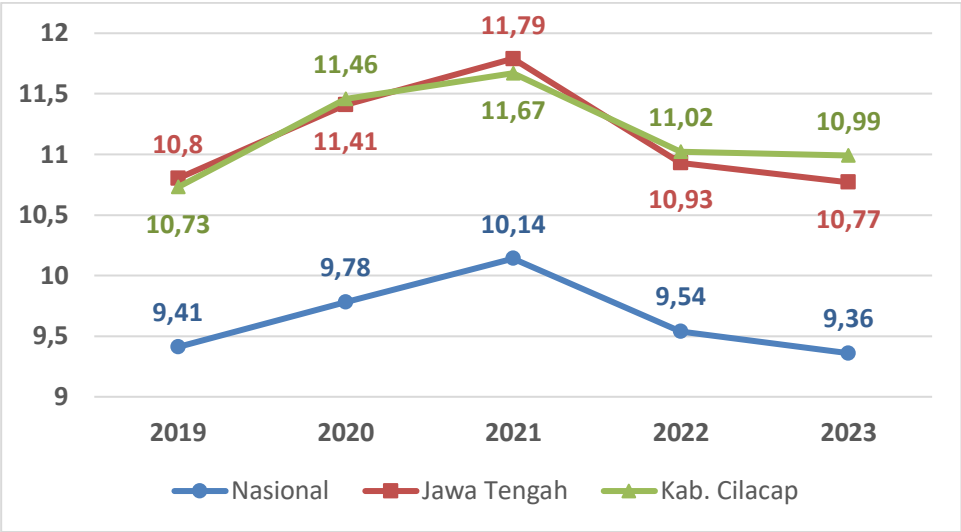
Gambar 2. 13
Indeks Gini Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Indeks Gini Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,364 jika dibandingkan tahun sebelumnya 2022 sebesar 0,356. Angka koefisien sebesar 0,364 tersebut menunjukkan bahwa persebaran pendapatan di Kabupaten Cilacap masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Dengan menurunnya indeks Gini tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dalam masyarakat Kabupaten Cilacap mengalami penurunan sejalan dengan tujuan ke-10 SDG's yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023, capaian Indeks Gini Kabupaten Cilacap tahun 2023 masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

4) Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap, tetapi pada tahun 2020 ada peningkatan karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 10,73 persen meningkat menjadi 11,46 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 11,67 persen. Namun, pada tahun 2022 Jumlah Penduduk Miskin berhasil mengalami penurunan menjadi 11,02 persen dan pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 10,99 persen. Meskipun menurun, namun masih diatas provinsi dan

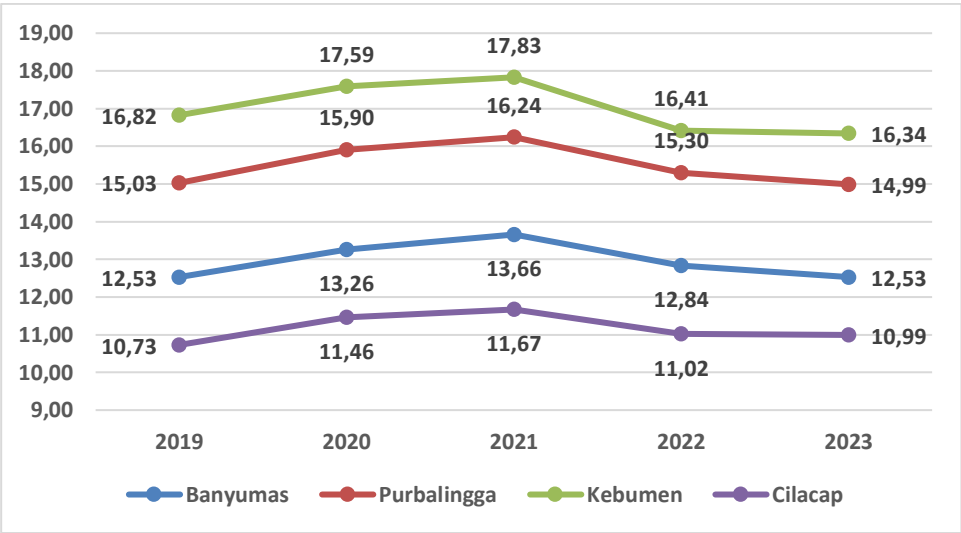
nasional, sehingga masih perlu diusahakan kembali langkah-langkah yang lebih optimal dalam hal penanggulangan kemiskinan.



Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2023

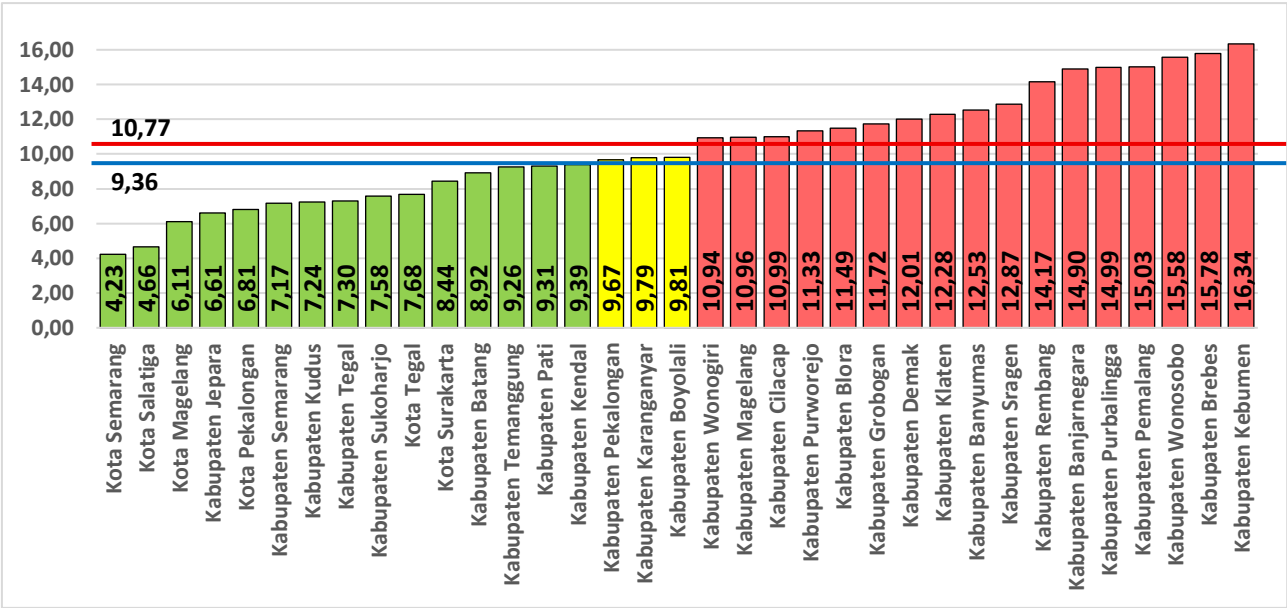
Gambar 2. 14
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap disandingkan dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 15
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023



Gambar 2. 16
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2023

Jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 23
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin
2019	185.176	10,73
2020	198.596	11,46
2021	201.710	11,67
2022	190.960	11,02
2023	191.000	10,99

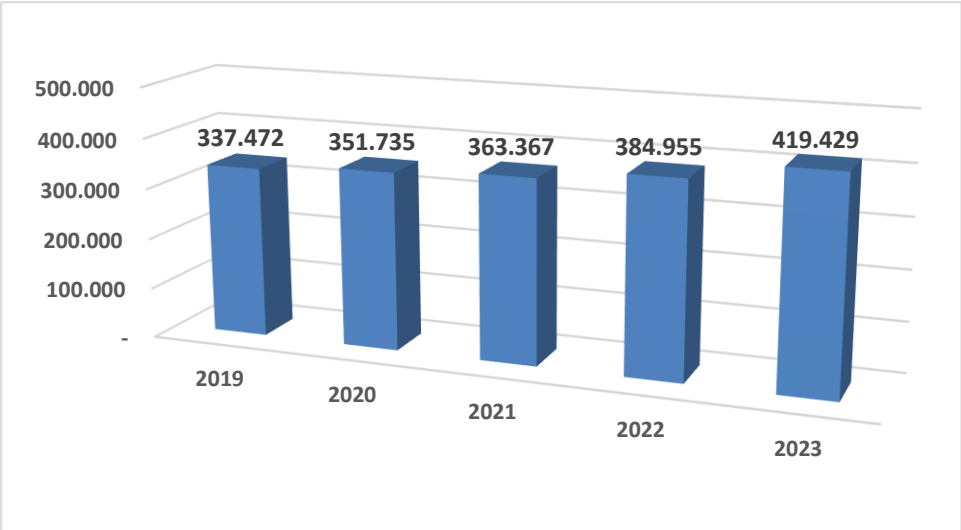
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Salah satu penyebab penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan tersebut adalah intervensi pemerintah dalam bentuk kenaikan dana bantuan sosial. Selain itu, pengendalian harga pangan yang relatif stabil dan pengendalian harga bahan bakar minyak turut berperan dalam menekan inflasi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

Garis Kemiskinan

Penghitungan angka kemiskinan tidak lepas dari penggunaan standar Garis Kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 419.429 per kapita per bulan atau sekitar Rp 13.981 per kapita per hari. Artinya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita

per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kondisi Garis Kemiskinan di Kabupaten Cilacap tahun 2019-2023 tergambar sebagai berikut :

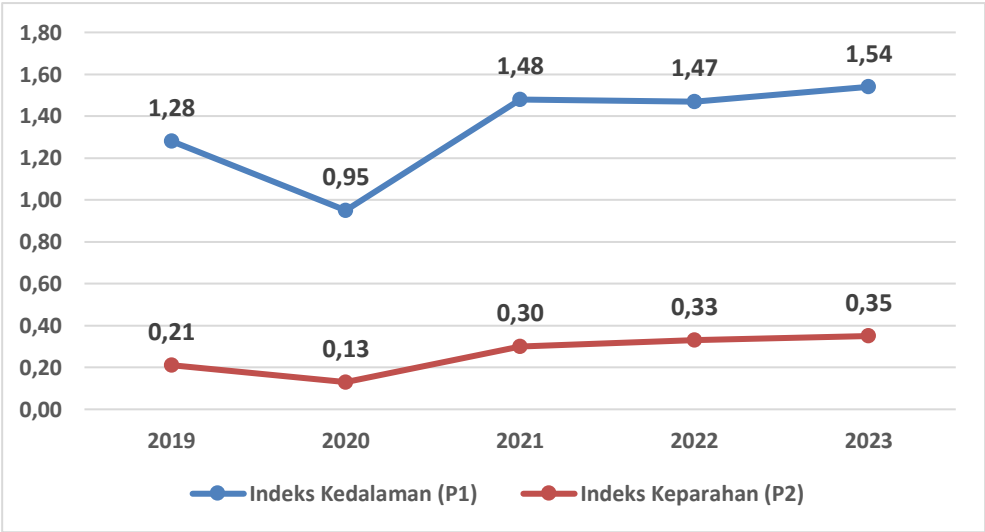


Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 17
Garis Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih mendalam terkait kondisi kemiskinan makro disuatu daerah, digunakan pula indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang capaiannya di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 18
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan P1 di Kabupaten Cilacap pada Tahun 2022 sebesar 1,47 meningkat di Tahun 2023 menjadi 1,54. Hal ini menunjukkan

bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 dibanding Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 0,33 menjadi 0,35 yang artinya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Cilacap.

Kemiskinan Ekstrem

Sesuai Kepmenko PMK Nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, pada tahun 2023 dan tahun 2024, Kabupaten Cilacap menjadi lokus penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah. Pada tahun 2023 sudah dilakukan intervensi penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem melalui perumusan dan pemanfaatan anggaran serta konsolidasi program dan kegiatan, baik yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan pendapatan, yang menysasar kelompok miskin ekstrem yang tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan.

Tabel 2. 24
Angka Kemiskinan Ekstrem dan Penduduk Miskin Ekstrem
di Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap
Tahun 2021-2023

Prov/Kab	Angka Kemiskinan Ekstrem			Penduduk Miskin Ekstrem		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nasional	4	1,74	1,12	10.860.000	4.190.000	3.300.000
Jawa Tengah	2,28	1,97	1,11	795.506	689.714	391.920
Cilacap	1,2	2,19	1,25	20.701	37.958	21.790

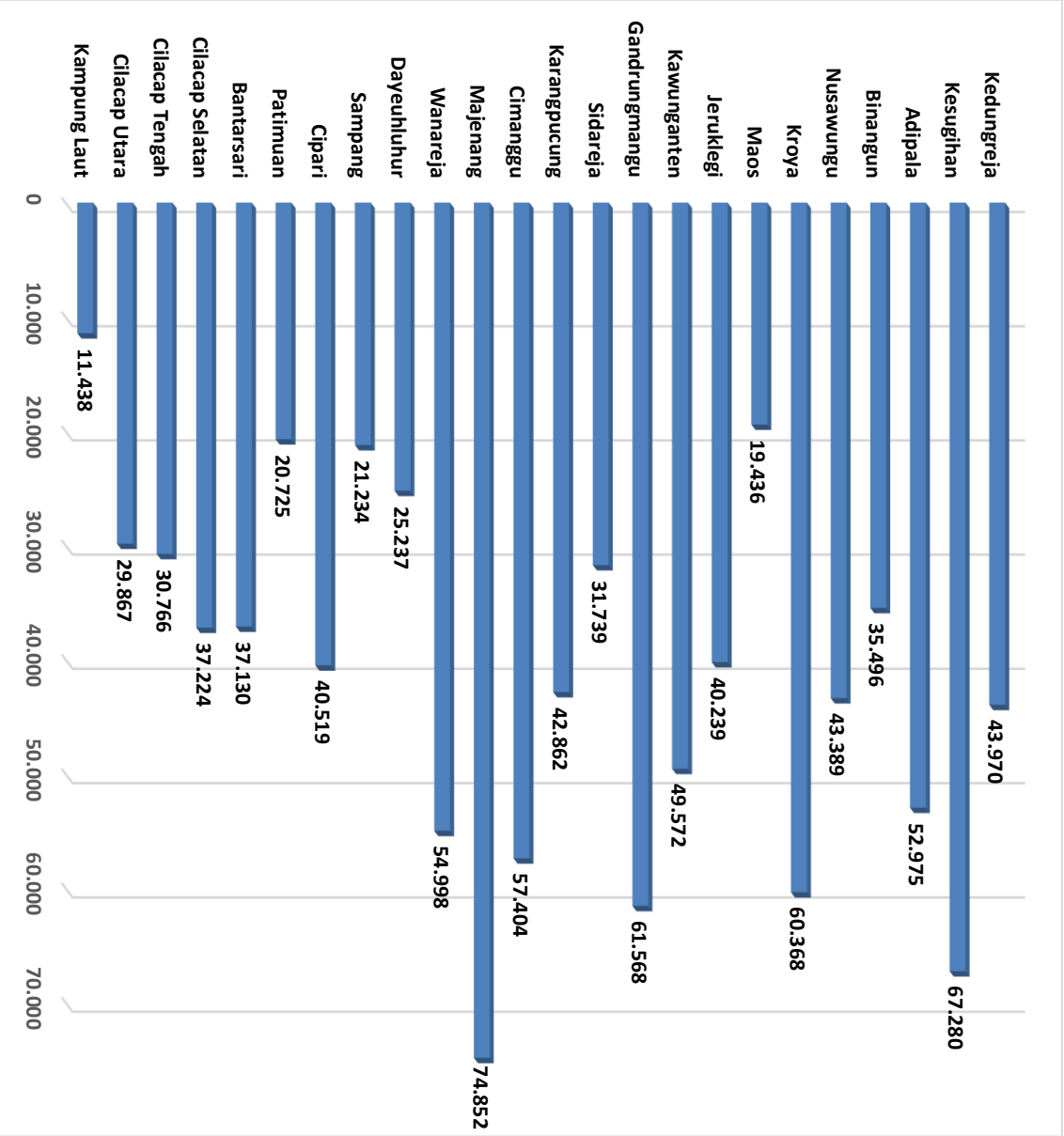
Sumber : BPS Tahun 2023, KemenkoPMK Tahun 2024

Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebesar 1,2 persen atau 20.701 jiwa naik menjadi 2,19 persen atau 37.958 jiwa pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023 berhasil diturunkan menjadi 1,25 persen atau menjadi 21.790 jiwa. Hal ini karena adanya intervensi ke sasaran jiwa miskin dari hasil verifikasi dan validasi data yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap guna penurunan angka kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Data P3KE Tahun 2022 Kabupaten Cilacap jumlah penduduk miskin ekstrem pada desil 1 sebesar 59.524 jiwa. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 130.1/47 tanggal 17

Januari 2023 Perihal Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (termasuk Kemiskinan Ekstrem) Di Jawa Tengah ditetapkan 37 Desa pada 15 Kecamatan sebagai Prioritas sasaran program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) pada tahun 2023. Pemetaan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilakukan sampai level desa dengan menggunakan metode kuadran persandingan jumlah individu desil 1 Data P3KE dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Sehingga seluruh program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 difokuskan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem target 0 (nol) persen, dengan berpedoman pada 3 strategi yaitu penurunan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Jumlah dan persentase penduduk miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Cilacap yang menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun sejalan dengan tujuan ke-1 SDG's yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

Persebaran Penduduk Miskin

Merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, di Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin pada Desil 1 hingga Desil 4 sebanyak 990.288 jiwa. Dari data tersebut, Kecamatan Majenang merupakan Kecamatan yang memiliki penduduk miskin terbanyak berjumlah 74.852 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kecamatan Kampunglaut berjumlah 11.438 jiwa.

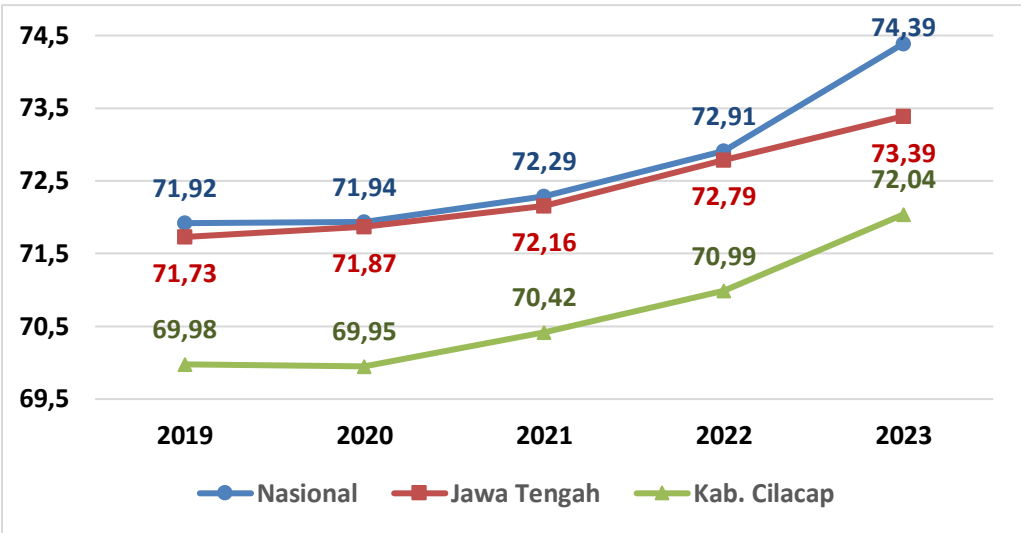


Sumber : Data P3KE, Tahun 2023

Gambar 2. 19
Persebaran Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2023

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

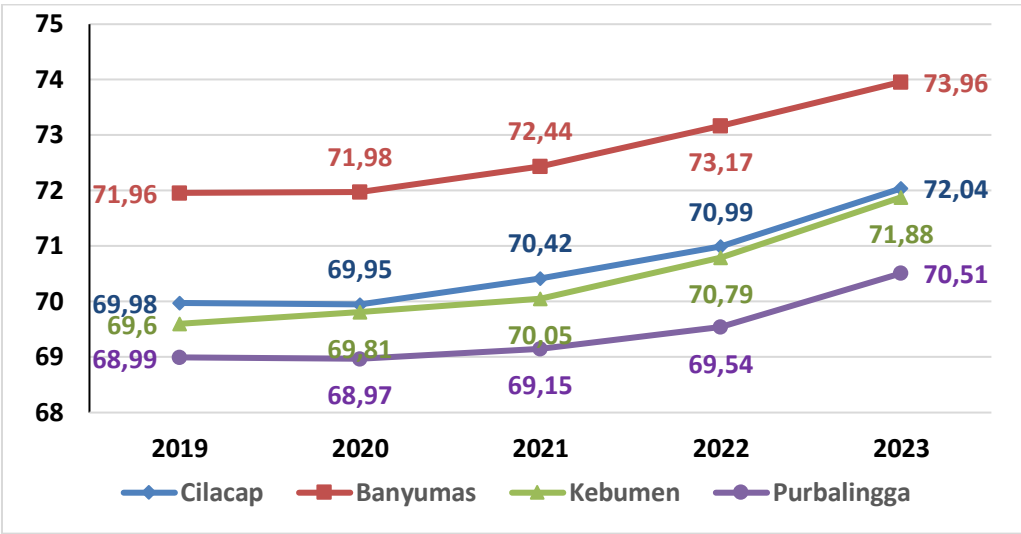
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun ada penurunan pada tahun 2020. Tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Cilacap sebesar 69,95 meningkat menjadi 70,42 pada tahun 2021 dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 70,99 meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 72,04. Walaupun capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2019-2023, akan tetapi capaian tersebut masih di bawah capaian Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 20
Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Sedangkan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

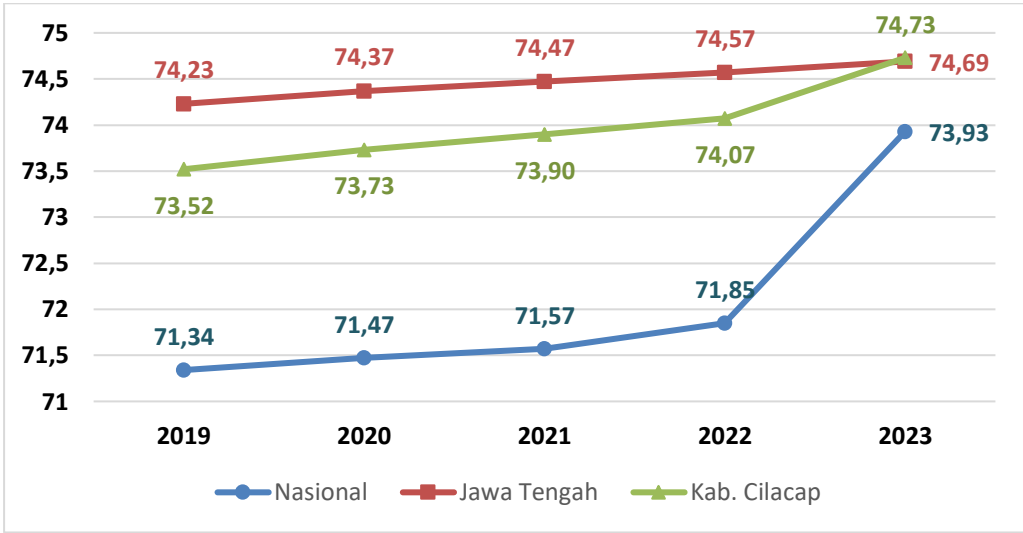
Gambar 2. 21
Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023

Sementara itu, indeks pembentuk IPM Kabupaten Cilacap meliputi umur harapan hidup (tahun); harapan lama sekolah (tahun); rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita (rupiah) diuraikan di bawah ini.

a) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Cilacap periode tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-3 SDG's yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Mulai tahun 2023, perhitungan UHH menggunakan metode Long

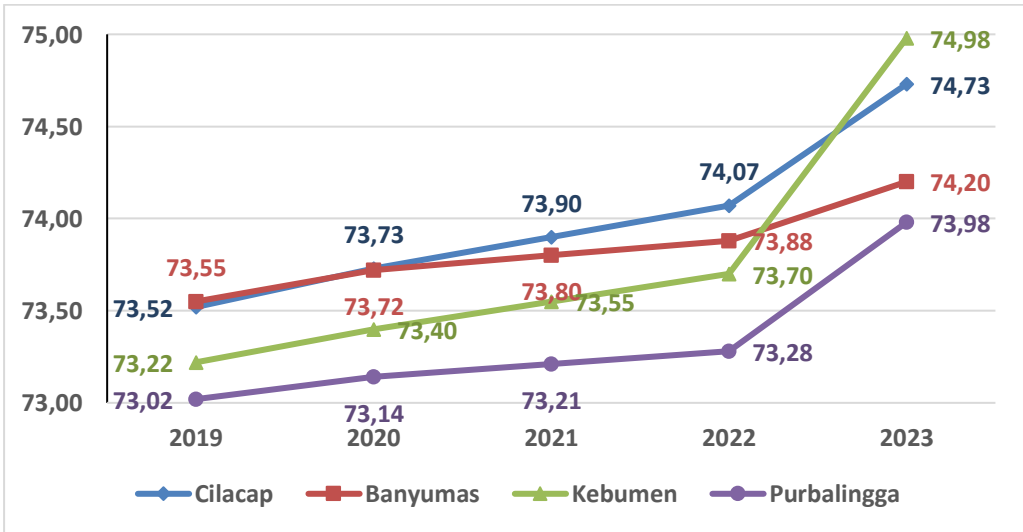
Form Sensus Penduduk yang merupakan pembaharuan data penduduk dengan pertanyaan lebih detail kepada seluruh responden. Pendataan Long Form Sensus Penduduk dilakukan untuk mendapatkan parameter demografi yang akurat dimana pendataannya dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data yang lebih lengkap tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi juga terkait pendidikan, disabilitas, maupun perumahan. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2023 capaian Kabupaten Cilacap berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023
*2023 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020

Gambar 2. 22
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Sedangkan UHH Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



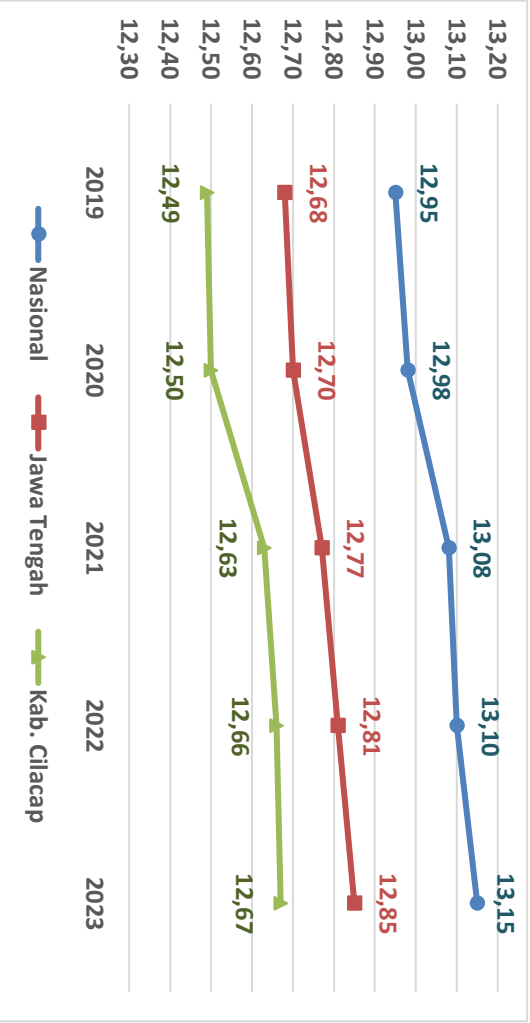
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023
*2023 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020

Gambar 2. 23
Umur Harapan Hidup Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023 (Tahun)

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perkembangan HLS Kabupaten Cilacap terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019 harapan lama sekolah mencapai 12,49 tahun meningkat menjadi 12,67 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional capaian harapan lama sekolah Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

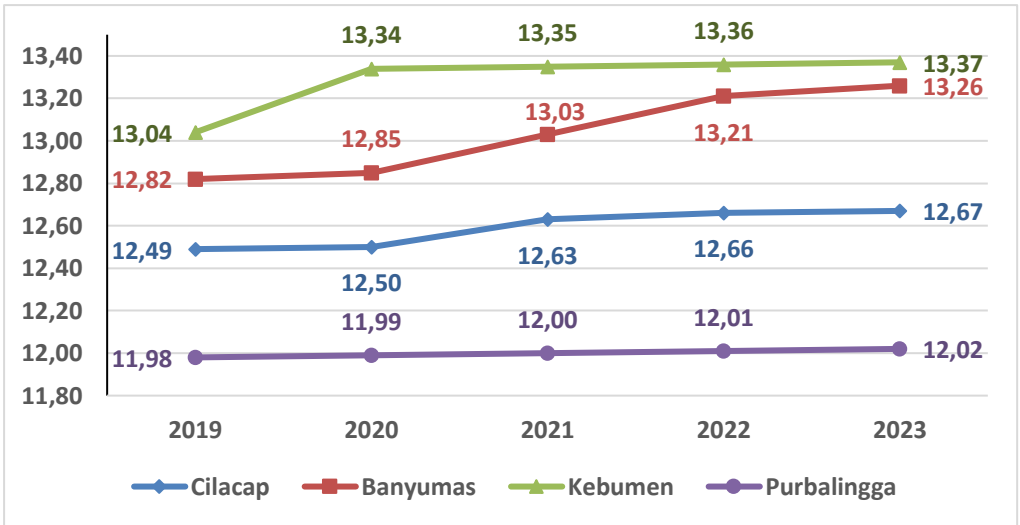


Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 24

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Sedangkan HLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



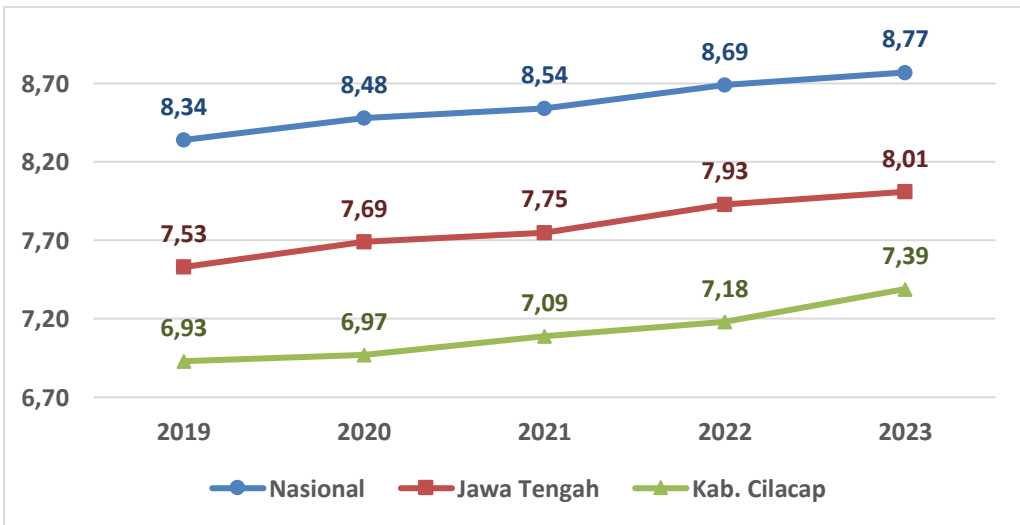
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 25
Harapan Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga
Tahun 2019-2023 (Tahun)

c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

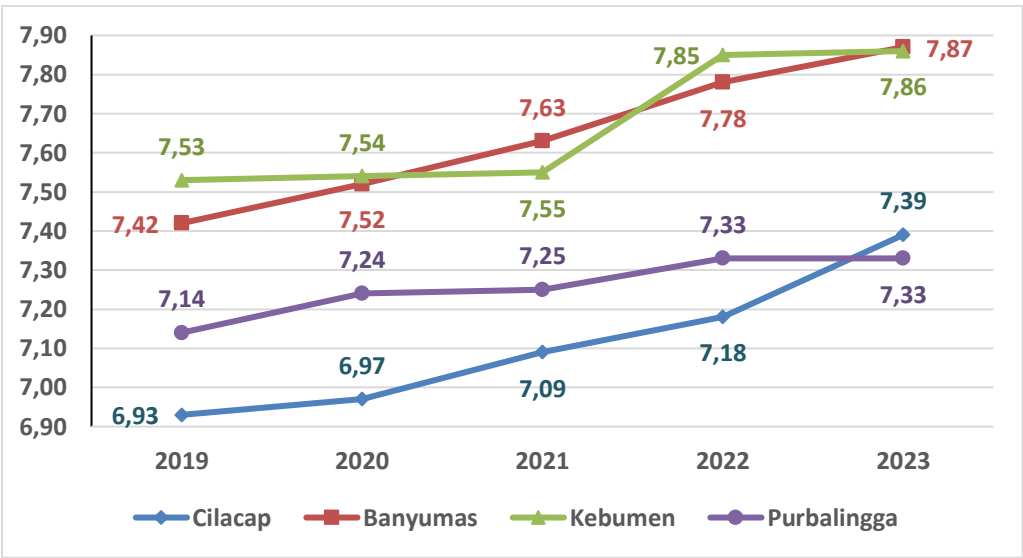
Perkembangan RLS Kabupaten Cilacap periode 2019-2023 mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-4 SDG's yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pada tahun 2019 sebesar 6,93 tahun meningkat menjadi 7,39 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian RLS tahun 2019-2023 angka capaian Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 26
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Sedangkan RLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :

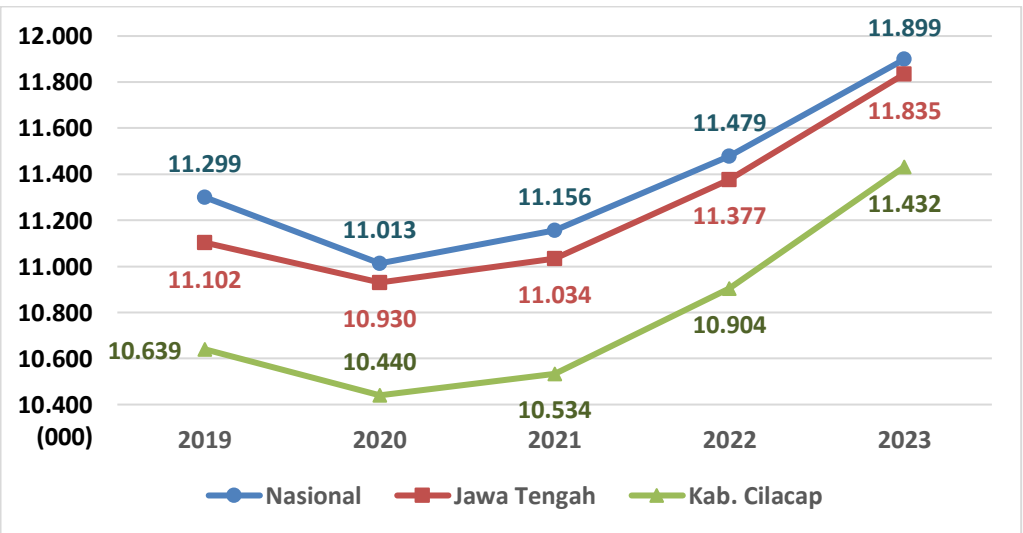


Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 27
Rata-rata Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023 (Tahun)

d) Pengeluaran Per Kapita

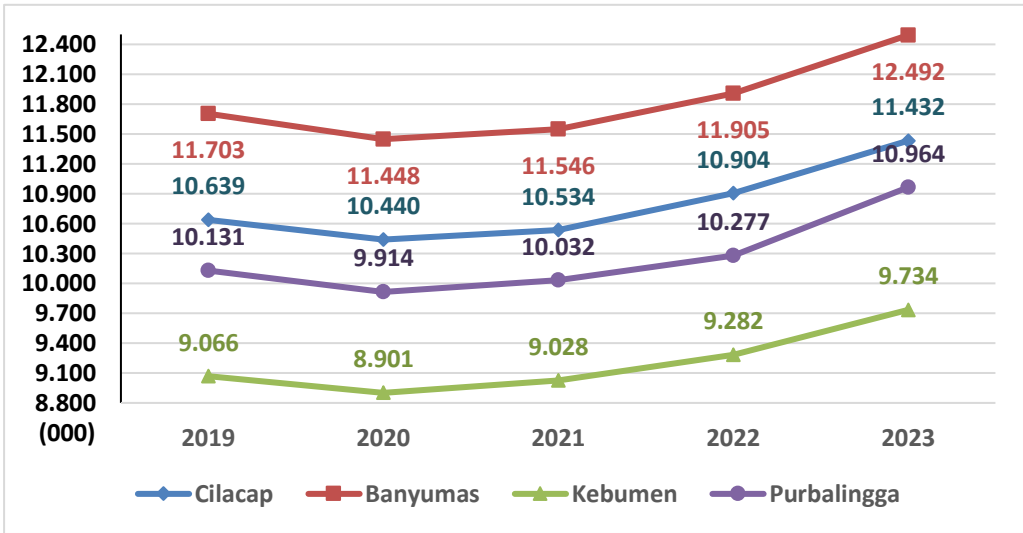
Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup positif sejak periode 2019-2023, pada tahun 2019 pengeluaran per kapita (per tahun) sebesar Rp 10.639 (ribu) meningkat menjadi Rp 11.432 (ribu) pada tahun 2023 walaupun tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 28
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2019-2023 (Ribuan Rupiah)

Sedangkan pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :

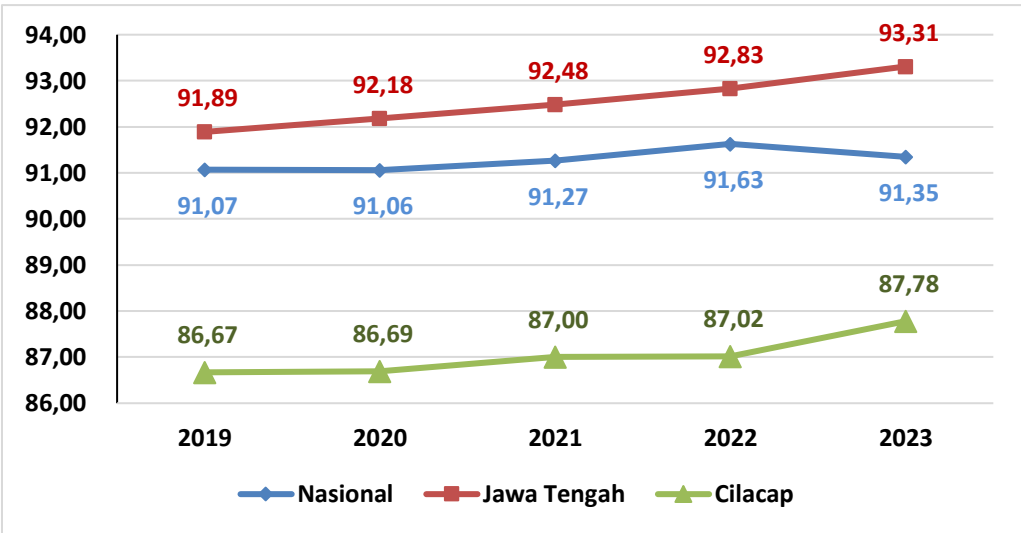


Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 29
Pengeluaran per Kapita Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga
Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan indikator IPM yang dipilah laki-laki dan perempuan, hal ini penting untuk mengetahui ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk menggambarkan ketimpangan gender diketahui dari skor nilai IPG dengan nilai 100. Nilai IPG semakin dekat dengan nilai 100 maka ketimpangan gender semakin rendah dan semakin rendah nilai maka ketimpangan gender semakin tinggi, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan sumbangan ekonomi rumah tangga (ribu rupiah) dari laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2019-2023 mengalami tren positif. Angka IPG Kabupaten Cilacap dari tahun 2018 sebesar 86,53, meningkat menjadi 87,02 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata IPG Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2022, capaian IPG Kabupaten Cilacap masih di bawah IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83 dan IPG Nasional sebesar 91,63. Capaian IPG Kabupaten Cilacap sesuai dengan tujuan ke-5 SDG's yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.



Sumber : BPS Tahun 2024

Gambar 2. 30
Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan lama sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Besarnya Sumbangan Pendapatan. Akan tetapi, semua indikator ini dilihat berdasarkan jenis kelaminnya. Seperti IPM, mulai tahun 2023, perhitungan UHH menggunakan metode Long Form Sensus Penduduk yang merupakan pembaharuan data penduduk dengan pertanyaan lebih detail kepada seluruh responden. Pendataan Long Form Sensus Penduduk dilakukan untuk mendapatkan parameter demografi yang akurat dimana pendataannya dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data yang lebih lengkap tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi juga terkait pendidikan, disabilitas, maupun perumahan.

Tabel 2. 25
Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	UHH		HLS		RRLS		Pengeluaran Per Kapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	2019	71,58	75,35	12,93	12,48	7,42	6,47	15.697	7.242
2.	2020	71,85	75,56	12,94	12,49	7,46	6,49	15.313	7.156
3.	2021	72,05	73,75	13,07	12,58	7,47	6,76	15.560	7.200
4.	2022	72,25	75,94	13,08	12,65	7,66	6,77	15.956	7.442
5.	2023	72,93	77,46	13,09	12,66	7,87	6,97	16.507	7.781

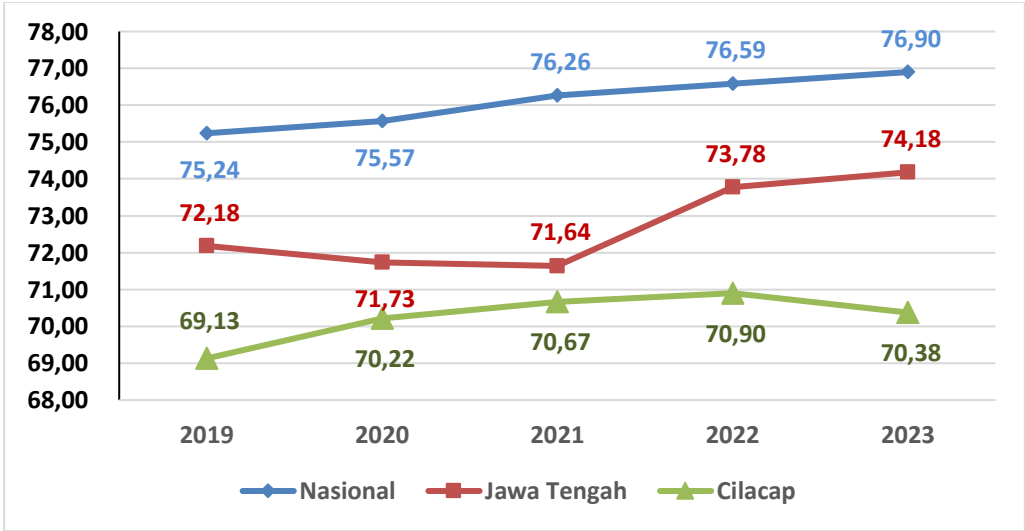
Sumber : BPS Tahun 2024

3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dipergunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemberdayaan kaum perempuan, terutama dari aspek keterwakilan perempuan di parlemen, persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja dengan keahlian/keterampilan (administrasi,

manajer dan teknisi) serta sumbangan ekonomi rumah tangga dari kaum perempuan.

IDG Kabupaten Cilacap selama kurun waktu tahun 2019-2022 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, akan tetapi tahun 2023 terjadi penurunan. Angka IDG Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 69,13 meningkat menjadi 70,38 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, IDG Kabupaten Cilacap masih berada di bawah dari angka Provinsi Jawa Tengah 74,18 dan Nasional 76,90.



Sumber : BPS Tahun 2024

Gambar 2. 31
Perkembangan IDG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Penurunan IDG pada tahun 2023 terjadi karena indikator komposit IDG mengalami penurunan yaitu indikator perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Adapun untuk mengetahui komposit pembentuk IDG Kabupaten Cilacap tahun 2019-2023 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 26
Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

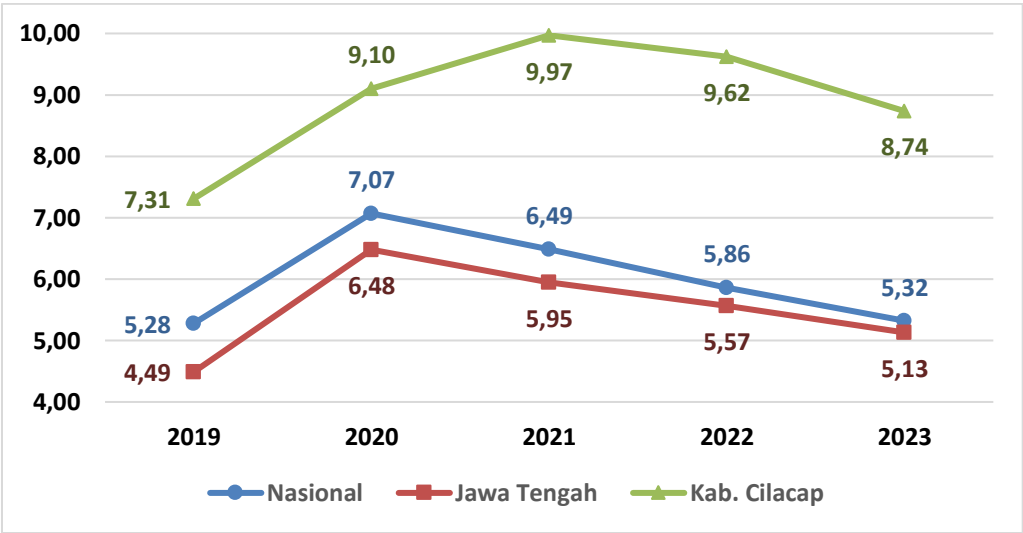
No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Keterlibatan perempuan di parlemen	%	24	26	26	26	26
2	Perempuan sebagai tenaga Profesional	%	45,11	43,97	45,69	55,57	40,97
3	Sumbangan pendapatan perempuan	%	26,35	26,44	26,83	26,48	26,42
IDG		%	69,13	70,22	70,67	70,90	70,38

Sumber : BPS Tahun 2024

4) Ketenagakerjaan

a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

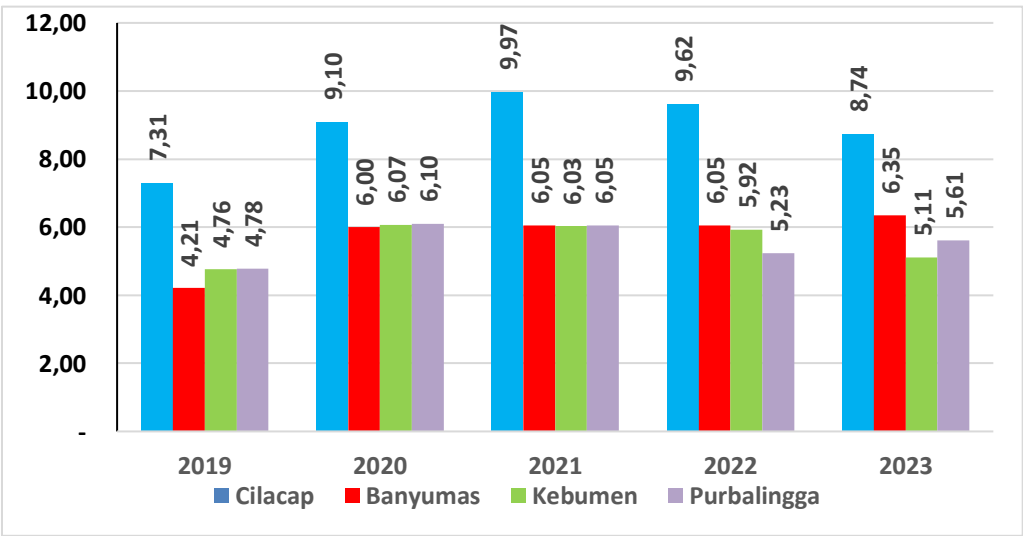
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,74 persen. Dampak pasca pandemi Covid-19 mulai ada kelonggaran kegiatan masyarakat di tempat umum maupun tempat kerja sehingga aktivitas ekonomi penduduk mulai menggeliat, terlihat dari semakin ramainya UMKM yang beroperasi, proyek pembangunan juga sudah menggeliat serta konsumsi masyarakat juga semakin meningkat, sehingga berdampak pula pada penurunan tingkat pengangguran.



Sumber : BPS Tahun 2023

Gambar 2. 32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

TPT Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :

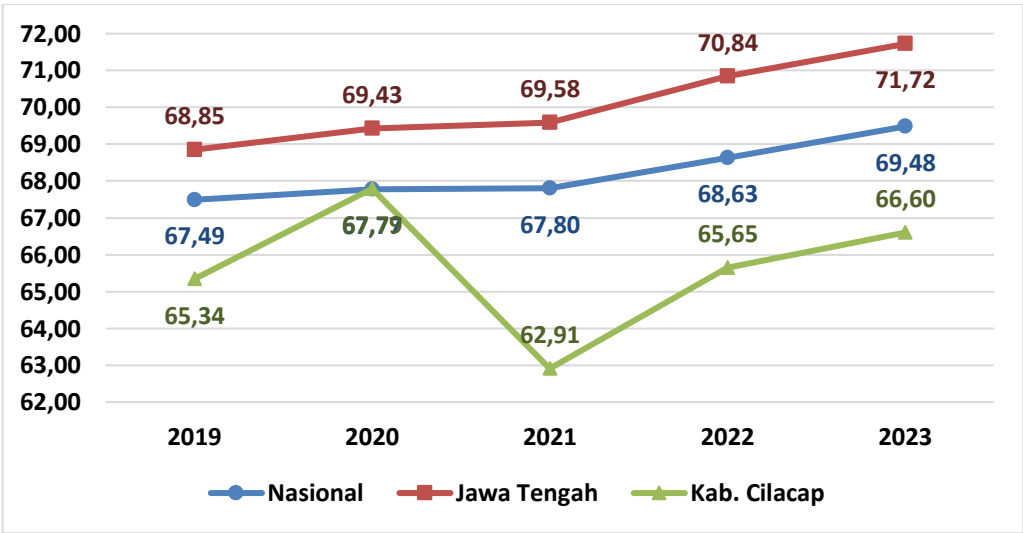


Sumber : BPS Tahun 2023

Gambar 2. 33
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

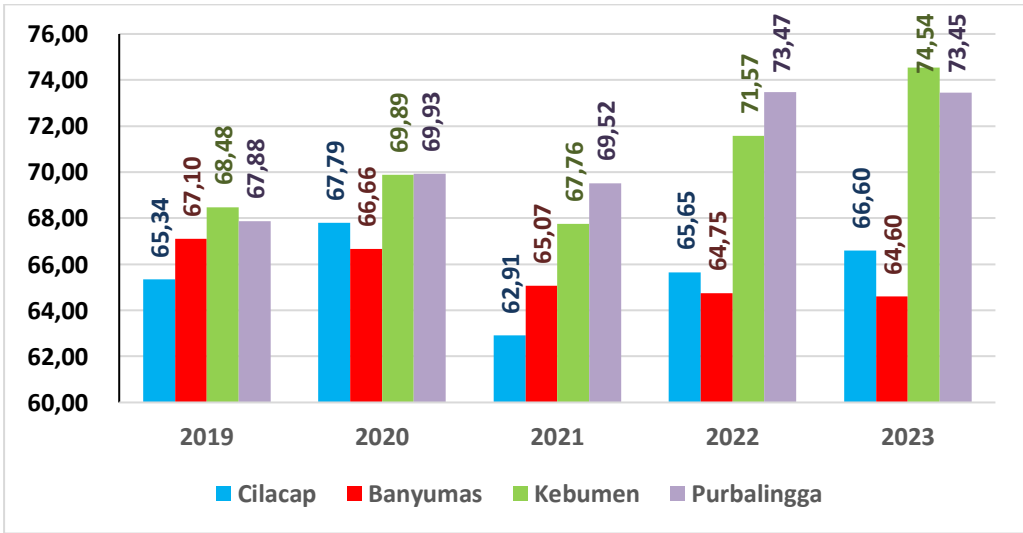
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cilacap menunjukkan tren fluktuatif, pada tahun 2019 capaian TPAK Kabupaten Cilacap sebesar 65,34 persen mengalami peningkatan menjadi 66,60 persen pada tahun 2023. Kondisi tahun 2021 menjadi kondisi terendah selama kurun waktu 2019-2023. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap Tengah tahun 2023 mencapai 1.050.000 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2023 sebesar 955.160 orang.



Sumber : BPS Tahun 2023

Gambar 2. 34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2019-2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Hasil pembangunan untuk urusan pendidikan di Kabupaten Cilacap periode tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan untuk rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2023 rata mencapai 7,39 tahun artinya rata-rata penduduk Kabupaten Cilacap berumur 15 tahun keatas berpendidikan SMP kelas 1 dan diperkirakan akan semakin bertambah dengan meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs yang mencapai 97,84 persen. Untuk harapan lama sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang menjadi 12,67 tahun di tahun 2023.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dapat dilihat dari capaian jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD serta jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang mencapai 100 persen.

Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar untuk memudahkan akses dan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik bagi penduduk dalam dapat dilihat dari jumlah sekolah baik SD maupun SMP yang terdapat di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap yaitu jumlah SD/MI sebanyak 1.233 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 270 sekolah. Prioritas peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Cilacap yang masih perlu diperhatikan adalah terkait dengan persentase SD yang memiliki sarpras sesuai SNP di tahun 2023 baru mencapai 36,78 persen dan persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP sebesar 50 persen.

Kemudian jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cilacap dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023) cenderung stagnan, dari 30 menjadi 32. Selama 5 tahun terdapat penambahan jumlah PKBM sebanyak 2 satuan pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang mengalami kendala keterbatasan

sarana dan prasarana untuk menanggulangi permasalahan pemerataan dan keterbatasan jumlah PKBM di Kabupaten Cilacap.

Untuk lebih jelasnya hasil pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6,93	6,97	7,09	7,18	7,39
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,49	12,50	12,63	12,66	12,67
3	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100	100	100
4	% PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina	%	62,60	65,80	67,08	68,18	69,31
5	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100
6	% SD yang memiliki sarpras sesuai SNP	%	27,81	28,32	28,81	33,92	36,79
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,26	95,15	94,61	96,06	96,11
8	% SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP	%	42,21	43,88	45,88	47,88	50
9	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang erpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100
10	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	%	89,20	89,03	91,07	91,19	94,68
	TK	%	64,96	69,54	66,89	64,87	61,68
	SD/Sederajat	%	90,66	91,83	93,70	97,98	95,30
	SMP/Sederajat	%	93,84	89,97	94,50	98,89	97,35
11	Rasio Guru terhadap Siswa						
	SD/Sederajat		19,00	17,00	16,00	16,00	18,00
	SMP/Sederajat		15,00	16,00	15,00	16,00	16,00
12	Jumlah Sekolah						
	SD/MI	unit	1.224	1.225	1.227	1.232	1.234
	SMP/MTs	unit	273	270	272	269	270
13	Angka Partisipasi Murni						
	SD/Sederajat	%	90,95	92,48	87,37	86,57	86,30
	SMP/Sederajat	%	73,12	72,93	73,44	71,00	72,89
14	Angka Partisipasi Kasar						
	SD/Sederajat	%	104,92	104,18	93,93	94,27	93,56
	SMP/Sederajat	%	101,30	101,15	93,57	91,40	91,96
15	Angka Putus Sekolah						
	SD/Sederajat	%	0,082	0,03	0,06	0,09	0,03
	SMP/Sederajat	%	0,31	0,18	0,28	0,18	0,16
16	Jumlah PKBM	unit	30	31	32	31	32

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap, 2024

Keberhasilan capaian pembangunan khususnya pada indikator SPM dikarenakan karena adanya upaya terus menerus yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan sehingga mampu meningkatkan capaian kemampuan literasi pada jenjang SD menjadi 77,31 naik 14,99 dari tahun sebelumnya, capaian kemampuan literasi SMP menjadi 76,92 naik 9,97 dari tahun sebelumnya, kemudian capaian peningkatan numerasi pada jenjang SD 61,45 naik 29,64 dari tahun sebelumnya, numerasi jenjang SMP menjadi 55,22 naik 11,31 dari tahun sebelumnya serta peningkatan proporsi guru penggerak pada angkatan 9 dengan total peserta 302 guru naik 149 peserta dari angkatan sebelumnya. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan adanya program ramah anak yang berkaitan dengan iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas, serta adanya grup wali murid yang dimanfaatkan untuk saling memotivasi. Dengan adanya *live skill* pada program Dikmas menjadikan anak usia sekolah yang putus sekolah bisa langsung lanjut program paket.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Cilacap juga diarahkan untuk mencapai tujuan ke-4 SDG's yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

2) **Kesehatan**

Status Kesehatan Ibu Dan Anak

Dalam kesehatan ibu dan anak hal yang akan dibahas beberapa indikator perkembangan kesehatan dan gizi pada ibu dan anak.

Tabel 2. 28
Perkembangan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	16	14	45	14	11
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	155	132	150	152	149
3.	Angka Kematian Balita (AKABA)	kasus	190	152	176	175	159
4.	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (<i>stunting</i>)	Kasus	6.152	6.328	7.641	5.984	4.252
5.	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi	Kasus	49	53	49	37	8.121
6.	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	69,72	100	89,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2024

AKI mengalami penurunan dimana tahun 2021 sebesar 163,44 per 100.000 KH (45 kasus), tahun 2022 sebesar 52, 92 per 100.000 KH (14 kasus) dan tahun 2023 sebesar 43,68 per 100.000 KH (11 kasus). AKB tiga tahun terakhir fluktuatif, tahun 2021 sebesar 5,45 per 1.000 KH (150 kasus), tahun 2022 sebesar 5,74 per 1.000 KH (152 kasus) dan tahun 2023 sebesar 5,84

per 1.000 KH (149 kasus), sehingga dari jumlah kasus mengalami penurunan. AKABA mengalami penurunan, tahun 2021 sebesar 6,39 per 1.000 KH (176 kasus), tahun 2022 sebesar 6,62 per 1.000 KH (175 kasus), dan tahun 2023 menurun menjadi 6,23 per 1.000 KH (159 kasus).

Faktor pendorong penurunan jumlah kasus kematian ibu, bayi, dan anak balita yaitu seluruh ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan anak balita mendapatkan akses pelayanan dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar. Semua ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal, yaitu pelayanan kunjungan baru ibu hamil dengan mendapatkan vaksin Tetanus Difteri, Tablet Tambah Darah, Deteksi Resiko Ibu Hamil, USG, Edukasi, dan Konseling. Semua ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, yaitu persalinan normal dilakukan di fasyankes primer, dan persalinan komplikasi dilakukan di fasyankes rujukan. Semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar minimal 3 kali selama periode neonatal. Semua anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu pra skrining perkembangan, deteksi dini tumbuh kembang, vitamin A, dan imunisasi dasar lengkap.

Namun demikian masih ada beberapa faktor penghambat dalam lingkup kesehatan ibu anak antara lain banyaknya jumlah sasaran yang harus dilayani, luasnya wilayah kerja yang harus dijangkau oleh pelayanan kesehatan, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya untuk mengakses pelayanan kesehatan sesuai standar. Upaya atau strategi untuk mengatasinya yaitu penguatan pelayanan primer untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sampai di tingkat desa/kelurahan/dusun melalui Posyandu.

Permasalahan gizi masyarakat digambarkan melalui balita stunting, balita gizi buruk, dan balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi. Jumlah kasus balita stunting tahun 2021 (7.641 kasus), tahun 2022 (5.948 kasus) menurun menjadi 4.252 kasus pada tahun 2023. Jumlah balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi tahun 2021 (49 kasus), tahun 2022 (37 kasus), namun meningkat pada tahun 2023 (8.121 kasus). Kesenjangan jumlah kasus tahun 2023 disebabkan adanya pergantian metode pengukuran masalah gizi pada anak balita. Pada tahun sebelumnya pengukuran dilakukan secara manual dengan keluaran data balita gizi buruk, sedangkan tahun 2023 menggunakan metode Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (aplikasi e-PPGBM). Keluaran data

e-PPGBM merupakan jumlah balita kekurangan gizi sebanyak 8.121 kasus, dimana 481 kasus di antaranya merupakan kasus balita gizi buruk.

Faktor pendorong menurunnya permasalahan gizi masyarakat (*stunting*, gizi buruk, dan gizi rendah) yaitu adanya konvergensi yang kolaboratif dan integratif serta dukungan multi sektoral dan swasta, berupa penyampaian informasi dan edukasi tentang pentingnya asupan gizi yang baik, pemberian makanan pendamping ASI, pemberian makanan tambahan dan vitamin, pemantauan tumbuh kembang anak, dan akses terhadap fasilitas sanitasi lingkungan. Meskipun demikian, masih ada faktor penyebab peningkatan balita dengan kekurangan gizi karena menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan sensitifitas lebih tinggi dibandingkan dengan metode manual. Dimana keluaran data dari e-PPGBM adalah balita dengan berat badan rendah. Upaya atau strategi yang terus dilakukan sejalan dengan tujuan ke-2 SDG's yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan status gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

Pengendalian Penyakit

Pantauan desa/kelurahan mengalami kejadian penyakit dan atau berpotensi KLB, dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam terus dilakukan. Berdasarkan pantauan yang dilaksanakan berikut adalah perkembangan dari Tahun 2019-2023 terhadap kejadian tuberkulosis, malaria DBD, leptospirosis, HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral, kanker serviks, dan hipertensi.

Tabel 2. 29
Perkembangan Pantauan Kejadian Penyakit di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	100	100	100
2	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus (CNR)	Per 100.000 penduduk	211	141	123	194	200,27
3	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral	%	69,1	100	93,26	81,65	90,41
4	Angka kejadian malaria	Per 1.000 penduduk	0,018	0,01	0,0051	0,01035	0,01
5	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 penduduk	24,1	25,71	24,3	69,53	5,16
6	Jumlah kasus leptospirosis	Kasus	11	34	37	28	37
7	Cakupan kanker serviks	%	7,57	1,3	4,26	4,7	13,59
8	Cakupan DM	%	82,71	71,19	98,45	97,24	102,53
9	Cakupan hipertensi	%	12,16	15,34	47,88	96,84	99,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2023

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) <24 jam tahun 2021 (100 persen), 2022 (100 persen) dan

tahun 2023 (100 persen), artinya PE sdh dilakukan dalam waktu <24 jam pada setiap Desa/Kelurahan yang berpotensi/mengalami KLB penyakit (respon cepat penyakit). Faktor pendorong tercapainya target PE yaitu maksimalnya Tim Gerak Cepat dengan koordinasi yang baik antara jaringan kesehatan (puskesmas, pustu, pusling, dan Bidan Desa), jejaring kesehatan (RS, Poliklinik Kesehatan, Apotek, Laboratorium, dan Faskes Lainnya), dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Hal lain sebagai penghambat yaitu masih terjadi keterlambatan pelaporan kejadian penyakit kepada Puskesmas/Dinas Kesehatan.

Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/CNR) mengalami peningkatan, tahun 2021 (123 per 100.000 penduduk), 2022 (194 per 100.000 penduduk), dan tahun 2023 (200,27 per 100.000 penduduk). Faktor penyebab peningkatan kasus tuberkulosis berkaitan dengan hasil pelacakan kasus secara aktif pada kelompok-kelompok terduga tuberkulosis yang merupakan penduduk dengan kontak erat terhadap penderita tuberkulosis. Upaya yang dilakukan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tanda dan gejala penyakit tuberkulosis, pentingnya pemeriksaan kesehatan segera bagi terduga tuberkulosis, dan pengobatan tuntas penderita tuberkulosis sampai sembuh.

Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral ada kecenderungan menurun, yaitu tahun 2021 (93,26 persen), tahun 2022 (81,65 persen), dan tahun 2023 (90,41 persen). Faktor penyebab menurunnya angka ini antara lain belum semua penderita HIV terbuka dan bekerjasama dalam mengakses pelayanan pengobatan HIV (menutup diri/malu). Upaya yang dilakukan dengan mendekati dan mengajak pada kelompok/komunitas bagian masyarakat yang mempunyai resiko tinggi terinfeksi HIV (PSK, pengguna obat terlarang dengan jarum suntik, LSL, dll), untuk diberikan edukasi dan pengobatan secara tuntas.

Angka kejadian malaria sedikit mengalami penurunan, tahun 2021 (0,0051 per 1.000 penduduk), tahun 2022 (0,01035 per 1.000 penduduk), dan tahun 2023 (0,01 per 1.000 penduduk). Faktor penyebab masih adanya kasus malaria karena kasus malaria yang ada merupakan kasus yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cilacap (kasus impor), yang terjadi di daerah perbatasan sebagai pendatang/pekerja musiman. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kerjasama lintas batas kabupaten/provinsi dalam penanganan penyakit menular.

Jumlah kasus leptospirosis relatif stabil walaupun sempat berkurang, yaitu tahun 2021 (37 kasus), menurun pada tahun 2022 (28 kasus), dan tahun 2023 (37 kasus). Masih adanya kasus leptospirosis di Kabupaten Cilacap berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dimana praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat. Leptospirosis akan berkembangbiak pada lingkungan yang kotor, dimana banyak sampah sisa makanan yang tidak dikelola dengan baik, dan akan menjadi tempat perindukan tikus pembawa bakteri leptospira.

Cakupan deteksi dini kanker leher rahim (kanker serviks) meningkat, tahun 2021 (4,26 persen), tahun 2022 (4,7 persen), dan tahun 2023 (13,56 persen). Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM meningkat, tahun 2021 (98,45 persen), tahun 2022 (97,24 persen), dan tahun 2023 (102,53 persen). Demikian juga untuk Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami peningkatan, tahun 2021 (47,88 persen), tahun 2022 (96,84 persen), dan tahun 2023 (99,9 persen). Faktor pendorong peningkatan pelayanan deteksi dini kanker leher rahim, DM, dan hipertensi disebabkan meningkatnya akses layanan dengan semakin mendekatkan pelayanan sampai di tingkat Posyandu, instansi, dan institusi pendidikan melalui pelayanan reguler maupun berkaitan dengan even tertentu. Selain itu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa/kelurahan, kader, dan peran aktif masyarakat untuk mengikuti skrining kesehatan.

Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Pelayanan Puskesmas semakin optimal jika 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk. Untuk Kabupaten Cilacap rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sampai dengan tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang semakin kecil dibandingkan dengan tahun 2019, yang artinya 1 unit puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah Puskesmas masih tetap 38 dari tahun 2019 sampai dengan 2023, sementara jumlah penduduk Kabupaten Cilacap tiap tahun meningkat.

Tabel 2. 30
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	Rasio Per 30.000 penduduk
1	2019	0,59
2	2020	0,59
3	2021	0,58
4	2022	0,58
5	2023	0,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2023 (diolah)

Rasio Dokter Per Satuan (100.000) Penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk selama periode tahun 2019-2023 di Kabupaten Cilacap mengalami perkembangan fluktuatif, namun demikian secara absolut terus meningkat dikarenakan adanya persyaratan akreditasi dan apabila fasilitas pelayanan kesehatan mengadakan kerjasama dengan BPJS harus ada dokter dengan jumlah tertentu. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemerataan dokter, utamanya pada penempatan fasilitas pelayanan tingkat pertama (puskesmas).

Tabel 2. 31
Rasio Dokter di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2019	204	10,57	125	6,48	47	2,43
2020	334	17,06	97	4,95	58	2,96
2021	300	15,32	111	5,66	62	3,16
2022	312	15,75	117	5,91	65	3,28
2023	344	17,07	127	6,3	81	4,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2023 (diolah)

Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan (100.000) Penduduk

Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung oleh dokter juga dibantu oleh tenaga paramedis seperti perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga gizi. Rasio terbesar adalah perawat dan bidan karena adanya standar akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit yang menyebutkan jumlah perawat dan bidan lebih banyak dari tenaga paramedis lainnya serta adanya persyaratan dari BPJS yang menentukan jumlah tenaga kesehatan yang harus tersedia di Fasyankes.

Tabel 2. 32
Rasio Tenaga Paramedis Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	Perawat		Bidan		Tenaga Farmasi		Tenaga Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2019	1.443	74,76	1.456	75,43	171	8,86	62	3,21
2020	2.123	108,43	1.315	67,17	374	19,10	85	4,34
2021	2.114	107,97	1.255	64,1	376	19,2	86	4,39
2022	2.181	110,14	1.270	64,13	379	19,14	95	4,79
2023	2.311	114,7	1.286	63,83	419	20,79	99	4,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2023 (diolah)

Persentase Rumah Sakit yang dibina untuk Akreditasi

Rumah Sakit (RS) yang dibina untuk akreditasi pelayanan pada tahun 2017 ada dua RSUD yang ada di Kabupaten Cilacap, yaitu RSUD Cilacap dan RSUD Majenang telah terakreditasi.

Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan di Rumah Sakit perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 33
Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah yang dibina untuk akreditasi	Persentase
2019	2	2	100
2020	2	2	100
2021	2	2	100
2022	2	2	100
2023	2	2	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2023 (diolah)

Jumlah Penduduk Miskin Yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Pemenuhan pembiayaan masyarakat miskin sebagai salah satu upaya dalam penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar maka dilaksanakan program JKN PBI dan JKN Non PBI APBN. Pada tahun 2019, ada pengalihan pembiayaan dari Jamkesda ke JKN sehingga jumlah penerima JKN meningkat, sedangkan tahun 2020 ada penambahan penerima Jamkesda bagi Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Cilacap.

Perlindungan sosial dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin menjadi bagi bagian dari pelayanan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*), dengan tujuan agar setiap orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan. Cakupan kepesertaan JKN tahun 2023 sebesar 86,39 persen, dan untuk meningkatkan cakupan jaminan Kesehatan untuk menuju UHC, maka dilakukan upaya untuk mencapai UHC sebesar 95 persen. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengupayakan pembiayaan untuk pembayaran premi JKN Kelas III masyarakat yang tidak mampu sebagai Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP), melalui potensi sumber-sumber anggaran lain (DBHCHT, Dana Desa, CSR, dan sumber swasta lainnya).

Tabel 2. 34
Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat JKN dan Jamkesda
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Penerima JKN	%	Penerima Jamkesda	%
2019	939.798	900.649	95,83	67.216	7,15
2020	957.214	896.971	93,7	69.481	7,26
2021	845.315	870.665	104,1	88.467	0,10
2022	217.900	807.041	370,37	82.747	37,97

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Penerima JKN	%	Penerima Jamkesda	%
2023	221.421	940.294	424,66	126.483	57,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2023

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Cilacap sejalan dengan tujuan ke-3 SDGs yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jalan dan Jembatan

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 620/539/17/2017 Tentang Ruas Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten meliputi 587 ruas dengan panjang 1.269,202 km.

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Cilacap pada Tahun 2023 total sepanjang 1.526,618 km, terdiri dari 173,540 km jalan Nasional 83,876 km jalan Provinsi dan 1.269,202 km jalan Kabupaten/Kota. Di samping itu, juga terdapat beberapa ruas jalan non status di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 35
Panjang Jalan di Kab. Cilacap Berdasarkan Kewenangan Tahun 2023

No.	Kewenangan Jalan	Panjang (km)	%	Legalitas Penetapan Kewenangan
1.	Nasional	173,540	11,5	SK Menteri PU & Pera No. 290/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015
2.	Provinsi	83,876	5,5	SK Gubernur Jawa Tengah No. 620/2/2016, 25 Januari 2016
3.	Kabupaten	1.269,202	83,0	SK Bupati Cilacap No.620/539/17/2017, 27 Desember 2017
Total Panjang		1.526,618	100	

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, 2023

Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2019 sampai dengan 2023, kinerja jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 Jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 65,67 persen atau sepanjang 833,458 km yang menurun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 68,033 persen atau sepanjang 863,476 km. Perlu usaha yang lebih optimal untuk mendukung tujuan ke-9 SDG’s yaitu membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.

Tabel 2. 36
Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2019-2023

No	Tahun	Satuan	Kondisi				Total
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	2019	Km	813,453	271,753	161,027	22,969	1.269,202
		%	64,090	21,410	12,690	1,810	100,00
2	2020	Km	842,998	161,788	140,586	123,830	1.269,202
		%	66,420	12,750	11,080	9,750	100,00
3	2021	Km	853,410	144,055	145,959	125,778	1.269,202
		%	67,240	11,350	11,50	9,910	100,00
4	2022	Km	863,476	125,679	123,382	156,665	1.269,202
		%	68,033	9,90	9,72	12,340	100,00
5	2023	Km	833,458	147,057	173,062	115,625	1.269,202
		%	65,67	11,59	13,64	9,11	100,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, 2023

Perubahan total panjang jalan Kabupaten Cilacap didasarkan pada :

1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 620/420/03/Tahun 2015 meliputi 577 ruas dengan panjang 1.287,082 km.
2. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 620/539/17/Tahun 2017 meliputi 587 ruas dengan panjang 1.269,202 km.

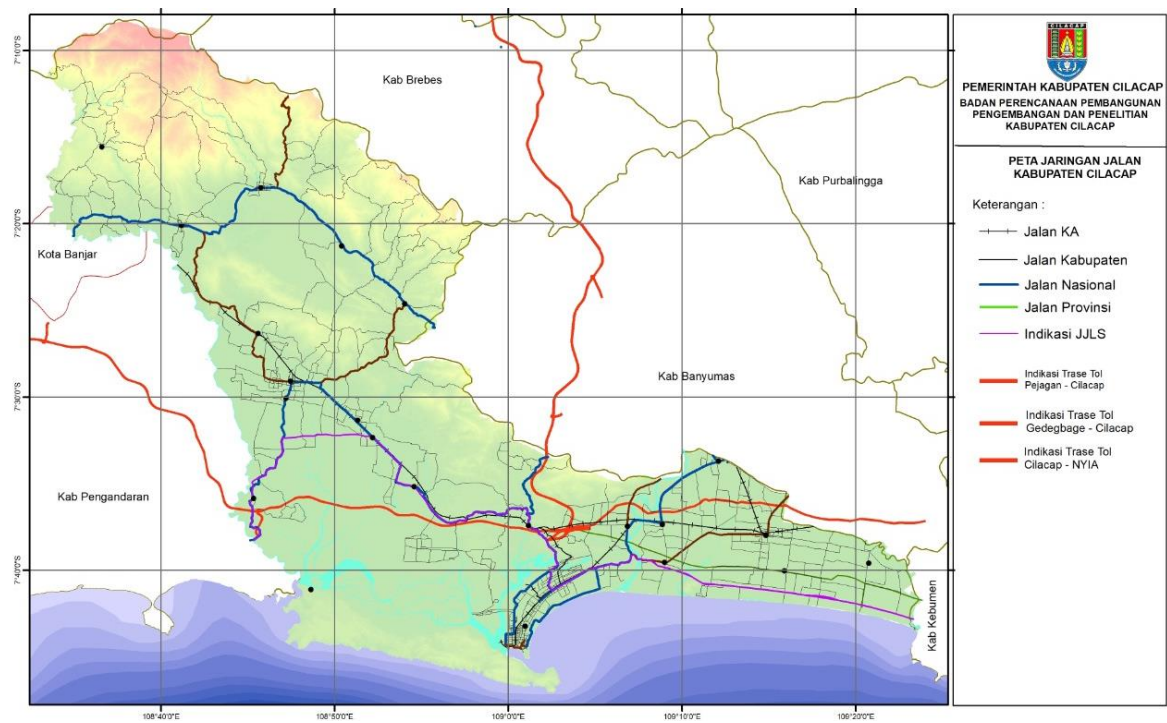
Tabel 2. 37
Tipe Konstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2019-2023

No	Tahun	Satuan	Tipe Konstruksi				Total
			Aspal/ Penetrasi /Macadam	Rigid/ Beton	Telforf/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	
1	2019	Km	1.124,62	112,93	30,05	1,60	1.269,202
		%	88,61	8,9	2,37	0,12	100
2	2020	Km	1.009,67	135,69	123,42	0,41	1.269,202
		%	79,56	10,69	9,72	0,03	100
3	2021	Km	998,61	173,63	96,59	0,38	1.269,202
		%	78,68	13,68	7,61	0,03	100
4	2022	Km	972,85	192,41	103,56	0,38	1.269,202
		%	76,65	15,16	8,16	0,03	100
5	2023	Km	1.013,525	221,674	25,926	8,08	1.269,202
		%	79,86	17,47	2,04	0,64	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, 2023

Kabupaten Cilacap yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, secara struktur pergerakan memiliki nilai yang sangat strategis, mengingat wilayah Kabupaten Cilacap akan dilintasi oleh Jalan Tol Ruas Bandung-Tasikmalaya - Cilacap, Cilacap - Pejagan, Cilacap - Yogyakarta (NYIA). Pertemuan tiga ruas tol yang ada di Cilacap tentunya memberikan dampak bagi perkembangan wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap. Selain itu di kawasan pesisir selatan Cilacap juga akan dilintasi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang menghubungkan 5 Provinsi di Selatan Jawa mulai Jawa Timur

sampai dengan Banten. Keberadaan infrastruktur jalan tersebut tentunya menjadi mementum bagi Kabupaten Cilacap untuk menginisai peningkatan konektivitas dengan jalan Kabupaten yang ada, sehingga terbentuk pola struktur pergerakan yang saling mendukung dan berkesinambungan.



Gambar 2. 36
Peta Jaringan Jalan Kabupaten Cilacap

Penanganan jalan difokuskan pada jalan kewenangan Kabupaten dengan kondisi panjang jalan dan persentase rusak beratnya tinggi seperti di Kecamatan Dayeuhluhur, Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Patimuan dan Kecamatan Cimanggu. Kondisi jalan di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 38
Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kondisi				Total (KM)
		Baik	Rusak Ringan	Sedang	Rusak Berat	
1	Adipala	21,350	3,610	5,359	2,224	32,543
2	Bantarsari	32,103	4,414	4,867	7,752	49,136
3	Binangun	19,077	10,792	7,962	3,259	41,090
4	Cilacap Selatan	36,616	0,000	2,798	0,110	39,524
5	Cilacap Tengah	54,501	0,400	3,719	1,400	60,020
6	Cilacap Utara	55,705	0,000	9,768	0,200	65,673
7	Cimanggu	46,926	8,100	7,600	10,929	73,555
8	Cipari	22,797	1,683	7,967	0,899	33,346
9	Dayeuhluhur	57,845	17,070	12,247	11,439	98,601
10	Gandrungmangu	28,508	11,460	5,000	10,268	55,236
11	Jeruklegi	31,515	3,230	6,557	3,368	44,670
12	Kampung Laut	4,482	0,000	0,394	5,349	10,225

No	Kecamatan	Kondisi				Total (KM)
		Baik	Rusak Ringan	Sedang	Rusak Berat	
13	Karangpucung	38,192	11,410	8,600	10,240	68,442
14	Kawunganten	31,004	4,370	2,390	3,965	41,729
15	Kedungreja	42,491	10,510	4,885	6,769	64,655
16	Kesugihan	42,033	6,132	3,102	0,449	51,716
17	Kroya	43,701	10,765	14,631	1,203	70,300
18	Majenang	48,154	5,430	15,694	8,509	77,787
19	Maos	13,036	3,300	4,315	0,200	20,851
20	Nusawungu	30,833	5,000	8,214	1,654	45,701
21	Patimuan	33,325	4,630	6,092	10,161	54,208
22	Sampang	20,779	2,388	4,170	0,000	27,337
23	Sidareja	31,459	3,433	7,571	2,053	44,516
24	Wanareja	47,022	18,930	19,160	13,229	98,341
TOTAL		833,458	147,057	173,062	115,625	1,269,202

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, 2023

Kondisi jembatan kewenangan Kabupaten Cilacap dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021. Pada tahun 2019 kinerja jembatan dalam kondisi baik sepanjang 3.323,50 meter atau 78,52 persen dan meningkat menjadi 84,50 persen pada tahun 2022 sepanjang 5.449,38 meter. Pada tahun 2023 dilakukan pendataan lebih menyeluruh terkait kondisi jembatan, terdapat peningkatan jembatan dengan kondisi baik menjadi 6.311,47 meter atau 95,95 persen, dari total 790 unit jembatan yang ada di Kabupaten Cilacap sebanyak 758 unit dalam kondisi baik, namun demikian jembatan dengan kondisi rusak berat masih terdapat di 32 unit.

Tabel 2. 39
Kondisi Jembatan Kewenangan Kabupaten Tahun 2019-2023

No	Tahun	Satuan	Kondisi				Total
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2019	M	3.323,50	909	0	0	4.232,50
		%	78,52	21,48	0	0	100
2	2020	M	3.402,93	829,57	0	0	4.232,50
		%	80,40	19,60	0	0	100
3	2021	M	5.384,89	1.064,08	0	0	6.448,97
		%	83,50	16,50	0	0	100
4	2022	M	5.449,38	999,59	0	0	6.448,97
		%	84,50	15,50	0	0	100
5	2023	M	6.311,47	0	0	188,30	6.499,77
		%	95,95	0	0	4,05	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, 2024

Sarana dan Prasarana Jalan

Sarana dan prasarana jalan dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan

mencapai 91 persen pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan menjadi 95 persen pada tahun 2019 hingga 2020, kemudian pada tahun 2021 sampai 2023 meningkat kembali menjadi 100 persen. Persentase jalan kabupaten yang terpasang LPJU meterisasi mengalami peningkatan tahun 2018 mencapai 37,18 persen pada tahun 2019 sebesar 45,18 persen dan tahun 2023 menjadi 50,93 persen. Persentase jalan raya terbangun LPJU meterisasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 mencapai 15,5 persen menjadi 24 persen pada tahun 2019 dan meningkat lagi menjadi 31,32 persen pada tahun 2021, pada tahun 2023 menurun menjadi 19,45 persen. Persentase titik PJU abunemen termeterisasi di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, dari tahun 2018 mencapai 5,86 persen menjadi 21,78 persen pada tahun 2023. Begitu juga fasilitas umum terbangun penerangan mengalami peningkatan, pada tahun 2018 mencapai 5,50 persen menjadi 9,21 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 40
Kondisi Sarana Prasarana Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	95	95	100	100	100
2	Jalan Kabupaten yang terpasang LPJU Meterisasi	%	45,18	48,40	50,93	50,93	50,93
3	Jalan Raya terbangun LPJU Meterisasi	%	24	28,20	31,32	19,45	19,45
4	Titik PJU Abunemen Termeterisasi	%	13,53	16,86	19,98	21,78	21,78
5	Fasilitas Umum Terbangun Penerangan	%	5,86	8,78	8,8	9,21	9,21

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap, 2023

Sumber Daya Air

Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air pada tahun 2019 hanya mencapai mencapai 5,67 persen dan mengalami peningkatan menjadi 9,42 persen pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan perubahan data Saluran Pembuang yang semula hanya dihitung saluran pembuang dalam kota saja yang jumlahnya tidak ada 100 Saluran pembuang, menjadi lebih dari 967 saluran pembuang se Kabupaten Cilacap berdasarkan SK Bupati Cilacap Nomor : 614/537/18 Tahun 2017 tentang Saluran Pembuang.

Panjang irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 405,161 km dan menjadi 245,389 km pada tahun 2023 dengan rincian kewenangan Kabupaten sebesar 43,61 persen, Provinsi sebesar 3,61 persen dan Pusat sebesar 39,67 persen.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Indikator Sumber Daya Air Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	%	5,67	6,62	11,97	10,61	9,42
2	Panjang irigasi dalam kondisi baik	Km	405,161	417,761	323,423	209,024	245,389
3	Panjang irigasi dalam kondisi sedang	km	279,200	2,792	18,176	119,976	128,7232
4	Panjang irigasi dalam kondisi rusak	km	899,412	886,812	416,067	425,488	380,374

Sumber: Dinas PSDA Kab Cilacap, 2023

Air Minum dan Sanitasi

Cakupan pelayanan akses air minum yang layak mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022. Persentase jiwa yang mengakses air minum yang layak pada tahun 2019 sebesar 83,56 persen menjadi 89,43 persen pada tahun 2022. Persentase jiwa yang mengakses jamban yang layak juga menunjukkan peningkatan dari 84,6 persen pada tahun 2019 menjadi 94,58 persen pada tahun 2022. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari dua kali setahun di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 mencapai 77,6 persen dan naik menjadi 92,4 persen pada tahun 2022.

Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja air minum dan air limbah di Kabupaten Cilacap pada umumnya terus mengalami kenaikan dan sejalan dengan program Universal Akses 100 0 100 dan Tujuan ke-6 SDGs yaitu : Menjamin Ketersediaan Dan Pengelolaan Air Serta Sanitasi Yang Berkelanjutan Bagi Semua Orang. Dalam rangka menunjang SPM Pemenuhan Air minum dan Air Limbah, maka capaian kinerja harus terus ditingkatkan sehingga mencapai 100 persen. Ruang lingkup akses layanan sanitasi dalam hal ini merupakan pemenuhan jiwa yang mengakses jamban yang layak (baru sebatas pemenuhan jamban layak).

Tabel 2. 42
Kondisi Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jiwa yang mengakses air minum yang layak	%	83,56	85,44	87,74	89,43	91,23
2	Jiwa yang mengakses jamban yang layak	%	84,6	87,84	89,84	94,58	91,99
3	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam	%	77,6	82,6	87,60	92,4	90,60

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap, 2023

Penataan Ruang

Kinerja Penataan Ruang selama kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2023 relatif mengalami peningkatan dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 43
Kondisi Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rekomtek Izin Mendirikan Bangunan/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	%	n.a.	n.a.	0,035	0,035	0,298
2	Persentase bangunan publik dalam kondisi baik (%)	%	1	3,57	6,73	10	20
3	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik	%	50	53,5	60	65	71,5
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90	90	94	94	94
5	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang	%	5,56	5,56	11,11	11,11	37
6	Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	n.a.	n.a.	n.a.	99,46	96,07
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	12,12	13,97	13,97	13,97	44,09

Sumber: Dinas PUPR Kab. Cilacap, 2023

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kebutuhan dan Pemenuhan Perumahan

Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman adalah *backlog* rumah dan munculnya kawasan kumuh permukiman. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *backlog* yaitu urbanisasi khususnya di perkotaan, terbatasnya lahan, serta terbatasnya kemampuan pengembang dan pemerintah sebagai penyedia rumah. Namun pertumbuhan jumlah rumah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan rumah, sehingga menimbulkan ketimpangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan rumah (*Backlog*). Dari data SUPAS, BPS 2015 menunjukkan *backlog* kepemilikan sejumlah 27.166 unit dan *backlog* kepemilikan sejumlah 33.567 unit.

Dari data yang ada, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah rumah di Kabupaten Cilacap dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2. 44
Jumlah Rumah di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Rumah (unit)
2019	474.570
2020	490.819
2021	483.381
2022	490.298
2023	490.298

Sumber : Disperkimta Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Perumahan Tidak Layak Huni

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jawa Tengah sejumlah kurang lebih 1.691.660 Unit. Data BDT dimaksud merupakan data tingkat kesejahteraan penduduk yang setiap tahun dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah, yang selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (PPFM OTM).

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan mulai tahun 2011 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta. Adapun perkembangan penanganan RTLH beserta Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 45
Perkembangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah (Unit)
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR	Swadaya/ lainnya	
2019	2.285	807	326	0	0	3.418
2020	1.470	450	531	378	83	2.912
2021	2.208	466	376	433	25	3.508
2022	1.681	520	111	269	0	2.581
2023	1.203	464	958	347	0	2.972

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cilacap, 2023

Dalam upaya menekan angka kemiskinan melalui penanganan RTLH, sepanjang tahun 2019-2023 penanganan RTLH mengalami dinamika naik turun. Pada kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 sudah tertangani 15.391 RTLH dengan alokasi pendanaan baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR/TJSLP, maupun sumber lainnya.

Persentase perumahan swadaya yang terfasilitasi pada tahun 2019 mencapai 3,35 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 2,92 persen. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 82 persen menjadi 86 persen pada tahun 2023. Sementara itu untuk persentase rumah layak huni juga mengalami peningkatan, pada tahun 2019 mencapai 81 persen menjadi 84,1 persen pada tahun 2023. Persentase areal pemakaman yang terpelihara dengan baik mengalami peningkatan, pada tahun 2019 mencapai 90,94 persen menjadi 90,98 persen pada tahun 2023.

Sedangkan persentase penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota pada tahun 2019 sampai tahun 2023

mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Capaian kinerja terkait permukiman di Kabupaten Cilacap pada umumnya terus mengalami kenaikan dan sejalan dengan program Universal Akses 100 0 100 dan Tujuan ke-11 SDGs yaitu Menjadikan Kota dan Pemukiman Manusia Inklusif, Aman, Berketahanan dan Berkelanjutan serta melaksanakan amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terkait Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2. 46
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase perumahan swadaya yang terfasilitasi	%	3,35	2,86	3,42	3,2	2,92
2	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	82	83	84	85,02	86
3	Persentase rumah layak huni	%	81	83,86	83,86	83,86	84,1
4	Persentase areal pemakaman dalam kondisi baik	%	90,94	90,95	90,96	90,97	90,98
5	Persentase penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota yang mengalami kerusakan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cilacap, 2023

Ruang Terbuka Hijau

Untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau menunjukkan luasan yang sama dari tahun 2019 yaitu 18,17 persen dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 21 persen.

Tabel 2. 47
Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Ruang terbuka hijau	%	18,17	18,18	18,18	21	21

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cilacap, 2023

Penanganan Kawasan Kumuh

Menurunnya kualitas permukiman adalah salah satu isu yang berkembang saat ini dimana pendorong tumbuhnya kawasan kumuh permukiman antara lain meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan ekonomi khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pertumbuhan penduduk itu sendiri. Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka luasan kawasan kumuh diatas 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, luasan kawasan kumuh 10-15 Ha menjadi kewenangan Provinsi dan luasan kumuh di bawah 10 Ha menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014 diterbitkan SK

Bupati Cilacap terkait Penetapan Wilayah Kumuh dengan jumlah 14 kawasan dan luas area 26,88 Ha, dan pada tahun 2020 diterbitkan kembali SK Bupati Cilacap Nomor : 663/782/19/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cilacap dengan 8 kawasan dan luas area 139,48 Ha.

Tabel 2. 48
Kawasan Kumuh di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Kewenangannya

No.	Kawasaan Kumuh	Jumlah Kawasan	Luas Kawasan (ha)	Persentase Luas Kawasan
1.	< 10 hektar	3	24,16	17,32%
2.	10 – 15 hektar	2	23,86	17,11%
3.	> 15 hektar	5	91,46	65.57%
Total		10	139,48	100%

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cilacap, 2023

Dari luasan kumuh 139,48 Ha telah tertangani 80,38 Ha, sehingga pada tahun 2023 luasan kumuh tersisa 59,1 Ha. Capaian penanganan kumuh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 49
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Tahun	Luas (Ha)
2019	8,43
2020	1,03
2021	50,9
2022	24,84
2023	4,64

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cilacap, 2023

Kabupaten Cilacap belum teridentifikasi dan ditetapkan lokasi kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Perangkat Daerah terkait berupaya untuk :

- a. Proses penyusunan regulasi RP2KPKPK menjadi Perbup dan mendorong Penyusunan Naskah Akademis (NA) Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Perbup Kumuh) sebagai detail penjabaran dari Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang merupakan Tools dalam melaksanakan Program/Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- b. Mendorong Penggunaan Dokumen RP3KP (RKP) sebagai tools dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian dan tempat kegiatan

- pendukungnya serta menjamin keterpaduan PSU dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Melengkapi ketersediaan data tabular dan spasial melalui SI-SPKP sebagai dasar perencanaan infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR bersumber dana APBN.
 - d. Mendorong Pokja PKP dan Forum PKP berkoordinasi aktif dan melakukan sinkronisasi data dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah dalam rangka menjaga kondusivitas daerah, mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat agar kegiatan sosial budaya, sosial ekonomi dan kalangan dunia usaha memperluas kegiatan usaha, terutama terkait dengan upaya untuk meminimalkan terjadinya konflik SARA dan kerusuhan sosial.

Perlindungan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas. Rasio Linmas per 10.000 penduduk ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 50
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2019	8.580	1.937.427	44,29
2	2020	8.580	1.957.872	43,82
3	2021	8.980	1.980.912	43,31
4	2022	6.390	2.014.746	31,72
5	2023	6.404	2.032.570	31,51

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, Tahun 2023

Selanjutnya tingkat waktu tanggap *response time rate* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Cilacap mencapai 7 menit pada tahun 2019 dan menjadi 14,2 menit pada tahun 2023. Sedangkan cakupan pengamanan yang ditangani mengalami kestabilan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mencapai 100 persen. Begitu pula indikator persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat masih tetap mencapai 100 persen pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, cakupan patroli petugas satpol PP (dalam 24 jam) realisasi mengalami stabil

mencapai 3 kali pada tahun 2019 juga terjadi pada tahun berikutnya, dan rasio poskamling per jumlah desa/kelurahan mengalami peningkatan, dari 36,84 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 13,61 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 51
Kondisi Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	7	6,2	6,83	8,48	14,2
2	Cakupan pengamanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
3	Patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan patroli petugas satpol PP (dalam 24 jam)	Kali	3	3	3	3	3
5	Rasio poskamling per jumlah desa/kelurahan	Rasio	36,84	21,19	13,61	13,61	13,61
6	Jumlah Damkar	Unit	7	8	9	9	9
7	Jumlah Relawan DAMKAR	Orang	117	117	224	224	310

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Cilacap, 2023

Penegakan PERDA

Sebagai upaya untuk mendukung ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan tugas dan kewenangannya antara lain melakukan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Kinerja Satpol PP selama kurun waktu tahun 2019-2023 ditunjukkan melalui Rasio Polisi Pamong Praja dan penyelesaian pelanggaran peraturan daerah secara tuntas.

Tabel 2. 52
Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2019	126	1.937.427	0,65
2	2020	118	1.957.872	0,60
3	2021	132	1.980.912	0,66
4	2022	138	2.014.746	0,68
5	2023	164	2.032.570	0,81

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Cilacap, 2023

Selama kurun waktu tahun 2019-2023 rasio Polisi Pamong Praja naik dari 0,65 menjadi 0,81 dikarenakan masuknya urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga kelembagaan Satpol PP ditingkatkan dan jumlah personil Satpol PP diperbanyak disesuaikan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Meskipun jumlah anggota Satpol PP mengalami peningkatan namun tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk, oleh karena itu salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan Kader Siaga Tramtib (KST) yang telah terbentuk agar lebih dapat berdayaguna dan meningkat peran sertanya dalam upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, meningkatkan dukungan upaya-upaya preventif dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peran serta dalam perlindungan masyarakat.

Tabel 2. 53
Penyelesaian Pelanggaran Perda Kab. Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Pelanggar Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1	2019	1.630	1.525	93,55
2	2020	1.383	1.345	97,25
3	2021	1.383	1.318	95,30
4	2022	1.002	1.002	100
5	2023	1.334	1.321	99,02

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, 2023

Penyelesaian pelanggaran Perda tahun 2019-2023 cukup optimal dengan capaian fluktuatif tiap tahunnya, hal ini berarti bahwa setiap pelanggaran Perda yang terdata semua diselesaikan dengan baik melalui cara-cara yang sifatnya persuasif maupun represif. Upaya yang akan dilakukan pada masa mendatang adalah dengan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap Perda sedangkan upaya yang sifatnya represif baru akan dilakukan jika upaya pembinaan tidak dipatuhi oleh pelanggar.

Kinerja SPM terkait Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota terealisasi 100 persen, hal ini karena tidak ada warga negara yang mengalami kerugian baik materiil maupun cedera fisik, selain itu dalam penyelesaian pelanggaran K3 yang terjadi sudah dapat dilaksanakan secara penuh pada tahun 2023.

Tabel 2. 54
Penyelesaian Pelanggar Perda Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	100	100	100	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Cilacap	%	100	99,35	100	100	100
3	Cakupan Penegakkan Perda dan Perkada di Kabupaten Cilacap	%	0,13	0,148	0,15	0,15	0,15
4	Jumlah Pelanggar Perda yang di tertibkan	Kasus	1.525	1.345	1.318	1.002	1.321

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, 2023

Kabupaten Cilacap mempunyai luas wilayah 225.360,84 Ha yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa dan 15 kelurahan, dari luas wilayah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap sangatlah tidak sebanding. Jumlah personil Satpol PP Kabupaten Cilacap secara keseluruhan baik ASN dan Non ASN berjumlah 164 personil, hal ini dapat diasumsikan bahwa 1 personil Satpol PP menangani luas wilayah 1,38 Ha.

Demi mendukung program Pemerintah Pusat terkait pertumbuhan ekonomi dan kemudahan investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melakukan inovasi dengan pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang dikenal dengan OSS (*Online Single Submission*), inovasi ini membantu pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusaha secara cepat dan mudah. Praktek dilapangan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki perizinan untuk kegiatan usaha yang mereka lakukan, beberapa temuan permasalahan dilapangan yang ditemukan :

1. Maraknya pendirian bangunan tanpa terlebih dahulu memenuhi perijinan dasar (SPPL, KKPR dan PBG SLF);
2. Maraknya bangunan pada lokasi-lokasi terlarang:
 - Saluran air
 - Badan jalan
 - Bantaran sungai
3. Maraknya bangunan di lokasi LP2B, LSD, zona hijau berdasarkan Perda Tata Ruang;
4. Penjualan tanah dalam bentuk kapling yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Belum adanya kontribusi PAD dari para pengusaha di wilayah sepanjang pantai Adipala binangun dan Nusawungu dan sebagian pengusaha di wilayah pantai teluk penyu;
6. Belum optimalnya pajak dan retribusi para pengusaha di sepanjang area tanah HGB PT KAI.

Dari permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah penambahan armada berupa kendaraan dinas untuk operasional sejumlah 3 unit, dengan wilayah operasional kegiatan Cilacap Barat, Cilacap Tengah dan Cilacap Timur dan pembekalan kemampuan seluruh pimpinan dan anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap terkait pedoman teknis operasional di lapangan, sehingga ketika menemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2019-2023 secara umum menunjukkan situasi kondusif, dengan ditunjukkan tidak adanya kasus kriminalitas (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) dan tidak adanya konflik sosial. Selain itu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak ditemui kasus konflik agama. Kondisi konduktivitas wilayah selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 55
Kondisi Konduktivitas Wilayah Tahun di Kabupaten Cilacap 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kasus Konflik Agama	Jumlah	0	0	0	0	0
2	Kasus Kriminalitas (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya)	Jumlah	0	0	0	0	0
3	Jumlah konflik social	Jumlah	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Cilacap, 2023

Penanggulangan Bencana Daerah

Tingkat *respon*time bencana alam, non alam dan bencana sosial realisasinya masih sama mencapai 15 menit pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terjadi fluktuasi, dari 1,9 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan menjadi 6,99 persen pada tahun 2023. Sementara itu persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat masih tetap realisasinya mencapai 100 persen pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Cilacap dari tahun 2019 terus mengalami penurunan indeks dari tahun 2019 dengan Indeks IRBI 124,2 terus menurun sampai tahun 2023 menjadi Indeks IRBI 96,93 yang berarti Kabupaten Cilacap semakin tangguh dalam penanggulangan bencana sehingga mampu menurunkan resiko bencana semakin rendah. Untuk semakin meningkatkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Cilacap selalu membentuk Desa Tangguh Bencana tahun 2019 Destana sejumlah 24 Desa dan di tahun 2023 sudah mencapai 52 Desa Tangguh Bencana. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana juga semakin meningkat dengan adanya peningkatan Relawan Kebencanaan yang terdaftar tahun 2019 sejumlah 550 orang di tahun 2023 sudah terdaftar menjadi 776 orang. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap juga masih tetap realisasinya mencapai 100 persen pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sama realisasinya mencapai 100 persen pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2. 56
Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat <i>respon time</i> bencana alam, non alam dan bencana sosial	Menit	15	15	15	15	15
2	Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	%	1,9 (37.199 Jiwa)	1,87 (36.612 Jiwa)	2,8 (54.934 jiwa)	5,9 (118.469 Jiwa)	6,99 (140.986 jiwa)
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100 (112.828 jiwa)	100 (32.559 jiwa)	100 (126.552 Jiwa)	100 (72.176 Jiwa)	100 (105.847 jiwa)
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	%	100 (154 Jiwa)	100 (9.439 Jiwa)	100 (839 Jiwa)	100 (3.028 jiwa)	100 (252 Jiwa)
5	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	%	100 (107 bencana)	100 (173 bencana)	100 (122 bencana)	100 (145 bencana)	100 (106 bencana)
6	Indeks Risiko Bencana	Indeks	124,2	112,75	112,75	103,7	96,93
7	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	24	26	26	37	52
8	Jumlah Relawan PB	Orang	550	600	650	700	776

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Cilacap. 2023

6) Sosial
Sarana Sosial dan Prasarana Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS dilakukan melalui pendekatan sistem panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2023 terdapat 9 panti baru, penambahan tersebut merupakan milik swasta, hal ini dikarenakan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 upaya Kabupaten Cilacap dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada panti sosial terealisasi sebanyak 25 Panti Sosial atau mencapai 69,44 persen dari 36 panti pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Cilacap mengupayakan untuk semakin meningkatkan perhatian terkait dengan pemenuhan SPM dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 57
Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial
Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Panti Sosial / UPT	Jumlah Panti Sosial Yang diberi bantuan	Persentase
1	2019	27	5	18,52
2	2020	27	13	48,14
3	2021	27	23	85,19
4	2022	27	16	59,26
5	2023	36	25	69,44

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 2023

Upaya pelayanan Penerima Manfaat dalam panti menjadi prioritas mengingat masih rendahnya penyelenggaraan pelayanan kesos sehingga

diperlukan komitmen serta dukungan berbagai pihak, salah satunya dengan pemenuhan rumah singgah sehingga penanganan rehabilitasi PMKS dapat menjangkau secara keseluruhan.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Populasi PMKS cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan, sehingga tidak dapat melaksanakan memenuhi kebutuhan hidup secara memadai dan wajar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya memberikan penanganan PMKS melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

Tabel 2. 58
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Orang	630	731	659	1385	1.935
2	Jumlah PPKS di luar indikator SPM yang direhabilitasi	Orang	165	157	230	302	611
3	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Desa/ Kelurah an	284	284	284	284	284
4	Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Orang	2.078	4.736	10.572	7.852	10.969
5	Jumlah TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina	Orang	674	659	923	419	781
6	Jumlah pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Kompon en	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cilacap 2023

Populasi dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada kurun waktu Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 59
Populasi dan Penanganan PMKS di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah Penanganan (bansos, KUBE, rehab)	%
1	2019	269.048	142.535	52,98
2	2020	240.444	211.830	88,10
3	2021	202.272	194.533	96,17
4	2022	199.789	196.694	98,45
5	2023	153.538	91.464	59,19

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 2023

Dalam penanganan PMKS diperlukan upaya peningkatan kualitas penanganan dengan melibatkan beberapa pihak terkait baik swasta, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Selain itu, peran Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga penting dalam peningkatan kualitas penanganan PPKS.

PMKS yang memperoleh Bimbingan/Pelatihan

Salah satu cara untuk penanganan PMKS adalah dengan memberi penguatan pengetahuan dan keterampilan.

Tabel 2. 60
Penguatan Kapasitas PMKS di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	Populasi PMKS	Jumlah Penguatan Kapasitas	Persentase
1	2019	269.048	300	0,11
2	2020	240.444	300	0,12
3	2021	202.272	300	0,15
4	2022	199.789	462	0,23
5	2023	154.538	323	0,21

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 2023

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7) Tenaga Kerja
Pelatihan Tenaga Kerja

Rasio tenaga kerja yang pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan dari Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Untuk tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2019 sebesar 85 persen meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2023. Penurunan tersebut dikarenakan jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar. Sedangkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun 2019 sebesar 70 persen meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 61
Rasio Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	85	83,3	81,4	81,82	100
2	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	70	81,08	83,80	80,65	100

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2023

Dari data tersebut dapat disampaikan bahwa rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah jumlah tenaga kerja yang dilatih berbanding dengan jumlah pendaftar. Pada tahun 2019 jumlah pendaftar pelatihan kompetensi adalah 106 dengan jumlah yang dilatih 90 orang, pelatihan kewirausahaan adalah 100 pendaftar dan 70 orang telah dilatih. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan kompetensi 72 orang dan

pelatihan kewirausahaan 74 orang dan yang dilatih dari keduanya hanya masing-masing 60 orang menurun dari tahun 2019 karena pengurangan anggaran akibat Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah pendaftar pelatihan kompetensi adalah 54 orang dan yang dilatih adalah 44 orang, pelatihan kewirausahaan jumlah pendaftar 124 dan yang dilatih 104 mengalami kenaikan karena bertambahnya volume peserta pelatihan dari kenaikan anggaran. Pada tahun 2022 jumlah pendaftar kompetensi sebanyak 110 orang dan dilatih 90 orang, untuk pelatihan kewirausahaan pendaftar 465 orang dan dilatih 375 orang, dari kedua pelatihan pada tahun 2022 meningkat karena bertambahnya peserta pelatihan dari anggaran kegiatan pelatihan. Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2023 adalah sebanyak 140 orang pendaftar dan dilatih 140 orang, pendaftar pelatihan kewirausahaan sebanyak 355 orang dan dilatih 355 orang, sedangkan pada tahun 2023 total pelatihan lebih tinggi dari 2022 karena alokasi anggaran untuk peserta pelatihan meningkat.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi realisasi mencapai 31,69 persen dari target 30 persen dimana jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi adalah sebanyak 69.814 orang berbanding dengan jumlah tenaga kerja pada sektor formal adalah sebanyak 220.270 orang, faktor penyebab dan pendorong dari capaian realisasi tersebut adalah meningkatnya volume pelatihan kepada pencari kerja serta adanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kabupaten Cilacap dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja.

Untuk ketercapaian Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota adalah 50,65 persen dari target 46 persen dengan jumlah penempatan tenaga kerja sebesar 10.745 orang berbanding dengan jumlah pencari kerja sebanyak 21.214 orang, faktor penyebab capaian ini adalah kontribusi dari penempatan luar negeri sebagian besar ke Taiwan, Hongkong, Korea dan Jepang sebanyak 6.727 orang ditambah dengan penempatan dalam negeri sebesar 4.018 orang serta adanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indoensia di Kabupaten Cilacap dalam rangka penempatan dan penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan di luar negeri.

Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi pada kurun waktu 2019-2023 relatif selalu terselesaikan dengan baik. Hal tersebut antara lain karena adanya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan secara intensif.

Tabel 2. 62
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2019	11	100% terselesaikan
2	2020	12	100% terselesaikan
3	2021	6	100% terselesaikan
4	2022	12	100% terselesaikan
5	2023	10	100% terselesaikan

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2023

Pencari Kerja yang Ditempatkan

Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 28,02 persen. Hal ini disebabkan saat pandemi Covid-19 penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri masih ditutup dan negara penempatan belum menerima dan penempatan tenaga kerja utk antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah berkurang. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 50,65 persen, ke depannya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Cilacap didominasi oleh lulusan SMA/SMK. persentasenya dihitung dari pencari kerja yang ditempatkan berbanding dengan pencari kerja terdaftar. Tahun 2019 dari jumlah pencari kerja terdaftar 26.978 orang telah ditempatkan 11.345 orang dimana penempatan lokal adalah 5.050 orang dan penempatan antar negara 6.295 orang. Pada tahun 2020 pencari kerja yang terdaftar 16.432 orang dan pencari kerja yang ditempatkan 4.605 orang mengalami penurunan karena adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan penutupan Negara tujuan CPMI dan terbatasnya lowongan kerja, dengan jumlah penempatan local 2.615 orang dan penempatan antar negara 1.990 orang. Pada tahun 2021 dari penempatan 8.082 jumlah penempatan lokal adalah 6.481 orang dan 1.601 penempatan antar negara, hal ini semakin menurun dikarenakan masih ditutupnya beberapa Negara tujuan CPMI, kemudian di tahun 2022 dari penempatan 17.394 orang terdiri dari penempatan lokal 9.915 orang dan antar negara 7.479 orang mengalami kenaikan akibat selesainya pandemi

Covid-19 dan menuju perbaikan ekonomi sehingga dibuka kembali lapangan pekerjaan. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah pencari kerja terdaftar adalah 21.214 orang, jumlah penempatan tenaga kerja adalah 10.745 orang yang terdiri dari antar kerja lokal sebanyak 4.018 orang dan antar kerja antar negara sebanyak 6.727 orang yang mengalami penurunan pada penempatan lokal dan antar Negara dikarenakan akibat penumpukan yang lebih besar dari tahun sebelumnya pasca Covid-19 dan terbatasnya lowongan pekerjaan serta ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi pemberi kerja.

Tabel 2. 63
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2019	26.978	11.345	42,05
2020	16.432	4.605	28,02
2021	17.583	8.082	45,96
2022	26.321	17.394	66,08
2023	21.214	10.745	50,65

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2023

Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Upah minimum Kabupaten dari Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.1.989.209,- pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 2.383.090,- pada Tahun 2023. Namun demikian, apabila dilakukan penghitungan pencapaian rasio UMK dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) maka Kabupaten Cilacap termasuk 6 Kabupaten/Kota yang belum sampai 100 persen KHL.

Tabel 2. 64
Upah Minimum Kabupaten Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Upah Riil Tenaga Kerja (UMK)	Rp	1.989.058	2.158.327	2.228.904	2.230.731	2.383.090

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2023

Jumlah Pekerja/Buruh Sektor Non Formal yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Sebagai upaya dalam perlindungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, setiap lembaga ataupun perusahaan mewajibkan melakukan pemenuhan atas hak-hak tenaga kerja dari keadaan hubungan/kondisi pekerjaan yang merugikan kesehatan dan kecelakaan pekerja yang ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Pada tahun 2019, Badan Usaha yang mengikutsertakan tenaga kerja pada Program BPJS Ketenagakerjaan sebesar 96,18 persen dan Tahun 2023 mengalami

peningkatan menjadi 98,71 persen. Sedangkan badan usaha yang mengikutsertakan tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan Tahun 2019 sebesar 92,76 persen dan Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 97,78 persen. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mendorong seluruh badan usaha untuk menerapkan jaminan ketenagakerjaan pada seluruh karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020 jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan mengalami penurunan sebesar 0,97 persen dan 0,01 persen, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga terjadi PHK dan pekerja yang dirumahkan. Pada tahun 2021 BPJS ketenagakerjaan meningkat 0,37 persen dan BPS kesehatan 0,57 persen sedikit meningkat karena kenaikan penempatan tenaga kerja. Pada tahun 2022 adalah peningkatan tertinggi untuk BPJS ketenagakerjaan yaitu 2,85 persen dan BPJS kesehatan 4,33 persen setelah berakhirnya pandemic Covid-19 penempatan tenaga kerja semakin besar baik dari dalam dan luar negeri. Sedangkan pekerja yang mengikuti BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan pada tahun 2023 yaitu naik sebesar 0,29 persen dan 0,13 persen kembali meningkat karena kontribusi Program Gercep (Gerakan Cilacap Peduli Pekerja Rentan) yang dananya berasal dari program CSR perusahaan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 65
Perkembangan Jumlah Pekerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		
		Jumlah Tenaga Kerja	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Kesehatan
1	2019	60.502	58.191 (96,18%)	56.122 (92,76%)
2	2020	60.402	57.508 (95,21%)	56.024 (92,75%)
3	2021	65.528	62.632 (95,58%)	61.148 (93,32%)
4	2022	68.718	67.637 (98,43%)	67.103 (97,65%)
5	2023	68.267	67.388 (98,71%)	66.754 (97,78%)

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2023

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengarusutamaan Gender (PUG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Perencanaan dan penganggaran responsif gender dilaksanakan di Kabupaten Cilacap sejak tahun 2012. Rasio program dan kegiatan responsif gender di OPD Kabupaten Cilacap meningkat, dari tahun 2019 sebesar 40 persen menjadi 87,27 persen di tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman *stakeholder* terkait dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Tabel 2. 66
Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD
di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Program dan kegiatan responsif gender di SKPD	%	40	56,6	83,01	90,56	87,27

Sumber: Dinas KB PP dan PA Kab. Cilacap, 2023

Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif

Perkembangan persentase keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kabupaten Cilacap Tahun 2019 yaitu 39,72 persen sampai tahun 2023 tetap 39,72 persen. Meskipun persentase perempuan dalam legislatif di Kabupaten Cilacap lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten sekitar, namun dapat terpenuhi dari target 22 persen. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain peran organisasi politik yang mempunyai andil cukup besar terhadap peningkatan motivasi perempuan untuk ikut dalam legislatif serta dukungan dan motivasi dari suami maupun keluarga.

Tabel 2. 67
Keterwakilan Perempuan yang menjadi Anggota Legislatif
di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Keterwakilan Perempuan yang menjadi anggota Legislatif	%	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72

Sumber: Dinas KB PP dan PA Kab. Cilacap, 2023

Persentase Perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha

Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha mencapai 45,11 persen tahun 2019 menjadi 47,62 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 68
Persentase Perempuan Yang Bekerja atau Mempunyai Usaha
di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha	%	45,11	43,97	46	47,42	47,62

Sumber: Dinas KB PP dan PA Kab. Cilacap, 2023

Rasio Korban Kekerasan Berbasis Gender

Terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi perempuan dan anak-anak dapat ditunjukan dari rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari tahun 2019 hingga 2022 rasio KDRT menunjukkan angka yang fluktuatif, yaitu sebesar 0,0007 pada tahun 2019 dan 0,0004 di tahun 2023. Penurunan kasus kekerasan perempuan dan anak dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian KDRT pada lembaga yang tersedia.

Tabel 2. 69
Rasio Korban Kekerasan Berbasis Gender
di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Korban Kekerasan berbasis gender	%	0,00007	0,0001	0,0001	0,0001	0,00004
Korban Kekerasan berbasis gender	kasus	7	10	10	10	4

Sumber: Dinas KB PP dan PA Kab. Cilacap, 2023

Perlindungan Anak

Secara umum capaian pembangunan dalam hal Perlindungan Anak sudah baik. Beberapa capaian indikator perlu ditingkatkan antara lain Persentase Kecamatan yang mampu memenuhi hak Anak pada tahun 2022 sebesar 8,33 persen; Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten pada tahun 2022 sebesar 0,02 persen; Persentase kecamatan yang memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada tahun 2022 sebesar 7,9 persen.

Tabel 2. 70
Capaian Perlindungan Anak di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	%	83,33	100	100	100	100
2	Kategori KLA	kategori	Madya (638)	Madya (638)	Nindya (705)	Nindya (703,8)	Nindya (713,35)
3	Persentase Kecamatan yang mampu memenuhi hak Anak	%	-	-	4	8,33	16,67
4	Persentase kecamatan yang memiliki PUSPAGA	%	-	-	1,6	7,9	33,34
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,124	0,226	0,018	0,02	0,000 192

Sumber: Dinas KB, PP dan PA Kab. Cilacap, 2023

Pada tahun 2019 Kabupaten Cilacap telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan predikat Madya (skor 638), dan pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya (skor 713,35). Hal ini dapat tercapai dengan dukungan berupa pembentukan kelembagaan dan penyusunan regulasi tentang perlindungan Anak.

9) Pangan

Ketersediaan pangan yang cukup, harga terjangkau, aman, memenuhi gizi seimbang dan dapat diakses oleh semua warga adalah upaya mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan masyarakat Cilacap pada khususnya. Pelayanan urusan

pangan tahun 2019-2023 dilakukan melalui berbagai aspek antara lain : ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

Regulasi Bidang Pangan

Dalam rangka penyelenggaraan pangan, pemerintah daerah menetapkan regulasi sebagai upaya kebijakan pangan di daerah. Pada tahun 2022 telah ditetapkan 2 (dua) regulasi daerah di bidang pangan yang masih berlaku hingga saat ini yaitu : 1) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap; 2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Bagi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil.

Tabel 2. 71
Regulasi Pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan	Dokumen	1	3	3	3	2

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

Ketersediaan Pangan Utama, Energi dan Protein Per kapita

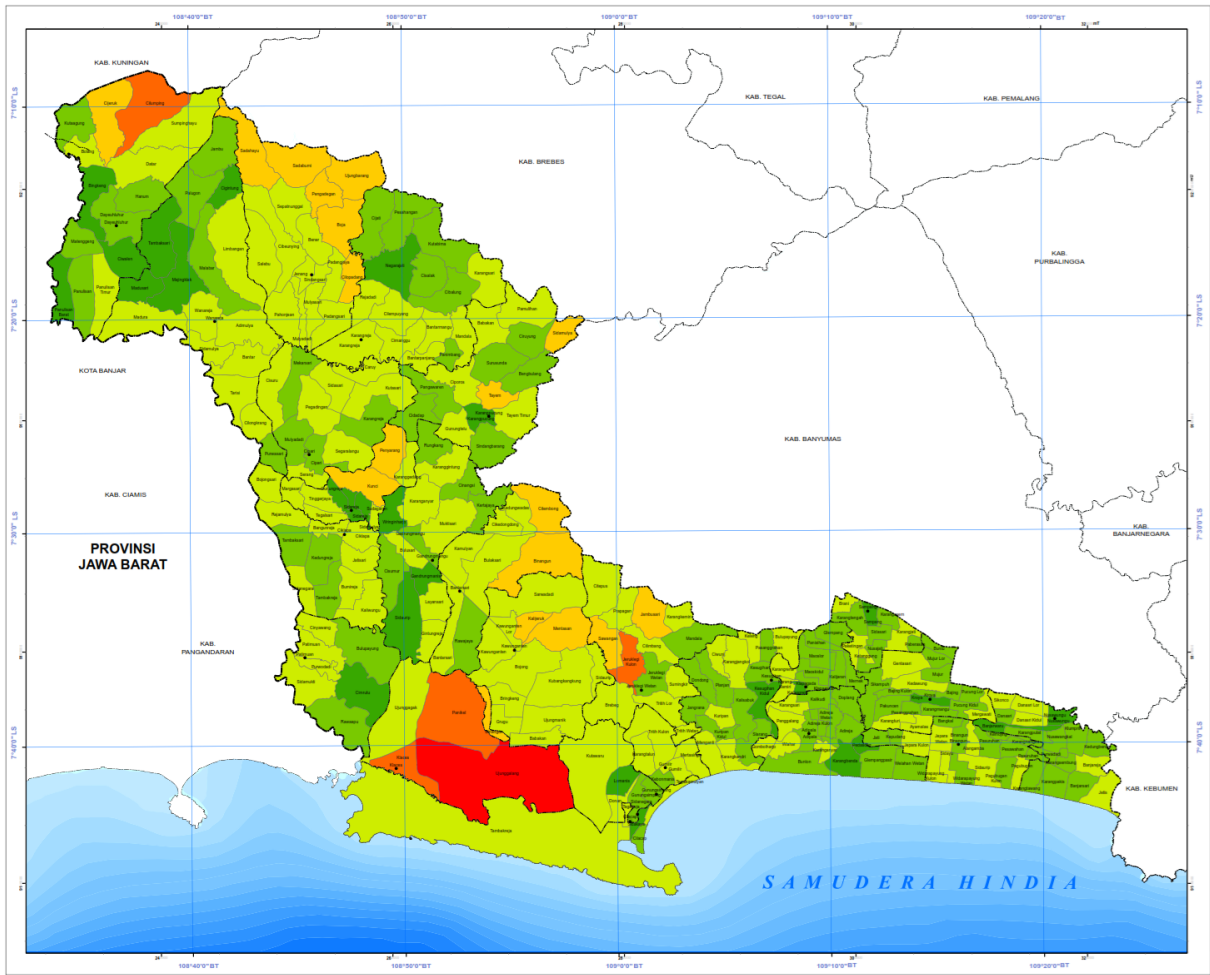
Ketersediaan pangan utama setiap tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 mencapai 147 persen sudah melebihi kebutuhan utama, sedangkan tahun 2023 mencapai 168 persen dengan ketersediaan energi dan protein per kapita sudah mencapai 100 persen di tahun 2023.

Tabel 2. 72
Ketersediaan Pangan Utama, Energi dan Protein Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan pangan utama	%	147	185	170,3	168,5	168
Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

Daerah Rawan Pangan



Sumber: Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Gambar 2. 37
Peta Daerah Rawan Pangan Kabupaten Cilacap

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa/kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa/kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa/kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa/kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 284 desa yang ada di Kabupaten Cilacap maka didapatkan 1 desa/kelurahan (Prioritas 1), 4 desa/kelurahan (Prioritas 2), 17

desa/kelurahan (Prioritas 3), 134 desa/kelurahan (Prioritas 4), 102 desa/kelurahan (Prioritas 5) dan 26 desa/kelurahan (Prioritas 6).

Daerah Rentan Rawan Pangan adalah wilayah yang mengalami kondisi ketidakcukupan pangan pada waktu tertentu, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses ekonomi dan fisik yang terbatas terhadap pangan, kualitas dan keamanan pangan yang tidak memadai, serta harga pangan yang tidak terjangkau. Penanganan daerah rawan pangan melibatkan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, baik yang bersifat kronis maupun transien, melalui program-program yang efektif dan efisien. Penanganan daerah rentan rawan pangan selain untuk mengatasi kerawanan pangan akibat bencana alam dan gagal panen, juga diarahkan untuk rumah tangga miskin. Upaya yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat miskin dan/atau pada daerah rawan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, antara lain kegiatan Kelompok Afinitas pada Desa Mandiri Pangan dan fasilitasi lumbung pangan masyarakat di daerah yang mengalami defisit pangan pada saat masa tanam atau berpotensi rawan pangan/miskin. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui intervensi bantuan pangan. Daerah rentan rawan pangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 13,73 persen di tahun 2021 menjadi 7,75 persen atau 22 desa/kelurahan dari 284 desa/kelurahan pada tahun 2023.

Tabel 2. 73
Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase daerah rawan pangan	%	n.a	n.a	13,73	13,02	7,75

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

Skor Pola Pangan Harapan

Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dapat diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor pola pangan harapan di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar

86,2 persen menjadi sebesar 89,3 persen pada tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Cilacap yang masih bergantung pada konsumsi beras dibandingkan dengan konsumsi umbi-umbian. Selain itu masih kurang seimbang keragaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat terutama buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian serta protein dari hewani.

Tabel 2. 74
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	86,2	84,4	85	86,9	89,3

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat

Untuk memperpendek rantai distribusi dan mendukung stabilitas harga pangan maka dibentuk usaha distribusi pangan masyarakat berupa lembaga distribusi pangan (gapoktan, toko tani) maupun usaha perorangan, namun jumlahnya masih terbatas, sampai dengan tahun 2023 jumlah lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah 50 unit.

Tabel 2. 75
Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah usaha distribusi pangan masyarakat	Unit	39	50	50	50	50

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

Pangan Segar Asal Tumbuhan yang teregistrasi

Pengelolaan pangan segar asal tumbuhan telah dilaksanakan secara optimal. Tahun 2023 tersedia produk pangan segar asal tumbuhan yang teregistrasi sebanyak 137 produk PSAT.

Tabel 2. 76
Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Teregistrasi Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang teregistrasi	PSAT	15	18	90	115	137

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

Peredaran Jenis Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Dari 20 jenis makanan yang dilakukan survei dan uji kandungan bahan yang berbahaya, terdapat 13 jenis makanan yang dinyatakan negatif dan 7 jenis makanan yang masih positif mengandung bahan berbahaya sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut terhadap produsen makanan.

Tabel 2. 77
Peredaran Jenis Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya	%	55	55	35	35	35

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

Jumlah kecamatan rawan pangan transien (bencana) dan kronis (kemiskinan)

Kecamatan di Kabupaten Cilacap sebanyak 24 Kecamatan dan semuanya memiliki kerawanan pangan baik transien (bencana) maupun kronis (kemiskinan). Di Tahun 2023, dari 24 Kecamatan tersebut terdapat 11 Kecamatan yang memiliki desa-desa dengan potensi rawan pangan.

Tabel 2. 78
Jumlah kecamatan rawan pangan transien (bencana) dan kronis (kemiskinan) di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kecamatan rawan pangan transien (bencana) dan kronis (kemiskinan)	Kecamatan	24	24	13	13	11

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

10) Pertanian

Persentase kasus / permasalahan tanah yang ditindaklanjuti relatif stabil mencapai 100 persen pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 walaupun terjadi fluktuasi tiap tahunnya. Sedangkan persentase capaian pengadaan tanah bersertifikat realisasi 40 persen pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 100 persen.

Tabel 2. 79
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kasus / permasalahan tanah yang ditindaklanjuti	%	100	80	100	96,8	100
2	Persentase capaian pengadaan tanah bersertifikat	%	40	83,33	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian Kab. Cilacap, 2023

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanian berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi Masyarakat, melalui Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 592/202/19/Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap, mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Kabupaten Cilacap yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Cialcap telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang sudah mendapat stimulasi penataan aset melalui reforma agraria di antaranya dengan melakukan pembinaan kelompok UMKM dan pentaan RTH. Selain itu juga berkoordiniasi dengan perusahaan untuk menyalurkan TJSLP ke lokasi aset dimaksud. Capaian pelaksanaan program Reforma Agraria dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 80
Capaian Program Reforma Agraria Tahun 2023

SK GTRA	Sumber Tanah	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Bidang	Penataan Akses
- Keputusan Bupati Cilacap Nomor 592/202/19/TAHUN 2023 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap tanggal 03 Maret 2023	Usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan (PPTPKH)	Cimrutu	Patimuan	1097	Keputusan Bupati Cilacap Nomor:590/501/19/Tahun 2023 Tentang Penetapan Kawasan Eks Bong China Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap sebagai Kampung Reforma Agraria Tahun 2023
		Rawaapu	Patimuan	129	
		Bantarpanjang	Cimanggu	127	
		Cilempuyang	Cimanggu	4	
		Pamulihan	Karangpucung	143	
		Ujunggagak	Kampung Laut	70	
		Bantarsari	Bantarsari	27	
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor 246/SK-33.01.NP.02.03/III/2023 Tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap	LPRA HGU PT.Rumpun Sari Antan (RSA)	Caruy	Cipari	494	▪ CSR dari PT. Sumber Segara Primadaya (S2P) PLTU Cilacap berupa uang bantuan untuk pembangunan Gedung ARA Center ▪ Rencana Pembangunan RTH di lapangan donan oleh pemkab Cilacap tahun 2025 ▪ Lokasi Penataan Akses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten berupa pelatihan pembuatan stick kelor dan dimsum kelor dengan target 200 KK.
		Mekarsari			
		Karangreja			
		Kutasari			
	Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara	Donan	Cilacap Tengah	165	

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cilacap, 2023

11) Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Gambaran kualitas lingkungan hidup dapat ditunjukkan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan/hutan.

Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru dilakukan Tahun 2017 dimana dari hasil pengukuran mengalami penurunan dari 69,93 persen pada tahun 2019 menjadi 65,66 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 81
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,93	71,75	71,93	72,86	65,66

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2024

Komponen penyusun IKLH adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Untuk IKU mengalami

peningkatan, dari 82,79 pada tahun 2019 menjadi 92,45 pada tahun 2023. Capaian IKA mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, 48,21 pada Tahun 2019 kemudian naik menjadi 48,95 pada tahun 2023. Sedangkan IKL menunjukkan nilai tersebut mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi tiap tahunnya yaitu dari 76,57 pada tahun 2019 menjadi 44,82 pada tahun 2023. Kedua nilai tersebut menunjukkan kondisi tutupan hutan di Kabupaten Cilacap relatif stabil tanpa adanya pengurangan luas wilayah hutan primer dan sekunder.

Tabel 2. 82
IKU, IKA dan IKTL Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,79	80,07	80,09	92,80	92,45
Indeks Kualitas Air	Indeks	48,21	49,26	49,39	43,45	48,95
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	76,57	82,38	82,72	79,97	44,82

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2024

Berdasarkan Surat Sekditjen PPKL Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 terkait konversi capaian IKLH tahun 2023, maka hasil pengukuran IKLH Kabupaten Cilacap tahun 2023 menjadi IKLH sebesar 74,76; IKA sebesar 68,97; IKU sebesar 87,18; IKL sebesar 61,74.

Penetapan target IKLH pada RPD tahun 2022-2026 menggunakan dasar PERMENLHK Nomor 27 Tahun 2021, dimana nilai IKA dihitung masih dengan pembandingan kelas air; nilai IKU dihitung dari olahan data sampling NO2 dan SO2 metode *passive sampler*; nilai IKL (tutupan vegetasi) dihitung dari pemetaan sendiri terhadap luasan tutupan vegetasi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mulai tahun 2024, perhitungan IKA menggunakan rumusan standar Indonesia (penyempurnaan PERMENLHK No. 27/2021), perhitungan nilai IKU menggunakan 3 parameter yaitu NO2, SO2 dan PM2,5; dan nilai IKL (tutupan vegetasi) mengacu pada pemetaan lahan nasional tahun 2022.

Pengelolaan Sampah

Persampahan telah menjadi permasalahan penting di wilayah kabupaten Cilacap, khususnya pada kawasan permukiman perkotaan. Volume sampah yang semakin meningkat, tempat pembuangan sampah yang semakin sempit dan sulitnya mencari tempat pembuangan sampah baru merupakan permasalahan utama yang mendesak untuk segera dijadikan alternatif solusinya. Indikator kinerja terkait pengelolaan sampah meliputi : persentase pengurangan sampah, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA. Kondisi

pengangkutan sampah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 persentase pengangkutan sampah mencapai 45,88 persen naik menjadi 65,14 persen di tahun 2023.

Dari sisi pengurangan sampah di perkotaan juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 persentase pengurangan sampah perkotaan tercatat 9,26 persen, naik menjadi 13,56 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya implementasi 3 R (*reuse, reduce and recycling*) di kawasan perkotaan.

Sedangkan potensi timbunan sampah tiap tahun semakin meningkat, di iringi dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap, yang pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 348.406,57 Kg.

Salah satu kenaikan pengelolaan sampah pada sisi pengurangan oleh masyarakat terjadi pada bank sampah unit. Terhitung sejak tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah bank sampah sebesar 100 persen setiap tahunnya atau bertambah sebesar 45 bank sampah.

Mendasari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2022 Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Cilacap sebesar 53,94 persen, sedangkan tahun 2023 data belum rilis.

Tabel 2. 83
Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	9,26	12,6	13,5	13,55	13,56
2	Persentase penanganan sampah	%	45,88	62,4	65,05	65,10	65,14
3	Potensi Timbunan Sampah	Kg/ Tahun	339.437 ,21	340.738 ,95	344.409 ,04	347.055 ,78	348.406 ,57
4	Bank sampah	Unit	45	55	47	198	225
5	Komposting	ton/hari	0,021	0,141	0,749	0,050	3,57
6	Daur Ulang	ton/hari	0,090	0,461	0,076	12,04	8,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2023

Indikator kinerja pada pengelolaan sampah adalah merupakan bagian dari Upaya Pemkab Cilacap untuk mendukung capaian SDGs tujuan ke-6 yaitu : ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.

Dokumen Lingkungan

Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan dalam rangka

pengambilan sebuah kebijakan. Mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 telah tersedia sebesar 100 persen. Sedangkan dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan adalah 100 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 84
Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku	%	100	100	100	50	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2023

Indikator ketersediaan dokumen lingkungan hidup menjadi indikator target Kabupaten Cilacap untuk mendukung capaian SDGs tujuan ke-15 yaitu : melindungi, memperbaharui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasai tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Dokumen perencanaan pada tahun 2019-2022 merupakan pembuatan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen DIKPLHD dan dokumen IKLH. Pada tahun 2022 Target yang ditetapkan adalah 50 persen dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan penilaian tanpa menyusun dokumen IKLH. Permasalahan yang ada dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait UU Cipta Kerja yang merubah beberapa kebijakan dari pusat hingga daerah. Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi kabupaten/kota terkait untuk dapat menyusun dokumen perencanaan (RPPLH, DIKPLHD) dengan tepat dan sesuai dengan peraturan dan perkembangan kondisi di Kabupaten Cilacap.

Pengaduan Masyarakat Terkait Kasus Lingkungan

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelayanan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 seluruh Pengaduan Masyarakat/Kasus Lingkungan dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan atau 100 persen, berjumlah 15 dari total 15 kasus lingkungan. Dugaan pencemaran lingkungan yang disampaikan melalui laporbup, laporgub, SP4Nlapor dan

web, harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan batas waktu. Untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan, DLH melaksanakan sosialisasi terhadap para pelaku usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

Tabel 2. 85
Tindak Lanjut Kasus Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2023

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kabupaten Cilacap memiliki banyak industri yang menghasilkan limbah B3 dimana dalam pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa limbah B3 yang dihasilkannya telah diangkut, dimanfaatkan, dimusnahkan, diolah ataupun ditimbun dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut maka usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 mengalami peningkatan dari 11,87 persen pada tahun 2019, menjadi 100 persen pada tahun 2023. Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Rintek Pengelolaan Limbah B3 sejumlah 48 usaha/kegiatan dari total 48 usaha/kegiatan yang wajib memiliki Rintek Pengelolaan Limbah B3. Sampai dengan tahun 2023 sudah ada 48 usaha/kegiatan yang wajib memiliki Rintek Pengelolaan Limbah B3 atau 100 persen.

Faktor pendorong ketercapaian target izin pengelolaan B3 karena ada upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman pada pelaku usaha atau kegiatan di bidang Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sehingga pemenuhan data dukung kelengkapan administrasi dan komitmen dalam Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 mudah dilakukan. Perlu adanya evaluasi pelaporan data pelaku usaha dan atau kegiatan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 terhadap kegiatan usaha yang dilakukan

Indikator kinerja pada pengelolaan limbah B3 adalah merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mendukung capaian SDGs tujuan ke-6 yaitu : ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.

Tabel 2. 86
Ijin Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	%	11,87	11,2	16,5	13,34	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2023

Pendidikan Lingkungan

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan maka Pendidikan lingkungan sangat diperlukan. Pendidikan lingkungan sangat berperan dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan dalam mewujudkan hidup yang berkelanjutan. Ada tiga cara dalam Pendidikan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu dengan Sekolah Adiwiyata (pendidikan mulai usia dini), mendorong tumbuhnya kelompok peduli lingkungan dan jumlah rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R. Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan mengalami peningkatan sejak Tahun 2019 yang hanya berjumlah 50 kelompok menjadi 418 kelompok pada Tahun 2022, sekolah adiwiyata mengalami peningkatan, dari 59,62 persen pada tahun 2019 menjadi 82,94 persen atau sebanyak 141 sekolah yang dilakukan pembinaan dari 171 sekolah pada tahun 2023, sedangkan jumlah RT yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023 dimana hal ini selaras dengan amanat tujuan ke-12 TPB/SDGs yaitu : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan. Dengan melakukan pembinaan, memberikan apresiasi, piagam dan sertifikat penghargaan dapat memperbesar antusias masyarakat untuk semangat dan lebih peduli terhadap lingkungan.

Tabel 2. 87
Pendidikan Lingkungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	kelompok	50	69	132	418	521
2	Sekolah adiwiyata	%	59,62	64,1	68,3	70	82,94
3	Jumlah Rumah Tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3 R	KK	2.397	5.063	7.170	9,8	12,5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2023

Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dalam Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Tahun 2020-2030, Kabupaten Cilacap menargetkan penurunan emisi sebesar 20,8 persen pada tahun 2030 atau setara dengan 16.664,6 Gg CO2eq (16.664.600 Ton CO2eq)

dari total emisi sebesar 80.199,47 Gg CO₂eq (80.199.470 Ton CO₂eq). *Baseline* emisi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 adalah sebesar 35.267,66 Gg CO₂eq (34.267.660 Ton CO₂eq) sesuai Laporan IGRK Tahun 2021 di RAD Pengendalian Perubahan Iklim Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang berbasis GRK yang merupakan kebijakan baru maka Kabupaten Cilacap dalam dokumen RPD 2023-2026 pada akhir periode RPD 2026, menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 11.500 Gg CO₂eq (11.500.000 Ton CO₂eq) dari total emisi yang diestimasi sebesar 52.434,72 Gg CO₂eq (52.434.720 Ton CO₂eq) dan diharapkan pada akhir tahun 2030 terpenuhi target sesuai dengan dokumen RAD Gas Rumah Kaca. Dari 5 sub sektor penghasil emisi gas rumah kaca di Kabupaten Cilacap, sektor energi adalah penyumbang terbesar. Pada tahun 2020 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 91 persen atau setara dengan 32.448,99 Gg CO₂eq (32.448.990 Ton CO₂eq). Hal ini berpengaruh pada penetapan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2023 sudah melakukan penurunan Gas Rumah Kaca sebesar 11.446,97 Gg CO₂e (11.446.970 Ton CO₂eq).

Pada tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga menyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perubahan iklim dunia sebagaimana dinyatakan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia sebagai bagian dari komitmen pada *Conference of the Parties* (COP). RAD Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Cilacap, diarahkan untuk mendukung Kebijakan Prioritas nasional sebagaimana yang tertuang dalam NDC mencakup sektor air, pertanian dan kesehatan.

12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kepemilikan dan Rasio/Persentase Penduduk ber KTP

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. 88							
Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023							
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	rasio	98,84	99,85	99,4	98,05	98,4
2	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	orang	1.437.965	1.443.438	1.449.492	1.506.303	1.535.588

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cilacap, 2024

Ketercapaian hingga tahun 2023 mencapai 98,4 persen karena data kependudukan merupakan data yang sangat dinamis, dimana setiap harinya

mengalami perubahan data dikarenakan jumlah penduduk wajib KTP-el terus mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Namun demikian usaha untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el kepada pemohon terus dilakukan percepatan dan untuk menjangkau para pemohon hingga pelosok wilayah dilakukan pelayanan *admindukcapil* mobile (menggunakan mobil) ke desa-desa serta ke rumah penduduk secara langsung bagi penduduk yang termasuk kondisi rentan (lanjut usia/disabilitas).

Dalam Rangka Percepatan Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), telah dikeluarkan Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap yaitu penduduk yang berumur 17 Tahun atau lebih, penduduk yang berumur dibawah 17 tahun yang sudah berstatus kawin, penduduk yang sudah melaksanakan perekaman KTP-el dan memiliki ponsel wajib melakukan aktivasi IKD pada tahun 2023. Capaian penduduk yang sudah ber IKD pada tahun 2023 adalah sebesar 34.422 dari jumlah wajib KTP sebanyak 1.535.588. Upaya yang dilakukan untuk percepatan pencapaian IKD adalah:

1. Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, UPTD *Yandukcapil*, Kecamatan diwajibkan untuk aktivasi IKD.
2. Memfasilitasi penduduk untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui *Video Call Whatsapp*.
3. Melakukan jemput bola perekaman KTP sekaligus pelayanan aktivasi IKD.

Kepemilikan Akte Kelahiran

Secara umum dari Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan data manual (data pelayanan) pada tahun 2017 dan seterusnya yang dipakai berdasarkan database kependudukan (data elektronik) yang ada didalam SIAK. Data manual adalah data jumlah penerbitan akta kelahiran dari terbentuknya catatan sipil sampai dengan tahun pelaporan. Sedangkan data elektronik kepemilikan akta kelahiran adalah data penduduk yang sudah termasuk memiliki akta kelahiran yang ada didalam SIAK.

Kepemilikan akte kelahiran dalam kurun waktu tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, dari 87,47 persen di tahun 2019 menjadi 94,4 persen di tahun 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 89
Perkembangan Kepemilikan Akte Kelahiran
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	87,47	87,81	88,24	92,09	94,4
2	Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	Orang	469.319	486.076	486.026	481.460	492.322
3	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	%	46,91	48,51	42,68	44,69	46,42
4	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	Orang	908.881	949.780	845.509	900.450	943.418

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cilacap, 2024

Kepemilikan akta kelahiran yang terus meningkat, didorong oleh beberapa faktor pendorong diantaranya :

1. Sosialisasi yang intens baik melalui tatap langsung maupun melalui berbagai media media sosial sehingga membuat kesadaran masyarakat mulai meningkat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai identitas hukum dan sebagai kunci pelayanan publik lainnya seperti Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Hal ini membuat masyarakat segera melaporkan kelahiran yang terjadi untuk dicatatkan pada akta kelahiran.
2. Kemudahan pendaftaran akta kelahiran online melalui aplikasi “Dolan Teluk Penyu”.

Perkawinan yang dicatat

Rasio perkawinan yang dicatat di Catatan Sipil tahun 2019-2023 sudah mencapai kinerja yang baik dengan capaian 100 persen.

Tabel 2. 90
Perkawinan yang Dicatatkan di Catatan Sipil
di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perkawinan yang dicatat di catatan sipil	perkawinan	125	107	124	155	123

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cilacap, 2024

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah dikembangkan secara *on-line* dari Kabupaten Cilacap ke provinsi dan pusat dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara lebih optimal, serta sebagai bentuk pencapaian target pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu dalam pelaksanaannya SIAK didukung pula dengan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan peralatan infrastruktur pendukung.

Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Keluarga

Cakupan penerbitan akta kematian Tahun 2019-2023 mengalami penurunan menjadi 30,6 persen pada tahun. Penurunan cakupan penerbitan akta kematian dikarenakan dokumen akta kematian baru di ajukan sebagai dasar pelayanan publik yang ada kaitannya dengan ahli waris atau pihak ketiga yang berkepentingan. Sedangkan cakupan penerbitan kartu keluarga Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari 94,72 persen pada tahun 2019 menjadi 99,93 persen di tahun 2023.

Tabel 2. 91
Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Keluarga di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan penerbitan akta kematian	%	43,9	34,9	33,99	34,5	30,6
	Jumlah penerbitan akta kematian	Orang	5.538	4.313	6.381	4.989	4.357
2	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	94,72	97,6	95,82	98,37	99,93
	Jumlah penerbitan Kartu Keluarga	Orang	686.304	636.419	723.951	671.010	683.390

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Penataan Desa

Fasilitasi Penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa menuju Desa Mandiri. Salah satu Langkah strategis adalah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur desa berupa Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang mendapatkan alokasi sebanyak 310 titik/unit di tahun 2019 menjadi 966 unit/titik di tahun 2023. Pelaksanaan Kinerja Penataan Desa ini dibuktikan dengan hasil penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM) 269 Desa di Kabupaten Cilacap ditahun 2019 adalah 0,6834 mengalami peningkatan rata-rata di tahun 2023 adalah 0,7455. Hal ini sudah menunjukkan bahwa ditahun 2022 sudah tidak ada desa tertinggal dan Desa Mandiri mengalami peningkatan dari 2,3 persen atau 4 Desa di tahun 2019 menjadi 14,71 persen atau sebanyak 48 Desa sampai dengan tahun 2023.

Peningkatan indikator tersebut salah satunya tidak terlepas dari faktor pendorong berupa dukungan Pemerintah dengan memberikan bantuan

keuangan kepada desa untuk membangun akses infrastruktur, adaya Dana Desa yang dialokasi untuk pembangunan desa, adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil. Untuk lebih jelasnya gambaran Kinerja Penataan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 92
Kinerja Penataan Desa di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	79,17	0	71,43	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	2,3	3,85	5,75	10,84	14,71
3	Desa Mandiri	Desa	4	7	10	28	48
4	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	310	4.874 (penerima BLT Bansus)	617	710	966
5	Nilai IDM	Rata-rata	0,6834	0,6911	0,7017	0,7247	0,7455

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cilacap, 2023

Peningkatan Kerjasama Desa

Pemberdayaan Peningkatan kerjasama desa dalam rangka pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Fasilitasi Kerjasama Desa sudah diterapkan oleh 269 Desa di Kabupaten Cilacap melalui Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten sebanyak 21 Dokumen, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten menghasilkan sebanyak 15 Dokumen di tahun 2023. Kerjasama terkait pemanfaatan aset dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, di Tahun 2023 sudah mempunyai 9 kawasan perdesaaan.

Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota yang sejumlah 21 dokumen kerjasama dihasilkan dari kerjasama antar desa di setiap kecamatan yang dikenal dengan BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa. Sementara itu, Kerjasama antar desa dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan antar desa yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu. Dari 9 kawasan Kerjasama perdesaan di Kabupaten Cilacap, 7 kawasan dibentuk melalui Peraturan Bupati Cilacap Nomor 160 tahun 2020 tentang Penetapan

Kawasan Perdesaan Kabupaten Cilacap, satu Kawasan perdesaan dibentuk melalui Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Payungbaja Berdikari dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Lokasi Perdesaan Balongtapa.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau Kelurahan yaitu lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan dan suatu mitra dari pemerintah desa dalam pemberdayaan Masyarakat yang berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipatif dan juga swadaya gotong royong Masyarakat. Sedangkan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan Masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, mengembangkan kemitraan, memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Masyarakat.

Di Kabupaten Cilacap sendiri terdapat 25.558 LKD yang terdiri dari RT, RW, Karang Taruna Desa, Karang Taruna Kelurahan, PKK RT, PKK RW, LPM Desa, LPM Kelurahan, Posyandu Desa dan Posyandu Kelurahan. Dari berbagai macam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibentuk dengan tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan dan fungsi di atas, jumlah LKD yang dibina mulai Tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2019 total ada 852 lembaga (orang) dan terus naik di tahun 2020 akumulasi menjadi 1.136 lembaga (orang). Lanjut di tahun 2021 terdapat 1.420 lembaga (orang), tahun 2022 ada 1.988 lembaga (orang) dan terakhir data di tahun 2023 terdapat 2.556 lembaga (orang) LKD yang dibina.

Adanya peningkatan jumlah LKD yang dibina dipengaruhi oleh faktor pendukung ketersediaan anggaran APBD Kabupaten Cilacap yang dialokasikan untuk pembinaan dan bimbingan pelatihan bagi pengurus ataupun anggota LKD dalam rangka pemberdayaan pengurus dan anggota LKD, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Tabel 2. 93
Kondisi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LKD di Kabupaten Cilacap yang dibina	Orang/ Lembaga	852	1.136	1.420	1.988	2.556

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cilacap, 2023

Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan dan pengembangan administrasi desa dan kualitas perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan penguatan pada kelengkapan perencanaan pembangunan desa. Tidak hanya dengan perencanaan, pembinaan dan pengawasan juga mengarah pada pengelolaan keuangan dan aset desa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dibuktikan dengan sudah disusunnya RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa 269 Desa di Kabupaten Cilacap tiap tahun. Selain itu pembinaan dan pengembangan administrasi desa salah satunya di bidang perekonomian dan atau pelayanan umum juga maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. BUMDes sendiri terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, potensi Desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip salah satunya terbuka dan professional. Sehingga diperlukan pembekalan dan pembinaan bagi Bumdes/BUMDesma terutama di bidang manajemen administrasi.

Tahun 2023 di tiap desa sudah mempunyai BUMDes dan sudah 100 persen terbentuk semua sejumlah 269 BUMDes dan ada 20 BUMDesma yang sudah terbentuk. Sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang BUMDes Pasal 7 bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama harus memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia, maka untuk memperoleh status badan hukum Pemerintah Desa wajib melakukan pendaftaran BUMDes/BUMDesma kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa. Sebanyak 269 Bumdes di tahun 2023 dari 269 BUMDes yang terbentuk sudah ada 186 BUMDes yang sertifikat badan hukum atau sebesar 69,14%. Sedangkan BUMDesma sejumlah 20 BUMDesma atau 100% sudah memperoleh status badan hukum.

Tabel 2. 94
Kondisi Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes	Desa	269	269	269	269	269
2	Prosentase BUMDES yang terbentuk	%	81,4	82,25	82,25	100	100
3	Jumlah BUMDES yang telah bersertifikasi Badan Hukum	BUMDES	na	na	14	138	186
4	Jumlah BUMDESMA yang telah bersertifikasi Badan Hukum	BUMDESMA	na	na	na	na	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cilacap, 2023

Peningkatan capaian kinerja Administrasi Pemerintahan Desa tersebut diatas didukung dengan adanya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang terencana, adanya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel melalui pembinaan Siskeudes, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa untuk menginventarisir dan mengamankan aset desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk memberikan pemahaman tentang aturan dan Undang-Undang Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa untuk peningkatan perekonomian desa serta adanya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha penanggulangan kependudukan yang merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan dan bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk. Gambaran mengenai perkembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana setidaknya dapat dilihat dari perkembangan capaian data antara lain persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) dan persentase *Unmet need*.

Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Cilacap mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,6 persen, dan di tahun 2023 mencapai 0,88 persen.

Tabel 2. 95
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,6	1,65	1,17	1,28	0,88

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cilacap, 2023

Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif

Jumlah peserta KB Aktif selama periode 2019-2023 fluktuatif tiap tahunnya, di tahun 2021 mengalami penurunan yang semula 70,26 di tahun 2020 menjadi 67,13 di tahun 2021. Penurunan ini disebabkan antara lain tingginya penggunaan alat kontrasepsi non MKJP, keyakinan sebagian masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat tentang KB, berkurangnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta adanya pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesertaan KB antara lain melalui peningkatan penggunaan alat kontrasepsi MKJP, peningkatan kapasitas PPKBD mengingat keterbatasan jumlah PLKB, kerjasama peningkatan KB di lingkungan perusahaan, peningkatan kepesertaan KB Pria, advokasi kabupaten/kota yang kesertaan KB MKJPnya rendah, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Tabel 2. 96
Peserta KB Aktif di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
1	2019	379.804	266.211	70,09
2	2020	388.924	273.250	70,26
3	2021	348.058	233.649	67,13
4	2022	334.359	218.960	65,49
5	2023	339.708	227.164	66,87

Sumber : Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap, 2023

Total Fertility Rate (TFR) dan Unmet Need KB

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak yang dimiliki perempuan selama masa reproduksinya, di Kabupaten Cilacap tahun 2019 mencapai 2,18 dan menurun di tahun 2019-2023 mencapai 1,81 per 1.000 perempuan.

Tabel 2. 97
TFR di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Total Fertility Rate (TFR)	Per 1.000 perempuan	2,18	2,11	2,04	2,04	1,81

Sumber : Dinas KB PP dan PA Kab. Cilacap, 2023

Unmet need KB (persentase perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB) dari tahun 2019-2023 secara umum mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2022 sebesar 15 persen atau 2.014.746 orang lebih banyak dari tahun 2019 sebesar 12,64 persen atau 1.937.427 orang. Peningkatan ini disebabkan keyakinan agama sebagian masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi *unmet need* KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase *unmet need* KB nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB.

Tabel 2. 98
***Unmet Need* KB Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (orang)	Unmet Need KB (%)
1	2019	379.804	1.937.427	12,64
2	2020	386.980	1.945.220	12,72
3	2021	348.058	1.980.912	15,46
4	2022	334.359	2.014.746	15
5	2023	339.708	2.032.570	13,77

Sumber : Dinas KB PP dan PA Kab. Cilacap, 2023

Peran Aktif Kelompok Tribina

Desa/kelurahan yang memiliki Tribina KB aktif sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 93, naik dibandingkan tahun 2020 sejumlah 69 desa/kelurahan.

Tabel 2. 99
Persentase Tri Bina Aktif di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina KB aktif	%	66	69	93	93	100

Sumber : Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap, 2023

Peningkatan Peran Masyarakat

Upaya untuk menyukseskan program KB adalah melalui peningkatan peran masyarakat dalam mensosialisasikan program KB. Peran masyarakat tersebut antara lain melalui kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Bina Keluarga Balita (UPPKS- BKB) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Peningkatan peran UPPKS-BKB dengan mengikutsertakan anggota yang masih usia subur dalam program KB.

Tabel 2. 100
Peran Masyarakat Program KB di Kab. Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	67,03	74,02	61,99	76,19	76,19
Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif	%	24	48	70	70	75

Sumber : Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap, 2023

15) Perhubungan

Perhubungan Darat

Kondisi pelaksanaan urusan Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu tahun 2019-2028 menunjukkan untuk V/C rasio sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan rata-rata kondisi lalu-lintas yang ada dengan arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Selain itu adanya penurunan trayek yang dilayani karena jumlah kendaraan angkutan umum semakin menurun. VC rasio sendiri adalah derajat kejenuhan jalan atau (v/c) rasio, yaitu jumlah arus lalu-lintas yang ditampung pada suatu kapasitas jalan.

Indikator lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah indeks konektivitas yaitu daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada. Nilai indeks konektivitas Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,66 menjadi 0,76. Kenaikan ini dikarenakan mulai adanya penataan pada trayek dan lintasan penyeberangan. Upaya kedepannya dengan mengoptimalkan penataan yang lebih baik pada trayek dan lintasan penyeberangan di Kabupaten Cilacap sehingga capaian indeks konektivitas dapat terus meningkat.

Jumlah kasus kecelakaan di Kabupaten Cilacap cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yaitu dari 898 kejadian menjadi 1.195 kejadian. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Untuk menekan kenaikan angka kecelakaan, upaya yang dilakukan ke depannya yaitu dengan melaksanakan sosialisasi keselamatan dan tertib berlalu lintas.

Tabel 2. 101
Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
VC Rasio	Indek	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38
Indeks Konektivitas	Indek	0,83	0,83	0,71	0,66	0,76
jumlah Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Titik	3	3	3	3	3
Jumlah kasus kecelakaan	Kejadian	898	851	867	1.150	1.195

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, 2023

Dalam Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Perda No 1 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap, dijelaskan bahwa untuk pengembangan rencana jaringan jalan transportasi darat khususnya rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari pembangunan dan pengembangan terminal penumpang, terminal barang dan kantong parkir. Terminal barang dan kantong parkir direncanakan di Kawasan Perkotaan Cilacap, Majenang, Sidareja, Maos dan Kroya. Sedangkan untuk terminal penumpang direncanakan di Perkotaan Cilacap (Type A), Kecamatan Kroya dan Majenang (Type B) serta type C di Kecamatan Adipala, Sampang, Kawunganten, Sidareja, Karangpucung, Rawaapu, Majenang dan Wanareja.



Gambar 2. 38
Peta Jaringan Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Cilacap

Jumlah terminal tipe C di Kabupaten Cilacap sesuai dengan SK Bupati Cilacap No : 551.2/591/17/Tahun 2015 tentang Penetapan lokasi Terminal

Type C di Kabupaten Cilacap, terdapat 9 lokasi terminal Tipe C yang ada di Kabupaten Cilacap (Kroya, Adipala, Sampang, Kawunganten, Sidareja, Karangpucung, Rawaapu, Majenang dan Wanareja). Sampai dengan tahun 2022, terdapat satu terminal yang tidak beroperasi yaitu Terminal Rawaapu Kecamatan Patimuan, karena sepiunya kendaraan angkutan yang beroperasi dan kondisi fisik yang rusak berat, serta terdapat dua terminal yang kurang layak untuk beroperasi yaitu Terminal Sampang dan Wanareja disebabkan karena daya tampung dan fasilitas terminal yang kurang memenuhi standar.

Tabel 2. 102
Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Nama Terminal				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Adipala	Terminal Bus Adipala	Terminal Bus Adipala	Terminal Bus Adipala	Terminal Bus Adipala	Terminal Bus Adipala
2.	Kawunganten	Terminal Bus Kawunganten	Terminal Bus Kawunganten	Terminal Bus Kawunganten	Terminal Bus Kawunganten	Terminal Bus Kawunganten
3.	Sidareja	Terminal Bus Sidareja	Terminal Bus Sidareja	Terminal Bus Sidareja	Terminal Bus Sidareja	Terminal Bus Sidareja
4.	Karangpucung	Terminal Bus Karangpucung	Terminal Bus Karangpucung	Terminal Bus Karangpucung	Terminal Bus Karangpucung	Terminal Bus Karangpucung
5.	Majenang	Terminal Bus Majenang	Terminal Bus Majenang	Terminal Bus Majenang	Terminal Bus Majenang	Terminal Bus Majenang
6.	Wanareja	Kurang Layak Beroperasi	Kurang Layak Beroperasi	Kurang Layak Beroperasi	Kurang Layak Beroperasi	Kurang Layak Beroperasi
7.	Sampang	Kurang Layak Beroperasi	Kurang Layak Beroperasi	Kurang Layak Beroperasi	Kurang Layak Beroperasi	Kurang Layak Beroperasi
8.	Kroya	Terminal Bus Kroya	Terminal Bus Kroya	Terminal Bus Kroya	Terminal Bus Kroya	Terminal Bus Kroya
9.	Rawaapu	Tidak Beroperasi	Tidak Beroperasi	Tidak Beroperasi	Tidak Beroperasi	Tidak Beroperasi

Sumber : SK Bupati No. 551.2/591/17 Tahun 2015 Tahun tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap

Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 sebesar 39,55 persen naik menjadi 46 persen di Tahun 2022. Kenaikan ini dikarenakan adanya pengadaan perlengkapan jalan tiap tahun dan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Tabel 2. 103
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, warning light)	%	39,55	40,3	46,01	47	46
Rambu jalan	Buah	1.632	1.782	1.992	2.113	2.253
Marka jalan	m ²	10.058,15	10.058,15	12.385	13.052	14.384,66
Traffic light	Unit	14	14	15	16	17
Warning light	Unit	22	22	26	28	30
Guardrail	M	1.238	1.238	1.311	1.359	1.359
Deliniator	Buah	467	467	621	621	621

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, 2023

Jumlah Izin Trayek Tahun 2019-2023 mengalami penurunan yaitu tahun 2019 sejumlah 309 ijin menjadi sejumlah 39 ijin pada tahun 2023. Penurunan ijin trayek sebagian besar diakibatkan berkembangnya jasa angkutan yang menggunakan teknologi *online* dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang dimiliki sebagian masyarakat serta dengan adanya OSS para operator angkutan umum belum siap untuk memenuhi persyaratannya. Kemudian adanya pembatasan usia kendaraan angkutan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku juga mempengaruhi berkurangnya jumlah ijin trayek. Upaya kedepannya dilakukan pembinaan terhadap operator perusahaan angkutan umum dan pendampingan pemenuhan persyaratan melalui OSS.

Tabel 2. 104
Pelayanan Angkutan Darat di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Izin Trayek Perkotaan	72	57	45	59	23
2.	Jumlah Izin Trayek Pedesaan	194	116	71	17	10
3.	Jumlah Izin Trayek Perbatasan	38	8	8	4	0
4.	Jumlah Izin Trayek Rintisan	5	6	6	6	6
	Jumlah Ijin Trayek	309	187	130	86	39
	Rasio Ijin Trayek	77,95	61,31	69,51	67,72	45,35

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, 2023

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dari tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif. Adanya kenaikan jumlah KBWU pada tahun 2022 sampai tahun 2023 dari 14.098 kendaraan menjadi 14.872 kendaraan. Jumlah KIR kendaraan cenderung mengalami penurunan walaupun pada tahun 2021 mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Rasio kelayakan juga mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2023, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas salah satunya dengan melakukan uji KIR kendaraan secara berkala. Upaya yang dilakukan kedepannya adalah dengan pelaksanaan operasi laik jalan secara berkala.

Tabel 2. 105
Kelayakan Kendaraan Umum di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah KBWU	11.999	11.332	13.296	14.098	14.872
2.	Jumlah KIR Kendaraan	19.252	12.182	12.980	12.412	10.891
3.	Rasio Kelayakan	1,6	1,08	0,98	0,88	0,73

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, 2023

Tahun 2021 jumlah penumpang yang datang melalui Terminal di Kabupaten Cilacap sebanyak 181.486 orang dan yang berangkat sebanyak

215.790 orang. Tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah penumpang sebanyak 220.481 orang yang datang dan 276.869 orang yang berangkat dari Terminal. Pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan jumlah penumpang sebanyak 211,109 orang yang datang dan 252.142 orang yang berangkat dari Terminal. Sedangkan untuk jumlah kendaraan angkutan darat yang datang dan berangkat melalui Terminal di Kabupaten Cilacap, pada tahun 2021 sebanyak 45.779 kendaraan dan 88.583 kendaraan. Tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi sebanyak 43.635 kendaraan datang dan 86.431 kendaraan berangkat. Pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan pada kendaraan datang menjadi sebanyak 43.965 dan ada penurunan kendaraan berangkat sebanyak 78.516.

Daerah Operasi V Purwokerto atau disingkat dengan Daop V Purwokerto atau Daop V PWT (Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Purworejo) adalah salah satu daerah operasi perkeretaapian di Indonesia, di bawah lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di bawah Direksi PT Kereta Api Indonesia. Daerah Operasi V Purwokerto memiliki beberapa stasiun besar, yaitu Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Kroya, dan Stasiun Maos. Dipo kereta api berada di Stasiun Purwokerto dan Stasiun Kutoarjo, sedangkan dipo lokomotif berada tak jauh dari Stasiun Purwokerto.

Di Kabupaten Cilacap terdapat sekitar 14 Stasiun Kereta Api dengan berbagai jenis ukuran dan fungsi, yaitu Stasiun Cipari, Stasiun Meluwung, Stasiun Sidareja, Stasiun Gandrungmangu, Stasiun Kawunganten, Stasiun Jeruklegi, Stasiun Lebeng, Stasiun Kesugihan, Stasiun Maos, Stasiun Sikampuh, Stasiun Kroya, Stasiun Karangandri, Stasiun Gumilir dan Stasiun Cilacap.

Stasiun Cilacap (CP) merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Stasiun yang terletak pada ketinggian +8 m ini adalah stasiun kereta api yang letaknya paling selatan di Daerah Operasi V atau DAOP V Purwokerto yaitu di Kabupaten Cilacap. Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 1 sebagai sepur lurus, tetapi hanya jalur 1-4 yang sering digunakan. Stasiun ini merupakan stasiun paling ujung di lintas Kroya-Maos-Cilacap. Sekalipun demikian, dari utara jalur kereta api masih meneruskan jalan dengan membelok ke barat, lalu ke utara, dan akhirnya berhenti di area Pelabuhan Tanjung Intan. Di dekat stasiun terdapat dipo lokomotif. Stasiun ini juga menjadi tempat parkir untuk kereta api Purwojaya, kereta api Wijayakusuma,

gerbong-gerbong avtur, serta beberapa lokomotif diesel hidroaulis untuk aktivitas langsir dari dan ke depot Pertamina.

Stasiun Kroya (KYA) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di Bajing, Kroya, Cilacap. Stasiun yang terletak pada ketinggian +11 meter ini termasuk dalam DAOP 5 Purwokerto dan merupakan stasiun yang lokasinya paling timur di Kabupaten Cilacap. Stasiun yang terletak di jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa ini menjadi pertemuan antara jalur kereta api dari arah Bandung-Tasikmalaya dengan jalur kereta api dari arah Cirebon-Purwokerto. Hal ini menjadikan stasiun ini merupakan stasiun yang memiliki tingkat lalu lintas KA terpadat di Daop V sekaligus teramai di Kabupaten Cilacap, dan untuk mengakomodasinya, emplasemen stasiun ini dibuat sepanjang sekitar 900 m. Saat ini lintas jalur pada stasiun ini menuju ke arah Cirebon dan Kutoarjo sudah berupa jalur ganda. Dengan adanya jalur ganda tersebut, rute Jakarta-Kroya via Purwokerto-Cirebon maupun sebaliknya sudah dapat ditempuh selama 5,5–6 jam saja. Secara bertahap jalur ganda tersebut akan disambungkan dengan jalur ganda segmen Solo Jebres-Jombang yang sudah aktif sepenuhnya sejak akhir November 2019, dan terakhir ke Surabaya via Kertosono-Mojokerto.

Panjang lintasan kereta api dari ujung barat di Stasiun Cipari hingga Stasiun Kroya di ujung Timur Kabupaten Cilacap sekitar 62,38 Km. Panjang lintasan kereta api diujung utara di Stasiun Kesugihan hingga Stasiun Cilacap di ujung Selatan Kabupaten Cilacap sekitar 17,19 Km. Total panjang lintasan aktif kereta api yang melintas di Kabupaten Cilacap sekitar 82,5 Km.

Tabel 2. 106
Panjang Lintasan Stasiun di Kabupaten Cilacap di Wilayah DAOP 5 Purwokerto berdasarkan bentang arah Timur ke Barat hingga ke Selatan

Jarak Antar Stasiun (Km)	Stasiun Cipari	Stasiun Kesugihan	Stasiun Maos	Stasiun Kroya	Stasiun Cilacap	Keterangan
Stasiun Cipari	-	48,11	51,06	62,38	65,31	Stasiun di ujung barat Kab. Cilacap
Stasiun Kesugihan	48,11	-	2,95	14,27	17,20	Stasiun persimpangan arah mata angin
Stasiun Maos	51,06	2,95	-	11,32	20,15	Stasiun di bagian selatan Kab. Cilacap
Stasiun Kroya	62,38	14,27	11,32	-	31,47	Stasiun di ujung timur Kab. Cilacap
Stasiun Cilacap	65,31	17,20	20,15	31,47	-	Stasiun di ujung selatan Kab. Cilacap

Sumber : BAPPEDA Kab. Cilacap (diolah), 2023

Tabel 2. 107
Stasiun di Kabupaten Cilacap di Wilayah DAOP 5 Purwokerto berdasarkan Kelas, Layanan dan Status

No.	Stasiun	Kelas	Ketinggian	Layanan	Status
1	Stasiun Cipari	III/kecil	+11m	Hanya Persilangan & Persusulan Kereta Api	aktif
2	Stasiun Meluwung	III/kecil	+5m	Hanya Persilangan & Persusulan Kereta Api	aktif

No.	Stasiun	Kelas	Ketinggian	Layanan	Status
3	Stasiun Sidareja	II	+5m	Penumpang	aktif
4	Stasiun Gandrungmangu	III/kecil	+15m	Penumpang	aktif
5	Stasiun Kawunganten	III/kecil	+15m	Hanya Persilangan & Persusulan Kereta Api	aktif
6	Stasiun Jeruklegi	III/kecil	+10m	Hanya Persilangan & Persusulan Kereta Api	aktif
7	Stasiun Lebeng	III/kecil	+11m	Hanya Persilangan & Persusulan Kereta Api	aktif
8	Stasiun Kesugihan	III/kecil	+9m	Hanya Persilangan & Persusulan Kereta Api	aktif
9	Stasiun Maos	Besar tipe C	+8m	Penumpang & Ketel BBM	aktif
10	Stasiun Sikampuh	III/kecil	+8m	Hanya Persilangan & Persusulan Kereta Api	aktif
11	Stasiun Kroya	Besar tipe B	+11m	Penumpang & Parcel ONS	aktif
12	Stasiun Karangkandri	III/kecil	+8m	Hanya Persilangan & Persusulan Kereta Api	aktif
13	Stasiun Gumilir	III/kecil	+7m	Penumpang	aktif
14	Stasiun Cilacap	I	+5m	Penumpang	aktif

Sumber : BAPPEDA Kab. Cilacap (diolah), 2023

Adapun fasilitas keselamatan jalan pada perlintasan sebidang rel kereta api khusus di ruas jalan kabupaten, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 108
Fasilitas Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Kereta Api

No	Stasiun	Jml Lintas	Fasilitas Keselamatan									
			Marka Jalan	Lampu	Palang Pintu	Pos Jaga	Pita Penggaduh	Stop	Larangan 1	Larangan 2	Peringatan 1	Peringatan 2
1	Perbatasan-Meluwung	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Meluwung-Cipari	18	0	1	3	0	0	4	4	4	2	0
3	Cipari-Sidareja	22	2	3	4	2	0	3	4	0	4	0
4	Sidareja-Gandrungmangu	10	0	1	1	1	0	0	0	3	2	2
5	Gandrungmangu-Kawunganten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kawunganten-Jeruklegi	35	1	2	5	3	0	6	10	0	6	2
7	Jeruklegi-Lebeng	29	0	2	6	3	0	6	3	1	6	2
8	Lebeng-Maos	40	0	2	8	4	0	7	8	2	7	2
9	Maos-Sikampuh	9	0	0	2	1	0	0	2	2	2	0
10	Sikampuh-Kroya	15	0	1	2	1	0	2	2	2	3	2
11	Kroya-Kemranjen	33	0	0	3	2	4	6	6	4	5	3
12	Kebasen-Randegan	30	4	3	2	1	0	6	4	2	6	2
13	Randegan-Kroya	29	2	3	2	2	0	7	0	3	8	2
14	Gumilir-Karangtalun	23	0	2	4	2	0	4	6	1	3	1
15	Kesugiha-Karangkandri	47	0	4	8	4	0	8	12	2	7	2
16	Karangkandri-Gumilir	14	0	1	2	1	0	2	6	0	2	0
17	Gumilir-Cilacap	110	4	17	16	8	6	19	20	3	14	3
18	Cilacap-Cilacap Pelabuhan	13	0	1	2	1	0	2	6	0	1	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Sudah ada 7 (tujuh) perlintasan tidak sebidang dengan rel kereta api di Kabupaten Cilacap. Namun demikian, kebutuhan berdasarkan tingkat lalu lintas yang padat dan memerlukan perlintasan tidak sebidang ada 2 (dua) lokasi di Desa Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten dan di Pasar Kroya, Kecamatan Kroya.

Tabel 2. 109
Perlintasan Tidak Sebidang Kereta Api

No	Titik Perlintasan Tidak Sebidang	Lintas	Kecamatan	Lebar Jalan (M)	Status Jalan
1	Underpass Sidaurip	Km 372+1/2 petak Sta. Jeruklegi - Sta. Kawunganten	Kawunganten	4	Kabupaten
2	Pasar Sitinggil	Km 357+3/4 petak Sta. Kawunganten - Sta. Gandrungmangu	Bantarsari	4	Kabupaten
3	Desa Cipari	Km 339+2/3 petak Sta. Cipari - Sta. Mluwung	Cipari	3,5	Kabupaten
4	Terowongan Jembluk (Underpass Ds. Bajing Kulon)	Km 399+5/6 petak St. Kroya - Sta. Sikampuh	Kroya	4,25	Kabupaten
5	Jembatan KA Sikampuh (Underpass Ds. Sikampuh)	Km 396+2/3 petak Sta. Sikampuh - Sta. Maos	Kroya	4,25	Kabupaten
6	Overpass Sigong	Km 404+9/0 petak Sta. Kroya - Sta. Kemranjen	Kroya	5	Kabupaten
7	Overpass Kedawung	Km 375+4/5 petak Sta. Kroya - Sta. Randegan	Kroya	4,5	Kabupaten

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Tahun 2023 jumlah penumpang Kereta Api di Stasiun Cilacap sebanyak 133.037 orang yang terbagi berdasarkan kelas, yaitu kelas Eksekutif 65.665 penumpang dan kelas Ekonomi 67.372 penumpang.

Perhubungan Udara

Bandar Udara di Kabupaten Cilacap 1 buah, yaitu Bandara Tunggul Wulung dengan *run way* sepanjang 1.400 m x 30 m. Adapun perkembangan pelayanan Perhubungan Udara sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 110
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Frekuensi Penerbangan	982	238	52	34	36
Penumpang (orang)	9.339	1.359	441	277	261

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2024

Kantor UPBU Kelas III Bandara Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024

Indikator kinerja pada penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara adalah merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mendukung capaian SDGs tujuan ke-9 yaitu : Membangun

Infrastruktur yang Berketahanan, Mendorong Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Membina Inovasi.

Perhubungan Laut

Untuk jaringan transportasi laut mencakup Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan, pengembangan terminal khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), yang meliputi TUKS minyak di Kecamatan Cilacap Selatan dan Tengah, TUKS Kecamatan Kesugihan, TUKS gas alam cair atau LNG, Terminal Khusus batubara di Kecamatan Adipala dan Terminal Khusus serta TUKS di Kawasan peruntukan industri.

Kabupaten Cilacap memiliki 15 dermaga penyeberangan yaitu dermaga Seleko, Lomanis, Cigintung, Perkuyan, Kutawaru, Alasmalang, Kalipanas, Prenca, Wijayapura, Sodong, Ciperet, Motehan, Klaces, Ujunggagak/Karanganyar, dan Patimuan. Tahun 2021 jumlah penumpang yang naik melalui dermaga sebanyak 142.220 orang dan yang turun sebanyak 142.303 orang. Pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan jumlah penumpang sebanyak 134.868 orang yang naik dan 135.318 orang yang turun dari dermaga. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah penumpang sebanyak 250.367 orang yang naik dan 244.274 orang yang turun dari dermaga.

Pengelolaan Parkir

Dasar pengelolaan parkir di Kabupaten Cilacap adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018.

Pengelolaan Parkir sampai dengan tahun 2017 mendasari pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Tipe B Pada Dinas Perhubungan.

Pengelolaan parkir tahun 2018 dilakukan melalui kerja sama daerah dengan Badan Hukum melalui pelelangan dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Pasal 4 Berikut Penjelasannya);

2. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Pengelolaan parkir tahun 2019 masih dilakukan melalui kerja sama daerah dengan pihak ketiga Perseorangan/Badan Hukum/Ormas yang berbadan hukum maupun tidak melalui pelelangan dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
2. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Sedangkan Pengelolaan parkir pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dilakukan melalui kerja sama daerah dengan pihak ketiga dengan Perseorangan/Badan Hukum/Ormas yang berbadan hukum maupun tidak melalui pelelangan dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
2. Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Jenis pendapatan yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Hasil retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah di dapat dari 3 (tiga) jenis retribusi, yaitu :

- Retribusi Jasa Umum, yaitu Retribusi Parkir tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi jasa kepelabuhanan.
- Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi ijin trayek.

2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Adapun lain-lain

PAD sah di dapat dari :

- Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
- Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

16) Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan daerah melalui

website resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap di alamat *www.cilacapkab.go.id*. Selain *website* resmi tersebut, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sejumlah 55 OPD juga telah memiliki *website*. Pada tahun 2019, sudah 50 OPD (91 persen) telah melakukan *update website* dari 55 OPD yang ada. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah OPD yang melakukan *update website* hanya sebanyak 38 OPD (70 persen), namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 44 OPD (80 persen). Jumlah OPD yang melakukan *update website* tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 111
Jumlah OPD Kabupaten Cilacap Memiliki *Website* dan yang Melakukan *Update Data Pada Website* Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Total OPD	Jumlah OPD yang memiliki <i>Website</i>	% OPD yang memiliki <i>Website</i>	Jumlah OPD yang melakukan <i>up dating data pada Website</i>	% OPD yang melakukan <i>up dating data pada Website</i>
2019	55	55	100 %	50	91
2020	55	55	100 %	38	70
2021	55	55	100 %	38	70
2022	55	55	100 %	44	80
2023	55	55	100 %	55	100

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap, 2023

Dalam mewujudkan informasi yang *up-to-date*, ada beberapa faktor yang mendukung, antara lain :

1. Tim Pengelola yang Kompeten yang terdiri dari ahli IT, *content creator*, dan *editor* yang mampu mengelola dan memperbarui konten secara efektif;
2. Sistem dan teknologi yang mendukung berupa *platform website* yang stabil, aman, dan mudah diakses;
3. Koordinasi yang baik antara tim pengelola website dan berbagai pihak untuk memastikan informasi yang diterima akurat dan terkini, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Persentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 35 persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 75 persen, sedangkan persentase *website update* mengalami peningkatan juga dari tahun 2019 sebesar 54,5 persen menjadi 100 persen pada tahun 2023.

Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan meningkat dari tahun 2019 sebesar 25 persen menjadi 100 persen pada tahun 2023, sedangkan persentase penyebaran informasi melalui mass media dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mencapai 100 persen.

Tabel 2. 112
Kinerja Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi	%	35	60	58	75	75
2	Persentase Website Update	%	54,5	70	70	80	100
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan	%	25	25	58	100	100
4	Persentase penyebaran informasi melalui mass media	%	100	98	90	100	100
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,43	3,13	2,81	2,87	3,46
	- Indeks Kebijakan SPBE		n.a.	3,53	3,60	4,30	3,6
	- Indeks Tata Kelola SPBE		n.a.	2,86	2,10	2,10	2,1
	- Indeks Manajemen SPBE		n.a.	n.a.	1,00	1,00	1,4
	- Indeks Layanan SPBE		n.a.	3,15	3,63	3,56	3,6

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap, 2023

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah ukuran untuk menilai tingkat kematangan dan efektivitas implementasi *e-government*. Nilai indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa baik instansi tersebut dalam menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Cilacap sejak tahun 2018 telah melaksanakan evaluasi SPBE. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, pada tahun 2019 indeks SPBE mencapai 2,43 dengan kategori “Cukup”. Pada tahun 2021, evaluasi SPBE disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan menggunakan metode evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan. Tahun 2023 indeks SPBE Kabupaten Cilacap meningkat menjadi 3,46 dengan Kategori “Baik” dan meraih urutan 19 diantara 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi ini dapat dicapai berkat dukungan kuat dari semua OPD terkait.

Indeks SPBE Kabupaten Cilacap baru mencapai 3,46 (skala 5), masih di bawah 3,5 / *standar world class*), yang dibentuk oleh aspek kebijakan, aspek tata kelola, aspek manajemen dan aspek layanan. Adapun aspek yang masih lemah adalah aspek manajemen dengan nilai 1,4 dan aspek tata kelola dengan nilai 2,1. Kelemahan dalam aspek manajemen disebabkan oleh belum adanya peta rencana SPBE dan belum maksimalnya pengamanan informasi (minimnya infrastruktur dan SDM siber yang professional), Adapun lemahnya tata kelola SPBE disebabkan oleh belum adanya standar dan prosedur operasional yang baku untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan SPBE.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Selanjutnya pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten/Kota ini dievaluasi setiap tahun untuk mendapatkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE tersebut.

Terkait dengan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cilacap berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 480/624/36/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cilacap yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2020 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 555/297/36/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cilacap yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2022. Adapun harmonisasi kebijakan SPBE diantara Propinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Rancangan Peraturan Gubernur tentang SPBE dan Rapat Koordinasi Teknis SPBE yang difasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya terkait dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dari beberapa kali sosialisasi, bimtek dan pelatihan terkait dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Media Informasi dan SDM Penggiat Infokom maka telah dibentuk 21 KIM di Kabupaten Cilacap, telah dilakukan publikasi melalui media sosial dan *website* Pemkab Cilacap tentang KIM, kemudian tiap KIM juga melakukan publikasi kegiatan yang mereka laksanakan di desanya masing-masing melalui media digital seperti Instagram, Youtube, Facebook dan lain sebagainya sesuai dengan platform yang dimiliki. Untuk kerjasama dalam pembuatan konten bersama belum pernah dilakukan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika ke depan hal tersebut dapat dilakukan. Adapun terkait dengan optimalisasi media penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan Diskominfo Propinsi Jawa Tengah sebagai fasilitatornya.

Kemudian terkait dengan mandat untuk membentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), di Kabupaten Cilacap belum terbentuk Tim CSIRT untuk penanganan insiden *cyber* karena belum tersedianya SDM keamanan informasi, akan tetapi telah ada rintisan Tim CSIRT yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap Nomor : 487.12/0024/36 tentang Tim Tanggap Insiden *Cyber* di Lingkungan Diskominfo Kabupaten Cilacap yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2022.

Isu lain yang dihadapi adalah selama ini belum ada standarisasi keseragaman pola diantara jenis, tipe dan basis data diantara provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan *Aplication Program Interface* (API) untuk menghubungkan antara basis data yang telah tersedia sehingga terjadi keseragaman pola. Kabupaten Cilacap telah memiliki *website* satu data yang baru sebatas menampilkan publikasi data dan belum sampai ke tahap pengolahan data, ke depan akan dibuat aplikasi satu data yang terintegrasi.

17) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan dan penurunan melihat dari data di atas yaitu tahun 2019 sebesar 5,39 persen, tahun 2020 sebesar 1,97 persen, tahun 2021 sebesar 3,31 persen, tahun 2022 sebesar 2,29 persen, dan tahun 2023 sebesar 3,4 persen hal ini disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan persentase pertumbuhan UMKM menjadi turun, tetapi untuk jumlah UMKM dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan melihat dari data di atas yaitu tahun 2019 sebesar 19.407 unit usaha, tahun 2020 sebesar 19.789 unit usaha, tahun 2021 sebesar 20.371 unit usaha, tahun 2022 sebesar 20.970 unit usaha, dan tahun 2023 sebesar 21.681 unit usaha. Pertumbuhan Jumlah usaha mikro dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan melihat dari data di atas yaitu tahun 2019 sebesar 17.237 unit usaha, tahun 2020 sebesar 17.557 unit usaha, tahun 2021 sebesar 18.159 unit usaha, tahun 2022 sebesar 18.758 unit usaha, dan tahun 2023 sebesar 19.469 unit usaha.

Sedangkan capaian indikator persentase koperasi aktif dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah, bahwa ketentuan terkait jumlah orang yang dapat membentuk Koperasi Primer dirubah dari sebelumnya Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Perubahan

peraturan perundang-undangan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap penambahan jumlah koperasi di Kabupaten Cilacap baik Koperasi Simpan Pinjam maupun Koperasi sektor riil. Jumlah Koperasi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,99 persen dari 385 koperasi pada tahun 2019 menjadi 435 koperasi pada Tahun 2023. Demikian pula jumlah Koperasi Simpan Pinjam dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,16 persen dari 146 koperasi pada tahun 2019 menjadi 155 koperasi pada Tahun 2023. Sementara itu jumlah pengelola koperasi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 50,40 persen dari 865 orang pada tahun 2019 menjadi 1.301 orang pada Tahun 2023, penambahan jumlah pengelola koperasi terjadi selain dikarenakan berdirinya koperasi yang baru disebabkan pula oleh adanya perluasan layanan koperasi kepada para anggotanya melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tentu saja membutuhkan penambahan para pengelola koperasi.

Tabel 2. 113
Capaian Kinerja Urusan Koperasi Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	5,39	1,97	3,31	2,29	3,4
2	Persentase koperasi aktif	%	85,25	85,86	68,58	68,87	67,87
3	Jumlah Koperasi	koperasi	385	400	414	426	435
4	Jumlah koperasi aktif	koperasi	236	250	264	276	285
5	Jumlah KSP/USP	koperasi	146	149	149	154	155
6	Jumlah Pengelola Koperasi	orang	865	1.099	1.280	1.198	1.301
7	Jumlah UMKM	unit usaha	19.407	19.789	20.371	20.970	21.681
8	Jumlah usaha mikro	unit usaha	17.237	17.557	18.159	18.758	19.469

Sumber : DPKUKM Kabupaten Cilacap, 2023

18) Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui indikator realisasi investasi yang ada baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (melalui pertumbuhan pertumbuhan nilai investasi dan proyek PMA dan PMDN).

Tabel 2. 114
Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tahun	Jumlah Proyek			Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN (%)
	PMA	PMDN	Jumlah	
2019	0	28	28	-91,69
2020	2	60	62	121,42
2021	0	189	189	204,83
2022	11	317	328	73,54
2023	0	544	544	65,85

Sumber : DPMPTSP Kab. Cilacap, 2023

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN di Kabupaten Cilacap kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan pada jumlah proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap hal ini selaras dengan kemudahan – kemudahan yang diberikan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cilacap. Pertumbuhan jumlah Proyek di Kabupaten Cilacap khususnya di sektor Perdagangan dan Jasa Lainnya masih mendominasi. Bahwa perizinan berusaha telah berganti dari OSS 1.0 ke OSS-RBA, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Data realisasi investasi dihitung berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pada tahun 2021 jumlah proyek sebesar 189 dan mengalami peningkatan sebesar 73,54 persen pada tahun 2022 menjadi 328 proyek. Kemudian, mengalami peningkatan lagi sebesar 65,85 persen pada tahun 2023 menjadi 544 proyek.

Tabel 2. 115
Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Nilai Investasi (RUPM)	%	841,07	437,51	139,60	150,50	132,12
2	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Izin	5.311	6.058	5.856	12.637	35.250
3	Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	12	19,09	34,13	12,25	71,48
4	Jumlah Perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Perusahaan	309	425	751	1.092	2.559
5	Jumlah Perusahaan yang seharusnya melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Perusahaan	2.575	2.226	2.200	8.916	4.369
6	Jumlah Keminatan Investasi	buah	23	19	20	45	60

Sumber: DPMPTSP Kab Cilacap, 2023

Indikator Persentase Nilai Investasi (RUPM) selalu melampaui target atau di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cilacap dan patuhnya para pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya. Pada indikator jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selalu meningkat dari periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya kemudahan proses perizinan melalui OSS-RBA, namun demikian dalam hal pengawasan diperketat sesuai dengan konsep “Trust by verified”. Sementara, pada indikator Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara garis besar cenderung naik. Hal ini disebabkan para pelaku usaha patuh dalam melaporkan kegiatan usahanya secara online melalui OSS-RBA. Hal ini juga selaras dengan peningkatan indikator Jumlah Perusahaan yang melaporkan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk indikator Jumlah Perusahaan yang seharusnya melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengalami peningkatan karena peningkatan jumlah pelaku usaha skala menengah dan besar. Selanjutnya, untuk indikator Jumlah Keminatan Investasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan *Letter of Interest* (LoI) yang ada.

19) Kepemudaan dan Olahraga

Peran aktif kepemudaan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Jumlah organisasi maupun kepemudaan meningkat dari tahun 2019 sejumlah 37 menjadi 41 di tahun 2023. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan jumlah wirausaha muda menjadi prioritas Kabupaten Cilacap dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2024.

Upaya membangun sektor olahraga dilaksanakan dengan menyiapkan sarana dan prasarana olahraga, sampai dengan tahun 2023 telah tersedia 263 unit sarana dan prasarana olahraga. Pembinaan klub olahraga dan cabang olahraga selain oleh KONI Kabupaten Cilacap juga dilakukan oleh Perusahaan, baik milik negara (BUMN dan BUMD) maupaun milik swasta. Melalui upaya pembinaan ini, prestasi atlet yang diikuti dalam Popda tingkat Provinsi tahun 2019 sejumlah 389 atlet berprestasi, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2022 karena adanya Pandemi Covid-19, maka Popda tingkat Provinsi dilaksanakan secara terbatas. Sedangkan pada tahun 2023 dengan meningkatnya pendampingan terhadap atlet-atlet dan cabang olahraga yang diikuti, membuahkan 11 atlet berprestasi pada Popda Provinsi.

Tabel 2. 116
Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	Organi sasi	37	39	39	41	41
2	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	216	218	263	263	263
3	Rasio Lapangan Olahraga terhadap penduduk	Per 10.000	2,85	2,68	2,88	2,85	2,85
4	Prestasi Popda Provinsi	Atlet	19	11	11	8	11

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap 2023

20) Statistik

Ketersediaan data statistik/informasi perkembangan daerah berguna untuk bahan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Penyediaan data/informasi yang cepat, tepat dan akurat akan memudahkan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan. Ketersediaan Buku Cilacap Dalam Angka dan PDRB

Kabupaten Cilacap yang disusun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sangat membantu dalam penyediaan data/informasi untuk perencanaan pembangunan daerah setiap tahun.

Permasalahan terkait dengan ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Cilacap adalah waktu terbit/release data yang sering terlambat sehingga data yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Cilacap yang diukur dengan indikator persentase pemanfaatan dokumen statistik, realisasi mencapai 100 persen pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Data statistik yang disediakan sampai saat ini baru dalam bentuk 3 (tiga) dokumen, yaitu dokumen Data Dasar Kabupaten Cilacap, dokumen Kecamatan Dalam Angka, dan dokumen PDRB Kabupaten Cilacap. Adapun data statistik sektoral yang lain belum dapat dimanfaatkan secara optimal, hal ini disebabkan oleh waktu terbit yang sering terlambat.

Tabel 2. 117
Persentase Pemanfaatan Dokumen Statistik
di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pemanfaatan dokumen statistic	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kab Cilacap, 2023

21) Persandian

Pelaksanaan urusan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi, namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan belum mencukupi. Pelaksanaan urusan bidang persandian dan keamanan informasi se-Kabupaten Cilacap belum didukung oleh SDM dan sarana dan prasarana yang memadai. Idealnya, urusan persandian dikelola oleh minimal 4 (empat) orang yang kompeten dalam persandian dengan spesifikasi pendidikan S1 Teknologi Informasi. Sampai dengan tahun 2023, sudah ada 4 (empat) orang pengelola persandian dengan jenjang pendidikan 1 orang S2, 1 orang S1, 1 orang D3, dan 1 orang SMA. Hal ini berdampak pada pengelolaan persandian yang belum tertangani secara optimal dan baru terbatas pada dokumen surat menyurat, belum optimal pada pengamanan informasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sampai saat ini dokumen persandian yang dikelola oleh Diskominfo sangat terbatas, dimana surat-surat yang menggunakan kode persandian masih sangat sedikit.

Tabel 2. 118
Persentase Surat Yang Menggunakan Persandian Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase surat yang menggunakan persandian	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kab Cilacap, 2023

22) **Kebudayaan**

Urusan Kebudayaan menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap di tahun 2017 sesuai dengan perubahan SOTK dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap (Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap). Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan terus bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2019 hanya ada 17 Cagar Budaya, pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi 96 Cagar Budaya dan yang telah mendapat SK Bupati sebanyak 21 Cagar Budaya. Sedangkan untuk Tim ahli cagar budaya pada tahun 2023 mengalami kevakuman dikarenakan salah satu Tim Ahli Cagar Budaya purna tugas, ditambah telah berakhirnya masa aktif sertifikat Tim Ahli Cagar Budaya, maka pada tahun 2023 dilakukan kegiatan penyiapan calon-calon Tim Ahli Cagar Budaya untuk registrasi sertifikasi sebagai Tim Ahli Cagar Budaya.

Tabel 2. 119
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Cagar Budaya		17	21	96	96	96
2	Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	Orang	5	5	4	4	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap, 2023

23) **Perpustakaan**

Perkembangan perpustakaan ditunjukkan dengan indikator antara lain jumlah koleksi judul buku perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan, dan jumlah SDM Perpustakaan yang memiliki kompetensi jika memungkinkan ada yang lulus uji kompetensi dan lulus sertifikasi (memiliki sertifikat kompetensi) dari lembaga yang kompeten.

Jumlah koleksi perpustakaan mengalami kecenderungan meningkat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, yaitu dari 35.825 judul buku menjadi 39.597 judul buku (81.838 buku), akan tetapi tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebanyak 20.640 judul buku (60.623 buku). Untuk jumlah pengunjung perpustakaan juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 67.310 pengunjung di tahun 2019 menjadi 1.381.344 pengunjung pada tahun 2022, hal ini dikarenakan hadirnya perpustakaan *online* sehingga memudahkan masyarakat untuk membaca dan meminjam buku, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah

pengunjung menjadi 202.878 saja. Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat perpustakaan dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu 240 SDM menjadi 768 SDM. Capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 120
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	67.310	49.646	81.300	1.381.344	202.878
2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	eksemplar	70.591	77.541	79.618	81.838	60.623
3	Jumlah judul buku perpustakaan	judul	35.825	38.579	38.816	39.597	29.640
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	240	418	548	668	768

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, 2023

24) Kearsipan

Arsip memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai sumber informasi yang akurat, sebagai alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, bukti kinerja organisasi dan aparaturinya, serta bukti pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya, melalui dokumen arsip evaluasi kinerja dalam suatu perangkat daerah dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif, produktif, transparan dan akuntabel. Selain itu dalam konteks reformasi birokrasi maka kearsipan adalah salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang dibina mengalami peningkatan dari 100 orang tahun 2022 menjadi 150 orang pada tahun 2023. Hal ini berdampak pada persentase Pengelolaan arsip yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai NSPK. Capaian perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 1,89 % menjadi 5,66% pada tahun 2023. Arsip yang berhasil di kelola pada tahun 2022 sebanyak 14.000 dokumen menurun menjadi 10.539 dokumen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pengelolaan arsip pada OPD Dinas Arpus volume yang dikelola sudah semakin sedikit. Sedangkan cakupan sarpras arsip terpelihara tetap pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 seluas 1.315 M3 walaupun sempat ada peningkatan menjadi 1.428 M3 pada tahun 2021. Dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 2.380 M3, dikarenakan ada penambahan lokasi pemeliharaan sarpras arsip yaitu di Kelurahan Sidakaya.

Tabel 2. 121
Kondisi Kearsipan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK	%	-	-	1,89	1,89	5,66
2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang dibina	orang	100	0	100	100	150
3	Cakupan arsip yang berhasil dikelola	Berkas	17.000	17.000	17.000	14.000	10.539
4	Cakupan Sarpras Arsip terpelihara	M ³	1.078	1.078	1.428	1.315	2.380

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, 2023

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

25) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang memiliki pantai dan kawasan pesisir dengan garis pantai sepanjang 201,9 kilometer dan merupakan kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Jawa Tengah. Berdasarkan data panjang garis pantai Kabupaten Cilacap, diketahui sepanjang 105 kilometer diantaranya berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dan sisanya sepanjang 96,9 kilometer merupakan garis pantai yang berhadapan dengan Pulau Nusakambangan serta Kawasan Segara Anakan.

Produksi Perikanan

Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai kawasan pengembangan perikanan nasional di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan yang ditunjukkan dengan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang sangat besar. Produksi perikanan budidaya memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan perikanan tangkap namun demikian jumlah produksinya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 Produksi Perikanan Tangkap dengan realisasi capaian sebesar 42,974,77 ton . Kenaikan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya bantuan stimulan dari Pemerintah terutama bantuan BBM untuk mengendalikan inflasi kepada 2.606 nelayan (per nelayan mendapat Rp. 300.000,-) dan bantuan sarana konverter kit kepada 1.921 nelayan, sedangkan Produksi Perikanan Budidaya dengan realisasi capaian sebesar 16.106,64 ton. Komoditas perikanan budidaya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, kenaikan produksi perikanan budidaya disebabkan oleh tingginya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan air tawar seperti lele, gurami dan nila, serta berhasilnya bantuan sarana produksi perikanan budidaya yang diberikan kepada para pembudidaya ikan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 122
Kondisi Produksi Perikanan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.918,6	26.586,99	25.759,12	27.129,54	42,974,77
2	Produksi Perikanan budidaya	Ton	11.306	13.887,72	14.339,04	15.610,56	16.106.64

Sumber : Dinas Perikanan Kab Cilacap, 2023

Kelompok Nelayan dan Pembudidaya

Total cakupan bina kelompok nelayan sampai dengan tahun 2019 sebesar 87,16 persen atau sebanyak 217 kelompok nelayan dari jumlah 335 kelompok nelayan. Selama kurun tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan dan sampai dengan tahun 2022 sudah terbina 357 kelompok nelayan dari jumlah target 335 kelompok nelayan atau sebesar 106,57 persen. Sedangkan untuk cakupan bina kelompok pembudidaya ikan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 246 kelompok dari total 438 kelompok atau sebesar 56,16 persen, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan sampai dengan tahun 2022 mencapai persen atau sebanyak 384 kelompok yang terbina dari 438 kelompok pembudidaya ikan. Pada tahun 2023 sesuai pendataan dan perhitungan baru, jumlah kelompok nelayan yg mendapatkan pembinaan sebanyak 100 kelompok dari 250 kelompok nelayan, atau tercapai sebesar 40 persen, sedangkan kelompok pembudidaya ikan yg mendapatkan pembinaan sebanyak 115 kelompok dari 250 kelompok atau tercapai sebesar 46 persen.

Tabel 2. 123
Kondisi Kelompok Nelayan dan Pembudidaya di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan bina kelompok nelayan	%	87,16	93,13	99,10	106,57	40
2	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	56,16	65,30	74,2	87,67	46

Sumber : Dinas Perikanan Kab Cilacap, 2023

* tahun 2023 menggunakan metode perhitungan baru sesuai RPD Kab. Cilacap 2023-2026

Angka Konsumsi Ikan dan Produksi Garam

Angka Konsumsi Ikan pada tahun 2023 naik jika dibandingkan pada tahun 2022. Tahun 2023 Angka Konsumsi Ikan sebesar 30,35 kg/kapita/tahun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya makan ikan agar menjadikan generasi yang sehat, cerdas dan terhindar dari stunting. Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung peningkatan Angka Konsumsi Ikan antara lain, Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan kepada Kader PKK desa, Ibu Hamil, Ibu dengan balita berpotensi stunting yang pelaksanaan kegiatannya di desa

dengan lokus stunting, diversifikasi olahan produk hasil perikanan, penyediaan sarana dan prasarana kepada kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan dan memperkenalkan produk olahan hasil perikanan melalui pameran-pameran di lingkup lokal maupun regional.

Sedangkan pada tahun 2023 produksi garam mencapai 38,54 ton, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 20 ton. Hal ini disebabkan tingginya minat dan semangat dari kelompok usaha garam rakyat untuk memproduksi. Produksi Garam Rakyat merupakan produksi garam yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dan sudah memiliki kandungan NaCL sebesar 98 persen. Untuk mendukung usaha garam rakyat tersebut di lakukan fasilitasi ijin edar garam konsumsi beryodium ke BPOM oleh Dinas Perikanan melalui beberapa kegiatan yang mendukung antara lain:

1. Pembinaan, pelatihan bimtek kepada kelompok usaha garam rakyat untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha garam rakyat; dan
2. Pembuatan demplot *tunnel* garam baru untuk peningkatan produksi usaha garam rakyat.

Usaha garam sudah diarahkan menjadi garam industri karena semakin tingginya produksi dan meningkatnya minat usaha garam. Disamping itu juga telah dilakukan fasilitasi pendampingan proses SNI oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian serta fasilitasi pemberian bantuan peralatan berupa oven, penggilingan, tempat cuci, alat cetak untuk garam cetak.

Tabel 2. 124
Angka Konsumsi Ikan dan Produksi Garam Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kapita/ tahun	25,96	28	28,95	30,02	30,35
2	Produksi garam	Ton	26,2	10	15,19	20	38,54

Sumber : Dinas Perikanan Kab Cilacap, 2023

26) Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 116 Tahun 2022 tentang Penggolongan Jenis Obyek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap Tahun 2022 terdapat 20 destinasi wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap yang masuk ke dalam Perbup, di luar Perbup terdapat 45 destinasi wisata yang dikelola oleh perorangan dan organisasi masyarakat, sehingga total destinasi wisata yang ada di Kabupaten Cilacap sebanyak 65 destinasi wisata. Adanya Obyek Wisata yang terus berkembang di Kabupaten Cilacap dari 45 Obyek Wisata pada tahun 2022 meningkat menjadi 65 Obyek Wisata pada tahun 2023 karena kebutuhan masyarakat untuk berwisata semakin meningkat sehingga menumbuhkan Obyek Wisata baru. Hal ini mendorong

pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Cilacap sebesar 1.450.268 pada tahun 2023 atau naik 35,63 persen di banding tahun sebelumnya. Destinasi wisata yang dikelola secara langsung oleh Kabupaten Cilacap adalah Destinasi Wisata Air Panas Cipari, sedangkan destinasi wisata yang lain masing-masing dikelola oleh pihak lain karena terkait dengan kewenangan pengelolaannya.

Tabel 2. 125
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Obyek Wisata di Kab. Cilacap	OW	30	41	32	45	65
2	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	552.396	472.384	846.380	1.069.293	1.450.268
3	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	Desa	6	17	22	29	29

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap, 2023

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Cilacap. Sampai akhir tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 556/794/27/2022 tanggal 17 Desember 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Dan Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan 29 Desa Wisata, sedangkan pada tahun 2023 bertambah 1 Desa Wisata berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 556/243/27/Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 sehingga jumlah Desa Wisata yang ada di Kabupaten Cilacap menjadi 30 Desa Wisata yang akan dikembangkan, yaitu :

1. Desa Wisata Samudera Mandiri Desa Widarapayung, Kecamatan Binangun;
2. Desa Wisata Karangbanar Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu;
3. Desa Wisata Cimendaway Indah Desa Datar, Kecamatan Dayeuhluhur;
4. Desa Wisata Curug Geulis Desa Desa Cisuru, Kecamatan Cipari;
5. Desa Wisata Genta Wisata Desa Gentasarai, Kecamatan Kroya;
6. Desa Wisata Wagir Indah Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala;
7. Desa Wisata Bojong Tirta Indah Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungreja;
8. Desa Wisata Rahayu Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya;
9. Desa Wisata Lewih Manggu Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja;
10. Desa Wisata Talabunsa Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung;
11. Desa Wisata Kumandang Wisata Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Selatan;

12. Desa Wisata Tambaksari Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja;
13. Desa Wisata Alam Lestari Desa Sumpingshayu, Kecamatan Dayeuhluhur;
14. Desa Wisata Curug Tonjong Panto Cinagara Desa Sadahayu, Kecamatan Majenang;
15. Desa Wisata Kamulyan Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari;
16. Desa Wisata Jambusari Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi;
17. Desa Wisata Pesona Serayu Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan;
18. Desa Wisata Bunton Desa Bunton, Kecamatan Adipala;
19. Desa Wisata Ekosistem Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur;
20. Desa Wisata Salam Sari Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu;
21. Desa Wisata Cipari Desa Cipari, Kecamatan Cipari;
22. Desa Wisata Karangsari Desa Karangsari, Kecamatan Adipala;
23. Desa Wisata Sindang Kencana Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung;
24. Desa Wisata Padangbumi Kamulyan Desa Salebu, Kecamatan Majenang;
25. Desa Wisata Karangmangu Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya;
26. Desa Wisata Mandala Giri Desa Mandala, Kecamatan Jeruklegi;
27. Desa Wisata Kompas Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu;
28. Desa Wisata Mentasan Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten;
29. Desa Wisata Sport Center Desa Panisihan, Kecamatan Maos; dan
30. Desa Wisata Bhumi Nawasena Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung

Kunjungan wisata di Kabupaten Cilacap pada kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebanyak 552.396 orang. Fluktuasi kunjungan wisata kembali terjadi di tahun 2020 karena dampak wabah Covid-19. Kunjungan wisata tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 472.384, turun 50.012 kunjungan dari tahun 2019 (9,5 persen). Adapun mulai tahun 2021 kondisi sudah semakin membaik. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya jumlah kunjungan wisata menjadi 846.380 kunjungan pada tahun 2021, tahun 2022 semakin meningkat menjadi 1.069.293 kunjungan wisata. Tahun 2023 kunjungan wisata di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan sebesar 35,63 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1.450.268 jumlah wisata yang berkunjung di Kabupaten Cilacap.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Cilacap, diperlukan berbagai upaya dan terobosan baru, antara lain melalui :

- 1) Revitalisasi daya tarik wisata untuk memenuhi layanan terhadap wisatawan;
- 2) Mengadakan kegiatan pariwisata untuk menarik pengunjung dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan keselamatan wisatawan menjadi perhatian utama; dan
- 3) Melakukan promosi daya tarik wisata dengan publikasi melalui media cetak (pamflet, brosur, baliho, dan lain-lain), media elektronik dan produksi video promosi pariwisata.

27) Pertanian

Urusan pertanian terdiri dari empat sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Produktivitas dan produksi pertanian bergantung pada iklim/cuaca selain juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian sejak olah tanam (persiapan tanam), tanam, dan pasca panen. Sarana pertanian yang perlu menjadi perhatian yaitu benih/bibit unggul, pupuk, pestisida serta alat dan mesin (alsintan). Benih/bibit unggul dan berlabel seringkali belum dapat diperoleh oleh petani karena terkendala harga dan ketersediaan. Alokasi pupuk dari pemerintah pusat masih di bawah kebutuhan petani dan masih ada kendala dalam distribusinya. Ketersediaan alat mesin pertanian untuk mendukung produksi pertanian pun masih terbatas. Termasuk diantaranya sarana transportasi seperti jalan usaha tani masih belum memadai, serta jaringan irigasi yang dibutuhkan untuk kelancaran pengairan tanaman. Tahun 2023 kondisi jaringan irigasi tersier usaha tani tercatat hanya 21,43 persen atau 537.863 meter yang memiliki konstruksi permanen, sementara 78,57 persen atau 1.972.279 meter masih berupa konstruksi alam/tanah. Kondisi jaringan irigasi tersier konstruksi permanen tersebut pada tahun 2023 tercatat 16,20 persen kondisi baik, 3,52 persen kondisi sedang, 1,23 persen rusak ringan dan 0,49 persen rusak berat.

Dalam hal permodalan, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sudah mengupayakan fasilitasi pembiayaan, permodalan dan pemasaran melalui kegiatan temu usaha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan secara langsung oleh penyuluh pertanian dan petugas pertanian lainnya untuk mempertemukan antara kelompok tani/ Gapoktan dengan perbankan dan pelaku usaha lain dalam upaya meningkatkan kualitas dan harga produk serta pendapatan. Terkait dengan permodalan, minat petani masih rendah untuk mengajukan pinjaman modal usaha melalui perbankan karena ada kekhawatiran dengan tingkat suku bunga pinjaman dan hasil pertanian di

akhir masa panen yang tidak sesuai harapan dan adanya persyaratan agunan/jaminan serta proses pengajuannya kurang praktis apabila dibandingkan dengan pinjaman modal dari tengkulak atau peminjam modal lainnya.

Tanaman Pangan

Pada sub sektor tanaman pangan produksi tanaman pangan utama yaitu padi, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan fluktuasi jumlah produksi tiap tahun dari sebanyak 747.435 ton pada Tahun 2019 menjadi 796.685 ton pada tahun 2023. Dengan produksi padi yang cukup besar tersebut, mampu menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Daerah surplus beras di Jawa Tengah. Produksi jagung pada tahun 2019 sebanyak 45.197 ton mengalami peningkatan yang menjadi 53.785 ton pada tahun 2023. Sedangkan produksi kedelai cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6.172 ton, menjadi 5.945 ton pada tahun 2023.

Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan utama salah satunya dipengaruhi oleh luasan area panen dan juga produktivitas tiap hektar lahan yang semakin meningkat. Namun demikian upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan tetap menjadi perhatian karena masih ditemukannya hama penyakit tanaman pangan, rendahnya ketrampilan petani dan kurangnya pemanfaatan teknologi pertanian.

Tabel 2. 126
Produksi Tanaman Pangan Utama Tahun 2019-2023

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Padi	Ton	747.435	894.791	832.442	842.512	796.685
2.	Jagung	Ton	45.197	76.662	56.970	61.421	53.785
3.	Kedelai	Ton	6.172	3.201	3.849	2.828	5.945

Sumber: Dinas Pertanian Kab Cilacap, 2023

Penurunan produksi padi dan jagung pada tahun 2023 disebabkan oleh Elnino. Kondisi lahan yang kering tidak memungkinkan untuk ditanami padi sehingga sebagian petani beralih komoditas lain (palawija) seperti kedelai dan kacang hijau. Lahan yang kering akibat elnino juga menyebabkan hasil ubi kayu dan ubi jalar bobot produksinya tidak optimal. Peralihan komoditas oleh petani inilah menyebabkan produksi kedelai dan kacang hijau. Selain itu ada bantuan benih kedelai dari APBN yang menjadi faktor pendorong peningkatan produksi. Data BPS Kabupaten Cilacap menunjukan produktivitas padi sawah tahun 2021 sebesar 64,92 Kw/Ha, dan turun pada tahun 2022 menjadi 64,90 Kw/Ha dan tahun 2023 64,27 Kw/Ha.

Hortikultura

Produksi tanaman hortikultura secara umum dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi jumlah produksi, hal ini dikarenakan pengaruh perubahan iklim.

Tabel 2. 127
Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cabe	Ton	10.670,6	9.832,1	12.856	13.569	9.635,77
2.	Jeruk Siam	Ton	1.818,5	3.752,6	3.180	3.723,52	2.089,06
3.	Sukun	Ton	1.430,8	1.001,7	503	337,8	1.123,96
4.	Manggis	Ton	3.902,9	5.149,2	184	149,12	20.389,07
5.	Pepaya	Ton	7.407,2	3.416,4	2.654	4.181,03	8.595,35
6.	Semangka	Ton	3.341,9	3.353,1	1.521	683,2	1.366,45
7.	Jahe	Ton	551,1	766,2	1.020	521,31	447,11
8.	Jamur	Ton	42,8	99,73	512	808,57	427,99
9.	Pisang	Ton	27.686,7	34.097,6	51.324,4	34.404,9	42.607,8
10.	Bawang Merah	Ton	672,8	830,3	768,4	458,26	951,12

Sumber: Dinas Pertanian Kab Cilacap, 2023

Jumlah produksi sepuluh komoditas hortikultura mengalami fluktuasi setiap tahun. Produksi cabe selalu mengalami kenaikan sejak 2019 sampai dengan 2022 tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan 30,02 persen atau 4.074 ton dari tahun 2022. Penurunan produksi pada tahun 2023 juga dialami oleh komoditas jeruk dan jamur. Penurunan produksi ini disebabkan adanya perubahan iklim yang diikuti juga dengan serangan hama tanaman. Tahun 2023 banyak tanaman jeruk yang terkena penyakit *Citrus Vein Phloem Degeneration* (CVPD). Adanya perubahan iklim ini juga membuat petani mengganti ke komoditas hortikultura yang lain. Penggunaan benih yang tidak berlabel dan terlambat pindah tanam juga menjadi penyebab penurunan produksi.

Beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan diantaranya dengan pemberian bantuan pestisida, benih berlabel dan pembinaan kepada kelompok tani.

Selain cabe, beberapa komoditas hortikultura mengalami kenaikan produksi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Kenaikan produksi ini diantaranya karena adanya bantuan bibit dari pemerintah khususnya bersumber dari APBN melalui Kementerian Pertanian salah satunya bawang merah. Manggis dan semangka juga mengalami kenaikan produksi karena pada tahun 2023 setelah elnino, cuaca yang kering membantu tanaman manggis dan semangka untuk berbunga dan berbuah optimal.

Perkebunan

Kabupaten Cilacap memiliki potensi perkebunan yaitu tanaman kelapa dalam, kelapa deres, kopi, kakao, pala, cengkeh, dan karet. Produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 128
Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kab. Cilacap Tahun 2019-2023

No	Produktivitas	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelapa dalam	kg/ha eq. Kopra	1.134,22	1.119,16	1.125,02	1.100,98	840,49
2	Kelapa deres	kg/ha gula kelapa	8.945,46	9.132,60	9.103,79	9.157,55	6.944,39
3	Kopi	kg/ha	672,28	671,85	693,94	677,38	3.066,39
4	Kakao	kg/ha	817,12	774,90	793,62	795,53	583,79
5	Pala	kg/ha	300,27	266,46	262,10	261,89	247,82
6	Cengkeh	kg/ha	345,69	344,58	373,20	374,1	353,17
7	Karet	kg/ha	1249,03	1.263,76	1.269,68	1.268,29	946,96
8	Lada	Kg/ha	597,57	585,06	627,03	614,03	584,20

Sumber: Dinas Pangan dan Perkebunan Kab Cilacap, 2023

Berdasarkan tabel tersebut komoditas perkebunan yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2023 yaitu kopi, sementara komoditas lainnya fluktuatif dari tahun 2019 sampai 2022, dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Kenaikan produksi komoditas kopi disebabkan minat masyarakat untuk bertanam kopi meningkat. Hal ini disebabkan saat ini minum kopi menjadi gaya hidup sehingga kopi menjadi salah satu komoditas yang permintaan pasarnya tinggi dan harga jual produksi ikut naik. Sementara itu, penurunan produksi pada komoditas lainya akibat petani beralih menanam komoditas yang sedang bagus baik dari segi harga dan permintaan seperti kopi. Penurunan ini juga akibat banyaknya tanaman yang sudah berusia tua tetapi belum dilakukan penggantian seperti kelapa, adanya hama penyakit dan alokasi pupuk subsidi komoditas perkebunan yang terbatas. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu dengan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi petani khususnya terkait penanganan hama dan budidaya yang baik.

Peternakan

Beberapa jenis komoditas peternakan yang perkembangannya cukup baik adalah sapi/kerbau, kambing/domba dan ayam/itik/unggas. Perkembangan populasi hewan ternak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 129
Jumlah Populasi Ternak di Kab. Cilacap Tahun 2019-2023

No	Jenis Ternak	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sapi / Kerbau	Ekor	17.691	14.724	14.997	16.104	17.543
2.	Kambing/ Domba	Ekor	169.588	185.663	197.469	181.287	202.902
3.	Unggas	Ekor	7.837.544	7.517.589	8.156.547	8.094.844	8.031.154

Sumber: Dinas Pertanian Kab Cilacap, 2023

Jumlah produksi daging (Sapi/ Kerbau) terus mengalami peningkatan, dari tahun 2019 sebanyak 1.433.938 kg, menjadi 1.714.920 kg pada tahun 2023, jumlah produksi daging (Kambing/ Domba) juga mengalami peningkatan, dari tahun 2019 sebanyak 257.728 kg, menjadi 375.264 kg pada tahun 2023, sedangkan jumlah produksi daging Unggas relatif stabil, dari tahun 2019 sebanyak 6.767.583 kg menjadi 6.659.003 kg di tahun 2023. Jumlah produksi telur rentang tahun 2019 menjadi 3.213.285 kg, meningkat menjadi 6.890.000 kg pada tahun 2023. Sedangkan jumlah produksi susu mengalami penurunan pada tahun 2023, pada tahun 2021 sebanyak 32.200 liter menjadi sebanyak 20.805 liter pada tahun 2023. Pada tahun 2022 terjadi penurunan produksi susu disebabkan karena menurunnya jumlah populasi sapi perah, tahun 2021 ada 18 ekor sapi milik 2 peternak yang memproduksi semua, sedang tahun 2022 dimiliki 1 orang peternak dan hanya 5 ekor yang memproduksi dari total jumlah populasi sapi perah 16 ekor. Perkembangan produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 130
Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Komoditi	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi/ Kerbau	Kg	1.433.938	1.410.974	1.547.000	1.651.000	1.714.920
2	Kambing/ Domba	Kg	257.728	323.904	260.000	402.000	375.264
3	Ayam/ Itik/ Unggas	Kg	6.767.583	5.952.596	6.404.000	6.949.000	6.659.003
4	Produksi Telur	Kg	3.213.285	4.227.858	4.098.000	4.837.000	6.890.000
5	Susu Sapi	Liter	32.200	32.200	34.500	14.400	20.805

Sumber : Dinas Pertanian Kab Cilacap, 2023

Menurunnya populasi dan produksi peternakan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dan kematian ternak. Tingkat kesakitan ternak khususnya ternak sapi/kerbau, kambing, dan domba cukup tinggi. Penyakit-penyakit tersebut antara lain demam 3 hari, *bloat*/kembung, parasite, cacing hati, scabies, dan *pink eye*/mata merah.

Tabel 2. 131
Angka Kesakitan Ternak di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No	Komoditi	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kesakitan Ternak	%	11,9	11,7	11,675	11,675	11,625

Sumber: Dinas Pertanian Kab Cilacap, 2023

Pada bulan April 2022 mulai merebak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia, oleh sebab itu Kabupaten Cilacap menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap No.524/2603/33, Tanggal 9 Mei 2022, Perihal Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Cilacap. Selain menyiapkan petugas dan sarana prasarana untuk mengantisipasi wabah PMK, beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1. Pembinaan kepada kelompok tani/ ternak,
2. Melaksanakan vaksinasi PMK, LSD dan rabies,
3. Melaksanakan survailens penyakit menular ternak baik yang zoonosis maupun non zoonosis,
4. Koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait seperti dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Veteriner Kementerian Pertanian dan Dinas Kesehatan Kab Cilacap.

28) Perdagangan

Capaian indicator cakupan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) mengalami fluktuasi, dari 70 persen pada tahun 2019 dan turun menjadi 47 persen di tahun 2021, meningkat menjadi 109,98 persen di tahun 2023. Sedangkan indikator ketersediaan informasi dan harga distribusi masih tetap realisasinnya mencapai 100 persen dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Cakupan alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) pada RKPD Tahun 2023 realisasi sangat tinggi dikarenakan adanya Permohonan tera ulang meter air dari Perumdam Kabupaten Cilacap yang mencapai 12.000 unit.

Ketersediaan Informasi dan Harga Distribusi target untuk setiap tahunnya sebanyak 240 kali melakukan monitoring harga atau 240 dokumen laporan hasil monitoring harga, yang mana kegiatan dimaksud dilaksanakan setiap hari kerja untuk setiap pekan dan bulannya. Jadi target 100% adalah untuk 240 kali monitoring harga dalam setahun.

Jumlah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit yang terbagi menjadi 4 (empat) UPTD, yaitu UPTD Pasar Gede, UPTD Pasar Kroya, UPTD Pasar Majenang, dan UPTD Pasar Sidareja. Setiap tahun, jumlah pasar ini tidak mengalami

penambahan atau pengurangan. Hal ini disebabkan oleh upaya untuk menambah jumlah unit pasar yang belum memungkinkan saat ini, mengingat kondisi pasar yang ada masih perlu dioptimalkan dengan baik.

Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi pada tahun 2019 hanya mencapai 156 (seratus lima puluh enam) orang. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut, jumlah yang memperoleh fasilitasi hanya dihitung dari penerima barang (tenda/gerobak). Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan yang signifikan karena jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan tidak hanya dihitung dari jumlah penerima barang, tetapi juga dari jumlah pengelola yang mendapatkan pembinaan atau fasilitasi oleh PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Kabupaten Cilacap.

Jumlah unit usaha mikro di kabupaten cilacap dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan pada tahun 2023 jumlah pelaku usaha mikro naik sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2022, dilihat dari jumlah pelaku usaha sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 rata-rata kenaikan adalah 3 persen. Jumlah kelompok pedagang/usaha informal, Peningkatan jumlah UMKM terutama usaha mikro berperan penting dalam meningkatkan daya serap tenaga kerja dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan struktural UMKM yang perlu diselesaikan sehingga UMKM dapat berperan lebih dalam perekonomian nasional.

Permasalahan tersebut antara lain kualitas dan kontinuitas produksi, akses pemasaran, packaging produk, kualitas SDM/pelaku UMKM di bidang manajerial, keuangan dan produksi. Untuk itu salah satu peran pemerintah adalah dengan melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap UMKM guna meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Jumlah pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor, Produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Hanya saja, masih banyak yang tidak tahu dan memahami bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya bisa dieskpor ke luar negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan kepada eksportir karena eksportir harus menguasai hal dasar syarat ekspor seperti administrasi dan legalitas eksportir.

Tabel 2. 132
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP)	%	70	30,48	47	48,56	109,98
2	Ketersediaan Informasi dan Harga Distribusi	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah Pasar Pemda	Pasar	33	33	33	33	33
4	Potensi UTTP	unit	13.300	14.000	15.200	19.000	19.000
5	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	orang	156	2.942	2.292	2.500	2.500
6	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	unit usaha	19.407	19.789	20.371	20.970	21.569
7	Jumlah pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	orang	250	250	250	250	250

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi, UKM, 2023

29) Perindustrian

Jumlah IKM yang dikembangkan melalui teknologi industri dari tahun 2019 adalah sebanyak 75 unit, tahun 2020 naik 80 unit karena adanya penambahan volume pembiayaan dan tahun 2021 adalah 105 unit meningkat karena juga penambahan anggaran kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 85 unit karena berkurangnya anggaran dan naik kembali 90 unit karena kenaikan anggaran pada tahun 2023. Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pembinaan teknologi industri tersebut dilaksanakan dengan APBD dan DBHCHT.

Pertumbuhan jumlah IKM pada tahun 2019 adalah 6,5 persen dari semula sebanyak 2.760 menjadi 2.936 IKM meningkat karena adanya pendataan IKM pada 12 kecamatan, tahun 2020 5,49 persen dari 2.936 IKM menjadi 3.107 IKM meningkat kembali dari pendataan IKM di 6 Kecamatan, dan tahun 2021 menjadi 8,01 persen dari 3.107 menjadi 3.356 IKM meningkat karena bertambahnya bantuan peralatan untuk IKM dan wirausaha baru. Tahun 2022 naik 8,02 persen karena bertambahnya bantuan peralatan untuk IKM baru dari 3.356 menjadi 3.625 IKM, kemudian terdapat kenaikan pada tahun 2023 menjadi 8,5 persen dari 3.625 IKM meningkat menjadi 3.934 IKM karena tumbuhnya IKM baru yang diberikan pelatihan maupun bantuan peralatan.

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Cilacap dapat dilihat dari kondisi pertumbuhan industri setiap tahunnya. Pada tahun 2019, industri tumbuh sebesar 6,5 persen dan mengalami peningkatan menjadi 8,5 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini cukup signifikan karena adanya kegiatan penumbuhan wirausaha baru yang berdampak pada pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah, sehingga jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

mengalami penurunan dari Tahun 2019 sejumlah 75 unit menjadi 90 unit di tahun 2023.

One Village One Product (OVOP/ satu desa satu produk) adalah program yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa, dengan mendorong setiap desa untuk menemukan dan mengembangkan satu produk unggulan yang kompetitif dan mampu bersaing ditingkat global namun tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Pada tahun 2019 sampai 2021 jumlah OVOP semula adalah 5 yaitu sabutret, gula kelapa, batik, sale pisang, lanting kemudian pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 8 dengan tambahan yaitu mocaf, kopi cilumping dan anyaman bambo melalui SK Nomor 900/470/32/Tahun 2021 tentang Penetapan Produk unggulan Daerah Perdesaan Di Sentra Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan OVOP di Kabupaten Cilacap.

Persentase sentra industri terbina adalah jumlah IKM yang dibina oleh Disnakerin Kabupaten Cilacap melalui pelatihan maupun bantuan peralatan sarana usaha, tahun 2019 adalah sebanyak 220 IKM, tahun 2020 meningkat sebanyak 505 IKM karena meningkatnya peserta/pelaku usaha dan alokasi anggaran untuk pembinaan IKM. Pada tahun 2021 105 IKM telah dibina namun menunjukkan angka terendah karena pandemic Covid-19 sehingga terjadi pengurangan untuk pembinaan IKM. Pada tahun 2022 sebanyak 685 IKM telah dibina meningkat kembali karena alokasi anggaran untuk peserta/pelaku usaha kembali naik pasca pandemi. Dan pada tahun 2023 meningkat sebanyak 2.472 IKM yang ada telah dibina karena kenaikan jumlah peserta/pelaku usaha dari alokasi anggaran pembinaan IKM.

Tabel 2. 133
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pembinaan kemampuan teknologi industri	Unit	75	80	105	85	90
2	Pertumbuhan Jumlah industri kecil dan menengah	%	6,5	5,49	8,01	8,02	8,5
3	<i>One Village One Product</i> (OVOP)	produk	5	5	5	8	8
4	Persentase sentra Industri terbina	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, 2023

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

30) Sekretariat Daerah

Gambaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 – 2023 menunjukkan capaian kinerja yang baik sekali, pencapaian standar pelayanan di Setda Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2023

menunjukkan kinerja yang baik, antara lain Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda (kategori tinggi), Nilai SAKIP sebesar 74,58, Indeks RB sebesar 76,77, Nilai SKM termasuk tinggi (87,97). Hal ini didorong oleh adanya komitmen para pimpinan dan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; Rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sudah disusun; Pengukuran Kinerja dan Monev Kinerja sudah optimal dan adanya komitmen dalam peningkatan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tahun 2019 – 2023 dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 134
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	73,19 (BB)	73,74 (BB)	73,98 (BB)	74,26 (BB)	74,58 (BB)
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	67,69 (B)	68,28 (B)	69,06 (B)	69,27 (B)	76,77 (BB)
3	Indeks Kematangan Organisasi	indeks	35,31 (Sedang)	37,7 (Sedang)	37,02 (Sedang)	36,91 (Sedang)	38,65 (Tinggi)
4	Nilai SKM	Nilai	82,77	85,38	86,27	86,94	87,97
5	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	%	100	100	80	100	100
6	Nilai EKPPD	Nilai	3,1104 (sangat tinggi)	3,127 (sangat tinggi)	3,127 (sangat tinggi)	2,60 (sangat tinggi)	3,1844 (sedang)
7	Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda	Indeks	n.a.	41 (Tinggi)	41 (Tinggi)	42 (Tinggi)	50 (Sangat Tinggi)
8	Nilai AKIP Setda	Nilai	80,80	79,75	79,83	79,81	82,61
9	Nilai rata-rata SKM Setda	Nilai	82,20	84,98	86,83	87,7	88,78

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Cilacap Tahun 2024

31) Sekretariat DPRD

Pada fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap capaian kinerja dari tahun 2019 sampai 2023 mencapai 100 persen, dan terjadi penurunan menjadi 99,76 persen pada tahun 2022. Sedangkan persentase aspirasi Pokir DPRD yang sesuai dengan tema prioritas RKPD pada tahun 2023 sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2. 135
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	100	100	100	99,76	100
2	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	%	79	80	91	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Cilacap. Tahun 2023

Tercapainya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap pada Tahun 2023 didukung oleh kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dengan selalu mempedomani peraturan/regulasi terbaru yang mengatur mengenai kebijakan yang berhubungan dengan program, layanan, dan dukungan terhadap DPRD. Selain itu hubungan yang baik antara Sekretariat DPRD dan DPRD sehingga mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai *supporting system* terhadap kegiatan DPRD.

Faktor pendorong tercapainya indikator kedua adalah penggunaan aplikasi SIPD yang sangat mendukung dalam pengajuan usulan pokok-pokok pikiran DPRD, dan arah kebijakan yang mendukung baik dari pemerintah pusat ataupun daerah sehingga keseluruhan pokok pikiran DPRD sesuai dengan tema RKPD.

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

32) Perencanaan

Perencanaan Pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan perencanaan yang terintegrasi dilaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota yang berbatasan dalam provinsi maupun dengan provinsi tetangga.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk setiap tahunnya yaitu RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD kemudian penjabaran RKPD ke dalam APBD, dimana seluruh rencana pembangunan mengacu pada RTRW.

Tabel 2. 136
Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD	-	ada	ada	ada	ada	ada

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	yg telah ditetapkan dgn PERBUP						
4	Tersedianya Dokumen RTRW yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	84	84,48	90	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Cilacap, 2023

33) Keuangan

Administrasi Keuangan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja pengelolaan keuangan daerah secara administrasi sudah sangat baik, meliputi kinerja pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga perlu memperhatikan belanja daerah, karena belanja daerah yang fokus, tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Peningkatan pendapatan tidak lagi hanya dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi yang telah given ditetapkan dalam UU 28 Tahun 2009. Perkembangan dan dinamika pengelolaaan keuangan daerah telah memunculkan dan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk mengawal, mengelola dan mengoptimalkan “aset keuangan” yang dimiliki.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, secara periodik dilakukan evaluasi manajemen pengelolaan aset, sehingga keberadaan aset yang dimiliki dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD secara signifikan. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui pemberdayaan aset dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga termasuk pendayagunaan aset-aset yang *idle*, pengamanan aset melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah, inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset serta penyelesaian kasus/sengketa.

Belanja Pendidikan dan Kesehatan

Besaran anggaran belanja pendidikan dan kesehatan Kabupaten Cilacap sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 sudah sesuai amanat Undang-Undang yaitu sebesar 20 persen anggaran APBD untuk pendidikan dan 10 persen anggaran APBD untuk kesehatan.

Tabel 2. 137
Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD
Tahun 2019-2023

Tahun	Pendidikan		Kesehatan	
	Jumlah (juta rupiah)	Persentase (%)	Jumlah (juta rupiah)	Persentase (%)
2019	797.198,35	25,2	622.340,73	19,7
2020	1.082.519,87	24,1	613.393,93	19,34
2021	1.095.195,84	30,91	754.957,05	21,31
2022	1.180.329,02	33,09	716.126,67	20,08
2023	1.347.303,33	37,85	735.360,16	20,40

Sumber : BPPKAD Kab. Cilacap. Tahun 2023

34) Kepegawaian

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki karena penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun.

Tabel 2. 138
Pengadaan CPNS di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Pengadaan CASN		
		CPNS	PPPK	TOTAL
1.	2019	794	311	1.105
2.	2020	0	0	0
3.	2021	469	4.305	4.774
4.	2022	0	1.153	1.153
5.	2023	0	302	302

Sumber : BKPPD Kab Cilacap, 2023

Manajemen Talenta merupakan suatu sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi. Penerapan manajemen talenta pada pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap akan dimulai pada tahun 2023.

Untuk saat ini aspek penataan sistem manajemen SDM difokuskan pada peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur yang dilakukan dengan cara pengadaan CPNS, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat dan promosi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi

terbuka. Selama kurun waktu 2019-2023 telah dilaksanakan tes kompetensi bagi 697 pejabat struktural sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 139
Tes Kompetensi Pejabat Struktural di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Tes Kompetensi
1.	2019	- 6 org Es. II - 49 org Es. III - 106 org Es. IV
2	2020	- 4 org Es. II - 29 org Es. III - 57 org Es. IV
3.	2021	- 27 org Es. III - 61 org Es. IV
4.	2022	- 14 org Es. II - 72 org Es. III - 106 org Es. IV
5.	2023	- 82 org Es. III - 84 org Es. IV

Sumber : BKPPD Kab. Cilacap, 2023

Sedangkan kenaikan pangkat di lingkungan Pemkab Cilacap tahun 2019-2023 sebanyak 8.151 PNS telah terfasilitasi kenaikan pangkatnya.

Tabel 2. 140
Kenaikan Pangkat di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Kenaikan Pangkat
1.	2019	2.020
2.	2020	1.489
3.	2021	1.356
4.	2022	1.531
5.	2023	1.755

Sumber: BKPPD Kab. Cilacap, 2023

35) Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan serta rencana pengembangan karier. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional, diklat pengembangan kompetensi teknis, dan diklat pengembangan kompetensi manajerial. Adapun data ASN yang telah mengikuti diklat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 141
Diklat Aparatur di Kab Cilacap Tahun 2019-2023

No.	Jenis Diklat	Tahun					
		Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Diklat Kepemimpinan (Struktural)	Orang	16	33	69	40	36
2	Diklat Non Kepemimpinan (Teknis dan Fungsional)	Orang	615	0	55	101	113

Sumber: BKPPD Kab. Cilacap, 2023

36) Penelitian dan Pengembangan

Untuk menunjang kegiatan kelitbangan di Kabupaten Cilacap telah disusun dan diterbitkan beberapa dokumen kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, antara lain :

- 1) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap.
- 2) Keputusan Bupati Cilacap Nomor 070/551/37/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap.
- 3) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap.
- 4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 253 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023.
- 5) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 24 Tahun 2022 tentang Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027.

Tabel 2. 142
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase inovasi daerah yang ditindaklanjuti	%	56,49	59,54	64,74	82,5	84,33
2	Persentase Jumlah riset daerah yang ditindaklanjuti	%	5,54	6,49	11,59	19,11	31,91
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	22,14	30,88	41,16	50,41	71,82
4	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan	%	2,49	3,5	4,02	6,17	23,35

Sumber : Bappeda Kabupaten Cilacap, 2023

Indikator capaian kinerja urusan penelitian dan Pengembangan mencakup 2 fokus kegiatan Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Penerapan pada urusan Penelitian dan Pengembangan yang telah disesuaikan dengan Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah tertuang pada RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026. Persentase Inovasi daerah yang ditindaklanjuti menggambarkan inovasi daerah yang ditindaklanjuti dengan diikuti dalam pelatihan IGA, krenova, pameran produk inovasi, pelatihan calon pengusaha baru berbasis teknologi, pelatihan dan pendampingan oleh dinkes dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM dari total inovasi yang diikutsertakan dalam Innovation Government Award (IGA), Krenova dan lomba inovasi daerah. Adapun Persentase jumlah riset daerah yang ditindaklanjuti menggambarkan hasil

riset atau kajian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi maupun perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan didiseminasikan, dipublikasikan melalui jurnal maupun seminar serta dibukukan dibandingkan dengan total riset yang ada. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti menggambarkan total hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total hasil penelitian dan pengembangan yang ada. Sedangkan Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan menggambarkan hasil inovasi yang ditindaklanjuti dengan implementasi yang diusulkan untuk dibiayai dengan APBD Kabupaten yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (RPJMD atau RKPD).

2.1.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

37) Inspektorat Daerah

Nilai maturitas SPIP di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menggunakan data capaian tahun 2017 dengan nilai 3.038 (Level 3). Untuk tahun 2022 dilakukan penilaian oleh BPKP dengan nilai 3,217 (Level 3) dan untuk penilaian tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai 3,249 (Level 3). Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 3,249 (level 3) sebelumnya telah dilakukan Penilaian Mandiri dengan nilai 4,315 akan tetapi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hal berikut :

1. Indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achiveable, relevant, time bond*);
2. Indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang tidak cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis;
3. Target sasaran strategis perangkat daerah yang tidak tepat;
4. Masih terdapat indikator program yang tidak cukup untuk mengukur capaian program;
5. Masih terdapat indikator kegiatan yang belum memenuhi kriteria SMART;
6. Masih terdapat indikator kegiatan yang tidak cukup untuk mengukur capaian program.

Selanjutnya persentase pengaduan masyarakat yang ditangani realisasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih yaitu 100 persen. Realisasi capaian persentase perangkat daerah predikat evaluasi AKIP minimal BB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2019 mencapai 87,3 persen, dan pada tahun 2023 mencapai 100 persen atau semua perangkat daerah sudah mendapat nilai BB dan A. Peningkatan

Presentase Perangkat Daerah dengan predikat evaluasi AKIP minimal BB disebabkan karena adanya keseriusan dari Perangkat Daerah terhadap peningkatan kinerja di masing-masing Perangkat Daerah. Presentase Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mengikuti Diklat/PKS untuk tahun 2023 sebesar 100 % karena ada amanat dari kemendagri terkait pemenuhan jam diklat 120 jam per tahun.

Untuk Capaian Kinerja Pengawasan Survey Penilaian Integritas sebelum ada Survey Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Kemenpan yang dijadikan dasar untuk penentuan Nilai Indeks Persepsi Korupsi, dalam penentuan nilainya menggunakan Survey Eksternal Persepsi Korupsi dengan skala nilai tertinggi 4,00 setelah ada Survey Penilaian Integritas Tahun 2021 Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 100 untuk nilai tertingginya. Tujuan dari SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut. Pada Tahun 2019 Nilai Eksternal Persepsi Korupsi naik menjadi 3,85 dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 turun menjadi 3,65 dari Tahun 2019. Indeks Persepsi Anti Korupsi 2021 menggunakan skala 100 dengan nilai sebesar 80,01 sedangkan untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 76,06 dan untuk tahun 2023 mengalami penurunan lagi dengan nilai sebesar 75,53. Hal ini dikarenakan dalam Survey Penilaian Integritas melibatkan 3 sumber data yaitu Sumber Internal: Pegawai di Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah. Sumber Eksternal: Pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Sumber Ekspert atau Narasumber Ahli: Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, dan lainnya. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. Proses pengumpulan data melibatkan pemilihan calon responden secara acak, termasuk pegawai dan pengguna layanan. Responden mengisi kuesioner daring melalui aplikasi pengirim pesan *WhatsApp* (WA), dan seluruh jawaban serta identitas responden dilindungi oleh KPK dan hanya digunakan untuk kebutuhan SPI. Sehingga dalam penentuan nilainya tidak dapat diprediksi karena melibatkan responden secara acak. Level Kapabilitas APIP yaitu Level 3 dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 2. 143
Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Level 3 (3,038)	Level 3 (3,038)	Level 3 (3,038)	Level 3 (3,217)	Level 3 (3,249)

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah Predikat Evaluasi AKIP Minimal BB	%	87,3	94,55	96,36	98,18	100
4	Persentase APIP yang mengikut Bimtek/PKS	%	40	65	80	100	100
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	skala	3,85	3,65	84,64	76,06	75,53
6	Level Kapabilitas APIP	level	3	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Kab Cilacap Tahun 2023

2.1.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

38) Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka meningkatkan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kesetiaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan bela negara dengan capaian sebesar 0,63 persen yang merupakan unsur elemen masyarakat dalam kurun waktu tahun 2019-2023. Jumlah Ormas yang terdaftar di Kabupaten Cilacap tiap tahun makin meningkat, hingga tahun 2022 ada 64 Ormas yang sudah terdaftar.

Tabel 2. 144
Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik
di Kabupaten Cilacap 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Masyarakat yang mengikuti bela negara	Orang	8.250	9.035	10.413	12.013	12.213
		(%)	0,43	0,48	0,55	0,63	0,64
2	Jumlah Ormas	Ormas	10	28	45	62	80
3	Tingkat partisipasi memilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (%)	%	71,6	-	-	-	-
4	Jumlah memilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	Orang	1.506.203	-	-	-	-
5	Jumlah memilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada yang menggunakan hak pilih	Orang	1.081.005	-	-	-	-

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Cilacap, 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing

2.1.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kabupaten Cilacap mempunyai Bandara Tunggal Wulung. Sebelum pandemi tahun 2020, Bandara Tunggal Wulung melayani pesawat komersial dengan rute Cilacap - Jakarta. Namun saat pandemi hingga saat ini, hanya digunakan oleh pesawat VVIP atau pesawat charter dan juga pesawat latih.

Tabel 2. 145
Fasilitas Pelabuhan Udara Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bandara Tunggul Wulung (meter)	1.400 x 30	1.400 x 30	1.400 x 30	1.400 x 30	1.400 x 30
Frekuensi Penerbangan	956	210	52	34	36

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2024
Kantor UPBU Kelas III Bandara Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024

Karena letak geografisnya di kawasan pesisir, Kabupaten Cilacap juga mempunyai pelabuhan laut yaitu pelabuhan Tanjung Intan. Selain itu di Kabupaten Cilacap terdapat 6 (enam) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan 1 (satu) Terminal Khusus (Tersus) yaitu TUKS PT Kilang Pertamina Internasional RU IV, TUKS PT Pertamina Patra Niaga, TUKS PT Solusi Bangun Indonesia, TUKS PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, TUKS PT Sumber Segara Primadaya dan TUKS PT Cilacap Samudera Fishing Industry, serta Tersus PT PLN Indonesia Power Jawa Tengah 2 Adipala OMU. Keberadaan pelabuhan Tanjung Intan sangat berperan sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah bagian Selatan, khususnya kegiatan ekspor-impor, bongkar muat barang dan bahan bakar minyak (BBM) antar pulau dan manca negara.

Kereta Api juga menjadi salah satu moda angkutan orang dan barang, termasuk hasil industri. Tahun 2021 jumlah penumpang kereta api yang tercatat di stasiun KA Cilacap sebanyak 8.670 penumpang dengan rincian 4.279 kelas eksekutif dan 4.391 kelas ekonomi. Sedangkan tahun 2022 jumlah penumpang peningkatan signifikan akibat karena dengan pelonggaran kebijakan terkait Covid-19, yakni menjadi 89.070 penumpang dengan rincian 48.787 penumpang kelas eksekutif dan 40.283 penumpang kelas ekonomi. Pada tahun 2023 karena pandemi Covid-19 sudah usai, dan juga penambahan rute kereta api dari dan ke Kabupaten Cilacap, terjadi peningkatan kembali dengan jumlah penumpang sebanyak 133.037 dengan rincian 65.665 kelas eksekutif dan 67.372 kelas ekonomi.

Tabel 2. 146
Banyaknya Penumpang Kereta Melalui PT KAI Cilacap
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penumpang	Orang	95.025	22.531	8.670	89.070	133.037

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2024, PT KAI Cilacap Tahun 2024

Fasilitas perhubungan dalam mendukung konektivitas di Kabupaten Cilacap tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 147
Jumlah Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Cilacap
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelabuhan Umum	Unit	1	1	1	1	1
2	Pelabuhan Khusus	Unit	1	1	1	1	1
3	Dermaga Sungai	Unit	15	15	15	15	15
4	Bandara	Unit	1	1	1	1	1
5	Terminal Bus	Unit	9**)	9**)	9**)	9**)	9**)
6	Terminal Lainnya	Unit	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, 2023
 *) Terminal Tipe A & C **) Terminal Tipe C dalam kondisi baik
 Jumlah Terminal Tipe C sesuai SK Bupati Cilacap Nomor : 551.2/591/17 Tahun 2015 tentang Penetapan Terminal Tipe C di Kabupaten Cilacap keseluruhan sebanyak 9 unit terminal

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor ke suatu wilayah sangat tergantung dari beberapa faktor, diantaranya:

1. Kemudahan berinvestasi;
2. Jaminan keamanan; dan
3. Politik dalam negeri.

Penanaman modal oleh para pelaku usaha harus memenuhi izin dan persyaratan dasar. Adapun bentuk izin dan persyaratan dasar, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada setiap sektor usaha.

1) Kriminalitas

Pada tahun 2022 rasio kriminalitas di Kabupaten Cilacap sebesar 0,93 persen meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 yang sebesar 0,78. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kewaspadaan kembali dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas. Meningkatnya angka rasio kriminalitas tahun 2022 bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait diantaranya peredaran miras dan maraknya geng motor sebagai imbas dari kurangnya kontrol terhadap media sosial. Dalam rangka menurunkan angka rasio kriminalitas tersebut hal yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, ormas, dan masyarakat dalam mengatasi masalah keamanan dapat berkontribusi pada penurunan kriminalitas sehingga angka rasio kriminalitas di tahun 2023 menurun menjadi 0,71.

Tabel 2. 148
Rasio Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	0,98	0,72	0,78	0,93	0,71

Sumber : Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Jenis kriminalitas yang paling banyak terjadi di Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yaitu pencurian dengan pemberatan sebanyak 73 kasus, berikut jenis kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 149
Banyaknya Kejadian Kriminalitas Menurut Jenis Kriminalitas Tahun 2019-2023

No	Jenis Kriminalitas	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencurian dengan pemberatan	65	52	70	64	73
2	Pencurian kendaraan bermotor	35	26	21	26	4
3	Pencurian dengan kekerasan	5	9	7	4	6
4	Pembunuhan	1	1	4	3	2
5	Penganiayaan berat	0	-	1	13	-
6	Kebakaran	40	-	0	2	-
7	Narkotika	50	47	51	63	27
8	Uang palsu	0	1	1	2	-
9	Perkosaan	1	5	0	2	-
10	Kenakalan remaja	0	0	0	10	33
	Total	197	141	155	189	145

Sumber : Polres Cilacap Tahun 2023

2) Perijinan Usaha

Lamanya proses perijinan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 150
Lamanya Proses Perijinan di Kabupaten Cilacap

No	Jenis ijin	lama (hari)
1	Nomor Induk Berusaha	1
2	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20
3	Persetujuan Bangunan Gedung	30
4	Sertifikat Laik Fungsi	30
5	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan	7
6	Perizinan Penyelenggaraan Reklame	7
7	Perizinan Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan	7
8	Perizinan Pemasangan LPJU Swadaya	7
9	Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial/Anak	30
10	Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	7
11	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	30
12	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	30
13	Izin Pendirian Satuan PAUD	60
14	Perizinan Penerbitan Surat Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat	14
15	Perizinan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	14
16	Izin Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7
17	Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	30

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengubah paradigma penyelenggaraan perizinan berusaha, dari yang awalnya berbasis izin menjadi berbasis risiko (*risk based approach*) yang dibagi menjadi 3 (tiga) risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Dokumen legalitas Perizinan Berusaha juga mengalami perubahan, untuk usaha dengan risiko rendah menggunakan Nomor Induk Berusaha, risiko menengah menggunakan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar, serta risiko tinggi menggunakan Nomor Induk Berusaha dan Izin. Selain Perizinan Berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja juga menyederhanakan proses persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, Persetujuan Lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Persyaratan dasar perizinan berusaha dimaksud dilaksanakan secara terintegrasi dengan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS).

Seluruh penyelenggaraan perizinan berusaha, baik persyaratan dasar perizinan berusaha maupun perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Digitalisasi pelayanan publik merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Perizinan berusaha yang telah disediakan platform OSS, turut mendorong percepatan pelayanan perizinan. Sementara itu, untuk perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan daerah terus diupayakan untuk dilakukan digitalisasi pelayanan.

Pelayanan perizinan non berusaha seperti perizinan reklame non komersial, perizinan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan, surat keterangan penelitian dan persetujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengesahan dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman, perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan, perizinan pemasangan alat penerangan jalan umum swadaya, dan non perizinan lainnya secara bertahap dilayani melalui *platform online* yang dibangun secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sambil menunggu

penyempurnaan platform MPP Digital yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, terdapat 11 (sebelas) Sektor Perizinan Berusaha melalui OSS yang terbagi menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi; 23 (dua puluh tiga) jenis Perizinan Non Berusaha; dan 4 (empat) Non Perizinan.

Perizinan Berusaha meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan.
- b. Pertanian.
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. Perindustrian.
- e. Perdagangan.
- f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- g. Transportasi.
- h. Kesehatan, obat, dan makanan.
- i. Pendidikan dan kebudayaan.
- j. Pariwisata.
- k. Ketenagakerjaan.

Perizinan Non Berusaha, meliputi :

- a. Perizinan Penyelenggaraan Reklame.
- b. Perizinan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Swadaya (LPJU Swadaya).
- c. Perizinan Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija).
- d. Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- e. Perizinan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

- f. Perizinan Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Perizinan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- i. Perizinan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.
- k. Perizinan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.
- l. Perizinan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
- m. Fasilitasi Perizinan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- n. Perizinan Praktik Tenaga Medis.
- o. Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
- p. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- q. Penerbitan Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- r. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- s. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- t. Perizinan Praktik Mandiri Dokter Hewan.
- u. Perizinan Praktik Tenaga Veteriner.
- v. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.
- w. Surat izin tukang gigi.

Non Perizinan meliputi:

- a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG).
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- c. Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan perubahan tersebut, maka berkenaan dengan data, ada sebagian data yang tidak bisa disediakan sebagaimana tabel di bawah ini. Namun demikian, jumlah penerbitan perizinan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dipergunakannya OSS-RBA menggantikan OSS versi 1.0 yang mempermudah pelaku usaha dalam proses penerbitan perizinan

Tabel 2. 151
Jumlah Penerbitan Perijinan Tahun 2019-2023

No	Jumlah Penerbitan Perijinan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	KKPR Non Berusaha	19.965	1.882	0	99	42
2	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	333	276	180	382	406
3	Izin penyelenggaraan reklame	19	7	0	154	292
4	Perizinan OSS	22.468	2.330	0	8.916	31.734
5	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan	2.441	525	0	3.007	2.391
6	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SPF)	582	101	0	6	7
7	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)	94	235	41	18	32
8	Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	12	20	3	6	9
9	Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS/A)	14	-	2	5	7
10	Surat Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (SPPM)	2.441	525	2.870	29	39
11	Perizinan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP)	-	-	-	14	43
12	Perizinan Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija)	-	-	-	1	17
13	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	-	-	170
14	Pengesahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan	-	-	-	-	10
15	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	-	-	-	-	4
16	Surat Izin Tukang Gigi	-	-	-	-	45
17	Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	-	-	-	-	2
Total		46.369	5.901	3.096	12.637	35.250

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2024

3) Jumlah dan Macam Pajak Daerah

Jumlah dan macam pajak daerah di Kabupaten Cilacap sebanyak 11 macam. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 152
Jumlah dan Macam Pajak Daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pajak	11	11	11	11	11
Macam pajak	Hotel	Hotel	Hotel	Hotel	Hotel
	Restoran	Restoran	Restoran	Restoran	Restoran
	Hiburan	Hiburan	Hiburan	Hiburan	Hiburan
	Reklame	Reklame	Reklame	Reklame	Reklame
	Penerangan jalan	Penerangan jalan	Penerangan jalan	Penerangan jalan	Penerangan jalan
	Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet
	Pajak Parkir	Pajak Parkir	Pajak Parkir	Pajak Parkir	Pajak Parkir
	Mineral bukan Logam dan Batuan	Mineral bukan Logam dan Batuan	Mineral bukan Logam dan Batuan	Mineral bukan Logam dan Batuan	Mineral bukan Logam dan Batuan
	Air Tanah	Air Tanah	Air Tanah	Air Tanah	Air Tanah
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
	PBB Perkotaan/ Perdesaan	PBB Perkotaan/ Perdesaan	PBB Perkotaan/ Perdesaan	PBB Perkotaan/ Perdesaan	PBB Perkotaan/ Perdesaan

Sumber : BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Jumlah macam retribusi daerah di Kabupaten Cilacap dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tetap sebanyak 19.

Tabel 2. 153
Jumlah Macam Retribusi Daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Retribusi	Retribusi	19	19	19	19	19

Sumber : BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023

4) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi

Jumlah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Cilacap mengalami perubahan dari tahun 2019-2023 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak setiap tahun ada penerbitan regulasinya. Hal ini karena Peraturan Daerah tersebut diterbitkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Perda tersebut, diharapkan akan mendukung peningkatan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. 154
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi	Dok	4	0	4	2	4

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2023

2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Dependency ratio (rasio ketergantungan) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dari 43,69 persen di tahun 2019 menjadi 44,83 persen di tahun 2023 Hal ini artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2. 155
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Ketergantungan	%	43,69	43,46	43,77	43,19	44,83

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap, 2024 (diolah)

2.1.5 Riset dan Inovasi Daerah

2.1.5.1. Riset Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyebutkan bahwa Riset dengan terminologi lain penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Selain dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya ilmu sosial, penelitian dapat digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi solusi permasalahan pembangunan.

Telah dilaksanakan beberapa riset yang diarahkan dalam upaya mendukung kebijakan pembangunan maupun penanganan isu-isu strategis daerah seperti penanggulangan kemiskinan, pengembangan perekonomian wilayah pantai selatan dan antisipasi dampak pembangunan tol Bandung-Cilacap melalui beberapa kajian dengan tema/fokus antara lain :

- Kajian Analisis Indikator Ekonomi Daerah;
- Kajian sentra-sentra Potensi Peternakan;
- Penyusunan Database Gula Semut;
- Profil dan Peluang Investasi di Kabupaten Cilacap;
- Profil Pengembangan Kopi Robusta di Kecamatan Dayeuhluhur;
- Kajian Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas;
- Kajian Optimalisasi CSR;
- Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa Wisata / Kawasan Wisata Unggulan;
- Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;

- Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka Kebijakan Ketahanan Pangan;
- Masterplan Kawasan Pertanian;
- Masterplan Perkebunan;
- Kajian Pengembangan Wilayah Kawasan Jaringan Jalan Lintas Selatan Trase Batas Batas Jawa Barat - Patimuan - Bantarsari.

2.1.5.2. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota didorong untuk membangun daerahnya dengan semangat pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Dengan mengacu pada berbagai peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berupaya untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah melalui Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 060/ 3650 /10/ Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, dengan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak

untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap bertujuan membantu meningkatkan efesiensi kerja aparatur internal. Beberapa Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah yang dibangun, dilaksanakan dan dikembangkan oleh penyelenggara/pelaksana inovasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai pedoman inovasi pelayanan yang dilakukan secara kompetitif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 156
Inovasi Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Cilacap

No.	Nama Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Asal Instansi / Perguruan Tinggi / Sekolah
1	PKP Award (Penghargaan terhadap kinerja Puskesmas)	Dinas Kesehatan
2	WEB GIS Jalan	DPUPR
3	SIDA PEDES (Sistem Informasi Data Aparatur PEmerintahan DESa)	DISPERMADES
4	SIVERA (Sistem Informasi Verifikasi SPJ Penyedia Barang/Jasa)	Dinas Pertanian
5	PASARKU	DPKUKM
6	SISUKMA	SETDA
7	E-SAKIP terintegrasi e-planning dan e-budgeting	SETDA
8	Verifikasi RKA-DPA online	SETDA
9	SIMPOK (Sistem Informasi Pengendalian Operasional Kegiatan Kab. Cilacap)	SETDA
10	ASOKA (Aplikasi Surat Online Kabupaten Cilacap)	SETDA
11	Aplikasi E-Kontak	Inspektorat
12	Sistim Informasi Monitoring Bebas Temuan (SIMON BETE)	Inspektorat
13	Inspektorat Cilacap Mobile	Inspektorat
14	"Tali Bang Alan" Tambah Lima Bangunan dan Akses Jalan	BPPKAD
15	Jabat Tangan (Pajak Bersahabat Tenang Dan Nyaman)	BPPKAD
16	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Berbasis Elektronik (E-Learning)	BKPPD
17	SIAP PAKDE (Sistem Aplikasi Pengelolaan Pasca Diklat Elektronik)	BKPPD
18	Saran Ki Petrok (Sasaran Kinerja Pegawai Elektronik)/E-Kinerja	BKPPD
19	SITI MAKNYUS (Sistem Manajemen Kombinasi untuk Pelayanan Mudah dan Bagus)	Kecamatan Cilacap Utara
20	Pengumuman Agenda Dinas Secara Elektronik	Diskominfo
21	PAKDE MUNCER (Peningkatan Kualitas Desa Menuju Desa Cerdas Melalui Basis Data Desa)	Kec. Gandrungmangu
22	BIMAKU DESA (Buku Instrumen Monitoring Administrasi Dan Keuangan Desa)	Kec. Majenang
23	Gerakan Mewujudkan "SaTeADe" Sadar Tertib Arsip Desa Melalui Video Tutorial Pengelolaan ArsipDi Kecamatan Kesugihan	Kec. Kesugihan
24	Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Efektivitas Komunikasi Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kinerja Perangkat Desa Mujur Lor	Desa Mujur Lor Kec. Kroya

No.	Nama Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Asal Instansi / Perguruan Tinggi / Sekolah
25	E-Arsip (Aplikasi Arsip Surat Masuk - Surat Keluar)	Desa Karangjati Kec. Sampang
26	LANPU SI EMEN	Kecamatan Karangpucung

Inovasi Pelayanan Publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018, Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Inovasi Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap bertujuan untuk memudahkan pelayanan umum yang cepat dan efesien serta untuk meningkatkan daya saing daerah.

Beberapa Inovasi Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2. 157
Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
1	SINERGI (Sinergitas Untuk Negeri) CILACAP	Bappeda
2	E-Litbang	Bappeda
3	PETI DESI MANDIRI (Pendampingan Melibatkan Perguruan Tinggi Di Desa Inovasi Menuju Desa Mandiri).	Bappeda
4	E-Dalev	Bappeda
5	GUNTING BAJAK SUTRA (Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Penyediaan Bahan Kajian Kebijakan Penangan Isu Strategis Daerah)	Bappeda
6	LAYAR SUREKO MAWA RATASTIS	Bakesbangpol
7	MONALISA WIKEN (Monitoring Antisipasi dan Pengendalian Konflik di Wilayah Kecamatan)	Bakesbangpol
8	SIAP MAS BRO (Mengatasi Abrasi Pantai Menggunakan Anyaman Sabut Kelapa/ Bronjong)	BPBD
9	Smart PBB	BPPKAD
10	SISTEM INFORMASI MUTASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH (SI IMUT) SEBAGAI OPTIMALISASI LAYANAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN CILACAP;	BKPPD
11	SIAP PAKDE (SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN PASCA DIKLAT);	BKPPD
12	MEWUJUDKAN SASARAN KINERJA PEGAWAI YANG SISTEMATIS MELALUI SISTEM INFORMASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SKP (SIPP SKP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP;	BKPPD
13	Sistem Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN (SIPP KOMPAS).	BKPPD
14	Gerakan Cegah Stunting Masa Depan Cerah (Kancing Merah)	Dinas Kesehatan
15	Pepes Nila	Disnakertrans

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
16	SOBAT SIGENTAR (Solusi Cepat Atasi Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar)	Dinsos
17	MARI PERCAYA (Manajemen Informasi Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya)	Dinsos
18	LINTAS KANCIL (Linmas Inti Kecamatan Tanpa Batas Kabupaten Cilacap)	Satpol PP
19	STASIUN PEMADAM KEBAKARAN TERPADU SIAP (SATKARTARU SIAP)	Satpol PP
20	BALAKAR TO RESPON TIME	Satpol PP
21	Forum Seller and Buyer Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisata Ke Desa Wisata di Kabupaten Cilacap	Disporapar
22	Cilacap Creative Mart	Disporapar
23	Pelayanan Literasi Tuna Netra (PELITA)	Dinas ARPUS
24	DEWI ASRAMA (DESTINASI WISATA ARSIP RAMAH ANAK)	Dinas ARPUS
25	PENCIL	Dinas ARPUS
26	Klinik BUMDesa, Mitra Bagi Desa dan BUMDesa	Dispermades
27	SIDA PEDES (Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintah Desa)	Dispermades
28	Sivera	Dispertan
29	Sipetani	Dispertan
30	Display Program Beras PNS Pada Toko Tani Indonesia Center Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Sebagai Upaya Serapan Hasil Pertanian Masyarakat	Dispertan
31	SICANTIK (Inovasi Cilacap Tanpa Kantong Plastik)	DLH
32	Penerapan Metode Refuse Derived Fuel / RDF Pada Pengolahan Sampah Menuju Waste to Energy di Kabupaten Cilacap	DLH
33	Agen Pembaharuan Bank Sampah Entaskan Masalah Dengan Pawai Dalam Upaya Kenal-Luaskan Akses Informasi (Apem BS Empuk AI)	DLH
34	Solusi 10 Menit Ungkap Kekerasan Sambil Bermain (SOSEME)	Dinas KBPPPA
35	MEJA LACI YA (Melihat Kinerja Lampu Cilacap Bercahaya)	Disperkimta
36	Aplikasi SIKEBUD: Ensiklopedia Kebudayaan Cilacap	Dinas P & K
37	EMUT (Sistem Informasi Mutasi Siswa Elektronik)	Dinas P & K
38	SMARTKIR Berbasis E-Payment (Sistem Manajemen Uji KIR Terintegrasi Berbasis E-Payment)	Dishub
39	Peta Rambu lalu lintas Menggunakan Google MyMaps	Dishub
40	Sistem Informasi Manajemen Peluang dan Potensi Investasi Cilacap (SIMPATIC)	DPMPTSP
41	Sistem Informasi Aplikasi Peluang Investasi Kabupaten Cilacap (SI APIC)	DPMPTSP
42	Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Digital (e-SIP URAT NADI)	DPMPTSP
43	Sistem Pendekatan Wilayah Bantuan OSS Secara Elektronik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (SIP WIL BOSS-e LKPM)	DPMPTSP
44	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan (SIMBAJA)	DPUPR

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
45	RISDA (Ruang Informasi Sumber Daya Air)	Dinas PSDA
46	PASARKU (Sistem Informasi Pasar Kabupaten Cilacap)	DPKUKM
47	CIBLON (Cilacap Belanja Online)	DPKUKM
48	MAKSIMAL (Pelelangan Ikan Melayani Waktu Siang Malam) di Kabupaten Cilacap	Dinas Perikanan
49	SIREKSOBUDI (Pelayanan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi Dengan Sistem Rekomendasi Pembelian Solar Bersubsidi)	Dinas Perikanan
50	TEMAN SEJATI (Sistem Pelayanan Secara Terintegrasi)	Dinas Dukcapil
51	GAGIYAN METU (Tiga Strategi Pelayanan Melalui Satu Langkah) PAKET 3 In 1	Dinas Dukcapil
52	PATRIOT SEJATI (Pendaftaran Antrian Online Terpadu Semua Jadi Mudah Tanpa Antri)	Dinas Dukcapil
53	CEMANI ANGKER (Cetak Mandiri Angkatan Kerja 1 - AK1)	Disnakerin
54	LANPU RANGKA BISO (Pelayanan Publik Karangpucung Berbasis Iso)	Kec. Karangpucung
55	Pengembangan Si Bakul (Sistem Informasi Bakul) Dalam Rangka Pemberdayaan Bumdes Di Kecamatan Majenang	Kec. Majenang
56	PULIK MANG OLEN SISWA (Pelayanan Publik Cimanggu Online Berbasis WA Web)	Kec. Cimanggu
57	RESOLUSI (Rumah Kreatif Promosi Konsultasi Edukasi)	Kec. Cilacap Utara
58	Klinik BUMDesa Jeruklegi	Kec. Jeruklegi
59	WA DARJA (Warga Sadar Pajak)	Kec. Dayeuhluhur
60	Sistem Informasi Pelayanan Ora Ngresula (SIPON)	Kec. Kampung Laut
61	GERTAK PALU MESRA (Gerakan Serentak Pajak Lunas Masyarakat Sejahtera)	Kec. Patimuan
62	PENDAPAT (Pesan-Datang-Dapat)	Kec. Kawunganten
63	Pelayanan Paten Tanpa Coca Cola (Covid-19, Calo, Coin, Lama)	Kec. Cilacap Tengah
64	Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Jogo Tonggo Stunting (JOTOS) di Kecamatan Cilacap Tengah	Kec. Cilacap Tengah
65	Asok Glondong Pengaren Areng	Kec. Binangun
66	Ojek IMB	Kec. Sidareja
67	SIPUSPA (Sistem Informasi Pengelolaan Unit Bank Sampah)	Kec. Cipari
68	Inovasi Pelayanan Publik "Jemput Paten" di Kecamatan Wanareja	Kec. Wanareja
69	“SI MAS WARIS “ INOVASI PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI WA SECARA GRATIS	Kec. Wanareja
70	Pelunasan PBB	Kec. Nusawungu
71	Mba "Lila SMS" (Lima Langkah Satu Menit Selesai) Layanan Legalisasi (Khajatan, SKCK, Amen Nikah dan Surat-surat Keterangan Lainnya)	Kec. Cilacap Selatan
72	KLINTUNG ASMARA (Keliling Langsung Atasi Stunting Sekaligus Serap Aspirasi dan Pelayan Masyarakat)	Kec. Cilacap Selatan
73	LIPAT (dektop layanan si cemplon disdukcapil bagi masyarakat)	Kec. Sampang
74	KELORISASI (Gerakan Menanam dan Mengolah Tanaman Kelor Untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja)	Kec. Sidareja

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
75	Gerakan Serentak Pelunasan PBB "GERTAKNAS"	Kec. Kroya
76	Gemma Kesuma (Bergerak Menyapa Masyarakat Kesugihan Untuk Melayani)	Kec. Kesugihan
77	Kecamatan Maos Pelayanan Terpadu dan Terkomputerisasi (MAS PETRUK)	Kec. Maos
78	MAS SEBAKUL (Maos Bersinergi Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui UMKM Lokal)	Kec. Maos
79	KERJA BASAH (Kedungreja Bebas Limbah)	Kec. Kedungreja
80	Desa Pinggiran Menuju Desa Dunia	Desa Sindangbarang
81	Petani Milenial Kembangkan Hidroponik Di Tengah Pandemi Covid-19	Desa Majingklak
82	GUREN EKOMAS (Gula Aren Ekonomi Masyarakat) Bangga Memberdayakan Masyarakat Melalui Produk Ekonomi Kreatif Desa	Desa Tambaksari Kec. Wanareja
83	GEMATI RT PBB (Gerakan Menabung Tingkat Rukun Tetangga Pajak Bumi dan Bangunan)	Desa Sidamulya Kec. Karangpucung
84	Gula Semut	Desa Cisuru Kec. Cipari
85	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP)	Desa Pesahangan Kec. Cimanggu
86	Inovasi Desa Wisata Salam Sari Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	Desa Cilempuyang Kec. Cimanggu
87	Kampus Desa	Desa Kawunganten Kec. Kawunganten
88	Bobok Bumbung PBB Tahun 2022 Desa Pesanggrahan	Desa Pesanggrahan Kec. Kroya
89	Pemanfaatan Lahan Kosong di Sepanjang Jalan Desa Untuk Peningkatan Produksi Lokal Berbahan Dasar Buah Nangka	Desa Karangnangka Kec. Binangun
90	Pengembangan Potensi Buah Pisang untuk Industri Makan Olahan Berbasis Pemberdayaan Ibu Ibu Kader PKK	Desa Maos Lor Kec. Maos
91	Penerapan Aplikasi Open SID Dalam Pengelolaan Website dan Sistem Informasi Desa di Desa Cisumur	Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu
92	Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Online	Desa Jetis Kec. Nusawungu
93	Grebeg PBB P2 Desa Sawangan	Desa Sawangan Kec. Jeruklegi
94	Kreatifitasku untuk Desaku Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kuripan Kidul	Desa Kuripan Kidul Kec. Kesugihan
95	Pengembangan Si Bakul (Sistem Informasi Bakul) Dalam Rangka Pemberdayaan Bumdes Di Kecamatan Majenang	Kecamatan Majenang
96	ARGO MINA MAKMUR di Penyarang Menuju Desa 1000 Kolam (Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Organik)	Desa Penyarang Kec. Sidareja
97	Ke Bali di Margasari (Kerajinan Bambu dan Lidi di Margasari)	Desa Margasari Kec. Sidareja
98	Perpustakaan Desa "NGUDI ILMU"	Desa Rawaapu Kec. Patimuan
99	GELISAH MESRA (Gerakan Literasi Desa Harapan Masyarakat Sejahtera)	Desa Sidamukti Kec. Patimuan
100	Zerokan Zona Merahmu	Kelurahan Sidanegara Kec. Cilacap Tengah

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
101	PODORAMAS (Pokdar Donan Ramah Masyarakat)	Kelurahan Donan Kec. Cilacap Tengah
102	Kampoeng Sehati (Sehat Anak dan Ibu Tercinta)	Kelurahan Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah
103	DENI CENI PENI (Deteksi Dini Cegah Dini Penanggulangan Dini)	Kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah
104	KUWIKUT (Kumandang Wisata Kutawaru)	Kelurahan Kutawaru Kec. Cilacap Tengah
105	Layanan Cepat Akta Kematian di Kelurahan (LAYAT AMANAH) di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara	Kelurahan Gumilir Kec. Cilacap Utara
106	Merubah Sampah Jadi Rupiah	Kelurahan Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
107	Kampung Bersinar Terang	Kelurahan Sidakaya Kec. Cilacap Selatan
108	Sistem Pelayanan Berbasis Whatsapp (SIMPEL WA)	Kelurahan Karangtalun Kec. Cilacap Utara
109	Posbindu	Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara
110	KAPEKA (Kampoeng Pinggir Kali)	Kelurahan Tambakreja Kec. Cilacap Selatan
111	Psikolog Goes To School: Menciptakan Generasi Milenial Yang Sehat Mental	RSUD Majenang
112	SIAP MATA (Sistem Informasi Antrian Pendaftaran, Tempat Tidur dan Aduan Masyarakat)	RSUD Majenang
113	Percepatan Penanganan Sindrom Koroner Akut Di Kabupaten Cilacap Dengan SINAR SENJA (Sharing Gambar EKG Serangan Jantung di Kabupaten Cilacap)	RSUD Cilacap
114	Program RENALIS (Ruang Edukasi Pasien Gagal Ginjal Kronis)	RSUD Cilacap
115	GOTUBALL (Goyang Inpartu Dengan Gymball)	RSUD Cilacap
116	SURFACE 124 (Surveilans Faktual Dan Cepat 1 x 24 Jam Pada Penyakit Potensial Wabah Di RSUD Cilacap)	RSUD Cilacap
117	Penghantaran Obat Aman Tanpa Antrian (HANOMAN)	RSUD Cilacap
118	SI SANI (Sistem Informasi Semua Ada Disini)	RSUD Cilacap
119	POLJITU (Poli Jiwa Terpadu)	UPTD Puskesmas Kedungreja
120	SURTI KENA COVID-19 (Surveilans Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi Edukasi Nasehat Aman Covid-19)	UPTD Puskesmas Kedungreja
121	Pelayanan Vaksinasi Cepat Melalui "SIAPAKECO"	UPTD Puskesmas Kedungreja
122	GETUK LINDRI (Gerakan Temukan Batuk Mulai dari Diri Sendiri)	UPTD Puskesmas Kedungreja
123	OSSELA (One Stop Servis Lansia)	UPTD Puskesmas Kedungreja
124	JUMALA BUDE JAMU (Jum"at Senam Lansia Bugar Dengan Jamu)	UPTD Puskesmas Kedungreja
125	RAPOR GIATKU (Gigi Anak Sehatku)	UPTD Puskesmas Kedungreja
126	SIPITALOKA (Sistem Antrian Cepat Tiga Loker Antrian)	UPTD Puskesmas Majenang I

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
127	PUSKESMAS PROSILA DENGAN ITM	UPTD Puskesmas Majenang I
128	ANTARKAREDOK PEUDES (PELAYANAN ANTENATAL CARE TERPADU DENGAN DOKTER DAN PEMERIKSAAN USG)	UPTD Puskesmas Majenang I
129	GENERASI PEDULI GIZI (GENZI)	UPTD Puskesmas Majenang I
130	BUYALOR BUKAN CETING (Budi Daya Kelor Buat Makanan Cegah Stunting)	UPTD Puskesmas Nusawungu I
131	Pinter Melantun (Pilar Terintegrasi Melayani dengan Sopan dan Santun)	UPTD Puskesmas Maos
132	Call Sakina (Call Stop Angka Kematian Ibu dan Anak)	UPTD Puskesmas Binangun
133	Bunda Asuh Bumil Resti	UPTD Puskesmas Kroya I
134	PELAYANAN PRIMA SECARA LENGKAP, DIGITAL, TERPADU (LAPIS LEGIT)	UPTD Puskesmas Cilacap Utara I
135	Pinisi (Pijat Nikmat Sehat Alami)	UPTD Puskesmas Cilacap Utara I
136	Operasi Sadar Keren (Optimalisasi Peran Santri Husada Terhadap Kesehatan Pesantren)	UPTD Puskesmas Kesugihan I
137	Giat Gesit (Gerakan Ibu Anak Sehat Dengan Eliminasi AIDS SIFILIS dan HEPATITIS B)	UPTD Puskesmas Kesugihan I
138	Penyu Jalan Pagi Mas (Penyusunan Rawat Jalan Setiap Pagi Dilanjutkan GERMAS)	UPTD Puskesmas Gandrungmangu I
139	GELAS KRISTAN (Gerakan Lansia Sehat Dengan Skrining Kesehatan)	UPTD Puskesmas Bantarsari
140	Kegiatan Program Kesehatan Jiwa Ramah Jiwa (Rumah Singgah Sehat Jiwa)	UPTD Puskesmas Bantarsari
141	KANDA SUKA ROTI (Gerakan Dana Sosial Untuk Kasus-kasus Resiko Tinggi)	UPTD Puskemas Dayeuhluhur II
142	KARSA MERINDU	UPTD Puskemas Dayeuhluhur II
143	Giat Selebritis (strategi cepat seleksi batuk terduga tuberkulosis)	UPTD Puskemas Dayeuhluhur II
144	Photo Artis Berdaya (Poto shoot dan akte gratis bersalin di Puskesmas Dayeuhluhur 2)	UPTD Puskemas Dayeuhluhur II
145	Papah IHA (Pemberian penghargaan Ibu Hamil Aterm)	UPTD Puskemas Dayeuhluhur II
146	Mantra Medsos (Materi penggunaan obat tradisional melalui media sosial)	UPTD Puskemas Dayeuhluhur II
147	Jebol Pandu Iva Danis (jemput bola pemeriksaan terpadu iva dan payudara oleh tenaga klinis)	UPTD Puskemas Dayeuhluhur II
148	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut "SENJA BAHAGIA"	UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I
149	Layanan Kesehatan Berkualitas Melalui Penguatan Etos Kerja Aparatur Dan Sipekar Pada UPTD Puskesmas Kesugihan II	UPTD Puskesmas Kesugihan II
150	Ayuk Tingkatkan Penanganan Stunting Dengan Memberdayakan Desa (Ayu Ting-Ting)	UPTD Puskesmas Cimanggu II
151	GAYENG NING ATI (Gerakan Layanan Skrinning, Aktif Temukan Hipertensi)	UPTD Puskesmas Cimanggu II
152	Novi Sipelayan Ceria (Inovasi Sistem Pelayanan Cekatan Elegan Ramah Indah dan Aman) dengan SIMPEL KASIR (Sistem Informasi Pelayanan Kasir)	UPTD Puskesmas Cipari
153	OPEN GIGIMU BU (Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Ibu Hamil)	UPTD Puskesmas Kroya II

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
154	BERGASS (Bersama Kita Keluarga Sehat Sejahtera)	UPTD Puseksmas Cimanggu I
155	GARDU SEHATI" GERAKAN POSBINDU UNTUK KESEHATAN DI HARI TUA NANTI	UPTD Puskesmas Majenang II
156	"CI GEBYUR" CIPTAKAN GEMAR MAKAN BUAH DAN SAYUR	UPTD Puskesmas Majenang II
157	"RAJA GUNTING" GERAKAN REMAJA CEGAH STUNTING	UPTD Puskesmas Majenang II
158	"GUNTING BAJA BESI" GUGURKAN STUNTING BERSAMA REMAJA BEBAS ANEMIA	UPTD Puskesmas Majenang II
160	"AJAK AKU" AKSI JEMPUT PAKET DAHAK KE RUMAH	UPTD Puskesmas Majenang II
161	"PIONIR" PELAYANAN INFORMASI OBAT INFORMATIF DAN RASIONAL	UPTD Puskesmas Majenang II
162	PELUK JARI CERIA" PENDAMPING UNTUK REMAJA PUTRI CEGAH ANEMIA	UPTD Puskesmas Majenang II
163	"PELABUHAN HATI ODHIV" PENCEGAHAN PENULARAN BARU DAN KEMATIAN SERTA HINDARI STIGMA ODHIV	UPTD Puskesmas Majenang II
164	"PIONIR" PELAYANAN INFORMASI OBAT INFORMATIF DAN RASIONAL	UPTD Puskesmas Majenang II
165	Pelayanan Surat Pindah Antar Kecamatan Dengan Menggunakan Aplikasi Whatsapp di Kecamatan Cipari	Kec. Cipari
166	Meraup Keuntungan Besar Pada Budidaya Melon	Kec. Cipari
167	"POPOK EMAS" (Posbindu dan Posyandu Lansia Keliling Desa di Kecamatan Sidareja)	Puskesmas Sidareja
168	PENYU JALAN PAGI MAS (PENYULUHAN RAWAT JALAN SETIAP PAGI DILANJUTKAN GERMAS)	Puskesmas Gandrungmangu I
169	POSDARA (POSYANDU UDARA)	Puskesmas Adipala II
170	BILANG MAS ADJI (Bincang Pelanggan Puskesmas Adipala Siji)	Puskesmas Adipala II
171	BAWA GUNTING (PMBA Dua Tahun Guna Cegah Stunting) dan PMT NUGET TIGA BINTANG	UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
172	OPTIMALISASI PENDIDIKAN KETERAMPILAN SESUAI DENGAN KONSEP LIFE SKILLS SISWA SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU	SMP Negeri 1 Nusawungu
173	Smart Library SMP Negeri 2 Jeruklegi	SMP Negeri 2 Jeruklegi
174	OLAH SAMPAH JAGA BUMI (OPAH GAMI)	SMP Negeri 2 Jeruklegi
175	EE CAORKAMARALING (ECO ENZYME CAIRAN ORGANIK KAYA MANFAAT RAMAH LINGKUNGAN)	SMP Negeri 5 Cilacap
176	SI DARN0 (Sistem Informasi DARING pelayaNan sekOlah)	SMP Negeri 1 Sampang
177	BEAT PLASTIC POLLUTION	SMP Negeri 2 Nusawungu
178	Lebah Madu Bambu Betung	SMP Negeri 2 Karangpucung
179	PEMANFAATAN FANPAGE SEBAGAI MEDIA LITERASI DIGITAL DI SMP NEGERI 6 CILACAP	SMP Negeri 6 Cilacap
180	PERPUSTAKAAN DIGITAL DENGAN PEMANFAATAN WEBSITE NOL RUPIAH	SMP Negeri 5 Kroya
181	Siap Membangun Karakter (SIMEKAR)	SMP Negeri 3 Binangun
182	SI PELIT (SISTEM PENGELOLAAN PENGUATAN LITERASI DIGITAL) BERBASIS APLIKASI E-HASCARIA LIBRARY DAN JURNAL LITERASI ONLINE	SMP Negeri 1 Cilacap

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
183	Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Educandy Game Melalui Google Classroom Bagi Peserta Didik SMP Negeri 1 Adipala	SMP Negeri 1 Adipala
184	Inovasi Pemanfaatan ecoenzym pada hidroponik dari sisa organik dan non organik di SMPN 3 Nusawungu Kabupaten Cilacap	SMP Negeri 3 Nusawungu
185	PPDB ONLINE SMP NEGERI 3 JERUKLEGI	SMP Negeri 3 Jeruklegi
186	SIAPLAH (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERSEKOLAHAN) SMP NEGERI 6 KROYA	SMP Negeri 6 Kroya

Inovasi Daerah Lainnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018, Inovasi Daerah Lainnya adalah segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Inovasi Daerah Lainnya yang dimiliki Kabupaten Cilacap adalah inovasi yang bersifat eksternal. Hal ini dalam rangka menampung, mengolah dan mempublikasikan kepada publik sehingga hasilnya dapat dinikmati langsung oleh publik. Inovasi ini berisikan hasil karya baik yang dilakukan oleh pelajar, Perguruan Tinggi maupun masyarakat yang dilaksanakan melalui lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat setiap tahun dengan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

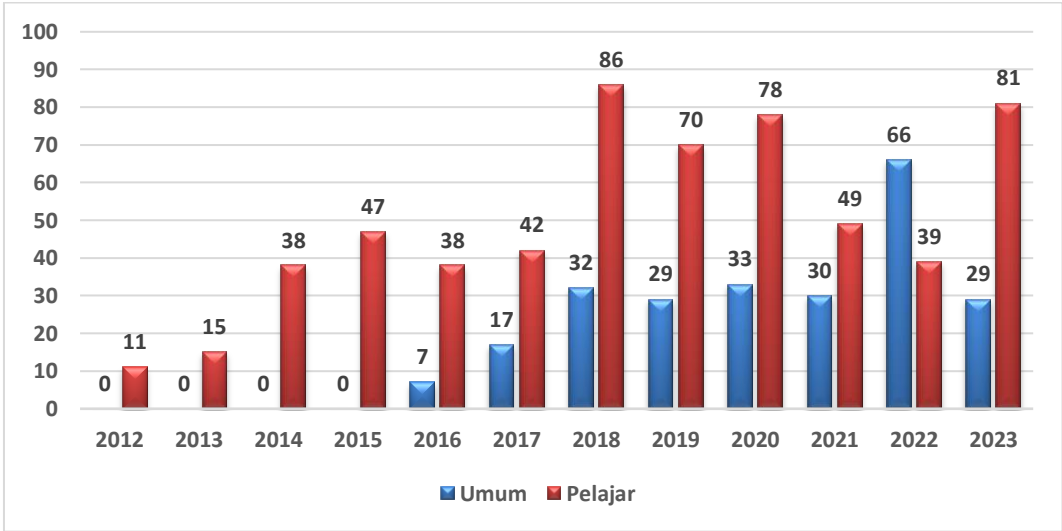
Beberapa Inovasi Daerah Lainnya yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 158
Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten Cilacap

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
1	GuardianBot: Inovasi Robot Ekspedisi Pertambangan Berbasis IoT untuk Deteksi Kebocoran Gas dan Monitoring Suhu serta Kelembaban guna Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Pekerja di Area Pertambangan	PNC
2	Cleaner Solar Panel Otomatis Menggunakan Mikrokontroler Dengan Metode Terjadwal	PNC
3	B3S_Green (Bio-Oil, Bioantiseptic, Biopestisida, Selulosa dan Organic Green Corrosion Inhibitors) Dari Limbah Sekam dan Jerami Padi Di Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Sumber Daya Kabupaten Cilacap Menuju Green Economy Development	PNC
4	Biesrol (Biodiesel dan Gliserol) Dari Minyak Jelantah Untuk Program Low Carbon Economy dan Blue Energy	PNC
5	Pemanfaatan Kotoran Sapi Dan Kulit Pisang Menjadi Biogas Skala Rumah Tangga Sebagai Upaya Implementasi Teknologi Bersih di Kabupaten Cilacap	STT Migas Cilacap
6	Suka_Bioplastik (Seululosa, Kitosan, Bio-Oil dan Bioplastik Degradable) Dari Sekam Padi Dan Emerita Sp. Untuk Lingkungan Kabupaten	PNC

No	Judul Inovasi	Instansi/Asal
	Cilacap Bebas Sampah Plastik Serta Mendukung Program Green Economy dan Blue Economy Pemerintah	
7	Wirausaha Sosial Triologi Biomasa	Masyarakat
8	Suplementasia Omega-3 Bahari Pada Produk Facial Oil Multifungsi Sebagai Inovasi Wirausaha Farmasi	Masyarakat
9	Steadier Oven	Masyarakat
10	Teknologi Tepat Guna Alat Filtrasi Limbah Batik Kutawaru Cilacap Menggunakan Fly Ash Teraktivitasi H2SO4, Pasir, Ijuk, Dan Kerikil	UNUGHA
11	Formulasi Food Bar Dari Tepung Jagung Dan Tepung Millet Sebagai Bahan EFP (Emergency Food Product) Untuk Buffer Stock Darurat Bencana	SMP Negeri 1 Gandrungmangu

Dalam rangka pengembangan inovasi daerah lainnya BAPPEDA Kabupaten Cilacap berupaya untuk mendorong masyarakat melakukan kreativitas dan inovasi dengan menyelenggarakan Lomba Kreavitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova). Lomba Krenova terdiri dari dua kategori yaitu Umum dan Pelajar. Peserta Lomba Krenova yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2019 terdapat 99 proposal yang diterima, tahun 2020 meningkat menjadi 111 proposal, sedangkan tahun 2021 menurun menjadi 79 proposal (dampak dari Pandemi Covid-19), pada tahun 2022 diterima 105 proposal dan pada tahun 2023 diterima 110 proposal. Proposal Lomba Krenova yang diterima oleh Panitia BAPPEDA Kabupaten Cilacap sejak tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Gambar 2. 39
Proposal Lomba Krenova Tahun 2012-2023

Apresiasi diberikan kepada enam besar juara masing-masing karegori. Pada tahun 2023 hadiah bagi Juara Krenova terdiri dari:

1. Pemenang Utama, Juara 1-3 mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan pengembangan dari Bupati Cilacap serta souvenir untuk kategori Pelajar SMP, Pelajar SMA, Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
2. Pemenang Harapan, Harapan 1-3 mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan pengembangan dari Bupati Cilacap serta souvenir untuk kategori Pelajar SMP, Pelajar SMA, Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Masyarakat.

Fasilitasi inovasi peserta Lomba Krenova diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui fasilitasi HKI serta Paten dan Diseminasi Inovasi hasil Lomba Krenova tingkat Kabupaten Cilacap. Hasil temuan Krenova diharapkan dapat diterima industri dan sekaligus dapat mengatasi permasalahan teknologi yang ada di masyarakat. Kegiatan lomba Krenova ini diharapkan dapat menstimulasi iklim yang kondusif dalam rangka peningkatan inovasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi daerah dan kemandirian masyarakat Kabupaten Cilacap.

Selain Krenova, di Kabupaten Cilacap diselenggarakan kegiatan Lomba Inovasi Daerah (LINDA) bertujuan untuk mengukur penerapan inovasi oleh OPD, Instansi/lembaga, Desa dan masyarakat. Kegiatan Fasilitasi Inovasi Dinas/Lembaga dibagi dalam tiga kategori yaitu OPD/Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Puskesmas/RSUD.

LINDA pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 dan dilaksanakan dua tahun sekali. Pada Lomba tahun 2021 terjaring 53 (lima puluh tiga) proposal kategori OPD/Kecamatan, 36 (tiga puluh enam) proposal kategori Desa/Kelurahan dan 24 (dua puluh empat) proposal kategori Puskesmas/RSUD. Pada pelaksanaan LINDA tahun 2023 terjaring 75 proposal inovasi yang terdiri dari 35 proposal inovasi OPD/Kecamatan, 17 proposal inovasi RSUD/Puskesmas dan 23 proposal inovasi BUMD/Desa/Kelurahan. Dewan Juri sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari: unsur OPD terkait dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap. Penghargaan diberikan kepada Juara 1 sampai dengan 6 masing-masing kategori Lomba Inovasi Daerah Tahun 2023.

Indeks Inovasi Daerah

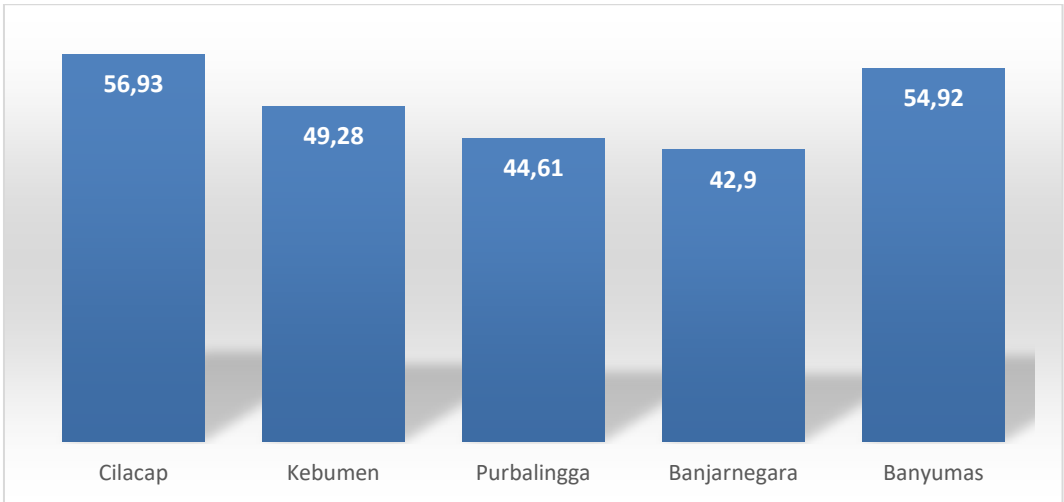
Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Lingkup inovasi daerah ada 2 (dua) :

1. Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dalam bentuk Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yaitu inovasi yang berasal dari masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Indeks Inovasi Daerah merupakan komponen penilaian dalam ajang penghargaan tahunan *Innovative Government Award (IGA)* yang diselenggarakan oleh Kemendagri, yang dalam pelaksanaannya melalui penjaringan inovasi daerah yang diinput ke sistem dan skor yang dihasilkan untuk penentuan nilai IID.

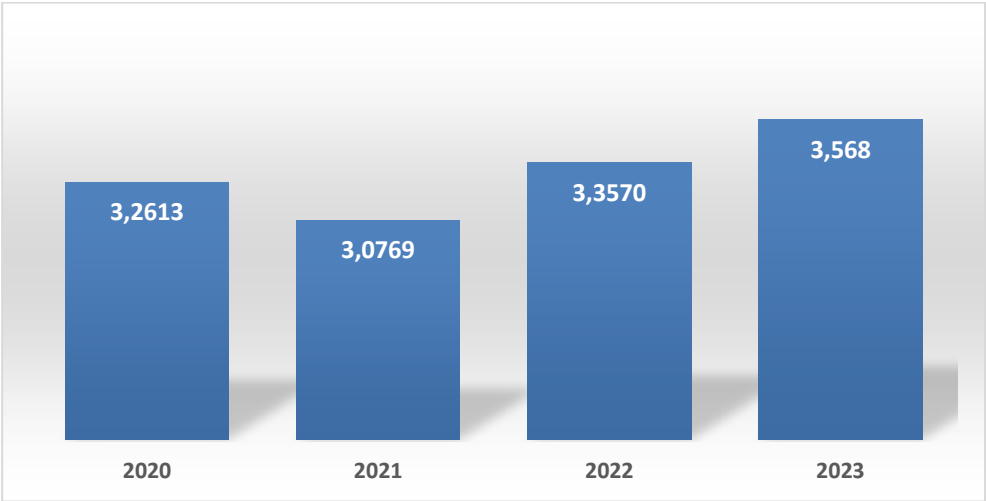
Penilaian IID tahun 2021 berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 skor IID Kabupaten Cilacap 700 peringkat 48 Nasional dengan kategori Inovatif, tahun 2019 sebesar 700 peringkat 82 Nasional dengan kategori Inovatif dan tahun 2020 sebesar 5.153 peringkat 17 Nasional dengan kategori Sangat Inovatif. Pada tahun 2021 skor IID Kabupaten Cilacap sebesar 52,61 peringkat 74 Nasional dengan kategori Inovatif, pada tahun 2022 skor IID Kabupaten Cilacap sebesar 52,47 peringkat 119 nasional dengan kategori Inovatif. Dan pada tahun 2023 skor IID Kabupaten Cilacap sebesar 56,93 peringkat 55 nasional dengan kategori Inovatif. Perbandingan skor IID tahun 2023 dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Gambar 2. 40
Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap dan
Kabupaten Tetangga Tahun 2023

Pemetaan Daya Saing Daerah

Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) merupakan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

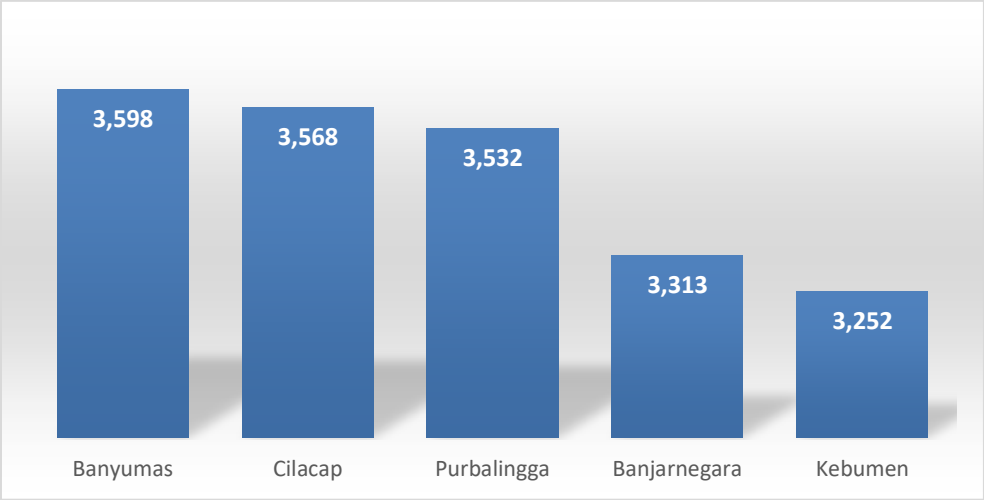


Gambar 2. 41
Progres PDSD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 - 2023

Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah melakukan penghitungan Indeks PDSD kembali yang terdiri atas 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator. Dari hasil penghitungan tersebut, nilai PDSD Kabupaten Cilacap tahun 2023 sebesar 3,568 dengan kategori tinggi. Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa progres perolehan nilai PDSD Kabupaten Cilacap dari tahun 2020 – 2023 cenderung naik. Pada Tahun 2021 Nilai PDSD mengalami penurunan dikarenakan Kabupaten Cilacap adalah salah satu daerah yang terdampak penyebaran virus Covid-19. Hal itu menyebabkan perekonomian di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 mengalami kontraksi ekonomi sehingga seluruh anggaran dan kegiatan difokuskan pada penanganan Covid-19. Namun pada tahun 2022 dan 2023 Nilai PDSD Kabupaten mengalami peningkatan karena pada tahun ini penyelenggaraan kegiatan sudah mulai pulih dan bangkit kembali.

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap difokuskan pada upaya pemulihan kondisi perekonomian daerah dan upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung Covid-19. Kebijakan ini sejalan dengan dicabutnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pemulihan dan penerapan tatanan hidup baru (new

normal) pasca Pandemi Covid-19. Peran dan kapasitas daerah dalam konteks Interaksi Wilayah



Gambar 2. 42
Skor PDS Barlingmascakeb tahun 2023

Nilai PDS Kabupaten Cilacap dibandingkan dengan daerah lain pada sistem Perwilayahan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen)) berada pada Peringkat II (kedua) setelah Kabupaten Banyumas dengan Skor 3,598 dengan predikat Tinggi.

Daya Dukung Inovasi Daerah

Daya dukung inovasi daerah Kabupaten Cilacap tidak saja berasal dari pemerintahan daerah atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), tetapi juga didukung oleh Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap dan para *stakeholder* peneliti lainnya. Sistem inovasi yang baik di daerah perlu dukungan dan kerjasama dari berbagai Perguruan Tinggi dan *stakeholders*, guna meningkatkan daya saing daerah.

Berikut data Perguruan Tinggi beserta daya dukungnya di wilayah Kabupaten Cilacap yang telah mendukung pelaksanaan inovasi daerah.

Tabel 2. 159
Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap Tahun 2023

No	Perguruan Tinggi	Jumlah Dosen	Nama Jurnal	Jumlah Lulusan		Pusat Inovasi
				Diploma	S1	
1	Akademi Maritim Nusantara (AMN) Cilacap	28	Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu – Ilmu Maritim	205	0	-
2	STKIP Majenang	26	-	0	103	• Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2MP) • Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
3	STAIS Majenang	24	Jurnal At-Thariq Jurnal Qalam Jurnal J-EBI	0	83	• Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2MP)

No	Perguruan Tinggi	Jumlah Dosen	Nama Jurnal	Jumlah Lulusan		Pusat Inovasi
				Diploma	S1	
						• Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) • Pusat Pengembangan dan Kerjasama • Pusat Seni dan Budaya Islam • Pusat Studi Al-Qur'an
4	Politeknik Negeri Cilacap	73	• INFOTEKMESIN • Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA) • Madani : Indonesian Journal of Civil Society, • Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL) • Electronic and Electrical Journal of Innovation Technology (E-JOINT) • Accurate : Journal Of Mechanical Engineering and Science	276	0	• Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) • Cilacap Bisnis dan Teknologi (CiBITEC)
5	UNUGHA Cilacap	98	• Jurnal Pancar • Jurnal Teknologi Industri • I RATH, • Dimas Ghozali • MATHGRAM • AMANU • Tawadhu • Warna • Al Munqidz • Al Wasith • Hujjah • IMUNIA	0	192	• Ghozali Entrepreneur Center • Laboratorium Technopreneur
6	STIKES Graha Mandiri Cilacap	18	-	12	0	• Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) • Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM)
7	Universitas Al-Irsyad Cilacap	72	• Jurnal Kesehatan Al Irsyad • Jurnal Pharmaceutuous • Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Irsyad • <i>Journal Trends of Nursing Science</i>	86	134	• Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) • Inkubator Bisnis dan Penerbitan • Pusat Kajian Farmasi Bahari • UKM Karya Ilmiah Mahasiswa
8	STT Migas Cilacap	15	Jurnal Dinamika Sains dan Rekayasa Teknologi	0	10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
9	STIKES Serulingmas Cilacap	24	Serulingmas <i>Health Science</i> dan Jurnal Pengabdian Serulingmas	68	13	• Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat • Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM)

No	Perguruan Tinggi	Jumlah Dosen	Nama Jurnal	Jumlah Lulusan		Pusat Inovasi
				Diploma	S1	
10	STMIK KOMPUTAMA Majenang	25	JTB (Jurnal Teknologi dan Bisnis)	0	0	• Inkubator Bisnis Mahasiswa (IBM) • Pusat dan Pengabdian Masyarakat (P3M) • Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM)
11	STKIP Darussalam Cilacap	15	• Jurnal Karakter (Kajian Ilmu Pendidikan & Pembelajaran) - Jurnal Sport & Sains	0	142	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
12	STIE Muhammadiyah Cilacap	21	Jurnal Ekonomi	7	45	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Total		439		654	722	

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2023 dan Realisasi RPD

Evaluasi kinerja yang digunakan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan menggunakan Tabel E.1 sebagai berikut :

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA		KETERANGAN
91% < 100%	Sangat Tinggi	(ST)	Pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
76% < 90%	Tinggi	(T)	
66% < 75%	Sedang	(S)	Pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
51% < 65%	Rendah	(R)	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
< 50%	Sangat Rendah	(SR)	

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Cilacap diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023, dibandingkan dengan target tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2023, dari 260 indikator kinerja pembangunan sebanyak 251 indikator (96,54%) berstatus Sangat Tinggi; 4 indikator (1,54%) berstatus Tinggi; 2 indikator (0,77%) berstatus Sedang, dan 3 indikator (1,77%) berstatus Rendah.

Tabel 2. 160
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Cilacap
Tahun 2023

Status Pencapaian Indikator	2023	
	Jumlah Indikator	Persentase
Sangat Tinggi	251	96,54
Tinggi	4	1,54
Sedang	2	0,77
Rendah	3	1,15
Sangat Rendah	0	0
Total Indikator	260	100

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2023 ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program dan indikator utama pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

Berikut evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 terhadap target RPD Tahun 2023-2026 berdasarkan urusan pemerintahan.

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Tabel 2. 161
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023
Terhadap Target Kinerja RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Status Kinerja Th. 2023	Capaian Kinerja RPD s.d.2023	Status Capaian terhadap target RPD
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	68,5	76,77	112,07	ST	102,36	ST
2.	Angka kriminalitas *	Indeks	20	20,75	17,12	117,49	ST	116,39	ST
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,68	71,26	72,04	101,09	ST	101,09	ST
4.	Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas)	%	3,5-4,0	2,1-2,5	5,34	213,6	ST	133,5	ST
5.	Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas)	%	5,46-6,00	4,15-5,15	5,76	111,84	ST	96	ST
6.	Inflasi	%	2,5-4,5	2,5-4,5	2,69	100	ST	100	ST
7.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	91,32	84,45	84,53	100,09	ST	100,09	ST
8.	Indek Kinerja Sistem Irigasi	%	49,35	47,85	45,46	95,01	ST	95,01	ST
9.	Vc Rasio *	Indeks	0,30-0,40	0,33-0,40	0,38	100	ST	100	ST
10.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7199	0,7055	0,7455	105,67	ST	105,67	ST
11.	Penurunan Gas Rumah Kaca	Gg Co2e	13.500	10.750	11.197	104,16	ST	104,16	ST
12.	Indeks Resiko Bencana *	Indeks	112,25	112,55	103,73	92,16	ST	92,16	ST
13.	Nilai SAKIP	Nilai	74,7	74	74,58	100,78	ST	100,78	ST
14.	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	73,5	70,5	74,146	105,17	ST	105,17	ST
15.	Indeks Merit System	Indeks	333	296	310	104,73	ST	104,73	ST
16.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,1	2,86	3,46	120,98	ST	120,98	ST
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,5	86,9	87,97	101,23	ST	101,23	ST
18.	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	93 (Zona Hijau)	90 (Zona Hijau)	96,52 (Zona Hijau)	107,24	ST	107,24	ST

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Status Kinerja Th. 2023	Capaian Kinerja RPD s.d.2023	Status Capaian terhadap target RPD
19.	IPG	Indeks	87,83	87,32	87,78	100,53	ST	99,94	ST
20.	Angka kemiskinan *	%	10	10,97	10,99	99,82	ST	99,8	ST
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka *	%	5,85	8,06	8,74	91,56	ST	91,6	ST

*) Rumus Invers : capaian semakin menurun semakin baik

2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.2.2.1. Pendidikan

Capaian kinerja urusan Pendidikan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target 2023 dari 9 indikator kinerja program, semua indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 162 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS P & K
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS P & K
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS P & K

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS P & K
	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS P & K
	% PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina.	%	72,58	69,28	69,31	100,04	ST	69,31	95,49	ST	DINAS P & K
	% SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP.	%	45,12	36,72	36,79	100,19	ST	36,79	81,54	T	DINAS P & K
	% SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP.	%	55,88	49,88	50	100,24	ST	50	89,48	T	DINAS P & K
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	%	93,07	91,25	92,03	100,85	ST	92,03	98,88	ST	DINAS P & K

2.2.2.2. Kesehatan

Capaian kinerja urusan Kesehatan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target 2023, dari 26 indikator kinerja program, sebanyak 25 indikator berstatus Sangat Tinggi dan 1 indikator berstatus Sedang.

Tabel 2. 163 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	83,33	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pusling dengan Kondisi Sarana dan Prasarana Memadai Masyarakat	%	91,07	88,39	91,94	104,02	ST	91,94	100,96	ST	DINKES
	% FKTP Terakreditasi	%	100	97,44	97,44	100,00	ST	97,44	97,44	ST	DINKES
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	99,82	99,82	ST	99,82	99,82	ST	DINKES
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun ke atas	%	100	100	96,41	96,41	ST	96,41	96,41	ST	DINKES

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan										
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun ke atas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	102,39	102,39	ST	102,39	102,39	ST	DINKES
	Jumlah Warga Negara Penderita Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	% Desa/Kelurahan STBM	%	60	10	7,04	70,40	S	7,04	11,73	SR	DINKES
	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	90	82	86,97	106,06	ST	86,97	96,63	ST	DINKES
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB/Potensi KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	% Menurunnya Angka Kesakitan dan Kecacatan Akibat Penyakit	%	23	20	80	400,00	ST	80	347,83	ST	DINKES
	% Pemanfaatan SIK Terintegrasi di Fasyankes	%	80	65	65,31	100,48	ST	65,31	81,64	T	DINKES
	% RS Rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	% Tenaga Kesehatan Teregistrasi	%	94	91,2	100	109,65	ST	100	106,38	ST	DINKES

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	% Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINKES
	% Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Syarat	%	65	60	60	100,00	ST	60	92,31	ST	DINKES
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	86	85,75	90,32	105,33	ST	90,32	105,02	ST	DINKES

Urusan Kesehatan memiliki 1 kinerja program dengan status Sedang, yaitu Persentase Desa/Kelurahan STBM. Desa/Kelurahan di Kabupaten Cilacap pada umumnya sudah menerapkan seluruh pilar-pilar STBM (stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga, dan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga). Belum terealisasinya indikator ini disebabkan antara lain karena kesiapan desa/kelurahan untuk dilakukan verifikasi STBM (STBM belum menjadi prioritas), selain itu sarana TPS di masing-masing desa masih terbatas sehingga sebagian masyarakat masih mengolah sampah dengan cara membakar. Upaya atau strategi yang dilakukan yaitu dengan tetap menjalankan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hidup bersih dan sehat kepada kelompok masyarakat yang masih melakukan praktek-praktek BABS, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam percepatan verifikasi Desa/Kelurahan STBM.

2.2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target 2023 dari 16 indikator kinerja program, semua indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 164 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah (PUPR)	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PUPR
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	% panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	71	68	65,67	96,57	ST	65,67	92,49	ST	DINAS PUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	% kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	93	87	96,07	110,43	ST	96,07	103,30	ST	DINAS PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	% bangunan pemerintah dalam kondisi baik	%	80,8	63,7	71,5	112,24	ST	71,5	88,49	T	DINAS PUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	48,43	27,43	44,09	160,74	ST	44,09	91,04	ST	DINAS PUPR
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PSDA)	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PSDA
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PSDA
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	% Jaringan Irigasi yang Berfungsi Baik	%	50,09	47,09	45,12	95,82	ST	45,12	90,08	ST	DINAS PSDA
	% Ketersediaan Penunjang Data SDA.	%	67,69	48,52	49,51	102,04	ST	49,51	73,14	S	DINAS PSDA
	% Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak Air	%	11	9,5	8,77	92,32	ST	8,77	79,73	T	DINAS PSDA

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	% penanganan sampah	%	70,05	67,05	65,14	97,15	ST	65,14	92,99	ST	D L H
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	90,88	90,88	100,00	ST	90,88	90,88	ST	DINAS PERKIMTA
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	91,9	91,9	100,00	ST	91,9	91,90	ST	DINAS PERKIMTA
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	% bangunan dan lingkungan yang tertata dalam kondisi baik	%	68,29	63,72	63,72	100,00	ST	63,72	93,31	ST	DINAS PERKIMTA
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	% Drainase dalam keadaan baik	%	95,1	90,6	90,6	100,00	ST	90,6	95,27	ST	DINAS PERKIMTA

2.2.2.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023, dari 6 indikator kinerja program, seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 165 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERKIMTA
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERKIMTA
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERKIMTA
	Persentase penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota yang mengalami kerusakan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERKIMTA
Program Kawasan Permukiman	% kawasan kumuh yang tertangani	%	100	64,28	64,28	100,00	ST	64,28	64,28	R	DINAS PERKIMTA
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	%	89	86	86	100,00	ST	86	96,63	ST	DINAS PERKIMTA

2.2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 11 indikator kinerja program, sebanyak 10 indikator berstatus Sangat Tinggi dan 1 indikator berstatus Tinggi.

Tabel 2. 166 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SATPOL PP
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SATPOL PP
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SATPOL PP
	% Linmas yang Dibina	%	14	3,5	3,91	111,71	ST	3,91	27,93	SR	SATPOL PP
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	80,26	80,26	T	80,26	80,26	T	SATPOL PP
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPBD
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPBD

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPBD
	% cakupan daerah yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPBD

Beberapa faktor pendorong yang mendukung keberhasilan indikator-indikator tersebut, antara lain :

- a. Kesigapan dan kesiapan dalam pelaksanaan tugas penertiban;
- b. Sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c. Kegiatan patroli yang rutin dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam sehari;
- d. Tersedianya SOP dan ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas;
- e. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

2.2.2.6. Sosial

Capaian kinerja urusan Sosial apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 8 indikator kinerja program seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 167 Capaian Kinerja Urusan Sosial

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINSOS
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINSOS
Program Pemberdayaan Sosial	% TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina	%	100	15,4	84,61	549,42	ST	84,61	84,61	T	DINSOS
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINSOS
	Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi	%	0,34	0,34	0,38	111,76	ST	0,38	111,76	ST	DINSOS
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	% daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINSOS
Program Penanganan Bencana	Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINSOS
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	60,75	59,25	59,25	100,00	ST	59,25	97,53	ST	DINSOS

2.2.3 **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

2.2.3.1. **Tenaga Kerja**

Capaian kinerja urusan Tenaga Kerja apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 4 indikator kinerja program seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 168 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISNAKERIN
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISNAKERIN
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	33	30	31,69	105,63	ST	31,69	96,03	ST	DISNAKERIN
Program Penempatan Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	49	46	50,65	110,11	ST	50,65	103,37	ST	DISNAKERIN

2.2.3.2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 9 indikator kinerja program seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 169 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PP, PA KB
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PP, PA KB
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	% Oganisasi Wanita yang Aktif	%	98	95	97,14	102,25	ST	97,14	99,12	ST	DINAS PP, PA KB
	Rasio Program dan Kegiatan responsif gender	%	100	87	87,27	100,31	ST	87,27	87,27	T	DINAS PP, PA KB
	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,00005	0,00008	0,00004	150,00	ST	0,00004	120,00	ST	DINAS PP, PA KB
Program Perlindungan Perempuan	% Perempuan yang Bekerja atau Mempunyai Usaha *	%	62	47	47,62	101,32	ST	47,62	76,81	T	DINAS PP, PA KB
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang terlayani Puspaga	%	0,00022	0,00006	0,00006	100,00	ST	0,00006	27,27	SR	DINAS PP, PA KB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% Pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	%	50	43	43,31	100,72	ST	43,31	86,62	T	DINAS PP, PA KB
Program Perlindungan Khusus Anak	% Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	%	0,000195	0,000195	0,000192	98,46	ST	0,000192	98,46	ST	DINAS PP, PA KB

*Rumus Invers : capaian semakin menurun semakin baik

2.2.3.3. Pangan

Capaian kinerja urusan Pangan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 8 indikator kinerja program 7 indikator berstatus Sangat Tinggi dan 1 indikator berstatus Tinggi.

Tabel 2. 170 Capaian Kinerja Urusan Pangan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PANGAN
	% terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PANGAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% Ketersediaan Pangan	%	182	173	150,9	87,23	T	150,9	82,91	T	DINAS PANGAN
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PANGAN
	Produksi Komoditas Perkebunan	ton	249.467,20	62.079,00	62.819,74	101,19	ST	62.819,74	25,18	SR	DINAS PANGAN
	% Kelompok yang Dibina dalam rangka Pengembangan Konsumsi Pangan	%	29,4	6,6	7,2	109,09	ST	7,2	24,49	SR	DINAS PANGAN
Program Penanganan Kerawanan Pangan	% Daerah Rentan Rawan Pangan *	%	10,56	13,73	7,75	143,55	ST	7,75	126,61	ST	DINAS PANGAN
Program Pengawasan Keamanan Pangan	% Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	72	69	81,42	118,00	ST	81,42	113,08	ST	DINAS PANGAN

*Rumus Invers : capaian semakin menurun semakin baik

2.2.3.4. **Pertanahan**

Capaian kinerja urusan Pertanahan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 4 indikator kinerja program seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 171 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	% Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	100	25	81,82	327,28	ST	81,82	81,82	T	DINAS PERKIMTA
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	% Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERKIMTA
Program Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian maslah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERKIMTA
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	% Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERKIMTA

2.2.3.5. **Lingkungan Hidup**

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 9 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 172 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	D L H
	% terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	D L H
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	% ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	D L H
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai pengukuran indeks kualitas air	indeks	40	39,28	48,95	124,62	ST	48,95	122,38	ST	D L H
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	% kegiatan/usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	D L H
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	% penataan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	D L H
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata	%	71,78	69	82,94	120,20	ST	82,94	115,55	ST	D L H
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran / kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	D L H

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengelolaan Persampahan	% pengurangan sampah	%	14,5	13,9	14,06	101,15	ST	14,06	96,97	ST	D L H

2.2.3.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari sebanyak 10 indikator kinerja program, sebanyak 9 indikator berstatus Sangat Tinggi dan 1 indikator berstatus Tinggi.

Tabel 2. 173 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISDUKCAPIL
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISDUKCAPIL
Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	%	99,5	99,47	98,4	98,92	ST	98,4	98,89	ST	DISDUKCAPIL
	% anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,4	30,25	36,02	119,07	ST	36,02	118,49	ST	DISDUKCAPIL
	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	96,01	95,85	99,93	104,26	ST	99,93	104,08	ST	DISDUKCAPIL

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	30,19	20,75	18,87	90,94	ST	18,87	62,50	R	DISDUKCAPIL
Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	%	89,61	89,01	94,4	106,06	ST	94,4	105,35	ST	DISDUKCAPIL
	% cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	35,03	35	30,6	87,43	T	30,6	87,35	T	DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISDUKCAPIL

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri.
2. Memaksimalkan sosialisasi kepada jumlah OPD untuk bekerja sama.
3. Memberikan asistensi pengajuan usulan pemanfaatan data.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam pencapaian cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi pengajuan pelayanan akta kematian melalui medis sosial.
2. Melakukan pembinaan kepada petugas pencatatan peristiwa kematian.
3. Menerbitkan buku pokok pemakaman.

2.2.3.7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 6 indikator kinerja program seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 174 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPERMADES
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPERMADES
Program Penataan Desa	% Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPERMADES
Program Peningkatan Kerjasama Desa	% desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPERMADES
Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPERMADES
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	% Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	%	14,96	8,97	9,99	111,37	ST	9,99	66,78	S	DISPERMADES

2.2.3.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 5 indikator kinerja program, seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 175 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengendalian Penduduk	% Usia Kawin Pertama yang Istrinya Dibawah Usia 20 Tahun *	%	15,3	18,1	4,08	177,46	ST	4,08	173,33	ST	DINAS PP, PA KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	% Jumlah Peserta KB / CPR	%	69,53	68,21	66,87	98,04	ST	66,87	96,17	ST	DINAS PP, PA KB
	% Unmeet Need	%	11,76	13,72	13,17	95,99	ST	13,17	111,99	ST	DINAS PP, PA KB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	% Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Aktif	%	90	75	86,75	115,67	ST	86,75	96,39	ST	DINAS PP, PA KB
	% Kelompok Masyarakat dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang di Bina	%	75	60	60,23	100,38	ST	60,23	80,31	T	DINAS PP, PA KB

* Rumus Invers : capaian semakin menurun semakin baik

2.2.3.9. Perhubungan

Capaian kinerja urusan Perhubungan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 6 indikator kinerja program, 4 indikator berstatus Sangat Tinggi, 1 indikator berstatus Sedang dan 1 indikator berstatus Rendah.

Tabel 2. 176 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISHUB
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISHUB
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Perlengkapan Jalan	%	58	46	46	100,00	ST	46	79,31	T	DISHUB
	Rasio Ijin Trayek	%	63	61	45,35	74,34	S	45,35	71,98	S	DISHUB
	% Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	97,66	97,63	59,89	61,34	R	59,89	61,33	R	DISHUB
Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio ketersediaan rambu Angkutan Sungai dan Penyeberangan	%	60	40	36	90,00	ST	36	60,00	R	DISHUB

Urusan Perhubungan terdapat 2 indikator program yang tidak mencapai target, yaitu Rasio Ijin Trayek dan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum. Indikator Rasio Ijin Trayek tidak tercapai disebabkan karena adanya penyesuaian regulasi perijinan berusaha secara elektronik berbasis resiko sehingga pengusaha belum bisa memenuhi komitmen persyaratan perijinan, armada Angkutan Umum memasuki batas usia angkutan dan pengusaha belum mampu meremajakan angkutan umumnya, dan adanya surat edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng nomor 551.2/02553/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang mewajibkan rekomendasi TNKB kuning dengan mensyaratkan

sertifikat standar yang telah terverifikasi. Sedangkan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum tidak tercapai karena ada penambahan angkutan umum (kendaran bermotor wajib uji angkutan umum) tiap bulannya..

2.2.3.10. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 4 indikator kinerja program seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 177 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPDPD (TH. 2023)	CAPAIAN RKPDPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISKOMINFO
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISKOMINFO
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	73	73	73	100,00	ST	73	100,00	ST	DISKOMINFO
Program Aplikasi Informatika	% perangkat daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai masterplan	%	100	25	25	100,00	ST	25	25,00	SR	DISKOMINFO

Untuk menjamin penyebaran informasi publik, kebijakan dan program prioritas daerah ke masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cilacap membangun sarana informasi daerah dengan bekerjasama dengan beberapa media, diantaranya media cetak (6 koran), media elektronik (2 stasiun televisi dan 11 radio), dan media internet (seluruh media sosial dan website).

Pembangunan *smart city* merupakan proyek besar bagi daerah, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, tahun 2023 baru ditargetkan 25 persen dari 28 OPD yang ada di Kabupaten Cilacap untuk menerapkan SPBE. keberhasilan dalam pencapaian target ini sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah sebagai obyek sekaligus subyek program untuk mewujudkan *smart city* di Kabupaten Cilacap.

2.2.3.11. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 5 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 178 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DPKUKM
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DPKUKM
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	% Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	100	21,58	21,58	100,00	ST	21,58	21,58	SR	DPKUKM
Program Pendidikan dan Latihan Perkopersian	% Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	%	84	50,72	50,72	100,00	ST	50,72	60,38	R	DPKUKM
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	37,59	36,69	42,82	116,71	ST	42,82	113,91	ST	DPKUKM

2.2.3.12. Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 7 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 179 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DPMPTSP
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DPMPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	% Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	% Promosi Di Tingkat Regional Dan/Atau Nasional Yang Diikuti	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	% Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	100	100	3.025,75	3025,75	ST	3.025,75	3025,75	ST	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	% Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	80	50	58,57	117,14	ST	58,57	73,21	S	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	% Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DPMPTSP

2.2.3.13. Pemuda dan Olahraga

Capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 5 indikator kinerja program, seluruh indikator kinerja program berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 180 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPARPORA
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPARPORA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	% organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPARPORA
	% Wirausaha muda	%	100	25	25	100,00	ST	25	25,00	SR	DISPARPORA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISPARPORA

2.2.3.14. Statistik

Capaian kinerja urusan Statistik apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 1 target indikator kinerja program tercapai dengan status Sangat Tinggi.

Tabel 2. 181 Capaian Kinerja Urusan Statistik

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISKOMINFO

2.2.3.15. Persandian

Capaian kinerja urusan Persandian apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari sebanyak 1 target indikator kinerja program tercapai dengan status Sangat Tinggi.

Tabel 2. 182 Capaian Kinerja Urusan Persandian

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Indeks KAMI	1,3	1,3	1,3	100,00	ST	1,3	100,00	ST	DISKOMINFO

Meskipun demikian, kondisi ini masih sangat jauh dari standar keamanan SPBE dengan nilai maksimal 5. Nilai Indeks 1,3 termasuk dalam kategori lemah. Untuk meningkatkan kualitas keamanan informasi pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap menetapkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer atau *Computer Security Incident Response Tim* (CSIRT) untuk meningkatkan ketahanan organisasi terhadap ancaman keamanan siber, merespon insiden keamanan dengan cepat, mengurangi dampak negatif, dan memastikan keamanan informasi tetap terjaga.

2.2.3.16. Kebudayaan

Capaian kinerja urusan Kebudayaan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 4 indikator kinerja program, seluruhnya indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 183 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengembangan Kebudayaan	% Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	%	31,25	25	25	100,00	ST	25	80,00	T	DINAS P & K
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	% Kesenian Tradisional yang dibina.	%	52,9	43,8	50	114,16	ST	50	94,52	ST	DINAS P & K
Program Pembinaan Sejarah	% sejarah lokal yang dibina	%	13,33	8,89	8,89	100,00	ST	8,89	66,69	S	DINAS P & K
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	% Cagar Budaya yang teregistrasi	%	27,56	26,02	26,83	103,11	ST	26,83	97,35	ST	DINAS P & K

2.2.3.17. Perpustakaan

Capaian kinerja urusan Perpustakaan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 4 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 184 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS ARPUS
	% terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS ARPUS
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	%	4,15	4,12	9,98	242,23	ST	9,98	240,48	ST	DINAS ARPUS
Program Pelestarian Koleksi Nasional	% koleksi nasional dan naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	%	33,33	8,33	12,5	150,06	ST	12,5	37,50	SR	DINAS ARPUS

2.2.3.18. Kearsipan

Capaian kinerja urusan Kearsipan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 2 indikator kinerja program, seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 185 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	75,35	75,31	75,29	99,97	ST	75,29	99,92	ST	DINAS ARPUS

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	% Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	65	20	29,82	149,10	ST	29,82	45,88	SR	DINAS ARPUS

2.2.4 **Urusan Pemerintahan Pilihan**

2.2.4.1. **Kelautan dan Perikanan**

Capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 6 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 186 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERIKANAN
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERIKANAN
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	100	40	40	100,00	ST	40	40,00	SR	DINAS PERIKANAN
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	40	46,4	116,00	ST	46,4	46,40	SR	DINAS PERIKANAN

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan kelompok masyarakat pengawas aktif	%	100	41,94	41,94	100,00	ST	41,94	41,94	SR	DINAS PERIKANAN
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	33,33	33,33	100,00	ST	33,33	33,33	SR	DINAS PERIKANAN

2.2.4.2. Pariwisata

Capaian kinerja urusan Pariwisata apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 3 indikator kinerja program sebanyak 3 indikator tersebut berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 187 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	% peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	40	10	35,63	356,30	ST	35,63	89,08	T	DISPARPORA
Program Pemasaran Pariwisata	% obyek wisata yang dipromosikan	%	100	24	24	100,00	ST	24	24,00	SR	DISPARPORA
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	%	100	25	25	100,00	ST	25	25,00	SR	DISPARPORA

2.2.4.3. Pertanian

Capaian kinerja urusan Pertanian apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 9 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 188 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERTANIAN
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERTANIAN
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Ton	4.037.934	1.005.449	928.463	92,34	ST	928.463	22,99	SR	DINAS PERTANIAN
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	285.103	69.173	87.633,69	126,69	ST	87.633,69	30,73	SR	DINAS PERTANIAN
	Populasi ternak	Ton	9.166.151	8.896.576	8.251.599	92,75	ST	8.251.599	90,02	ST	DINAS PERTANIAN
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	% Luas pelayanan Jaringan Irigasi	%	10	9,6	10,6	110,42	ST	10,6	106,00	ST	DINAS PERTANIAN
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	25	25	22,82	91,28	ST	22,82	91,28	ST	DINAS PERTANIAN
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DINAS PERTANIAN

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penyuluhan Pertanian	% Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	8	7,6	7,6	100,00	ST	7,6	95,00	ST	DINAS PERTANIAN

Capaian indikator kinerja program pada tahun 2023 telah melampaui target RKPD 2023 seperti Produksi Tanaman Hortikultura dengan capaian 126,69 persen atau 87.633,69 ton dari target yang ditetapkan 69.173 ton. Hal ini disebabkan iklim atau cuaca kering yang justru sangat mendukung budidaya beberapa komoditas hortikultura untuk berbunga dan berbuah secara optimal, seperti manggis dan semangga. Selain itu adanya dukungan bantuan benih dari APBN juga berdampak bagi peningkatan produksi komoditas hortikultura secara keseluruhan. Realisasi indikator persentase luas pelayanan jaringan irigasi sebesar 10,6 persen dari target 9,6 persen. Hal ini banyaknya dukungan bantuan dari APBN terkait pembangunan infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi tersier dan bantuan alat mesin pertanian menjadi faktor pendorong capaian tersebut.

2.2.4.4. Perdagangan

Capaian kinerja urusan Perdagangan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target 2023 dan target tahun 2022 dari 9 indikator kinerja program, sebanyak 8 indikator berstatus Sangat Tinggi dan 1 indikator berstatus Rendah.

Tabel 2. 189 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	13,23	10,02	11,27	112,48	ST	11,27	85,19	T	DPKUKM
Program Pengembangan UMKM	% Pertumbuhan UMKM	%	2,75	2,6	3,39	130,38	ST	3,39	123,27	ST	DPKUKM
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	% sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi	%	100	25	14,58	58,32	R	14,58	14,58	SR	DPKUKM
	% Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	%	45,16	1,52	2,4	157,89	ST	2,4	5,31	SR	DPKUKM
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	% kinerja realisasi pupuk	%	55,55	53	48,12	90,79	ST	48,12	86,62	T	DPKUKM
	% ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DPKUKM
Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	%	6	3,2	3,2	100,00	ST	3,2	53,33	R	DPKUKM
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	% alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	%	56	50	109,98	219,96	ST	109,98	196,39	ST	DPKUKM
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	0,45	0,38	0,38	100,00	ST	0,38	84,44	T	DPKUKM

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap, target akhir rehabilitasi pasar adalah 100 persen, dengan jumlah total 48 (empat puluh delapan) unit pasar yang akan direhabilitasi. Target rehabilitasi per tahun ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) unit pasar. Namun, realisasi yang tercapai dalam satu periode selalu berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, jumlah pasar yang direhabilitasi hanya mencapai 7 (tujuh) unit pasar, terdiri dari 5 (lima) unit pasar yang dibiayai oleh anggaran APBD dan 2 (dua) unit pasar yang dibiayai dari dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan R.I. serta Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, capaian yang terealisasi hanya sebesar 14,58 persen. Pada tahun 2024, anggaran definitif untuk rehabilitasi pasar hanya mencakup 1 (satu) unit pasar, yang akan semakin menghambat pencapaian target. Realisasi capaian yang selalu berada di bawah target ini disebabkan oleh kurangnya anggaran yang tersedia untuk rehabilitasi pasar. Hal ini terjadi karena saat ini fokus anggaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak menjadikan pasar sebagai prioritas utama. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengajukan permohonan anggaran rehabilitasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta mengajukan bantuan kepada pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk rehabilitasi pasar.

Pencapaian indikator Program Pengembangan Ekspor untuk tahun 2023 adalah 100 persen, namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPD (tahun 2026) pencapaian indikator program pengembangan ekspor sebesar 53,33 persen hal ini dikarenakan masih dalam proses meningkatkan pelaku usaha di Cilacap untuk melakukan ekspor dan diupayakan sampai akhir periode RPD target pelaku usaha yang melakukan ekspor sebanyak 15 pelaku usaha dapat tercapai. Adapun Upaya yang dilakukan adalah dengan mempromosikan produk – produk pelaku usaha di Cilacap melalui pameran dagang serta melakukan pelatihan dan pendampingan prosedur ekspor.

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen indikator cakupan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) mengalami fluktuasi, dari 70 persen pada tahun 2019 dan turun menjadi 47 persen di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya wabah covid-19, yang mana Pemerintah berupaya untuk menanggulangi dan

mencegah penyebaran Covid 19 dengan mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang, dan dari Pemerintah Daerah mengatur adanya jam kerja WFH (*Work From Home*), yang mengakibatkan berhentinya kegiatan Sidang Tera Ulang yang ada di Pasar wilayah Kabupaten Cilacap. Sedangkan meningkat menjadi 109,98 persen di tahun 2023 dikarenakan adanya permohonan tera ulang meter air Perumdam Kabupaten Cilacap yang mencapai 12.000 unit.

2.2.4.5. Perindustrian

Capaian kinerja urusan Perindustrian apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 5 indikator kinerja program, seluruh indikator kinerja program telah berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 190 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Hubungan Industrial	% perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	45	33	34,63	104,94	ST	34,63	76,96	T	DISNAKERIN
	% perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISNAKERIN
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	% sentra industri terbina	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	DISNAKERIN
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	% jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	2,94	2,05	2,06	100,49	ST	2,06	70,07	S	DISNAKERIN

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	77,5	70	95	135,71	ST	95	122,58	ST	DISNAKERIN

2.2.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.2.5.1. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 12 indikator kinerja program, seluruh indikator sudah berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 191 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA
	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai standar.	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA
	Persentase pemenuhan dokumen penataan organisasi.	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	% koordinasi bidang pemerintahan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA
	% koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA
	% koordinasi bidang kesra	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA
	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	Dokumen	180	40	58	145,00	ST	58	32,22	SR	SETDA
Program Perekonomian dan Pembangunan	% penyerapan APBD	%	95	85	95,42	112,26	ST	95,42	100,44	ST	SETDA
	% koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA
	Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETDA

2.2.5.2. Sekretariat DPRD

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 4 indikator kinerja program telah berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 192 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETWAN

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Daerah Kabupaten/Kota											
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETWAN
	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETWAN
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	% fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SETWAN

2.2.6 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.6.1. Perencanaan

Capaian kinerja urusan penunjang Perencanaan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 6 indikator kinerja program, seluruh indikator kinerja program berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 193 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BAPPEDA

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	% terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BAPPEDA
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% Pencapaian Realisasi Target Program Tahunan	%	81,73	78,73	92,16	117,06	ST	92,16	112,76	ST	BAPPEDA
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% realisasi indikator OPD dibawah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	81	78	92,41	118,47	ST	92,41	114,09	ST	BAPPEDA
	% realisasi Indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian	%	83	80	89,23	111,54	ST	89,23	107,51	ST	BAPPEDA
	% Realisasi Indikator OPD dibawah rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83	80	95,56	119,45	ST	95,56	115,13	ST	BAPPEDA

2.2.6.2. Keuangan

Capaian kinerja urusan penunjang Keuangan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 8 indikator kinerja program, sebanyak 7 indikator berstatus Sangat Tinggi dan 1 indikator berstatus Rendah.

Tabel 2. 194 Capaian Kinerja Urusan Keuangan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPPKAD
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPPKAD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditure)	%	66,11	59,93	65,5	109,29	ST	65,5	99,08	ST	BPPKAD
	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD *	%	-0,09	-0,083	-0,042	149,40	ST	-0,042	153,33	ST	BPPKAD
	% Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BPPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	Ya = 1 Tidak = 2	1	1	1	100,00	ST	1	100,00	ST	BPPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dan APBD	%	0,053	0,05	0,028	56	R	0,028	52,83	R	BPPKAD
	% Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	%	7,8	1,8	6,8	377,78	ST	6,8	87,18	ST	BPPKAD

*Rumus Invers : capaian semakin menurun semakin baik

2.2.6.3. **Kepegawaian**

Capaian kinerja urusan penunjang Kepegawaian apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 6 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 195 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BKPPD
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BKPPD
Program Kepegawaian Daerah	% terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN	%	59,19	60,47	63,16	104,45	ST	63,16	106,71	ST	BKPPD
	% Penempatan ASN sesuai Kompetensi	%	99,49	99	99,89	100,90	ST	99,89	100,40	ST	BKPPD
	% kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian	%	99,921	99,9	99,88	99,98	ST	99,88	99,96	ST	BKPPD
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	28,74	13,62	42,89	314,90	ST	42,89	149,23	ST	BKPPD

2.2.6.4. **Pendidikan dan Pelatihan**

Capaian kinerja urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 1 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 196 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	% Kesesuaian Kompetensi ASN dengan Persyaratan / Standar Jabatan	%	58,06	53,14	55,05	103,59	ST	55,05	94,82	ST	BKPPD

2.2.6.5. Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Tahun 2023, dari 2 indikator kinerja program, seluruhnya berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 197 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RPKD TH. 2023	CAPAIAN RPKD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	% Riset Daerah yang ditindaklanjuti	%	45	24	31,91	132,96	ST	31,91	70,91	S	BAPPEDA
	% Jumlah Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	%	91	84	84,33	100,39	ST	84,33	92,67	ST	BAPPEDA

2.2.7 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.2.7.1. Inspektorat Daerah

Capaian kinerja urusan Pengawasan Inspektorat Daerah apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 6 indikator kinerja program, seluruh indikator berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 198 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100		SR	INSPEKTORAT
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	INSPEKTORAT
Program Penyelenggaraan Pengawasan	% Perangkat Daerah dengan Nilai Kinerja Baik	%	100	40	40	100,00	ST	40	40,00	SR	INSPEKTORAT
	% Pemerintahan Desa dengan Nilai Kinerja Baik.	%	100	40	40	100,00	ST	40	40,00	SR	INSPEKTORAT
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	% Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	INSPEKTORAT
	% komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	%	100	70	71,7	102,43	ST	71,7	71,70	S	INSPEKTORAT

2.2.8 Unsur Kewilayahan
2.2.8.1. Kecamatan

Capaian Kinerja Kecamatan apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 6 target indikator dan berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 199 Capaian Kinerja Kecamatan

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	KECAMATAN
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	KECAMATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	KECAMATAN
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	KECAMATAN
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Forkompincam	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	KECAMATAN
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	KECAMATAN

2.2.9 Unsur Pemerintahan Umum
2.2.9.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Kinerja Kesbangpol apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2023 dari 7 target indikator, seluruh indikator sudah berstatus Sangat Tinggi.

Tabel 2. 200 Capaian Kinerja Urusan Kesbangpol

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPd TH. 2023	CAPAIAN RKPd TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BAKESBANGPOL
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	BAKESBANGPOL
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara	Kecamatan	24	24	24	100,00	ST	24	100,00	ST	BAKESBANGPOL
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	% pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu	%	70	70	-	-	ST	-	-	ST	BAKESBANGPOL
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% LSM/ormas yang dibina	%	100	25	25	100,00	ST	25	25,00	SR	BAKESBANGPOL
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kecamatan	24	24	24	100,00	ST	24	100,00	ST	BAKESBANGPOL

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (TH. 2026)	TARGET RKPD TH. 2023	CAPAIAN RKPD TH 2023			CAPAIAN S.D. AKHIR RPD (2026)			OPD
					REALISASI	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	REALISASI S.D. TH 2023	TK. CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencagahan dan penanganan konflik sosial	Kecamatan	24	24	24	100,00	ST	24	100,00	ST	BAKESBANGPOL

Capaian Kinerja bersatatus Sangat Tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, diantaranya masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan memiliki rasa memiliki terhadap wilayahnya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat mengurangi potensi ketidakpuasan dan konflik, Peran Forkopimda dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kerukunan. Kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan sektor swasta dapat meningkatkan sumber daya dan koordinasi dalam rangka mendukung capaian kinerja pada Bakesbangpol.

2.3 Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Cilacap yang menjadi prioritas untuk mendapatkan penanganan pada tahun 2025, sebagai berikut:

- 1 Belum optimalnya nilai akuntabilitas pelayanan pemerintahan dan reformasi birokrasi.
- 2 Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan sesuai SPBE.
- 3 Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan.
- 4 Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular.
- 5 Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- 6 Belum optimalnya pembinaan wirausaha muda.
- 7 Belum optimalnya penurunan kemiskinan.
- 8 Masih tingginya angka pengangguran.
- 9 Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- 10 Masih rendahnya tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah.
- 11 Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Infrastruktur.
- 12 Belum optimalnya penanganan sanitasi dan permukiman kumuh.
- 13 Belum optimalnya pemenuhan Ruang Terbuka Publik.
- 14 Belum optimalnya minat investasi dan peningkatan nilai ekspor non migas.
- 15 Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan.
- 16 Masih rendahnya daya saing dan pemanfaatan Iptek serta hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
- 17 Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

- 1 Pendidikan
 - a. Masih tingginya angka putus sekolah jenjang SD/MI (0,03%) dan jenjang SMP/MTs (0,16%) yang ditandai dengan rendahnya rata-rata

- lama sekolah dan masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah yang berasal dari pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs).
- b. Kondisi sarana dan prasarana sesuai SNP masih rendah untuk PAUD (69,31%), SD/MI (36,79%) dan SMP/MTs (50%).
 - c. Masih rendahnya persentase guru pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP dengan kualifikasi S1/D IV (66,7%)
 - d. Masih rendahnya indeks distribusi guru SD (0,34%) dan indeks distribusi guru SMP (0,64%), serta sebaran guru di Kabupaten Cilacap masih kurang merata.
- 2 Kesehatan
- a. Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kematian balita.
 - b. Masih ditemukannya masyarakat dengan gizi rendah dan gizi kurang, serta masih adanya perbedaan metode pengukuran gizi masyarakat.
 - c. Belum optimalnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
 - d. Masih rendahnya akses sanitasi tingkat Desa / Kelurahan (STBM).
 - e. Belum semua masyarakat Kabupaten Cilacap ikut dalam kepersertaan Jaminan Kesehatan.
- 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Belum optimalnya penanganan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana pendukungnya.
 - b. Belum optimalnya kinerja pelayanan air minum dan air limbah.
 - c. Belum optimalnya fungsi drainase saluran pembuang di kawasan perkotaan.
 - d. Belum optimalnya fungsi dan pengelolaan saluran irigasi sekunder.
 - e. Masih rendahnya capaian kinerja pengelolaan LPJU dan penerangan fasilitas umum.
 - f. Belum optimalnya penanganan sampah.
- 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Belum seluruh Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendapatkan penanganan menjadi Rumah Layak Huni (RLH).
 - b. Belum semua wilayah permukiman memiliki Prasarana Sarana Utilitas (PSU).
 - c. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh.
- 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- a. Belum optimalnya upaya pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

6 Sosial

- a. Belum seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mendapat penanganan kesejahteraan sosial.
- b. Masih adanya desa/kelurahan yang tidak melakukan verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Belum optimalnya pendampingan bagi Penerima Manfaat (PM) dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1 Tenaga Kerja

- a. Belum semua tenaga kerja ditempatkan sesuai mekanisme layanan Antar Kerja (50,65 persen);
- b. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi (31,69 persen)
- c. Belum optimalnya kerjasama Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan dunia usaha dalam melakukan fasilitasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih terjadinya kesenjangan pembangunan responsif gender.
- b. Masih adanya kasus kekerasan pada anak dan perempuan.
- c. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.
- d. Masih diperlukannya pembentukan Forum Anak, terutama ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

3 Pangan

- a. Belum optimalnya capaian pola pangan harapan.
- b. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan.
- c. Belum optimalnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- d. Masih adanya daerah yang berpotensi rawan pangan (rawan pangan transien dan kronis).

4 Pertanahan

- a. Masih rendahnya capaian kinerja pengadaan tanah untuk pembangunan/kepentingan umum.
- b. Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan.

- c. Belum optimalnya penataan bidang tanah yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- 5 Lingkungan Hidup
 - a. Masih rendahnya pengelolaan persampahan dan semakin tingginya potensi timbunan sampah setiap tahun.
 - b. Belum optimalnya akses terhadap informasi lingkungan hidup.
 - c. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan upaya pengurangan kerusakan lingkungan hidup.
- 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Pertambahan wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan tinggal di luar wilayah Kabupaten Cilacap.
 - b. Masih banyak peristiwa kematian yang belum dicatatkan akta kematiannya.
 - c. Persetujuan ijin akses untuk pemanfaatan data kependudukan sampai dengan saat ini belum diatur jangka waktu penyelesaian mulai dari permohonan diterima sampai dengan diterbitkannya ijin sehingga jangka waktu penyelesaian PKS masih bergantung pada pemberian ijin hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.
- 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa.
 - b. Belum optimalnya peran lembaga pos pelayanan teknologi tepat guna dalam mendayagunakan TTG.
 - c. Belum semua BUMDesa/BUMDesa Bersama Bersertifikat Badan Hukum.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur/sarana prasarana dasar perdesaan.
 - e. Belum dipahaminya tahapan tata cara kerjasama desa baik kerjasama desa dengan pihak ketiga, kerjasama antar desa dan pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah desa.
- 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya upaya Pemerintah Daerah untuk mengendalikan jumlah penduduk.
 - b. Masih tingginya angka Un Meet Need.
 - c. Masih rendahnya jumlah peserta KB/CPR.
- 9 Perhubungan
 - a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
 - b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan.

- c. Belum optimalnya penyediaan pelayanan angkutan umum.
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum.
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- f. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

10 Komunikasi dan Informatika

- a. Masih lemahnya manajemen SPBE, terutama dalam hal infrastruktur dan keamanan informasi. Jaringan internet (target 52 OPD) baru 32 OPD yang terlayani fiber optik (disediakan Diskominfo), hal ini pengaruh terhadap keamanan informasi.
- b. Masih ada wilayah yang *blank spot* akses internet atau jaringan seluler.

11 Koperasi dan UKM

- a. Belum optimalnya pembinaan/fasilitasi/pengawasan kelembagaan perkoperasian.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro, ditandai dengan belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil.
- c. Belum optimalnya sarana promosi produk UMKM.
- d. Belum optimalnya fasilitasi perijinan terhadap UMKM.

12 Penanaman Modal

- a. Meningkatnya nilai investasi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, mengingat penanaman modal lebih banyak terdapat disektor industri pengolahan dan industri besar yang padat teknologi.
- b. Investasi yang masuk di Kabupaten Cilacap, belum sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan keterampilan sumber daya manusia (SDM).
- c. Belum optimalnya promosi investasi untuk menarik investor.

13 Kepemudaan dan Olahraga

- a. Kurangnya pembinaan organisasi kepemudaan agar menjadi organisasi kepemudaan yang aktif.
- b. Kurangnya pembinaan atlet-atlet olahraga berprestasi.
- c. Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan olahraga.

14 Statistik

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah. Jenis data

masih sangat kurang (buku data dasar Kabupaten, Data Dasar Kecamatan, dan PDRB).

- b. Belum tersedianya data real time dari masing-masing sektor.
- c. Aplikasi SATU DATA belum disosialisaikan secara maksimal untuk dimanfaatkan perangkat daerah secara optimal.

15 Persandian

- a. Belum maksimalnya penanganan pengamanan informasi (rendahnya Indeks KAMI dan Indeks Manajemen SPBE).
- b. Belum adanya kerjasama dengan TNI POLRI yang ada di daerah untuk memanfaatkan tenaga ahli siber.

16 Kebudayaan

- a. Masih perlunya pembinaan, perlindungan dan pelestarian peninggalan sejarah benda purbakala/situs/benda cagar budaya.
- b. Belum optimalnya promosi seni budaya daerah melalui berbagai festival/pentas seni yang sementara masih menggunakan media sosial dan *website* karena keterbatasan anggaran.
- c. Belum adanya verifikator, petugas juru pelihara serta terbatasnya tenaga ahli cagar budaya yang kompeten sehingga banyak cagar budaya belum teridentifikasi dan memperoleh perlindungan hukum.
- d. Belum adanya lembaga dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam memahami teks dan perawatan naskah terkait Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
- e. Pada seni tradisi terdapat stagnasi pemain dan tidak adanya gedung kesenian yang representatif untuk penyelenggaraan kegiatan seni.

17 Perpustakaan

- a. Masih kurangnya budaya literasi masyarakat.
- b. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan Daerah dan Desa.
- c. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik Daerah.
- d. Masih rendahnya rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat.

18 Kearsipan

- a. Gedung Depot Arsip sudah semakin penuh dan sarana penyimpanan dan preservasi arsip sangat kurang.
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas.
- c. Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan.

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya tingkat produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- b. Belum optimalnya fasilitasi perijinan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- c. Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan dan kelompok budidaya ikan.

2. Pariwisata

- a. Belum optimalnya pemerintah dalam melakukan pembinaan/fasilitasi obyek wisata.
- b. Belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam menjalin kerjasama dengan para pelaku wisata dan investor pariwisata.
- c. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dan penyelenggaraan event pariwisata melalui upaya promosi/pemasaran.
- d. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana pariwisata.

3. Pertanian

- a. Produktivitas dan produksi tanaman pangan tidak optimal dan produksinya menurun, disebabkan terjadinya fenomena elnino. Fenomena elnino dengan curah hujan yang rendah menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Kondisi kering ini menyebabkan lahan tidak dapat ditanami komoditas pangan utama (padi dan jagung), tetapi petani masih bisa mengupayakan beralih ke komoditas palawija yaitu kedelai dan kacang hijau.
- b. Kurangnya sarana pertanian yaitu bibit/benih unggul, pupuk dan pestisida serta alat dan mesin (alsintan), serta prasarana pendukung yaitu jalan usaha tani dan irigasi yang dibutuhkan untuk kelancaran distribusi air. Ketersediaan dan akses terkait pupuk besubsidi dan bibit/bibit unggul akan mempengaruhi hasil produksi. Sementara itu kondisi prasarana jaringan irigasi tersier juga perlu ditingkatkan, mengingat saat ini 78,57 persen masih berupa konstruksi alam/ tanah.
- c. Masih rendahnya minat petani untuk mengajukan pinjaman modal usaha melalui lembaga keuangan/ perbankan karena kekhawatiran terhadap tingkat suku bunga pinjaman dan hasil pertanian di akhir masa panen yang tidak sesuai harapan, serta adanya persyaratan berupa jaminan/ agunan.

4. Perdagangan

- a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat/pasar tradisional.
- b. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pelaku usaha/pedagang mikro dan kecil.
- c. Belum optimalnya pengembangan produk-produk unggulan daerah yang dapat diterima oleh pasar internasional (ekspor) yang ditandai dengan minimnya jumlah kerjasama perdagangan internasional.
- d. Belum memadainya sarana distribusi milik Pemerintah Daerah.

5. Perindustrian

- a. Belum optimalnya upaya pembinaan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pengembangan usaha dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses produksi guna meningkatkan nilai tambah.
- b. Belum optimalnya peningkatan *One Village One Product* (OVOP).

2.3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1 Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan pembangunan dan tertib administrasi kewilayahan. Seperti sering tidak sesuainya antara target pelaksanaan kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sehingga sering dijumpai deviasi realisasi di sebagian perangkat daerah yang juga mempengaruhi capaian kegiatan secara keseluruhan.
- b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
- c. Belum optimalnya fasilitasi pelayanan dan kinerja bidang kesejahteraan masyarakat, antara lain keterbatasan jumlah SDM dalam pelayanan bidang kesejahteraan masyarakat menyebabkan waktu penyelesaian dalam pelayanannya menjadi lebih lama.

2 Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- b. Belum optimalnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) sesuai Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah).
- c. Latar belakang pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbeda-beda di Sekretariat DPRD menyebabkan tugas terhadap pelayanan terhadap kegiatan Dewan belum optimal. Kemajuan

teknologi yang pesat khususnya di bidang informatika khususnya aplikasi keuangan dan kepegawaian mendorong semua pegawai untuk lebih menguasai kemampuan digital.

2.3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1 Perencanaan

- a. Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah karena adanya perubahan sistem yang baru dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
- b. Belum optimalnya usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD.

2 Keuangan

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek dan kewajiban pajaknya secara objektif baik PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah lain dan penataan basis data dan pemanfaatan IT untuk mendukung kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah.
- b. Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, dilihat dari masih tingginya kontribusi pendapatan dari dana transfer dalam APBD.
- c. Belum optimalnya pengelolaan barang dan aset milik daerah secara akuntabel. SDM pengurus barang belum sepenuhnya paham dengan praktik dan tata cara penyusunan laporan BMD pada setiap akhir tahun.
- d. Aplikasi SIMDA BMD belum mendukung sepenuhnya sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, sehingga untuk memenuhi permintaan pelaporan pertriwulan dan semester masih secara manual.

3 Kepegawaian

- a. Belum semua pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- b. Masih dijumpai ASN yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan tentang Disiplin ASN;
- c. Belum semua pegawai pegawai mengikuti assessment dalam rangka penilaian kompetensi.

- 4 Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Belum semua ASN memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ pengembangan kompetensi;
 - b. Masih banyak pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan penjenjangan struktural.
- 5 Penelitian dan Pengembangan
 - a. Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi kerjasama jaringan penelitian (Jarlit).
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil inovasi daerah dan hasil litbang.
 - c. Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi pengembangan inovasi daerah pada masing-masing perangkat daerah.

2.3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- 1 Inspektorat Daerah
 - a. Belum optimalnya fungsi dan kinerja pengawasan dibidang pemerintahan, kepegawaian, pembangunan dan sosial kemasyarakatan karena keterbatasan jumlah APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).
 - b. Belum optimalnya nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB).

2.3.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

- 1 Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Belum optimalnya pembentukan Kapa/Kama tingkat Kecamatan. Pembentukan Kapa/Kama tingkat Kecamatan pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan capaian 100 persen, namun tindaklanjut dari pembentukan Kapa/Kama belum sepenuhnya maksimal, hal ini dikarenakan tindaklanjut yang dilakukan baru sebatas sosialisai P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dengan jumlah volume yang perlu ditingkatkan.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Di samping memperhatikan berbagai isu yang berkembang saat ini dan perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Cilacap memperhatikan isu strategis untuk ditangani secara bersama-sama sebagai prioritas perencanaan pembangunan daerah tahun 2024. Adapun isu strategis Kabupaten Cilacap, antara lain :

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan (*governance*): bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel
Hal ini dapat dilihat Nilai SAKIP yang belum mencapai A, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai angka tinggi, Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai nilai A, Sistem Merit belum dilaksanakan dalam mewujudkan pengelolaan ASN dan kematangan kelembagaan yang belum mantap hal ini dapat dilihat masih ditemukannya pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah, serta penerapan standar pelayanan minimal belum mencapai 100 persen. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal.
2. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi
Era industry 4.0 menuntut kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, memiliki tingkat kelulusan yang tinggi, masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah, SDM yang mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi serta SDM yang mampu berinovasi. Selain itu juga manusia yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang baik. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi masih menjadi isu dalam bidang kesehatan, kepemilikan jaminan pemeliharaan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal juga belum mencapai 100 persen.
3. Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat
Masih tingginya angka pengangguran, tingginya kemiskinan terutama masih ditemukannya kemiskinan ekstrem, masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Berdasarkan analisis tingkat pengangguran, pengangguran di Kabupaten Cilacap tercipta karena calon tenaga kerja tidak memiliki sertifikasi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan investor dan perusahaan yang ada di Kabupaten Cilacap lebih banyak perusahaan padat modal.

4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap belum optimal

Hal ini dikarenakan sektor dalam PDRB belum ditingkatkan dengan optimal. Produk unggulan belum mampu meningkatkan lapangan usaha dalam sektor PDRB. Keempat lapangan usaha penyumbang terbesar di PDRB mengalami penurunan di masa pandemic Covid. Pariwisata dalam hal ini akomodasi restaurant juga mengalami penurunan akibat pandemi. Pengelolaan industri pengolahan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kawasan industri belum terkelola dengan baik, Pengelolaan UMKM juga belum optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita walaupun UMKM ini mampu bertahan di pandemi Covid 19. Koperasi belum mampu sebagai akses permodalan untuk UMKM. Pembangunan pertanian dan perikanan sudah mencapai produktivitas yang bagus namun demikian pengembangan inovasi dalam pengembangan bibit yang berkualitas unggul/bersertifikat belum optimal dalam pengembangan produktivitas. Pengembangan ke arah agro industri belum terlihat demikian juga dengan perikanan. Peningkatan nilai investasi dan investor baru belum mampu menjawab penyerapan tenaga kerja.

5. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai; pengembangan kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup

Hal ini dapat dilihat dari masih belum semua jalan memiliki kondisi baik, drainase masih belum berfungsi dengan baik, belum terciptanya sistem transportasi yang mampu menghubungkan wilayah dengan baik. Masih ditemukannya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kualitas SDA dalam memenuhi kebutuhan air baku, jaringan irigasi belum optimal, pengelolaan lingkungan yang belum optimal (penanganan sampah, dan perwujudan indeks kualitas lingkungan).

6. Pengelolaan dan Penanganan Bencana yang belum optimal

Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan potensi rawan bencana. Sarana dan prasarana belum memadai dalam rangka melakukan evakuasi maupun rehab rekon. SDM juga belum memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sarpras yang dimiliki.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan kondisi ekonomi tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 dapat diketahui.

Kerangka ekonomi daerah diperoleh melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dalam skala global, nasional dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2025 termasuk di dalamnya perkiraan potensi dan besaran pendapatan dari seluruh sektor.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Cilacap disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis

pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mencapai Rp 20.892,4 triliun dan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp12.301,4 triliun pada 2023, nilai ini juga naik dari PDB ADHK 2022 yang sebesar Rp11.710,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan IV tahun 2023 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya meningkat sebesar 0,45% persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen. Namun demikian, kondisi ini apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (y-on-y). Kondisi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan hingga 4,94 persen (YoY). Perlu dorongan dan konsistensi lebih untuk peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya realisasi bantuan sosial untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di samping juga terjadi perbaikan kinerja pada seluruh kelompok pengeluaran. Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan IV tahun 2023 (y-on-y), Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, dan Pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif, Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan serta Jasa Lainnya didorong oleh kenaikan pengguna jasa angkutan penumpang, peningkatan volume pengiriman barang ekspor-impor, peningkatan kunjungan wisatawan, dan rangkaian persiapan pemilihan umum.

Sementara itu, realisasi belanja K/L yang merupakan komponen dari Belanja Pemerintah pusat mencapai Rp1.153,46 triliun (115,25 persen dari APBN 2023 dan Perpres Nomor 75/2023) meningkat 6,34 persen (yoy). Memasuki akhir 2023, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Desember 2023 tercatat Rp2.774,30 triliun (112,64 persen dari target APBN 2023 atau 105,20 persen dari target Perpres Nomor 75/2023), tumbuh 5,25 persen (yoy) . Capaian tersebut lebih tinggi Rp138,46 triliun dari periode yang sama tahun lalu, dengan menjaga tren kinerja yang masih positif sejak awal 2023. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023

terdapat defisit Rp347,64 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB. Defisit tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp2.774,30 triliun, sedangkan Belanja Negara mencapai Rp3.121,94 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp359,51 triliun (60,10 persen terhadap pagu APBN atau 74,91 persen terhadap Perpres Nomor 75/2023). Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang Rp406,96 triliun (58,44 persen dari pagu APBN 2023 atau 96,62 persen dari Perpres Nomor 75/2023) yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) Rp308,73 triliun dan Pinjaman (Neto) Rp98,23 triliun.

Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia menahan suku bunga kebijakan pada level 6,00% persen, tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang *pro-stability* yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran $3\% \pm 1$. Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebesar 2,61% (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51% (yoy). Selanjutnya perekonomian global pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 3,0 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% secara kumulatif (*cumulative-to-cumulative/ctc*) sepanjang 2023, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Dan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,1-5,5 persen.

Sementara itu, kondisi perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen. Dan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ditargetkan sebesar 4,90-5,60 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,24 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 7,34 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 34,03 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar

60,90 persen. Adapun inflasi Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2023 tercatat mencapai 2,61 persen (yoy).

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2023 mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan menurun jumlah pengangguran terbuka dari 1,084 juta orang pada tahun 2022 menjadi 1,080 juta orang. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 117,76. Terdapat tiga Subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah subsektor tanaman pangan sebesar 0,28 persen, subsektor hortikultura (NTPH) sebesar 5,51 persen dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,88 persen. Subsektor yang mengalami penurunan NTP adalah subsektor peternakan (NTPT) sebesar -0,20 persen dan subsektor perikanan sebesar -0,76 persen. Rata-rata harga gabah kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG) di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 29,37 persen.

Dari uraian kondisi perekonomian makro di tingkat nasional dan regional Jawa Tengah tersebut, maka dapat dilakukan analisa perbandingan dan proyeksi kinerja makro Kabupaten Cilacap. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap (tanpa migas) selama lima tahun terakhir berfluktuasi antara -1,36 % hingga 5,37 %. Pada tahun 2019 mencapai 5,37 % (2019) menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar -1,36 % dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 3,39 %. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 5,73 persen. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apabila tingkat inflasi di daerah tinggi, karena peningkatan pendapatan masyarakat dirasakan lebih rendah dari kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Inflasi di Kabupaten Cilacap mengalami penurunan, pada tahun 2023 tercatat 2,69 persen. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Cilacap diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer yang menjadi andalan Kabupaten Cilacap.

Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional yang harus bersinergi, linier dan terintegrasi. Sejalan dengan kebijakan pembangunan

Kabupaten Cilacap Tahun 2025 yang diarahkan pada **“Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Daya Saing SDM”**. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan merujuk pada prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat berjalan selaras dan sinergis.

Selanjutnya dalam proses pembangunan berkelanjutan dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Arah Kebijakan masih ditujukan pada *“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”*, dengan prioritas daerah diarahkan pada :

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2025 bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dengan fokus pada :

- a. Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;
- b. Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan kolaborasi dengan *e-commerce*;
- c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;

- a. Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
- b. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
- c. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta;
- d. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
- e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.

Sebagai salah satu kota industri dan daerah tujuan investasi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,4-6,1 persen.

Tabel 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Target Tahun 2025
dan Proyeksi Tahun 2024

No	Indikator	Target	
		RKPD 2024	RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	- Dengan migas	2,5-3,0	5,4-6,1
	- Tanpa Migas	5,2-6,0	5,4-6,1
2.	Inflasi (persen)	2,50 - 4,50	2,50 - 4,50
3.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	1.583,189	1.991,31
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen)	7,24	8,84-7,82
5.	Kemiskinan (persen)	10,33	10,14

Sumber : Bappeda Kabupaten Cilacap, 2024

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan *money follow programme priority* serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, dan DAK merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Cilacap dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini tentu saja harus disikapi secara bijak oleh daerah untuk terus berupaya memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat melalui berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah.

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan RKPD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Cilacap berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Penentuan kinerja pendapatan daerah diukur dengan membandingkan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan. Data pertumbuhan pendapatan tahun 2020-2024 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Pendapatan Daerah					Rata-rata (%) Pertumbuhan Tahun 2020-2024
Realisasi 2020 (000)	Realisasi 2021 (000)	Realisasi 2022 (000)	Realisasi 2023*) (000)	Target 2024**) (000)	
3.152.402.455	3.334.300.290	3.292.581.173	3.476.512.675	3.668.147.255	3,9%

Sumber : *)LRA APBD 2023 audited, **)Perda APBD 2024

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Cilacap sektor penerimaan PAD meningkat pada tahun 2021 antara lain dikarenakan meningkatnya pendapatan BLUD terutama karena bertambahnya jumlah pasien. Kemudian menurun pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh penurunan

pendapatan BLUD dan pendapatan jasa giro dan bunga deposito. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023 meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, akan tetapi terdapat DAU yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar 300,4 Miliar. Merujuk pada realisasi dan target pendapatan daerah tahun 2020-2024 relatif sudah sesuai dengan target RPJMD Tahun 2017-2022 dan RPD Tahun 2023-2026. Adapun deviasi target pendapatan dengan realisasi, lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Cilacap seperti kenaikan dan/atau penurunan dana perimbangan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan DID serta penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari dana hibah maupun dana bagi hasil pajak dari Provinsi.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu lagi dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Transfer, yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : 1) Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil/DBH dan Dana Alokasi Umum/DAU serta Dana Transfer Khusus yaitu DAK fisik dan DAK non fisik), 2) Dana Insentif Daerah (DID) dan 3) dana desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi : hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2025, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Cilacap sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan pendapatan properti investasi;
4. Optimalisasi kinerja BUMD;
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
6. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
7. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
8. Menggalakkan gerakan bangga belanja di Kabupaten Cilacap;
9. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta kebutuhan pendanaan di masa mendatang, maka dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2025, meliputi :

1. Peningkatan PAD, dengan upaya :
 - a. Mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
 - 1) Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah;
 - 2) Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - 3) Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek-objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya;
 - 4) Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif;
 - 5) Melakukan Pemasangan Stiker Belum Bayar Pajak sebagai sanksi moral kepada wajib pajak;
 - 6) Melakukan pemantauan secara “*open*” maupun “*silent*” untuk mengetahui kesesuaian antara laporan dalam SPTPD yang disampaikan dengan fakta riil di lapangan;
 - 7) Melakukan pendekatan secara persuasif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak;

- 8) Melakukan kerjasama dengan Satpol PP sebagai penegak Perda dalam berbagai kegiatan optimalisasi pemungutan pajak;
 - 9) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan semua stakeholder terkait ketentuan perpajakan;
 - 10) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah;
 - 11) Secara bertahap melakukan peninjauan NJOP Reklame dan NJOP PBB-P2;
 - 12) Memberikan reward melalui Gebyar Hadiah Pelunasan PBB P2 baik bagi wajib pajak maupun aparat pemungut tingkat desa/kelurahan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan aparat pemungut tingkat desa/kelurahan; dan
 - 13) Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- b. Mengoptimalkan pendapatan Retribusi Daerah dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain :
- 1) Menggali sumber-sumber retribusi daerah dengan memperluas pelayanan;
 - 2) Meninjau tarif retribusi yang pengenaan tarifnya sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - 3) Mengintensifkan pemungutan retribusi daerah melalui penerapan *e-retribusi*; dan
 - 4) Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- c. Meningkatkan pendapatan dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
- d. Mengoptimalkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah yang idle melalui kerjasama atau bentuk perikatan lainnya;
 - 2) Mengoptimalkan tagihan daerah baik Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - 3) Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan; dan
 - 4) Melakukan investasi jangka pendek atas *idle* kas.
2. Meningkatkan penerimaan Dana Transfer dengan upaya : meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, insentif daerah, dana desa) dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan).

3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan upaya : meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian objek penerimaan. Beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi/Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023*)	Target Tahun 2024**)	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah	700.428.762.449	768.640.705.768	785.192.221.815	1.031.189.898.742	1.144.817.285.027
1.1	Pajak Daerah	280.277.331.102	296.270.228.744	300.000.000.000	504.117.000.000	605.256.351.935
1.2	Retribusi Daerah	19.813.134.112	19.684.990.112	24.891.749.473	372.555.738.138	34.527.045.420
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.360.003.796	61.133.781.992	60.744.600.000	61.650.000.000	67.606.571.408
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	342.978.293.439	391.551.704.920	399.555.872.342	92.867.160.604	437.427.316.263
2	Pendapatan Transfer	2.563.412.247.062	2.684.312.641.684	2.879.523.034.000	2.075.766.865.800	2.773.129.307.509
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.286.284.520.504	2.404.202.119.337	2.587.285.422.000	1.906.563.390.800	2.636.926.801.509
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	277.127.726.558	280.110.522.34	292.237.612.000	169.203.475.000	136.202.506.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.291.129.832	23.559.328.200	3.432.000.000	3.432.000.000	0
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)		3.293.132.139.343	3.476.512.675.652	3.668.147.255.815	3.110.388.764.542	3.917.946.592.536

Sumber: *) LRA APBD 2023 audited; **) Perda APBD 2024

Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun 2025 yang lebih rendah dari Target Tahun 2024 dikarenakan pada RKPD Tahun 2025 tidak mencantumkan pendapatan dari Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh DAK) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja bantuan keuangan khusus terhadap pemerintah desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana.
6. Belanja daerah urusan wajib dan urusan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024.
7. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
8. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
9. Mengatasi permasalahan yang diperlukan oleh masyarakat luas secara langsung agar tercipta stabilitas ekonomi daerah.

10. Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.
11. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
13. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
14. Mitigasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana alam.

Struktur rencana belanja daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk rencana Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi tahun 2024 yang dilantik pada tahun 2025.
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka mewujudkan sekolah murah bagi siswa SD dan SMP; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan dalam rangka pemenuhan UHC; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan hibah pendidikan tingkat dasar untuk sekolah swasta, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik.

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal diantaranya untuk pembangunan/rehabilitasi jalan jembatan, jaringan irigasi dan saluran pembuang, pembangunan RTH.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dipergunakan antara lain untuk beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (Stunting, Kemiskinan Ekstrem, ibu hamil kekurangan energi kronis).
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, TMMD dan pengembangan kawasan pedesaan serta pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk aparatur pemerintah desa.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian, apabila besaran penerimaan pendapatan daerah relatif kecil dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana. Berikut ini rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 sebagai tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Pertumbuhan Belanja Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Belanja Daerah					Rata-rata (%) Pertumbuhan Tahun 2020- 2024
Realisasi 2020 (000)	Realisasi 2021 (000)	Realisasi 2022 (000)	Realisasi 2023*) (000)	Target 2024**) (000)	
3.088.834.820	3.329.814.716	3.401.500.832	3.501.105.821	3.768.105.932	5,13%

Sumber : *)LRA APBD 2023 audited, **) Perda APBD 2024

Secara umum selama 4 (empat) tahun terakhir rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Cilacap naik sebesar 5,13%. Kemudian realisasi, target dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 5
Realisasi/Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023*)	Target Tahun 2024**)	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Operasi	2.320.737.241.789	2.443.369.777.401	2.749.292.572.327	2.328.412.087.203	2.854.744.781.984
1.1	Belanja Pegawai	1.276.549.760.531	1.347.024.602.981	1.597.524.600.063	1.420.647.949.134	1.720.214.405.071
1.2	Belanja Barang dan Jasa	927.982.437.486	946.328.971.742	980.869.220.337	822.342.304.779	1.051.081.089.127
1.3	Belanja Subsidi		370.902.000	548.204.800	1.045.200.000	
1.4	Belanja Hibah	110.755.993.772	148.484.800.678	169.995.547.127	74.203.383.290	81.805.460.286
1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.449.050.000	1.160.500.000	355.000.000	10.173.250.000	1.643.827.500
2	Belanja Modal	537.110.858.819	468.852.514.719	396.390.413.479	529.964.885.100	605.734.019.300
3	Belanja Tidak Terduga	4.204.295.318	279.100.208	9.879.310.832	10.000.000.000	25.000.000.000
4	Belanja Transfer	539.983.224.804	588.604.429.000	612.543.635.496	622.747.058.797	623.609.924.433
4.1	Belanja Bagi Hasil	23.312.112.400	29.206.572.700	29.408.140.000	51.971.550.000	28.255.473.068
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	516.671.112.404	559.397.856.300	583.135.495.496	570.775.508.797	595.354.451.365
Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)		3.402.035.620.730	3.501.105.821.328	3.768.105.932.134	3.491.124.031.100	4.109.088.725.717

Sumber: *)LRA APBD 2023 audited; **)Perda APBD 2024

Penurunan Belanja Operasi pada Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan pada RKPD Tahun 2025 tidak mencantumkan belanja yang bersumber dari DAK antara lain Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD. Belanja tersebut merupakan anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan

akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal. Strategi pembiayaan daerah tahun 2025, antara lain:

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi.
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, diarahkan pada :

1. Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Cilacap yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja dan pelampauan pendapatan.
2. Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Cilacap yaitu: Pembentukan dana cadangan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2029.

Adapun realisasi, target dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 6
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 – 2026

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023*)	Target Tahun 2024**)	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	5	6	7	8	9
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	314.067.155.485	185.663.674.098	99.958.676.319	385.735.266.558	210.642.133.181
3.1.1	SiLPA	314.067.155.485	185.663.674.098	99.958.676.319	385.735.266.558	210.642.133.181
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah					
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.500.000.000	21.000.000.000	0	5.000.000.000	19.500.000.000
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo					
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	19.500.000.000	21.000.000.000	0	0	19.500.000.000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan				5.000.000.000	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	294.567.155.485	164.663.674.098	99.958.676.319	380.735.266.558	191.142.133.181

Sumber: *)LRA APBD 2023 audited; **)Perda APBD

3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mendorong pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di antaranya sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tabel 3. 7

Realisasi Dana APBN di Kabupaten Cilacap Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu	K/L	Sumber
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Jambu-Sadahayu Cs	23.425.954.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dana Inpres
2	Rehabilitasi Jalan Ruas Caringin-Palugon Cs	20.390.956.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dana Inpres
3	Pembangunan Pengaman Pantai Cilacap	326.737.219.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SBSN 2023-2024 DIPA SNVT PJSA
4	Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Adipala – Ayah 1 (E.Katalog)	36.655.550.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
5	Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Adipala – Ayah 2 (E.Katalog)	36.236.092.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
6	Pelebaran Jalan Adipala – Ayah 3	36.536.974.363	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
7	Pelebaran Jalan Adipala – Ayah 4	36.639.014.613	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kegiatan	Pagu	K/L	Sumber
8	Pengerbangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Untuk 6 Kecamatan: Kec. Karangpucung Kec. Bantarsari Kec. Kawunganten Kec. Adipala Kec. Wanareja Kec. Gandrungmangu	3.000.000.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

Pendanaan alternatif non APBD ditempuh di antaranya dengan mendorong pengembangan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, peningkatan peran serta BUMN, BUMD dan perusahaan swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta bentuk partisipasi swadaya masyarakat lainnya. Peningkatan peran BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta melalui TJSLP/program *Corporate Social Resbosibility* (CSR) di Kabupaten Cilacap merupakan wujud sinergitas perusahaan untuk berperan serta dalam mendukung pencapaian target dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Cilacap.

Pelaksanaan program TJSLP/CSR oleh BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat disinkronkan dan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Bentuk komitmen pelaksanaan TJSLP secara formal dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Bupati Cilacap dengan Pimpinan BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta di Kabupaten Cilacap. Melalui kerjasama ini perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSLP di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan mengalokasikan anggaran TJSLP sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan.

Selama kurun waktu Tahun 2021–2023 Program TJSLP/CSR diwujudkan dalam penanganan permasalahan di bidang pendidikan;

kesehatan; pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kesejahteraan sosial, olahraga-seni-budaya-pariwisata; keagamaan; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan; energi terbarukan, kedaruratan, pendampingan umum, dan inftasruktur yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di antaranya melalui penanganan RTLH, bantuan pendidikan, jaminan sosial dan pelayanan kondisi darurat. Realisasi pelaksanaan Program TJSLP/CSR di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.8
Realisasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Di Kabupaten Cilacap
Tahun 2021 – 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN (Rp)		
		2021	2022	2023
1	PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap	3.597.506.167	4.931.975020	5.680.809.500
2	PT. Sumber Segara Primadaya Cilacap	6.831.053.430	6.538.964.173	5.984.326.000
3	PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk.	2.841.080.555	2.017.760.000	2.519.803.520
4	PERUMDAM Tirta Wijaya Kab. Cilacap	643.656.645	1.267.067.035	864.565.824
5	PT. PLN UP3 Cilacap	2.582.523.000	2.094.868.000	2.635.423.000
6	PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Lomanis	378.103.449	722.615.000	785.029.230
7	PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cilacap	593.554.031	409.870.000	32.390.000
8	PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Maos	1.070.810.000	1.875.450.000	1.126.957.623
9	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	1.798.000.000	2.345.761.963	1.597.434.883
10	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.212.524.798	1.718.491.750	961.840.000
11	PT. Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala OMU	679.389.300	621.887.414	998.517.500
12	PT. Manunggal Perkasa	444.330.000	550.706.500	740.014.000
13	Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap	250.744.415	542.478.550	369.946.598
14	PT. Pertamina Lubricants Cilacap	580.839.950	644.467.300	409.500.000
15	PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)	403.561.600	396.835.000	180.255.000
16	PT. Bank Mandiri (Persero)	931.209.000	439.800.001	166.043.569
17	PT. Bank Jateng Cabang Cilacap	535.991.140	2.039.874.290	921.017.729
18	PT. Waroeng Batok Industri	50.000.000	19.200.000	1.500.000
19	PT. Juifa International Foods	12.700.000	-	Belum Melaporkan
20	PT. Hutama Prima	12.000.000	6.400.000	9.600.000
21	PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap	374.500.000	1.641.560.000	925.000.000
22	PT. Dharmapala Usaha Sukses (DUS) Cilacap	143.280.010	122.310.600	135.485.500
23	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	108.500.000	26.000.000	55.000.000
24	PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda)	353.701.500	368.979.324	442.815.350
25	Rumah Sakit Santa Maria	33.890.000	31.310.000	47.810.000
26	PT. Indo Java Rubber Planting Co	39.888.028	34.546.500	29.698.000
27	PT. BPR Gunung Slamet Cilacap	91.985.000	88.700.000	145.270.000
28	PT. Bank Central Asia, Tbk.	Belum Melaporkan	Belum Melaporkan	Belum Melaporkan
29	RSU Duta Mulya	Belum Melaporkan	Belum Melaporkan	338.828.787
30	PT. Toxindo Prima	Belum Melaporkan	Belum Melaporkan	78.898.562
31	BI Purwokerto	678.779.010	1.115.351.700	585.798.500
32	Rumah Sakit Afdila Cilacap	83.700.000	75.720.500	296.140.523
33	Klinik Utama An Nur Cilacap	5.490.000	20.000.000	46.774.000
34	RSU Aprilia Cilacap	24.000.000	21.210.000	20.519.000
35	PT. Bank Surya Yudha Cabang Cilacap	1.000.000	Belum Melaporkan	Belum Melaporkan
36	RSU Raffa Majenang	2.062.500	14.171.620	75.483.200
37	RS Pertamina Cilacap (PERTAMEDIKA)			197.085.000
JUMLAH TOTAL		27.435.353.528	32. 748.104.240	29.405.580.398

Sumber: Sistem Pelaporan Online TJSLP/CSR Kabupaten Cilacap Per 31 Desember 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, yaitu: (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) serta (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*). Penyusunan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain: (1) Kesesuaian dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD); (2) Fokus penanganan isu-isu strategis; dan (3) Kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain kriteria tersebut, penyusunan prioritas pembangunan daerah juga dirumuskan dengan memperhatikan: (1) RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, (2) Isu dan permasalahan strategis daerah, dan (3) Prioritas program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Penyusunan program dan kegiatan juga memperhatikan asas tematik, holistik, integratif, dan spasial yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

Penetapan skala prioritas pembangunan daerah dalam perumusan rencana pembangunan daerah didasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, evaluasi RKPD tahun 2023 maupun usulan prioritas lainnya.

Prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi tidak boleh terpisah dari prinsip berkesinambungan dan terpadu dari satu periode perencanaan ke periode perencanaan berikutnya. Hal tersebut untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan menengah daerah. Skala prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPD

Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Sedangkan sasaran pada RKPD untuk memastikan capaian kinerja sasaran pada tahun rencana dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program strategis di masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 telah memasuki tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 dan merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 disusun dengan memperhatikan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah guna menjamin sinergitas sasaran dan prioritas pembangunan serta arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain : 1) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program prioritas dalam RPD; 2) RKPD berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja (Renja); dan 3) RKPD merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS).

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen RPJMD merupakan dokumen yang berisi penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Selanjutnya mengingat periode RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Cilacap berakhir di tahun 2022, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang memuat arah prioritas pembangunan dan target kinerja indikator yang harus dicapai setiap tahunnya secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Cilacap

Tahun 2023-2026 dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Sebagai salah satu landasan implementasi RKPD Tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 yang akan diwujudkan, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel		Indeks	76,77
			Nilai SAKIP	Nilai	74,75
			Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249
		Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	74,146
			Indeks Merit System	Indeks	319
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,46
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,97
			Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	96,52
			Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	40,95
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (IID)	kategori	62 (sangat inovatif)
Meningkatkan stabilitas keamanan ketentraman wilayah	Angka kriminalitas	Menurunnya gangguan keamanan di wilayah		Indeks	17,12
			Kasus konflik sosial	Jumlah	0
			Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten	%	1
Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya	Indeks Pembangunan-			Indeks	72,91
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Saing Masyarakat	an Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,76
		Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,94
		Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak	IPG	Indeks	87,78
		Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Angka kemiskinan	%	10,14
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,84 - 7,82
Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal	Pertumbuh- an Ekonomi (dengan migas dan tanpa migas)			%	5,40-6,10
				%	5,40-6,10
	Inflasi			%	2,5-4,5
		Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	7,4
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB	%	2,55
		Meningkatnya investasi dalam penanaman modal	Nilai investasi	Milyar	1.991,31
		Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil	Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	5,45
		Meningkatkan pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,05
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur			Indeks	89,28
		Meningkatnya kualitas kebinamargaan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	76,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
		Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	94
		Terwujudnya pemenuhan universal akses	Persentase capaian rata rata universal akses (sanitasi, air bersih dan Kawasan kumuh/ dalam persentase bukan luasan)	%	92,84
		Meningkatnya Capaian Reforma Agraria	Persentase Kegiatan Reforma agraria yang dilaksanakan	%	100
	Indek Kinerja Sistem Irigasi			%	48,85
		Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten	Debit air yang tersedia	%	0,61
	Vc Rasio			Indeks	0,30-0,40
		Meningkatnya kinerja perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan	%	56,77
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan	Indeks Desa Membangun			Indeks	0,7455
		Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,67
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	Penurunan Gas Rumah Kaca			TonCO2eq	739.415
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,66
Meningkatkan Pengelolaan Bencana	Indeks Resiko Bencana			Indeks	96,93
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana disetiap desa/ kelurahan	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	18,3

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan Kabupaten Cilacap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. RKPD Tahun 2025 disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas dengan memperhatikan keselarasan

dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Kebijakan Pemerintah yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow programme priority*, bertujuan agar pencapaian pembangunan dan penetapan prioritas pemerintah dapat berjalan maksimal (berhasil), fokus dan tepat sasaran. Kebijakan ini diimplementasikan dengan mengarahkan alokasi anggaran untuk fokus pada prioritas pembangunan, relokasi program kegiatan yang telah memenuhi target dan efisiensi anggaran program non prioritas. Di samping itu, program dan kegiatan diprioritaskan untuk menyelesaikan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cilacap serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025–2029 diarahkan untuk Penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas:

1. Transformasi Sosial

Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi

pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Berdasarkan kondisi nasional dan mempertimbangkan perkembangan geopolitik regional dan global, maka target Indikator Makro Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,1 - 5,5 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,5 - 5,0 persen;
3. Angka Kemiskinan : 8,0 - 7,0 persen;
4. Rasio Gini : 0,379 – 0,382;
5. Indeks Modal Manusia (nilai) : 0,56;
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) : 38,6.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada tema ***"Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter,"*** dengan prioritas pembangunan diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja

utama daerah tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yaitu :

1. PDRB per kapita sebesar 48,53-48,66 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,66-9,00 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,90–5,60 persen;
5. Inflasi pada angka $2,5 \pm 1$ persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,81 – 4,42 persen;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 107,52;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 59,92;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,68;
13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cilacap

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan peninjauan kerja, rapat kerja, reses, dan menerima audiensi dari masyarakat yang menjadi salah satu bahan kebijakan dalam penyusunan prioritas serta fokus pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cilacap didalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 menitikberatkan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Aplikasi BASO agar ditinjau ulang penerapannya agar dapat mengakomodir aspirasi masyarakat Desa.
 - b. Optimalisasi pembangunan jalan kabupaten.
 - c. Pembangunan infrastruktur lebih mengutamakan skala prioritas.
 - d. Menekankan agar pembangunan infrastruktur yang dialokasikan melalui aspirasi DPRD untuk lebih maksimal. Hasil dari pembangunan sementara baru tercapai 700 km yang dialokasikan dari 1300 km, untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

- e. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tetap dengan berpedoman pada pemerataan pembangunan mengingat ruas jalan yang membutuhkan anggaran masih begitu banyak sementara anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan jalan sangat terbatas. Ketika menggunakan ruas tuntas maka jumlah ruas jalan yang mendapat anggaran lebih sedikit sehingga bagi ruas jalan yang belum mendapatkan anggaran akan sangat lama menunggu giliran dibangun hal tersebut dapat memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
 - f. Pembangunan Infrastruktur di daerah pinggiran atau perbatasan dengan kabupaten lain perlu mendapat perhatian khusus, baik itu Pembangunan jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya sehingga terjadi pemerataan Pembangunan di Kabupaten Cilacap yang efeknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pinggiran.
 - g. Pada bidang Infrastruktur agar terus ada upaya peningkatan anggaran pembangunan khususnya jalan dan jembatan yang diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan wilayah disertai dengan meningkatkan pengawasan terhadap pengerjaan pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar konektivitas antar wilayah kabupaten hingga kecamatan tercapai serta pemerataan anggaran pembangunan di setiap wilayah.
 - h. Pemerintah Daerah harus terus menerus mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Daerah perlu merencanakan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, mengalokasikan anggaran dengan bijak, melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam proses pengembangan, serta memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- a. Pajak PJU adalah Sumber Pemasukan Pajak Daerah nomor 2 setelah PBB, tetapi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap setiap tahun hanya mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU) sebesar 500 juta. Faktanya di lapangan banyak PJU yang

rusak dan tidak terawat, untuk itu kami menyarankan alokasi anggaran pemeliharaan PJU di APBD Tahun 2025 ditingkatkan sesuai kebutuhan.

- b. Pemasangan PJU harus mencakup juga jalan-jalan desa, mengingat pajak penerangan jalan dibayarkan oleh seluruh konsumen PLN. Dengan demikian perlu dilakukan alokasi yang adil dan merata untuk memastikan bahwa masyarakat desa merasakan manfaat dari layanan penerangan jalan yang sesuai dengan kontribusi pajak yang telah disumbangkan melalui tagihan yang dibayarkan melalui PLN.

3. Bidang Pendidikan dan Olahraga

- a. Pesantren adalah bagian dari SISDIKNAS, begitu tingginya animo publik ke pesantren di Kabupaten Cilacap dan begitu besarnya jasa-jasa pesantren terhadap bangsa dan negara, saya berharap Pemkab segera membuat perda pesantren.
- b. Agar Sekolah Maarif berhak mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana sekolah-sekolah dibawah yayasan lain.
- c. Intensif guru ngaji agar lebih diperhatikan.
- d. Fasilitasi yang lebih terhadap bakat minat dunia olahraga.
- e. Dibidang pendidikan, agar ada sekolah-sekolah unggulan di masing-masing Kecamatan yang nantinya akan dijadikan sebagai barometer atau miniatur target sumber daya manusia, sehingga anak-anak para generasi penerus akan menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah.
- f. Menekankan akan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kualitas pemberlajaran, profesionalisme guru, serta peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

4. Bidang Kesehatan

- a. Kartu Indonesia Sehat masih kurang efektif dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi seperti sosialisasi program yang belum merata, terkait teknisnya untuk bisa diprioritaskan agar keberpihakan masyarakat lebih maksimal.
- b. Perlu adanya anggaran yang diperuntukan untuk membantu pembiayaan kesehatan di rumah sakit atau faskes lainnya bagi keluarga miskin yang tidak memiliki BPJS.
- c. Pada sektor Kesehatan, Pemerintah Daerah harus menekankan untuk UHC (*Universal Health Coverage*) yang merupakan standar kesehatan agar mendekati angka yang diharapkan oleh nasional yaitu minimal

95%. Kami juga mendorong agar Pemerintah Daerah juga meningkatkan anggaran untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) bagi masyarakat yang mengidap penyakit, tergolong dalam masyarakat miskin, dan tidak memiliki BPJS. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih cermat lagi dalam menyusun data dan angka terhadap masyarakat yang semestinya mendapatkan alokasi BPJS namun belum mendapatkan BPJS, sehingga APBD berperan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dilayani kesehatan secara gratis.

- d. Permasalahan stunting masih menjadi target yang utama, oleh sebab itu untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2025, perlu penekanan pentingnya bantuan pangan khususnya kepada ibu hamil dan masyarakat yang masih masuk digaris kemiskinan ekstrem.

5. Bidang Sosial

- a. Anggaran BPJS non mandiri perlu ditambah agar masyarakat miskin merasakan manfaatnya.
- b. Verifikasi faktual, untuk dilakukan kembali terkait bantuan BLT dikarenakan banyak yang tidak tepat sasaran dan harus dibenahi.
- c. DPRD Kabupaten Cilacap mendorong terus secara berkelanjutan agar kemiskinan di Kabupaten Cilacap semakin ditekan menuju angka dibawah 10% dan kemiskinan ekstrim bisa menjadi Zero Miskin Ekstrem di Tahun 2025.

6. Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian

- a. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian yang serius dalam pemberdayaan UMKM dari hulu ke hilir.
- b. UMKM berperan membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di daerah. UMKM memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pada masa pandemi Covid 19. Untuk itu, UMKM perlu ditingkatkan kapabilitasnya dengan kemampuan terhadap manajemen persediaan dan akuntansi sederhana, supaya dapat mengendalikan atau mengevaluasi kegiatan usahanya.
- c. Kabupaten Cilacap menjadi salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Tengah, untuk itu kami berharap ada perhatian khusus dan kebijakan yang konkrit dan solutif dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi tingkat pengangguran, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan alat produksi kepada masyarakat, sehingga pencari kerja dapat memiliki skill yang dibutuhkan untuk bekerja dan juga mendorong masyarakat untuk berwirausaha.

- d. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan perekonomian yang berbasis UMKM dengan memberikan pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia para pelaku UMKM dan akses permodalan yang mudah, sehingga pelaku UMKM bisa berkembang dan bisa mengikuti perkembangan pasar yang serba digital dan berbasis teknologi informasi
 - e. Popularitas koperasi sedang mengalami tren penurunan, sedangkan UKM pada umumnya belum bisa diandalkan sebagai ujung tombak perekonomian. Oleh sebab itu, perlu diambil langkah-langkah: revitalisasi koperasi, akses permodalan yang mudah dan tidak berbelit bagi pelaku koperasi dan UKM, kemudian para pelaku UKM juga perlu dilatih, didampingi dan dibukakan akses pasar yang seluas luasnya.
 - f. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mendorong investasi dalam sektor sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong masuknya investasi di Kabupaten Cilacap.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Persoalan tanah bengkok desa di Kecamatan Kedungreja dan Sidareja, yang berada di Kecamatan Patimuan telah berpuluh-puluh tahun, hendaknya Pemerintah Kabupaten menyelesaikan dengan serius sehingga tidak menjadi masalah turun-temurun.
 - b. Dalam rangka penertiban aset-aset desa, Pemerintah Kabupaten agar membuat program sertifikasi tanah-tanah bengkok dan tanah-tanah milik desa secara masal dan murah, seperti PTSL.
 - c. Agar PILKADES serentak tahun 2025 dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap tanpa kontribusi dari APBDES, sehingga APBDES bisa fokus untuk kepentingan pembangunan desa.
 - d. Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan kami berpendapat bahwa upaya tersebut dapat dilakukan melalui revitalisasi/peremajaan balai latihan kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan life skill, Pemberian peralatan berusaha/industri untuk kemandirian masyarakat, serta mendorong pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan terkait kemudahan investasi bagi para investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

- e. Generasi muda merupakan penerus keberlangsungan pembangunan daerah kedepan, oleh karena itu kami mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sana dunia usaha dan kewirausahaan.
- f. Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi lokal terwakili. Partisipasi masyarakat yang kami maksud bukan hanya sebatas informasi atau konsultasi, tetapi melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan secara aktif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
- g. Pemerintah Daerah harus fokus dalam memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing daerah. Mengintegrasikan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memajukan sektor bisnis lokal.
- h. Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Dengan menjalankan peran ini secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sosial masyarakatnya.

8. Bidang Administrasi Keuangan

- a. Hendaknya Cilacap tetap menggunakan satu aplikasi dalam menyusun perencanaan APBD yaitu aplikasi SIPD sesuai aturan mendagri, sebagaimana kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia.
- b. Bantuan Keuangan Daerah untuk bisa membantu sekolah swasta, karena banyaknya sekolah swasta yang jumlahnya sama dengan sekolah negeri dan sekolah swasta juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Berkaitan dengan insentif guru honorer dan guru ngaji, kami harap terdapat peningkatan jumlah insentif yang mampu memberikan kesejahteraan.
- d. Pemberian intensif untuk RT dan RW agar ditingkatkan.
- e. Berdasarkan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penelaahan Pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar

pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Mengingat tahun 2025 adalah masa transisi dan dipayungi melalui Rencana pembangunan daerah (RPD) 2024- 2026, maka program dan kegiatan yang akan disusun agar memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

- f. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) salah satunya berupa rekam data dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Program kedepan dirancang agar masyarakat bisa dilayani ditingkat kecamatan dan tidak perlu sampai kabupaten untuk menghindari proses panjang dan antrean. Persiapan dilakukan dengan pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana, diharapkan adanya evaluasi dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan masyarakat.
- g. Untuk membantu meningkatkan peluang dalam mengakses DID. meningkatkan kemampuan untuk memprediksi nilai DID yang akan diterima, dan mendukung kualitas belanja daerah yang bersumber dari dana transfer, KOMPAK membantu sejumlah kabupaten meningkatkan peluangnya dengan cara yang lebih terarah, strategis, dan terkoordinasi melalui Tim Dana Insentif Daerah.
- h. Pelayanan publik supaya ditingkatkan untuk menuju smart city, sehingga masyarakat Kabupaten Cilacap dapat merasa dimudahkan dalam akses untuk pelayanan-pelayanan kebutuhan hidup manusia, baik perekonomian, industri, dan sebagainya agar pelayanan-pelayanan publik tersebut menjadi lebih maksimal.
- i. Mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi kecamatan dan kelurahan yang merupakan unsur kewilayahan dan sebagai ujung tombak pelaksanaan program kegiatan, termasuk para RW dan RT agar mendapatkan peningkatan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.

9. Bidang Pertanian

- a. Untuk meningkatkan ketersediaan pupuk untuk para petani. Hal ini lantaran penyaluran pupuk subsidi seringkali mengalami kendala dalam pendistribusiannya dan terjadi permainan harga di lapangan. Untuk itu, program tersebut serta meminta agar penyaluran pupuk subsidi harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
- b. Penyelesaian kesulitan yang dihadapi oleh para petani seperti kelangkaan pupuk, kurang tersedianya bibit unggul, kestabilan harga

jual hasil pertanian. Mengingat selama ini para petani sering mengalami kerugian yang diakibatkan karena kurang stabilnya harga.

- c. Optimalkan bantuan modal dan perlindungan ke petani
- d. Untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa kunci dari kemandirian pangan adalah reformasi agraria. Lahan pertanian harus terus diperluas dan yang sudah ada tidak boleh dialihfungsikan menjadi peruntukan lain. Produktivitas pertanian wajib didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti: saluran irigasi, embung, bendungan, jalan usaha tani, bibit/benih, serta pupuk dan obat-obatan yang memadai.

10. Bidang Peternakan

- a. Optimalkan hibah bibit ternak ke petani dan hapus pengadaan sistem lelang pengadaan bibit ternak.
- b. Optimalkan anggaran untuk penanganan hama dan penyakit hewan.

11. Pendapatan Daerah

- a. Optimalkan anggaran untuk pembangunan wisata daerah sebagai penunjang PAD.
- b. Perlu penyusunan kebijakan pengoptimalan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai PAD.
- c. Pendapatan daerah agar semakin meningkat sehingga di tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah sukses menuju satu trilyun yang merupakan angka yang signifikan ketika pemerintah daerah inovatif dan kreatif dengan menginventarisir potensipotensi sumber pendapatan daerah.

12. Bidang Kepegawaian

Percepatan penyelesaian persoalan pegawai non ASN harus terus dilakukan demi menutup kekurangan Pegawai ASN yang banyak mengalami pensiun.

13. Bidang Lingkungan Hidup

- d. Dengan semakin meningkatnya emisi karbon rumah kaca yang mengakibatkan suhu udara semakin panas, oleh karenanya Pemerintah Daerah melalui dinas terkait agar membuat planning yang berkelanjutan melalui berbagai konservasi di area-area yang berpotensi menghasilkan oksigen, sehingga mampu menyerap emisi karbon yang kemudian akan terjadi keseimbangan alam antara pembuangan residu gas dengan oksigen yang dihasilkan dari bentuk konservasi tersebut.

- e. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah. Menerapkan prinsip-prinsip ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan memperhatikan lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah, pembangunan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

14. Bidang Ketahanan Pangan

Pemerintah Daerah harus mendorong sektor-sektor ketahanan pangan yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan. Dari tujuh komoditas Kabupaten Cilacap ini harus didorong agar sektor hulu dan hilir ini menjadi prioritas dan ada kebijakan anggaran yang cukup bagi para pelaku pertanian, perkebunan, dan peternakan.

(Dasar : Surat Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Nomor: 000.7/1667/13 tanggal 18 Desember 2023 perihal Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Selanjutnya secara khusus substansi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cilacap menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dan diselaraskan serta disinergikan dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Cilacap.

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Di samping itu, prioritas tahun 2025 disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial, dan integratif dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, perkiraan capaian kinerja di tahun 2024, dan isu-isu strategis tahun 2025.

Pedoman arah kebijakan pembangunan tahun 2025 memperhatikan tujuan, sasaran, serta isu-isu strategis pembangunan dalam RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai pedoman transisi sebelum terpilihnya

presiden baru. Kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2025 diarahkan pada **“Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Daya Saing SDM”** dengan 6 (enam) prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;
 - b. Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan kolaborasi dengan *e-commerce*;
 - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
 - d. Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
 - e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
 - f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta;
 - g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
 - h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 9) Program Penyuluhan Pertanian;
- 10) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 11) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 12) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
- 13) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 14) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- 15) Program Pengembangan UMKM;
- 16) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 17) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 18) Program Pengembangan Ekspor;
- 19) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 20) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 21) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 22) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 23) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- 24) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 25) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 26) Program Promosi Penanaman Modal;
- 27) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 28) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 29) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 30) Program Pemberdayaan Sosial;
- 31) Program Rehabilitasi Sosial;
- 32) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 33) Program Penanganan Bencana;
- 34) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 35) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- 36) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

- 37) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - 38) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
 - 39) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 40) Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - 41) Program Hubungan Industrial;
 - 42) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - 43) Program Pemasaran Pariwisata;
 - 44) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 45) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
- a. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
 - b. Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;
 - c. Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM;
 - d. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 2) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 4) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 9) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 10) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- 11) Program Pengembangan Perumahan;

- 12) Program Kawasan Permukiman;
 - 13) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - 14) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 15) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - 16) Program Pengelolaan Pelayaran.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas SDA, difokuskan pada:
- a. Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;
 - b. Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
 - c. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST;
 - d. Pengurangan risiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - 2) Program Penanggulangan Bencana;
 - 3) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 5) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - 6) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 7) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 10) Program Pengelolaan Persampahan.
4. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada:
- a. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan,

- penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
 - c. Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah, pemenuhan wajib belajar 13 Tahun dan pendidikan kesetaraan, serta pengembangan sekolah inklusi;
 - d. Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital;
 - e. Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran;
 - f. Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional;
 - g. Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya;
 - h. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 5) Program Pengendalian Penduduk;
- 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 8) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 9) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 10) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 11) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- 12) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 14) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 15) Program Pengembangan Kebudayaan;

- 16) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
 - 17) Program Pembinaan Sejarah;
 - 18) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - 19) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 20) Program Perlindungan Perempuan;
 - 21) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - 22) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - 23) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - 24) Program Perlindungan Khusus Anak;
5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada:
- a. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar;
 - b. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - c. Pengembangan pengelolaan arsip digital;
 - d. Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - e. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - f. Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat;
 - g. Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 6) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 7) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 9) Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
- 10) Program Penatagunaan Tanah;
- 11) Program Kepegawaian Daerah;
- 12) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 15) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- 16) Program Pengelolaan Arsip;
- 17) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
- 18) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 19) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 20) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 21) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 22) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 23) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 24) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- 25) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 26) Program Pendaftaran Penduduk;
- 27) Program Pencatatan Sipil;
- 28) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 29) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- 30) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 31) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- 32) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa;
- 33) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 34) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 35) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

- 36) Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
 - 37) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - 38) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 39) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada:
- a. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dan presentase desa mandiri;
 - b. Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah;
 - c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
 - d. Pengembangan kerjasama antar desa.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Penataan Desa;
- 2) Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
- 5) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cilacap dalam RPD Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 dengan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, difokuskan pada : a. Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal, dengan sasaran : a. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi; b. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi; c. Meningkatnya investasi dalam penamaman modal;

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
b. Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan kolaborasi dengan <i>e commerce</i>; c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen; d. Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal; f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta; g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan; h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.	d. Meningkatkan kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil; e. Meningkatkan pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif.
2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada : a. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;	Meningkatkan Kualitas Infra- struktur, dengan sasaran : a. Meningkatkan kualitas kebinamargaan; b. Meningkatkan kepatuhan terhadap tata ruang wilayah; c. Terwujudnya pemenuhan universal akses; d. Meningkatkan capaian reforma agraria;

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
b. Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan; c. Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM; d. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.	e. Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten; f. Meningkatnya kinerja perhubungan.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas Sumber Daya Alam (SDA), difokuskan pada: a. Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;; b. Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri; a. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran : □ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Pengelolaan Bencana, dengan sasaran: Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan
4. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada: a. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan kampung sehat; b. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera; c. Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat	Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas Pendidikan; b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan; c. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak; d. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah, pemenuhan wajib belajar 13 Tahun dan pendidikan kesetaraan, serta pengembangan sekolah inklusi; d. Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital; e. Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran; f. Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional; g. Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya; h. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.	
5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada : b. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar; c. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah; d. Pengembangan pengelolaan arsip digital; e. Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan; f. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif, dengan sasaran : a. meningkatnya birokrasi yang akuntabel; b. meningkatnya birokrasi yang kapabel; c. meningkatnya kualitas pelayanan publik; d. meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan. Meningkatkan stabilitas keamanan ketentraman wilayah, dengan sasaran : ☐ Menurunnya gangguan keamanan di wilayah

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan; g. Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat; i. Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.	
6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada: a. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dan presentase desa mandiri; b. Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah; c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan; d. Pengembangan kerjasama antar desa.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran : □ Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan

Prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2025 dengan permasalahan dan isu strategis daerah dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis (RPD) dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1.	Belum optimalnya nilai akuntabilitas pelayanan pemerintahan dan reformasi birokrasi	Perwujudan tata kelola pemerintahan (<i>governance</i>): bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel.	Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah (5)
2.	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan sesuai SPBE		
3.	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan	Kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi.	Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing (4)
4.	Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular		
5.	Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan		
6.	Belum optimalnya pembinaan wirausaha muda		
7.	Masih rendahnya daya saing dan pemanfaatan Iptek serta hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah	Tingkat kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem (1)
8.	Belum optimalnya penurunan kemiskinan		
9.	Masih tingginya angka pengangguran		Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan (6)
10.	Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro		
11.	Masih rendahnya tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah		

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
12.	Belum optimalnya minat investasi dan peningkatan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap.	Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (2)
13.	Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Infrastruktur	Infrastruktur yang memadai; Pengembangan kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup.	
14.	Belum optimalnya penanganan sanitasi dan permukiman kumuh		
15.	Belum optimalnya pemenuhan Ruang Terbuka Publik		
16.	Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan	Pengelolaan dan Penanganan Bencana.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas SDA (3)
17.	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dan prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, yaitu :

- a. Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas) sebesar 5,40-6,10 persen dan (dengan migas) sebesar 5,40-6,10 persen;
- b. Angka Kemiskinan sebesar 10,14 persen;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,84-7,82 persen;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,91;
- e. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 87,78; dan
- f. Penurunan Gas Rumah Kaca 739.415 TonCO2eq.

4.3 Pembangunan Kewilayahan

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta system permukiman, meliputi: WP Kedungsepur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, WP Cibalingmas, WP Subosukawonosraten, WP Bregasmalang, dan WP Petanglong. WP Cibalingmas merupakan gabungan dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas. Arah pengembangan WP Cibalingmas diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap – Purwokerto - Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Bregasmalang), disebutkan bahwa Kawasan Cibalingmas memiliki peran pendukung Kawasan Bregasmalang terutama pada aspek ekonomi, industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan migas. Kawasan ini memiliki keunggulan pada sektor: (i). Primer dibidang perikanan, perkebunan, pasir besi, minyak dan gas; (ii). Sekunder dibidang industri batik, logam dan furnitur; serta (iii). Tersier dibidang perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan fakta tersebut, maka pengembangan kawasan Cibalingmas difokuskan pada bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan.

Dalam rangka mendukung arah pembangunan kawasan Cibalingmas dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Kabupaten Cilacap memiliki strategi pengembangan wilayah sebagai berikut:

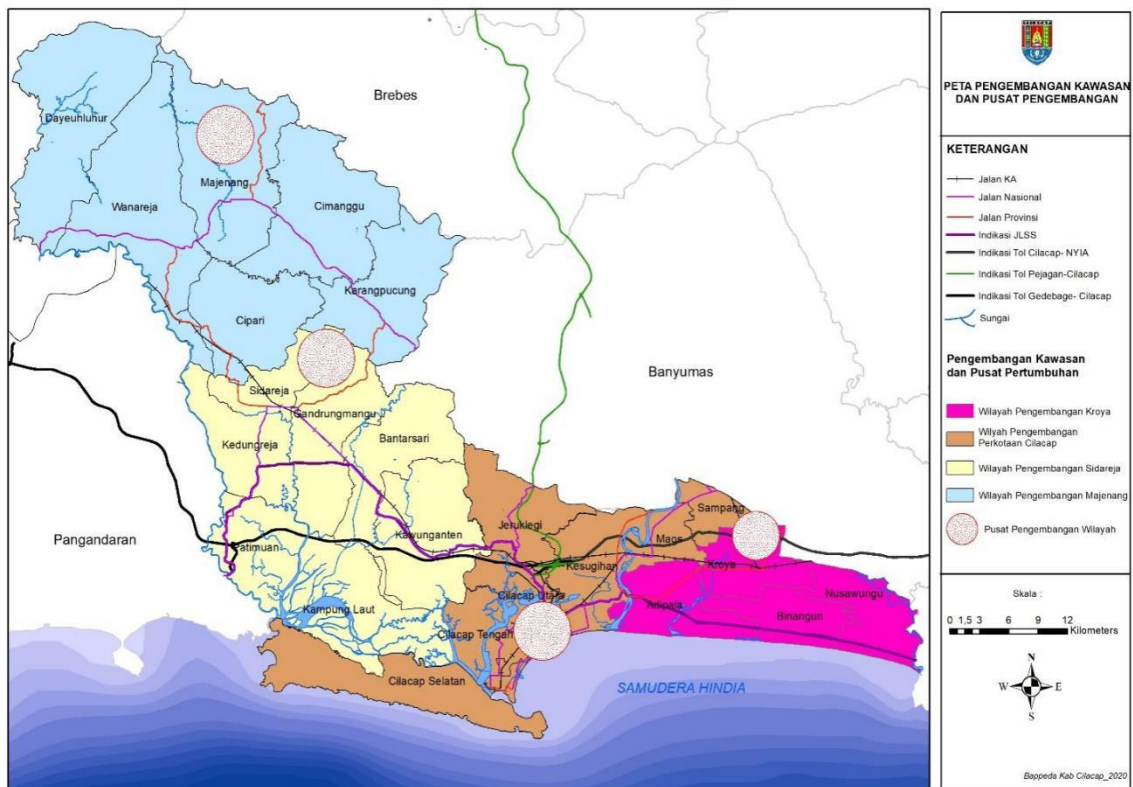
1. Penguatan kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di perkotaan Cilacap menjadi pusat pertumbuhan dengan skala internasional, nasional dan regional dengan mengoptimalkan kawasan industri pengolahan minyak dan industri petrokimia, melalui upaya penyiapan kawasan industri untuk mengantisipasi pengembangan kilang pengolah minyak baru melalui RDMP di Kabupaten Cilacap, pengembangan kawasan pelabuhan Tanjung Intan dengan mendukung pembuatan Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Baru, pengembangan Bandara Tunggal Wulung, optimalisasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pinggiran melalui penetapan prioritas pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan, penanganan persampahan melalui pendekatan pengolahan sampah untuk bahan bakar pengganti fosil bagi industri yang ada di Kabupaten Cilacap, pengembangan pusat pemerintahan melalui pembangunan sarana terpusat, pengembangan ruang publik dan penataan kawasan yang berorientasi pada penataan kawasan pemukiman dan perumahan.
2. Pengembangan kawasan Majenang dan sekitarnya dengan berorientasi pada penetapan perkotaan Majenang sebagai pusat pertumbuhan yang mampu menjadi pusat pelayanan dari beberapa kecamatan sekitar untuk wilayah Cilacap Barat, yang didukung oleh pengembangan kawasan sekitar dengan berorientasi pada peningkatan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas antar kawasan, optimalisasi industri skala menengah dan kecil, pengembangan area publik di pusat kecamatan, optimalisasi kawasan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian pangan dan jaringan sumber daya air, penataan kawasan pemukiman, serta pengendalian ancaman bencana alam.
3. Pengembangan kawasan perkotaan Kroya dan sekitarnya, dengan berorientasi pada penetapan perkotaan Kroya sebagai pusat pertumbuhan yang mampu menjadi pusat pelayanan kecamatan di sekitarnya untuk wilayah Cilacap Timur, dengan didukung oleh peningkatan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas antar kawasan, pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM, pengembangan kawasan pertanian sebagai lumbung pangan, pengembangan sarana prasarana sumber daya air, penataan kawasan pemukiman dan penanganan bencana alam.

4. Peningkatan kawasan Sidareja sebagai pusat pertumbuhan wilayah di selatan wilayah Kabupaten Cilacap yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang terkoneksi dengan jaringan jalan utama (JJLS dan Jalan Tol), pengembangan wilayah perbatasan, peningkatan sistem jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi budidaya perikanan sebagai basis pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri padat karya, serta mitigasi dan penanganan bencana.
5. Pengembangan kawasan perdesaan yang berorientasi pada peningkatan fungsi kawasan perdesaan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah kawasan pertanian dalam skala luas, peningkatan sarpras pertanian, peningkatan konektivitas antar kawasan, optimalisasi industri kecil dan UMKM, serta mitigasi dan penanganan bencana alam.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan kewilayahan di Kabupaten Cilacap diprioritaskan pada:

1. Pembangunan kewilayahan berbasis potensi unggulan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi penggerak bagi kawasan disekitarnya yang didukung dengan kebijakan penataan kawasan, pengembangan pertanian, pariwisata, industri kecil dan UMKM, sinergitas agropolitan-minapolitan, serta dukungan infrastruktur.
2. Pembangunan berbasis pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan melalui peningkatan konektivitas antar kawasan, pemerataan pusat produksi dan distribusi, pengembangan kawasan pemukiman, jasa dan perdagangan, pemerataan pelayanan infrastruktur dasar serta mitigasi dan penanganan bencana.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.2
Peta Pengembangan Kawasan dan Pusat Pengembangan Wilayah
Kabupaten Cilacap

Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan kearifan lokal dan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan melalui sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya.

Terkait dengan *progress* pelaksanaan Perpres 79 Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memberikan dukungan kebijakan melalui :

1. Persetujuan Bupati Cilacap terhadap *Masterplan* Pelabuhan Indonesia Tanjung Intan Cilacap;
2. Keterlibatan dalam inisiasi pembebasan lahan RDMP Pertamina RU IV Cilacap;
3. Penyiapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, dengan luas kurang lebih 5.286 ha, terdiri dari :
 - a. KPI Cilacap di Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, dan Kecamatan Cilacap Selatan;

- b. KPI Karangandri di Kecamatan Kesugihan, dan Kecamatan Cilacap Selatan;
 - c. KPI Bunton di Kecamatan Adipala;
 - d. KPI Warung Batok di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - e. KPI Tinggarjaya di Kecamatan Sidareja;
 - f. KPI Cilacap Timur di Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Nusawungu;
 - g. KPI Bengawan Donan di Kecamatan Cilacap Tengah, dan Kecamatan Kawunganten; dan
 - h. KPI Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Kesugihan).
4. Surat Bupati Cilacap kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 523/03710/35 tanggal 6 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambakan dan Pertanian Ketahanan Pangan dalam rangka dukungan terhadap implementasi Kegiatan Perpres 79 Tahun 2021 yaitu: Pembangunan Sarana Prasarana bagi Budidaya Udang Vaname, Kab. Cilacap
 5. Penyusunan *Masterplan* Agrowisata Bantarsari
Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki hamparan lahan seluas $\pm$ 84 Hektar, yang saat ini belum termanfaatkan secara optimal di wilayah Kecamatan Bantarsari. Lahan tersebut dilihat dari aspek lokasi memiliki potensi yang strategis, serta dapat dioptimalkan untuk fungsi pelayanan agrowisata dan penyediaan ruang public.
 6. Penyusunan DED Kawasan Agrowisata Bantarsari
Luas Kawasan Agrowisata dalam DED ini sebesar 8,025 Ha, sebagai dokumen perencanaan teknis untuk pembangunan sarana prasarana kawasan agrowisata berbasis eduwisata dan sebagai acuan bagi pelaksanaan konstruksi;
 7. Penyusunan *Masterplan* Pembangunan Perikanan
Kawasan prioritas pembangunan perikanan untuk perikanan budidaya di Kabupaten Cilacap difokuskan pada 5 wilayah Kecamatan dengan total luasan wilayah 560,79 Ha. Wilayah tersebut terdistribusi di Kecamatan Adipala, Gandrungmangu, Binangun, Kawunganten dan Kampunglaut. Jenis komoditas utama yang dapat dibudidayakan pada kawasan tersebut adalah udang vaname dengan metode tambak biokret di Kecamatan Adipala dan Binangun serta tambak tanah di Kecamatan Kawunganten dan Kampunglaut.

Adapun dukungan program kegiatan yang dialokasikan di Tahun 2025 untuk percepatan implementasi Perpres 79 Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap secara khusus tidak dialokasikan mengingat proyek strategis yang masuk kriteria P1 adalah Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap yang merupakan kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

4.4 Keselarasan dengan Kebijakan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045

Penyusunan RKPD Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045. Tahun 2025 merupakan masa tansisi di mana RKPD Tahun 2025 adalah *baseline* tahun pertama Tahap I RPJPD Tahun 2025-2045 sehingga kesinambungan pembangunan di daerah diwujudkan dengan sinkronisasi dokumen perencanaan. Keselarasan dokumen RKPD Tahun 2025 dengan RPJPD Tahun 2025-2025 antara lain digambarkan dengan penyesuaian indikator makro sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Keselarasn RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dengan
RJPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045

Indikator	Satuan	Target RKPD	Target RPJPD	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40-6,10	5,40-6,10	Sasaran Visi RPJPD
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,91	72,91	Sasaran Visi RPJPD
Angka Kemiskinan	%	10,14	10,14	Indikator Utama Pembangunan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,84 - 7,82	8,84 - 7,82	Indikator Utama Pembangunan

Terdapat 56 Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Cilacap dan selaras dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama 20 tahun ke depan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2025
1	2	3	4
1	Tingkat Kemiskinan	%	10,14
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (Sumber data dari <i>Angka PoU Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah)</i>)	%	12
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Sumber data dari <i>Badan Pangan Nasional</i>)	Angka	84,65
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,94
5	Jumlah kasus kematian Ibu	Kasus	11
6	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,77
7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00
8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90
9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	90,03
10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):		
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	64,14
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	58,11
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	55,12
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	63,30
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,76
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,91
14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	77,68
15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan		97,38
	a. PAUD	%	100
	a. SD	%	100
	b. SMP	%	92,15
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	37,48
17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	
18	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,70
19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,13
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0
21	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	62,49-62,54
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,38 - 0,37
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	58,12
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,49
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	332
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,80
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,62
28	Return on Aset (ROA) BUMD	%	3,09
29	Disparitas Harga	%	± 10
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	20,93
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,34

No	Indikator	Satuan	2025
1	2	3	4
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,24
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,23
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,15
35	Persentase Desa Mandiri	%	4,83
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,84 - 7,82
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,17
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	7,74
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	69,10
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	55,63
41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	76,00
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	51,316
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,3
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	28,4
45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	48,85
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,10
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	53,94
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	99,34 - 96,68
49	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	739.415
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,67
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	51
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,47
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,49
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,16
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	71,37-71,85
56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,67-19,87

4.5 Inovasi Daerah

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, disebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila yang sering disebut dengan Perencanaan Pembangunan Berbasis Riset (*Research Based Planning*).

Lembaga litbang daerah merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang melaksanakan fungsi-fungsi Penelitian,

Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Menurut UU No. 11 tahun 2019 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Invenisi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegratan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Serta Inovasi adaiah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang menganciung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.

4.5.1 Penelitian dan Pengkajian

Kegiatan penelitian dan kajian menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bekerjasama dengan para pakar dari perguruan tinggi dan lembaga swasta. Penelitian dan kajian dilaksanakan dalam berbagai bidang dan urusan, sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah. Berikut kegiatan penelitian dan kajian yang direncanakan di tahun 2025, yaitu :

Tabel 4. 6
Rencana Riset oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Usulan Riset	Penanggung jawab
1.	Konsep Paket Wisata Heritage	Disporapar
2.	Tingkat Pemanfaatan Arsip di Instansi atau Organisasi	Dinas Arpus
3.	Kawasan Rawan Tsunami di Pesisir Pantai	BPBD
4.	Kawasan Rawan Liquefaksi atau Perairan / Pergerakan Tanah Akibat Gempa	BPBD
5.	Pemetaan & Optimalisasi Potensi Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	BPPKAD
6.	Jasa Lingkungan Pemanfaatan Gas Rumah Kaca / Carbon Trade	DLH
7.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada BUMD	Sekretariat Daerah

No	Usulan Riset	Penanggung jawab
8.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Setda
9.	Potensi Penanaman Modal	DPMPTSP
10.	RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	DPMPTSP
11.	Investasi Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Setda
12.	RDTR Kawasan Perkotaan Kedungreja dan Bantarsari	DPUPR
13.	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Cilacap	DPUPR
14.	Laporan Penanggulangan Kemiskinan	BAPPEDA
15.	Optimalisasi Kelompok UMKM dalam Memperluas Produksi Pewarna Alami & Briket	BAPPEDA
16.	Residu Pestisida pada Sayuran Segar	DISPABUN
17.	Indeks Minat Baca Masyarakat	Dinas Arpus
18.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Arpus
19.	Strategi Peningkatan Kesadaran Partisipasi Masyarakat	Dinsos
20.	Strategi dan Agenda Kebijakan dalam menghadapi Transformasi Digital	BAPPEDA
21.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang sosial dan Kependudukan	BAPPEDA

Dalam rangka mendukung penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Riset (*Research Based Planning*), Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menindaklanjuti dengan menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

Jaringan Penelitian

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 037/152/37 Tahun 2021 tentang Pembentukan Jaringan Penelitian Kabupaten Cilacap, seluruh perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Cilacap disatukan dalam sebuah wadah agar interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Cilacap semakin intensif dan berkualitas. Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Cilacap, yaitu:

- 1) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
- 2) Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap
- 4) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas
- 5) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darussalam Cilacap
- 6) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Majenang
- 7) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang
- 8) Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Cilacap
- 9) Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang
- 10) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap
- 11) Akademi Maritim Nusantara Cilacap

12) Politeknik Negeri Cilacap.

Jaringan Penelitian ini memiliki tugas untuk: (1) Memberikan masukan ilmiah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah; (2) Secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan daya saing daerah; dan (3) Membantu pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan iklim akademis di Kabupaten Cilacap.

Jurnal Ilmiah

Dalam rangka mewadahi hasil penelitian dan pengembangan yang penting sebagai dasar ilmiah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, maka diselenggarakan Jurnal Inovasi Daerah (JID), dengan fokus kajian inovasi pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, produk unggulan daerah, sistem inovasi daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jurnal ini berskala Nasional dan terbit secara berkala 2 (dua) kali setahun dengan jumlah artikel 7 judul setiap terbitan.

4.5.2 Pengembangan dan Penerapan

Tabel 4. 7
Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Urusan	Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan	• Difusi Inovasi Unit Kerja Pada Perangkat Daerah • Pengembangan pusat pengkajian dan publikasi hasil pengkajian tentang Kab.Cilacap dari berbagai sudut pandang keilmuan • Intensifikasi kerjasama pendampingan terintegrasi CSR • Penguatan Penjaringan Inovasi • Pendampingan Perguruan Tinggi atau pengusaha besar untuk Masyarakat/ Desa Inovasi untuk menjamin kemandirian desa inovasi
Komunikasi dan Informatika	• Penyediaan pusat informasi (fasilias kesehatan dan pendidikan) • Implementasi SPBE dalam kelembagaan dan tata laksana pemerintahan • Pengembangan digitalisasi dan integrasi database
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	• Penyediaan co-working space dan research lab untuk pengembangan start-up • Fasilitasi networking dan business matching bersama investor • Penyusunan sistem <i>database</i> produk unggulan daerah

Urusan	Kegiatan
	• Pembentukan <i>Virtual Mall</i> untuk produk ekonomi lokal • Pengembangan produk – produk pesisir sebagai produk unggulan Cilacap • Fasilitasi peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk unggulan • Pendampingan mitra strategis (Pengusaha Besar) dalam pendampingan, teknologi dan <i>quality control</i> untuk meningkatkan kapasitas dan kontinuitas pemenuhan permintaan pasar bagi UMKM potensi ekonomi lokal
Penanaman Modal	• Temu Bisnis
Pariwisata	• Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kab.Cilacap • Pembentukan pusat pendampingan terintegrasi pariwisata & ekonomi kreatif • Pengembangan promosi pariwisata & ekonomi kreatif melalui pemanfaatan <i>influencers</i> • Pengembangan paket pariwisata dengan daerah lain • Pembinaan/fasilitasi pengembangan Kawasan pariwisata alam/pegunungan/melalui penguatan peran komunitas (Pokdarwis, Deswita atau BUMDes bermitra dengan pemangku Kawasan) • Pembinaan/fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata pesisir melalui penguatan peran komunitas (Pokdarwis, Deswita atau BUMDes bermitra dengan TNIAD)
Pemberdayaan Masyarakat Desa	• Pendampingan BUMDes dalam pemanfaatan potensi ekonomi lokal • Pembentukan/fasilitasi pusat pembinaan dan pendampingan inovasi desa atau kelompok masyarakat • Penyediaan/fasilitasi peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa atau kelompok masyarakat • Mendorong penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, utamanya pengembangan kecakapan digital dan <i>e-commerce</i> melalui Peraturan Bupati
Kelautan dan Perikanan	• Pendampingan inovasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan
Sosial	• Pendampingan dan penguatan kelembagaan desa bagi kelompok masyarakat dan kaum difabel
Kebudayaan	• Penyediaan pusat kreasi seni budaya dan pelestarian kearifan lokal • Pembuatan kapita selekta/ensiklopedia tentang identitas budaya dan kearifan lokal

Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaga Litbang). Diseminasi hasil penelitian adalah salah satu bentuk kegiatan pertanggungjawaban akademik yang dilakukan oleh setiap peneliti untuk kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyelenggarakan Diseminasi Hasil Riset/Kajian Perguruan tinggi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Maksud dari kegiatan Diseminasi Hasil Riset/Kajian Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap ini adalah untuk memfasilitasi 12 Perguruan Tinggi serta Peneliti yang ada di Kabupaten Cilacap dalam menyampaikan hasil riset/kajian kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kajian/riset yang telah didiseminasikan diharapkan dapat langsung diimplementasikan untuk membantu isu permasalahan daerah.

4.5.3 Invensi dan Inovasi

Inovasi merupakan pengungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Daerah khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan UU No 11 Tahun 2019 Pemerintah daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi yang ditujukan untuk solusi permasalahan nasional, memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika, dan menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat. Invensi dan inovasi dihasilkan dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan, alih teknologi, rekayasa balik, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau komersialisasi teknologi. Adapun aktifitas terkait inovasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 di Kabupaten Cilacap adalah :

- Pendampingan Desa Inovasi
- Lomba Krenova
- Fasilitasi Penilaian Mandiri Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Inovation Government Award (IGA)

- Fasilitasi HKI
- Pemaren Produk Inovasi (PPI)
- Diseminasi Hasil Kelitbangan
- Diseminasi Hasil Krenova
- Pelatihan Bisnis Model Kanvas bagi Inventor dan Innovator

Pemerintah juga menetapkan gerakan wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Beberapa inovasi yang akan dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
1	DINAS P DAN K	Forum Konsultasi Akreditasi Sekolah Dasar	Forum yang bertujuan untuk menjembatani dinas dan sekolah yang akan melaksanakan akreditasi, untuk meningkatkan jumlah dan hasil dalam akreditasi. Peran forum ini untuk mengkomunikasikan sekolah yang akan diakreditasi dengan badan akreditasi/asessor, mengkoordinir sekolah yang akan dikreditasi, dan memfasilitasi sekolah yang akan diakreditasi untuk meningkatkan sekolah yang akan diakreditasi dan presentase hasil akreditasi.	1. Jumlah sekolah yg terakreditasi bertambah 2. Meningkatnya score atau nilai akreditasi sekolah	1. Meningkatkan mutu/kualitas sekolah 2. Meningkatnya kualitas Pendidikan jenjang SD di kab Cilacap	1. Terakreditasinya SD di kab. Cilacap 2. Sekolah lebih siap saat diakreditasi
		E Mut (Sistem Informasi Mutasi Siswa Elektronik)	Merupakan sistem layanan yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan mengakomodir kebutuhan dalam proses mutasi siswa termasuk di dalamnya kenaikan jenjang tingkat siswa secara regular, perubahan biodata siswa dan perpindahan siswa ke satuan sekolah yang berbeda.	Terbentuknya inovasi E-Mut,	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Target tahun 2026 yaitu 100 %	Rata-Rata Lama Sekolah target tahun 2026 : 7,34 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Tari Gotik EsTePe (Pendataan Mandiri Guru dan Tenaga Kependidikan berSPT)	Yaitu aplikasi yang digunakan untuk mendata secara mandiri GTT/PTT yang masih aktif khususnya yang telah memiliki SPT yang berada di sekolah-sekolah negeri (TK, SD, SMP) di Kabupaten Cilacap agar tersedia data pendidkn dan kependidikan Non ASN yang akurat. Dengan data yang akurat akan mempercepat dalam penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) pada setiap tahunnya.	Terwujudnya aplikasi Gotik EsPeTe	Database Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada satuan pendidikan negeri (TK, SD, SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap	Akurasi data Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN yang telah memiliki Surat Perintah Tugas
		Virtual Cagar Budaya	Museum virtual untuk menampilkan informasi terkait sejarah budaya Cilacap, peninggalan pra sejarah dan cagar budaya yang ada di Cilacap berbasis media interaktif.	Terwujudnya inovasi Virtual Cagar Budaya	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan target tahun 2026 : 31,25 %	Persentase obyek pemajuan kebudayaa yang diimplementasikan target tahun 2026 : 40 %
		SiKAP SMES	Merupakan layanan SKPP sementara yang berbasis sistem informasi dengan harapan bisa mempermudah dan mempercepat mendapatkan SKPP sementara.	Terwujudnya inovasi pelayanan publik untuk layanan SKPP Sementara	Persentase pelayanan PNS yang membutuhkan SKPP sementara pada tahun 2026 : 100 %	Peningkatan waktu pelayanan lebih singkat 1 hari
		Aplikasi LAKON PDK (Layanan Kontrak Online) di Lingkungan Dinas	Merupakan layanan Kontrak Online dengan adanya LAKON PDK diharapkan mampu menghemat biaya dan waktu (tidak perlu datang langsung ke tempat pelayanan), akses cepat dan tepat, adanya peringkasan prosedur konvensional karena sudah berbasis online dan mampu mengembalikan <i>trust society</i> .	Terwujudnya aplikasi Layanan Kontrak Online	Implementasi Pengelolaan dokumen kontrak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap	Optimalisasi pengelolaan dokumen kontrak terutama pada proses penerbitan dokumen kontrak

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Layanan LAKON PDK dapat diakses di https://lakon.pdk.cilacapkab.go.id			
		Aplikasi SI KEBUD (Ensiklopedia Kebudayaan) Cilacap	Merupakan katalog virtual yang menampilkan berbagai objek kebudayaan meliputi kesenian, cagar budaya, upacara adat, dan makanan tradisional yang ada di Kabupaten Cilacap. Aplikasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi kebudayaan di Kabupaten Cilacap dan menjadi media pembelajaran seni budaya pada instansi pendidikan.	Terciptanya inovasi dalam bentuk aplikasi android yang merupakan literasi digital tentang ensiklopedia Objek Pemajuan Kebudayaan Cilacap	Persentase literasi tentang pengetahuan kebudayaan lokal baik berupa buku ataupun literasi digital pada instansi pendidikan.	Meningkatnya minat baca anak dan efektifitas pembelajaran seni budaya melalui literasi digital berbasis aplikasi android. Hasil survei pada guru seni budaya menyatakan bahwa 50% guru menyatakan aplikasi SIKEBUD SANGAT EFEKTIF sebagai media pembelajaran, sementara 45% menyatakan EFEKTIF, dan 5% menyatakan CUKUP EFEKTIF.
2	DINKES					
	- UPT Puskesmas Cilacap Tengah I	BAWA GUNTING (PMBA Dua Tahun Guna Cegah Stunting)				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		dan PMT NUGET TIGA BINTANG				
	- UPT Puskesmas Cilacap Tengah II	SENI SEHAT (Septik-tank Mini Sederhana Ekonomis Hygienis Aman Tertib)	Teknologi pembuatan mini septic tank anti kuras bertujuan untuk meningkatkan capaian ODF di kabupaten Cilacap. Keunggulan teknologi ini adalah tidak perlu menguras (karena diberi anti bakteri), murah (karena dari bahan bekas dream plastik / kaleng cat ukuran 25 kg), mudah pembuatannya karena tidak memerlukan instalasi, serta tidak memerlukan lahan yang luas. Limbah dari Closet akan ditampung ke tanki pertama, lalu masuk ke tanki utama (terjadi proses dekomposisi) lalu ke tanki ketiga sudah berbentuk cair, di titrasi dengan kaporit dan di buang ke kolam/peresapan. Seni Sehat merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk percepatan capaian Desa ODF. Dimana Capaian Desa SBS (ODF) Berdasarkan Data STBM SMART Kabupaten Cilacap baru mencapai 11,27 %. Perkembangan Desa ODF per tahun sangat lambat (peningkatan 1%), sehingga diharapkan seni sehat dapat memberikan kontribusi dalam percepatan Desa ODF. Seni Sehat	Tersedianya septik tank yang Mini Sederhana Ekonomis Hygienis Aman Tertib	Persentase Rumah Tangga perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS target tahun 2026 : 86 %	Indeks Keluarga Sehat target tahun 2026 : 0,3

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			merupakan Inovasi Septictank yang terbuat dari Drum bekas cat yang memiliki beberapa keunggulan yaitu mudah pembuatannya, murah biayanya karena memakai barang bekas (Rp. 500.000,- per unit), bahannya tahan lama dan bentuknya bisa menyesuaikan lokasi dan jenis tanah. Kabupaten Cilacap telah menerapkan Seni Sehat sebanyak 70 unit tersebar di 9 wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Cilacap. Dalam kejuaraan Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Seni Sehat mendapatkan Juara I dan Juara Favorit, dan salah satu reward nya adalah pada tahun anggaran 2022 Seni Sehat dialokasikan sebanyak 1000 unit yang akan disebar di seluruh Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.			
	- Sie Jamkes dan Mutu Pelayanan Kesehatan	PKP “award”	Merupakan suatu bentuk penghargaan kepada Puskesmas yang memperoleh nilai terbaik yang dinilai dari indikator Penilaian Kinerja Puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja puskesmas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.	Penghargaan puskesmas	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai target tahun 2026 : 91,07 %	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
	- UPT Puskesmas Majenang II	“GJOS 121” Gerakan Jamban Orang Sehat 1 Bulan 2 Jamban 1 RT	GJOS 121 merupakan kegiatan inovasi puskesmas dalam pengadaan jamban sehat dengan strategi setiap 1 bulan membuat 2 jamban sehat dalam 1 RT. Jamban sehat yang dievaluasi adalah Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), dan Jamban Sharing (1 jamban untuk banyak KK) melalui aplikasi STBM SMART yang di download di Play Store. Dengan adanya inovasi GJOS diharapkan ada penekanan pada promotif dan preventif untuk memutus siklus penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi.	Tersedianya Jamban Sehat Orang Sehat (1 Bulan 2 Jamban 1 RT)	Persentase Rumah Tangga perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS target tahun 2026 : 86 %	Indeks Keluarga Sehat target tahun 2026 : 0,3
		AJAK AKU (Aksi Jemput Paket Dahak Ke Rumah)				
		RAJA GUNTING (Gerakan Remaja Cegah Stunting)				
		PIONIR (Pelayanan Informasi Obat Rasional dan Informatif)				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
	- RSUD Cilacap	SISANi (Sistem Informasi Semua ada Disini)	SISANi (Sistem Informasi Semua ada Disini) Adalah aplikasi berbasis web dan android yang terdiri dari fitur pendaftaran rawat jalan secara online, informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap, Jadwal [praktik dokter, Tracking resep obat pasien mendapat kepastian waktu kapan obatnya sehingga dapat menunggu di rumah atau pun di tempat lain dengan nyaman tanpa harus antri di ruang tunggu pelayanan Farmasi Rawat Jalan.	Pelayanan rawat jalan semakin cepat dengan adanya pendaftaran online, pasien dapat mengetahui jadwal praktek dokter, pasien dapat mengetahui ketersediaan tempat tidur rawat inap, Terselenggaranya sistem antrian obat pasien rawat jalan.	Inovasi ini berhasil memangkas waktu pelayanan rawat jalan yang disesuaikan dengan Indikator mutu nasional rata – rata waktu tunggu rawat jalan 85,62 menit / pasien (2020),menjadi 83,84 menit / pasien (2022). Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat jalan, Peningkatan kepuasan terhadap Instalasi farmasi dari 71,50 kurang baik (2021) menjadi 81 sangat baik (2022).	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan target tahun 2026 : 100
		LANTAS SANTAP TB RO	Layanan Tuntas Satu Atap TBC Resistensi Obat (LANTAS SANTAP TB RO) Mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi penderita TB-RO hanya di satu tempat pelayanan PARU CENTER. Disamping untuk mengantisipasi resiko penularan kepada pasien lain juga dapat meningkatkan pemahaman bagi pasien TB- RO melalui pendampingan	Terselenggaranya layanan TBC Resistensi Obat secara lebih cepat dalam satu atap	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan target tahun 2026 : 100 %	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan target tahun 2026 : 100

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			dan konseling secara berkesinambungan. Inovasi ini masuk dalam Top 20 KIPP Provinsi Jawa Tengah.			
		LENTERA HATI	Layanan Lanjut Usia Sejahtera Sehat Idaman (LENTERA HATI) Pasien Geriatri adalah pasien Lanjut Usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan Multidisiplin yang bekerja secara Interdisiplin. Pelayanan geriatri diberikan untuk para lansia yang berumur lebih dari 60 tahun keatas	Tersedianya layanan lanjut usia (Geriatri) dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin.	Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan Lanjut Usia Syarat target tahun 2026 : 100 %	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan target tahun 2026 : 100
		SIGAP STROKE	Siap Identifikasi Kegawatan Pasien Stroke (SIGAP STROKE) program/metode deteksi dini untuk mengenali tanda dan gejala stroke.	Terwujudnya keterampilan untuk mengidentifikasi Kegawatan Pasien Stroke secara dini	Persentase menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit target tahun 2026 : 23%	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan target tahun 2026 : 100
		SINAR SENJA CILACAP	“SINAR SENJA CILACAP” (<i>SharINg gambar EKG SERangaN Jantung di Kabupaten CILACAP</i>) merupakan suatu program aplikasi dengan menggunakan “platform digital” yang	Terwujudnya percepatan penanganan pasien dengan kasus Sindrom Koroner	Dari semua kasus yang dikonsultasikan via aplikasi “SINAR SENJA CILACAP”, sebanyak 53,85%	Lama rawat inap pasien yang dirawat di RSUD Cilacap

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			dibuat dengan tujuan untuk mengurangi keterlambatan sistem (<i>system delay</i>) yang terjadi pada saat penanganan pasien dengan kasus Sindrom Koroner Akut yang terjadi di daerah Kabupaten Cilacap. Sehingga pasien dengan kasus Sindrom Koroner Akut dapat langsung tertangani dan mendapatkan advis terapi secara langsung dari dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.	Akut yang terjadi di daerah Kabupaten Cilacap, sehingga dapat lebih meningkatkan angka harapan hidup pasien dan dapat meminimalisir kerusakan atau komplikasi yang terjadi pada jantung.	dirujuk ke RSUD Cilacap. Rata-rata kecepatan respon dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dalam menjawab konsultasi via aplikasi “SINAR SENJA CILACAP” adalah 8.7 menit.	paling banyak adalah 5 hari.
		Program RENALIS (Ruang Edukasi Pasien Gagal Ginjal Kronis)	RENALIS atau Ruang Edukasi Pasien Gagal Ginjal Kronis adalah program edukasi bagi pasien Gagal Ginjal Kronis dan keluarga di Unit Dialisis RSUD Cilacap serta pengunjung dan masyarakat luar Rumah Sakit.	Tersedianya program promosi Kesehatan yang disusun secara teratur dan berkesinambungan dengan edukator dari beragam profesi yang ditentukan melalui SK Direktur, tersedianya materi yang menarik serta mudah dipahami sesuai dengan pedoman PERNEFRI, serta pemanfaatan	Peningkatan pengetahuan, kepatuhan dalam terapi, terbentuknya sikap mental positif dan meningkatnya motivasi serta semangat hidup berdampak baik terhadap kondisi klinis pasien. Kondisi klinis ini dapat dilihat dari perbaikan kadar hemoglobin dan Tekanan Darah Pasien	Kualitas Kesehatan dan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis yang meningkat

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				media sosial dan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) untuk menyebarluaskan informasi sehingga bermanfaat pula untuk banyak Masyarakat luar Rumah Sakit.	serta angka rawat inap yang terus menurun.	
		GOTUBALL (Goyang Inpartu Dengan Gymball)	Gerakan menggoyangkan panggul ke beberapa sisi sesuai arahan menggunakan bola besar yang terbuat dari lateks (Gymball) yang bertujuan memperlancar persalinan.	Tercapainya proses persalinan yang lancar dan minim komplikasi pada pasien.	Meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk bersalin di RSUD Cilacap.	Pada Periode persalinan di Bulan Januari-Mei 2023 menunjukkan angka keberhasilan 68 % partus spontan yang menggunakan exercise dengan Gymball.
		SURFACE 124 (Surveilans Faktual Dan Cepat 1 x 24 Jam Pada Penyakit	SURFACE 124 (Surveilans Faktual Dan Cepat 1 x 24 Jam Pada Penyakit Potensial Wabah Di RSUD Cilacap) adalah upaya deteksi dini kejadian luar biasa. Surface 124 merupakan sistem pelaporan penyakit potensial	Terselenggaranya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap	1. Penggunaan paperless pada pelaporan penyakit 2. Ketepatan pelaporan pada	Meningkatnya kecepatan respon oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Potensial Wabah Di RSUD Cilacap)	wabah yang mengintegrasikan surveilans aktif RS dan surveilans berbasis laboratorium yang memanfaatkan fitur dari SIMRS dan terhubung dengan WhatsApp Gateway sehingga penyampaian informasi menjadi lebih cepat.	kemungkinan terjadinya KLB.	website SKDR meningkat, pada tahun 2022 capaiannya adalah 96,15% sedangkan pada tahun 2023 sampai minggu ke-45 adalah 97,78%. 3. Jumlah partisipasi ruangan yang melaporkan penyakit potensial wabah meningkat. 4. Ketepatan pelaporan pada 1x24 jam sejak penegakkan diagnosis atau selama pasien dirawat di RS meningkat. 5. Jenis penyakit yang dilaporkan dalam aplikasi SKDR semakin banyak, 6. Meningkatnya pengetahuan dan	

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
					kesadaran petugas dalam mengenali dan merespon jenis penyakit yang berpotensi wabah.	
	Kega-Gizi	Ceting di Meja (Cegah Stunting Dari Mulai Remaja)	Merupakan kegiatan dalam upaya penurunan stunting yang diawali dari remaja putri baik di sekolah maupun di masyarakat, yang bertujuan menurunkan prevalensi anemia bagi WUS khususnya remaja putri dan peningkatan cakupan konsumsi Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri (target RAD-PG sampai tahun 2024, 40%). Remaja Putri yang mengalami anemia, KEK (Kurang Energi Kronik) menjadi penyebab dasar calon ibu bayi yang tidak berkualitas, dimana dapat melahirkan bayi yang kurang gizi antara lain BB rendah, PB < 47 Cm bagi perempuan, PB < 48 Cm bagi laki-laki) yang beresiko stunting. Sehingga perlunya pencegahan sejak mulai remaja putri. Adapun sasaran kegiatan ini, meliputi : 1. Masyarakat, yang melibatkan kader, karang taruna, dinas terkait baik di desa, posyandu	Terselenggaranya kegiatan dalam upaya penurunan stunting yang diawali dari remaja putri baik di sekolah maupun di masyarakat.	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan target tahun 2026 : 100 %	Indeks Keluarga Sehat target tahun 2026 : 0,3

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			remaja, maupun melalui wadah karng taruna dan PKK 2. Di Institusi Sekolah Siswa putri (SMP/SLTA) mendapat sosialisasi / workshop tentang penanggulangan anemia dan pentingnya konsumsi Tablet Tambah darah secara rutin setiap seminggu sekali, serta pencaanangan minum Tablet tambah Darah (TTD) bersama dimasing-masing institusi sekolah yang dipandu oleh petugas kesehatan (Puskesmas / Dinas Kesehatan), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan HB dan pengdan ukuran LILA (Lingar Lengan Atas) Uraian Kegiatan Ceting Di Meja, sbb: 1. Advokasi tingkat Desa, Kecamatan & Kabupaten 2. Workshop, sosilasisi, KIE dan penyediaan leaflet 3. Penyediaan Tablet Fe (Tambah Darah) 4. Pemeriksaan Hb dan Lila 5. Distribusi Tablet Fe dan Minum Bersama			
	Promosi Kesehatan, Kemitraan dan	Kampung Sehat	Kampung Sehat adalah Kampung yang penduduknya memiliki sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi	Terselenggaranya kampung yang penduduknya memiliki sumber	Persentase Rumah Tangga PHBS target tahun 2026 : 86 %	Indeks Keluarga Sehat target tahun 2026 : 0,3

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
	Pemberdayaan Masyarakat		masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari serta masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Target RPJMD 2017-2024 terbentuk 24 Kampung se-Kabupaten Cilacap (masing-masing kecamatan 1 kampung) Tahapan Kampung Sehat Tahun 2022 : 1. Pertemuan Teknis Tim Kampung Sehat 2. Sosialisasi Kampung Sehat Tingkat 3. Kabupaten 4. Sosialisasi Kampung Sehat 5. Monitoring dan Pembinaan 6. Pelaksanaan Lomba Kampung Sehat Tingkat Kecamatan serta Penyerahan Piagam dan Piala 7. Penilaian Berkas Penentuan 10 Besar Tingkat Kabupaten 8. Penilaian Lapangan Lomba Kampung Sehat Tingkat Kabupaten 9. Pembinaan Kampung Sehat Kriteria kampung Sehat terdiri dari :	daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri		

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			1. Kelembagaan kampung Sehat 2. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat 3. Pemberian ASI Eksklusif 4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5. Rumah terdapat jendela difungsikan/dibuka 6. Pelaksanaan desa Siaga 7. Peran Posyandu. Peningkatan gizi dan penurunan angka kematian ibu 8. Peningkatan germas 9. Pencegahan penyakit DBD 10. Kriteria tambahan kampung sehat			
	RSUD Majenang	Dor to Door (Drug on The Road)	Sebuah proedur pengiriman obat ke rumah pasien (terutama lansia) wilayah Kecamatan Majenang.	Terlaksananya pengiriman obat bagi pasien (terutama lansia) di wilayah Kecamatan Majenang	Meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan RSUD Majenang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Sahabat Sehat	Sebuah Prosedur fasilitasi transportasi pasien dialisis dari rumah pasien menuju RSUD Majenang dan sebaliknya dengan tujuan memudahkan akses pelayanan.	Terlaksananya bantuan transportasi pasien dialisis wilayah Kecamatan Majenang, Cipari dan Sidareja ke layanan dialisis	Meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan RSUD Majenang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		SIAP MATA (Sistem Informasi				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Antrian Pendaftaran, Tempat Tidur dan Aduan Masyarakat)				
	Puskesmas Kedungreja	Poljitu				
	Puskesmas Majenang I	ANTAR CAREDOK PEUDES (Antenatal Care Bidan Kolaborasi Dokter Plus USG)				
		SIPITALOKA (Sistem Pendaftaran Cepat Tiga Loker Antrian)				
	Puskesmas Cimanggu II	GAYENG NING ATI (Gerakan Layanan Skrinning, Aktif Temukan Hipertensi)				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
	Puskesmas Cilacap Utara I	LAPIS LEGIT (PELAYANAN PRIMA SECARA LENGKAP, DIGITAL, TERPADU)				
	Puskesmas Dayeuhluhur II	Giat selebritis (strategi cepat seleksi batuk terduga tuberkulosis)				
		Photo artis berdaya (Poto shoot dan akte gratis bersalin di puskesmas dayeuhluhur				
		Papah IHA (Pemberian penghargaan ibu hamil aterm)				
		Mantra Medsos (Materi penggunaan				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		obat tradisional melalui media sosial)				
		Jebol pandu iva danis (jemput bola pemeriksaan terpadu iva dan payudara oleh tenaga klinis				
	Puskesmas Adipala I	BILANG MAS ADJI (Bincang Pelanggan Puskesmas Adipala Siji)				
3	DPUPR	SIMBAJA	Merupakan inovasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap untuk menginformasikan kondisi jalan Kabupaten Cilacap terkini.	Terselenggaranya model pelaporan kondisi jalan Kabupaten terkini secara cepat dan <i>up to date</i> berbasis website	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik target tahun 2026 : 71 %	Tingkat kemantapan jalan target tahun 2026 : 82 %
4	DINAS PSDA	KEKASIH: Kegiatan Kali Bersih	Kegiatan Kali Bersih (KEKASIH) merupakan kegiatan berbasis masyarakat sungai dengan fasilitator dari sektor government dan didukung peran swasta dengan	Terjalinnnya simbiosis mutualisme antar sector untuk membersihkan sungai	Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air target tahun 2026 : 11,00 %	Debit air yang tersedia target tahun 2026 : 0,61 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			mengoptimalkan CSR sehingga didapat sibiose yang saling mendukung antar sektor sehingga kegiatan KEKASIH dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran.			
		RISDA : Ruang Informasi Sumber Daya Air	Risda (Ruang Informasi Sumber Daya Air) merupakan ruang digital media interaktif (<i>softmedia</i>) yang berisi kumpulan data <i>digital content</i> yang terdiri dari <i>data movie</i> , <i>digital vector</i> dan <i>digital form</i> . RISDA berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan perolehan data aktual terkait sumber daya air. RISDA dapat diintegrasikan menjadi <i>offline system</i> dan <i>online system</i> .	Terselenggaranya <i>softmedia</i> (movie, fector, form) untuk sarana penyebaran informasi dan perolehan data aktual terkait sumber daya air	Persentase ketersediaan penunjang data SDA target tahun 2026 : 67,69 %	Debit air yang tersedia target tahun 2026 : 0,61 %
		Pengoperasian Pintu Air Irigasi Sistem Portabel	Pengaturan debit merupakan aktivitas penting dalam operasi jaringan irigasi. Hal ini umum dilakukan menggunakan pintu bukaan bawah yang memiliki kelemahan terkait sifat hidrolis aliran dan benda hanyut. Untuk itu diperlukan pintu air irigasi sistem portable. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dalam mengendalikan pintu air dan mempersingkat waktu dalam pengoperasiannya.	Tersedianya pintu air irigasi dengan system portable	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik target tahun 2026 : 50,09 %	Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik : 50,86 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		NgOPi Disit di warung jamu	NgOPi Disit di warung jamu (Pengelolaan Laporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dengan Sistem Digital) merupakan aplikasi pelaporan Operasi dan pemeliharaan irigasi yang memuat data masa tanam, petak tersier, luas tanam, kebutuhan air, ketersediaan air dan realisasi pembagian serta pemberian airnya. Aplikasi ini guna mempermudah dan mempercepat penyajian data yang diperlukan oleh <i>stakeholder</i> .	Tersedianya pintu air irigasi dengan system portable	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik target tahun 2026 : 50,09 %	Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik : 50,86 %
5	DISPERKIMTA	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	LINTAS (Linmas Inti KecamatanN Tanpa BatAS)	Merupakan pemberdayaan linmas inti kecamatan yang terbentuk setiap kecamatan se-Kabupaten Cilacap dengan jumlah 30 personil per kecamatan dalam rangka upaya penanganan dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanggulangan bencana alam serta kebakaran. Dengan adanya pembentukan dan pemberdayaan Linmas Inti Kecamatan berdampak pada menurunnya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanganan bencana alam dan kebakaran yang semakin cepat.	Terbentuknya Linmas Inti Kecamatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap sejumlah 30 orang x 24 kecamatan yaitu 720 orang tersebar di 269 desa dan 15 kelurahan.	Memudahkan dalam penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kebencanaan dan Kebakaran maupun kebencanaan yang setiap saat bisa terjadi.	Dengan adanya Linmas Inti Kecamatan, Linmas Inti Kabupaten dan Dinas Instansi terkait baik Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Basarnas dan PMI akan dimudahkan dalam berkoordinasi dalam penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
						Kebencanaan dan Kebakaran
		SATKAR TARU (Satuan Pemadam Kebakaran Terpadu)	Inovasi atau terobosan berupa “Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu (SATKAR TARU) di Kabupaten Cilacap” dalam rangka mewujudkan layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran. Operasional Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu telah mendukung terciptanya layanan respon cepat (Response Time) dalam penanggulangan kejadian kebakaran dan pelayanan pemadaman kebakaran yang efektif akan mengurangi kerugian yang timbulkan akibat bencana kebakaran.	Output dalam proyek perubahan ini merupakan pencapaian tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang meliputi : 1. Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan Masyarakat Kejadian Kebakaran di Kabupaten Cilacap berbasis digital/ android. 2. Aplikasi SATKARTARU SIAP merupakan sarana emergency response dua arah yang akan difungsikan pada saat terjadi kondisi darurat kebakaran oleh masyarakat yang membutuhkan pemadam.	Dari proyek perubahan ini akan menghasilkan outcome jangka panjang meliputi : 1. Semakin optimal layanan respon cepat (response time) dalam bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran dan penyelamatan. 2. Semakin memantapkan program pro investasi Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan adanya peningkatan rasa aman.	Memudahkan masyarakat dalam hal layanan pengaduan dalam bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran dan penyelamatan.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				3. Layanan respon cepat (responsif) dalam bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran dan penyelamatan secara e-aplikasi berbasis android		
		BALAKAR TO RESPON TIME (Barisan Suka ReLA KebaKARan menuju RESPONSE TIME)	Merupakan inovasi memberdayakan masyarakat dalam ikut berperan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, utamanya di kawasan padat penduduk dan sulit dijangkau. Inovasi ini merupakan solusi atas keterbatasan sumber daya maupun sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten Cilacap.	Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran ditingkat RT/RW untuk peningkatan Respon Time (waktu tanggap) penanggulangan kebakaran	Indek Respon Time tahun 2018 yaitu 13,13 menit atau 97%, artinya faktor penghambat meliputi kondisi geografis, ketersediaan peralatan dan keterbatasan sumber daya petugas mampu ditekan melalui pemberdayaan relawan kebakaran	1. Tersedianya sumber daya petugas pemadam kebakaran suka rela yang tersebar di wilayah (tingkat RT/RW) 2. Tertanganinya kebakaran dilokasi padat penduduk dan sulit terjangkau secara cepat menggunakan peralatan yang sederhana (Mini

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
						Portable Pump & APAR) 3. Partisipasi masyarakat meningkat dan membantu pemadaman.
7	BAKESBANGPOL	LAYAR SUREKO MAWA RASTATIS (Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Rekomendasi Penelitian bagi Mahasiswa yang Ramah Berkualitas dan Gratis)	Adalah inovasi pelayanan berupa penerbitan surat ijin rekomendasi penelitian kepada masyarakat dengan menggunakan Aplikasi <i>e-litbang</i> , dengan adanya inovasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi dan menyingkat waktu untuk pengajuan surat ijin rekomendasi penelitian yang semula harus datang ke kantor kesbangpol. Sehingga dengan adanya inovasi ini diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, diantaranya dapat diakses dimanapun dan kapanpun, memudahkan komunikasi dua arah tanpa harus bertatap muka langsung, meminimalisir penularan Covid-19 dan mempercepat serta mempermudah pelayanan.			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
8	BPBD	“SIAP MASBRO” (Mengatasi Abrasi Pantai Menggunakan Anyaman Sabut Kelapa/Bronjong)	yaitu penanggulangan abrasi pantai menggunakan Anyaman Sabut Kelapa berbentuk Bronjong, kemudian diisi dengan media pasir pantai yang ditempatkan pada bibir pantai sebagai tanggul. Kemudian dikombinasikan secara tumpangsari melalui penanaman pohon peneduh, sehingga kondisi pantai kembali seperti kondisi semula.	Terlaksananya penanggulangan abrasi pantai menggunakan Anyaman Sabut Kelapa	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target tahun 2026 : 100 %	Indeks Pencapaian SPMtarget tahun 2026 : 100 %
9	DINSOS	MARI PERCAYA (Manajemen Informasi Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya)	Merupakan program layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) atau <i>Single Windows Service</i> (SWS) dan bertujuan untuk memudahkan masyarakat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya secara mudah, murah, cepat, dan tepat. Dalam pelaksanaannya, Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesmas –SLRT) Cilacap Bercahaya didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya (SIKS-CB) yang akan digunakan sebagai <i>big data</i> dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cilacap agar tepat sasaran.	Jumlah PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani tahun 2026: 57,25%	Persentase penurunan jumlah PPKS tahun 2026: 0,45%
10	DISKOMINFO	Impelementasi <i>Smart City</i>	<i>Smart city</i> atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah terintegrasikan teknologi informasi		Persentase perangkat daerah yang	

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		sesuai <i>Masterplan</i>	dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.		mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city target tahun 2026 : 100%	
11	DISNAKERIN	(LTSA) Layanan Terpadu Satu Atap (SICERMAT) Selektif, Informatif, Cepat, Ramah, Murah, Aman, dan Terlindungi	Inovasi (LTSA) Layanan Terpadu Satu Atap (SICERMAT) Selektif, Informatif, Cepat, Ramah, Murah, Aman, dan Terlindungi merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyederhanakan dan memudahkan keseluruhan proses pengurusan PMI dengan membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Cilacap (LTSA-PTKLN). Seluruh proses pengurusan dokumen PMI dilakukan dalam satu tempat secara Selektif, Inovatif, Cepat, Ramah, Murah, Aman, dan Terlindungi sehingga penempatan PMI Unprosedural khususnya di Kabupaten Cilacap dapat dikurangi.	Tersedianya pengadaan mesin cetak paspor	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota target tahun 2026 : 49 %	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) target tahun 2026 : 63,77
		CEMANI ANGKER (Cetak Mandiri Angkatan Kerja 1 - AK1)				
		SIAP MIGAS (Sistem	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pelayanan Surat Rekomendasi	Terciptanya aplikasi pelayanan Surat	Persentase Tenaga kerja yang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Informasi Administrasi Pelayanan Surat Rekomendasi Sektor Minyak dan Gas Bumi)	sektor migas sebagai bentuk pelayanan publik yang Akuntabel, Transparan, dan Aksesibiliti. Dengan adanya inovasi SIAP MIGAS diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap secara umum.	Rekomendasi sektor migas sebagai bentuk pelayanan public yang Akuntabel, Transparan, dan Aksesibiliti	ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota target tahun 2026 : 49 %	(TPAK) target tahun 2026 : 63,77
		PEPES NILA (Pencatatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Aplikasi)	Merupakan aplikasi Pencatatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan aplikasi sehingga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dapat terselesaikan dengan Cepat, Efektif dan Efisien serta Akuntabel.	Terciptanya aplikasi Pencatatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui mediasi dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan target tahun 2026 : 45 %	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) target tahun 2026 : 63,77
12	DPMPTSP	SIMPATIC (Sistem Informasi Penanaman Modal Cilacap)	Sistem Informasi Manajemen Peluang dan Potensi Investasi Cilacap (SIMPATIC) adalah aplikasi yang menampilkan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Cilacap, baik potensi baru maupun yang sudah <i>ready to offer</i> dan memfasilitasi	Terpromosikanya potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Cilacap dan terfasilitasinya pengusaha yang tertarik untuk	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti. Target tahun 2026 : 100 %	Persentase realisasi investasi. Target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			pengusaha yang tertarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Cilacap melalui fasilitasi Surat Kepeminatan Investasi / <i>Letter of Intens</i> (LOI) berbasis <i>website</i> .	melakukan investasi di Kabupaten Cilacap.		
		Aplikasi SI APIC	Sistem Informasi Aplikasi Peluang Investasi Kabupaten Cilacap (SI APIC) adalah aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah calon investor menemukan tempat untuk berinvestasi di Kabupaten Cilacap berbasis Android berdasarkan peta potensi investasi.	Terpromosikannya potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Cilacap dan terfasilitasinya pengusaha yang tertarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Cilacap.	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti. Target tahun 2026 = 100 %	Persentase realisasi investasi. Target tahun 2026 = 100 %
		e-SIP URAT NADI	Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Digital (e-SIP URAT NADI) adalah aplikasi yang berfungsi mempermudah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memperoleh legalitas untuk melakukan praktik profesinya (Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan).	Terbitnya Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	Persentase perizinan dan non perizinan dan non perizinan yang diterbitkan. Target tahun 2026 = 100 %	Persentase realisasi investasi. Target tahun 2026 = 100 %
		SIP WIL BOSS-e LKPM	Sistem Pendekatan Wilayah Bantuan OSS Secara Elektronik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (SIP WIL BOSS-e LKPM) adalah aplikasi yang berfungsi mendekatkan pelayanan di	Terfasilitasinya pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya terkait pelaporan kegiatan penanaman modal.	Persentase kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Target tahun 2026 = 80 %	Persentase realisasi investasi. Target tahun 2026 = 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			wilayah tingkat Kecamatan, memfasilitasi pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya terkait pelaporan kegiatan penanaman modal.			
13	DISPORAPAR	Forum Seller and Buyer Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisata Ke Desa Wisata di Kabupaten Cilacap				
14	DINAS ARPUS	DEWI ASMARA (Destinasi Wisata Arsip Ramah Anak)	Merupakan layanan kearsipan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti penting arsip.	Terciptanya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti penting arsip.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional target tahun 2026 : 75, 35 %	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK target tahun 2026 : 15,09%
		PENCIL	Merupakan aplikasi berbasis web isinya menyediakan bahan pustaka elektronik secara gratis, memuat berita seputar Cilacap, menjadi wadah dan sarana promosi hasil karya literasi warga Cilacap, dan alat untuk menghimpun serta menyediakan data yang digunakan untuk mengukur Indikator Kinerja	Tersedianya 1. Bahan bacaan elektronik yang tidak berbayar yang mudah diakses; 2. Media tayang informasi <i>up to date</i> ;	Meningkatnya nilai IPLM dari 44.96 menjadi 82	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dari 56,49 menjadi 75

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Utama Bidang Perpustakaan yaitu IPLM dan TGM dengan aplikasi berbasis web/digital.	3. Memuat artikel / karya literasi warga Cilacap 4. Data IPLM serta TGM		
		Pelayanan Literasi Tuna Netra (PELITA)	Merupakan layanan peminjaman buku Braile kepada penyandang Tuna Netra anggota Perpustakaan, dengan cara datang langsung ke pertemuan rutin PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Cilacap dan datang langsung ke rumah-rumah penyandang Tuna Netra, serta layanan belajar membaca buku braile bagi penyandang Tuna Netra yang belum bisa membaca bulu braile	Terlayannya kebutuhan informasi penyandang Tuna Netra.	1. Meningkatkan jumlah kunjungan 2. Meningkatkan jumlah pemanfaatan koleksi braile 3. Meningkatkan jumlah keanggotaan perpustakaan 4. Meningkatkan jumlah penyandang tuna netra yang dapat membaca braile	Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap
15	DISPABUN	Toko Tani Indonesia (TTI)	Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan toko/warung/kios milik pedagang komoditas pangan baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan untuk menjual komoditas pangan dan strategi dari Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gakpoktan) dan mitra industri pangan dengan harga sesuai ketentuan dalam kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). TTI bertujuan untuk membantu stabilisasi harga pangan utama (beras) dan lainnya	Terlaksananya program untuk membantu memasarkan produk pangan dan hasil perkebunan yang berasal dari produksi petani/kelompok tani yang ada di Kabupaten Cilacap.	Persentase ketersediaan Pangan target tahun 2026 : 182 %	1. Konsumsi energi per kapita per hari target tahun 2026 : 2100 Kkal/kapita/hari 2. Konsumsi protein per kapita per hari target tahun 2026 : 55 Gram/kapita/hari

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			yang berasal dari produksi petani/kelompok tani yang ada di Kabupaten Cilacap. TTI menerima beras dari gapoktan dan menjualnya dengan harga sesuai ketentuan (di bawah harga pasar). TTI berfungsi untuk membantu keterjangkauan akses pangan masyarakat. Hingga saat ini terdapat 38 TTI yang tersebar di Kabupaten Cilacap.			
		Beras untuk PNS	Program ini dimaksudkan agar beras yang dihasilkan oleh para petani/kelompok tani/gapoktan yang ada di Kabupaten Cilacap dapat dibeli dan dinikmati oleh masyarakat Cilacap. Pembelian beras Cilacap oleh aparat/PNS Cilacap merupakan bentuk semangat ikut membangun daerah. Sampai saat ini program beras PNS telah berjalan dengan baik dengan rata-rata suplai beras untuk PNS mencapai 6 ton/bulan.	Peningkatan pendapatan petani	Persentase ketersediaan Pangan target tahun 2026 : 182 %	1. Konsumsi energi per kapita per hari target tahun 2026 : 2100 Kkal/kapita/hari 2. Konsumsi protein per kapita per hari target tahun 2026 : 55 Gram/kapita/hari
16	DLH	Optimalisasi Pengelolaan Persampahan melalui RDF	Pengelolaan Persampahan Terpadu RDF merupakan pengelolaan sampah di TPST dengan mengubah sampah menjadi energi berupa bahan bakar pengganti batubara, yang bisa dijual kepada Pabrik Semen, PLTU, dsb.	Terciptanya energi berupa bahan bakar pengganti batubara dengan bahan baku sampah	Persentase Pengurangan Sampah target tahun 2026 : 14,5 %	Persentase Pengelolaan Sampah target tahun 2026 : 84,55%
		SICANTIK (Inovasi Cilacap				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Tanpa Kantong Plastik)				
17	DISDUKCAPIL	GAGIYAN METU (Tiga Strategi Pelayanan Melalui Satu Langkah) PAKET 3 In 1	pelayanan yang memberikan kemudahan kepada pemohon dimana satu permohonan misal untuk akte kelahiran tetapi juga mendapatkan Kartu Keluarga untuk penambahan anggota keluarga dan Kartu identitas Anak/KIA untuk yang dibuatkan akte kelahiran. Paket Tree in One Kelahiran (Akte Kelahiran, KK dan KIA). Paket Tree In One Perkawinan (KK, KTP dan Surat nikah yang terintegrasi dengan Dukcapil).	Memberikan kemudahan dan kepuasan kepada pemohon berupa pemberian 3 dokumen kependudukan dalam 1 kali permohonan berupa akta kelahiran,ktp,kk/akta kematian,ktp,dan kk	Presentase akta kelahiran Tahun 2026 : 89,61% dan Akta kematian Tahun 2026 : 35,03 %	Mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan hanya dengan 1 kali permohonan
		WA Sinkronisasi	Adalah pelayanan secara langsung kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp untuk keperluan sinkronisasi data kependudukan untuk keperluan BPJS, SIM CARD, DAPODIK, PAJAK, PERBANKAN, SAMSAT, dan lain-lain.	Data kependudukan yang sudah tersinkronisasi/tervalidasi	Jumlah permintaan sinkronisasi (per bulan/tahun)	Mempermudah masyarakat dalam pengecekan/validasi data kependudukan yang sesuai dengan database kependudukan
		WA Pengaduan	Adalah pelayanan pengaduan masyarakat secara langsung melalui nomor WhatsApp yang ditindaklanjuti oleh petugas pengaduan selama hari dan jam kerja.	Terselesaikannya pengaduan dan konsultasi yang dilakukan oleh masyarakat terkait dokumen kependudukan	Jumlah pengaduan (perbulan/tahun)	Masyarakat lebih mudah dalam mengajukan keluhan serta kemudahan masyarakat untuk mendapatkan

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
						informasi terkait pelayanan dokumen kependudukan
		Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM)	Dukcapil Menyapa Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat struktural Disdukcapil yang dilakukan setiap pagi yang bertugas menyapa masyarakat yang datang ke Disdukcapil dan bertanya keperluan warga tersebut).	Identifikasi jenis pelayanan dan permasalahan dokumen kependudukan yang dialami masyarakat/pemohon secara detail	Bahan monitoring dan evaluasi bulanan utk dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan yang sesuai dengan permasalahan detail masyarakat/pemohon yang mengajukan pelayanan
18	DISPERMADES	SIDA PEDES (Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintahan DESA	Merupakan cara agar proses penganggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa sebagai salah satu unsur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat tersusun dengan baik tepat jumlah ataupun tepat waktu maka perlu adanya sebuah Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.	Terbentuknya SIDA PEDES (Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintahan DESa	Persentase Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes target tahun 2026 : 100 %	Persentase peningkatan status desa mandiri target tahun 2026 : 18,25 %
19	DINAS KB, PP dan PA	Lakon Kaprok Kampung KB (Lapak Konseling Kesehatan	Merupakan inovasi strategis untuk dapat menggemakan kembali program KB umumnya di wilayah Kabupaten Cilacap dan khususnya di desa desa di seluruh Kabupaten	Peningkatan Jumlah kesertaan Ber KB terutama MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Persentase kesertaan Ber KB CPR 68,50 %	TFR = 2,1 LPP = 1,71 % * TFR = Total Fertility Rate

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Reproduksi Kampung Keluarga Berencana)	Cilacap. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK / Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat; Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu : "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia "; Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.	Peningkatan Jumlah dan kualitas materi dan persebaran informasi tentang Program KKBPK	Persentase kesertaan ber KB MKJP 28 % dari semua mix kontrasepsi Persentase pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK 10%	*LPP = Laju Pertumbuhan Penduduk
20	DISHUB	SMART KIR BANG BADE (Sistem Manajemen Uji KIR Terintegrasi Bangga Mbangun Desa)	Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor sejak tahun 2018 sudah secara online menggunakan Aplikasi yang bernama SMART KIR BANG BADE. Aplikasi SMART KIR BANG BADE (Sistem	Terciptanya pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara online	Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor Wajib Uji target tahun 2026 : 97,66 %	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ target tahun 2026 : 65,54 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Manajemen Uji KIR Terintegrasi Bangga Mbangun Desa). Aplikasi ini merupakan aplikasi online untuk: a. Cek Jadwal Uji KIR, b. Pelayanan Informasi tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, c. Informasi Pelayanan dan Persyaratan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, dan d. Epayment yaitu pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap yang dapat dilakukan secara online sehingga mempermudah pemilik kendaraan wajib uji dalam melakukan transaksi pembayaran, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Bank Jateng.			
		Peta Rambu lalu lintas Menggunakan Google MyMaps	Peta Rambu Lalu Lintas Menggunakan <i>Google MyMaps</i> merupakan salah satu upaya penyediaan sistem informasi terkait rambu lalu lintas berbasis geospasial. Hal ini perlu untuk dilakukan di era digital ini guna memudahkan aksesibilitas pengguna informasi, mengumpulkan hasil inventarisasi data rambu lalu lintas, serta data pengamatan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kinerja	Tersedianya peta digital Rambu Lalu Lintas menggunakan <i>Google MyMaps</i>	Target kinerja Rasio Perlengkapan Jalan Tahun 2026 : 0,58	Tersedia sistem informasi rambu lalu lintas yang lebih efisien dan mudah diakses untuk meningkatkan kinerja rasio perlengkapan jalan

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			rambu lalu lintas. Peta Rambu Lalu Lintas Menggunakan <i>Google MyMaps</i> menyediakan <i>database</i> lokasi, jenis rambu, dan kondisi rambu lalu lintas yang sudah terpasang untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pemeliharaan rambu lalu lintas, serta menyediakan <i>database</i> kebutuhan pemasangan rambu lalu lintas untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengadaan / penyediaan rambu lalu lintas baru. Dengan demikian, akan meningkatkan kinerja penyediaan perlengkapan jalan sebagai bagian untuk mendukung RUNK LLAJ menuju Indonesia <i>Zero Accident</i> .			
21	Dinas Perikanan	Membuka Gerai Asuransi Mandiri Terpercaya (SIMANTAP)	Gerai Asuransi Mandiri Terpercaya (SIMANTAP) Inovasi Gerai Asuransi Mandiri Terpercaya didasari oleh Undang-Undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan. Untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran asuransi mandiri nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap telah	Terselenggaranya gerai – gerai pelayanan pendaftaran asuransi mandiri di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan target tahun 2026 : 100 %	Produksi Perikanan Tangkap target tahun 2026 : 27500 ton/tahun

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			membuka gerai – gerai pelayanan pendaftaran asuransi mandiri di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap yang dekat dengan nelayan seperti: a. Kecamatan Adipala, b. Kecamatan Cilacap Tengah (Kelurahan Kutawaru), c. Kecamatan Cilacap Selatan (Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap), d. Kecamatan Nusawungu (Desa Jetis), e. Kecamatan Patimuan.			
		Respon Cepat penanganan Penyakit Ikan dengan Aplikasi Berbasis Android	Respon Cepat penanganan Penyakit Ikan dengan Aplikasi Berbasis Android Dalam rangka mempercepat penanganan penyakit ikan di Kabupaten Cilacap, maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan melakukan sosialisasi aplikasi berbasis android kepada para pembudidaya ikan di Kabupaten Cilacap	Terciptanya penanganan penyakit ikan yang cepat	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan target tahun 2026 : 100 %	Produksi perikanan budidaya target tahun 2026 : 16500 ton /tahun
		Lelang malam pada TPI Menganti Kecamatan Kesugihan dan TPI Jetis Kec. Nusawungu	Dalam rangka pemenuhan pencapaian target produksi perikanan tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan pengurus TPI Menganti Kecamatan Kesugihan dan TPI Jetis Kecamatan Nusawungu mengadakan lelang malam agar nelayan dapat segera melakukan bongkar hasil	Terlaksananya Lelang malam pada TPI agar hasil tangkapan ikan segera dai bongkar	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan target tahun 2026 : 100 %	Produksi Perikanan Tangkap target tahun 2026 : 27500 ton/tahun

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			tangkapan ikan segera setelah didaratkan.			
		Gervikan (Gerakan Vaksinasi Ikan) pada Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	Merupakan gerakan agar ikan semakin sehat dan produktif dalam rangka peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.	Terciptanya ikan yang sehat dan produktif	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan target tahun 2026 : 100 %	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) target tahun 2026 : 44.000 ton / tahun
		SIREKSOBUDI (Pelayanan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi Dengan Sistem Rekomendasi Pembelian Solar Bersubsidi)				
22	Dinas Pertanian	"LAPAK PETANI"	Lapak Petani merupakan kegiatan jual beli langsung antara petani produsen selaku penjual dengan masyarakat selaku konsumen. Lapak Petani berbeda dengan toko tani dan pasar murah. Harga di Lapak Petani ditentukan sendiri oleh petani dan tentunya lebih murah dari harga pasar pada umumnya. Tujuan Lapak Petani adalah untuk memperpendek rantai distribusi hasil	Terwujudnya sarana untuk kegiatan jual beli langsung antara petani produsen selaku penjual dengan masyarakat selaku konsumen	Persentase peningkatan kelas kelompok tani target tahun 2026 : 8 %	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) target tahun 2026 : 64,76 kw/ha

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			pertanian, meningkatkan aksesibilitas hasil pertanian oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan peningkatan margin/selisih harga jual hasil pertanian. Dengan tag line “Panenane Dhewek, Adol Dhewek, Regane Murah, Kabeh Bungah, Tekani Tukoni, Petani Cilacap Teyeng”. Saat ini, inovasi ini sudah merambah ke Lapak Petani Online berbasis website atas kerjasama dengan Politeknik Cilacap.			
		Sistem Informasi Pertanian Tanaman Pangan Terkini (SIPETANI)	Merupakan aplikasi pelaporan data pertanian tanaman pangan yang dilaporkan atau diinput secara online yang memuat data-data pertanian tanaman pangan berupa data harian, bulanan, dan tahunan. Aplikasi ini mempermudah dan mempercepat penyajian data yang diperlukan oleh skateholder. Penyajian data tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) sebagai pendukung dalam penyusunan kebijakan yang menunjang dalam peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan.	Terciptanya aplikasi memuat data-data pertanian tanaman pangan berupa data harian, bulanan, dan tahunan.	Produksi Tanaman Pangan target tahun 2026 : 4.037.934 ton	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) target tahun 2026 : 64,76 kw/ha

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
23	DPKUKM	Aplikasi NEW PASARKU	Sistem <i>host to host</i> penerimaan retribusi pelayanan pasar yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Inovasi ini mampu menyederhanakan pelayanan publik.	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal target tahun 2026 : 0,45 %	Persentase pertumbuhan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting target tahun 2026 : 5,72 %
		Aplikasi CIBLON	Merupakan aplikasi promosi dan penjualan secara online.	Terciptanya aplikasi pemasaran produk UMKM yang mudah dipahami dan digunakan oleh para pelaku UMKM serta konsumen baik dari unsur pemerintah, swasta maupun umum dalam mendapatkan	Meningkatnya pertumbuhan dan fasilitasi Usaha Mikro tahun 2026 : 2,75%	Meningkatnya promosi produk UMKM, memperluas jangkauan pemasaran pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap dan mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk UMKM.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				produk UMKM Cilacap		Target jumlah UMKM difasilitasi pemasaran tahun 2026 : 1.858 UMKM
24	SETDA	SISUKMA	Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan perintah sebagai penyedia layanan belum dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan. Melalui Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan publik.	Terciptanya aplikasi yang melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah target tahun 2026: 100 %	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik target tahun 2026: 93 (Zona Hijau)
		E- SAKIP terintegrasi dg e-planning dan e-budgeting	Melalui e Sakip Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah dapat memantau kinerja bawahan setiap saat jika diperlukan karena bisa dimonitor secara langsung melalui laptop, tablet maupun smartphone.	Terciptanya aplikasi yang membantu pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja Perangkat	Persentase koordinasi bidang Pemerintahan target tahun 2026 : 100 %	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik target tahun 2026 : 93 (zona Hijau)

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Dengan demikian pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai target yang ditetapkan.	Daerah secara mudah dan sesuai target.		
		E-tendering	Merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara online, terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik. E-tendering dilakukan untuk semua cara pengadaan barang/jasa baik pengadaan langsung maupun tender.	Merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara online, terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik. E-tendering dilakukan untuk semua cara pengadaan barang/jasa baik pengadaan langsung maupun tender.	Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.	Tahun 2023 prosentase Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100% secara elektronik. Target Tahun 2026: 100%
		E-katalog lokal	Merupakan aplikasi belanja online untuk mendukung pengadaan barang/jasa yang menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemda dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam e-katalog	Terciptanya aplikasi yang membantu meningkatkan peran serta usaha UMKM serta meningkatkan penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	Pada 2023, persentase target belanja e-Purchasing 30% dari pagu anggaran. Target Tahun 2026:100%	Persentase Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			lokal menampilkan produk UMKM dan penyedia lokal.			
		SI PEKA (Sistem Informasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas)	Merupakan inovasi yang bertujuan memudahkan monitoring data teknis, data pemeliharaan (jenis dan biaya), penggunaan bbm dan pajak kendaraan dinas di Lingkungan Sekrtetariat Daerah kabupaten Cilacap.			
		SIMPOKAPBD	Merupakan inovasi yang bertujuan menyediakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan operasional kegiatan APBD baik secara fisik maupun keuangan berdasarkan laporan rutin bulanan OPD/Unit Kerja melalui sebuah sistem informasi dan sebagai penunjang terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan Belanja APBD Kabupaten Cilacap.	Terciptanya aplikasi yang menyediakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan operasional kegiatan APBD baik secara fisik maupun keuangan berdasarkan laporan rutin bulanan OPD/Unit Kerja.	Persentase koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan target tahun 2026 : 100 %	Persentase penyerapan APBD target tahun 2026 : 95 %
25	SETWAN	E-risalah	Adalah aplikasi pencatat hasil rapat secara otomatis yang mengubah suara menjadi dalam bentuk tulisan sehingga laporan risalah rapat-rapat dapat tertulis lengkap.			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
26	Inspektorat	Aplikasi E-Kontak	Yaitu Konsultasi dan Tanya Kami-secara elektronik berbasis <i>smarthphone</i> , yang isinya tentang Konsultasi Pengawasan. Inovasi ini dicetuskan sebagai solusi karena selama ini upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan masih minim, karena lebih banyak kegiatan audit yang dilakukan oleh APIP sifatnya pos audit. Pejabat fungsional Auditor maupun pengawas Pemerintah (P2) pada Inspektorat Kabupaten Cilacap akan menyumbangkan keahlian dan kompetensi secara insentif dengan memberikan layanan konsultasi pengawasan dengan maksud untuk memberikan keyakinan, peringatan dini dan konsultasi dalam membangun Pemerintahan yang baik dan bersih	Terciptanya aplikasi yang dapat memberikan layanan konsultasi pengawasan dengan maksud untuk memberikan keyakinan, peringatan dini dan konsultasi dalam membangun Pemerintahan yang baik dan bersih	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik target tahun 2026 : 100 %	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3 target tahun 2026 : 90%
		Sistem Informasi Monitoring Bebas Temuan (SIMON BETE)	Berfungsi untuk mempercepat Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan dan menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban tugas yang diberikan ditengah berbagai tugas mandatori lain yang harus dilaksanakan.	Terciptanya aplikasi untuk mempercepat Pelayanan	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik target tahun 2026 : 100 %	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3 target tahun 2026 : 90%

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Inspektorat Cilacap Mobile				
27	BPPKAD	"Simpel Pakde Olin" Sistem Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Online	Sebuah Inovasi Dalam Strategi untuk meningkatkan pelayanan daerah khususnya PBB-P2 di Kabupaten Cilacap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan pajak daerah dari PBB-P2. Tujuan dari "Simpel Pakde Olin" adalah meningkatkan objektifitas data bangunan untuk Pajak PBB-P2; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data demi tercapainya peningkatan potensi pendapatan daerah; meminimalisir objek pajak yang belum terdata; meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya update data demi terciptanya tertib administrasi; memudahkan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) di daerah tertentu; dan memberikan rasa keadilan dalam penetapan pajak dengan mempertimbangkan akses jalan pada objek pajak PBB-P2. Data yang telah dimutakhirkan berdasarkan kondisi riil objek dan subjek pajak akan berpengaruh terhadap peningkatan ketetapan pajak terutang sehingga diharapkan bisa meningkatkan	Terciptanya strategi meningkatkan objektifitas data bangunan untuk Pajak PBB-P2, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data, meminimalisir objek pajak yang belum terdata, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya update data, memudahkan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) di daerah tertentu	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD target tahun 2026 : 0,053 %	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD target tahun 2026 : 27,72%

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			potensi pendapatan dari sektor PBB-P2. Satu mutasi yang diajukan mengakibatkan terupdatenya 5 data bangunan lainnya, sehingga target peningkatan pendapatan yang diharapkan akan tercapai secara optimal.			
		SMART PBB				
28	BAPPEDA	Jurnal Inovasi Daerah (JID)	Merupakan terobosan yang diselenggarakan BAPPEDA Kabupaten Cilacap guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam publikasi berbagai kajian ilmiah, diutamakan hasil kajian yang mendukung isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Untuk mendukung pengelolaan JID didukung dengan aplikasi <i>Open Journal System</i> (OJS). Jurnal Inovasi Daerah diagendakan terbit secara berkala 2 kali dalam setahun. Jurnal Inovasi Daerah diterbitkan secara online melalui Open Journal System (OJS) dan secara cetak. Artikel ilmiah yang terkumpul dan terpublish dalam Jurnal Inovasi Daerah selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh OPD, perguruan tinggi dan Sektor Bisnis se-Kabupaten Cilacap, secara cetak dan online untuk dapat dijadikan	Terbit 2 (dua) kali setahun	Persentase kesesuaian tema artikel JID dengan isu strategis daerah Target 2026 : 30%	Persentase pemanfaatan artikel JID sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan daerah Target 2026 : 30%

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			referensi dalam pengambilan kebijakan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.			
		GUNTING BAJAK SUTRA (Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Penyediaan Bahan Kajian Kebijakan Penangan Isu Strategis Daerah)	GUNTING BAJAK SUTRA (Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Penyediaan Bahan Kajian Kebijakan Penangan Isu Strategis Daerah)	Merupakan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis riset (Research Based Planning) dengan menyinkronkan kebutuhan riset OPD dengan Riset yang dilakukan Oleh Perguruan Tinggi untuk membantuangani isu strategis daerah	1. Database hasil riset perguruan tinggi di Kabupaten Cilacap 2. Data inventarisasi kebutuhan riset dari perangkat daerah	Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti : 61 %
		E-Dalev	Aplikasi eDalev atau elektronik Pengendalian dan Evaluasi RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.	Memudahkan Pemerintah Daerah dalam pemantauan pengendalian perencanaan dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah, serta menyajikan data secara lengkap.	Dengan penggunaan aplikasi eDalev diharapkan Pemerintah Daerah akan lebih mudah dalam proses pengendalian pembangunan, mempermudah dalam mengetahui capaian indikator kinerja dan memudahkan proses evaluasi, pengawasan,	Mendukung pencapaian indikator tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah sebesar 69,2% pada tahun 2026 (akhir RPD)

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
					pelaporan anggaran mengukur keberhasilan pembangunan. realisasi dalam	
29	BKPPD	CISA (Cilacap Smart ASN)	Merupakan inovasi untuk up to date data dan unggah dokumen kepegawaian secara mandiri oleh ASN melalui media <i>Smartphone</i> . Modul ini terintegrasi dengan SIASN BKN sehingga secara otomatis akan memutakhirkan data pada SIASN BKN.			
30	Kecamatan Cilacap Selatan	Program mba “LILA SMS” (Lima Langkah Satu Menit Selesai)	Memberikan kemudahan kepada warga masyarakat di Wilayah Kecamatan Cilacap Selatan untuk mengurus legalisasi surat-surat dan surat keterangan lainnya dengan mudah, murah lebih cepat dan hemat biaya karena layanan ini menjadi lebih singkat. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini adalah Koramil 01 Cilacap Selatan, Polsek Cilacap Selatan, Semua Seksi, Subbag dan karyawan- karyawati di Kecamatan Cilacap Selatan, Lurah dan perangkatnya yang dibantu oleh perangkat RW, RT dan Kelompok PKK RT dan RW.	Terciptanya pelayanan legalisasi surat-surat dan surat keterangan lainnya yang mudah, murah lebih cepat dan hemat biaya	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		KLINTUNG ASMARA (Keliling Langsung Atasi Stunting Sekaligus Serap Aspirasi dan Pelayan Masyarakat)				
31	Kecamatan Cilacap Tengah	<i>Pelayanan Paten Tanpa Coca Cola (Covid-19, Calo, Coin, Lama)</i>	Dalam hal ini Kecamatan Cilacap Tengah inovasi mengemukakan inovasi dengan judul <i>Pelayanan Paten Tanpa CoCa CoLa (Covid-19, Calo, Coin, Lama)</i> . Maksud dari judul ini yaitu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Cilacap Tengah diharapkan terhindar dari wabah Covid-19, tidak menggunakan jasa calo, tidak mengeluarkan coin atau uang, dan waktu pelayanan tidak lama.	Hasil kegiatan pelayanan yang dirasakan langsung yaitu masyarakat memiliki kesadaran untuk datang sendiri tanpa perantara alias calo, karena dengan menggunakan jasa calo masyarakat akan ditarik biaya. Bagi masyarakat yang mengurus dokumen dengan persyaratan yang lengkap pasti pelayanan akan lebih cepat. Sebagai apresiasi kepada masyarakat yang datang sendiri akan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				diberikan souvenir masker.		
		Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Jogo Tonggo Stunting (JOTOS) di Kecamatan Cilacap Tengah				
32	Kecamatan Cilacap Utara	Inovasi Budaya Kerja "SMART PRO"	Dalam upaya meningkatkan motivasi dan semangat kerja, Kecamatan Cilacap Utara mempunyai inovasi budaya kerja "SMART PRO" yaitu Semangat, Melayani, Aktif, Responsif, Terpercaya, dan Profesional. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan semangat kerja untuk peningkatan kinerja.	Terciptanya Semangat kerja pegawai kecamatan Aktif, Responsif, Terpercaya, dan Profesional	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
		Resolusi UMKM Berdaya Kecamatan Cilacap Utara	Menghimpun pelaku usaha mikro di wilayah Kecamatan Cilacap Utara, sehingga memiliki suatu wadah untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas dan memasarkan produk lokal.			
		SITI MAKNYUS (Sistem Manajemen Kombinasi untuk				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Pelayanan Mudah dan Bagus)				
33	Kecamatan Jeruklegi	Pelayanan Legalisasi Cepat (NANSIPAT)	Percepatan durasi pelayanan sesuai dengan situasi dan kondisi di era pandemi Covid-19.	Terciptanya pelayanan cepat dan tanggap	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
		Klinik BUMDES Kecamatan Jeruklegi	Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Jeruklegi yang terdiri dari 13 Desa utamanya di BUMDesa yang mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat yaitu sebagai sarana meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi masyarakat.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka perekonomian masyarakat.	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban target tahun 2026 : 100 %	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan target tahun 2026 : 100 %
		DISAJI KEMAS (Digitalisasi Sistem Pelayanan Perijinan Kegiatan Masyarakat) Di Kecamatan Jeruklegi				
34	Kecamatan Kawunganten	PENDAPAT (Pesan-Datang-Dapat)	Memberikan kemudahan dan kecepatan waktu, kepastian layanan khusus bagi pemohon Perijinan SIUP tertentu, IUMK dan Pemohon kepesertaan listrik bersubsidi.	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan pasti pemohon Perijinan SIUP	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				tertentu, IUMK dan Pemohon kepesertaan listrik bersubsidi		
35	Kecamatan Bantarsari	SITINGGIL BANGSARI (Sistem Informasi Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Ketertinggalan dengan Bangga mBangun Desa ala Bantarsari)	Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk mengawal penyaluran bantuan bantuan sosial agar tepat sasaran dan memberi masukan dalam sinkronisasi penyusunan Basis Data Terpadu Keluarga Sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan intensitas koordinasi antar dinas instansi dan pemerintah desa untuk menggali data ataupun informasi adanya masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh program pengentasan kemiskinan atau masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan tertentu. Dari data yang ada dirumuskan kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan setiap Jum'at pertama dan keempat setiap bulan secara berkeliling dari satu desa ke desa lainya. Kegiatan diawali dengan senam bersama masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan pengumpulan dana. Dari dana yang terkumpul disalurkan bantuan kepada keluarga sasaran yang diwakili oleh Forkompimca.	Tumbuh kembalinya budaya gotong royong, solidaaritas dan rasa empati dimasyarakat secara umum, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bahwa pemerintah hadir disetiap lini kehidupan masyarakat.	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
36	Kecamatan Kesugihan	Gema Kesuma (Gerakan Menyapa Masyarakat Kesugihan Untuk Melayani)	Gema Kesuma adalah upaya Inovasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kesugihan, yaitu Gerakan Menyapa Masyarakat Kesugihan Untuk Melayani. Tujuan dari gerakan ini yaitu meningkatkan kinerja pelayanan menuju Kesugihan yang sejahtera, Unggul dan Mandiri. Inovasi ini berupa Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan publik melalui aplikasi <i>Whatsapp</i> (nomor telah dipublikasikan). Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui nomor <i>Whatsapp</i> tanpa datang langsung ke kantor kecamatan sehingga operator dapat menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan melalui media sosial. Selain lebih efektif dan efisien, pelayananpun menjadi lebih mudah dan cepat sehingga kepuasan masyarakat meningkat.	Terciptanya Gerakan Menyapa Masyarakat Kesugihan Untuk Melayani nasyarakat	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
		Gerakan Mewujudkan "SaTeADe" Sadar Tertib Arsip Desa Melalui Video Tutorial Pengelolaan ArsipDi				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Kecamatan Kesugihan				
37	Kecamatan Adipala	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Maos	Pembinaan Terintegrasi dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara n Pemerintahan dan Hasil Pembangunan di Desa (PETERPAN TERBANG)	Merupakan kegiatan pembinaan kepada seluruh aparatur desa mulai dari perangkat desa, bidan desa, linmas dan seluruh perangkat yang diberikan insentif oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah kabupaten. Maksud dan tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat <i>entrepreneur</i> dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Goverment</i> . Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan manajemen apatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat.	Terlaksananya pembinaan kepada seluruh aparatur desa mulai dari perangkat desa, bidan desa, linmas dan seluruh perangkat	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban target tahun 2026 : 100 %	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan target tahun 2026 : 100 %
		MAS SEBAKUL (Maos Bersinergi				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui UMKM Lokal)				
39	Kecamatan Sampang	SDTK (Sistem Data Terpadu Kecamatan Sampang)	Merupakan inovasi berupa portal informasi dan data terbuka mengenai pemerintahan/organisasi/instansi/ desa yang ada di wilayah Kecamatan Sampang, yang tersedia secara bebas untuk dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Data terbuka dalam kaitannya dengan pemerintahan dalam salah satu upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat. Maksud dan tujuan SDTK adalah sebagai komitmen konkret Kecamatan Sampang, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.	Terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
40	Kecamatan Kroya	Lapis Kupas	Merupakan layanan penjemputan warga disabilitas yang hendak melakukan perekaman E-KTP di Kecamatan Kroya.	Terciptanya layanan penjemputan warga disabilitas	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
41	Kecamatan Binangun	Jumat berkah dengan memberikan bantuan	Kegiatan "JUM'AT BERKAH" di Kecamatan Binangun merupakan Kegiatan Bantuan Sosial yang diberikan kepada Masyarakat miskin	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Sosial yang diberikan	Persentase implementasi	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		kepada masyarakat yang kurang mampu	tidak mampu yang belum masuk ke dalam Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/ Basis Data Terpadu (BDT) dengan menginventarisir keluarga yang tidak mampu dengan memberikan Paket sembako, santunan anak yatim dan lasia serta bedah rumah, bantuan peralatan sekolah, seragam, dan sarana transportasi ke sekolah, serta bantuan biaya pengobatan, iuran asuransi kesehatan dan operasional <i>ambulance</i> .	kepada Masyarakat miskin	pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	
42	Kecamatan Nusawungu	Integritas Tim Kerja “Pelunasan PBB”	Merupakan salah satu cara yang diterapkan untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.	Terciptanya Tim Kerja “Pelunasan PBB”	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
43	Kecamatan Sidareja	PANSER PBB (Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan secara Serempak)	Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat sadar kewajibannya sebagai wajib pajak dan pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dari tingkat RT yang kemudian berjenjang sampai tingkat desa. Masing – masing desa punya inovasi sendiri, ada yang menggunakan cara menabung setiap bulan di RT masing – masing sehingga pada saat SPPT pajak sudah ada Masyarakat tinggal menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.	Tersedianya pelayanan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan secara Serempak	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		KELORISASI (Gerakan Menanam dan Mengolah Tanaman Kelor Untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja)	KELORISASI (Gerakan Menanam dan Mengolah Tanaman Kelor Untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja)	Pelaksanaan program Kelorisasi untuk pencegahan Stunting dilakukan oleh Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan Sidareja yang terdiri dari Camat Sidareja, Forkopimcam Sidareja, Puskesmas Sidareja, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sidareja, Ketua TP PKK Kecamatan Sidareja, Kepala Desa se Kecamatan Sidareja, Ketua TP PKK Desa se Kecamatan Sidareja beserta anggota, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sidareja, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sidareja, Koordinator PKH Kecamatan Sidareja. Kader KPM se Kecamatan Sidareja	Program Kelorisasi untuk mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja memberikan hasil yang cukup baik. Pasalnya, dari evaluasi data hasil penimbangan serentak dapat diketahui bahwa ada peningkatan tinggi badan untuk beberapa balita di setiap pelaksanaan penimbangan.	Meningkatnya pemenuhan gizi bagi bayi/balita berpotensi stunting

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				dan Kader Posyandu se Kecamatan Sidareja serta masyarakat di Kecamatan Sidareja. Adapun pelaksanaan kegiatan program Kelorisasi diantaranya sebagai berikut : Rembug Stunting, Gerakan Menanam Pohon Kelor Di Halaman Rumah, Mengolah Tanaman Kelor Menjadi Salah Satu Menu Makanan Pada Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Bayi dan Balita Berpotensi Stunting		
44	Kecamatan Kedungreja	PATEN ONLINE	Yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu dengan memanfaatkan media online secara online. Inovasi pelayanan yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan fasilitas media sosial seperti website, whatsapp, instagram, facebook, twitter dan sarana media sosial yang lain untuk mempermudah warga masyarakat			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			dalam mendapatkan informasi maupun pelayanan pada Kecamatan Kedungreja. Ketersediaan fasilitas ini diharapkan mampu menambah nilai lebih bagi pelayanan PATEN Kecamatan Kedungreja dan berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.			
45	Kecamatan Gandrungmangu	“Gertak Paksanen” (Gerakan Serentak Pembayaran PBB P2 Pasca Panen)	Untuk mempercepat pelunasan pajak PBB P2 di Kecamatan Gandrungmangu, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Pembayaran Pajak PBB P2. Inovasi kreatif dan inovatif ini ditujukan untuk mengatasi situasi kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak dan bagaimana petugas pemungut pajak melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam rangka percepatan pelunasan pajak PBB P2. Gertak paksanen dilaksanakan pada saat paca panen raya dengan pemikiran bahwa masyarakat Gandrungmangu mayoritas bermata pencaharian bertani dan buruh tani sehingga ini tidak memberatkan kepada masyarakat karena proses pembayaran dapat di lakukan dengan memberikan padi kering.	Terwujudnya pelunasan pajak PBB P2 di Kecamatan Gandrungmangu yang tepat waktu	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		PAKDE MUNCER (Peningkatan Kualitas Desa Menuju Desa Cerdas Melalui Basis Data Desa)				
46	Kecamatan Patimuan	Gertak Palu Mesra (Gerakan Serentak Pajak Lunas Masyarakat Sejahtera)	Inovasi Gertak Palu Mesra (Gerakan Serentak Pajak Lunas Masyarakat Sejahtera) merupakan suatu inovasi yang bertujuan untuk mempercepat pelunasan pajak PBB-P2 di kecamatan Patimuan dan juga meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi melunasi Pajak PBB-P2 dengan cara melakukan pembayaran secara serentak dilakukan di tiap-tiap Desa dan pelaksanaanya dilaksanakan dengan dibarengi acara2 besar yang diadakan oleh Desa seperti hari jadi Desa dll.	Terwujudnya pelunasan pajak PBB-P2 diKecamatan Patimuan di awal waktu.	Terciptanya budaya taat membayar pajak PBB-P2 di awal waktu.	Peningkatan Prestasi di bidang Pajak PBB-P2 meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.
47	Kecamatan Cipari	Simpel Umik (Sistem Informasi Pendataan Pelaku Usaha Mikro Kecil)	Dengan inovasi ini diharapkan pendataan UMK bisa menjadi lebih cepat, mudah , efektif dan data yang dihasilkan valid. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekacauan data pada saat pendataan pelaku usaha mikro kecil untuk pemberian bantuan sosial oleh pemerintah dalam rangka			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			meringankan beban pelaku usaha mikro kecil yang terdampak pandemi Covid-19.			
		SIPUSPA (Sistem Informasi Pengelolaan Unit Bank Sampah)				
48	Kecamatan Karangpucung	LANPU RANKA BISO (Pelayanan Publik Karangpucung Berbasis ISO)	Kecamatan Karangpucung menjadi pilot project pertama pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menerakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada tahun 2012. Inovasi Kecamatan Karangpucung untuk menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ini menurut kami sangat inovatif karena Kecamatan Karangpucung adalah satu-satunya kecamatan yang melaksanakan inovasi ini pada tahun 2012. Dengan menerapkan SMM ISO 9001, pengelolaan sistem manajemen organisasi di Kecamatan Karangpucung mempunyai perbedaan dengan kecamatan lain, yaitu arsip aktif dan inaktif tertata dengan baik, setiap seksi/subbag memiliki sasaran mutu/target kinerja yang harus dicapai setiap tahun, Ada pemeriksaan intern/audit internal	Terciptanya pelayanan yang prima kepada masyarakat dan tidak ada pungutan liar dalam pelayanan.	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			antar seksi/subbag yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. ada Forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun berjalan, dan ada pemeriksaan ekstern/audit eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu badan sertifikasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.			
49	Kecamatan Cimanggu	Sistem Informasi Rencana Kerja (SiRenja)	Merupakan inovasi yang dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat para Kasi dan Subbag dalam mengusulkan kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja.	Sosialisasi Aplikasi Sirenja.	Terkumpulnya usulan program kegiatan dari masing-masing seksi dan subag.	Terlaksananya koordinasi antar seksi dan subag
		PULIK MANG OLEN SISWA (Pelayanan Publik Cimanggu Online Berbasis WA Web)				
50	Kecamatan Majenang	Gerakan Bangun Potensi Desa Unggulan (GERBANG SI SANGGUL)	Merupakan media untuk memberikan informasi dan pelayanan publik serta sebagai media promosi potensi-potensi unggulan yang ada di desa-desa pada wilayah Kecamatan Majenang sehingga bisa meningkatkan di sektor UMKM,	Terciptanya katalog/media promosi digital atas produk unggulan di sektor UMKM, Kesenian, Budaya dan Pariwisata yang dapat di akses secara	Terciptanya partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menggunakan produk unggulan daerah meningkat.	Persentase pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, kesenian, budaya dan pariwisata meningkat.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			kesenian, budaya, maupun pariwisata di Kecamatan Majenang	mudah oleh masyarakat.		
		BIMAKU DESA (Buku Instrumen Monitoring Administrasi Dan Keuangan Desa)				
51	Kecamatan Wanareja	KK Online	KK Online merupakan upaya inovasi dengan sistem pendekatan pelayanan secara online, dimana petugas PATEN akan memferivikasi berkas ajuan dokumen kependudukan pemohon melalui Nomor Whatsapp yang telah diberikan setelah data sesuai dengan ketentuan. Berkas akan diproses dan diajukan melalui sistem TTE dan bukti fisik penerbitan KK (Kartu Keluarga) dapat kembali dikirim kepada pemohon melalui PDF atau dapat diambil secara langsung ke kecamatan, selain perekaman KTP, Izin Hajat, dispensasi nikah, legalisasi tertentu, merupakan upaya Kecamatan Wanareja dalam mengoptimalkan sistem pelayanan terhadap kepuasan masyarakat.			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		“SI MAS WARIS “ INOVASI PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI WA SECARA GRATIS				
52	Kecamatan Dayeuhluhur	JEMPOL GESIT (Jemput bola cepat dengan menggunakan sarana komunikasi nomor Telpon)	Adalah inovasi pelayanan dimana masyarakat dapat langsung telpon ke nomor yang telah disediakan untuk meminta pelayanan yang dibutuhkan, dan bisa jemput bola langsung ke desa/rumah masyarakat yang membutuhkan pelayanan.			
53	Kecamatan Kampung Laut	Program Sistem Pelayanan Ora Ngresula (SIPON)	SIPON memanfaatkan media sosial <i>WhatsApp</i> dimana prosesnya saat masyarakat datang ke kantor desa untuk mengurus persyaratan maka perangkat desa akan mengambil gambar persyaratan dokumen masyarakat, untuk selanjutnya gambar tersebut dikirim melalui <i>WhatsApp</i> ke petugas operator di kecamatan. Berdasarkan gambar yang dikirimkan operator di kecamatan melakukan pemeriksaan apakah persyaratan sudah lengkap atau belum, jika belum kekurangan persyaratan akan diinformasikan ke operator di desa. Jika sudah lengkap maka operator kecamatan akan	Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan khususnya membuat KK yang mudah dan hemat biaya	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			memproses pengurusan dokumen dimaksud. Estimasi penyelesaian dokumen jika persyaratan sudah lengkap sekitar 10 – 30 menit. Sehingga nantinya saat masyarakat datang ke kecamatan hanya mengirimkan persyaratan dan mengambil dengan dokumen kependudukan yang sudah diproses tadi.			

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Pendanaan Daerah

Pada tahun 2025 pendapatan daerah Kabupaten Cilacap diproyeksikan sebesar Rp. 3,110 trilyun yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 1,031 trilyun, Dana Transfer di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 2,075 trilyun dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 3,432 milyar. Sementara itu, belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 3,491 trilyun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2,328 trilyun, belanja modal sebesar Rp. 529,964 milyar, belanja tidak terduga sebesar Rp.10 milyar, serta belanja transfer sebesar Rp. 622,747 milyar. Pembiayaan daerah untuk menutup surplus antara pendapatan dan belanja diproyeksikan sebesar Rp. 380,735 milyar.

Belanja daerah tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2025. Belanja daerah tahun 2025 digunakan untuk: 1) Belanja Operasi, di antaranya untuk belanja gaji pegawai dan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah dan DPRD; belanja barang/jasa, antara lain untuk operasional kegiatan rutin kantor; belanja hibah, antara lain untuk lembaga pendidikan umum dan keagamaan tingkat PAUD, SD dan SMP, BOP Madin, TPQ dan Ponpes, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan, kelompok tani; dan belanja bantuan sosial berupa bantuan biaya pendidikan untuk siswa miskin dan perbaikan rumah tidak layak huni; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan mendesak; 4) Belanja Transfer berupa bagi hasil pajak serta bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selengkapnya proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025
	PENDAPATAN DAERAH	3.110.388.764.542
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.031.189.898.742
1.1.	Pajak Daerah	504.117.000.000
1.2.	Retribusi Daerah	372.555.738.138
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	61.650.000.000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	92.867.160.604
2.	Pendapatan Transfer	2.075.766.865.800
2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.906.563.390.800
2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.203.475.000
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.432.000.000
3.1.	Pendapatan Hibah	3.432.000.000
	BELANJA DAERAH	3.491.124.031.100
1.	Belanja Operasi	2.328.412.087.203
1.1.	Belanja Pegawai	1.420.647.949.134
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	822.342.304.779
1.3.	Belanja Subsidi	1.045.200.000
1.4.	Belanja Hibah	74.203.383.290
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.173.250.000
2.	Belanja Modal	529.964.885.100
3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
4.	Belanja Transfer	622.747.058.797
4.1.	Belanja Bagi Hasil	51.971.550.000
4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	570.775.508.797
	Surplus/(Defisit)	(380.735.266.558)
	PEMBIAYAAN DAERAH	380.735.266.558
1.	Penerimaan Pembiayaan	385.735.266.558
1.1.	SiLPA	385.735.266.558
1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0
2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
2.2.	Penyertaan Modal Daerah	0

Sumber: Bappeda Kab. Cilacap

Proyeksi belanja daerah tahun 2025 selanjutnya dijabarkan dalam rencana program/kegiatan dengan pagu indikatif per OPD sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Pagu Indikatif Belanja OPD Tahun 2025

No	OPD	Pagu Indikatif 2025 *)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	753.232.839.260
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana **)	740.005.294.846
3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	89.988.227.272
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	370.848.294.509
5	Satuan Polisi Pamong Praja	17.885.642.204
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.598.720.649
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.784.193.482
8	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian	14.818.904.404
9	Dinas Ketahanan Pangan	14.863.544.702
10	Dinas Lingkungan Hidup	43.640.655.000
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.286.252.299
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.560.652.631
13	Dinas Perhubungan	23.495.289.266
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15.233.761.598
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.077.350.498
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	8.595.302.055
17	Dinas Perikanan	11.587.569.527
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	18.952.548.831
19	Dinas Pertanian	61.122.501.455
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	19.324.880.129
21	Sekretariat Daerah	98.099.388.058
22	Sekretariat DPRD	88.756.534.881
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	19.598.701.847
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	56.427.391.812
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD) ***)	632.747.058.797
26	Badan Pendapatan Daerah	26.902.986.540
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	172.396.038.562
28	Inspektorat	16.481.469.415
29	Kecamatan Cilacap Selatan	13.910.307.343
30	Kecamatan Cilacap Tengah	14.555.415.349
31	Kecamatan Cilacap Utara	14.332.747.026
32	Kecamatan Jeruklegi	2.935.717.228
33	Kecamatan Kawunganten	3.442.003.895
34	Kecamatan Bantarsari	2.346.696.870
35	Kecamatan Kesugihan	3.351.552.635
36	Kecamatan Adipala	3.235.552.497
37	Kecamatan Maos	3.022.112.225
38	Kecamatan Sampang	3.067.507.585
39	Kecamatan Kroya	2.991.536.769
40	Kecamatan Binangun	3.380.657.676
41	Kecamatan Nusawungu	3.184.097.386
42	Kecamatan Sidareja	3.118.667.149
43	Kecamatan Kedungreja	3.032.947.885

No	OPD	Pagu Indikatif 2025 *)
44	Kecamatan Gandrungmangu	2.855.860.040
45	Kecamatan Patimuan	2.565.516.720
46	Kecamatan Cipari	2.542.369.570
47	Kecamatan Karangpucung	3.019.560.068
48	Kecamatan Cimanggu	3.586.916.929
49	Kecamatan Majenang	3.404.980.442
50	Kecamatan Wanareja	2.936.408.708
51	Kecamatan Dayeuhluhur	2.165.603.210
52	Kecamatan Kampunglaut	2.807.895.899
53	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.019.405.467

Sumber: Bappeda Kab. Cilacap
*) Pagu Indikatif OPD terdiri dari belanja operasi dan belanja modal
**) Pagu indikatif termasuk belanja BLUD RSUD dan Puskesmas
***) Pagu indikatif OPD untuk belanja tak terduga dan belanja transfer

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 merupakan gambaran rencana kerja Pemerintah Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana kerja tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2023, permasalahan dan isu strategis RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 serta proyeksi pencapaian kinerja tahun 2024, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Di samping itu, RKPD juga berkedudukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan yang kemudian ditindaklanjuti sebagai alat analisis dan bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 menjadi pedoman perumusan untuk menyempurnakan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025. Program prioritas yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 dijabarkan ke dalam urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 bidang, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 18 bidang, urusan pilihan sebanyak 5 bidang, unsur pendukung urusan pemerintahan 2 bidang, unsur penunjang urusan pemerintahan sebanyak 5 bidang, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan masing-masing sebanyak 1 bidang sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendidikan diarahkan pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan fokus pada Penambahan Ruang Kelas Baru SD; Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD; Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dasar; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar; Pengadaan Mebel Sekolah Dasar; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar; Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar; Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama fokus pada Penambahan Ruang Kelas Baru SMP; Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama; Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama; Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SMP; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama fokus pada Pendampingan pencegahan perundungan kekerasan pada anak di SD dan SMP. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) fokus pada Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; Pengadaan Mebel PAUD; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD; Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD; Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD dan Kesetaraan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan berfokus pada Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan; Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan. Prioritas program ini adalah untuk kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SD, SMP, PAUD dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan yang difasilitasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah Warga Negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100%; Jumlah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100%; Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100%; Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina 71.48%; Persentase SD yang memiliki sarpras sesuai SNP 42,32%; Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP 53.88%.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan dalam Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan diarahkan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan fokus Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang Pendidikan 92,32%.

2. Urusan Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pembangunan Puskesmas; Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pengembangan Puskesmas; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas; Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi; Pengadaan Obat dan Vaksin; Pengadaan Bahan Habis Pakai; Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA; Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus; Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan *Universal Health*

Coverage (UHC); Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional; Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota; Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal); Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga; Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis; Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV); Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria; Pengelolaan Kawasan tanpa rokok. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya; Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%; Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100% termasuk prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting) 10,77%; Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara

usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Persentase desa/kelurahan STBM 40%; Persentase FKTP terakreditasi 100%; Persentase menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit 22%; Persentase pemanfaatan SIK terintegrasi di Fasyankes 75%; Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai 90,17%; Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi 100%; Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 87%.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan dalam program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase tenaga kesehatan teregistrasi 93%.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Kegiatan dalam program ini diarahkan pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan; Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan 100%.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan diarahkan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan

Sehat; Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM); Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 85,9%.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan dalam Program Penataan Bangunan Gedung diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota; Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase bangunan Pemerintah dalam kondisi baik 75,10%.

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Jalan diarahkan pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; Survey Kondisi Jalan/Jembatan; Pembangunan Jalan; Rekonstruksi Jalan; Rehabilitasi Jalan; Pemeliharaan Berkala Jalan; Pemeliharaan Rutin Jalan; Pembangunan Jembatan; Rehabilitasi Jembatan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 70%.

c. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan dalam Program Pengembangan Jasa Konstruksi diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Pengelolaan

Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi; Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 41,43%.

d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diarahkan pada Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota; Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah termasuk dalam rangka pemenuhan dokumen RDTR. Program ini diarahkan pada pencapaian Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 91%.

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Pembangunan Unit Air Baku; Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing; Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing; Normalisasi/Restorasi Sungai; Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai; Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik

49,09%; Persentase ketersediaan penunjang data SDA 61,3%; dan Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air 10,50%.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari 94,24%.

g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman; Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja; Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100%; Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 94% dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sebesar 4,3%.

h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan; Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan; Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan; Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Drainase dalam keadaan baik 93,60%.

- i. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase penanganan sampah 69,05%.

4. Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan dalam Program Pengembangan Perumahan diarahkan pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota; Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan; Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana; Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana; Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100%; Persentase penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota yang mengalami kerusakan 100%.

- b. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan dalam Program Kawasan Permukiman diarahkan pada Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh. Program ini

diarahkan pada pencapaian Persentase kawasan perumahan kumuh yang tertangani 90,31%.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan diarahkan pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan; Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan; Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian; Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik 88%.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan diarahkan pada Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 75%.

5. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan diarahkan pada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan; Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum termasuk keamanan dan ketertiban pasca pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang

Bernuansa Hak Asasi Manusia. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum, perda dan perkara 100%; Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100%; Persentase Linmas yang Dibina 100%.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK). Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat; Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana. Program ini diarahkan pada pencapaian Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%.

c. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan dalam Program Penanggulangan Bencana diarahkan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; Pelatihan Pencegahan

dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota; Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota; Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota; Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana; Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan; Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100%; Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%; Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%; dan Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi 100%.

6. Urusan Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan dalam Program Pemberdayaan Sosial diarahkan pada Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina 100%.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan dalam Program Rehabilitasi Sosial diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) tercapai 100%; dan indikator Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi 0,34%.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan sebesar 100%.

d. Program Penanganan Bencana

Kegiatan diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota tercapai 100%.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sebesar 60,25%.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Program diarahkan untuk pencapaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 32%.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan; Perluasan Kesempatan Kerja. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan dan Pengendalian LPTKS. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Job Fair/Bursa Kerja. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna

Penempatan. Program diarahkan untuk pencapaian Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota 50,65%.

c. Program Hubungan Industrial

Kegiatan diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan; Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota. Program diarahkan untuk pencapaian Persentase Perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui mediasi 100%; dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 40%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Kegiatan dalam Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG; Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Rasio Program dan kegiatan responsif gender di Perangkat Daerah 96%. Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif 25%; Persentase Organisasi Wanita yang Aktif 97%; Rasio korban kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 0,00006;

b. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha 57%;

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota; Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Keluarga yang terlayani PUSPAGA 0,00015%; dan persentase Kecamatan desa/kelurahan yang memiliki puspaga 76%.

d. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program diarahkan untuk pencapaian Prosentase pencapaian Desa / kelurahan Layak Anak 47%;

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program diarahkan untuk pencapaian persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar 0,000205%.

3. Urusan Pangan

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Kegiatan dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 179%; Persentase ketersediaan pangan 179%.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan; Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun; Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program ini diarahkan pada pencapaian Ketersediaan energi dan protein per kapita 100%; Persentase kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan 7,2%; Produksi Komoditas Perkebunan (Bidang Perkebunan) 62495,8 ton.

- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan; Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase daerah rentan rawan pangan 7,75%.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota ; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 81,42%.

4. Urusan Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Kegiatan dalam Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan diarahkan pada Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini diarahkan pada Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 100%.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Kegiatan diarahkan pada Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 100%.

- c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Kegiatan diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah. Program ini diarahkan pada Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah 100%.
- d. Program Penatagunaan Tanah
Kegiatan diarahkan pada Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah. Program ini diarahkan pada Persentase Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan 44%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan dalam Program Perencanaan Lingkungan Hidup diarahkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup 100% dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup 100%.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air 39,68%.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota; Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Program ini diarahkan pada pencapaian Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 0,44.

- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3; Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Kegiatan/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 100%.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase penataan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah yang ditindaklanjuti 100%.

- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan; Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Program diarahkan pada pencapaian Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan 62 kelompok; Persentase Sekolah Adiwiyata 71,07%.

- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota. Program diarahkan pada pencapaian Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti 100%.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Sampah; Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota; Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota; Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta; Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah. Program diarahkan pada pencapaian Persentase Pengurangan Sampah 14,3%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan dalam Program Pendaftaran Penduduk diarahkan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan; Penataan Pendaftaran Penduduk; Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan; Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk; Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk; Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk. Program diarahkan pada pencapaian Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 96%; Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama 28,3%; Perekaman KTP elektronik 99,49%; Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 30,35%.

b. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Pencatatan Sipil; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting; Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil. Program diarahkan pada pencapaian Kepemilikan akta kelahiran 94,4%; dan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 35,02%.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program diarahkan pada pencapaian Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara 100%.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Profil Kependudukan; Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain. Program diarahkan pada pencapaian Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun 100%.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penataan Desa

Kegiatan dalam Program Penataan Desa diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Desa; Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa; Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa; Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa; Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Pengentasan Desa tertinggal 100%.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Kerja Sama antar Desa; Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota; Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam

Kabupaten/Kota; Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga 100%.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa; Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa; Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa; Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Fasilitas Penyusunan Profil Desa; Fasilitas Pengelolaan Aset Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD; Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDDes 100%.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina 12,96%.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK); penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota; Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal; Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal; Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan; Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga; Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Perumusan Parameter Kependudukan; Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan; Penyediaan Data dan Informasi Keluarga; Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB; Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya dibawah usia 20 tahun 16,1%.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal; Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK; Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK; Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat

Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok); Pengendalian Program KKBPK. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB; Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB; Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB; Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP; Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB; Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan; Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak; Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB; Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Jumlah Peserta KB/CPR 68,65%; dan Persentase *Un Meed Need* 12,04%.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga); Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja. Program ini diarahkan

pada pencapaian Persentase kelompok masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB) 70%; dan Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif 85%.

9. Urusan Perhubungan

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan dalam program LLAJ diarahkan pada Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan; Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Rasio Ijin Trayek 0,62; Rasio Perlengkapan jalan 0,54; Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor Wajib Uji 97,65%.
- b. Program Pengelolaan Pelayaran
Kegiatan diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha; Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Rasio Ketersediaan Rambu Angkutan Sungai dan Penyeberangan 0,5.

10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Media; Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan; Manajemen Komunikasi Krisis; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 73%.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota; Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra

Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi; Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas; Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang mendukung *Smart City* sesuai masterplan 75%.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan dalam program Pemberdayaan UMKM diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan; Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro; Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro; Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Program ini diarahkan pada persentase meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha 12,23%.

- b. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil; Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase Pertumbuhan UMKM 3,3%.

- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota; pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota 72%.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Pengelola Koperasi yang memiliki kompetensi 71,84%.

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Meningkatnya koperasi yang berkualitas 37,28%.

12. Urusan Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan dalam Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diarahkan pada:

- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan dengan target 100%.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan dalam Program Promosi Penanaman Modal diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah

Kabupaten / Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Promosi di Tingkat Regional dan/atau Nasional yang diikuti dengan target 100%.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
- 2) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dengan target 100%.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- 1) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
- 2) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- 3) Pengawasan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Kepatuhan LKPM dengan target 75%.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha dengan target 100%.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Organisasi pemuda yang aktif 100%; Persentase Wirausaha Muda 25%.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota; Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Pengembangan Organisasi Keolahragaan. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Pembinaan Olahraga 100 Cabor.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah melalui Pelatihan dan Pembinaan Giat Saka Pariwisata. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina sebesar 100%.

14. Urusan Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan yang akan

diarahkan pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100%.

15. Urusan Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi, kegiatan yang diarahkan pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Tingkat keamanan informasi pemerintah 1,02 indeks.

16. Urusan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan dalam Program Pengembangan Kebudayaan diarahkan pada Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional; Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan 31,25%.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kesenian tradisional yang dibina 50%.

c. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase sejarah lokal yang dibina 12,22%.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan diarahkan pada Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota; Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten/Kota yang berfokus pada Pemanfaatan Cagar Budaya. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase cagar budaya yang terintergrasi 27%.

17. Urusan Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan dalam Program Pembinaan Perpustakaan diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Subkegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat; Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca; Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk 9,98%.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Kegiatan diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota; terdiri dari Subkegiatan : Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan 25%.

18. Urusan Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan dalam Program Pengelolaan Arsip diarahkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota; Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis; Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota; Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 75,34%.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan ini diarahkan pada Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota; Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan untuk pencapaian Indikator Persentase Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan 50%.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan dalam Program Pengelolaan Perikanan Tangkap diarahkan pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT. Program ini diarahkan pada pencapaian Presentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan 80%.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan fokus pada Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan 80%.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan diarahkan pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif 80,65%.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan diarahkan pada Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha

Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan 77,78% serta untuk ketercapaian angka konsumsi ikan sebesar 30,448 kg/kapita/th.

2. Urusan Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan dalam Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diarahkan pada Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota 10%.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan fokus Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri; Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Obyek Wisata yang dipromosikan 24%.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif (semua 17 Subsektor yang dikembangkan) 33,33%.

- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan fokus Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata; Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase (%) pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan 25%.

3. Urusan Pertanian

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diarahkan pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota fokus pada Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak. Program ini diarahkan pada pencapaian Populasi ternak 9.075.397 ekor; Produksi Tanaman Hortikultura 71.967 Ton; Produksi Tanaman Pangan 1.010.489 ton.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Prasarana Pertanian; Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya yang meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian, pengawasan pupuk dan pestisida, Pembangunan Prasarana Pertanian fokus pada Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; Pembangunan, Rehabilitasi dan

- Pemeliharaan DAM Parit; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Luas pelayanan Jaringan Irigasi 9,8%.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Kegiatan diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular 24,9%.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Kegiatan diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota; Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani 100%.
- e. Program Penyuluhan Pertanian
- Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase peningkatan kelas kelompok tani 7,8%.

4. Urusan Perdagangan

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diarahkan pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan; Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya; Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi 75%; Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina 14,24%.
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan diarahkan pada Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan fokus Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan fokus pada Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok 100%; Persentase Kinerja realisasi pupuk 54%.

c. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota; Pameran Dagang Nasional; Pameran Dagang Lokal; Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor. Program ini diarahkan pada Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor 4%.

d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan; Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang; Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/ tera ulang dalam tahun berjalan 100%.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan diarahkan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota; Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi

Perdagangan. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal 0,43%.

5. Urusan Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase sentra industri terbina sebesar 100%.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota; Fasilitasi Pemenuhan Komitmen PErolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 2,64%.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota; Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. Program ini diarahkan pada pencapaian Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini 95%.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diarahkan pada Administrasi Tata Pemerintahan; Penataan Administrasi Pemerintahan; Pengelolaan Administrasi Kewilayahan; Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat fokus pada Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dalam rangka penguatan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti; Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial; Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum fokus pada Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah; Fasilitasi Bantuan Hukum; Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Fasilitasi Kerjasama Daerah fokus pada Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan 40 dokumen; Persentase Ketersediaan Koordinasi Bidang Hukum Sesuai Kebutuhan 100%; Persentase koordinasi bidang Kesra 100%; Persentase koordinasi bidang Pemerintahan 100%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan fokus pada Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan; Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan; Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa fokus pada Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering 100%; Pelaksanaan

kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal di kabupaten Cilacap 24 kecamatan; Pengawasan peredaran barang dan jasa di bidang pupuk dan LPG bersubsidi 6 kegiatan; Persentase koordinasi bidang Perekonomian dan SDA 100%; Persentase Penyerapan APBD 94,75%.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan diarahkan pada Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peningkatan Kapasitas DPRD fokus pada Pendalaman Tugas DPRD; Publikasi dan Dokumentasi Dewan; Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat fokus pada Kunjungan Kerja dalam Daerah; Pelaksanaan Reses. Fasilitasi Tugas DPRD fokus pada Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal 100%.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah fokus pada Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah fokus pada Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase pencapaian realisasi target Program tahunan 93%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) fokus pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan fokus pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase realisasi indikator OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 93%; Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian 82%; dan Persentase Realisasi Indikator OPD dibawah Rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan 82%.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah fokus pada Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah; Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama, dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah fokus pada Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD -0.087%; Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 100%; Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure) 64,05%; Persentase Penyaluran Dana Transfer ke Desa 100%.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan program ini meliputi Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penyusunan Standar Harga; Penatausahaan Barang Milik Daerah; Inventarisasi Barang Milik Daerah; Pengamanan Barang Milik Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Manajemen Aset yang optimal dengan kelengkapan dokumen daftar aset, manual untuk menyusun daftar aset tetap, proses inventarisasi aset tahunan dan nilai aset tercantum dalam laporan anggaran.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah; Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan untuk penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB. Program ini diarahkan pada pencapaian Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD 0.053%; Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah 11,4%;

3. Kepegawaian

Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan dalam Program Kepegawaian Daerah diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN fokus pada Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian. Mutasi dan Promosi ASN fokus pada Pengelolaan Mutasi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; Pengelolaan Promosi ASN. Pengembangan Kompetensi ASN fokus pada Peningkatan Kapasitas kinerja ASN, Pengelolaan Assessment Center, Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN; Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur fokus pada Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian 99,92%; Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi 99,32%; Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN 63,38%; Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 24,27%.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis fokus pada Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional fokus pada Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan/standar jabatan 56,55%.

5. Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian, dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi; Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian, dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan fokus pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial; Penelitian dan Pengembangan Pariwisata; Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Pengembangan Inovasi dan Teknologi fokus pada Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; Diseminasi Jenis, Prosedur, dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif; Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan; Fasilitasi Hak

Kekayaan Intelektual. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase jumlah inovasi daerah yang ditindaklanjuti 90%; Persentase riset Daerah yang ditindaklanjuti 40%.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan diarahkan pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal; Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Reviu Laporan Keuangan; Pengawasan Desa; Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu fokus pada Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik 80%; dan Persentase Perangkat Desa dengan Nilai kinerja baik 80%.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan. Pendampingan dan Asistensi; Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 100%; Persentase kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi 88%.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang

Ada di Kecamatan dengan sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan sebagai keikutsertaan dalam mendukung Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif 100%; Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100%.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban 100%.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Persentase Fasilitasi Forkompincam 100%.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa; Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. Program ini

diarahkan pada pencapaian Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa 100%.

H. Unsur Pemerintah Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara 24 Kecamatan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu 70%.
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase LSM/Ormas yang dibina/ bimtek kebangsaan 80%.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 24 Kecamatan.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial 24 Kecamatan.

I. Non Urusan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah fokus pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah fokus pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN termasuk rencana Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi

tahun 2024 yang dilantik pada tahun 2025; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah fokus pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Administrasi Umum Perangkat Daerah fokus pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fokus pada Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fokus pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fokus pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Peningkatan Pelayanan BLUD fokus pada Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah fokus pada Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Penataan Organisasi fokus pada Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan fokus pada Fasilitasi Keprotokolan; Fasilitasi Komunikasi Pimpinan; Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD fokus pada Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Layanan Administrasi DPRD fokus pada Fasilitasi Fraksi DPRD; Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase

ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah 100% dan persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 100%; Persentase cakupan pelayanan BLUD 100%; Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai standar 100%; Persentase pemenuhan dokumen penataan organisasi 100%. Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat sesuai kebutuhan 97%; Persentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP 100%.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah Tahun 2025. Uraian rumusan rencana program dan pagu indikatif secara rinci tertuang pada tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3
RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			748.465.540.741				767.425.579.916	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			746.762.129.831				766.058.759.916	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			746.762.129.831				766.058.759.916	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	701.397.359.081			100 %	733.163.312.873	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000			6 Dokumen	31.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	16.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN	12 bulan	691.026.822.219			12 bulan	723.026.822.219	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	691.026.822.219	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Orang/bulan	723.026.822.219	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150 Orang	225.000.000			576 Orang	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	75.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	566 Paket	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	150.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Orang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	2.576.737.703			12 bulan	2.622.892.654	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	553.638.678	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	536.138.678	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	991.499.065	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	1.041.074.018	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	281.599.960	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	295.679.958	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	750.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	750.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	72 Unit	169.913.430			280 Unit	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	29 Unit	94.997.790	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	43 Unit	74.915.640	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250 Unit	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	5.937.773.409			12 bulan	5.937.773.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	555.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	555.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	5.382.773.409	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	5.382.773.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	414 Unit	1.421.112.320			564 Unit	1.119.325.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	26 Unit	420.816.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	320 Unit	180.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit	795.306.320	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	464.325.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	63 Unit	24.990.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190 Unit	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	42,32 % 100 % 53,88% 100% 71,48% 100%	36.391.435.310			100 % 100 % 100 % 72,58 % 72,58 % 45,12 % 55,88 % 100 % 100 % 55,88 % 45,12 % 100 %	23.647.362.743	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang difasilitasi	100 %	18.296.283.130			100 % 100 %	11.418.413.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	740.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Ruang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	-	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14 Ruang	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	460.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Ruang	460.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	2.666.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	17 Unit	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	5 Ruang	576.944.600	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	11 Ruang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	2 Ruang	300.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	16 Ruang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2659 Paket	1.690.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	78 Paket	980.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	482 Peserta Didik	116.750.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	288 Peserta Didik	116.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1033 Satuan Pendidikan	2.868.589.530	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	972 Satuan Pendidikan	3.150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar								
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	80.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Ruang	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar								
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	1 Ruang	100.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Ruang	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	760.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Ruang	560.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	13 Unit	1.185.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	26 Unit	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	1033 Satuan Pendidikan	271.999.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1031 Satuan Pendidikan	401.663.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	38 Ruang	6.081.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	108 Ruang	3.690.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>	8 Paket	400.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		430.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Persentase SMP yang difasilitasi</i>	100 %	7.662.343.340			100 %	6.286.719.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	0 Ruang	-	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Ruang	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium								
		<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>	0 Ruang	-	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	17 Ruang	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	6 Unit	1.165.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	27 Unit	565.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>	3 Ruang	560.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	67 Ruang	360.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium								
		<i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>	1 Ruang	200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Ruang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>	3 Unit	300.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Unit	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
		<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>	2 Paket	605.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	99 Paket	480.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>	2 Paket	130.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	4 Paket	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
		<i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	90 Peserta Didik	1.395.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	90 Peserta Didik	1.395.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	702 Peserta Didik	103.560.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	431 Peserta Didik	103.560.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
		<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>	84 Satuan Pendidikan	2.306.138.340	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	109 Satuan Pendidikan	2.235.514.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar</i>	84 Satuan Pendidikan	297.645.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	65415 Satuan Pendidikan	297.645.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1 Ruang	200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Ruang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
		<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>	8 Paket	400.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang difasilitasi	100 %	9.866.029.840			100 %	5.211.029.843	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	23 Unit	1.140.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Unit	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD								
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	17 Paket	595.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	13 Paket	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	896 Orang	2.151.029.840	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	988 Orang	2.151.029.843	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	977 Satuan Pendidikan	275.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	977 Satuan Pendidikan	275.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	870.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		540.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	9 Unit	895.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	108 Paket	2.595.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	977 Satuan Pendidikan	260.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		485.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	10 Ruang	1.035.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Penyelenggara Pendidikan non formal/ kesetaraan yang difasilitasi	100 %	566.779.000			100 %	731.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	64 Orang	81.200.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	160 Orang	106.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 Satuan Pendidikan	245.379.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30 Satuan Pendidikan	230.379.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	2163 Peserta Didik	215.200.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2213 Peserta Didik	394.021.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan</i>	92.32 %	8.973.335.440			92.32 %	9.248.084.300	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase Guru yang terfasilitasi</i>	100 %	8.973.335.440			100 %	9.248.084.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	1 Dokumen	20.999.900	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	20.999.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	7 Laporan	8.952.335.540	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Laporan	9.227.084.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.703.410.910				1.366.820.000	
222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.703.410.910				1.366.820.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan</i>	31.25 %	1.263.820.910			31.25 %	776.820.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesenian Tradisinal yang dilestarikan</i>	2 Jenis	1.263.820.910			2 Jenis	776.820.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								
		<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	7 Objek	1.037.000.910	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	8 Objek	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional								
		<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>	3 Laporan	200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan								
		<i>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan</i>	5 Sertifikat	26.820.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Sertifikat	26.820.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	<i>Persentase kesenian tradisional yang dibina</i>	50 %	289.590.000			50 %	350.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kelompok kesenian yang dibina</i>	2 Kelompok	289.590.000			2 Kelompok	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>	100 Orang	289.590.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	125 Orang	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dibina	12.22 %	30.000.000			12.22 %	30.000.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pembinaan sejarah lokal</i>	1 kegiatan	30.000.000			1 kegiatan	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah								
		<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat</i>	3 Dokumen	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang Teregistrasi	27,2 %	120.000.000			27,56 %	210.000.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Cagar Budaya yang di registrasi</i>	2 Objek	72.000.000			2 Obyek	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya								
		<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>	5 Objek	72.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Objek	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah objek cagar budaya yang dikelola</i>	1 Objek	48.000.000			1 Obyek	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya								
		<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>	3 Objek	48.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Objek	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	SMP NEGERI 1 CILACAP			60.000.000				78.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				78.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				78.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	60.000.000			100 %	78.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	18.000.000			12 bulan	18.000.000	SMP NEGERI 1 CILACAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	18.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	18.000.000	SMP NEGERI 1 CILACAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	42.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 1 CILACAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	42.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000	SMP NEGERI 1 CILACAP
	SMP NEGERI 2 CILACAP			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 2 CILACAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	60.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	60.000.000	SMP NEGERI 2 CILACAP
	SMP NEGERI 3 CILACAP			60.000.000				60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 3 CILACAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	60.000.000	SMP NEGERI 3 CILACAP
	SMP NEGERI 4 CILACAP			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	40.180.000			12 bulan	40.180.000	SMP NEGERI 4 CILACAP
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.692.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	8.692.000	SMP NEGERI 4 CILACAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.488.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	28.488.000	SMP NEGERI 4 CILACAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	3.000.000	SMP NEGERI 4 CILACAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	26 Unit	19.820.000			564 Unit	19.820.000	SMP NEGERI 4 CILACAP
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	19.820.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	19.820.000	SMP NEGERI 4 CILACAP
	SMP NEGERI 5 CILACAP			60.000.000				80.262.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				80.262.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				80.262.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	60.000.000			100 %	80.262.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	20.262.000			12 bulan	20.262.000	SMP NEGERI 5 CILACAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.262.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.262.000	SMP NEGERI 5 CILACAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	39.738.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 5 CILACAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	39.738.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000	SMP NEGERI 5 CILACAP
	SMP NEGERI 6 CILACAP			86.000.000				86.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			86.000.000				86.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			86.000.000				86.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</i>	100 %	86.000.000			100 %	86.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	7.850.000			12 bulan	7.850.000	SMP NEGERI 6 CILACAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	7.850.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.850.000	SMP NEGERI 6 CILACAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	78.150.000			12 bulan	78.150.000	SMP NEGERI 6 CILACAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	78.150.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	78.150.000	SMP NEGERI 6 CILACAP
	SMP NEGERI 7 CILACAP			69.967.400				103.276.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			69.967.400				103.276.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			69.967.400				103.276.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</i>	100 %	69.967.400			100 %	103.276.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	13.827.400			12 bulan	13.828.000	SMP NEGERI 7 CILACAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	4.827.400	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.828.000	SMP NEGERI 7 CILACAP
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	9.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	9.000.000	SMP NEGERI 7 CILACAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	36.660.000			12 bulan	69.968.000	SMP NEGERI 7 CILACAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	36.660.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	69.968.000	SMP NEGERI 7 CILACAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	20 Unit	19.480.000			564 Unit	19.480.000	SMP NEGERI 7 CILACAP
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	12 Unit	19.480.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	19.480.000	SMP NEGERI 7 CILACAP
	SMP NEGERI 8 CILACAP			70.000.000				80.005.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.000.000				80.005.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			70.000.000				80.005.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	70.000.000			100 %	80.005.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	10.005.000			12 bulan	10.005.000	SMP NEGERI 8 CILACAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.005.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	10.005.000	SMP NEGERI 8 CILACAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	59.995.000			12 bulan	70.000.000	SMP NEGERI 8 CILACAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.995.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	70.000.000	SMP NEGERI 8 CILACAP
	SMP NEGERI 9 CILACAP			78.000.000				78.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			78.000.000				78.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			78.000.000				78.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	78.000.000			100 %	78.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	11.268.000			12 bulan	11.268.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	9.000.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.268.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.268.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	23.800.000			12 bulan	23.800.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.800.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	23.800.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	43 Unit	42.932.000			564 Unit	42.932.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	25.872.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	25.872.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	7.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	7.000.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.060.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	10.060.000	SMP NEGERI 9 CILACAP
	SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN			39.999.900				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.999.900				40.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.999.900				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	39.999.900			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	39.999.900			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.999.900	Kab. Cilacap, Kawunganten, Bojong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.000.000	SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN
	SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Kawunganten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	60.000.000	SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN
	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN			64.696.000				116.912.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			64.696.000				116.912.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			64.696.000				116.912.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 Paket	64.696.000			100 Paket	116.912.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	47.396.000			12 bulan	99.612.000	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.476.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	21.476.000	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.440.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	13.440.000	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.480.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	64.696.000	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	9.600.000			12 bulan	9.600.000	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.600.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	9.600.000	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	24 Unit	7.700.000			564 Unit	7.700.000	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	7.700.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Sidaurip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	7.700.000	SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP			39.990.898				40.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.990.898				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.990.898				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	39.990.898			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	24.990.898			12 bulan	25.000.000	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.634.368	Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.634.400	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.587.930	Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	11.589.600	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.988.600	Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	3.996.000	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.780.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.780.000	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	9.000.000			12 bulan	9.000.000	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	9.000.000	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	24 Unit	6.000.000			564 Unit	6.000.000	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit	6.000.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Mentasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	6.000.000	SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
	SMP NEGERI 1 CIMANGGU			60.000.000				88.800.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				88.800.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				88.800.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	88.800.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	43.800.000			12 bulan	72.600.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.200.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Cilempuyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	60.000.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Cilempuyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	12.600.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	16.200.000			12 bulan	16.200.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	16.200.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Cilempuyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	16.200.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU
	SMP NEGERI 2 CIMANGGU			60.000.000				95.903.400	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				95.903.400	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				95.903.400	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	95.903.400	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	47.040.000			12 bulan	82.943.400	SMP NEGERI 2 CIMANGGU
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	17.107.200	Kab. Cilacap, Cimanggu, Pesahangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	17.107.200	SMP NEGERI 2 CIMANGGU
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	24.096.600	Kab. Cilacap, Cimanggu, Pesahangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	60.000.000	SMP NEGERI 2 CIMANGGU
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	5.836.200	Kab. Cilacap, Cimanggu, Pesahangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.836.200	SMP NEGERI 2 CIMANGGU
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	12.960.000			12 bulan	12.960.000	SMP NEGERI 2 CIMANGGU
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12.960.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Pesahangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	12.960.000	SMP NEGERI 2 CIMANGGU
	SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP			40.000.000				56.600.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				56.600.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				56.600.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	56.600.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	34.000.000			12 bulan	50.600.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	23.400.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.000.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	10.600.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	10.600.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	6.000.000			12 bulan	6.000.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	6.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	6.000.000	SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP
	SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP			40.000.000				53.500.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				53.500.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				53.500.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	53.500.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	29.200.000			12 bulan	42.700.000	SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.500.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Kutabima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.000.000	SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.700.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Kutabima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.700.000	SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	10.800.000			12 bulan	10.800.000	SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.800.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Kutabima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	10.800.000	SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP
	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.216.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Gandrungmangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	15.216.000	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.784.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Gandrungmangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	44.784.000	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU
	SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU			50.000.000				50.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			50.000.000				50.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			50.000.000				50.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	50.000.000			100 %	50.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	40.400.000			12 bulan	40.400.000	SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.399.600	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Cisumur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.399.600	SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.400	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Cisumur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.000.400	SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	9.600.000			12 bulan	9.600.000	SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.600.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Cisumur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	9.600.000	SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU
	SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU			52.400.000				52.400.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			52.400.000				52.400.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			52.400.000				52.400.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	52.400.000			100 %	52.400.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	52.400.000			12 bulan	52.400.000	SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.000.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Karanganyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	8.000.000	SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.400.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Karanganyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	44.400.000	SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU
	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.000.000			12 bulan	34.000.000	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.740.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Layansari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.740.000	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	28.260.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Layansari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	28.260.000	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	6.000.000			12 bulan	6.000.000	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Layansari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	6.000.000	SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP
	SMP NEGERI 1 JERUKLEGI			59.999.650				59.999.650	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			59.999.650				59.999.650	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			59.999.650				59.999.650	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	59.999.650			100 %	59.999.650	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	31.799.650			12 bulan	31.799.650	SMP NEGERI 1 JERUKLEGI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.919.650	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Tritih Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.919.650	SMP NEGERI 1 JERUKLEGI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.880.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Tritih Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	26.880.000	SMP NEGERI 1 JERUKLEGI
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	28.200.000			12 bulan	28.200.000	SMP NEGERI 1 JERUKLEGI
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.200.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Tritih Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	28.200.000	SMP NEGERI 1 JERUKLEGI
	SMP NEGERI 2 JERUKLEGI			70.000.000				70.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.000.000				70.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			70.000.000				70.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	70.000.000			100 %	70.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	42.400.000			12 bulan	42.400.000	SMP NEGERI 2 JERUKLEGI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.608.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	8.608.000	SMP NEGERI 2 JERUKLEGI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.792.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	33.792.000	SMP NEGERI 2 JERUKLEGI
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	27.600.000			12 bulan	27.600.000	SMP NEGERI 2 JERUKLEGI
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	27.600.000	SMP NEGERI 2 JERUKLEGI
	SMP NEGERI 3 JERUKLEGI			47.999.730				48.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.999.730				48.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			47.999.730				48.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	47.999.730			100 %	48.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	32.999.730			12 bulan	33.000.000	SMP NEGERI 3 JERUKLEGI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.999.730	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Brebeg	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	33.000.000	SMP NEGERI 3 JERUKLEGI
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	15.000.000			12 bulan	15.000.000	SMP NEGERI 3 JERUKLEGI
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Brebeg	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	15.000.000	SMP NEGERI 3 JERUKLEGI
	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	21.000.000			12 bulan	21.000.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	15.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	15.000.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	6.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.000.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	13.386.000			12 bulan	13.386.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	13.386.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	13.386.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	23 Unit	25.614.000			564 Unit	25.614.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	20 Unit	5.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	5.000.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	17.214.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	17.214.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	3.400.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190 Unit	3.400.000	SMP NEGERI 1 DAYEULLUHUR
	SMP NEGERI 2 DAYEULLUHUR			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	37.200.000			12 bulan	37.200.000	SMP NEGERI 2 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	5.062.400	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.062.400	SMP NEGERI 2 DAYEULLUHUR
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	27.537.600	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	27.537.600	SMP NEGERI 2 DAYEULHUHUR
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	4.600.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.600.000	SMP NEGERI 2 DAYEULHUHUR
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	22.800.000			12 bulan	22.800.000	SMP NEGERI 2 DAYEULHUHUR
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	22.800.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	22.800.000	SMP NEGERI 2 DAYEULHUHUR
	SMP NEGERI 1 MAJENANG			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawatan Perangkat Daerah</i>	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	31.590.000			12 bulan	31.590.000	SMP NEGERI 1 MAJENANG
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	31.590.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	31.590.000	SMP NEGERI 1 MAJENANG
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	23.200.000			12 bulan	23.200.000	SMP NEGERI 1 MAJENANG
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	23.200.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	23.200.000	SMP NEGERI 1 MAJENANG
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	5 Unit	5.210.000			564 Unit	5.210.000	SMP NEGERI 1 MAJENANG
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	5 Unit	5.210.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	5.210.000	SMP NEGERI 1 MAJENANG
	SMP NEGERI 2 MAJENANG			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawatan Perangkat Daerah</i>	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 2 MAJENANG
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	20.000.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.000.000	SMP NEGERI 2 MAJENANG
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	20.000.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.000.000	SMP NEGERI 2 MAJENANG
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	20.000.000			-	20.000.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	20.000.000			100 % 100 %	20.000.000	SMP NEGERI 2 MAJENANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah								
		<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	0 Unit	20.000.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	SMP NEGERI 2 MAJENANG
	SMP NEGERI 3 MAJENANG			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawatan Perangkat Daerah</i>	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	42.000.000			12 bulan	42.000.000	SMP NEGERI 3 MAJENANG
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	30.000.000	Kab. Cilacap, Majenang, Padangjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	30.000.000	SMP NEGERI 3 MAJENANG
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12.000.000	Kab. Cilacap, Majenang, Padangjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	12.000.000	SMP NEGERI 3 MAJENANG
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	18.000.000			12 bulan	18.000.000	SMP NEGERI 3 MAJENANG
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	18.000.000	Kab. Cilacap, Majenang, Padangjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	18.000.000	SMP NEGERI 3 MAJENANG
	SMP NEGERI 4 MAJENANG			49.997.000				49.997.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			49.997.000				49.997.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			49.997.000				49.997.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawatan Perangkat Daerah</i>	100 %	49.997.000			100 %	49.997.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 %	18.797.000			12 bulan	18.797.000	SMP NEGERI 4 MAJENANG
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	18.797.000	Kab. Cilacap, Majenang, Sepatnunggai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	18.797.000	SMP NEGERI 4 MAJENANG
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	31.200.000			12 bulan	31.200.000	SMP NEGERI 4 MAJENANG
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	31.200.000	Kab. Cilacap, Majenang, Sepatnunggai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	31.200.000	SMP NEGERI 4 MAJENANG
	SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP			39.999.380				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.999.380				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.999.380				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawatan Perangkat Daerah</i>	100 %	39.999.380			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	39.999.380			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	2.421.780	Kab. Cilacap, Majenang, Salebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.422.100	SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	30.961.900	Kab. Cilacap, Majenang, Salebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	30.962.200	SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	6.615.700	Kab. Cilacap, Majenang, Salebu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.615.700	SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP
	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP			50.000.000				50.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			50.000.000				50.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			50.000.000				50.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	50.000.000			100 %	50.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	26.393.500			12 bulan	26.393.500	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	17.697.500	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	17.697.500	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	8.696.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	8.696.000	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	9.600.000			12 bulan	9.600.000	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	9.600.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	9.600.000	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	12 Unit	14.006.500			564 Unit	14.006.500	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	12 Unit	9.300.000	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	9.300.000	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	4.706.500	Kab. Cilacap, Majenang, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190 Unit	4.706.500	SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
	SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	30.400.000			12 bulan	30.400.000	SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	2.600.000	Kab. Cilacap, Majenang, Boja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.600.000	SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	18.800.000	Kab. Cilacap, Majenang, Boja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	18.800.000	SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	9.000.000	Kab. Cilacap, Majenang, Boja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	9.000.000	SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	9.600.000			12 bulan	9.600.000	SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	9.600.000	Kab. Cilacap, Majenang, Boja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	9.600.000	SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP
	SMP NEGERI 1 CIPARI			43.400.000				43.400.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			43.400.000				43.400.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			43.400.000				43.400.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</i>	100 %	43.400.000			100 %	43.400.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	17.290.000			12 bulan	17.290.000	SMP NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	3.716.700	Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	3.716.700	SMP NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	2.821.300	Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.821.300	SMP NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	10.752.000	Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	10.752.000	SMP NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	21.000.000			12 bulan	21.000.000	SMP NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	21.000.000	Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	21.000.000	SMP NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	7 Unit	5.110.000			564 Unit	5.110.000	SMP NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7 Unit	5.110.000	Kab. Cilacap, Cipari, Mulyadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	5.110.000	SMP NEGERI 1 CIPARI
	SMP NEGERI 2 CIPARI			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 2 CIPARI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	310.000	Kab. Cilacap, Cipari, Pegadangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	310.000	SMP NEGERI 2 CIPARI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.690.000	Kab. Cilacap, Cipari, Pegadangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	39.690.000	SMP NEGERI 2 CIPARI
	SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	29.320.000			12 bulan	29.320.000	SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.264.000	Kab. Cilacap, Cipari, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	13.264.000	SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.056.000	Kab. Cilacap, Cipari, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	16.056.000	SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	10.680.000			12 bulan	10.680.000	SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.680.000	Kab. Cilacap, Cipari, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	10.680.000	SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP
	SMP NEGERI 4 CIPARI			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	29.200.000			12 bulan	29.200.000	SMP NEGERI 4 CIPARI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.200.000	Kab. Cilacap, Cipari, Sidasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.200.000	SMP NEGERI 4 CIPARI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.000.000	Kab. Cilacap, Cipari, Sidasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	22.000.000	SMP NEGERI 4 CIPARI
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	10.800.000			12 bulan	10.800.000	SMP NEGERI 4 CIPARI
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.800.000	Kab. Cilacap, Cipari, Sidasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	10.800.000	SMP NEGERI 4 CIPARI
	SMP NEGERI 1 SAMPANG			60.000.000				60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	30.730.000			12 bulan	30.730.000	SMP NEGERI 1 SAMPANG
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.787.100	Kab. Cilacap, Sampang, Sampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	1.787.100	SMP NEGERI 1 SAMPANG
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.942.900	Kab. Cilacap, Sampang, Sampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	28.942.900	SMP NEGERI 1 SAMPANG
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	45 Unit	29.270.000			564 Unit	29.270.000	SMP NEGERI 1 SAMPANG
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	8.000.000	Kab. Cilacap, Sampang, Sampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	SMP NEGERI 1 SAMPANG
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	21.270.000	Kab. Cilacap, Sampang, Sampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	21.270.000	SMP NEGERI 1 SAMPANG
	SMP NEGERI 2 SAMPANG			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 2 SAMPANG
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Cilacap, Sampang, Paketingan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.000.000	SMP NEGERI 2 SAMPANG
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.600.000	Kab. Cilacap, Sampang, Paketingan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	12.600.000	SMP NEGERI 2 SAMPANG
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	23.400.000	Kab. Cilacap, Sampang, Paketingan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	23.400.000	SMP NEGERI 2 SAMPANG
	SMP NEGERI 1 ADIPALA			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 1 ADIPALA
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.000.000	SMP NEGERI 1 ADIPALA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.844.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.844.000	SMP NEGERI 1 ADIPALA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.156.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	30.156.000	SMP NEGERI 1 ADIPALA
	SMP NEGERI 2 ADIPALA			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 2 ADIPALA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.000.000	SMP NEGERI 2 ADIPALA
	SMP NEGERI 1 BINANGUN			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	16.196.000			12 bulan	16.196.000	SMP NEGERI 1 BINANGUN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.196.000	Kab. Cilacap, Binangun, Widarapayung Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	16.196.000	SMP NEGERI 1 BINANGUN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	39.804.000			12 bulan	39.804.000	SMP NEGERI 1 BINANGUN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.804.000	Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	39.804.000	SMP NEGERI 1 BINANGUN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	4 Unit	4.000.000			564 Unit	4.000.000	SMP NEGERI 1 BINANGUN
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.000.000	Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	4.000.000	SMP NEGERI 1 BINANGUN
	SMP NEGERI 2 BINANGUN			60.000.000				60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	45.000.000			12 bulan	45.000.000	SMP NEGERI 2 BINANGUN
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.612.000	Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.612.000	SMP NEGERI 2 BINANGUN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.188.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	13.188.000	SMP NEGERI 2 BINANGUN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.200.000	Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	25.200.000	SMP NEGERI 2 BINANGUN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	6.000.000			12 bulan	6.000.000	SMP NEGERI 2 BINANGUN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	6.000.000	SMP NEGERI 2 BINANGUN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	36 Unit	9.000.000			564 Unit	9.000.000	SMP NEGERI 2 BINANGUN
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	36 Unit	9.000.000	Kab. Cilacap, Binangun, Jepara Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	9.000.000	SMP NEGERI 2 BINANGUN
	SMP NEGERI 3 BINANGUN			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	32.100.000			12 bulan	32.100.000	SMP NEGERI 3 BINANGUN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.100.000	Kab. Cilacap, Binangun, Kemojing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	32.100.000	SMP NEGERI 3 BINANGUN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	27.900.000			12 bulan	27.900.000	SMP NEGERI 3 BINANGUN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.900.000	Kab. Cilacap, Binangun, Kemojing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	27.900.000	SMP NEGERI 3 BINANGUN
	SMP NEGERI 1 BANTARSARI			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	44.430.000			12 bulan	44.430.000	SMP NEGERI 1 BANTARSARI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	960.400	Kab. Cilacap, Bantarsari, Kamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	960.400	SMP NEGERI 1 BANTARSARI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	43.469.600	Kab. Cilacap, Bantarsari, Kamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	43.469.600	SMP NEGERI 1 BANTARSARI
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	10.050.000			12 bulan	10.050.000	SMP NEGERI 1 BANTARSARI
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.050.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Kamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	10.050.000	SMP NEGERI 1 BANTARSARI
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	12 Unit	5.520.000			564 Unit	5.520.000	SMP NEGERI 1 BANTARSARI
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.520.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Kamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	5.520.000	SMP NEGERI 1 BANTARSARI
	SMP NEGERI 2 BANTARSARI			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 2 BANTARSARI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Rawajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.800.000	SMP NEGERI 2 BANTARSARI
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.460.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Rawajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	9.460.000	SMP NEGERI 2 BANTARSARI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.740.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Rawajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	47.740.000	SMP NEGERI 2 BANTARSARI
	SMP NEGERI 3 BANTARSARI			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	35.200.000			12 bulan	35.200.000	SMP NEGERI 3 BANTARSARI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	18.971.200	Kab. Cilacap, Bantarsari, Binangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	18.971.200	SMP NEGERI 3 BANTARSARI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	16.228.800	Kab. Cilacap, Bantarsari, Binangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	16.228.800	SMP NEGERI 3 BANTARSARI
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	4.800.000			12 bulan	4.800.000	SMP NEGERI 3 BANTARSARI
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	4.800.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Binangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	4.800.000	SMP NEGERI 3 BANTARSARI
	SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	35.200.000			12 bulan	35.200.000	SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	14.522.500	Kab. Cilacap, Bantarsari, Cikedondong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	14.522.500	SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	20.677.500	Kab. Cilacap, Bantarsari, Cikedondong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.677.500	SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	4.800.000			12 bulan	4.800.000	SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	4.800.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Cikedondong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	4.800.000	SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP
	SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	15.391.800	Kab. Cilacap, Kedungreja, Tambakreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	15.391.800	SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	44.608.200	Kab. Cilacap, Kedungreja, Tambakreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	44.608.200	SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA
	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	39.300.000			12 bulan	39.300.000	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.580.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.580.000	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36.720.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	36.720.000	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.200.000			12 bulan	7.200.000	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.200.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	7.200.000	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	40 Unit	13.500.000			564 Unit	13.500.000	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	8.500.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	8.500.000	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Jatisari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	5.000.000	SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
	SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA			59.981.000				59.981.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			59.981.000				59.981.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			59.981.000				59.981.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	59.981.000			100 %	59.981.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	29.461.000			12 bulan	29.461.000	SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.800.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Bojongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.800.000	SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.661.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Bojongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	21.661.000	SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	47 Unit	30.520.000			564 Unit	30.520.000	SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	28 Unit	7.000.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Bojongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	7.000.000	SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	23.520.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Bojongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	23.520.000	SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP			39.990.990				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.990.990				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.990.990				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	39.990.990			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	36.945.990			12 bulan	36.950.000	SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.155.990	Kab. Cilacap, Kedungreja, Kaliwungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	16.160.000	SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.790.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Kaliwungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.790.000	SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	8 Unit	3.045.000			564 Unit	3.050.000	SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.045.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Kaliwungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	3.050.000	SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP
	SMP NEGERI 1 KROYA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 1 KROYA
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.200.000	Kab. Cilacap, Kroya, Bajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.200.000	SMP NEGERI 1 KROYA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.480.000	Kab. Cilacap, Kroya, Bajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	14.480.000	SMP NEGERI 1 KROYA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.320.000	Kab. Cilacap, Kroya, Bajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.320.000	SMP NEGERI 1 KROYA
	SMP NEGERI 2 KROYA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 2 KROYA
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	5.200.000	Kab. Cilacap, Kroya, Kroya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.200.000	SMP NEGERI 2 KROYA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	14.480.000	Kab. Cilacap, Kroya, Kroya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	14.480.000	SMP NEGERI 2 KROYA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	40.320.000	Kab. Cilacap, Kroya, Kroya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.320.000	SMP NEGERI 2 KROYA
	SMP NEGERI 3 KROYA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 3 KROYA
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	7.940.000	Kab. Cilacap, Kroya, Karangmangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.940.000	SMP NEGERI 3 KROYA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	22.660.000	Kab. Cilacap, Kroya, Karangmangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	22.660.000	SMP NEGERI 3 KROYA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	29.400.000	Kab. Cilacap, Kroya, Karangmangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	29.400.000	SMP NEGERI 3 KROYA
	SMP NEGERI 4 KROYA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 4 KROYA
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	5.200.000	Kab. Cilacap, Kroya, Gentasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.200.000	SMP NEGERI 4 KROYA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	14.480.000	Kab. Cilacap, Kroya, Gentasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	14.480.000	SMP NEGERI 4 KROYA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	40.320.000	Kab. Cilacap, Kroya, Gentasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.320.000	SMP NEGERI 4 KROYA
	SMP NEGERI 5 KROYA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	23.100.000			12 bulan	23.100.000	SMP NEGERI 5 KROYA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.100.000	Kab. Cilacap, Kroya, Kroya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	23.100.000	SMP NEGERI 5 KROYA
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	29 Unit	36.900.000			564 Unit	36.900.000	SMP NEGERI 5 KROYA
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	36.900.000	Kab. Cilacap, Kroya, Kroya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	36.900.000	SMP NEGERI 5 KROYA
	SMP NEGERI 6 KROYA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	48.300.000			12 bulan	48.300.000	SMP NEGERI 6 KROYA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.560.000	Kab. Cilacap, Kroya, Karangturi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.560.000	SMP NEGERI 6 KROYA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.740.000	Kab. Cilacap, Kroya, Karangturi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.740.000	SMP NEGERI 6 KROYA
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	11.700.000			12 bulan	11.700.000	SMP NEGERI 6 KROYA
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.700.000	Kab. Cilacap, Kroya, Karangturi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	11.700.000	SMP NEGERI 6 KROYA
	SMP NEGERI 1 KESUGIHAN			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	52.200.000			12 bulan	52.200.000	SMP NEGERI 1 KESUGIHAN
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.600.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Pesanggrahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	3.600.000	SMP NEGERI 1 KESUGIHAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.200.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Pesanggrahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	10.200.000	SMP NEGERI 1 KESUGIHAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.400.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Pesanggrahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.400.000	SMP NEGERI 1 KESUGIHAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36.000.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Pesanggrahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	36.000.000	SMP NEGERI 1 KESUGIHAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.800.000			12 bulan	7.800.000	SMP NEGERI 1 KESUGIHAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.800.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Pesanggrahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	7.800.000	SMP NEGERI 1 KESUGIHAN
	SMP NEGERI 2 KESUGIHAN			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	55.200.000			12 bulan	55.200.000	SMP NEGERI 2 KESUGIHAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Slarang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	55.200.000	SMP NEGERI 2 KESUGIHAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	32 Unit	4.800.000			564 Unit	4.800.000	SMP NEGERI 2 KESUGIHAN
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	4.800.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Slarang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	4.800.000	SMP NEGERI 2 KESUGIHAN
	SMP NEGERI 3 KESUGIHAN			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 3 KESUGIHAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.516.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kuripan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	26.516.000	SMP NEGERI 3 KESUGIHAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.484.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kuripan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	33.484.000	SMP NEGERI 3 KESUGIHAN
	SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	15.000.000			12 bulan	15.000.000	SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Karangpucung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	15.000.000	SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	45.000.000			12 bulan	45.000.000	SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Karangpucung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	45.000.000	SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG
	SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	36.346.000			12 bulan	36.346.000	SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.346.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Tayem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.346.000	SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Tayem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	30.000.000	SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	3.654.000			12 bulan	3.654.000	SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.654.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Tayem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	3.654.000	SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG
	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	33.410.000			12 bulan	33.410.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	410.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Gunungtelu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	410.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	9.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Gunungtelu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	9.000.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	3.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Gunungtelu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	3.000.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	21.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Gunungtelu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	21.000.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	4.590.000			12 bulan	4.590.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	4.590.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Gunungtelu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	4.590.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	2 Unit	2.000.000			564 Unit	2.000.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	2.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Gunungtelu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	2.000.000	SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
	SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	37.000.000			12 bulan	37.000.000	SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	26.020.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Pamulihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	26.020.000	SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	10.980.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Pamulihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	10.980.000	SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	3.000.000			12 bulan	3.000.000	SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	3.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Pamulihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	3.000.000	SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP
	SMP NEGERI 1 SIDAREJA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	38.010.000			12 bulan	38.010.000	SMP NEGERI 1 SIDAREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.438.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Kunci	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.438.000	SMP NEGERI 1 SIDAREJA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.572.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Kunci	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	33.572.000	SMP NEGERI 1 SIDAREJA
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	21.990.000			12 bulan	21.990.000	SMP NEGERI 1 SIDAREJA
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.990.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Kunci	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	21.990.000	SMP NEGERI 1 SIDAREJA
	SMP NEGERI 2 SIDAREJA			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 2 SIDAREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	864.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Tegalsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	864.000	SMP NEGERI 2 SIDAREJA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59.136.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Tegalsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	59.136.000	SMP NEGERI 2 SIDAREJA
	SMP NEGERI 3 SIDAREJA			44.999.951				43.003.600	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			44.999.951				43.003.600	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			44.999.951				43.003.600	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawatan Perangkat Daerah	100 %	44.999.951			100 %	43.003.600	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	44.999.951			12 bulan	43.003.600	SMP NEGERI 3 SIDAREJA
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.999.991	Kab. Cilacap, Sidareja, Penyarang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	3.000.000	SMP NEGERI 3 SIDAREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.785.560	Kab. Cilacap, Sidareja, Penyarang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.789.200	SMP NEGERI 3 SIDAREJA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.214.400	Kab. Cilacap, Sidareja, Penyarang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	34.214.400	SMP NEGERI 3 SIDAREJA
	SMP NEGERI 1 WANAREJA			59.955.100				59.955.100	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			59.955.100				59.955.100	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			59.955.100				59.955.100	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	59.955.100			100 %	59.955.100	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	11.955.100			12 bulan	11.955.100	SMP NEGERI 1 WANAREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.955.100	Kab. Cilacap, Wanareja, Adimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	11.955.100	SMP NEGERI 1 WANAREJA
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	48.000.000			12 bulan	48.000.000	SMP NEGERI 1 WANAREJA
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Adimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	48.000.000	SMP NEGERI 1 WANAREJA
	SMP NEGERI 2 WANAREJA			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 2 WANAREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Madura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.000.000	SMP NEGERI 2 WANAREJA
	SMP NEGERI 3 WANAREJA			44.435.000				44.435.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			44.435.000				44.435.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			44.435.000				44.435.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	44.435.000			100 %	44.435.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	22.715.000			12 bulan	22.715.000	SMP NEGERI 3 WANAREJA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.715.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Majingklak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	16.715.000	SMP NEGERI 3 WANAREJA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Majingklak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.000.000	SMP NEGERI 3 WANAREJA
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	21.720.000			12 bulan	21.720.000	SMP NEGERI 3 WANAREJA
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.720.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Majingklak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	21.720.000	SMP NEGERI 3 WANAREJA
	SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	30.750.000			12 bulan	30.750.000	SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.750.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Jambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	30.750.000	SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	9.250.000			12 bulan	9.250.000	SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.250.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Jambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	9.250.000	SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP
	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	29.892.000			12 bulan	29.892.000	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.123.200	Kab. Cilacap, Nusawungu, Danasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.123.200	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.552.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Danasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	15.552.000	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.216.800	Kab. Cilacap, Nusawungu, Danasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.216.800	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	24.108.000			12 bulan	24.108.000	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	24.108.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Danasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	24.108.000	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	56 Unit	6.000.000			564 Unit	6.000.000	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 Unit	6.000.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Danasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	6.000.000	SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
	SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	45.528.000			12 bulan	45.528.000	SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.492.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Karangpakis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	9.492.000	SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36.036.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Karangpakis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	36.036.000	SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	14.472.000			12 bulan	14.472.000	SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.472.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Karangpakis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	14.472.000	SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU
	SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	45.480.000			12 bulan	45.480.000	SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.487.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Kedungbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5.487.000	SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.129.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Kedungbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	12.129.000	SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	27.864.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Kedungbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	27.864.000	SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	14.520.000			12 bulan	14.520.000	SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.520.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Kedungbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	14.520.000	SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU
	SMP NEGERI 1 PATIMUAN			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 1 PATIMUAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	23.000.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Cinyawang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	23.000.000	SMP NEGERI 1 PATIMUAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	37.000.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Cinyawang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	37.000.000	SMP NEGERI 1 PATIMUAN
	SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	21.514.000			12 bulan	21.514.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	9.004.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Rawaapu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	9.004.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12.510.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Rawaapu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	12.510.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	12.036.000			12 bulan	12.036.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12.036.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Rawaapu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	12.036.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	9 Unit	6.450.000			564 Unit	6.450.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	9 Unit	6.450.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Rawaapu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	6.450.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP
	SMP NEGERI 2 PATIMUAN			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	33.200.000			12 bulan	33.200.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	4.580.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Purwadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.580.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	27.720.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Purwadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	27.720.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	900.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Purwadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	900.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	10 Unit	6.800.000			564 Unit	6.800.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Purwadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	2.500.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.300.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Purwadadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	4.300.000	SMP NEGERI 2 PATIMUAN
	SMP NEGERI 1 MAOS			40.000.000				40.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.000.000				40.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.000.000				40.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	40.000.000			100 %	40.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	31.000.000			12 bulan	31.000.000	SMP NEGERI 1 MAOS
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.050.000	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	23.050.000	SMP NEGERI 1 MAOS
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.950.000	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.950.000	SMP NEGERI 1 MAOS
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	32 Unit	9.000.000			564 Unit	9.000.000	SMP NEGERI 1 MAOS
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	9.000.000	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	9.000.000	SMP NEGERI 1 MAOS
	SMP NEGERI 2 MAOS			55.999.270				55.999.270	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			55.999.270				55.999.270	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			55.999.270				55.999.270	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	55.999.270			100 %	55.999.270	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	43.999.270			12 bulan	43.999.270	SMP NEGERI 2 MAOS
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.799.270	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	1.799.270	SMP NEGERI 2 MAOS
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.000.000	SMP NEGERI 2 MAOS
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.200.000	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	35.200.000	SMP NEGERI 2 MAOS
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12.000.000			12 bulan	12.000.000	SMP NEGERI 2 MAOS

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12.000.000	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	12.000.000	SMP NEGERI 2 MAOS
	SMP NEGERI 3 MAOS			60.000.000				60.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.000.000				60.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.000.000				60.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawalan Perangkat Daerah</i>	100 %	60.000.000			100 %	60.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000	SMP NEGERI 3 MAOS
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	11.673.400	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	11.673.400	SMP NEGERI 3 MAOS
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	48.326.600	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	48.326.600	SMP NEGERI 3 MAOS
	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT			106.492.000				106.492.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			106.492.000				106.492.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			106.492.000				106.492.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan Kepegawalan Perangkat Daerah</i>	100 %	106.492.000			100 %	106.492.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	32.662.000			12 bulan	32.662.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12.400.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujunggagak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	12.400.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	20.262.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujunggagak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.262.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	6.000.000			12 bulan	6.000.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	6.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujunggagak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	6.000.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	1 Unit	67.830.000			564 Unit	67.830.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	1 Unit	67.830.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujunggagak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	67.830.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT
	SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT			90.000.000				90.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			90.000.000				90.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			90.000.000				90.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	90.000.000			100 %	90.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.000.000	SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.301.200	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujungalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.301.200	SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.311.400	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujungalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.311.400	SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.387.400	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujungalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	29.387.400	SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	1 Unit	50.000.000			564 Unit	50.000.000	SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	50.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Ujungalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	50.000.000	SMP NEGERI 2 KAMPUNGLAUT
	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP			58.000.000				58.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			58.000.000				58.000.000	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			58.000.000				58.000.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	58.000.000			100 %	58.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	39.200.000			12 bulan	39.200.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Panikel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	32.000.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.200.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Panikel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	7.200.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	8 Unit	18.800.000			564 Unit	18.800.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.800.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Panikel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	7.800.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	11.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Panikel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	11.000.000	SMP NEGERI 1 KAMPUNGLAUT SATU ATAP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL			154.995.250				154.995.250	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			154.995.250				154.995.250	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			154.995.250				154.995.250	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	154.995.250			100 %	154.995.250	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	10.000.000			576 Orang	10.000.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	566 Paket	10.000.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	30.099.000			12 bulan	30.099.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.553.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	3.553.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.248.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	13.248.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.398.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	8.398.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.200.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	1.200.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.700.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	3.700.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	89.232.250			12 bulan	89.232.250	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.672.250	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	30.672.250	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.560.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	58.560.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	5 Unit	25.664.000			564 Unit	25.664.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	6.850.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	6.850.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	6.100.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Unit	6.100.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	12.714.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jambusari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190 Unit	12.714.000	UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			296.471.974.204				287.181.019.377	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			294.931.794.914				285.353.019.377	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			294.931.794.914				285.353.019.377	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	214.072.614.764			100 %	212.891.002.134	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	55.000.410			7 Dokumen	40.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	25.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.000.210	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Laporan	15.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	207.324.952.634			12 Orang/Bulan	207.324.952.634	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2816 Orang/bulan	207.324.952.634	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2238 Orang/bulan	207.324.952.634	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Kepegawaian	180 orang	187.500.000			190 Orang	187.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	167.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190 Paket	162.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	20.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	25.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.744.833.670			4 Dokumen	1.523.001.500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	121.028.110	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	135.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	76.702.260	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	109.318.500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	672.843.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	537.683.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	91.454.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	93.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	782.805.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	647.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	4 Laporan	98.225.220			-	100.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	98.225.220	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	100.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	3.357.650.000			39 Unit	2.898.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	884.556.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	540.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.473.094.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.358.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintahan Daerah	5 Paket	1.304.452.830			5 Unit	816.948.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	209 Unit	871.717.830	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83 Unit	540.300.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	359 Unit	30.040.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131 Unit	57.275.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	164 Unit	74.835.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56 Unit	69.373.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	327.860.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	150.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai</i> <i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</i> <i>Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam</i> <i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> <i>Persentase desa/kelurahan STBM</i> <i>Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 22% 75% 100%	80.571.316.850			90.17 %	71.996.884.602	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	41 Unit	34.219.419.290			41 Unit	23.945.550.172	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas								
		<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i>	6 Unit	25.268.821.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Unit	21.889.325.172	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>	1 Unit	199.673.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Unit	209.475.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i>	10 Unit	5.400.020.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	771.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
		<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	25 Unit	350.903.540	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Unit	525.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
		<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	38 Paket	3.000.000.150	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	38 Paket	550.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	46.232.430.300			39 Upaya Layanan	47.852.859.624	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	29319 Orang	46.603.667	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	35.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	28783 Orang	34.728.750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24948 Orang	1.529.150.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	28141 Orang	484.573.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98638 Orang	37.250.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	112564 Orang	57.881.250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639 Orang	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	238377 Orang	28.940.625	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1107968 Orang	41.152.180	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1396000 Orang	68.148.125	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256454 Orang	10.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	235433 Orang	34.728.750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370654 Orang	45.889.670	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	680900 Orang	28.940.625	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.136 Orang	45.627.190	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	33004 Orang	28.940.625	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4698 Orang	28.476.996	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	99.171.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	19900 Orang	104.186.250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26680 Orang	264.599.810	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	34881 Orang	277.830.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar</i>	2 Dokumen	23.149.970	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	2 Dokumen	121.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	8 Dokumen	225.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	50 Dokumen	195.678.660	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	264.367.354	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	1 Dokumen	1.400.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	26.620.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	2 Dokumen	75.542.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9 Dokumen	220.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	3 Dokumen	42.513.456.280	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	44.579.666.732	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
		<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>	2 Paket	27.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	30.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat</i>	1 Dokumen	99.549.560	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	25.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	1 Dokumen	474.822.860	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1000 Dokumen	320.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	2 Laporan	16.499.880	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	95.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>	2 Dokumen	32.674.100	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	54.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>	42 Unit	285.999.130	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	40 Unit	318.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
		<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	3667 Orang	6.503.890	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3662 Orang	110.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
		<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	1080 Orang	9.946.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1225 Orang	100.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
		<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>	20 Orang	15.295.320	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Orang	35.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								
		<i>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok</i>	1 Tatanan	15.699.790	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	31.857.470	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0 Dokumen	50.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>	1 Dokumen	14.999.750	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								
		<i>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>	1 Dokumen	33.013.790	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40.726.875	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	3 Laporan	52.045.580			3 Laporan	57.881.250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	3 Dokumen	52.045.580	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0 Dokumen	57.881.250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	140 Dokumen	67.421.680			142 Dokumen	140.593.556	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
		<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diaawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>	2 Unit	32.999.550	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		88.500.431	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
		<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>	148 Unit	34.422.130	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	39 Unit	52.093.125	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase tenaga kesehatan teregistrasi</i>	93 %	92.196.400			93 %	57.940.625	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	15.362.000			2 Laporan	29.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	15.362.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	29.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Laporan	76.834.400			1 Dokumen	28.940.625	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	76.834.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	114 Orang	28.940.625	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	100 %	79.999.700			100 %	145.728.750	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan kegiatan Pemberian Izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal UMOT	3 Laporan	29.999.700			3 Laporan	30.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	29.999.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	30.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	1 Laporan	20.000.000			3 Laporan	34.728.750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	230 Dokumen	34.728.750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Laporan	15.000.000			1 Laporan	24.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	24.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	2 Laporan	15.000.000			2 Laporan	57.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	165 Unit	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	170 Unit	57.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	115.667.200			85,9 %	261.463.266	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000			1 Laporan	69.181.875	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	69.181.875	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	59.767.200			2 Laporan	128.336.391	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	44.767.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	64.667.016	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	2 Keluarga	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	350000 Keluarga	63.669.375	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	40.900.000			1 Laporan	63.945.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	2 Dokumen	40.900.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	63.945.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.540.179.290				1.828.000.000	
214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1.540.179.290				1.828.000.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun</i>	16.1 %	28.000.200			16.1 %	60.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun</i>	12 Dokumen	28.000.200			12 Dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal								
		<i>Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan</i>	1 Kegiatan	13.000.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana								
		<i>Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	1 Kegiatan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR</i>	69.09 %	1.223.301.640			69.53 %	1.512.000.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana</i>	60 layanan	367.802.990			60 layanan	605.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>	1 Laporan	34.996.230	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
		<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	1 Laporan	24.996.690	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
		<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	1 Dokumen	60.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		195.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal								
		<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>	4 Dokumen	93.610.270	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		145.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								
		<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	7 Organisasi	154.199.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		175.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Jumlah Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) yang terfasilitasi</i>	295 orang	814.999.300			305 orang	820.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
		<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	295 Orang	814.999.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		820.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) yang terfasilitasi</i>	59 kkb	40.499.350			59 kkb	87.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP								
		<i>Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP</i>	1 Laporan	10.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB								
		<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	5 Unit	5.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan								
		<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>	178 Orang	24.999.350	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		27.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB)</i>	70 %	288.877.450			70 %	256.000.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>	1264 Orang	89.999.850			1264 Orang	80.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>	1 Unit	49.999.950	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
		<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	240 Orang	39.999.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah peserta pengembangan PIK R, UPPKS, saka Kencana dan Genre</i>	372 Orang	198.877.600			75 Orang	176.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
		<i>Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	1 Laporan	28.877.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
		<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	72 Organisasi	169.999.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		141.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PUSKESMAS ADIPALA I			3.572.562.000				3.786.233.358	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.572.562.000				3.786.233.358	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.572.562.000				3.786.233.358	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.572.562.000			100 %	3.786.233.358	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	130.872.000			39 Unit	172.458.858	PUSKESMAS ADIPALA I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	130.872.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		172.458.858	PUSKESMAS ADIPALA I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	3.441.690.000			40 UPTD	3.613.774.500	PUSKESMAS ADIPALA I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.441.690.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	3.613.774.500	PUSKESMAS ADIPALA I
	PUSKESMAS ADIPALA II			2.106.073.000				2.171.681.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.106.073.000				2.171.681.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.106.073.000				2.171.681.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.106.073.000			100 %	2.171.681.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	176.808.000			39 Unit	158.916.000	PUSKESMAS ADIPALA II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	48.000.000	PUSKESMAS ADIPALA II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	128.808.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.916.000	PUSKESMAS ADIPALA II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	40 UPTD	1.929.265.000			40 UPTD	2.012.765.000	PUSKESMAS ADIPALA II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.929.265.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.012.765.000	PUSKESMAS ADIPALA II
	PUSKESMAS BANTARSARI			4.599.327.600				5.277.790.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.599.327.600				5.277.790.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.599.327.600				5.277.790.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	4.599.327.600			100 %	5.277.790.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	129.744.000			39 Unit	186.872.400	PUSKESMAS BANTARSARI
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.744.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		186.872.400	PUSKESMAS BANTARSARI
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	4.469.583.600			40 UPTD	5.090.917.600	PUSKESMAS BANTARSARI
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.469.583.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	5.090.917.600	PUSKESMAS BANTARSARI
	PUSKESMAS BINANGUN			4.439.484.000				4.668.490.586	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.439.484.000				4.668.490.586	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.439.484.000				4.668.490.586	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	4.439.484.000			100 %	4.668.490.586	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	38.496.000			39 Unit	47.467.586	PUSKESMAS BINANGUN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.496.000	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47.467.586	PUSKESMAS BINANGUN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	4.400.988.000			40 UPTD	4.621.023.000	PUSKESMAS BINANGUN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.400.988.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	4.621.023.000	PUSKESMAS BINANGUN
	PUSKESMAS CILACAP SELATAN I			1.742.022.400				1.942.643.014	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.742.022.400				1.942.643.014	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.742.022.400				1.942.643.014	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.742.022.400			100 %	1.942.643.014	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	142.022.400			39 Unit	182.643.014	PUSKESMAS CILACAP SELATAN I
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	103.560.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	137.838.360	PUSKESMAS CILACAP SELATAN I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.462.400	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44.804.654	PUSKESMAS CILACAP SELATAN I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1.600.000.000			40 UPTD	1.760.000.000	PUSKESMAS CILACAP SELATAN I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.600.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	1.760.000.000	PUSKESMAS CILACAP SELATAN I
	PUSKESMAS CILACAP SELATAN II			1.649.940.000				1.680.510.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.649.940.000				1.680.510.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.649.940.000				1.680.510.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.649.940.000			100 %	1.680.510.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	143.940.000			39 Unit	143.940.000	PUSKESMAS CILACAP SELATAN II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.729.940	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	119.729.940	PUSKESMAS CILACAP SELATAN II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.210.060	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24.210.060	PUSKESMAS CILACAP SELATAN II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1.506.000.000			40 UPTD	1.536.570.000	PUSKESMAS CILACAP SELATAN II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.506.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	1.536.570.000	PUSKESMAS CILACAP SELATAN II
	PUSKESMAS CILACAP TENGAH I			1.935.288.000				2.070.166.996	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.935.288.000				2.070.166.996	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.935.288.000				2.070.166.996	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.935.288.000			100 %	2.070.166.996	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	201.954.000			39 Unit	259.318.996	PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.146.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	110.286.660	PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.808.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		149.032.336	PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1.733.334.000			40 UPTD	1.810.848.000	PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.733.334.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	1.810.848.000	PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
	PUSKESMAS CILACAP TENGAH II			2.128.272.000				2.128.428.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.128.272.000				2.128.428.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.128.272.000				2.128.428.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.128.272.000			100 %	2.128.428.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	162.184.000			39 Unit	162.340.000	PUSKESMAS CILACAP TENGAH II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	70.000.000	PUSKESMAS CILACAP TENGAH II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92.184.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92.340.000	PUSKESMAS CILACAP TENGAH II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1.966.088.000			40 UPTD	1.966.088.000	PUSKESMAS CILACAP TENGAH II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.966.088.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	1.966.088.000	PUSKESMAS CILACAP TENGAH II
	PUSKESMAS CILACAP UTARA I			2.243.399.800				2.446.000.177	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.243.399.800				2.446.000.177	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.243.399.800				2.446.000.177	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.243.399.800			100 %	2.446.000.177	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	158.256.000			39 Unit	218.715.377	PUSKESMAS CILACAP UTARA I
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		0	12 Laporan 0	83.400.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	111.005.400	PUSKESMAS CILACAP UTARA I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		0	12 Laporan 0	74.856.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		107.709.977	PUSKESMAS CILACAP UTARA I

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.085.143.800			40 UPTD	2.227.284.800	PUSKESMAS CILACAP UTARA I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.085.143.800	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.227.284.800	PUSKESMAS CILACAP UTARA I
	PUSKESMAS CILACAP UTARA II			1.476.204.800				1.510.992.350	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.476.204.800				1.510.992.350	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.476.204.800				1.510.992.350	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.476.204.800			100 %	1.510.992.350	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit	96.804.800			39 Unit	117.844.350	PUSKESMAS CILACAP UTARA II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.850.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	79.660.350	PUSKESMAS CILACAP UTARA II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.954.800	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38.184.000	PUSKESMAS CILACAP UTARA II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan BLUD	1 UPTD	1.379.400.000			40 UPTD	1.393.148.000	PUSKESMAS CILACAP UTARA II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.379.400.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	1.393.148.000	PUSKESMAS CILACAP UTARA II
	PUSKESMAS CIMANGGU I			3.108.651.600				3.408.651.600	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.108.651.600				3.408.651.600	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.108.651.600				3.408.651.600	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.108.651.600			100 %	3.408.651.600	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	91.512.000			39 Unit	91.512.000	PUSKESMAS CIMANGGU I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.512.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91.512.000	PUSKESMAS CIMANGGU I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	3.017.139.600			40 UPTD	3.317.139.600	PUSKESMAS CIMANGGU I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.017.139.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	3.317.139.600	PUSKESMAS CIMANGGU I
	PUSKESMAS CIMANGGU II			2.855.327.500				3.136.967.500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.855.327.500				3.136.967.500	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.855.327.500				3.136.967.500	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.855.327.500			100 %	3.136.967.500	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	38.926.000			39 Unit	38.926.000	PUSKESMAS CIMANGGU II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	38.926.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38.926.000	PUSKESMAS CIMANGGU II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	2.816.401.500			40 UPTD	3.098.041.500	PUSKESMAS CIMANGGU II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	2.816.401.500	Kab. Cilacap, Cimanggu, Panimbang	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	3.098.041.500	PUSKESMAS CIMANGGU II
	PUSKESMAS CIPARI			4.512.478.000				4.581.433.541	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.512.478.000				4.581.433.541	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.512.478.000				4.581.433.541	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.512.478.000			-	4.581.433.541	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	93.120.000			39 Unit	150.056.541	PUSKESMAS CIPARI
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	93.120.000	Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.056.541	PUSKESMAS CIPARI
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	4.419.358.000			40 UPTD	4.431.377.000	PUSKESMAS CIPARI
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	4.419.358.000	Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	4.431.377.000	PUSKESMAS CIPARI
	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I			3.048.830.000				3.028.040.427	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.048.830.000				3.028.040.427	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.048.830.000				3.028.040.427	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	3.048.830.000			100 %	3.028.040.427	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	94.617.000			39 Unit	151.490.427	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	94.617.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		151.490.427	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	2.954.213.000			40 UPTD	2.876.550.000	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	2.954.213.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.876.550.000	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I
	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II			1.505.746.000				1.736.415.295	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.505.746.000				1.736.415.295	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.505.746.000				1.736.415.295	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	1.505.746.000			100 %	1.736.415.295	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	85.872.000			39 Unit	171.188.295	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	48.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	63.888.000	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	37.872.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Panulisan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		107.300.295	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	1.419.874.000			40 UPTD	1.565.227.000	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1.419.874.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	1.565.227.000	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II
	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I			4.550.308.500				4.426.297.341	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.550.308.500				4.426.297.341	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.550.308.500				4.426.297.341	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	4.550.308.500			100 %	4.426.297.341	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	164.308.500			39 Unit	284.221.341	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	164.308.500	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		284.221.341	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	4.386.000.000			40 UPTD	4.142.076.000	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	4.386.000.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	4.142.076.000	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I
	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II			2.321.682.642				3.074.536.459	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.321.682.642				3.074.536.459	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.321.682.642				3.074.536.459	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.321.682.642			100 %	3.074.536.459	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	110.332.800			39 Unit	170.410.459	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	110.332.800	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.410.459	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	2.211.349.842			40 UPTD	2.904.126.000	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	2.211.349.842	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.904.126.000	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
	PUSKESMAS JERUKLEGI I			2.990.796.000				3.286.124.200	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.990.796.000				3.286.124.200	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.990.796.000				3.286.124.200	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.990.796.000			100 %	3.286.124.200	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1 Unit	38.496.000			39 Unit	41.527.200	PUSKESMAS JERUKLEGI I

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.496.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41.527.200	PUSKESMAS JERUKLEGI I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	2.952.300.000			40 UPTD	3.244.597.000	PUSKESMAS JERUKLEGI I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.952.300.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	3.244.597.000	PUSKESMAS JERUKLEGI I
	PUSKESMAS JERUKLEGI II			2.110.060.000				2.110.084.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.110.060.000				2.110.084.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.110.060.000				2.110.084.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.110.060.000			100 %	2.110.084.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	95.976.000			39 Unit	96.000.000	PUSKESMAS JERUKLEGI II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.128.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	58.128.000	PUSKESMAS JERUKLEGI II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.848.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37.872.000	PUSKESMAS JERUKLEGI II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD Yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan BLUD	1 UPTD	2.014.084.000			40 UPTD	2.014.084.000	PUSKESMAS JERUKLEGI II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.014.084.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.014.084.000	PUSKESMAS JERUKLEGI II
	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT			1.500.415.400				1.551.651.800	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.500.415.400				1.551.651.800	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.500.415.400				1.551.651.800	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	1.350.415.400			100 %	1.391.651.800	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	364.215.400			39 Unit	388.651.800	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.791.400	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	98.227.800	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	290.424.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		290.424.000	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	986.200.000			40 UPTD	1.003.000.000	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	986.200.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	1.003.000.000	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase FKTP terakreditasi</i>	100 %	150.000.000			100 %	160.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Upaya layanan	150.000.000			39 Upaya Layanan	160.000.000	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	150.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	160.000.000	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT
	PUSKESMAS KARANGPUCUNG I			3.664.224.000				2.938.789.945	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.664.224.000				2.938.789.945	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.664.224.000				2.938.789.945	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.664.224.000			100 %	2.938.789.945	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	57.024.000			39 Unit	88.789.945	PUSKESMAS KARANGPUCUNG I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.024.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		88.789.945	PUSKESMAS KARANGPUCUNG I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	3.607.200.000			40 UPTD	2.850.000.000	PUSKESMAS KARANGPUCUNG I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.607.200.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.850.000.000	PUSKESMAS KARANGPUCUNG I
	PUSKESMAS KARANGPUCUNG II			1.464.312.000				1.706.947.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.464.312.000				1.706.947.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.464.312.000				1.706.947.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.464.312.000			100 %	1.706.947.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	98.652.000			39 Unit	114.998.400	PUSKESMAS KARANGPUCUNG II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Surusunda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	31.944.000	PUSKESMAS KARANGPUCUNG II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.652.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Ciporos Kab. Cilacap, Karangpucung, Bengbulang Kab. Cilacap, Karangpucung, Surusunda Kab. Cilacap, Karangpucung, Babakan Kab. Cilacap, Karangpucung, Ciruyung Kab. Cilacap, Karangpucung, Pamulihan Kab. Cilacap, Karangpucung, Sidamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83.054.400	PUSKESMAS KARANGPUCUNG II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1.365.660.000			40 UPTD	1.591.948.600	PUSKESMAS KARANGPUCUNG II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.365.660.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Ciporos Kab. Cilacap, Karangpucung, Bengbulang Kab. Cilacap, Karangpucung, Surusunda Kab. Cilacap, Karangpucung, Babakan Kab. Cilacap, Karangpucung, Ciruyung Kab. Cilacap, Karangpucung, Pamulihan Kab. Cilacap, Karangpucung, Sidamulya	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	1.591.948.600	PUSKESMAS KARANGPUCUNG II
	PUSKESMAS KAWUNGANTEN			4.819.680.000				4.819.680.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.819.680.000				4.819.680.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.819.680.000				4.819.680.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	4.819.680.000			100 %	4.819.680.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	72.000.000			39 Unit	72.000.000	PUSKESMAS KAWUNGANTEN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72.000.000	PUSKESMAS KAWUNGANTEN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	4.747.680.000			40 UPTD	4.747.680.000	PUSKESMAS KAWUNGANTEN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.747.680.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	4.747.680.000	PUSKESMAS KAWUNGANTEN
	PUSKESMAS KEDUNGREJA			5.216.524.000				5.257.101.275	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.216.524.000				5.257.101.275	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.216.524.000				5.257.101.275	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	5.216.524.000			100 %	5.257.101.275	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	166.524.000			39 Unit	166.524.000	PUSKESMAS KEDUNGREJA
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	166.524.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		166.524.000	PUSKESMAS KEDUNGREJA
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	5.050.000.000			40 UPTD	5.090.577.275	PUSKESMAS KEDUNGREJA
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.050.000.000	Kab. Cilacap, Kedungreja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	5.090.577.275	PUSKESMAS KEDUNGREJA
	PUSKESMAS KESUGIHAN I			3.701.564.000				3.082.800.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.701.564.000				3.082.800.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.701.564.000				3.082.800.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	3.701.564.000			100 %	3.082.800.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	74.964.000			39 Unit	85.000.000	PUSKESMAS KESUGIHAN I

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	74.964.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85.000.000	PUSKESMAS KESUGIHAN I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	1 unit	3.626.600.000			40 UPTD	2.997.800.000	PUSKESMAS KESUGIHAN I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		0	1 unit 0	3.626.600.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.997.800.000	PUSKESMAS KESUGIHAN I
	PUSKESMAS KESUGIHAN II			2.499.908.000				2.564.908.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.499.908.000				2.564.908.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.499.908.000				2.564.908.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.499.908.000			100 %	2.564.908.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	110.808.000			39 Unit	110.808.000	PUSKESMAS KESUGIHAN II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	110.808.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.808.000	PUSKESMAS KESUGIHAN II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	2.389.100.000			40 UPTD	2.454.100.000	PUSKESMAS KESUGIHAN II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	2.389.100.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.454.100.000	PUSKESMAS KESUGIHAN II
	PUSKESMAS KROYA I			5.635.432.000				5.635.432.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.635.432.000				5.635.432.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.635.432.000				5.635.432.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	5.635.432.000			100 %	5.635.432.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	76.032.000			39 Unit	76.032.000	PUSKESMAS KROYA I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	76.032.000	Kab. Cilacap, Kroya, Kroya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		76.032.000	PUSKESMAS KROYA I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	5.559.400.000			40 UPTD	5.559.400.000	PUSKESMAS KROYA I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	5.559.400.000	Kab. Cilacap, Kroya, Kroya	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	5.559.400.000	PUSKESMAS KROYA I
	PUSKESMAS KROYA II			2.599.524.000				2.666.910.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.599.524.000				2.666.910.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.599.524.000				2.666.910.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.599.524.000			100 %	2.666.910.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	39.024.000			39 Unit	56.808.000	PUSKESMAS KROYA II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Unit Laporan	39.024.000	Kab. Cilacap, Kroya, Gentasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56.808.000	PUSKESMAS KROYA II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	2.560.500.000			40 UPTD	2.610.102.000	PUSKESMAS KROYA II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.560.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.610.102.000	PUSKESMAS KROYA II
	PUSKESMAS MAJENANG I			3.903.852.000				4.265.418.259	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.903.852.000				4.265.418.259	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.903.852.000				4.265.418.259	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.903.852.000			100 %	4.265.418.259	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	74.352.000			39 Unit	128.883.259	PUSKESMAS MAJENANG I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.352.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		128.883.259	PUSKESMAS MAJENANG I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	3.829.500.000			40 UPTD	4.136.535.000	PUSKESMAS MAJENANG I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.829.500.000	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	4.136.535.000	PUSKESMAS MAJENANG I
	PUSKESMAS MAJENANG II			3.387.872.000				3.497.848.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.387.872.000				3.497.848.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.387.872.000				3.497.848.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.387.872.000			100 %	3.497.848.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	37.848.000			39 Unit	37.848.000	PUSKESMAS MAJENANG II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.848.000	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37.848.000	PUSKESMAS MAJENANG II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	3.350.024.000			40 UPTD	3.460.000.000	PUSKESMAS MAJENANG II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.350.024.000	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	3.460.000.000	PUSKESMAS MAJENANG II
	PUSKESMAS MAOS			3.755.940.000				3.954.175.023	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.755.940.000				3.954.175.023	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.755.940.000				3.954.175.023	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.755.940.000			100 %	3.954.175.023	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	218.340.000			39 Unit	316.575.023	PUSKESMAS MAOS
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	218.340.000	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		316.575.023	PUSKESMAS MAOS
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	3.537.600.000			40 UPTD	3.637.600.000	PUSKESMAS MAOS

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	3.537.600.000	Kab. Cilacap, Maos, Karangreja	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	3.637.600.000	PUSKESMAS MAOS
	PUSKESMAS NUSAWUNGU I			2.880.760.000				3.171.825.841	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.880.760.000				3.171.825.841	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.880.760.000				3.171.825.841	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.880.760.000			100 %	3.171.825.841	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	39.360.000			39 Unit	46.238.541	PUSKESMAS NUSAWUNGU I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	39.360.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		46.238.541	PUSKESMAS NUSAWUNGU I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	2.841.400.000			40 UPTD	3.125.587.300	PUSKESMAS NUSAWUNGU I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	2.841.400.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	3.125.587.300	PUSKESMAS NUSAWUNGU I
	PUSKESMAS NUSAWUNGU II			2.732.926.800				2.894.588.818	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.732.926.800				2.894.588.818	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.732.926.800				2.894.588.818	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.732.926.800			100 %	2.894.588.818	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	110.926.000			39 Unit	179.788.818	PUSKESMAS NUSAWUNGU II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	110.926.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		179.788.818	PUSKESMAS NUSAWUNGU II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	2.622.000.800			40 UPTD	2.714.800.000	PUSKESMAS NUSAWUNGU II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	2.622.000.800	Kab. Cilacap, Nusawungu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.714.800.000	PUSKESMAS NUSAWUNGU II
	PUSKESMAS PATIMUAN			3.224.184.000				4.185.726.827	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.224.184.000				4.185.726.827	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.224.184.000				4.185.726.827	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	3.224.184.000			100 %	4.185.726.827	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Unit	74.184.000			39 Unit	130.726.827	PUSKESMAS PATIMUAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	74.184.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130.726.827	PUSKESMAS PATIMUAN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD</i>	1 UPTD	3.150.000.000			40 UPTD	4.055.000.000	PUSKESMAS PATIMUAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.150.000.000	Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	4.055.000.000	PUSKESMAS PATIMUAN
	PUSKESMAS SAMPANG			2.995.894.600				3.026.369.600	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.995.894.600				3.026.369.600	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.995.894.600				3.026.369.600	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.995.894.600			100 %	3.026.369.600	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>undefined</i>	1 Unit 1 unit	57.120.000			39 Unit	57.120.000	PUSKESMAS SAMPANG
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.120.000	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		57.120.000	PUSKESMAS SAMPANG
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD <i>undefined</i>	1 UPTD 1 unit	2.938.774.600			40 UPTD	2.969.249.600	PUSKESMAS SAMPANG
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.938.774.600	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.969.249.600	PUSKESMAS SAMPANG
	PUSKESMAS SIDAREJA			5.641.022.000				5.940.063.081	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.641.022.000				5.940.063.081	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.641.022.000				5.940.063.081	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	5.641.022.000			100 %	5.940.063.081	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	186.048.000			39 Unit	268.169.081	PUSKESMAS SIDAREJA
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.048.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Sidareja, Sidareja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		268.169.081	PUSKESMAS SIDAREJA
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	5.454.974.000			40 UPTD	5.671.894.000	PUSKESMAS SIDAREJA
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.454.974.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Sidareja, Sidareja Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	5.671.894.000	PUSKESMAS SIDAREJA
	PUSKESMAS WANAREJA I			3.693.164.000				4.024.169.764	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.693.164.000				4.024.169.764	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.693.164.000				4.024.169.764	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	3.693.164.000			100 %	4.024.169.764	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	39.864.000			39 Unit	83.873.764	PUSKESMAS WANAREJA I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39.864.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83.873.764	PUSKESMAS WANAREJA I

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	3.653.300.000			40 UPTD	3.940.296.000	PUSKESMAS WANAREJA I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.653.300.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	3.940.296.000	PUSKESMAS WANAREJA I
	PUSKESMAS WANAREJA II			1.616.652.000				2.205.287.363	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.616.652.000				2.205.287.363	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.616.652.000				2.205.287.363	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.616.652.000			100 %	2.205.287.363	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	1 Unit	116.184.000			39 Unit	202.979.363	PUSKESMAS WANAREJA II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	52.308.300	PUSKESMAS WANAREJA II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56.184.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.671.063	PUSKESMAS WANAREJA II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1.500.468.000			40 UPTD	2.002.308.000	PUSKESMAS WANAREJA II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.500.468.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	2.002.308.000	PUSKESMAS WANAREJA II
	RSUD CILACAP			222.000.000.000				247.975.925.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			222.000.000.000				247.975.925.000	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			222.000.000.000				247.975.925.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan BLUD	100 %	215.000.000.000			100 %	244.040.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	215.000.000.000			40 UPTD	244.040.000.000	RSUD CILACAP
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	215.000.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	244.040.000.000	RSUD CILACAP
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	7.000.000.000			100 %	3.935.925.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	7.000.000.000			41 Unit	3.935.925.000	RSUD CILACAP
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	5.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	3.357.112.500	RSUD CILACAP
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Unit	578.812.500	RSUD CILACAP
	RSUD MAJENANG			103.703.016.000				113.888.166.891	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			103.703.016.000				113.888.166.891	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			103.703.016.000				113.888.166.891	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase cakupan pelayanan BLUD</i>	100 %	100.000.000.000			100 %	110.000.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	100.000.000.000			40 UPTD	110.000.000.000	RSUD MAJENANG
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	100.000.000.000	Kab. Cilacap, Majenang, Jenang	PENDAPATAN DARI BLUD	40 Unit Kerja	110.000.000.000	RSUD MAJENANG
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi</i>	100 %	3.703.016.000			100 %	3.888.166.891	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	3.703.016.000			41 Unit	3.888.166.891	RSUD MAJENANG
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3.703.016.000	Kab. Cilacap, Majenang, Jenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	3.888.166.891	RSUD MAJENANG
	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR			89.988.227.272				61.459.428.569	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			89.988.227.272				61.459.428.569	
103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			89.988.227.272				61.459.428.569	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	17.646.727.272			100 %	17.759.428.569	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	40.000.000			6 Dokumen	30.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	15.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas PSDA Kab. Cilacap	12 Bulan	10.542.542.294			12 Bulan	10.542.542.294	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	10.542.542.294	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	94 Orang/bulan	10.542.542.294	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Dinas PSDA Kab. Cilacap	12 Bulan	175.000.000			12 Bulan	160.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	246 Paket	135.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	25.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Dinas PSDA Kab. Cilacap</i>	12 Bulan	1.613.988.220			12 Bulan	1.490.886.275	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	159.999.620	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	150.886.275	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket	483.374.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	500.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	85.615.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	90.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	250 Laporan	884.999.100	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	750.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia</i>	59 Unit	328.932.410			185 Unit	400.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	24 Unit	199.434.660	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit	250.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	35 Unit	129.497.750	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	135 Unit	150.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan	4.065.101.500			12 Bulan	4.310.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	203.377.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	210.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	3.861.724.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	4.100.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	309 Unit	881.162.848			254 Unit	826.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	69 Unit	498.437.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69 Unit	500.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	101 Unit	25.250.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Unit	26.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	134 Unit	77.475.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145 Unit	80.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit	279.999.448	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	220.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan penunjang data SDA Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	61.3 % 10.50 %	57.685.000.000			11.00 % 67.69 % 67.69 % 67.69 % 50.09 % 11.00 % 50.09 %	35.350.000.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada tahun n	100 %	41.485.000.000			100 %	18.250.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	5 Lembaga	125.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Lembaga	150.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	5 Lembaga	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Lembaga	200.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai								
		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1,6 KM	1.000.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7,8 KM	2.500.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai								
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5,59 KM	4.600.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7,8 KM	700.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku								
		Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Titik	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Titik	300.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	15,48 KM	19.775.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 KM	7.000.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku								
		Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	2 Unit	400.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Unit	500.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing								
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,79 KM	4.600.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0,5 KM	600.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing								
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	7,43 KM	9.560.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 KM	5.000.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku								
		Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4 Titik	1.000.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Titik	1.000.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai								
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	300.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada tahun n</i>	100 %	16.200.000.000			100 %	17.100.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>	3,16 KM	3.950.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	11,66 KM	8.000.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	8 KM	10.950.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5,8 KM	6.000.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1,6 KM	1.000.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7,8 KM	2.500.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>	3 Dokumen	300.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari</i>	94,24 %	7.000.000.000			94,24 %	4.600.000.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan</i>	3862 Sistem	7.000.000.000			3862 Sistem	4.600.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>	2 Dokumen	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	600.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
		<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>	2,5 Liter/Detik	4.250.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2,5 Liter/Detik	2.000.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
		<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	5 Unit	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
		<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	890 SR	2.500.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	612 SR	2.000.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Persentase Drainase dalam keadaan baik</i>	93,6 %	7.656.500.000			93,6 %	3.750.000.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Drainase dalam keadaan Baik</i>	93,6 %	7.656.500.000			95,10 %	3.750.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan								
		<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>	2500 M	1.662.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3500 M	700.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan								
		<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi</i>	9700 M	5.344.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6352 M	1.500.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan</i>	2 Sistem Drainase Lingkungan	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Sistem Drainase Lingku	1.000.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan								
		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>	15 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Sistem Drainase Perkota	550.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			370.848.294.509				278.062.198.559	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			370.348.294.509				277.537.198.559	
103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			333.273.140.863				256.779.537.112	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	31.156.866.009			100 %	31.494.066.009	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	7 Dokumen	40.000.000			2 Dokumen	45.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	27.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	17.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	12 bulan	22.645.318.009			12 Bulan	22.645.318.009	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	150 Orang/bulan	22.645.318.009	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	150 Orang/bulan	22.645.318.009	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	390 Orang	259.000.000			270 Orang	252.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	234.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Orang	27.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi umum kantor DPUPR</i>	12 bulan	1.777.000.000			12 Bulan	2.130.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	197.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	216.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	650.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	825.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	130.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	154.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	800.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	935.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	28 unit	300.000.000			39 Unit	330.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	30 Unit	300.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39 Unit	330.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Administrasi umum kantor DPUPR</i>	12 bulan	4.625.548.000			12 Bulan	4.429.548.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	558.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	362.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	4.067.548.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	4.067.548.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i>	200 unit	1.510.000.000			200 Unit	1.661.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	81 Unit	735.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81 Unit	808.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	119 Unit	375.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119 Unit	412.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8 Unit	400.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	440.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Persentase penanganan sampah</i>	69.05 %	200.000.000			69.05 %	440.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani oleh pembangunan dan peningkatan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS</i>	19000 Rumah Tangga	200.000.000			19100 Ruma h Tangga	440.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
		<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan</i>	473 Ton/hari	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	473 Ton/hari	440.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</i> <i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</i>	94 % 100 %	5.144.346.354			95 % 100 % 100 %	12.757.402.103	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikelola dan dikembangkan</i>	931 sistem	5.144.346.354			941 sistem	12.757.402.103	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)								
		<i>Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan</i>	18 M³/Hari	-	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi Kerja Sama</i>	1 Unit	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja								
		<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	216 Rumah Tangga	31.200.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	216 Rumah Tangga	15.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
		<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1 Unit	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat								
		<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>	931 Rumah Tangga	4.888.146.354	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	940,6585013 Rumah Tangga	3.906.877.103	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
		<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	25 Orang	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Orang	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	8.034.925.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik</i>	75.10 %	32.473.500.000			75.10 %	32.560.000.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Jumlah bangunan gedung yang ditangani</i>	20 Unit	32.473.500.000			20 Unit	32.560.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan</i>	6 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Bangunan Gedung Cagar Budaya	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</i>	18 Bangunan Gedung	12.223.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	18 Bangunan Gedung	11.110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	20 Dokumen	19.950.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Dokumen	21.120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	60 Dokumen	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	60 Dokumen	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	70 %	262.713.428.500			70 %	177.982.569.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten yang ditangani	305.66 Km	262.713.428.500			225.405 KM	177.982.569.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	525.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan								
		Panjang Jalan yang Dibangun	2.5 KM	4.726.800.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0.95 KM	2.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan								
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	52.73 KM	204.536.628.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	69.89 KM	138.412.569.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8.09 KM	15.000.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9.03 KM	11.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan								
		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4 Jembatan	3.000.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Jembatan	2.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan								
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	12.000.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Jembatan	3.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1287.375 KM	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1287.375 KM	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan								
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.14 KM	7.725.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4.69 KM	3.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	242.70 KM	15.000.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	190.96 KM	16.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisís yang memiliki sertifikat kompetensi	41.43 %	700.000.000			41.43 %	770.000.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi	1 kali	200.000.000			1 kali	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
		<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>	250 Orang	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	220 Orang	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	7 Dokumen	172.000.000			7 Dokumen	189.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>	3 Dokumen	72.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	79.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
		<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>	1 Layanan Informasi	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Layanan Informasi	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</i>	1 Dokumen	250.000.000			2 Dokumen	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	1 Dokumen	250.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	4 Dokumen	78.000.000			2 Dokumen	85.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi								
		<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>	100 Lembaga	40.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Lembaga	44.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi								
		<i>Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun</i>	1 Dokumen	38.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	41.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	91 %	885.000.000			91 %	775.500.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTK) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen rencana Tata Ruang yang tersusun (RTRW dan RDTR)</i>	5 Dokumen	690.000.000			5 Dokumen	561.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen	650.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	517.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								
		<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	2 Laporan	40.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah ijin rekomendasi teknis pemanfaatan ruang</i>	40 Ijin	195.000.000			40 Ijin	214.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	40 Dokumen	195.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	40 Dokumen	214.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			37.075.153.646				20.757.661.447	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	5.724.674.687			100 %	1.844.450.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7 Dokumen	40.000.000			7 Dokumen	40.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								
		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								
		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun atau terehabilitasi	135 unit	5.675.949.750			135 unit	1.794.450.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana								
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	35 Unit Rumah	1.177.499.750	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	35 Unit Rumah	1.044.450.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	40 Unit Rumah	500.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35 Unit Rumah	3.998.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.724.937			1 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.724.937	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	90.31 %	10.298.286.447			90.31 %	10.518.286.447	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	58 peningkatan	10.298.286.447			71 Peningkatan	10.518.286.447	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
		<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>	500 Unit Rumah	9.780.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	500 Unit Rumah	10.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	3 Laporan	518.286.447	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	518.286.447	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>	88 % 89 %	20.952.192.512			89 %	8.294.925.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditingkatkan</i>	34 Kawasan	20.952.192.512			35 Kawasan	8.294.925.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>	4 Dokumen	37.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	237.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
		<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	33 Lokasi	20.892.192.512	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	33 Lokasi	8.034.925.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>	1 Laporan	22.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Laporan	22.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</i>	75 %	100.000.000			75 %	100.000.000	
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	<i>Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</i>	75 sertifikasi	100.000.000			100 sertifikasi	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>	1 Laporan	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000				525.000.000	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			500.000.000				525.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	100 %	300.000.000			100 %	315.000.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	5 penyelesaian	300.000.000			100 penyelesaian	315.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Berita Acara	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		210.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	50.000.000			100 %	52.500.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	50.000.000			2 Dokumen	52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah	100 %	100.000.000			100 %	105.000.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	100.000.000			1 dokumen	105.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah								
		Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah								
		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan	44 %	50.000.000			44 %	52.500.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	240 penggunaan	50.000.000			284 penggu naan	52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Laporan	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	284 Laporan	52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			17.885.642.204				15.839.001.606	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.885.642.204				15.839.001.606	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			17.885.642.204				15.839.001.606	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100%	13.433.614.464			-	13.703.675.584	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	26.900.000			100 %	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.750.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.150.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.359.675.584			100 %	8.359.675.584	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	8.359.675.584	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.359.675.584	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100% %	192.000.000			100 %	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	192.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	653.215.000			100 %	919.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	82.215.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	500.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100% %	3.721.823.880			100 %	3.585.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176.225.120	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		185.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.545.598.760	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	480.000.000			100 %	610.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	400.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	35 Unit	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	50.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Persentase Linmas yang Dibina	100% % 100 % 1003.5 %	1.269.668.400			100 % 100 % 100 % 3.5 % 100 % 3.5 %	1.295.326.022	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan aktifitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i> <i>Jumlah laporan aktifitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	950 Kasus 12 Laporan	1.209.668.400			950 Kasus	1.210.326.022	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	4 Dokumen	35.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	105.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	250 Orang	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2250 Orang	55.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	1 laporan	779.768.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350 laporan	725.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>	600 Laporan	37.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600 Laporan	75.326.022	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>	1 Unit	307.900.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	60.000.000			67 Laporan	85.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-	-	45.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Laporan	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>		15.000.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	3.182.359.340			-	840.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.711.998.340			102 Laporan	680.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya</i>		35.000.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		350.000.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		375.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran</i>		50.000.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya</i>		25.000.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>		2.251.998.340	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	28.861.000			13 Dokumen	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran</i>		28.861.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	441.500.000			22 Desa/Kelurahan	130.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</i>		15.000.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</i>		25.000.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar</i>		401.500.000	Kab.Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			9.598.720.649				10.227.218.939	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.598.720.649				10.227.218.939	
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.598.720.649				10.227.218.939	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	8.354.906.639			100 %	8.762.515.139	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	31.435.700			3 Dokumen	49.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	18.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	30.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	13.435.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	19.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan	5.613.750.139			12 bulan	5.613.750.139	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	42 Orang/bulan	5.613.750.139	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	42 Orang/bulan	5.613.750.139	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 Paket	51.000.000			85 Paket	51.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	51.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85 Paket	51.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	727.340.050			12 bulan	791.365.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	112.510.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	151.365.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	174.829.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	180.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	399.999.750	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165 Laporan	400.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.393.376.500			12 bulan	1.696.250.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	201.049.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	231.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.192.327.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.464.750.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	180 Unit	538.004.250			190 Unit	560.650.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	387.155.850	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57 Unit	348.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121 Unit	110.950.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123 Unit	156.250.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	39.898.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i> <i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</i> <i>Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi</i> <i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i>	100 % 100 % 100 % 100 %	1.243.814.010			100 %	1.464.703.800	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan informasi rawan bencana	7 Kegiatan	75.000.000			9 Kegiatan	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
		<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>	375 Orang	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	7 Kegiatan	412.296.130			6 Kegiatan	514.703.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
		<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	109 Unit	99.827.290	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	85 Unit	120.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	30 Orang	47.999.640	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		132.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	2 Dokumen	95.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Makhumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	5 laporan	61.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	2 Kawasan	108.469.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		162.703.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	810 Kegiatan	191.295.680			500 Kegiatan	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	87460 Orang	191.295.680	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	87460 Orang	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya cakupan daerah yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	17 Kegiatan	565.222.200			12 Kegiatan	650.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan								
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	87.219.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	478.003.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			13.784.193.482				12.817.746.503	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.500.310.152				11.443.571.503	
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			11.500.310.152				11.443.571.503	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.360.068.152			100 %	8.335.872.815	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	34.999.750			-	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	19.999.910	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.999.840	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	5.602.796.005			-	5.602.796.005	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.602.796.005	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.602.796.005	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	141 orang	111.000.000			-	62.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 Paket	81.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1.053.071.540			-	906.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.116.380	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	282.455.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.499.760	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	555.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 unit	55.139.950			-	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	55.139.950	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.061.205.241			-	1.148.085.400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176.130.241	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		172.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	885.075.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		975.585.400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	108 unit	441.855.666			-	481.491.410	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	259.999.670	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		427.226.410	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	54.127.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54.050.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	3 Unit	127.728.496	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		215.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina</i>	100 %	1.102.155.060			100 %	939.500.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PSKS dan non PSKS yang terbina</i>	776 orang	1.102.155.060			-	939.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	24 Orang	448.447.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		424.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	90 Keluarga	267.828.650	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	98 Lembaga	367.646.010	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								
		<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	140 Sertifikat	18.233.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i> <i>Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi</i>	100 % 0.34 %	923.977.500			100 %	1.209.795.077	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>Jumlah PPKS yang dibantu</i>	1009 orang	677.853.800			-	890.502.452	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	330 Orang	178.151.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		125.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	50 Orang	30.413.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	60 Orang	117.578.100	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		208.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	11.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		146.502.452	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	92.384.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	144 Orang	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								
		<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20 Orang	5.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100 Orang	176.468.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		305.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100 Orang	12.998.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20 Orang	5.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	10.999.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan								
		<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	35 Orang	7.859.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		57.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<i>Jumlah PPKS lainnya yang dibantu</i>	326 orang	246.123.700			326 Orang	319.292.625	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	24 Orang	25.994.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang								
		<i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	24 Orang	9.987.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	5.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	28 Orang	142.436.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		196.292.625	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA								
		<i>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	250 Orang	62.705.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		67.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan</i>	100 %	364.243.450			100 %	364.243.900	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen PPKS dan DTKS</i>	2 dokumen	364.243.450			-	364.243.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata</i>	50,000 Orang	306.357.450	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		306.357.450	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
		<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	180 Keluarga	22.886.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.886.450	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								
		<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	8 Orang	35.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota</i>	100 %	708.916.150			100 %	555.659.711	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Jumlah korban bencana yang menerima bantuan</i>	10000 orang	491.040.100			-	465.659.711	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	10000 Orang	351.517.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		450.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	40 Orang	24.723.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	6 Unit	24.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	240 Orang	80.799.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial								
		<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	23 Orang	10.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.659.711	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kampung Siaga Bencana yang terbina</i>	6 kampung	217.876.050			-	90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana								
		<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	6 Kampung	160.578.780	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
		<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	8 Orang	57.297.270	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	60.25 %	40.949.840			60.25 %	38.500.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang memenuhi standar</i>	11 komponen	40.949.840			-	38.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota</i>	77 Makam	40.949.840	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		38.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.283.883.330				1.374.175.000	
208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.283.883.330				1.374.175.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di Perangkat Daerah Persentase Organisasi Wanita Yang Aktif	96 % 99%	1.461.675.000			96 %	551.675.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perencana Dalam Melaksanakan Pengarusutamaan Gender</i>	54 Orang	60.000.000			54 orang	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota								
		<i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota</i>	60 Orang	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53 Orang	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan yang dilakukan pembinaan di bidang politik, ekonomi dan organisasi</i>	1160 orang	1.401.675.000			1160 orang	481.675.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 Dokumen	995.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
		<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	35 Organisasi	406.675.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Organisasi	416.675.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha</i>	57 %	85.210.100			57 %	105.000.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peserta pencegahan dan penanggulangan Tindak Perdagangan orang (TPPO)</i>	54 orang	30.210.100			54 orang	40.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	10.210.100	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 Perangkat Daerah	20.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53 Perangkat Daerah	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perempuan yang dibina dalam ketrampilan dan berwirausaha</i>	54 Orang	55.000.000			300 orang	65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	40.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Persentase Kecamatan yang memiliki PUSPAGA Cakupan Keluarga yang terlayani PUSPAGA</i>	76 % 0,00015 %	165.000.000			76 %	190.000.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peserta pembinaan dan sosialisasi dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak anak</i>	900 Orang	165.000.000			900 orang	190.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	4 Dokumen	110.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	130.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	55.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Persentase pencapaian desa / kelurahan layak anak</i>	47 %	123.998.790			47 %	134.500.000	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak anak (PHA) yang terfasilitasi</i>	3 Lembaga	77.998.970			3 lembaga	84.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>	65 Organisasi	52.999.990	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Organisasi	58.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	2 Dokumen	24.998.980	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	5 Dokumen	26.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</i>	6 kegiatan	45.999.820			6 kegiatan	50.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	2 Dokumen	25.999.940	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	3 Dokumen	28.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	19.999.880	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	2 Dokumen	22.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase anak korban kekerasan yang di tangani terkait kabupaten</i>	0,000205 %	447.999.440			0,000205 %	393.000.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peserta pencegahan bagi anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten</i>	100 orang	19.999.840			100 orang	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA								
		<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>	100 Orang	19.999.840	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peserta pembinaan dan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>	100 Orang	124.999.930			100 orang	130.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan</i>	100 Orang	124.999.930	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	130.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah forum anak dan gugus tugas perlindungan anak yang terbentuk</i>	7 kelompok	302.999.670			7 kelompok	238.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota								
		<i>Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK</i>	4 Kegiatan	102.999.670	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		108.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota								
		<i>Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus</i>	15 Orang	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	130.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN			14.818.904.404				12.478.476.899	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.544.762.804				12.163.476.899	
207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			12.544.762.804				12.163.476.899	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	8.203.548.384			100 %	8.078.976.899	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	7 dokumen	38.787.410			3 Laporan	39.151.875	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	24.999.910	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	24.675.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	13.787.500	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	14.476.875	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	45/12 Orang/bulan	5.952.625.672			31/12 Orang /bulan	5.952.625.672	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	45 Orang/bulan	5.952.625.672	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31/12 Orang/bulan	5.952.625.672	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	2 dokumen	49.800.000			2 Dokumen	54.337.500	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	34.800.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	38.587.500	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	15.750.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi umum perangkat daerah</i>	168 bulan	757.228.560			168 bulan	788.267.550	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	27.999.320	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	22.575.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	67.723.840	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	71.111.250	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	106.455.400	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	111.778.800	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	55.050.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	57.802.500	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	120 Laporan	500.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120 Laporan	525.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia</i>	12 bulan	39.825.310			12 bulan	42.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	19.901.460	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	21.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	19.923.850	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Unit	21.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi</i>	36 bulan	824.611.656			36 bulan	871.132.139	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	170.379.656	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	178.898.639	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	50.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	57.750.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	604.232.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	634.483.500	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	38 bulan	540.669.776			38 bulan	331.462.163	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	141.678.250	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	148.762.163	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	32.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	33.600.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	344.991.526	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	126.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	385 Unit	22.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	23.100.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	32 %	3.729.714.900			32 %	3.468.150.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencaker yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	140 Orang	3.709.714.900			145 Orang	3.447.150.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	140 Orang	3.679.859.110	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	145 Orang	3.415.650.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	17 Unit	29.855.790	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	110 Unit	31.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	80 LPK	20.000.000			108 LPK	21.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	20.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	108 Lembaga	21.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	50,65 %	277.000.000			50,65 %	290.850.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	10 Orang	45.000.000			10 Orang	47.250.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan								
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 Orang	20.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Orang	21.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja								
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	40 Orang	26.250.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang berizin	70 Lembaga	15.000.000			80 Lembaga	15.750.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku</i>	70 Lembaga	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	80 Lembaga	15.750.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah informasi lowongan kerja</i>	8800 lowongan	25.000.000			9000 lowong an	26.250.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja								
		<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja</i>	50 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Orang	26.250.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PMI terlindungi</i>	6000 orang	192.000.000			3600 orang	201.600.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran								
		<i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i>	6000 Orang	172.000.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Karangandri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3600 Orang	180.600.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan								
		<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>	10 Orang	20.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Orang	21.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persentase Perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui mediasi</i>	40 % 100 %	334.499.520			100 % 45 % 100 % 45 %	325.500.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama</i>	360 Perusahaan	34.499.520			370 Perusah aan	40.950.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								
		<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	60 Perusahaan	7.999.520	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	370 Perusahaan	13.125.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
		<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	18 Laporan	26.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	24 Laporan	27.825.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang dibina</i>	80 Perusahaan	300.000.000			80 Perusaha an	284.550.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	14 Perkara	150.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	16 Perkara	141.750.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	150.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	66 Lembaga	142.800.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.274.141.600				315.000.000	
331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.274.141.600				315.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri terbina	100 %	2.224.141.600			100 %	273.000.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM/Pelaku Industri terbina	725 IKM	2.224.141.600			730 IKM	273.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	2.224.141.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	12 Dokumen	273.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2.64 %	5.000.000			2.64 %	5.250.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI)	45 dokumen	5.000.000			50 Dokumen	5.250.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6 Dokumen	5.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Dokumen	5.250.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95 %	45.000.000			95 %	36.750.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	2 dokumen	45.000.000			3 Dokumen	36.750.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	21.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas								
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	15.750.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	DINAS KETAHANAN PANGAN			14.863.544.702				9.509.289.770	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.863.544.702				9.509.289.770	
209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			14.863.544.702				9.509.289.770	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.996.331.522			100 %	7.374.289.770	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi DISHANPAN	7 Dokumen	20.000.000			6 Dokumen	32.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	12.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	20.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 12 Bulan	5.767.289.770			12 Bulan	5.767.289.770	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.767.289.770	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Orang/bulan	5.767.289.770	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi administrasi kepegawaian Jumlah Pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian	70 orang 70 Orang	57.400.000			70 Orang	65.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	32.400.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65 Paket	35.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum DISPABUN Tersedianya Administrasi Umum DISHANPAN Tersedianya Administrasi Umum DISPABUN	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	510.166.260			12 Bulan	600.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	89.999.260	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	130.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.167.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	300.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Laporan	330.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	10 unit 10 Unit	34.790.580			10 Unit	95.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	24.999.720	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	60.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9.790.860	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	35.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> <i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan 12 Bulan	315.000.000			12 Bulan	485.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	65.152.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	85.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	249.848.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i> <i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	72 unit 72 Unit	291.684.912			72 Unit	330.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit	195.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	70 Unit	34.960.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Unit	40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	61.724.912	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	90.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	179 %	4.526.026.950			179 %	650.000.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengelola Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan</i> <i>Jumlah Pengelola Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (kelompok)</i>	6 kelompok 6 kelompok	4.526.026.950			6 kelompok	650.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya								
		<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>	6 Unit	4.526.026.950	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Unit	650.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan Ketersediaan energi dan protein per kapita Produksi Komoditas Perkebunan (Bidang Perkebunan)	7.2 % 100 % 62495,8 ton	2.739.559.770			100 % 9.6 % 9.6 % 100 % 62604.1 ton	700.000.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Jumlah Kelompok Dibina dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	60 kelompok	180.005.240			65 kelompok	235.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya								
		<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	6 Laporan	80.633.500	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	120.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>	2 laporan	29.999.800	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 laporan	25.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota								
		<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan	39.999.700	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis								
		<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>	2 Laporan	29.372.240	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Jumlah kelompok dibentuk dalam rangka pengembangan konsumsi pangan</i>	50 kelompok	2.559.554.530			55 kelompok	465.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								
		<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
		<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	8 Laporan	2.549.554.530	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Laporan	450.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	11,62%	407.267.560			7.75 %	500.000.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Jumlah dokumen penanganan rawan pangan</i>	1 dokumen	47.438.660			1 Dokumen	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								
		<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	1 Dokumen	47.438.660	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kelompok penerima penanganan rawan pangan</i>	34 kelompok	359.828.900			39 kelompok	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	359.828.900	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	81.42 %	194.358.900			81.42 %	285.000.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Berekistrasi Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Berekistrasi</i>	145 PSAT 145 Produk PSAT	194.358.900			155 Produk PSAT	285.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan								
		<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan</i>	10 Dokumen	26.999.750	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Dokumen	35.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	44.998.650	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan								
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Laporan	122.360.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			43.640.655.000				24.140.798.523	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			43.640.655.000				24.140.798.523	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			43.640.655.000				24.140.798.523	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	15.673.667.705			100 %	15.575.697.530	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	21.999.770			3 dokumen	22.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.999.890	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	9.999.880	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan 12 bulan	8.325.653.030			12 bulan	8.325.653.030	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	8.325.653.030	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	93 Orang/bulan	8.325.653.030	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	756.337.220			12 bulan	756.338.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	125.217.220	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	125.217.275	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	206.407.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	206.407.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.543.600	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	47.543.825	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	377.169.400	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115 Laporan	377.170.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	5.656.927.825			12 bulan	5.680.956.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.285.365	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	264.313.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	5.416.642.460	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	5.416.642.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	124 unit	912.749.860			131 unit	790.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	58 Unit	772.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64 Unit	650.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	31 Unit	40.750.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65 Unit	40.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit	99.999.860	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	100 %	375.000.000			100 %	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Tersusun</i>	1 dokumen	125.000.000			3 dokumen	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	125.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokuman	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten Cilacap yang Tersusun</i>	2 dokumen	250.000.000			5 dokumen	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	2 Dokumen	250.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air	39.68 Indeks	471.500.000			39.68 Indeks	471.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Tersusunnya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH</i>	1804 dokumen	415.500.000			2102 dokum en	415.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	1 Dokumen	55.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	55.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun</i>	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan</i>	1 Unit	63.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		63.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	300 Dokumen	232.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2100 Dokumen	232.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Tersusunnya Dokumen Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan LH</i>	1 dokumen	56.000.000			1 dokumen	56.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	56.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Kegiatan	56.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0.44 Indeks	18.608.001.833			0.44 Indeks	680.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luas Kawasan yang Dikelola Keanekaragaman Hayatinya</i>	1046,3 ha	18.608.001.833			1296,3 ha	680.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Ha	18.608.001.833	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Ha	680.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	100 %	30.000.000			100 %	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	15 dokumen	30.000.000			17 dokumen	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	17 Dokumen	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penataan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah yang ditindaklanjuti	100 %	50.000.000			100 %	55.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Dibina dan Diaawasi</i>	55 usaha/kegiatan	50.000.000			94 usaha/kegiatan	55.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	5 Dokumen	20.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	34 Dokumen	22.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diaawasi</i>	50 Badan Usaha	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	71.07 %	77.499.650			71.07 %	60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Kapasitasnya Meningkat Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	223 lembaga	77.499.650			234 lembag a	60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	77.499.650	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	175 Dokumen	60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	100 %	15.000.000			100 %	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat/ Kasus Lingkungan yang Ditindaklanjuti	15 kasus	15.000.000			18 kasus	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	15 Pengaduan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	18 Pengaduan	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	14.3 %	8.339.985.812			14.3 %	6.853.600.993	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, dan Diolah	590 ton	8.339.985.812			600 ton	6.853.600.993	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	-	205.794.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		205.794.093	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		300.720.800	Kab. Cilacap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.720.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota		297.500.000	Kab. Cilacap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		100.000.000	Kab. Cilacap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>		7.385.971.012	Kab. Cilacap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.162.086.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.111.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTKabupaten/ kota atau TPA/ TPST Regional</i>		50.000.000	Kab. Cilacap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			13.286.252.299				14.323.938.419	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.286.252.299				14.323.938.419	
212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			13.286.252.299				14.323.938.419	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	11.212.834.709			100 %	11.273.938.419	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	9 dokumen	24.077.100			9 dokumen	27.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	17.100.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 Laporan	6.977.100	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan	7.541.438.419			12 bulan	7.541.438.419	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	53 Orang/bulan	7.541.438.419	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	62 Orang/bulan	7.541.438.419	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	121 orang	84.600.000			139 orang	80.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	69.600.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	60.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Orang	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan</i>	12 bulan	831.101.920			12 bulan	900.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	151.102.020	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	125.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	180.000.100	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan</i>	1 Paket	49.999.800	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	450.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	34 unit	182.783.220			48 unit	250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	12 Unit	119.611.620	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Unit	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	22 Unit	63.171.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Unit	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	1.861.983.070			12 bulan	1.950.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	538.759.070	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	550.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.323.224.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	144 unit	686.850.980			435 unit	525.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	21 Unit	195.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	117 Unit	50.546.950	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	335 Unit	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	441.304.030	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Cakupan penerbitan Kartu Keluarga</i>	<i>99.49 % 36.02 % 28.3 % 99.93 %</i>	1.588.319.840			99.49 %	2.255.000.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk</i>	7 kegiatan	324.446.440			7 kegiatan	665.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan								
		<i>Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</i>	7 Laporan	324.446.440	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Laporan	665.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah kegiatan penataan pendaftaran penduduk</i>	2 kegiatan	1.201.145.550			2 kegiatan	1.500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan								
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	1.201.145.550	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Dokumen	1.500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan	15 lembaga	48.867.850			16 lembaga	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk								
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	2500 Orang	48.867.850	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2500 Orang	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 kegiatan	13.860.000			2 kegiatan	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk								
		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	13.860.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran	94.4 %	80.097.750			94.4 %	120.000.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan di pencatatan sipil	10 kegiatan	55.000.000			10 kegiatan	90.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil								
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Layanan	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 kegiatan	25.097.750			1 kegiatan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Laporan	25.097.750	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	385.000.000			100 %	625.000.000	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Data kependudukan yang dikelola secara elektronik dan terpelihara dalam kondisi baik	5273 record	15.000.000			41779 record	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan								
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5273 Dokumen	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	41779 Dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dipelihara	1 aplikasi	350.000.000			1 aplikasi	525.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	350.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	525.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kegiatan	20.000.000			1 kegiatan	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	20.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100 %	20.000.000			100 %	50.000.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	2 dokumen	20.000.000			2 dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain								
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	20.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			15.560.652.631				16.423.192.644	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.560.652.631				16.423.192.644	
213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			15.560.652.631				16.423.192.644	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.875.717.779			100 %	7.001.729.233	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	34.893.600			7 dokumen	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.893.870	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.999.730	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN	12 bulan	4.933.824.857			12 bulan	4.933.824.857	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.933.824.857	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Orang/bulan	4.933.824.857	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 orang	36.000.000			60 orang	34.728.750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	36.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 Paket	34.728.750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	921.593.110			12 bulan	831.455.001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	152.847.110	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	115.762.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.082.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	111.132.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan</i>	12 Paket	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	82.687.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	400 Laporan	594.663.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450 Laporan	521.873.001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	50 unit	99.674.790			35 unit	165.375.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	50 Unit	99.674.790	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	165.375.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	568.006.000			12 bulan	636.693.750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	124.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115.762.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	444.006.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		520.931.250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i>	98 unit	281.725.422			290 unit	364.651.875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	18 Unit	182.309.422	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		162.067.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	79 Unit	59.280.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86.821.875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	40.136.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115.762.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	100 %	6.264.934.852			100 %	6.155.825.901	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	<i>Jumlah desa yang menyelenggaraan penataan desa</i>	2 desa	6.264.934.852			2 desa	6.155.825.901	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa								
		<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>	2 Desa	-	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Desa	57.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa								
		<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya</i>	269 Desa	5.964.934.852	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	269 Desa	5.072.827.525	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi</i>	730 Unit	300.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	735 Unit	1.025.248.376	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	100 %	220.000.000			100 %	212.430.750	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa dan atau pihak ketiga	269 Desa	220.000.000			269 desa	212.430.750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	21 Dokumen	60.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	21 Dokumen	68.685.750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	30 Dokumen	60.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	40 Dokumen	57.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	85.995.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes	100 %	815.000.000			100 %	818.563.625	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes	269 Desa	815.000.000			269 Desa	818.563.625	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	55.125.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	63.581.250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	55.125.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	269 Dokumen	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	269 Dokumen	55.125.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	538 Orang	290.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	538 Orang	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	57.826.125	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa								
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	225 Laporan	-	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0 Laporan	170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa								
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	284 Dokumen	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	284 Dokumen	55.381.250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	60.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	55.125.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD								
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	269 Orang	70.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	269 Orang	66.150.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	1 Dokumen	70.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	55.125.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina</i>	12.96 %	1.385.000.000			12.96 %	2.234.643.135	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina</i>	568 lembaga 568 Lembaga	1.385.000.000			568 lembag a	2.234.643.135	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	33.075.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen	60.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	82.687.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	568 Lembaga	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	568 Lembaga	646.636.578	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	5 Dokumen	80.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	176.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	2 Laporan	65.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	154.350.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	1 Laporan	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	88.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	950.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	1.053.294.057	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	DINAS PERHUBUNGAN			23.495.289.266				24.195.859.815	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.495.289.266				24.195.859.815	
215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			23.495.289.266				24.195.859.815	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	14.667.813.645			100 %	14.515.859.815	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	40.000.000			6 Dokumen	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	12 Bulan	8.510.359.815			12 Bulan	8.510.359.815	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	8.510.359.815	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	65 Orang/bulan	8.510.359.815	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Dinas perhubungan Kabupaten Cilacap	1 Bulan	200.657.520			1 Bulan	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	211 Paket	200.657.520	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125 Paket	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	12 Bulan	1.535.763.000			12 Bulan	1.350.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	177.258.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	544.530.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Paket	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	175.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	663.975.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360 Laporan	600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	21 Unit	190.437.310			7 Unit	240.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	190.437.310	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	240.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.096.092.000			12 Bulan	3.075.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	300.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	2.796.092.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	2.675.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	326 Unit	1.094.504.000			143 Unit	1.150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	42 Unit	819.504.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Unit	700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	283 Unit	125.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	127 Unit	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Rasio Perlengkapan jalan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Rasio Ijin Trayek</i>	0,54 rasio 97,65 % 0,62 rasio	8.697.475.621			0,54 rasio	9.530.000.000	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	225.000.000			1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	225.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	748 Unit	6.930.025.103			230 Unit	7.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	340 Unit	3.981.498.103	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit	4.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	408 Unit	2.948.527.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180 Unit	3.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	2 Unit	364.920.710			- Unit	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)								
		<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	2 Unit	364.920.710	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Unit	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Uji</i>	14691 Unit	577.305.808			15572 Unit	1.225.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	2 Unit	207.305.808	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74 Unit	575.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	5000 Dokumen	125.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12000 Dokumen	450.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	2 Unit	245.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	161.492.740			1 Laporan	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	161.492.740	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	7 Laporan	140.532.260			1 Laporan	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	7 Laporan	140.532.260	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyediaan Angkutan Umum</i>	3120 Unit	148.199.000			3125 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>	3120 Unit	148.199.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3125 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan</i>	1 Dokumen	75.000.000			- Dokumen	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Dokumen	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan</i>	1 Dokumen	75.000.000			-	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio ketersediaan rambu Angkutan Sungai dan Penyeberangan	0.5 rasio	130.000.000			0.5 rasio	150.000.000	
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	<i>Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau</i>	1 Laporan	20.000.000			1 Laporan	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Unit	110.000.000			1 Unit	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	2 Unit	110.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			15.233.761.598				16.171.372.789	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.233.761.598				16.171.372.789	
216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			14.808.689.308				15.621.372.789	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.225.434.489			100 %	9.606.372.789	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	40.000.000			7 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49 Orang	5.921.372.789			60 Orang	5.921.372.789	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	5.921.372.789	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Orang/bulan	5.921.372.789	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 Orang	564.600.000			95 Orang	625.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	39.600.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90 Paket	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20000 Orang	500.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	21500 Orang	550.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	684.650.020			100 %	625.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	186.004.110	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	135.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Paket	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	303.645.910	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Unit	58.905.130			15 Unit	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	58.905.130	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Unit	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.486.406.550			12 Laporan	1.750.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	306.800.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.179.606.550	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	125 Unit	469.500.000			129 Unit	570.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	160.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Unit	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit	145.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115 Unit	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	14.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	73 %	1.355.866.010			73 %	1.335.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media yang mendiseminasikan Informasi Publik	135 Media	1.355.866.010			135 Media	1.335.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media								
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat								
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	35 Komunitas	50.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik								
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Permohonan	84.959.860	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik								
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	100 Rekomendasi	28.200.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi								
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	73 Persentase	988.743.450	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		850.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	74.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten								
		Jumlah Konten Informasi Publik	360 Konten	55.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik								
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/pelatihan	55 Orang	43.962.700	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai masterplan	75 %	4.227.388.809			75 %	4.680.000.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi e-government	100 %	4.227.388.809			100 %	4.680.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda								
		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	69.586.520	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah								
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	5.499.400	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	30 Perangkat Daerah	484.339.439	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas								
		<i>Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas</i>	6 Program	36.095.450	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE								
		<i>Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</i>	2 Dokumen	31.868.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE								
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>	52 Perangkat Daerah	3.600.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			325.944.980				400.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	100 %	325.944.980			100 %	400.000.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</i>	100 %	325.944.980			100 %	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral								
		<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>	54 Orang	44.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral								
		<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>	100 Persentase	281.944.980	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			99.127.310				150.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Tingkat keamanan informasi pemerintah</i>	1.02 indeks	99.127.310			1.02 indeks	150.000.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah</i>	1 Tim	99.127.310			1 Tim	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	99.127.310	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			8.077.350.498				7.996.872.493	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.077.350.498				7.996.872.493	
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			8.077.350.498				7.996.872.493	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	7.283.549.428			100 %	7.405.904.340	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	38.499.600			7 Dokumen	40.425.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.874.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	25.068.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.624.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.356.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	4.856.914.748			12 Bulan	4.856.914.748	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.856.914.748	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	37 Orang/bulan	4.856.914.748	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75 orang	50.000.000			75 Orang	52.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	36.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	8.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Orang	15.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	875.627.720			12 Bulan	919.422.457	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.054.950	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	31.557.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	179.371.370	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	188.352.029	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	136.202.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Paket	143.012.940	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	129.999.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	136.499.738	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	420.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	32 unit	171.844.740			290 Unit	180.833.940	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	21 Unit	16.814.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	13.020.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	115.753.440	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90 Unit	125.682.690	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	39.276.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	42.131.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan	930.987.500			12 Bulan	977.536.875	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	265.473.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	278.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	665.514.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	699.286.875	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	261 unit	359.675.120			224 Unit	378.271.320	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	13 Unit	123.561.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	129.739.470	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	81 Unit	20.250.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	34.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	160 Unit	103.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	109.142.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	108.114.220	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	100.270.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit	4.249.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	4.468.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan</i>	100 %	167.779.700			100 %	176.168.685	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal</i>	2 Dokumen	83.811.300			1 Dokumen	88.001.865	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	2 Dokumen	83.811.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	88.001.865	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	1 dokumen	83.968.400			1 Dokumen	88.166.820	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	1 Dokumen	83.968.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	88.166.820	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Promosi di Tingkat Regional dan/atau Nasional yang Ditikuti</i>	100 %	238.296.260			100 %	250.211.968	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah promosi PM yang diselenggarakan</i>	4 kali	238.296.260			80 kali	250.211.968	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>	4 Dokumen	238.296.260	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	8 Dokumen	250.211.968	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan</i>	100 %	328.475.110			100 %	102.375.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Perizinan yang Diterbitkan sesuai Kewenangan</i>	25000 Izin Terbit	328.475.110			25000 Izin Terbit	102.375.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	20000 Pelaku Usaha	305.445.210	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20000 Pelaku Usaha	78.193.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
		<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	5220 Pelaku Usaha	23.029.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5220 Pelaku Usaha	24.181.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Kepatuhan LKPM</i>	75 %	26.900.000			75 %	28.245.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</i>	1303 Perusahaan	26.900.000			1390 Perusa haan	28.245.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	168 Pelaku Usaha	26.900.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	500 Pelaku Usaha	28.245.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha</i>	100 %	32.350.000			100 %	33.967.500	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Dikelola</i>	4 Dokumen	32.350.000			4 Dokumen	33.967.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	32.350.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	33.967.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			8.595.302.055				8.459.519.642	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.595.302.055				8.459.519.642	
223	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			805.297.210				665.974.050	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk</i>	9,98 %	775.297.880			9,98 %	634.474.050	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan sesuai SNP	60 perpustak aan	502.488.580			65 perpusta kaan	408.724.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan								
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustak aan	29.999.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30 Perpustak aan	21.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota								
		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustak aan	24.999.630	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.750.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40 Orang	32.639.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		34.440.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan								
		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	3 Dokumen	84.811.320	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		101.284.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan								
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.500 Eksemplar	266.038.130	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		183.750.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik								
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	4 Perpustaka an	63.999.900	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		52.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	81900 orang	272.809.300			82100 orang	225.750.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang	30.532.660	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		31.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial								
		<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>	3 Perpustakaan	39.999.770	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		42.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Perpustakaan	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26.250.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca								
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota</i>	4 Orang	41.117.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat								
		<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</i>	60 Lokus	136.159.870	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		105.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	25 %	29.999.330			25 %	31.500.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Judul Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan</i>	2 Judul	29.999.330			2 Judul	31.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan								
		<i>Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>	12 Eksemplar	29.999.330	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		31.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			7.790.004.845				7.793.545.592	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.984.984.015			100 %	6.989.175.767	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen	15.199.490			9 Dokumen	15.960.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	9.999.670	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	10.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 Laporan	5.199.820	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	5.460.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan	4.860.036.203			12 bulan	4.752.550.482	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35 Orang/bulan	4.860.036.203	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	33 Orang/bulan	4.752.550.482	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	48 orang	55.000.000			48 orang	57.750.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	31.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Orang	26.250.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	695.206.730			12 bulan	729.971.550	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	129.666.630	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	136.153.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	170.540.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	179.068.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	31.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	349.999.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	367.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen	14.999.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	15.750.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	20 unit	156.760.470			37 unit	167.230.140	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	156.760.470	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	167.230.140	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan	620.740.700			12 Bulan	654.414.725	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	7.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	10.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	239.499.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	238.875.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	373.741.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	405.039.725	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i>	252 Unit	582.040.422			213 unit	611.298.870	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	18 Unit	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Unit	210.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	123 Unit	65.995.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130 Unit	69.300.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	304.046.422	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	319.398.870	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	51 Unit	11.999.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63 Unit	12.600.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	75.34 %	773.954.200			75.34 %	771.749.475	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen/ arsip dinamis yang dikelola</i>	27600 berkas	421.661.400			36800 berkas	401.841.720	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis								
		<i>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</i>	8500 Berkas	167.555.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	8500 Berkas	135.030.420	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	52 Laporan	254.106.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	52 Laporan	266.811.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen/ arsip statis yang dikelola</i>	2100 berkas	59.999.980			2800 berkas	63.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis								
		<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>	850 Arsip	59.999.980	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		63.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengguna yang bisa mengakses arsip statis</i>	220 orang	292.292.820			320 orang	306.907.755	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN								
		<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>	100 Pengguna	59.999.830	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Pengguna	63.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>	5 Laporan	232.292.990	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		243.907.755	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	50 %	31.066.630			50 %	32.620.350	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	<i>Jumlah arsip akibat bencana yang diselamatkan</i>	220 berkas	6.066.630			320 berkas	6.370.350	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana								
		<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	100 Arsip	6.066.630	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Arsip	6.370.350	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	<i>Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, kecamatan dan desa/kelurahan yang mengalami pemekaran dan/atau pemecahan yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	3 arsip	25.000.000			4 arsip	26.250.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	3 Arsip	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26.250.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	DINAS PERIKANAN			11.587.569.527				8.809.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.587.569.527				8.809.000.000	
325	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			11.587.569.527				8.809.000.000	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.538.031.027			100 %	6.304.000.000	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	38.999.900			-	25.500.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.999.900	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.500.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.690.026.333			-	4.500.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.690.026.333	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.500.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55 Orang	53.000.000			-	47.500.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	33.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.500.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	555.821.700			-	549.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	95.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	135.321.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		136.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	290.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 unit	59.961.990			-	60.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	59.961.990	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan	803.302.000			-	830.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	175.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	628.302.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	111 unit	336.919.104			-	292.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	46 Unit	195.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	64 Unit	41.920.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	99.999.104	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	80 %	1.858.499.470			80 %	1.420.000.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap</i>	12 Kelompok	1.089.999.800			-	535.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan								
		<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap								
		<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia</i>	12 Unit	1.054.999.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Nelayan yang mengikuti fasilitasi, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan</i>	6500 Orang	698.500.000			-	800.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil								
		<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	6500 Orang	698.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		800.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<i>Jumlah TPI yang Sudah Memenuhi Standar Minimal</i>	11 Unit	49.999.690			-	60.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
		<i>Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	11 Layanan	49.999.690	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000	DINAS PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Skala Kecil < 10 GT yang Sudah Terdaftar dan Berijin	100 Unit	19.999.980			-	25.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT								
		Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	100 Rekomendasi	19.999.980	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	80 %	2.709.239.030			80 %	640.000.000	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapat fasilitasi, sosialisasi, pembinaan pendampingan dan pelatihan	46 Kelompok	128.500.000			-	135.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil								
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	60.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha								
		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	6 Kelompok	18.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan dan BBI yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	31 Unit	2.580.739.030			-	505.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	670.255.380	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	39.988.100	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	30 Unit	1.835.495.550	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif	80.65 %	30.000.000			80.65 %	35.000.000	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pokmaswas yang Melakukan Pengawasan Sumberdaya Perikanan</i>	6 Kelompok	30.000.000			-	35.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan								
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk</i>	150 Orang	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	77,78 %	451.800.000			77,78 %	410.000.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<i>Jumlah Rekomendasi Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang sudah berijin</i>	5 Kelompok	30.000.000			-	30.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko								
		<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana</i>	1 Kelompok	421.800.000			-	380.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	57855 Ton	229.300.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi</i>	250 Pelaku Usaha	192.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		130.000.000	DINAS PERIKANAN
	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			18.952.548.831				19.829.847.314	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.366.285.610				8.665.000.000	
219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			9.366.285.610				8.665.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	100 % 25 %	724.854.850			25 % 100 % 25 % 100 %	340.000.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang diberdayakan dan dikembangkan</i>	375 orang	274.855.020			-	230.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Keuirausahaan Pemuda</i>	120 Orang	164.915.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								
		<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>	110 Orang	109.939.120	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	5 Dokumen	449.999.830			-	110.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota								
		<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ kota</i>	200 Orang	449.999.830	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	100 Cabor	8.611.431.860			100 Cabor	8.290.000.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan dikembangkan</i>	6 Cabang Olahraga	200.000.000			-	250.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
		<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/ kota yang tersedia</i>	20 Unit	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan</i>	4 Dokumen	1.386.431.860			-	1.200.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	4 Kegiatan	465.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga								
		<i>Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/ kota</i>	600 Orang	921.431.860	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		900.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina dan dikembangkan</i>	50 orang	75.000.000			-	190.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota								
		<i>Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/ kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan</i>	90 Orang	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		190.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<i>Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan</i>	2 Organisasi	6.500.000.000			-	6.500.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait								
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	6.500.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.500.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 unit	450.000.000			-	150.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan								
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	450.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang di bina	100 %	29.998.900			100 %	35.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	1 Laporan	29.998.900			-	35.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah								
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	29.998.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.586.263.221				11.164.847.314	
326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			9.586.263.221				11.164.847.314	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.376.063.451			100 %	9.003.847.314	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	40.000.000			-	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.707.469.466			-	6.098.492.940	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.707.469.466	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.098.492.940	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75 orang	33.600.000			-	82.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	33.600.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	791.998.140			-	800.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	179.999.540	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		190.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	134.999.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	264 Laporan	426.999.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		370.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	20 unit	109.990.830			-	121.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	109.990.830	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		121.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan	1.093.993.800			-	1.240.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	129.999.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	963.994.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	75 unit	599.011.215			-	632.354.374	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14 Unit	179.725.020	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		194.261.051	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	60 Unit	319.286.440	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		348.093.323	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		-	-	99.999.755	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota</i>	10 %	803.999.610			10 %	789.000.000	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>	1 Dokumen	100.000.000			-	56.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		56.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola</i>	4 Laporan	61.999.790			-	67.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>	50 Orang	61.999.790	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		67.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola</i>	2 unit	600.000.000			-	620.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>	2 Unit	600.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		620.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota</i>	2 Laporan	41.999.820			-	46.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha</i>	2 Laporan	41.999.820	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		46.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase obyek wisata yang dipromosikan	24 %	1.010.000.000			24 %	982.000.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Obyek Wisata yang dipromosikan</i>	6 Dokumen	1.010.000.000			-	982.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	9 Kegiatan	910.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		900.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	2 Promosi	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		82.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif (semua 17 Subsektor yang dikembangkan)	33.33 %	100.000.000			33.33 %	55.000.000	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	2 Dokumen	100.000.000			-	55.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah								
		<i>Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah</i>	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	25 %	296.200.160			25 %	335.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan</i>	60 Orang	221.200.160			-	255.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	1 Laporan	86.200.160	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		95.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
		<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	35 Orang	60.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	25 Orang	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Pengembangan kapasitas Pelaku Ekraf</i>	25 Orang	75.000.000			-	80.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif								
		<i>Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	25 Orang	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	DINAS PERTANIAN			61.122.501.455				32.433.592.768	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			61.122.501.455				32.433.592.768	
327	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			61.122.501.455				32.433.592.768	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	29.034.581.915			100 %	28.968.592.768	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 dokumen	40.000.000			3 dokumen	31.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	15.750.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	15.750.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan	23.531.801.285			12 bulan	23.531.801.285	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	215 Orang/bulan	23.531.801.285	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	225 Orang/bulan	23.531.801.285	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	285 orang	175.000.000			280 orang	194.250.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	157.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	36.750.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	1.449.926.400			12 bulan	1.559.250.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	175.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	183.750.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	499.926.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	525.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	10.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	600 Laporan	700.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	650 Laporan	840.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	2 paket	249.750.230			2 paket	120.750.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Unit	99.961.570	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70 Unit	105.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	149.788.660	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Unit	15.750.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	2.388.106.000			12 bulan	2.532.596.483	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	550.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	577.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.838.106.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.955.096.483	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	12 bulan	1.199.998.000			12 bulan	998.445.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	130 Unit	450.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130 Unit	472.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	110 Unit	99.998.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115 Unit	210.945.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	29 Unit	650.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29 Unit	315.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi ternak Produksi Tanaman Hortikultura Produksi Tanaman Pangan	9075397 ekor 71967 ton 1,010489 ton	13.382.968.670			73407 ton 1013036 ton 73407 ton 9166151 ekor 9166151 ekor 1013036 ton	1.942.500.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Hortikultura yang Digunakan</i>	5 jenis	1.560.108.010			5 jenis	1.155.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
		<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	1 Laporan	375.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	393.750.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
		<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	1 Laporan	175.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	183.750.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan								
		<i>Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan</i>	1 Laporan	1.010.108.010	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		577.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan yang Dikelola</i>	4 Jenis	699.999.800			4 jenis	577.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman								
		<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>	1 Dokumen	579.999.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	420.000.000	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman								
		<i>Jumlah Pemanfaatan SDG Heuxan/Tanaman</i>	1 Dokumen	120.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	157.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peserta Kontes Ternak</i>	100 ekor	100.000.000			100 ekor	105.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil								
		<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>	1 Laporan	100.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	105.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peningkatan Populasi Ternak (Kambing, Domba, Sapi, Itik dan Ayam)</i>	155702 ekor	11.022.860.860			158816 ekor	105.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak								
		<i>Jumlah benih/bibit ternak yang beredar</i>	4 Laporan	11.022.860.860	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3500 Laporan	105.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Luas pelayanan Jaringan Irigasi</i>	9,8 %	17.729.951.090			9,8 %	472.500.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Alsintan yang Dimanfaatkan Kelompok Tani/ Gapoktan</i>	545 unit	1.957.603.290			550 unit	157.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya								
		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	1 Laporan	1.957.603.290	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	157.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Tersedia</i>	237 unit	15.772.347.800			259 unit	315.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian								
		<i>Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 Unit	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Unit	157.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani								
		<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>	3 Unit	15.572.347.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	240 Unit	157.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular</i>	24,90 %	349.999.920			24,90 %	367.500.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Angka Kesakitan Ternak</i>	11,650 %	349.999.920			11,625 %	367.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan								
		<i>Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Heuxan</i>	1 Wilayah	349.999.920	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		367.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani</i>	100 %	79.999.860			100 %	105.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Petani yang Mengikuti AOTP dan AUTS</i>	1360 orang	79.999.860			1375 orang	105.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								
		<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	1 Laporan	79.999.860	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		105.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase peningkatan kelas kelompok tani</i>	7,8 %	545.000.000			7,8 %	577.500.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelasnya</i>	235 kelompok	545.000.000			235 kelompok	577.500.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								
		<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	22 Unit	395.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0 Unit	420.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
		<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	230 Unit	150.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	235 Unit	157.500.000	DINAS PERTANIAN
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			19.324.880.129				17.103.712.301	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			687.846.500				802.146.500	
217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			687.846.500				802.146.500	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	72 %	32.500.000			72 %	35.000.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah koperasi yang di periksa dan diawasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota kewenangan Kabupaten/Kota</i>	90 Unit	32.500.000			90 Unit usaha	35.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	90 Unit Usaha	32.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	90 Unit Usaha	35.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase pengelola koperasi yang memiliki kompetensi</i>	71.84 %	45.000.000			71.84 %	400.800.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian</i>	30 Orang	45.000.000			152 Orang	400.800.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
		<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	30 Orang	45.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	152 Orang	400.800.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Meningkatnya koperasi yang berkualitas</i>	37.28 %	75.000.000			37.28 %	36.000.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah anggota koperasi yang difasilitasi</i>	30 Orang	75.000.000			100 Orang	36.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Unit Usaha	75.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Unit Usaha	36.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha</i>	12.23 %	90.000.000			12.23 %	40.000.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi (Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi)</i>	380 Unit Usaha	90.000.000			582 Unit usaha	40.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro								
		<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	380 Orang	90.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	490 Orang	40.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</i>	3.3 %	445.346.500			3.3 %	290.346.500	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah UMKM yang dikembangkan Usahanya</i>	530 Unit Usaha	445.346.500			467 Unit usaha	290.346.500	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
		<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>	530 Unit Usaha	445.346.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		290.346.500	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			18.637.033.629				16.301.565.801	
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			18.637.033.629				16.301.565.801	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah</i>	100 %	15.075.487.649			100 %	14.124.897.576	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	7 Dokumen	40.000.000			6 Dokumen	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah tunjangan ASN</i>	12 bulan	9.320.129.634			12 Bulan	8.882.179.821	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	82 Orang/bulan	9.320.129.634	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	82 Orang/bulan	8.882.179.821	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	200 Orang	135.498.290			202 Orang	115.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	120.498.290	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	202 Paket	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang	15.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah</i>	12 bulan	1.238.514.010			12 Dokumen	1.161.154.456	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	134.521.110	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	134.521.250	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	381.657.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Paket	356.658.200	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	174.904.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	169.971.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	547.430.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450 Laporan	500.004.006	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	16 unit	114.674.860			36 Unit	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	114.674.860	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	3.599.738.855			12 Bulan	3.109.381.299	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.004.129.315	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	713.378.519	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.595.609.540	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	2.396.002.780	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	113 Unit	626.932.000			268 Unit	627.182.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37 Unit	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	61.450.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62 Unit	61.700.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	365.482.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		365.482.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi	75 %	2.477.925.000			75 %	1.482.226.525	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	43 Unit	2.087.925.000			119 Unit	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	2.037.925.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Unit	400.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	32 Unit	50.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	101 Unit	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kelompok Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	4 Kelompok	390.000.000			4 Kelompok	982.226.525	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	390.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	300 Dokumen	982.226.525	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok	100 %	637.000.000			100 %	190.000.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota	4 Laporan	18.500.000			4 Laporan	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	18.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Laporan	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	600.000.000			240 Laporan	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	600.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	4 Laporan	18.500.000			28 Laporan	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	18.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	28 Laporan	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	4 %	170.100.000			4 %	122.000.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pengembangannya	35 Pelaku usaha	170.100.000			127 Pelaku usaha	122.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional								
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25 Pelaku Usaha	134.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Pelaku Usaha	85.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal								
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	36.100.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Pelaku Usaha	37.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/ tera ulang dalam tahun berjalan	100 %	65.670.980			100 %	182.441.700	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelayanan tera	34 Kali	65.670.980			68 Kali	182.441.700	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	19460 Unit	65.670.980	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10460 Unit	182.441.700	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0.43 %	210.850.000			0.43 %	200.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kampanye Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	5 Paket	210.850.000			29 Paket	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	200.850.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 UMKM	185.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	10.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	8 UMKM	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	SEKRETARIAT DAERAH			98.099.388.058				76.458.268.233	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			98.099.388.058				76.458.268.233	
401	SEKRETARIAT DAERAH			98.099.388.058				76.458.268.233	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	44.041.751.888			100 %	45.137.627.640	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	26.024.000			4 Dokumen	26.024.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.962.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.962.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.062.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.062.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran Setda	90 %	24.067.345.199			90 %	24.071.028.611	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 Orang/bulan	24.010.245.199	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24.013.928.611	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	44.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	12.600.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.600.000	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	50 %	144.000.000			50 %	199.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	144.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		199.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	100 % 100 %	157.000.000			100 %	162.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	132.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		135.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	5.498.125.000			12 bulan	5.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.628.125.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	600.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	270.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.800.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.900.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.050.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	50 %	716.114.300			50 %	536.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	558.237.700	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		380.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	157.876.600	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		156.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan administrasi perkantoran jasa penunjuang urusan pemerintahan daerah setiap bulan	12 bulan	2.816.096.000			12 bulan	2.896.482.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.594.096.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.621.482.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</i>	100 %	2.720.000.000			100 %	2.770.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	70 Unit	910.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	17 Unit	1.200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1600 Unit	610.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		620.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan</i>	12 bulan	1.193.581.229			12 bulan	1.193.581.229	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang/Bulan	176.581.229	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		176.581.229	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang/Bulan	1.017.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.017.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan</i>	100 %	4.300.000.000			100 %	4.680.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
		<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>	12 Paket	2.200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
		<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>	12 Paket	1.800.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
		<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>	12 Paket	300.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		330.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Jumlah dokumen hasil penataan organisasi</i>	162 dokumen	1.230.252.970			162 Dokumen	1.286.733.800	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
		<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	108 Dokumen	216.499.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		235.165.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	41 Laporan	645.947.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		678.245.000	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	8 Dokumen	257.443.770	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		257.443.800	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	5 Dokumen	110.362.500	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115.880.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan</i>	100 %	1.173.213.190			100 %	1.616.278.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>	2 Laporan	669.539.440	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.037.975.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	2 Laporan	126.298.800	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		248.380.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								
		<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>	3 Laporan	377.374.950	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		329.923.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase koordinasi bidang Pemerintahan</i>	100 %	37.543.104.640			100 %	16.960.807.000	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan</i>	7 Dokumen	645.184.300			7 Dokumen	826.076.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	3 Dokumen	181.956.700	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		167.855.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	3 Dokumen	428.227.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		598.221.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</i>	301 Dokumen	35.977.488.310			315 Dokume n	15.150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	300 Dokumen	14.018.159.390	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	190 Dokumen	20.819.338.680	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>	19 Dokumen	1.139.990.240	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Jumlah produk hukum yang dipublikasikan</i>	60 dokumen	712.732.030			60 Dokumen	659.583.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
		<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>	60 Dokumen	170.002.080	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		142.694.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
		<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	37 Kasus	353.245.750	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		336.421.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
		<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>	60 Dokumen	189.484.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180.468.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah dokumen kerja sama daerah</i>	20 dokumen	207.700.000			50 Dokumen	325.148.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	20 Dokumen	207.700.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		325.148.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	100 %	16.514.531.530			100 %	14.359.833.593	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	100 %	1.889.780.750			100 %	1.799.792.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	30 Dokumen	308.470.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		293.781.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	25 Laporan	659.411.750	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		628.011.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>	30 Dokumen	921.899.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		878.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Persentase Penyerapan APBD</i>	94,75 %	11.987.268.300			95 %	8.363.721.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>	4 Dokumen	399.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		377.850.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	14 Laporan	237.360.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		188.496.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	1 Laporan	11.350.408.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.797.375.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement</i>	100 %	2.225.729.980			-	3.784.568.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1200 Dokumen	2.072.293.370	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.575.581.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	12 Dokumen	88.159.600	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		62.572.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	500 Orang	65.277.010	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		146.415.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	28 Dokumen	411.752.500			28 Dokumen	411.752.593	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>	28 Dokumen	411.752.500	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		411.752.593	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD			88.756.534.881				73.595.848.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			88.756.534.881				73.595.848.000	
402	SEKRETARIAT DPRD			88.756.534.881				73.595.848.000	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP</i>	100 %	43.491.474.021			100 %	45.831.348.000	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	3 dokumen	40.000.000			-	31.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.750.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.750.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya administrasi keuangan setuan kabupaten cilacap</i>	12 bulan	5.924.684.949			-	6.029.448.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	45 Orang/bulan	5.924.684.949	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.029.448.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya administrasi barang milik daerah Sekretariat Daerah dalam pembayaran asuransi kendaraan</i>	24 unit	177.678.000			-	190.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	177.678.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		190.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian setuan</i>	92 orang	173.000.000			-	194.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	84 Paket	48.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	25 Orang	125.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum kantor sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	12 bulan	2.773.166.690			-	3.224.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	55.453.690	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	275.551.770	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	119.453.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	142.068.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		145.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	5.892.630	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	374.748.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		393.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan	1.799.999.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	274 unit	209.349.330			-	900.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30.588.420	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	178.760.910	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	12 bulan	1.456.723.500			-	1.526.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.399.500	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	556.564.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		560.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	884.760.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		950.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	439 unit	1.356.425.320			-	1.342.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	585.447.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	186.529.320	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		210.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	513.449.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		410.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141 Unit	71.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya kesejahteraan anggota DPRD	50 orang	30.643.446.832			-	31.620.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	30.155.946.832	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	300 Paket	362.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		485.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	125.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		135.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Administrasi DPRD yang terlayani setiap bulan	12 bulan	736.999.400			-	774.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	39.995.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	697.004.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		729.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal	100 %	45.265.060.860			100 %	27.764.500.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah raperda inisiatif DPRD	5 raperda	271.400.000			-	280.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	271.400.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		280.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pelatihan / bintek yang mendukung peningkatan kapasitas DPRD	36 kegiatan	3.472.040.860			-	3.984.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD								
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	250 Dokumen	2.250.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.625.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	24 Orang	267.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	240.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		252.000.000	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD								
		<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	12 Dokumen	714.540.860	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		824.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>jumlah aspirasi masyarakat yang terhimpun</i>	180 dokumen	12.732.250.000			-	8.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	95 Laporan	1.222.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	150 Dokumen	11.510.250.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Jumlah dokumen hasil fasilitasi</i>	95 kegiatan	28.789.370.000			-	15.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	93 Dokumen	28.789.370.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			19.598.701.847				22.032.825.466	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			19.598.701.847				22.032.825.466	
501	PERENCANAAN			18.076.951.847				20.080.558.766	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	12.886.409.487			100 %	13.933.033.766	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	40.000.000			6 Dokumen	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN</i>	12 Bulan	8.266.830.487			12 Bulan	9.748.955.522	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	59 Orang/bulan	8.266.830.487	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	59 Orang/bulan	9.748.955.522	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	85 Orang	248.000.000			85 Orang	266.253.750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	198.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Paket	196.796.250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	50.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Orang	69.457.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan	1.672.087.000			12 bulan	1.396.971.815	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	245.365.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	253.236.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	353.222.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	339.186.440	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Paket	81.033.750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425 Laporan	1.000.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	425 Laporan	723.515.625	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	91 Unit	779.100.000			91 Unit	623.663.750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	101.100.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Unit	214.160.625	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	657.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38 Unit	376.228.125	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	21.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Unit	33.275.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.324.334.000			12 Bulan	1.387.882.401	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	289.406.250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.061.834.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.098.476.151	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	201 Unit	556.058.000			201 Unit	479.306.528	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	238.192.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27 Unit	262.606.074	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	106.160.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122 Unit	88.148.513	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	115.643.265	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	51 Unit	11.706.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51 Unit	12.908.676	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian realisasi target Program tahunan	93 %	3.016.000.000			93 %	3.313.525.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	1.680.000.000			2 Dokumen	1.557.625.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	530.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Berita Acara	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	4 Dokumen	1.150.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	1.157.625.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	425.000.000			3 Dokumen	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	175.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	250.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Buku	325.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	396.000.000			8 Dokumen	705.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	245.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	359.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	151.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Laporan	346.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	515.000.000			1 Dokumen	550.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	515.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	550.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% realisasi indikator OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase realisasi indikator OPD di bawah rumpun perekonomian Persentase realisasi indiktor OPD di bawah rumpun infrastruktur dan kewilayahan	93 %	2.174.542.360			93 %	2.834.000.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir dalam Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	41 Perangkat Daerah	809.340.360			41 Perangkat Daerah	1.164.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	40.737.780	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	99.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	18.224.800	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	126.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	18.793.390	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	43.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	10.499.900	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	159.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	31.237.830	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	27.618.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	57.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	1 Laporan	23.991.790	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	7 Laporan	638.236.870	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Laporan	630.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir dalam Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	7 Perangkat Daerah	478.052.000			7 Perangkat Daerah	569.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen	34.440.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	1 Laporan	23.648.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	1 Laporan	36.855.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	7 Laporan	293.543.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Laporan	317.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen	25.515.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	1 Laporan	16.328.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	1 Laporan	19.215.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>	1 Laporan	28.508.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dikoordinir dalam Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>	5 Perangkat Daerah	887.150.000			5 Perangkat Daerah	1.101.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	2 Dokumen	315.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	661.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	1 Laporan	37.800.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	1 Laporan	38.850.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	37.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	1 Laporan	115.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	136.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	2 Dokumen	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	39.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah</i>	2 Laporan	175.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	39.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	2 Laporan	138.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	114.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>	1 Laporan	37.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	39.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
505	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.521.750.000				1.952.266.700	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase riset daerah yang ditindaklanjuti	40 %	1.521.750.000			40 %	1.952.266.700	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Jumlah laporan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	24 laporan	635.000.000			24 laporan	547.150.900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>	6 Laporan	200.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Laporan	232.650.900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi								
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	1 Laporan	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa</i>	10 Laporan	275.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Laporan	260.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan								
		<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>	3 Laporan	130.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	29.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah laporan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	21 Dokumen	285.000.000			22 Dokumen	345.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	3 Dokumen	90.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>	2 Dokumen	60.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	20 Dokumen	135.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Dokumen	260.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	30.000.000			0 Laporan	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0 Dokumen	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan Fasilitas iPengembangan Inovasi dan Teknologi	219 Laporan	571.750.000			119 Laporan	1.030.115.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	15 Dokumen	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Dokumen	355.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100 Laporan	275.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Laporan	414.462.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100 Laporan	170.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	0 Laporan	119.166.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	75.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	74.444.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	36.750.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	67.043.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			56.427.391.812				54.851.711.994	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			56.427.391.812				54.851.711.994	
502	KEUANGAN			56.427.391.812				54.851.711.994	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	42.566.323.576			100 %	40.683.439.594	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	41.124.000			5 Dokumen	41.930.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.124.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	16.930.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	9.215.279.944			14 Dokumen	7.441.147.394	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	9.215.279.944	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	59 Orang/bulan	7.441.147.394	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	79.600.000			95 Unit	82.750.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	54.600.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90 Paket	57.750.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	1.204.500.000			12 Dokumen	1.445.790.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	139.965.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	480.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	176.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	206.325.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	619.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	55 Unit	4.810.564.730			266 Unit	4.877.865.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	4.128.729.730	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	4.141.250.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	681.835.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110 Unit	736.615.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	26.138.464.902			12 Dokumen	26.082.734.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.056.242.902	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	25.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.082.222.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.082.734.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	210 Unit	1.076.790.000			352 Unit	711.223.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	260.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	260.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit	90.371.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83 Unit	86.223.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	712.419.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	350.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	56 Unit	14.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56 Unit	15.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD</i>	-0.087 %	2.545.844.160			-0.087 %	2.968.593.400	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pengelolaan Keuangan</i>	58 Dokumen	1.415.840.100			56 Dokumen	1.575.356.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
		<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	56.238.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	70.235.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	62.065.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	77.582.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
		<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	4 Dokumen	148.831.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	199.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
		<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	8 Dokumen	141.276.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	148.339.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
		<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	30 Dokumen	160.803.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30 Dokumen	191.243.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	12 Dokumen	846.626.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	888.957.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan</i>	78 Dokumen	484.035.000			7000 Lembar	508.235.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	12 Dokumen	56.390.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	59.209.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	4 Dokumen	140.200.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	147.210.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	50 Dokumen	76.714.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	40 Dokumen	80.549.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	12 Dokumen	210.731.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14 Dokumen	221.267.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	28 dokumen	645.969.060			178 Laporan	885.002.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	19 Dokumen	64.664.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	17 Dokumen	76.043.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	7 Laporan	236.939.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Laporan	275.009.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
		<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen	82.842.520	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	124.450.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>	368 Orang	261.523.340	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	215 Orang	409.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	ya ya/tidak	11.315.224.076			ya ya/tidak	11.199.679.000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Aset/ Barang Milik Daerah</i>	951 Laporan	11.315.224.076			418 Laporan	11.199.679.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga								
		<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	4 Dokumen	386.904.780	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	420.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	930 Laporan	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	358 Laporan	210.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	5.712.037.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	5.997.638.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	4 Laporan	4.504.324.866	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	434 Laporan	3.889.541.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	12 Dokumen	237.555.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	262.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>	240 Orang	274.402.430	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	240 Orang	420.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)			632.747.058.797				642.090.636.124	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			632.747.058.797				642.090.636.124	
502	KEUANGAN			632.747.058.797				642.090.636.124	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Penyaluran Dana Transfer ke Desa</i>	100 %	632.747.058.797			100 %	642.090.636.124	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	3 Laporan	632.747.058.797			-	642.090.636.124	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	1 Laporan	570.775.508.797	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		601.212.089.124	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	1 Laporan	10.000.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota</i>	1 Laporan	51.971.550.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.878.547.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			26.902.986.540				35.725.620.719	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			26.902.986.540				35.725.620.719	
502	KEUANGAN			26.902.986.540				35.725.620.719	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	16.800.711.330			100 %	25.061.923.619	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	4 Dokumen	40.000.000			6 Dokumen	47.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	31.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	14 Dokumen	12.302.832.850			14 Dokumen	20.438.451.994	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	36 Orang/bulan	12.302.832.850	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	36 Orang/bulan	20.438.451.994	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	74.499.840			2 Dokumen	78.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	85 Paket	49.499.840	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66 Paket	52.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	26.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	1.191.061.790			48 Dokumen	1.191.921.625	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.911.590	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	115.671.625	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	368.315.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	383.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	159.999.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	168.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	539.834.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	525.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	80 Unit	1.299.999.850			100 Unit	1.320.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	900.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	249 Unit	200.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit	210.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	199.999.850	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit	210.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	1.199.359.000			24 Laporan	1.249.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	311.359.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	336.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	888.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	913.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	357 Unit	692.958.000			188 Unit	736.050.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	175.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46 Unit	183.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	226 Unit	151.988.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56 Unit	168.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	344.970.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	362.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	84 Unit	21.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84 Unit	22.050.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	11.4 % 0.053 %	10.102.275.210			0.053 % 7.8 %	10.663.697.100	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	1200000000 0 Rupiah	10.102.275.210			1200000000 0 Rupiah	10.663.697.100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	142.199.270	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Dokumen	154.567.350	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	80.816.310	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Laporan	90.792.450	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	572.834.050	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Unit	2.862.762.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2.663.004.540	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	2.850.030.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	219.256.210	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	245.975.100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1250000 Obyek Pajak	27.810.120	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1250000 Obyek Pajak	31.304.700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	2.760.898.240	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Dokumen	639.371.250	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	30.756.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	32.293.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	164.405.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	191.995.650	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	110 Dokumen	63.874.700	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	110 Dokumen	80.351.250	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Laporan	3.153.076.510	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Laporan	3.274.388.250	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	223.343.860	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	209.864.550	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			172.396.038.562				19.457.000.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			172.396.038.562				19.457.000.000	
503	KEPEGAWAIAN			169.160.056.742				16.785.000.000	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	165.890.419.542			100 %	13.536.000.000	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	43.550.000			6 Dokumen	47.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	29.250.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.300.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	17.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	163.301.008.212			12 Bulan	10.900.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	163.301.008.212	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	60 Orang/bulan	10.900.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 orang	73.000.000			85 Orang	75.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	48.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.010.499.100			12 Bulan	1.007.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	176.499.380	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	135.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	130.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	132.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.999.820	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	650.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	680.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	400 Dokumen	8.999.900	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400 Dokumen	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	20 unit	209.703.730			40 Unit	241.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	9 Unit	78.798.860	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	9 Unit	130.904.870	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	141.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	796.738.500			12 Bulan	803.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	285.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	288.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	511.738.500	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	515.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	415 unit	455.920.000			415 Unit	463.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	10 Unit	146.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	148.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	272 Unit	114.986.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	272 Unit	118.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	173.934.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	175.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	130 Unit	21.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130 Unit	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN</i>	63.38 %	3.269.637.200			63.38 %	3.249.000.000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta dokumen pengadaan calon ASN</i>	11 Dokumen	776.238.550			14 Dokumen	731.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	40.739.760	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	42.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	230.499.530	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	145.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	99.999.630	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	101.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	340.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	368.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	39.999.630	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian								
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	2826 dokumen	845.600.000			1029 Dokumen	854.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	520 Dokumen	368.400.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1025 Dokumen	369.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	27.200.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	450.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	455.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi	469 orang	1.090.399.520			20 Dokumen	1.097.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	358.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Orang	360.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center								
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	250.950.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	252.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	87.499.740	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	89.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	24 Orang	334.800.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Orang	335.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN								
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	10 Orang	35.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	35 Orang	36.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	24.149.780	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	25.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen penunjang penilaian dan evaluasi kinerja ASN	20 dokumen	557.399.130			800 Orang	567.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	50.499.670	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	52.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	56.899.930	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	58.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	245 Orang	299.999.930	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	126 Orang	302.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN								
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	315 Orang	112.999.770	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	360 Orang	115.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	36.999.830	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	40.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3.235.981.820				2.672.000.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kesesuaian Kompetensi ASN dengan Persyaratan/Standar Jabatan	56.55 %	3.235.981.820			56.55 %	2.672.000.000	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi teknis	560 orang	346.999.650			570 Orang	350.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	16.999.850	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	560 Orang	329.999.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	570 Orang	332.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen kerjasama dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	16 dokumen	2.888.982.170			23 Dokumen	2.322.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga								
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	10 Dokumen	320.450.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Dokumen	322.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	2.568.532.170	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	13 Laporan	2.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	INSPEKTORAT DAERAH			16.481.469.415				16.968.755.489	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			16.481.469.415				16.968.755.489	
601	INSPEKTORAT DAERAH			16.481.469.415				16.968.755.489	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.283.478.685			100 %	14.233.078.476	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	41.454.000			-	49.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	29.449.920	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.004.080	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	9.632.129.655			-	9.600.876.397	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	9.632.129.655	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9.600.876.397	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	947.949.360			-	1.368.465.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.800.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43.312.500	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	132 Orang	840.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.257.952.500	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	67.149.360	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		67.200.000	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.292.110.100			-	1.350.116.954	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.292.100	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115.807.444	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	132.118.100	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		132.124.300	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.699.900	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		62.685.210	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	990.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.039.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	20 Unit	307.174.070			-	451.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	232.692.340	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		367.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	74.481.730	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	713.101.200			-	837.088.560	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	172.383.200	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		181.002.360	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540.718.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		656.086.200	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	178 Unit	349.560.300			-	575.531.565	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	209.265.300	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		219.728.565	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	45.510.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48.174.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	82.547.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		294.668.850	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 Unit	12.238.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.960.150	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik	80 %	1.413.329.210			80 %	1.233.391.424	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	302 Dokumen	750.030.170			302 Dokume n	569.420.617	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan	145.563.140	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Laporan	192.677.835	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	109 Laporan	190.557.830	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109 Laporan	117.887.721	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	11 Laporan	40.725.680	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Laporan	22.786.218	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25 Laporan	197.084.680	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Laporan	152.522.496	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	150 Dokumen	176.098.840	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Dokumen	83.546.347	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	69 Dokumen	663.299.040			69 Dokumen	663.970.807	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	16 Laporan	215.877.680	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69 Laporan	216.350.662	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	447.421.360	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53 Laporan	447.620.145	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	88 %	1.784.661.520			88 %	1.502.285.589	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3 Dokumen	117.426.400			3 Dokumen	149.198.385	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomend asi	109.232.840	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Rekomend asi	140.595.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomend asi	8.193.560	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Rekomend asi	8.603.385	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen / Laporan Pendampingan dan Aistensi	166 Dokumen	1.667.235.120			166 Dokume n	1.353.087.204	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	614.492.720	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41 perangkat daerah	355.417.524	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 perangkat daerah	40.583.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 perangkat daerah	55.637.925	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
		<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	56 Kegiatan	937.980.360	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122 Kegiatan	862.880.655	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	54 perangkat daerah	74.178.840	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 perangkat daerah	79.151.100	INSPEKTORAT DAERAH
	KECAMATAN CILACAP SELATAN			7.968.968.993				7.983.969.083	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN			7.968.968.993				7.983.969.083	KECAMATAN CILACAP SELATAN
701	KECAMATAN			7.968.968.993				7.983.969.083	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	7.708.972.023			100 %	7.697.469.083	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	3 Dokumen	19.999.320			-	20.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	9.999.660	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	9.999.660	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.657.150.456			-	5.657.150.456	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	5.657.150.456	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.657.150.456	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	384.958.540			-	385.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		-	-	39.962.950	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	114.999.670	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	39.996.720	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	139.999.200	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		-	-	40.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	10.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	98.383.040			-	85.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								KECAMATAN CILACAP SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	71.788.040	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	26.595.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.298.780.680			-	1.300.235.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	188.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	1.110.780.680	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.130.235.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	249.699.987			-	250.083.627	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	114.502.987	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.083.627	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	65.260.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	69.937.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.999.910			-	40.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	14.999.910			-	40.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	14.999.910	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif</i>	100 %	134.997.340			100 %	135.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	99.997.700			-	100.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	4.997.830	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	94.999.870	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	34.999.640			-	35.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	34.999.640	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	33.500.000			-	35.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	33.500.000			-	35.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	33.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	49.999.920			-	50.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	49.999.920			-	50.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		-	-	29.999.920	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		20.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	26.499.800			-	26.500.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-	26.499.800			-	26.500.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.06.2.01.0007	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								KECAMATAN CILACAP SELATAN
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		0	0 0	25.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								KECAMATAN CILACAP SELATAN
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	1.499.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000	KECAMATAN CILACAP SELATAN
	KELURAHAN SIDAKAYA			1.165.600.000				1.000.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.165.600.000				1.000.000.000	
701	KECAMATAN			1.165.600.000				1.000.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.165.600.000			-	1.000.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.165.600.000			-	1.000.000.000	KELURAHAN SIDAKAYA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	5 Unit	894.284.950	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		600.000.000	KELURAHAN SIDAKAYA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	5 Pokmas / Ormas	271.315.050	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Sidakaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		400.000.000	KELURAHAN SIDAKAYA
	KELURAHAN CILACAP			1.199.800.000				900.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.199.800.000				900.000.000	
701	KECAMATAN			1.199.800.000				900.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.199.800.000			-	900.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.199.800.000			-	900.000.000	KELURAHAN CILACAP
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	12 Unit	913.901.300	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Cilacap	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		500.000.000	KELURAHAN CILACAP
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	9 Pokmas / Ormas	285.898.700	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Cilacap	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		400.000.000	KELURAHAN CILACAP
	KELURAHAN TAMBAKREJA			1.234.000.000				900.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.234.000.000				900.000.000	
701	KECAMATAN			1.234.000.000				900.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.234.000.000			-	900.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.234.000.000			-	900.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	5 Unit	953.378.350	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		500.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	5 Pokmas / Ormas	280.621.650	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		400.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJA
	KELURAHAN TEGALKAMULYAN			1.201.538.350				900.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.201.538.350				900.000.000	
701	KECAMATAN			1.201.538.350				900.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.201.538.350			-	900.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.201.538.350			-	900.000.000	KELURAHAN TEGALKAMULYAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	5 Unit	941.700.850	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		500.000.000	KELURAHAN TEGALKAMULYAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	4 Kegiatan Pokmas / Ormas	259.837.500	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalkamulyan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		400.000.000	KELURAHAN TEGALKAMULYAN
	KELURAHAN TEGALREJA			1.140.400.000				900.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.140.400.000				900.000.000	
701	KECAMATAN			1.140.400.000				900.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.140.400.000			-	900.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.140.400.000			-	900.000.000	KELURAHAN TEGALREJA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	5 Unit	864.572.500	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalreja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		500.000.000	KELURAHAN TEGALREJA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	5 Pokmas / Ormas	275.827.500	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tegalreja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		400.000.000	KELURAHAN TEGALREJA
	KECAMATAN CILACAP TENGAH			8.646.415.349				11.196.454.509	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			8.646.415.349				11.196.454.509	
701	KECAMATAN			8.646.415.349				11.196.454.509	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.378.640.049			100 %	9.994.890.494	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Mendukung persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	14 %	38.949.800			7 Dokumen	45.089.494	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	24.249.800	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	28.072.406	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	14.700.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	17.017.088	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Mendukung persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	16 %	6.326.905.049			12 Dokumen	7.356.905.235	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	52 Orang/bulan	6.326.905.049	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	52 Orang/bulan	7.356.905.235	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	14 %	52.500.000			105 Paket	60.775.313	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	105 Paket	52.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105 Paket	60.775.313	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	14 %	357.466.290			12 Bulan	464.805.481	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	17.041.960	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	28.940.625	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	130.913.770	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	181.909.135	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	29.999.260	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.516.875	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	148.511.300	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	163.660.971	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40.516.875	KECAMATAN CILACAP TENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	6.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	9.261.000	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Mendukung persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	14 %	54.462.760			76 Unit	386.646.750	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	96 Unit	32.261.340	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Unit	104.186.250	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	72 Unit	22.201.420	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Unit	282.460.500	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Mendukung persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	14 %	1.333.906.900			12 Laporan	1.433.957.496	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	139.598.900	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	173.643.750	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.194.308.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.260.313.746	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Mendukung persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah</i>	14 %	214.449.250			105 Unit	246.710.725	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	37 Unit	97.840.430	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 Unit	110.900.475	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	42 Unit	24.010.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 Unit	34.798.208	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	92.598.820	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	101.012.042	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000			-	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	15.000.000			-	-	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	125.904.560			100 %	33.488.438	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Mendukung persentase Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif</i>	100 %	72.500.000			-	-	KECAMATAN CILACAP TENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	72.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	53.404.560			50 Lembaga Kemasyarakatan	33.488.438	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	25 Lembaga Kemasyarakatan	53.404.560	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Lembaga Kemasyarakatan	33.488.438	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	100 %	28.799.620			100 %	907.262.663	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Mendukung persentase Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban</i>	100 %	28.799.620			19 Kegiatan	907.262.663	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	9.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	452.066.338	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	14 Laporan	19.799.620	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Laporan	455.196.325	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	46.871.800			100 %	62.743.276	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase fasilitasi forkompincam</i>	100 %	46.871.800			14 Kegiatan	62.743.276	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	50 Orang	24.899.900	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Orang	28.824.863	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	12 Dokumen	21.971.900	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	33.918.413	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	51.199.320			100 %	198.069.638	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung persentase kelurahan yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	51.199.320			5 Dokumen	198.069.638	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	16.199.700	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	67.836.825	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dokumen	23.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	65.405.813	KECAMATAN CILACAP TENGAH
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	11.999.620	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	64.827.000	KECAMATAN CILACAP TENGAH
	KELURAHAN LOMANIS			1.050.400.000				899.985.780	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.050.400.000				899.985.780	
701	KECAMATAN			1.050.400.000				899.985.780	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.050.400.000			-	899.985.780	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.050.400.000			50 Lembaga Kemasyarakatan	899.985.780	KELURAHAN LOMANIS
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	7 0	905.414.220	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	755.000.000	KELURAHAN LOMANIS
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	40 0	144.985.780	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Lomanis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Pokmas / Ormas	144.985.780	KELURAHAN LOMANIS
	KELURAHAN GUNUNGSIMPING			1.145.800.000				900.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.145.800.000				900.000.000	
701	KECAMATAN			1.145.800.000				900.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.145.800.000			-	900.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.145.800.000			50 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000	KELURAHAN GUNUNGSIMPING
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	5 0	955.313.900	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	682.288.572	KELURAHAN GUNUNGSIMPING
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	83 0	190.486.100	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Gunungsimping	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Pokmas / Ormas	217.711.428	KELURAHAN GUNUNGSIMPING
	KELURAHAN SIDANEGARA			1.316.800.000				900.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.316.800.000				900.000.000	
701	KECAMATAN			1.316.800.000				900.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.316.800.000			-	900.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.316.800.000			50 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000	KELURAHAN SIDANEGARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	13 0	775.852.400	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	400.742.400	KELURAHAN SIDANEGARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	185 0	540.947.600	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Pokmas / Ormas	499.257.600	KELURAHAN SIDANEGARA
	KELURAHAN DONAN			1.268.200.000				900.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.268.200.000				900.000.000	
701	KECAMATAN			1.268.200.000				900.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.268.200.000			-	900.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.268.200.000			50 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000	KELURAHAN DONAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	10 0	934.490.960	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	566.471.900	KELURAHAN DONAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	153 0	333.709.040	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Pokmas / Ormas	333.528.100	KELURAHAN DONAN
	KELURAHAN KUTAWARU			1.127.800.000				900.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.127.800.000				900.000.000	
701	KECAMATAN			1.127.800.000				900.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.127.800.000			-	900.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.127.800.000			50 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000	KELURAHAN KUTAWARU
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	11 0	875.950.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	654.200.000	KELURAHAN KUTAWARU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	81 0	251.850.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Kutawaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Pokmas / Ormas	245.800.000	KELURAHAN KUTAWARU
	KECAMATAN CILACAP UTARA			8.553.347.026				8.732.486.813	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			8.553.347.026				8.732.486.813	
701	KECAMATAN			8.553.347.026				8.732.486.813	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	8.323.347.026			100 %	8.432.986.813	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	3 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	17.795.600			4 Dokumen	35.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.795.600	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 45 Orang/bulan	6.018.486.813			45 Orang/bulan	6.020.486.813	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.013.486.813	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 Orang/bulan	6.013.486.813	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	2 Laporan	5.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	7.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Kedisiplinan Pegawai / ASN</i>	25 Paket 100 orang 100 %	20.000.000			100 %	35.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	25 Paket	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112 Paket	25.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	1 Orang	5.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64 Orang	10.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Bulan 6 Kegiatan 12 Paket	295.595.000			12 Paket	324.500.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Paket	15.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	70.011.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	72.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	6 Paket	8.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	17.500.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	170.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	175.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	30.584.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	35.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	5 Laporan	7.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	10.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	215.422.500			26 Unit	340.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Unit	26.443.860	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	40.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	65.710.160	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	75.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	104.246.080	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	175.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.022.400	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	50.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan 12 Bulan 12 Laporan	1.509.760.280			12 Laporan	1.375.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	150.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.522.280	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	25.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.340.238.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.200.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	12 Laporan 12 Bulan 35 Unit	246.286.833			35 Unit	303.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	87.286.833	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	95.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	5.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	10.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	54.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	58.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	85.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	120.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	20.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000			-	20.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	15.000.000			-	20.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang Memiliki Kelembagaan Aktif	100 %	143.000.000			100 %	189.500.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	105.000.000			3 Kegiatan	132.500.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	100.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	125.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang, Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Wilayah Kecamatan	5 Kelurahan 5 Kelurahan	33.000.000			5 Kelurahan	50.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Jumlah UMKM yang Terfasilitasi Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan 25 UMKM 1 Laporan	5.000.000			25 UMKM	7.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	7.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam Persentase fasilitasi forkompincam Persentase Fasilitas Forkoptmcam	2 Kegiatan 100 % 100 %	52.000.000			100 % 100 % 2 Kegiatan 100 %	70.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan Peringatan HUT RI ke-80 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Laporan	52.000.000			2 Kegiatan	70.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	35.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Orang	45.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	17.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa Persentase Kelurahan yang di Fasilitasi Terkait Tata Pemerintahan Kelurahan	100 % 100 %	20.000.000			100 % 100 % 100 %	20.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Kelurahan 1 Dokumen	20.000.000			-	20.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
		0	1 0	5.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan								
		0	1 0	15.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN CILACAP UTARA
	KELURAHAN MERTASINGA			1.163.800.000				950.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.163.800.000				950.000.000	
701	KECAMATAN			1.163.800.000				950.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.163.800.000			-	950.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.163.800.000			5 Kelurahan	950.000.000	KELURAHAN MERTASINGA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	9 0	1.000.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Mertasinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	700.000.000	KELURAHAN MERTASINGA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	8 0	163.800.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	432 Pokmas / Ormas	250.000.000	KELURAHAN MERTASINGA
	KELURAHAN GUMILIR			1.198.000.000				905.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.198.000.000				905.000.000	
701	KECAMATAN			1.198.000.000				905.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.198.000.000			-	905.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.198.000.000			5 Kelurahan	905.000.000	KELURAHAN GUMILIR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	7 0	979.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	655.000.000	KELURAHAN GUMILIR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	6 0	219.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	432 Pokmas / Ormas	250.000.000	KELURAHAN GUMILIR
	KELURAHAN KARANGTALUN			1.097.200.000				950.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.097.200.000				950.000.000	
701	KECAMATAN			1.097.200.000				950.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.097.200.000			-	950.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.097.200.000			5 Kelurahan	950.000.000	KELURAHAN KARANGTALUN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	14 0	930.070.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	750.000.000	KELURAHAN KARANGTALUN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	8 0	167.130.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Karangtalun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	432 Pokmas / Ormas	200.000.000	KELURAHAN KARANGTALUN
	KELURAHAN TRITIH KULON			1.192.600.000				950.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.192.600.000				950.000.000	
701	KECAMATAN			1.192.600.000				950.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.192.600.000			-	950.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.192.600.000			5 Kelurahan	950.000.000	KELURAHAN TRITIH KULON
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	10 0	980.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Tritih Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	700.000.000	KELURAHAN TRITIH KULON
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	3 0	212.600.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Tritih Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	432 Pokmas / Ormas	250.000.000	KELURAHAN TRITIH KULON
	KELURAHAN KEBONMANIS			1.127.800.000				905.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.127.800.000				905.000.000	
701	KECAMATAN			1.127.800.000				905.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.127.800.000			-	905.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.127.800.000			5 Kelurahan	905.000.000	KELURAHAN KEBONMANIS
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		0	9 0	926.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Kebonmanis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit	700.000.000	KELURAHAN KEBONMANIS
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		0	8 0	201.300.000	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Kebonmanis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	432 Pokmas / Ormas	205.000.000	KELURAHAN KEBONMANIS
	KECAMATAN JERUKLEGI			2.935.717.228				2.938.915.568	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.935.717.228				2.938.915.568	
701	KECAMATAN			2.935.717.228				2.938.915.568	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.799.705.148			100 %	2.809.515.568	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen 100 %	16.450.000			-	17.500.000	KECAMATAN JERUKLEGI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.500.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.450.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen	2.504.515.568			-	2.504.515.568	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.504.515.568	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.504.515.568	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Persentase Terpenuhinya Layanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	22 Paket 100 %	13.200.000			-	12.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		0	0 0	13.200.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Persentase Terpenuhinya Layanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Paket 100 %	103.743.280			-	109.500.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.633.870	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.480.920	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	6.993.290	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.635.200	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.500.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Terpenuhinya Layanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan 100 %	125.796.300			-	128.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81.796.300	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhihnya Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 % 10 unit	36.000.000			-	38.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	36.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan	100 %	15.000.000			100 %	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 Laporan 13 Kali	15.000.000			-	-	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	32.750.000			100 %	34.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga K emasyarakat	21.000.000			-	22.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Laporan	11.750.000			-	12.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	11.750.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	100 %	6.000.000			100 %	7.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Kali	6.000.000			-	7.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.000.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	39.100.000			100 %	40.400.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 Laporan	39.100.000			-	40.400.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	175 Orang	22.700.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	16.400.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.400.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	43.162.080			100 %	48.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	43.162.080			-	48.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	16.700.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7.700.240	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	11.300.000	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	7.461.840	Kab. Cilacap, Jeruklegi, Jeruklegi Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	KECAMATAN JERUKLEGI
	KECAMATAN KAWUNGANTEN			3.442.003.895				3.585.564.229	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.442.003.895				3.585.564.229	
701	KECAMATAN			3.442.003.895				3.585.564.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.335.191.875			100 %	3.444.348.928	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah	4 Dokumen	20.679.760			4 Dokumen	31.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.519.630	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.160.130	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	11.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	12 Bulan	2.711.011.470			12 Bulan	2.767.348.928	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.711.011.470	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30 Orang/bulan	2.767.348.928	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	28 orang	16.800.000			56 Orang	14.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	16.800.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	28 Paket	14.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi umum Perangkat daerah	12 Bulan	99.541.850			12 Bulan	142.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.832.750	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	42.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.159.100	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	52.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	13.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.550.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	35.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Unit	40.219.820			21 Unit	88.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	20.318.360	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Unit	40.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	19.901.460	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Unit	48.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan	199.003.000			12 Bulan	195.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.071.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	35.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172.932.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	160.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	29 unit	247.935.975			27 unit	207.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	35.781.800	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	42.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.220.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	15.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.934.175	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000			-	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.000.000			-	-	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	34.590.700			100 %	52.506.207	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan	14 Kali	34.590.700			15 Kali	52.506.207	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	12.045.250	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Lembaga K emasyarakat a	15.500.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	22.545.450	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	13 Laporan	37.006.207	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	100 %	4.723.630			100 %	9.334.812	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	12 kali	4.723.630			13 kali	9.334.812	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.723.630	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	9.334.812	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	37.849.160			100 %	56.421.748	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	8 Kali	37.849.160			15 Kali	56.421.748	KECAMATAN KAWUNGANTEN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	235 Orang	24.249.900	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Orang	27.421.748	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	13.599.260	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	29.000.000	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	14.648.530			100 %	22.952.534	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan dan Administrasi Tata Pemerintahan	12 Desa	14.648.530			12 Desa	22.952.534	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	6.719.630	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	48 Dokumen	22.952.534	KECAMATAN KAWUNGANTEN
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	7.928.900	Kab. Cilacap, Kawunganten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	-	KECAMATAN KAWUNGANTEN
	KECAMATAN BANTARSARI			2.346.696.870				2.874.779.670	KECAMATAN BANTARSARI
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.346.696.870				2.874.779.670	KECAMATAN BANTARSARI
701	KECAMATAN			2.346.696.870				2.874.779.670	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah undefined	100 % undefined undefined	2.240.706.200			100 % 100 %	2.668.279.670	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen 6 Dokumen	19.999.290			-	36.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	9.999.950	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	9.999.340	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.000.000	KECAMATAN BANTARSARI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.828.970.560			-	2.225.779.670	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								KECAMATAN BANTARSARI
		-	-	1.828.970.560	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.225.779.670	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.800.000			-	12.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								KECAMATAN BANTARSARI
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		10.800.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	132.837.770			-	137.500.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	27.492.270	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	5.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	47.480.700	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								KECAMATAN BANTARSARI
		-	-	7.610.800	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	44.594.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47.500.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	201.336.600			-	209.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	39.999.600	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	161.337.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		165.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	46.761.980			-	48.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								KECAMATAN BANTARSARI
		-	-	35.000.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	11.761.980	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.998.590			-	40.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	14.998.590			-	40.000.000	KECAMATAN BANTARSARI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	14.998.590	Kab. Cilacap, Bantarsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	% Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	26.999.630			100 %	52.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22 keg	26.999.630			-	52.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								KECAMATAN BANTARSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga K emasyarakat an	6.999.830	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN BANTARSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	19.999.800	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	6.000.000			100 %	11.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daetah Dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	6.000.000			-	11.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								KECAMATAN BANTARSARI
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	6.000.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi Forkopimcam	100 %	40.000.000			100 %	81.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8 Kali	40.000.000			-	81.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	15.000.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		31.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								KECAMATAN BANTARSARI
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	25.000.000	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	17.992.450			-	22.500.000	KECAMATAN BANTARSARI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-	17.992.450			-	22.500.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								KECAMATAN BANTARSARI
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	5.999.900	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								KECAMATAN BANTARSARI
		-	-	5.999.750	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000	KECAMATAN BANTARSARI
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								KECAMATAN BANTARSARI
		0	0 0	5.992.800	Kab. Cilacap, Bantarsari, Bantarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000	KECAMATAN BANTARSARI
	KECAMATAN KESUGIHAN			3.351.552.635				3.303.906.928	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.351.552.635				3.303.906.928	
701	KECAMATAN			3.351.552.635				3.303.906.928	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.222.850.695			100 %	3.201.906.928	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	10.794.900			6 Dokumen	16.210.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.085.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	11.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.709.900	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	4.710.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	12 bulan	2.834.199.844			12 bulan	2.816.345.178	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.834.199.844	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	27 Orang/bulan	2.816.345.178	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27 orang	16.200.000			30 Orang	13.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	16.200.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Paket	13.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	118.848.500			12 bulan	120.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diseditakan	12 Paket	34.998.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	35.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	54.491.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	55.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	10.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	19.358.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	20.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah</i>	2 unit	19.869.040			11 Unit	-	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	19.869.040	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	-	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	158.462.951			12 bulan	166.351.750	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	55.000.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	60.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	103.462.951	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	106.351.750	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milih Daerah Terpelihara</i>	36 unit	64.475.460			35 Unit	69.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	11 Unit	32.500.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	37.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	24 Unit	11.988.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	12.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	19.987.460	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	20.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase implementasi pelimpahan kewenangan</i>	100 %	14.999.800			100 %	15.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	1 laporan	14.999,800			1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	14.999,800	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif</i>	100 %	27.628.000			100 %	32.500.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan</i>	14 kali	27.628.000			9 kali	32.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	2 Lembaga K emasyarakat an	9.200.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Lembaga K emasyarakat a	12.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	18.428.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Laporan	20.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban</i>	100 %	3.000.000			100 %	3.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban</i>	100 %	3.000.000			100 %	3.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	4 Laporan	3.000.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	3.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase fasilitasi forkompincam</i>	100 %	37.500.000			100 %	18.600.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	8 kali	37.500.000			8 kali	18.600.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawusan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeltharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	260 Orang	21.000.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	260 Orang	2.100.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	4 Dokumen	16.500.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Dokumen	16.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa</i>	100 %	45.574.140			100 %	32.900.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi Bidang Perencanaan, Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset</i>	16 desa	45.574.140			16 desa	32.900.000	KECAMATAN KESUGIHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	80 Dokumen	28.974.800	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	16 Dokumen	16.000.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6.499.640	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	6.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	6.200.000	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	6.500.000	KECAMATAN KESUGIHAN
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	3.899.700	Kab. Cilacap, Kesugihan, Kesugihan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	3.900.000	KECAMATAN KESUGIHAN
	KECAMATAN ADIPALA			3.235.552.497				3.298.700.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.235.552.497				3.298.700.000	
701	KECAMATAN			3.235.552.497				3.298.700.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.068.881.637			100 %	3.112.700.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	20.000.000			-	22.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah setiap bulan	12 bulan	2.432.082.317			-	2.450.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.432.082.317	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.450.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai kecamatan	100 %	12.000.000			-	13.200.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	12.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.200.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah setiap bulan	12 bulan	140.000.000			-	150.500.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37.500.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	70.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan</i>	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</i>	25 0	36.199.320			-	36.500.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	23 Unit	36.199.320	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36.500.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan</i>	12 bulan	216.022.000			-	222.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	65.802.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		67.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	150.220.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		155.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</i>	48 unit	212.578.000			-	218.500.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	13 Unit	48.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		52.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	23 Unit	9.580.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	150.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	17 Unit	4.998.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.500.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000			-	15.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	15.000.000			-	15.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	5 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	35.419.200			100 %	41.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	15 Kegiatan	35.419.200			-	41.000.000	KECAMATAN ADIPALA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga K emasyarakatat an	15.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.419.200	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibangun dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	100 %	10.000.000			100 %	11.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4 Kali	10.000.000			-	11.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	61.251.660			100 %	70.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Forkopincam	9 Kali	61.251.660			-	70.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	38.751.660	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	22.500.000	Kab. Cilacap, Adipala, Adipala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	45.000.000			100 %	49.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi bidang perencanaan, pembangunan, administrasi tata pemerintahan desa, keuangan desa dan perangkat desa	16 Desa	45.000.000			-	49.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	16 Dokumen	9.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	16 Dokumen	13.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	16 Dokumen	13.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14.000.000	KECAMATAN ADIPALA
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	16 Dokumen	10.000.000	Kab. Cilacap, Adipala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000	KECAMATAN ADIPALA
	KECAMATAN MAOS			3.022.112.225				3.811.622.719	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.022.112.225				3.811.622.719	
701	KECAMATAN			3.022.112.225				3.811.622.719	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.883.702.675			100 %	3.550.761.900	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	13.399.610			6 Dokumen	23.152.500	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	6.249.690	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	11.576.250	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	7.149.920	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	11.576.250	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan	2.484.889.319			12 Bulan	3.079.939.617	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24 Orang/bulan	2.484.889.319	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Orang/bulan	3.079.939.617	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	24 orang	13.800.000			25 orang	14.470.313	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	24 Paket	13.800.000	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Paket	14.470.313	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	133.461.080			12 Bulan	130.811.626	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	40.498.880	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	46.883.813	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket	53.480.000	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	49.199.063	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	11.576.250	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	29.482.200	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	23.152.500	KECAMATAN MAOS

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah	2 unit	15.569.220			9 unit	26.250.000	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.569.220	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	26.250.000	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	144.127.600			12 Bulan	176.598.450	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	59.733.450	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	108.127.600	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	116.865.000	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Terpelihara	60 unit	78.455.846			60 unit	99.539.394	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	28.010.390	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	40.446.772	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	12.320.000	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	17.480.138	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	34.980.456	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34.232.625	KECAMATAN MAOS
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	3.145.000	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	7.379.859	KECAMATAN MAOS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	14.999.870			100 %	40.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14.999.870			-	40.000.000	KECAMATAN MAOS
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	14.999.870	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN MAOS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	41.554.770			100 %	55.916.818	
7.01.03.2.01	Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan	8 kali	41.554.770			9 kali	55.916.818	KECAMATAN MAOS
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	11.999.960	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Lembaga K emasyarakat a	14.681.521	KECAMATAN MAOS

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	29.554.810	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Laporan	41.235.297	KECAMATAN MAOS
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa / Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	100 %	7.499.780			100 %	23.889.039	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kali	7.499.780			23 kali	23.889.039	KECAMATAN MAOS
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.499.780	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	23 Laporan	23.889.039	KECAMATAN MAOS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	44.798.500			100 %	64.971.703	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6 kali	44.798.500			8 kali	64.971.703	KECAMATAN MAOS
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	240 Orang	26.198.780	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	200 Orang	31.545.281	KECAMATAN MAOS
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	18.599.720	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Dokumen	33.426.422	KECAMATAN MAOS
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	29.556.630			100 %	76.083.259	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset	10 Desa	29.556.630			10 desa	76.083.259	KECAMATAN MAOS
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40 Dokumen	6.399.710	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Dokumen	26.216.712	KECAMATAN MAOS
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	1 Dokumen	7.899.610	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	9.775.000	KECAMATAN MAOS
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	10 Dokumen	6.399.740	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Dokumen	14.377.703	KECAMATAN MAOS
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	1 Dokumen	6.799.700	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	22.400.044	KECAMATAN MAOS
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	10 Laporan	2.057.870	Kab. Cilacap, Maos, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Laporan	3.313.800	KECAMATAN MAOS
	KECAMATAN SAMPANG			3.067.507.585				3.639.339.695	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.067.507.585				3.639.339.695	
701	KECAMATAN			3.067.507.585				3.639.339.695	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.940.108.595			100 %	3.505.539.695	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	25.294.750			-	26.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	15.294.830	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	9.999.920	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	2.483.897.704			-	3.011.327.695	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	19 Orang/bulan	2.483.897.704	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.011.327.695	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	23 Orang	13.800.000			-	15.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	23 Paket	13.800.000	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 Paket	130.209.800			-	137.212.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	37.999.400	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	60.211.200	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.212.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12.000.000	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	19.999.200	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN SAMPANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit	53.428.040			-	55.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	53.428.040	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	159.208.000			-	180.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	119.208.000	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	31 Unit	74.270.301			-	81.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	34.910.301	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	11.860.000	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	27.500.000	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined	undefined undefined	15.000.000			undefined undefined	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	15.000.000			-	-	KECAMATAN SAMPANG
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	KECAMATAN SAMPANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	37.999.700			100 %	43.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan	2 Kali	37.999.700			-	43.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga K emasyarakatan an	12.999.940	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.999.760	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	KECAMATAN SAMPANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	.	-	5.999.910			-	6.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	12 Kali	5.999.910			-	6.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	5.999.910	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkoptimcam	100 %	57.399.770			100 %	65.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	8 Kali	57.399.770			-	65.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	150 Orang	29.999.890	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	4 Dokumen	27.399.880	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	10.999.610			100 %	19.800.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset</i>	10 Desa	10.999.610			-	19.800.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	30 Dokumen	5.999.690	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.800.000	KECAMATAN SAMPANG
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	10 Dokumen	4.999.920	Kab. Cilacap, Sampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.000.000	KECAMATAN SAMPANG
	KECAMATAN KROYA			2.991.536.769				3.014.953.059	KECAMATAN KROYA
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.991.536.769				3.014.953.059	KECAMATAN KROYA
701	KECAMATAN			2.991.536.769				3.014.953.059	KECAMATAN KROYA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.887.971.689			100 %	2.909.953.059	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	18.750.000			-	25.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								KECAMATAN KROYA
		-	-	8.750.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								KECAMATAN KROYA
				10.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.504.969.559			-	2.504.969.559	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								KECAMATAN KROYA
		0	0 0	2.504.969.559	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.504.969.559	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	123.733.430			-	125.983.500	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								KECAMATAN KROYA
		-	-	25.575.440	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.575.500	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								KECAMATAN KROYA
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10.299.990	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.300.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								KECAMATAN KROYA
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		62.758.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		62.758.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								KECAMATAN KROYA
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		10.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								KECAMATAN KROYA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15.100.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.350.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	33 Unit	24.980.700			-	35.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								KECAMATAN KROYA
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		24.980.700	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya layanan umum perangkat daerah	12 Bulan	147.968.000			-	155.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								KECAMATAN KROYA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		67.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								KECAMATAN KROYA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		80.968.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	35 Unit	67.570.000			-	64.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								KECAMATAN KROYA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		39.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								KECAMATAN KROYA
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		8.200.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								KECAMATAN KROYA
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		20.370.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>undefined</i>	<i>undefined undefined</i>	15.000.000			<i>undefined undefined</i>	-	KECAMATAN KROYA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	15.000.000			-	-	KECAMATAN KROYA
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN KROYA
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	KECAMATAN KROYA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif</i>	100 %	33.565.080			100 %	40.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	4 Lap	33.565.080			-	40.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								KECAMATAN KROYA
		0	0 0	11.207.080	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN KROYA
		-	-	22.358.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban</i>	100 %	3.000.000			100 %	5.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	4 Keg	3.000.000			-	5.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN KROYA
				3.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase fasilitasi forkompincam</i>	100 %	38.600.000			100 %	45.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</i>	8 Keg	38.600.000			-	45.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								KECAMATAN KROYA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				20.600.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								KECAMATAN KROYA
				18.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	13.400.000			100 %	15.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	23 dok	13.400.000			-	15.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								KECAMATAN KROYA
				3.400.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								KECAMATAN KROYA
				3.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000	KECAMATAN KROYA
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								KECAMATAN KROYA
				7.000.000	Kab. Cilacap, Kroya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	KECAMATAN KROYA
	KECAMATAN BINANGUN			3.380.657.676				3.545.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.380.657.676				3.545.000.000	
701	KECAMATAN			3.380.657.676				3.545.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.255.371.146			100 %	3.402.500.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	14.374.960			-	17.500.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.749.960	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.625.000	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	23 org/bln	2.885.646.486			-	3.000.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.885.646.486	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	138.116.430			-	155.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.000.000	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.605.380	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket	62.511.200	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	14.999.850	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan	159.885.270			-	165.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	49.805.030	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	110.080.240	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah terpelihara</i>	53 unit	57.348.000			-	65.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	12 Unit	47.238.000	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	16 Unit	10.110.000	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	100 %	15.000.000			100 %	20.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Mendukung Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	100 %	15.000.000			-	20.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif</i>	100 %	34.355.720			100 %	40.000.000	
7.01.03.2.01	Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan</i>	17 Kegiatan	34.355.720			-	40.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	54 Lembaga Kemasyarak atan	13.106.220	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	3 Laporan	21.249.500	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban</i>	100 %	12.499.820			100 %	15.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban</i>	4 laporan	12.499.820			-	15.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	17 Laporan	12.499.820	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase fasilitasi forkompincam</i>	100 %	43.886.080			100 %	50.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	315 orang	43.886.080			-	50.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	315 Orang	26.937.260	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	4 Dokumen	16.948.820	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa</i>	100 %	19.544.910			100 %	17.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi bidang perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan</i>	17 kegiatan	19.544.910			-	17.500.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	85 Dokumen	11.545.280	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000	KECAMATAN BINANGUN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	17 Dokumen	7.999.630	Kab. Cilacap, Binangun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN BINANGUN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN NUSAWUNGU			3.184.097.386				3.891.482.189	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.184.097.386				3.891.482.189	
701	KECAMATAN			3.184.097.386				3.891.482.189	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah.	100 %	3.050.597.386			100 %	3.684.959.721	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	27.300.000			-	33.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.700.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.600.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	12 bulan	2.582.174.261			-	2.945.894.721	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.582.174.261	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.945.894.721	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	15.000.000			-	14.500.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	15.000.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14.500.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	105.500.000			-	147.290.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.600.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	44.000.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	16.900.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.290.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	23.986.830			-	52.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	23.986.830	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	195.575.000			-	197.575.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.575.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56.575.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	139.000.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		141.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Nusawungu</i>	12 bulan	101.061.295			-	294.700.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	13 Unit	39.500.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39.500.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	14 Unit	8.860.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	49.767.295	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		238.000.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	37 Unit	2.934.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.200.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000			-	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	15.000.000			-	-	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif</i>	100 %	32.000.000			100 %	45.274.714	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan</i>	18 kali	32.000.000			-	45.274.714	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	2 Lembaga K emasyarakat an	9.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13.230.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	16 Laporan	23.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32.044.714	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban</i>	100 %	6.000.000			100 %	7.929.731	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Terlaksananya penegakan peraturan daerah</i>	6 Laporan	6.000.000			-	7.929.731	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	6.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.929.731	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase fasilitasi forkompincam</i>	100 %	57.600.000			100 %	90.699.919	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah fasilitasi forkopincam</i>	100 %	57.600.000			-	90.699.919	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	297 Orang	27.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		57.881.250	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	6 Dokumen	30.600.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32.818.669	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa</i>	100 %	22.900.000			100 %	62.618.104	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi bidang perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan, keuangan, dan aset</i>	17 desa	22.900.000			-	62.618.104	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	17 Dokumen	3.000.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13.860.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	17 Dokumen	10.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.440.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen	4.100.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.233.200	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
		<i>Jumlah Dokumen Fasiltasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	1 Dokumen	3.500.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9.309.904	KECAMATAN NUSAWUNGU
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 Laporan	2.300.000	Kab. Cilacap, Nusawungu, Nusawungu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.775.000	KECAMATAN NUSAWUNGU
	KECAMATAN SIDAREJA			3.118.667.149				3.124.432.579	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.118.667.149				3.124.432.579	
701	KECAMATAN			3.118.667.149				3.124.432.579	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.998.973.209			100 %	3.007.932.579	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 3 Dokumen	23.549.410			3 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.200.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.349.410	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 12 Laporan	2.608.432.579			12 Laporan	2.608.432.579	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.608.432.579	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Orang/bulan	2.608.432.579	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	1 Laporan 100 %	12.000.000			1 Laporan	13.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	12.000.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Paket	13.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Jumlah Laporan Penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 % 12 Laporan	115.062.320			12 Laporan	116.500.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.820.760	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	26.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.378.560	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	4.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.132.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	38.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.215.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.016.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	42.500.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	40.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</i> <i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	4 Unit 100 %	19.901.460			7 Unit	20.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	19.901.460	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	20.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</i> <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 12 Laporan	166.318.000			12 Laporan	167.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	39.670.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	40.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	126.648.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	127.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i> <i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i>	100 % 35 Unit	53.709.440			35 Unit	58.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 Unit	34.642.432	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	35.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	12 Unit	7.430.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	8.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	11.637.008	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	15.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase implemementasi pelimpahan kewenangan</i>	100 %	14.999.970			100 %	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	14.999.970			-	-	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	14.999.970	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif</i>	100 %	37.998.810			100 %	38.500.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan</i>	14 Kali	37.998.810			14 Kali	38.500.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10 Lembaga Kemasyarak atan	7.998.810	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Lembaga Kemasyarak ata	8.500.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	30.000.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	30.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang dibangun dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban</i>	100 %	8.200.000			100 %	10.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	12 Laporan	8.200.000			12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	8.200.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase fasilitasi forkompincam</i>	100 %	47.495.160			100 %	55.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	14 Kali 14 Kali	47.495.160			14 Kali	55.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	300 Orang	29.995.160	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	300 Orang	30.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	4 Dokumen	17.500.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa</i>	100 %	11.000.000			100 %	13.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset</i>	10 Desa	11.000.000			10 Desa	13.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	10 Dokumen	6.000.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Cilacap, Sidareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN SIDAREJA
	KECAMATAN KEDUNGREJA			3.032.947.885				2.950.900.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.032.947.885				2.950.900.000	
701	KECAMATAN			3.032.947.885				2.950.900.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.929.615.355			100 %	2.840.600.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	20.699.790			100 %	14.500.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	13.699.830	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	7.250.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	6.999.960	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	7.250.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah</i>	100 %	2.506.262.347			100 %	2.400.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	18 Orang/bulan	2.506.262.347	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	18 Orang/bulan	2.400.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</i>	100 %	10.800.000			100 %	8.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	18 Paket	10.800.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Paket	8.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</i>	12 Paket % 100 100 %	125.225.260			100 %	129.100.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	14.997.670	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	15.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	19.998.930	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	22.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	5.500.060	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	39.749.600	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	41.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	5.979.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	6.100.000	KECAMATAN KEDUNGREJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	256 Laporan	39.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270 Laporan	39.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	2 Unit 100 % 100 %	16.097.030			100 %	20.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	16.097.030	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	20.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Laporan	188.417.130			100 %	196.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	66.410.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	56.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	122.007.130	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	140.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Terpelihara Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah</i>	26 Unit % 100 100 %	62.113.798			100 %	73.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	15 Unit	35.461.898	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Unit	42.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	12 Unit	11.620.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	11.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	15.031.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	20.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	14.999.860			100 %	15.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan</i>	2 Laporan	14.999.860			-	15.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	14.999.860	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	30.133.740			100 %	32.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan	5 kali 27 Laporan 5 Kali	30.133.740			5 Kali	32.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	9.998.540	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	20.135.200	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Laporan	21.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibangun dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	100 %	3.199.230			100 %	3.300.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kali	3.199.230			1 Kali	3.300.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3.199.230	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	3.300.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	47.503.380			100 %	49.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8 kali	47.503.380			8 Kali	49.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	29.997.730	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Orang	31.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	17.505.650	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	18.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	7.496.320			100 %	11.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset	11 desa	7.496.320			11 Desa	11.000.000	KECAMATAN KEDUNGREJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	2.893.380	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.500.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	4.602.940	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN KEDUNGREJA
	KECAMATAN GANDRUNGMANGU			2.855.860.040				3.035.467.106	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.855.860.040				3.035.467.106	
701	KECAMATAN			2.855.860.040				3.035.467.106	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.739.008.102			100 %	2.909.317.106	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Daerah Persentase ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Daerah	100 Persen 100 %	23.999.560			100 Persen	27.500.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.499.940	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	12.500.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.499.620	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.293.630.390			100 Persen	2.434.817.106	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.293.630.390	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23 Orang/bulan	2.434.817.106	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	121.030.990			100 Persen	132.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.497.260	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	2.500.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.511.530	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	22.500.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	43.992.400	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	50.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	8.999.800	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	12.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.030.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	45.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	250.281.300			100 Persen	260.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	48 Laporan	63.406.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48 Laporan	65.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan	186.875.300	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Laporan	195.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.065.862			100 Persen	55.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	6 Unit	35.000.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	40.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	5.810.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Unit	7.500.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		-	-	9.255.862	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	7.500.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	15.000.000			100 %	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	15.000.000			-	-	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Gandrungmangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	39.348.230			100 %	45.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan</i>	3 Kegiatan	39.348.230			3 Kegiatan	45.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	6 Lembaga K emasyarakat an	14.347.460	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Lembaga K emasyarakat a	15.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	25.000.770	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Laporan	30.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	100 %	3.500.000			100 %	6.650.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 Kali	3.500.000			13 Kali	6.650.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.500.000	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	6.650.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	43.187.810			100 %	48.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8 Kali	43.187.810			8 Kali	48.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	335 Orang	25.488.980	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	312 Orang	30.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	17.698.830	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	18.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	15.815.898			100 %	26.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	JumlahDokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Dokumen	15.815.898			6 Dokumen	26.500.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		0	0 0	3.496.230	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	6.500.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		0	0 0	8.819.660	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		0	0 0	3.500.008	Kab. Cilacap, Gandrungmangu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN GANDRUNGMANGU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN PATIMUAN			2.565.516.720				2.665.049.839	KECAMATAN PATIMUAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.565.516.720				2.665.049.839	KECAMATAN PATIMUAN
701	KECAMATAN			2.565.516.720				2.665.049.839	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	-	-	2.440.859.200			-	2.529.349.839	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	100 %	14.853.110			100 %	18.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								KECAMATAN PATIMUAN
		-	8 Dokumen	8.186.130	Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								KECAMATAN PATIMUAN
				6.666.980	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	2.065.808.270			100 %	2.078.132.069	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								KECAMATAN PATIMUAN
				2.065.808.270	Kab. Cilacap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.078.132.069	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	105.038.920			100 %	107.119.800	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								KECAMATAN PATIMUAN
				3.998.340	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								KECAMATAN PATIMUAN
				25.991.180	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								KECAMATAN PATIMUAN
				38.607.400	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38.619.800	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								KECAMATAN PATIMUAN
				9.892.000	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								KECAMATAN PATIMUAN
				26.550.000	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan	100 %	17.698.110			100 %	20.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								KECAMATAN PATIMUAN
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	17.698.110	Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	20.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-	100 %	141.999.980			100 %	147.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								KECAMATAN PATIMUAN
		-	48 Laporan	25.558.500	Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	27.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								KECAMATAN PATIMUAN
				116.441.480	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ur	-	100 %	95.460.810			100 %	158.097.970	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								KECAMATAN PATIMUAN
				35.597.970	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.597.970	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								KECAMATAN PATIMUAN
				15.000.000	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								KECAMATAN PATIMUAN
				37.362.840	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								KECAMATAN PATIMUAN
				7.500.000	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan	100 %	14.999.950			100 %	15.000.000	KECAMATAN PATIMUAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tida	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	14.999.950			100 %	15.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN PATIMUAN
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		14.999.950	Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DE	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	35.821.210			100 %	40.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan	56 kali	35.821.210			14 kali	40.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								KECAMATAN PATIMUAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga Kemasyarak atan	9.724.670	Kab. Cilacap, Patimuan, Patimuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Lembaga Kemasyarak ata	11.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								KECAMATAN PATIMUAN
		0	4 Dokumen	6.097.360	Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN PATIMUAN
		-	48 Laporan	19.999.180	Kab. Cilacap, Patimuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	22.500.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	100 %	8.499.420			100 %	10.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	4.499.710			100 %	5.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								KECAMATAN PATIMUAN
				4.499.710	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Jumlah Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	100 %	3.999.710			100 %	5.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								KECAMATAN PATIMUAN
				3.999.710	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEM	Persentase Fasilitasi Forkopimcam	100 %	43.849.710			100 %	46.800.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum S	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56 kali	43.849.710			14 kali	46.800.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								KECAMATAN PATIMUAN
				24.551.950	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.500.000	KECAMATAN PATIMUAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			19.297.760	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.300.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PE	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 % 100 %	21.487.230			100 % 100 %	23.400.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bidang perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan, keuangan dan aset Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah desa yang terfasilitasi bidang perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan, keuangan dan aset	56 desa	21.487.230			14 desa	23.400.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								KECAMATAN PATIMUAN
				6.999.700	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.700.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6.997.900	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.700.000	KECAMATAN PATIMUAN
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			7.489.630	Kab. Cilacap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	KECAMATAN PATIMUAN
	KECAMATAN CIPARI			2.542.369.570				2.802.774.023	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.542.369.570				2.802.774.023	
701	KECAMATAN			2.542.369.570				2.802.774.023	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.402.158.650			100 %	2.644.774.023	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	23.314.140			100 %	24.691.800	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	14.956.900	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	9.691.800	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	8.357.240	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Orang	1.995.160.180			100 %	2.185.082.223	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.995.160.180	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Orang/bulan	2.185.082.223	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	10.800.000			100 %	15.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	10.800.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Paket	15.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	127.791.980			100 %	163.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.464.940	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	25.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	20.280.620	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	28.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	9.685.120	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	13.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	40.752.300	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	46.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	8.609.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	11.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	256 Laporan	42.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600 Laporan	40.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan</i>	6 Unit	33.615.640			100 %	40.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	6 Unit	9.819.810	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Unit	15.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		-	-	23.795.830	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	25.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 Laporan	155.346.091			100 %	149.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	55.303.011	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	51.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	100.043.080	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	98.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	30 Unit	56.130.619			100 %	68.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	13 Unit	36.704.819	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Unit	43.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	15 Unit	9.460.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Unit	10.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	2 Unit	9.965.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	15.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	14.999.860			100 %	15.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	14.999.860			-	15.000.000	KECAMATAN CIPARI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	14.999.860	Kab. Cilacap, Cipari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	% Desa yang memiliki Kelembagaan Aktif	100 %	41.225.640			100 %	45.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan</i>	11 Laporan	33.000.000			24 Kegiatan	36.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	11 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	9 Laporan	20.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	22.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan yang diberdayakan</i>	11 Lembaga	8.225.640			11 Lembaga	9.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
		-	-	8.225.640	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Desa/Kelurahan yang Dibina dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	2.500.000			100 %	5.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	4 Laporan	2.500.000			-	5.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	4 Laporan	2.500.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Fasilitasi Forkopimcam	100 %	47.424.440			100 %	51.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah</i>	6 Laporan	47.424.440			8 Kegiatan	51.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	240 Orang	29.593.400	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 Orang	32.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	6 Dokumen	17.831.040	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	19.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang Difasilitasi Terkait Tata Pemerintahan Desa	100 %	34.060.980			100 %	42.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan, Pembangunan, Adm Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	7 Dokumen	34.060.980			59 Dokumen	42.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	3 Dokumen	14.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	7 Dokumen	12.232.740	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Dokumen	13.000.000	KECAMATAN CIPARI
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	1 Dokumen	7.828.240	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN CIPARI
	KECAMATAN KARANGPUCUNG			3.019.560.068				3.857.594.728	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.019.560.068				3.857.594.728	
701	KECAMATAN			3.019.560.068				3.857.594.728	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.867.789.168			100 %	3.646.608.310	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	31.488.240			6 Dokumen	22.431.300	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	22.413.240	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	11.925.853	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	9.075.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	10.505.447	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	2.353.413.987			12 Bulan	2.997.705.006	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	19 Orang/bulan	2.353.413.987	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Orang/bulan	2.997.705.006	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i>	26 Orang	15.600.000			28 Orang	13.000.000	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	26 Paket	15.600.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 Paket	13.000.000	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	156.644.930			12 Bulan	205.173.046	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	25.910.100	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	31.531.500	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	9.719.430	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	11.921.333	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	55.176.600	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	72.583.088	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12.738.800	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	13.891.500	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	53.100.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	75.245.625	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah</i>	2 Unit	14.258.500			6 Unit	52.920.000	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	14.258.500	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	52.920.000	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan	235.449.600			12 Bulan	253.770.964	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	50.535.600	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.196.037	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	184.914.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	193.574.927	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Terpelihara</i>	46 Unit	60.933.911			42 Unit	101.607.994	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	15 Unit	36.335.211	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	41.607.994	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	30 Unit	15.191.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	10.000.000	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	9.407.700	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	50.000.000	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Implementasi Petimpahan Kewenangan	100 %	15.000.000			100 %	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	3 Laporan	15.000.000			-	-	KECAMATAN KARANGPUCUNG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	43.791.030			100 %	65.368.016	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan	7 Kali	43.791.030			8 Kegiatan	65.368.016	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga K emasyarakatat an	13.245.160	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Lembaga K emasyarakatat a	14.470.255	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	30.545.870	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Laporan	50.897.761	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	100 %	2.000.000			100 %	9.261.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kali	2.000.000			12 Laporan	9.261.000	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.000.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	9.261.000	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	62.863.460			100 %	95.171.246	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6 Kali	62.863.460			7 Kegiatan	95.171.246	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	330 Orang	42.835.820	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	120 Orang	61.238.363	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	20.027.640	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	33.932.883	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	28.116.410			100 %	41.186.156	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset	14 Desa	28.116.410			14 Dokumen	41.186.156	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	42 Dokumen	8.118.000	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14 Dokumen	13.139.623	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.961.140	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14 Dokumen	9.230.323	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	5.118.180	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14 Laporan	9.174.004	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	4.437.800	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14 Dokumen	5.136.729	KECAMATAN KARANGPUCUNG
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	5.481.290	Kab. Cilacap, Karangpucung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14 Laporan	4.505.477	KECAMATAN KARANGPUCUNG
	KECAMATAN CIMANGGU			3.586.916.929				3.582.978.491	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.586.916.929				3.582.978.491	
701	KECAMATAN			3.586.916.929				3.582.978.491	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.483.116.929			100 %	3.494.178.491	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.800.000			-	12.800.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.400.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.400.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.400.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.400.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	2.945.894.721			-	2.896.016.721	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.945.894.721	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.896.016.721	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	16.000.000			-	16.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	16.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 Dokumen	120.292.850			-	120.310.950	KECAMATAN CIMANGGU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	5.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	24.998.750	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	4.986.400	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	40.307.700	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.310.950	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	5.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	40.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</i>	2 Kegiatan	92.493.330			-	90.600.820	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	22.493.330	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.600.820	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	70.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	24 Laporan	227.872.017			-	227.883.217	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	51.291.217	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51.291.217	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	176.580.800	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		176.592.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	26 Unit	67.764.011			-	130.566.783	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 Unit	36.566.783	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36.566.783	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	12 Unit	6.980.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	24.217.228	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87.000.000	KECAMATAN CIMANGGU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Implementasi Pelimpahan Kewenangan	100 %	15.000.000			100 %	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit perangkat daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	15.000.000			-	-	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Desa yang memiliki Kelembagaan Aktif	100 %	25.000.000			100 %	25.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan	27 Laporan	25.000.000			-	25.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Cimanggu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	100 %	9.500.000			100 %	9.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Kegiatan	5.000.000			-	5.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15 Laporan	5.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	4.500.000			-	4.500.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	4.500.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa yang Dibina dalam dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	31.800.000			100 %	31.800.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Laporan	31.800.000			-	31.800.000	KECAMATAN CIMANGGU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	15.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	16.800.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.800.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Terkait Tata Pemerintahan Desa	100 %	22.500.000			100 %	22.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 Dokumen	22.500.000			-	22.500.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	5.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	7.500.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	5.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15 Laporan	5.000.000	Kab. Cilacap, Cimanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN CIMANGGU
	KECAMATAN MAJENANG			3.404.980.442				3.813.838.186	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.404.980.442				3.813.838.186	
701	KECAMATAN			3.404.980.442				3.813.838.186	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.317.166.192			100 %	3.720.838.186	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	19.751.060			6 Dokumen	29.445.680	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.844.930	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	12.505.680	KECAMATAN MAJENANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	5.906.130	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	16.940.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Setiap Bulan</i>	25 Orang/Bulan	2.620.118.767			35 Orang/Bulan	2.955.892.506	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 Orang/bulan	2.620.118.767	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	35 Orang/bulan	2.955.892.506	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	36 Orang/Bulan	4.950.000			35 Orang/Bulan	10.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	33 Paket	4.950.000	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Paket	10.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	60 Paket	186.010.920			60 Paket	194.500.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	4.786.030	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	12.500.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	42 Paket	35.477.490	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	32.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	84.444.800	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	85.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12.322.600	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	15.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	48.980.000	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	50.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	11 Unit 8 Unit	45.958.700			9 Unit	62.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		0	14 0	42.515.500	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	50.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	3.443.200	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	12.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	24 Laporan	371.244.500			24 Laporan	397.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	92.910.500	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	117.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	278.334.000	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	280.000.000	KECAMATAN MAJENANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	69.132.245			129 Unit	72.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	41.602.145	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	12.760.000	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26 Unit	12.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.370.100	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Unit	14.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.400.000	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76 Unit	2.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.999.520			-	16.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	14.999.520			4 Laporan	16.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	14.999.520	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	27.906.330			100 %	29.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan	12 Kali	27.906.330			12 Kali	29.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga K emasyarakat an	8.333.690	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga K emasyarakat a	9.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.572.640	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	20.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	100 %	2.583.580			100 %	3.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Kali	2.583.580			6 Kali	3.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	2.583.580	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	3.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam	100 %	30.503.540			100 %	31.500.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	2 Kali	30.503.540			8 Kali	31.500.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	200 Orang	13.130.260	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Orang	13.500.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	4 Dokumen	17.373.280	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	18.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Difasilitasi Terkait Tata Pemerintahan Desa	100 %	11.821.280			100 %	13.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	17 Laporan	11.821.280			17 Desa	13.500.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	34 Dokumen	4.149.620	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	34 Dokumen	5.891.180	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Dokumen	6.500.000	KECAMATAN MAJENANG
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	17 Laporan	1.780.480	Kab. Cilacap, Majenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Laporan	2.000.000	KECAMATAN MAJENANG
	KECAMATAN WANAREJA			2.936.408.708				2.789.852.208	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.936.408.708				2.789.852.208	
701	KECAMATAN			2.936.408.708				2.789.852.208	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.840.664.498			100 %	2.690.942.308	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	7 dokumen	13.960.040			9 dokumen	13.960.450	KECAMATAN WANAREJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.437.370	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	8.437.500	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.522.670	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	5.522.950	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen	2.180.197.755			12 bulan	2.180.197.755	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.180.197.755	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	19 Orang/bulan	2.180.197.755	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	16.200.000			27 paket	13.500.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	16.200.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27 Paket	13.500.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 dokumen	155.418.610			48 paket	159.380.210	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.248.110	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	38.188.960	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.190.500	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	41.191.250	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	10.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345 Laporan	69.980.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	70.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.000.000			8 unit	6.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	6.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	214.278.358			24 laporan	212.831.393	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.501.448	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	35.054.093	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.776.910	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	177.777.300	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	37 unit	255.609.735			37 unit	105.072.500	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	42.000.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	42.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	17 Unit	10.730.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Unit	10.730.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	201.407.235	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	50.870.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	1.472.500	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	1.472.500	KECAMATAN WANAREJA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	14.999.920			100 %	15.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 laporan	14.999.920			-	15.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	14.999.920	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	27.635.740			100 %	27.635.900	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	2 laporan	27.635.740			3 keg	27.635.900	KECAMATAN WANAREJA
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	48 Lembaga Kemasyarakatan	7.649.980	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.650.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	19.985.760	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	19.985.900	KECAMATAN WANAREJA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibangun dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	100 %	5.000.000			100 %	5.000.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	1 laporan	5.000.000			1 laporan	5.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1 Laporan	5.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitas forkompincam	100 %	36.273.800			100 %	36.274.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	6 dokumen	36.273.800			8 kali	36.274.000	KECAMATAN WANAREJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	165 Orang	20.199.800	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Orang	20.200.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	16.074.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	16.074.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 %	11.834.750			100 %	15.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 dokumen	11.834.750			6 dokumen	15.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	4.725.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.110.000	Kab. Cilacap, Wanareja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN WANAREJA
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	4.999.750	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN WANAREJA
	KECAMATAN DAYEULUHUR			2.165.603.210				2.397.558.885	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.165.603.210				2.397.558.885	
701	KECAMATAN			2.165.603.210				2.397.558.885	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.049.903.310			100 persen	2.260.058.885	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	16.400.000			-	17.250.000	KECAMATAN DAYEULUHUR
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.250.000	KECAMATAN DAYEULUHUR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.400.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	KECAMATAN DAYEULUHUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	12 dokumen	1.647.386.100			-	1.836.640.885	KECAMATAN DAYEULUHUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	9 Orang/bulan	1.647.386.100	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.836.640.885	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah</i>	12 dokumen	151.421.810			-	153.500.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	3.991.680	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		-	-	24.999.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	3.999.630	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	39.997.500	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	9.034.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.500.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	450 Laporan	69.400.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan peralatan kantor</i>	1 Unit	11.538.760			-	20.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	11.538.760	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 persen	181.647.500			-	181.668.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	53.999.500	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	127.648.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		127.668.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	25 unit	41.509.140			-	51.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	13 Unit	30.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	7.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	4.509.140	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan	100 %	15.000.000			100 %	20.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000			-	20.000.000	KECAMATAN DAYEULHUHUR
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN DAYEULHUHUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Memiliki Kelembagaan Aktif	100 persen	41.875.900			100 persen	45.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	4 laporan	41.875.900			-	45.000.000	KECAMATAN DAYEULHUHUR
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70 Lembaga Kemasyarakatan	11.876.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.500.000	KECAMATAN DAYEULHUHUR
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	29.999.900	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32.500.000	KECAMATAN DAYEULHUHUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 persen	3.000.000			100 persen	3.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	3.000.000			-	3.500.000	KECAMATAN DAYEULHUHUR
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.500.000	KECAMATAN DAYEULHUHUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Forkopincam	100 persen	31.000.000			100 persen	36.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	6 laporan	31.000.000			-	36.000.000	KECAMATAN DAYEULHUHUR
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100 Orang	10.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	4 Dokumen	21.000.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	100 persen	24.824.000			100 persen	33.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	8 laporan	24.824.000			-	33.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	2 Dokumen	4.212.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	2 Dokumen	2.606.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	2 Dokumen	4.412.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
		-	-	7.134.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	1 Dokumen	6.460.000	Kab. Cilacap, Dayeuhluhur, Dayeuhluhur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.000.000	KECAMATAN DAYEUHLUHUR
	KECAMATAN KAMPUNGLAUT			2.807.895.899				2.974.113.164	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.807.895.899				2.974.113.164	
701	KECAMATAN			2.807.895.899				2.974.113.164	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.659.245.389			100 %	2.820.113.164	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5 %	14.981.810			-	18.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		0	2 0	9.982.550	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		0	1 0	4.999.260	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	6.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya administrasi Keuangan setiap bulan</i>	12 bulan	1.858.761.408			-	2.076.483.594	KECAMATAN KAMPUNGLAUT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100 Orang/bulan	1.858.761.408	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Orang/bulan	2.076.483.594	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan</i>	12 bulan	176.043.990			-	176.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		0	12 0	11.999.760	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	12.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		0	12 0	23.507.600	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	24.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		0	12 0	20.563.230	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	20.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		0	12 0	44.973.400	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	45.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		0	12 0	15.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	15.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		0	12 0	60.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400 Laporan	60.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan</i>	12 bulan	229.282.000			-	229.629.570	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		0	12 0	45.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	45.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		0	12 0	184.282.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	184.629.570	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik daerah</i>	12 bulan	380.176.181			-	320.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		0	12 0	59.956.716	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		0	12 0	20.242.550	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Unit	20.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		0	2 0	299.976.915	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	240.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000			-	20.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	15.000.000			-	20.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	15.000.000	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif</i>	100 %	38.993.810			100 %	39.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Prosentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif</i> <i>Prosentase Desa yang memiliki kelembagaan akti</i>	100 % 100 %	38.993.810			100 %	39.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		0	5 0	14.999.880	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga K emasyarakat a	15.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		0	100 0	23.993.930	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	24.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban</i>	100 %	19.971.680			100 %	20.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		9.985.840			-	10.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		0	100 0	9.985.840	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		9.985.840			-	10.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
		0	100 0	9.985.840	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	10.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase fasilitasi forkompincam</i>	100 %	44.900.310			100 %	45.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Prosentasi Fasilitasi Kordinasi Forkopimcam</i>	100 %	44.900.310			-	45.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		0	2 0	34.900.510	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		0	2 0	9.999.800	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa</i>	100 %	29.784.710			100 %	30.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi bidang perencanaan pembangunan, administrasi keuangan dan Aset	4 Desa	29.784.710			-	30.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 Dokumen	9.913.070	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		0	100 0	9.935.460	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		0	100 0	9.936.180	Kab. Cilacap, Kampung Laut, Klaces	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000	KECAMATAN KAMPUNGLAUT
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			10.019.405.467				10.821.034.641	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			10.019.405.467				10.821.034.641	
801	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			10.019.405.467				10.821.034.641	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.865.980.507			100 %	5.011.962.630	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaean dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	38.675.000			6 Dokumen	41.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.937.500	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.737.500	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	3.438.745.762			12 Bulan	3.500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.438.745.762	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	43.000.000			40 Orang	46.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	581.145.000			12 Bulan	630.544.170	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.250.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.544.170	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	77.395.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan</i>	12 Paket	52.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	400.000.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		440.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	9 Unit	110.367.640			10 Unit	55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	15 Unit	110.367.640	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	12 Bulan	410.729.700			12 Bulan	486.419.560	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	102.957.700	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	52.500.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	255.272.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		321.419.560	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i>	54 Unit	243.317.405			300 Unit	252.498.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14 Unit	166.945.405	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	39.900.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	1 Unit	36.472.000	Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Donan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.698.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara	24 kecamatan	803.511.160			24 kecamatan	958.732.331	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	6 Laporan	803.511.160			5 Laporan	958.732.331	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	500 Orang	803.511.160	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		958.732.331	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (%)	70 %	3.253.634.000			70 %	3.579.339.900	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6 Laporan	3.253.634.000			6 Laporan	3.579.339.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	640 Orang	152.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		345.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	3.101.634.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.234.339.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/Ormas yang dibina/ bimteK kebangsaan	80 %	40.000.000			80 %	44.000.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	40.000.000			1 Laporan	44.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	40.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	24 kecamatan	245.000.000			24 kecamatan	270.000.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	10 Laporan	245.000.000			10 Laporan	270.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	1225 Orang	245.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		270.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial</i>	24 kecamatan	811.279.800			24 kecamatan	956.999.780	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	9 Laporan	811.279.800			5 Laporan	956.999.780	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	8 Laporan	123.279.800	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.199.780	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen	688.000.000	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		756.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah sesuai dengan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Cilacap. Indikator-indikator pembangunan tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, telah ditetapkan target yang harus dicapai pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6. 1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,77
2	Angka kriminalitas	Indeks	17,12
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,91
4	Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas)	%	5,40-6,10
5	Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas)	%	5,40-6,10
6	Inflasi	%	2,5-4,5
7	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	89,28
8	Indek Kinerja Sistem Irigasi	%	48,85
9	Vc Rasio	Indeks	0,30-0,40
10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7455
11	Penurunan Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	739.415
12	Indeks Resiko Bencana	Indeks	96,93
13	Nilai SAKIP	Nilai	74,75
14	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	74,146
15	Indeks Merit System	Indeks	319
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,46
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,97
18	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	96,52 (Zona Hijau)
19	IPG	Indeks	87,78
20	Angka kemiskinan	%	10,14
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,84 - 7,82

6.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada *level intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 6. 2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2025

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025
1	2	3	4
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25
2	Rata-Rata Lama Sekolah	%	7,76
3	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	indeks	100
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,11
5	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan	%	40
6	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	29,5
	Dinas Kesehatan		
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,5
2	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan	indeks	100
3	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	94,74
4	Persentase fasilitas kefarmasian dan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	81
5	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	38,03
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1	Persentase Rekomtek Izin Mendirikan Bangunan/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	%	0,035
2	Persentase bangunan publik dalam kondisi baik (%)	%	20,09
3	Tingkat kemantapan jalan	%	81
4	Pertumbuhan tingkat kemantapan jalan	%	3,5
5	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	94
6	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang	%	91
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		
1	Debit air yang tersedia	%	0,61
2	Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	49,86
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan		
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	%	85,96
2	Indeks pencapaian SPM	indeks	100
3	Persentase Kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan	%	100
4	Persentase Penanganan Sengketa Tanah yang dilakukan melalui Mediasi	%	100
	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten	%	1
2	Indeks Pencapaian SPM	indeks	100
3	Persentase penegakkan perda dan perkada di Kabupaten Cilacap (%)	%	33
4	Tingkat response time penanganan kebakaran	%	95
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025
1	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	18,3
2	Response time Penanganan Bencana	menit	15
3	Indeks Pencapaian SPM	indeks	100
	Dinas Sosial		
1	Persentase penurunan jumlah PPKS	%	13,99
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	59,19
3	Persentase PSKS yang terakreditasi	%	58,11
4	Indeks Pencapaian SPM	indeks	100
	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,84 - 7,82
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,6
3	Pertumbuhan/kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	7,4
4	Pertumbuhan IKM	%	9,5
	Dinas Pangan Dan Perkebunan		
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	89,3
2	Konsumsi energi per kapita per hari	Kkal/kapita/hari	2096
3	Konsumsi protein per kapita per hari	Gram/kapita/hari	57,4
	Dinas Lingkungan Hidup		
1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,66
2	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100
3	Persentase Pengelolaan Sampah	%	83,35
4	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	12,96
5	Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air pendukung IKLH yang Memenuhi Baku Mutu	%	41,83
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	40,95
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	68
3	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	51
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
1	Nilai IDM	Rata-rata	0,7455
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,67
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,66
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,09
3	Kategori KLA	kategori	Nindya
4	Persentase Kecamatan yang mampu memenuhi hak Anak	%	33,33
5	Persentase Pemenuhan indikator data gender dan anak dalam Siga	%	96
6	Usia Harapan Hidup		74,94
7	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,89
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,04
	Dinas Perhubungan		
1	Persentase Layanan Perhubungan	%	56,77
2	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ	%	63,54
3	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	%	50
	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	75
2	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Poin	81
3	Indeks Tata Kelola SPBE	Nilai	79

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025
4	Indeks Manajemen SPBE	%	75
5	Persentase Layanan SPBE	%	73
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1	Persentase realisasi Investasi	%	100
2	Jumlah Investor yang masuk di Kabupaten Cilacap	investor	39686
	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata		
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	75
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	21
4	Jumlah Prestasi olahraga	Cabor	16
5	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,05
6	PAD Sektor Pariwisata	Rp	500.000.000
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,24
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,25
3	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK	%	11,32
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71,64
	Dinas Perikanan		
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton/tahun	59081
2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	42974
3	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	16106
4	Angka konsumsi ikan	kg/kapita	30,448
	Dinas Pertanian		
1	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun (padi)	Kw/ha	64,69
2	Produksi Tanaman padi	Ton	839798
3	Produktivitas cabai (cabai rawit)	Kw/ha	80
4	Produksi Tanaman cabai (aneka cabai)	Ton	9686
5	Populasi ternak (Sapi, Kambing, dan Domba)	ekor	224659
6	Produksi daging	Ton	8749
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		
1	Pertumbuhan sub sektor Koperasi dan Perdagangan Besar dan Eceran	%	5,45
2	Persentase koperasi aktif	%	73,14
3	Persentase UMKM yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	46,07
4	Persentase pertumbuhan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	16,6
	Sekretariat Daerah		
1	Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda	indeks	42 (tinggi)
2	Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100
3	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	96,52 (Zona hijau)
4	Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan	%	100
	Sekretariat DPRD		
1	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	Persen	100
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025
1	Tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah	%	75,44
2	Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan	%	100
3	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan	%	23,35
4	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	71,82
	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
1	Persentase ketercapaian target pendapatan	%	100
2	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	27,19
3	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD nya baik	%	100
4	Persentase Ketepatan Pelaporan BMD	%	100
	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah		
1	Indeks Sistem Merit	Nilai	319
2	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	66,56
	Inspektorat		
1	Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249
2	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3	%	80
	Kecamatan Adipala		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Bantarsari		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Binangun		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Cilacap Selatan		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Cilacap Tengah		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Cilacap Utara		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Cimanggu		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Cipari		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Dayeuhluhur		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Gandrungmangu		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Jeruklegi		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Kampunglaut		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Karangpucung		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase gangguan keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa yang berkembang	%	100
	Kecamatan Kawunganten		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase gangguan keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa yang berkembang	%	100
	Kecamatan Kedungreja		

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Kesugihan		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Kroya		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Majenang		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Maos		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Nusawungu		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Patimuan		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Sampang		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Kecamatan Sidareja		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025
	Kecamatan Wanareja		
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
1	Jumlah Kasus konflik sosial	Kasus	0
2	Persentase Cakupan kecamatan yang dibina dalam keamanan wilayah	%	100

6.3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) aspek kesejahteraan masyarakat, 2) aspek pelayanan umum, serta 3) aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap tertuang pada Tabel 6.3 di bawah ini.

Tabel 6. 3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,91
2	Pertumbuhan ekonomi (dengan migas)	%	5,40-6,10
3	Pertumbuhan ekonomi (tanpa migas)	%	5,40-6,10
4	Inflasi	%	2,5-4,5
5	IPG	Indeks	87,78
6	Angka kemiskinan	%	10,14
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,84 - 7,82
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25
9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,76
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,94
11	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	7,4
12	Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB	%	2,55

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025
13	Pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	5,45
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,05
	ASPEK DAYA SAING		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	76,77
2	Angka kriminalitas	Indeks	17,12
3	Indeks kualitas infrastruktur	indek	89,28
4	Indek Kinerja Sistem Irigasi	%	48,85
5	Vc Rasio	Indeks	0,30-0,40
6	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7455
7	Penurunan Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	739.415
8	Indek Resiko Bencana	indeks	96,93
9	Nilai SAKIP	Nilai	74,75
10	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	74,146
11	Indeks Merit System	Indeks	319
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,46
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,97
14	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	96,52 (Zona Hijau)
15	Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249
16	Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	40,95
17	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kategori	62 (sangat inovatif)
18	Kasus Konflik Sosial	Jumlah	0
19	Persentase Penurunan gangguan keamanan skala kabupaten	%	1
20	Nilai Investasi	Milyar	1.991,31
21	Tingkat Kemantapan Jalan	%	81
22	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	94
23	Persentase capaian rata-rata universal akses (sanitasi, air bersih dan kawasan kumuh / dalam persentase bukan luasan)	%	92,84
24	Persentase Kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan	%	100
25	Debit air yang tersedia	%	0,61
26	Persentase Layanan Perhubungan	%	56,77
27	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,67
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,66
29	Persentase Desa/Kelurahan tangguh Bencana	%	18,3
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	indeks	100
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025
3	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,5
4	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan	indeks	100
5	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	94,74
6	Persentase fasilitas kefarmasian dan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	81
7	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	38,03
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
8	Persentase Rekomtek Izin Mendirikan Bangunan/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	%	0,298
9	Persentase bangunan publik dalam kondisi baik (%)	%	20,09
10	Pertumbuhan tingkat kemantapan jalan	%	3,5
11	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang	%	91
12	Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	49,86
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
13	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	%	85,96
14	Indeks pencapaian SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman	indeks	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
15	Indeks Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas	indeks	100
16	Persentase penegakkan perda dan perkada di Kabupaten Cilacap (%)	%	33
17	Tingkat response time penanganan kebakaran	%	95
18	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
19	Response time Penanganan Bencana	menit	15
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
20	Persentase penurunan jumlah PPKS	%	13,99
21	Persentase PPKS yang tertangani	%	59,19
22	Persentase PSKS yang terakreditasi	%	58,11
23	Indeks Pencapaian SPM Sosial	indeks	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,84 - 7,82
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,78
27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,09
28	Kategori KLA	kategori	Nindya
29	Persentase Kecamatan yang mampu memenuhi hak Anak	%	33,33
30	Persentase Pemenuhan indikator data gender dan anak dalam Siga	%	96
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
31	Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	89,3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025
32	Konsumsi energi per kapita per hari	Kkal/kapita/hari	2096
33	Konsumsi protein per kapita per hari	Gram/kapita/hari	57,4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
34	Persentase Penanganan Sengketa Tanah yang dilakukan melalui Mediasi	%	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
35	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,66
36	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100
37	Persentase Pengelolaan Sampah	%	83,35
38	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	12,96
39	Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air pendukung IKLH yang Memenuhi Baku Mutu	%	41,83
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
40	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	40,95
41	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	68
42	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	51
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
43	Nilai IDM	Rata-rata	0,7455
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
44	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,89
45	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,04
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
46	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ	%	63,54
47	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	%	50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
48	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Poin	81
49	Indeks Tata Kelola SPBE	Nilai	79
50	Indeks Manajemen SPBE	%	75
51	Persentase Layanan SPBE	%	73
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
52	Pertumbuhan sub sektor Koperasi dan Perdagangan Besar dan Eceran	%	5,45
53	Persentase koperasi aktif	%	73,14
54	Persentase UMKM yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	46,07

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
55	Persentase realisasi Investasi	%	100
56	Jumlah Investor yang masuk di Kabupaten Cilacap	investor	39686
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
57	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100
58	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	75
59	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	21
60	Jumlah Prestasi olahraga	Cabor	16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
61	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan	%	40
62	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	29,5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
63	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,24
64	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,25
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
65	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK	%	11,32
66	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71,64
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
67	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton/tahun	59081,41
68	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	42974,77
69	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	16106,64
70	Angka konsumsi ikan	kg/kapita	30,448
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
71	PAD Sektor Pariwisata	Rp	500.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
72	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun (padi)	Kw/ha	64,69
73	Produksi Tanaman padi	Ton	839793
74	Produktivitas cabai (cabai rawit)	Kw/ha	80
75	Produksi Tanaman cabai (aneka cabai)	Ton	9686
76	Populasi ternak (Sapi, Kambing, dan Domba)	ekor	224659
77	Produksi daging	Ton	8749,2
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
78	Persentase pertumbuhan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	16,6

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
79	Pertumbuhan /kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	7,4
80	Pertumbuhan IKM	%	9,5
	SEKRETARIAT DAERAH		
81	Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda	indeks	42 (tinggi)
82	Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100
83	Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan	%	100
	SEKRETARIAT DPRD		
84	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	Persen	100
	PERENCANAAN		
85	Tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah	%	75,44
86	Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan	%	100
	KEUANGAN		
87	Persentase ketercapaian target pendapatan	%	100
88	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	27,19
89	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD nya baik	%	100
90	Persentase Ketepatan Pelaporan BMD	%	100
	KEPEGAWAIAN		
91	Indeks Sistem Merit	Nilai	319
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
92	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	56
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
93	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan	%	23,35
94	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	71,82
	INSPEKTORAT DAERAH		
95	Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249
96	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3	%	80
	KECAMATAN		
97	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1
98	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100
99	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100
100	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
101	Jumlah Kasus konflik sosial	Kasus	0

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025
102	Persentase Cakupan kecamatan yang dibina dalam keamanan wilayah	%	100

6.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan. Di bawah ini Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap yang meliputi urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 6. 4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	URUSAN/BIDANG/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
a	Pendidikan		
1	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100
2	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100
3	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100
4	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100
b	Kesehatan		
5	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100
6	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
7	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
8	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
9	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
10	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
11	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100

No	URUSAN/BIDANG/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025
12	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
13	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
14	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
15	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
16	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
17	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
18	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100
19	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100
20	Tingkat Kemantapan Jalan	%	81
21	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	41,43
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
22	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
23	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
e	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
24	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
25	Persentase penegakkan perda dan perkada di Kabupaten Cilacap (%)	%	33
26	Tingkat response time penanganan kebakaran	%	95
27	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
28	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	%	100
29	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
30	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100
31	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
32	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
f	Sosial		

No	URUSAN/BIDANG/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025
33	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
34	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
a	Tenaga Kerja		
35	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-
36	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	32
37	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	%	48
38	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40
b	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
39	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/ 100.000 pddk	0,00006
40	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,000205
c	Pangan		
41	Persentase ketersediaan pangan	%	179
42	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	100
d	Pertanahan		
43	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100
e	Lingkungan Hidup		
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,66
45	Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	39,68
f	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
46	Perekaman KTP elektronik	%	99,49
47	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,35
48	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	28,3
49	Kepemilikan akta kelahiran	%	89,61
g	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
50	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,67
51	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	100
h	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
52	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,04
53	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,09
54	Persentase Un Meed Need	%	12,04
i	Perhubungan		
55	Vc Rasio	Indeks	0,30-0,40

No	URUSAN/BIDANG/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025
j	Komunikasi dan Informatika		
56	Persentase Layanan SPBE	%	73
57	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	73
58	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	75
k	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
59	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	37,28
60	Persentase UMKM yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	46,07
61	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	72
62	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	%	59,41
63	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	12,23
l	Penanaman Modal		
m	Kepemudaan dan Olahraga		
64	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100
65	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mandiri	%	75
66	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	10
n	Statistik		
67	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
o	Persandian		
68	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	1,02
p	Kebudayaan		
69	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	29,5
q	Perpustakaan		
70	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,24
71	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,25
r	Kearsipan		
72	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71,64
73	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	75,34
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
a	Kelautan dan Perikanan		

No	URUSAN/BIDANG/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025
74	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton/tahun	59081,41
b	Pariwisata		
75	Persentase kontribusi pariwisata dalam PAD	%	0,05
76	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	10
c	Pertanian		
77	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun (padi)	Kw/ha	64,69
78	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	24,9
d	Perdagangan		
79	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	54
80	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	25,26
e	Perindustrian		
81	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	2,64
82	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
a	Sekretariat Daerah		
b	Sekretariat DPRD		
V	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
a	Perencanaan		
b	Keuangan		
83	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	%	64,05
84	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-0,087
85	Manajemen Aset	(Ya/Tidak)	Ya
86	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	0,053
c	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
87	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,27
d	Penelitian dan Pengembangan		
VI	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
a	Pengawasan		
88	Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249
VII	UNSUR KEWILAYAHAN		
a	Kecamatan		
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
a	Kesbangpol		

BAB VII

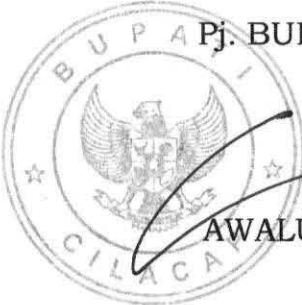
PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, dengan arah kebijakan untuk **“Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Daya Saing SDM”**. Sedangkan prioritas pembangunan tahun 2025 difokuskan pada upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, disusun berdasarkan prinsip *money follow programs priority*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan yang berpedoman pada RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026, serta disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar dapat berjalan dengan baik. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang sah.

RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 digunakan sebagai landasan, pedoman dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD juga sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan lintas urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggungjawab perangkat daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, komitmen, konsistensi, dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 sangat diharapkan guna mendukung tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

 Pj. BUPATI CILACAP,

AWALUDDIN MUURI